



BAPPERIDA
KOTA BOGOR



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR



2025



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025, perencanaan pembangunan tahunan Kota Bogor harus mengacu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
- c. bahwa untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);



22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.



4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD merupakan:
 - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan



- b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP Tahun 2025 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2025.
- (3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kepala Bapperida melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2025

Pasal 4

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;



- b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

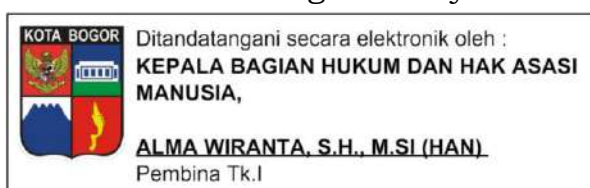
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	9
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	15
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	16
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA BOGOR TAHUN 2025	17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	21
2.1 KONDISI UMUM DAERAH	21
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	21
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	44
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	68
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	116
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	120
2.2.1 Capaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU)	120
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2023	129
2.2.3 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>).....	131
2.2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	214
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	223
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	223
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	233
2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	236
2.3.4 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pilihan	241
2.3.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Fungsi Penunjang.....	242
2.3.6 Urusan Fungsi Penunjang Lainnya.....	244

2.3.7	Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis	244
-------	--	-----

3 **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025246**

3.1	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	246
3.1.1	KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BOGOR.....	247
3.1.2	TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025.....	267
3.1.3	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI	283
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	291
3.2.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	294
3.2.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025	328
3.2.3	ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025.....	339
3.2.4	ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.....	345
3.2.5	ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025	356
3.2.6	ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.....	358
3.2.7	APBN (DANA TRANSFER DAN BELANJA DIPA K/L DI DAERAH)	358
3.2.8	DANA UMAT	359
3.2.9	PERAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	359
3.2.10	KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) ATAU PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)	369
3.2.11	HIBAH	370
3.2.12	PENDANAAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK	370

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH372

4.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	373
4.1.1	Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya	373
4.1.2	Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	376
4.1.3	Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor	379
4.1.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor	380
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 .	409
4.2.1	Isu strategis dan Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025..	409
4.2.2	Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan .	410
4.2.3	Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKPD dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	413
4.2.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025.....	439
4.2.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025.....	453

4.2.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2025.....	454
4.3 Program Prioritas Daerah Kota Bogor Tahun 2025	474
4.3.1 Penjabaran Prioritas Pembangunan ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	478
4.3.2 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2025	525
4.3.3 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam Tahun 2025.....	530
4.3.4 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan arah kebijakan pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	548
4.3.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	557
4.3.6 Arah Kebijakan Pendekatan Spasial	569
4.4 Inovasi Daerah.....	602
4.5 Kerjasama Daerah	611
4.6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	618
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	619
5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	619
5.2 REKAPITULASI RKPD DAN RENJA TAHUN 2025 PER SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH, PER URUSAN PEMERINTAHAN DAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	622
5.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBN.....	655
5.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT	655
5.5 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA BOGOR.....	686
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	693
6.1 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR TAHUN 2025.....	694
6.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	695
6.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	697
BAB VII PENUTUP	728
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025 4

Gambar 1.2 Tahapan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025..... 6

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah... 16

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Bogor 23

Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Bogor..... 25

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Lahan Kota Bogor..... 26

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kota Bogor 28

Gambar 2.5 Peta Geologi Kota Bogor..... 29

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2023 33

Gambar 2.7 Peta Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kota Bogor 35

Gambar 2.8 Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2023 36

Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor 40

Gambar 3.1 Kolaborasi Pendanaan Pembangunan..... 294

Gambar 3.2 Persentase Program RPJMD yang Terkait Dengan Kegiatan
CSR/TJSLP Tahun 2023 362

Gambar 4.1 Fokus Penekanan Tema RKP Tahun 2025 375

Gambar 4.2 Target Makro.Provinsi Jabar 2025-2029..... 376

Gambar 4.3 Peta Rencana Struktur Ruang..... 583

Gambar 4.4 Peta Rencana Pola Ruang 584

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, RT dan RW Menurut Kecamatan	22
Tabel 2.2 Luas Kota Bogor Menurut Kelas Lereng	24
Tabel 2.3 Luas Kota Bogor Menurut Ketinggian	24
Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kota Bogor	27
Tabel 2.5 Jenis Batuan di Kota Bogor	27
Tabel 2.6 Luas Sebaran Jenis Penggunaan Lahan di Kota Bogor Tahun 2023 ..	32
Tabel 2.7 Kawasan Rawan Bencana	34
Tabel 2.8 Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor	38
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023	41
Tabel 2.10 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bogor Tahun 2023	43
Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (juta rupiah) Tahun 2019–2023	44
Tabel 2.12 PDRB ADHK Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2023 (miliar Rupiah)	46
Tabel 2.13 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023 (miliar Rupiah)	47
Tabel 2.14 PDRB ADHB Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2023 (miliar Rupiah)	48
Tabel 2.15 Kondisi Kemiskinan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional	55
Tabel 2.16 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023	58
Tabel 2.17 Perkembangan Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2023	61
Tabel 2.18 Angka Melek Huruf di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2023	62
Tabel 2.19 Jumlah Balita yang Diukur dan Terindikasi Gizi Buruk di Kota Bogor Tahun 2019–2023	64
Tabel 2.20 Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2023	64
Tabel 2.21 Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2019 - 2023	65
Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bogor	68
Tabel 2.23 Perkembangan Sarana Prasarana dan Sumber daya Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023	69
Tabel 2.24 Rasio Peserta Didik per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023	70
Tabel 2.25 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Bogor Tahun 2019–2023	71
Tabel 2.26 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Bogor Tahun 2019–2023	74
Tabel 2.27 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Bogor Tahun 2019–2023	75

Tabel 2.28 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	75
Tabel 2.29 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bogor.....	76
Tabel 2.30 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang di Kota Bogor.....	77
Tabel 2.31 Indikator Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2019 – 2023	79
Tabel 2.32 Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bogor.....	79
Tabel 2.33 Indikator Sosial di Kota Bogor Tahun 2019-2023	81
Tabel 2.34 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bogor.....	82
Tabel 2.35 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.....	83
Tabel 2.36 Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2019 – 2023.....	85
Tabel 2.37 Indikator Urusan Pertanahan di Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	87
Tabel 2.38 Perkembangan IKLH, IKA dan IKU di Kota Bogor.....	89
Tabel 2.39 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023	90
Tabel 2.40 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023	91
Tabel 2.41 Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor Tahun 2019 – 2023	92
Tabel 2.42 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2019 - 2023.....	93
Tabel 2.43 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bogor.....	94
Tabel 2.44 Perkembangan Rasio Izin Trayek	96
Tabel 2.45 Perkembangan Jumlah Uji KIR.....	96
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023.....	97
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Bogor Tahun 2019- 2023.....	98
Tabel 2.48 Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	99
Tabel 2.49 Indikator Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bogor	99
Tabel 2.50 Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023..	100
Tabel 2.51 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Bogor..	101
Tabel 2.52 Perkembangan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	102
Tabel 2.53 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Bogor.....	103
Tabel 2.54 Perkembangan Kunjungan Wisata di Kota Bogor	104
Tabel 2.55 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	105
Tabel 2.56 Indikator Urusan Pertanian di Kota Bogor Tahun 2019 – 2023.....	106
Tabel 2.57 Kontribusi dan Laju Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kota Bogor.....	107
Tabel 2.58 Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB.....	108
Tabel 2.59 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	109
Tabel 2.60 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.....	110

Tabel 2.61 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.....	111
Tabel 2.62 Indikator Urusan Keuangan Kota Bogor Tahun 2019 – 2023.....	111
Tabel 2.63 Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2019 – 2023	112
Tabel 2.64 Indikator Urusan Pengawasan Kota Bogor Tahun 2019 - 2023.....	113
Tabel 2.65 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2019 - 2023.....	114
Tabel 2.66 Perkembangan Nilai SAKIP di Kota Bogor	115
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	116
Tabel 2.68 Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2019-2023	118
Tabel 2.69 Data Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2019-2023	119
Tabel 2.70 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2023 .	120
Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024.....	123
Tabel 2.72 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023	130
Tabel 2.73 Capaian Indikator Keberhasilan Kunci RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024.....	132
Tabel 2.74 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023	214
Tabel 2.75 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023	215
Tabel 2.76 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023	216
Tabel 2.77 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023	217
Tabel 2.78 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	218
Tabel 2.79 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	218
Tabel 2.80 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	219
Tabel 2.81 Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023.....	220
Tabel 2.82 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023.....	220
Tabel 2.83 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023	221
Tabel 2.84 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Sosial Tahun 2023	222
Tabel 2.85 Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	223
Tabel 2.86 Identifikasi isu strategis.....	244
Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp), 2019 -2023 .	249
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019–2023	250
Tabel 3.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019–2023.....	251
Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta) Kota Bogor Tahun 2019 – 2023	252
Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar) Kota Bogor Tahun 2019 – 2023	253
Tabel 3.6 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Kota Bogor Tahun 2019 – 2023.....	254
Tabel 3.7 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah) Kota Bogor Tahun 2021-2023.....	257

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025	278
Tabel 3.9 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)	279
Tabel 3.10 Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2024-2025	280
Tabel 3.11 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025.	281
Tabel 3.12 Target Indikator Makro Ekonomi	283
Tabel 3.13 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor.....	287
Tabel 3.14 Target Indikator Makro Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor Tahun 2025.....	291
Tabel 3.15 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..	297
Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	302
Tabel 3.17 Analisa Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Bogor.....	306
Tabel 3.18 Total Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023	308
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2019-2023	310
Tabel 3.20 Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2023	313
Tabel 3.21 Realisasi Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2023	316
Tabel 3.22 Alokasi Anggaran Per Urusan Kota Bogor Tahun 2019-2023	318
Tabel 3.23 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	319
Tabel 3.24 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	321
Tabel 3.25 Kondisi Neraca Daerah Tahun 2019-2023	322
Tabel 3.26 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	326
Tabel 3.27 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2023..	327
Tabel 3.28 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023	328
Tabel 3.29 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025	329
Tabel 3.30 Rencana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2025	331
Tabel 3.31 Rencana Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2025	332
Tabel 3.32 Proyeksi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025.....	332
Tabel 3.33 Rencana Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2025.....	334
Tabel 3.34 Rencana Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2025	334
Tabel 3.35 Rencana Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2025	335
Tabel 3.36 Rencana Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2025.....	335
Tabel 3.37 Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2021-2025.....	336
Tabel 3.38 Rencana Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2025.....	337
Tabel 3.39 Struktur Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025	338
Tabel 3.40 Keterkaitan Kegiatan CSR/TJSLP Tahun 2023 dengan Program dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024.....	363
Tabel 4.1 Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Nasional Tahun 2025	376
Tabel 4.2 Target Indikator Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.....	378
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kota Bogor Tahun 2025	381
Tabel 4.4 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025	411
Tabel 4.5 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Perangkat Daerah.....	414

Tabel 4.6	Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025	439
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026.....	442
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	453
Tabel 4.9	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Provinsi Jawa Barat dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025	456
Tabel 4.10	Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	471
Tabel 4.11	Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 kedalam program prioritas dan Program Pembangunan Daerah	474
Tabel 4.12	Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1.....	479
Tabel 4.13	Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada prioritas Pembangunan 2.....	493
Tabel 4.14	Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 3.....	501
Tabel 4.15	Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 4.....	506
Tabel 4.16	Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional	525
Tabel 4.17	Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	531
Tabel 4.18	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	548
Tabel 4.19	Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2025-2026.....	558
Tabel 4.20	Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan	585
Tabel 4.21	Indikasi Program Transportasi.....	587
Tabel 4.22	Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota	595
Tabel 4.23	Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan	603
Tabel 4.24	Kerjasama yang telah dilaksanakan	612
Tabel 5.1	RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA (RENJA OPD) BOGOR TAHUN 2025	622
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025.....	622
Tabel 5.3	Proporsi Pagu RKPD Per Urusan Pemerintahan	623
Tabel 5.4	Bidang Urusan dan Program Tahun 2025	624
Tabel 5.5	Proporsi Anggaran Bidang Urusan Tahun 2025.....	633
Tabel 5.6	Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	635
Tabel 5.7	Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi.....	640
Tabel 5.8	Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor	648
Tabel 5.9	Proporsi Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	654

Tabel 5.10 Rencana Usulan Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus Fisik APBN Tahun 2025 655

Tabel 5.11 Rencana Usulan Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 656

Tabel 5.12 Pagu RKPD Kegiatan Unggulan..... 658

Tabel 5.13 Rencana Pendanaan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 662

Tabel 5.14 Rencana Pendanaan Tematik Stunting Tahun 2025 676

Tabel 5.15 Rencana Pendanaan Pelaksanaan SPM Tahun 2025 678

Tabel 5.16 REKAP PERMASALAHAN USULAN POKIR TAHUN 2025 KOTA BOGOR..... 686

Tabel 5.17 Hasil Identifikasi Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor (Terlampir)..... 692

Tabel 6.1 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2020-2025 694

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor 695

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor 697

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Distribusi Penggunaan Lahan Tahun 2023 (%)	31
Grafik 2.2 Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2023.....	42
Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	43
Grafik 2.4 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2023.....	49
Grafik 2.5 Perkembangan PDRB ADHB Berdasarkan Komponen Pengeluaran (miliar rupiah)	50
Grafik 2.6 Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor (persen)	51
Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	52
Grafik 2.8 Perkembangan IHK dan Inflasi Gabungan Tujuh Kota Di Jawa Barat Menurut Bulan, 2023	53
Grafik 2.9 Perkembangan Rasio Gini di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	54
Grafik 2.10 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	56
Grafik 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2019-2023	60
Grafik 2.12 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	63
Grafik 2.13 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor.....	66
Grafik 2.14 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kota Bogor.....	72
Grafik 2.15 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor.....	73
Grafik 2.16 Persentase Jumlah Fakir Miskin dan PMKS yang Direhab dan Berdaya	82
Grafik 2.17 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023.....	117
Grafik 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023	248
Grafik 3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHB dan ADHK Kota Bogor Tahun 2019-2023	255
Grafik 3.3 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	255
Grafik 3.4 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Bogor Tahun 2021-2023.....	257
Grafik 3.5 Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2018 – 2022	258
Grafik 3.6 Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2023..	259
Grafik 3.7 Persentase indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2019 – 2022	259
Grafik 3.8 Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2019 - 2023.....	260
Grafik 3.9 IHK dan Tingkat Inflasi <i>Month to Month</i> (mtm), <i>Year to Date</i> (ytd), dan <i>Year on Year</i> (yoy) Kota Bogor Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran	262
Grafik 3.10 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2019-2023	263
Grafik 3.11 Perkembangan Tingkat Inflasi Bulanan Kota Bogor Tahun 2023..	264

Grafik 3.12 TPAK Kota Bogor Tahun 2018-2022	265
Grafik 3.13 TPT Kota Bogor Tahun 2019-2023	266
Grafik 3.14 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)	268
Grafik 3.15 Baltic Dry Index (BDI) dan Purchasing Managers Index Global.....	269
Grafik 3.16 Harga Komoditas Internasional	270
Grafik 3.17 Inflasi Bererapa Negara dan Suku bunga Beberapa Bank Sentral	270
Grafik 3.18 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	295
Grafik 3.19 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023	296
Grafik 3.20 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Komponen Tahun 2019-2023	298
Grafik 3.21 Pendapatan Transfer Pemerintah pusat Tahun 2019-2023	303
Grafik 3.22 Komposisi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2023	304
Grafik 3.23 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	305
Grafik 3.24 Kemandirian Fiskal Kota Bogor Tahun 2019-2023	305
Grafik 3.25 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	307
Grafik 3.26 Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi Tahun 2019-2023	311
Grafik 3.27 Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2019-2023	311
Grafik 3.28 Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023	314
Grafik 3.29 Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2023	314
Grafik 3.30 Total Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2019-2022	315
Grafik 3.31 Realisasi Belanja Transfer Terhadap Anggaran Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	316
Grafik 3.32 Realisasi TJSLP Tahun 2016-2023	362

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR**NOMOR : 19 TAHUN 2024****TANGGAL : 3 JULI 2024****TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BOGOR TAHUN 2025****BAB I
PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 mengamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Dokumen RPD ini akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. RPD dan Renstra PD Kabupaten/Kota tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan perkada.

RPJMD 2019-2024 Kota Bogor disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-

2024 yang telah diundangkan pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, berakhir pada tahun 2024, sehingga Pemerintah Kota Bogor menyusun RPD Kota Bogor tahun 2025-2026.

RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mempunyai Tema Pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah **“Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”**, yang dijabarkan ke dalam tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. Sebagai penjabaran RPD Kota Bogor 2025-2026, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bogor wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025.

RKPD Kota Bogor Tahun 2025 merupakan RKPD tahun ke 1 (satu) dari periode RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Selain berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, penyusunan Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Strategis RPD Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung tema **Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas** sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 didasari oleh permasalahan dan tantangan terkait sektor

Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pengangguran, Infrastruktur dan implementasi Reformasi Birokrasi. Dari beberapa permasalahan tersebut maka ditetapkanlah **isu strategis** Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 yaitu Pembangunan Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Akuntabilitas, pelayanan publik, dan Inovasi sebagai langkah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada periode berkenaan yaitu periode kelima, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Rancangan RKP Tahun 2025 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
3. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, DPRD Kota Bogor memberikan masukan dan saran berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor No. 6 tentang RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Gambar 1.1

Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



Sumber: Bappeda Kota Bogor, 2024

Proses Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Top-down, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2025, serta Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan tergambar dalam proses pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Bogor yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2024 dengan menghadirkan Narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bappeda Jabar) serta hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional;
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang mengakomodir usulan/kebutuhan masyarakat yang telah disepakati bersama melalui pelaksanaan Musrenbang di 68 (enam puluh delapan) Kelurahan yang dilaksanakan mulai dari bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, dimana usulan/kebutuhan masyarakat tersebut kemudian dipilah menurut prioritas dan urgensi di Tingkat Kecamatan, disepakati melalui Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada Bulan Januari-Februari Tahun 2024 di 6 (enam) Kecamatan dan untuk usulan/kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas teknis dan

aparatur wilayah dibahas dan disepakati melalui sidang kelompok dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, LPM, Kecamatan serta unsur DPRD melalui pelaksanaan Pra Musrenbang Tingkat Kota pada Bulan Maret 2024 dan difinalkan saat Musrenbang Tingkat Kota.

3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui penelaahan terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sudah dipaduserasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat bottom-up, top-down, partisipatif dan politis melalui Forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang kemudian disebut sebagai Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2025, dilaksanakan pada Bulan Maret 2024.
4. Politis, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD, ditunjukkan dengan diakomodirnya pemenuhan janji politis Kepala Daerah serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang teridentifikasi berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Proses ini dilaksanakan secara simultan pada Bulan Januari - Februari Tahun 2024;
5. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, hal ini ditunjukkan dengan diakomodirnya saran, masukan dan pendapat dari pemangku kepentingan seperti Akademisi, Badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas dan Media bersatu padu berkolaborasi serta berkomitmen untuk membangun Kota Bogor ke arah yang lebih baik dilaksanakan melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 pada Bulan Februari 2024.

Berikut disampaikan *timeline* pelaksanaan proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025:

Gambar 1.2
Tahapan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025



Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2024

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada:
 - Penelaahan terhadap target-target yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025, RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
 - Penelaahan terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui Forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan memperhatikan saran dan masukan dari Akademisi dan Praktisi Pembangunan sebagaimana disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- Penyusunan Rancangan RKPD merupakan hasil dari tahapan proses perencanaan yang bersifat Bottom-up, Top-down,

Teknokratik, Politis dan Partisipatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Musrenbang Tingkat Kelurahan (dilaksanakan mulai tanggal 03 November sampai dengan 30 Desember 2023);
 - b. Musrenbang Tingkat Kecamatan (dilaksanakan pada tanggal 05 Januari sampai dengan 30 Februari 2024);
 - c. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 08 Maret 2024;
 - d. Konsultasi Publik dengan pemangku kepentingan (dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024);
 - e. Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2024);
 - f. Pra Musrenbang, berupa sidang kelompok berdasarkan kelompok urusan Sosial Budaya, Pemerintahan, Fisik, serta Ekonomi (dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2024). Dalam sidang kelompok sebagaimana dimaksud, Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun oleh Perangkat Daerah melalui pendekatan teknokratik sudah dipaduserasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat bottom up yaitu usulan kegiatan masyarakat dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, usulan kegiatan yang bersifat top down kebijakan pemerintah pusat/provinsi, dan usulan kegiatan yang bersifat politis baik itu aspirasi pokok pokok pikiran DPRD maupun janji-janji politis Kepala Daerah serta partisipatif berupa saran dan masukan dari pemangku kepentingan seperti Akademisi, Badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas dan Media;
 - g. Hasil Sidang Kelompok dalam Pra Musrenbang menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.
 - h. Musrenbang Tingkat Kota (dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024).
3. Rancangan Akhir RKPD Kota Bogor Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan pada Rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 yang telah disampaikan pada saat Musrenbang Tingkat Kota, hasil

- Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional serta verifikasi dan validasi akhir untuk Program dan Kegiatan Prioritas;
4. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah sejak tanggal 10 Juni 2024 serta difasilitasi oleh Gubernur melalui Bappeda Jabar pada tanggal 25 Juni 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Bogor tentang RKPD Kota Bogor Tahun 2025;
 5. Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2025;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);

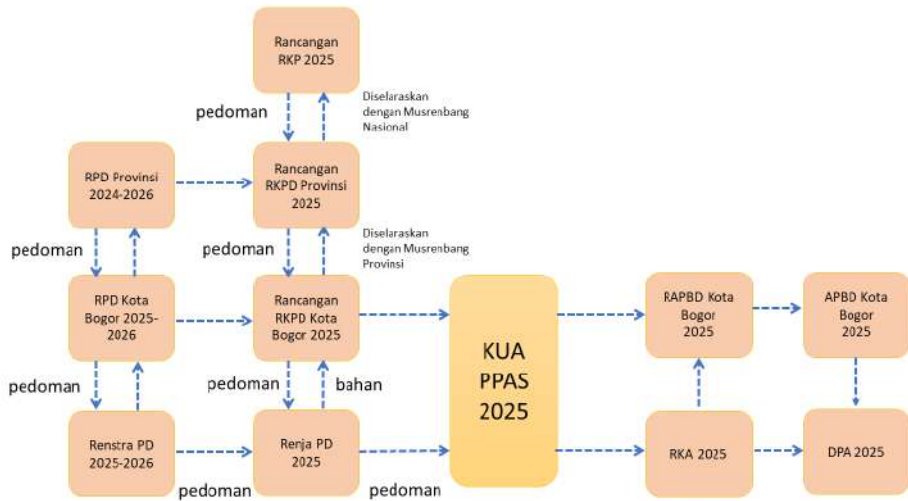
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2024);
49. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6)

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang sinergis dengan Rancangan RKP Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta guna menjaga sinergitas, harmonisasi dan memastikan keselarasan, keterkaitan serta konsistensi tersebut dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. RKPD Kota Bogor Tahun 2025 menjadi acuan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, yang selanjutnya akan dituangkan secara detail di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025, seperti digambarkan berikut ini:

Gambar 1.3

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2024

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai acuan/pedoman Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana telah dituangkan dalam target Tahunan Pencapaian Kinerja Utama Pembangunan Kota Bogor sebagaimana telah dituangkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dan Dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas serta pemangku kepentingan lainnya;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
7. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
8. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025; dan
9. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA BOGOR TAHUN 2025

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 yang berisi pengertian ringkas RKPD, proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD Tahun Rencana dalam periode Dokumen RPJMD, Keterkaitan antara Dokumen RKPD dan Dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RKP, dan RKPD Propinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 berkaitan dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis Kota Bogor, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas infrastruktur, fokus iklim investasi dan fokus sumber daya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menelaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

Telaahan Hasil Evaluasi mencakup :

- 2.2.1 Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- 2.2.2 Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun ke-n;
- 2.2.3 Realisasi Program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- 2.2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan yang direncanakan;
- 2.2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah;
- 2.2.6 Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab itu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Merumuskan secara umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan atau tugas fungsi perangkat daerah. Identifikasi Permasalahan pembangunan daerah tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu:

- 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- 2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2025, Arah Kebijakan Ekonomi yang tertuang dalam Rancangan Awal

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan Arah Kebijakan di bidang Ekonomi dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Arah Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan yang akan dirumuskan oleh Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan/Sasaran Pembangunan yang telah tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yang dikaitkan dengan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun berdasarkan Target Kinerja RPD Tahun 2025-2026 dan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun Rencana.

BAB VII. PENUTUP

Menjelaskan pedoman pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kota Bogor yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kota/kecamatan/desa.

Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kota Bogor dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 111,3858 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 30,50 km², sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 8,37 km².

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, RT dan RW Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase	Kelurahan	Jumlah RT/RW	
					RT	RW
1	Bogor Selatan	30,5021	27,38%	16	764	190
2	Bogor Timur	10,464	9,39%	6	357	67
3	Bogor Utara	18,1374	16,28%	8	558	109
4	Bogor Tengah	8,3667	7,51%	11	433	99
5	Bogor Barat	23,3155	20,93%	16	853	197
6	Tanah Sareal	20,6001	18,49%	11	687	139
Total		111,3858	100%	68	3642	801

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka (2024)

Adapun batas- batas wilayah administratif Kota Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

A. Topografi

Secara topografi, Kota Bogor terletak pada dataran tinggi dengan Sebagian wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan. Sebagaian besar wilayah Kota Bogor Sebagian termasuk kelas lereng datar-landai dengan kelerengan 2 - 5 %, yaitu mencapai luas 6.871,14 Ha (61,69%) dan tersebar di 6 (enam) kecamatan. Sementara luas wilayah paling kecil adalah kelas lereng curam (15-40%) yaitu seluas 127,06 Ha (1,14%). Pada Tabel berikut ini ditunjukkan luas Kota Bogor menurut kelas lereng.

Tabel 2.2
Luas Kota Bogor Menurut Kelas Lereng

No	Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 - 2 %	4.140,22	37,17
2	2 - 5 %	6.871,14	61,69
3	15 - 40 %	127,19	1,14
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor, Tahun 2011-2031

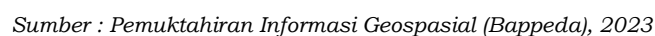
B. Ketinggian Lahan

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan ketinggian bervariasi antara 150 – 550 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan dominasi luas pada ketinggian 200 mdpl yaitu seluas 3.765,02 Ha (33,80%). Sedangkan ketinggian 550 Meter merupakan luasan terendah yaitu hanya 5,42 Ha (0,05%). Untuk lebih jelas terkait ketinggian wilayah di Kota Bogor sebagaimana disampaikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Luas Kota Bogor Menurut Ketinggian

No	Ketinggian (MDPL)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	150 mdpl	176,72	1,59
2	200 mdpl	3.765,02	33,80
3	250 mdpl	2.721,23	24,43
4	300 mdpl	1.405,64	12,62
5	350 mdpl	1.215,40	10,91
6	400 mdpl	761,85	6,84
7	450 mdpl	890,17	7,99
8	500 mdpl	197,11	1,77
9	550 mdpl	5,42	0,05
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor, Tahun 2011-2031



Jenis Tanah di Kota Bogor terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu jenis tanah andosol vitrik, latosol umbrik, dan regosol eutrik. Sebagian besar Kota

Bogor didominasi oleh jenis tanah latosol umbrik dengan luas 10.661,77 Ha atau 95,72%. Tanah latosol umbrik menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki jenis tanah mineral, yang cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Sementara jenis tanah dengan luasan terendah yaitu regosol eutrik dengan luas 228,48 Ha atau 2,05%.

Tabel 2.4

Jenis Tanah di Kota Bogor

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Andosol Vitrik	248,31	2,23
2	Latosol Umbrik	10.661,77	95,72
3	Regosol Eutrik	228,48	2,05
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor, Tahun 2011-2031

D. Geologi

Secara Geologis Kota Bogor memiliki memiliki jenis batuan yang terbagi menjadi 6 (enam) klasifikasi yaitu Batuan gunung api pangrango, batuan gunung api salak, breaksi dan lava gunung kencana, formasi bojonmanik, formasi jatiluhur dan kipas aluvium. Jenis tanah terluas yaitu kipas aluvium dengan luas 5.821,54 Ha atau 52,26 %. Sementara jenis tanah yang memiliki luasan terendah yaitu formasi jatiluhur dengan luas 39,30 Ha atau 0,35%.

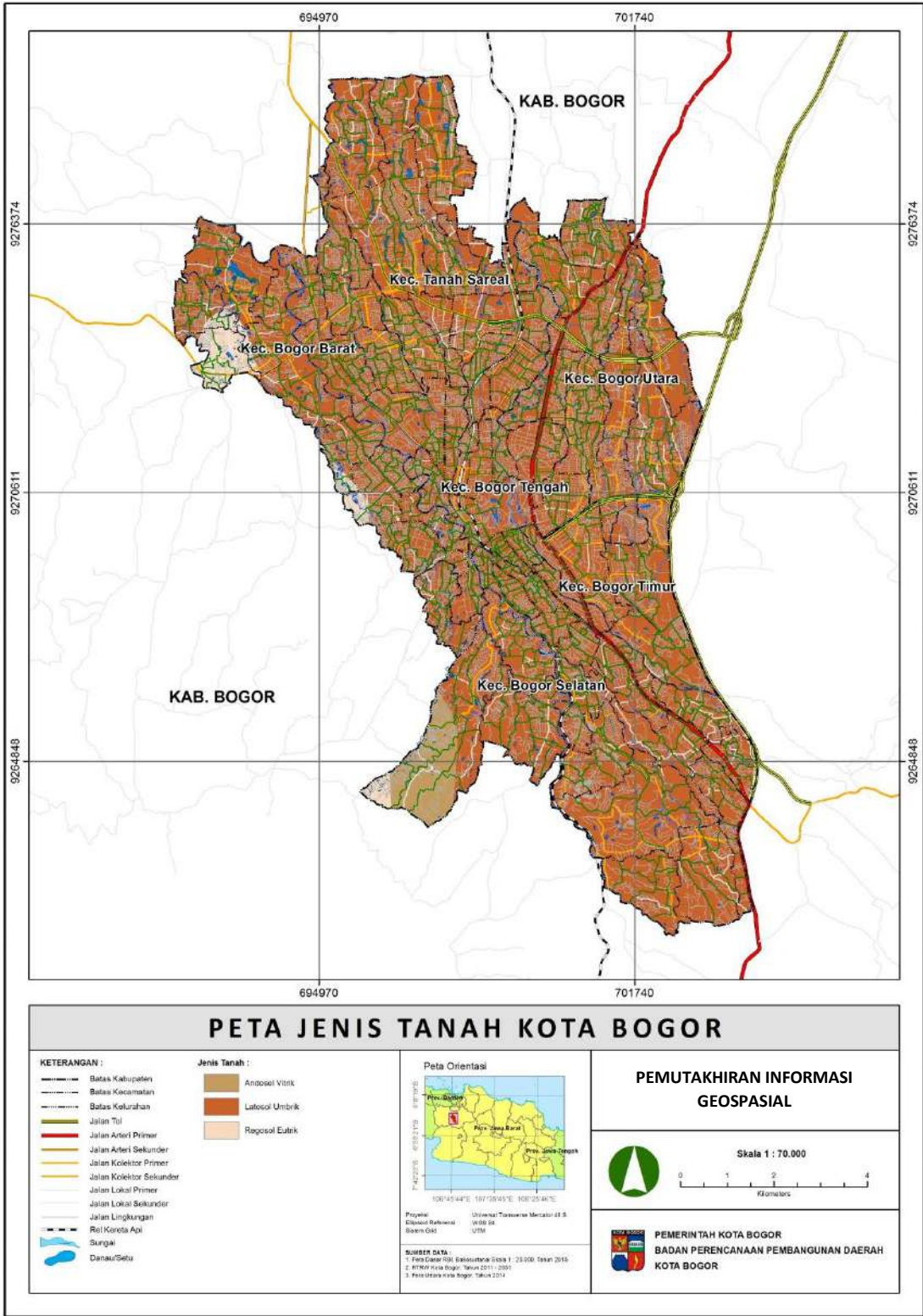
Tabel 2.5

Jenis Batuan di Kota Bogor

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.348,71	30,06
2	Batuan Gunung Api Salak	1.836,69	16,49
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	50,21	0,45
4	Formasi Bojongmanik	42,11	0,38
5	Formasi Jatiluhur	39,30	0,35
6	Kipas Aluvium	5.821,54	52,26
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor, Tahun 2011-2031

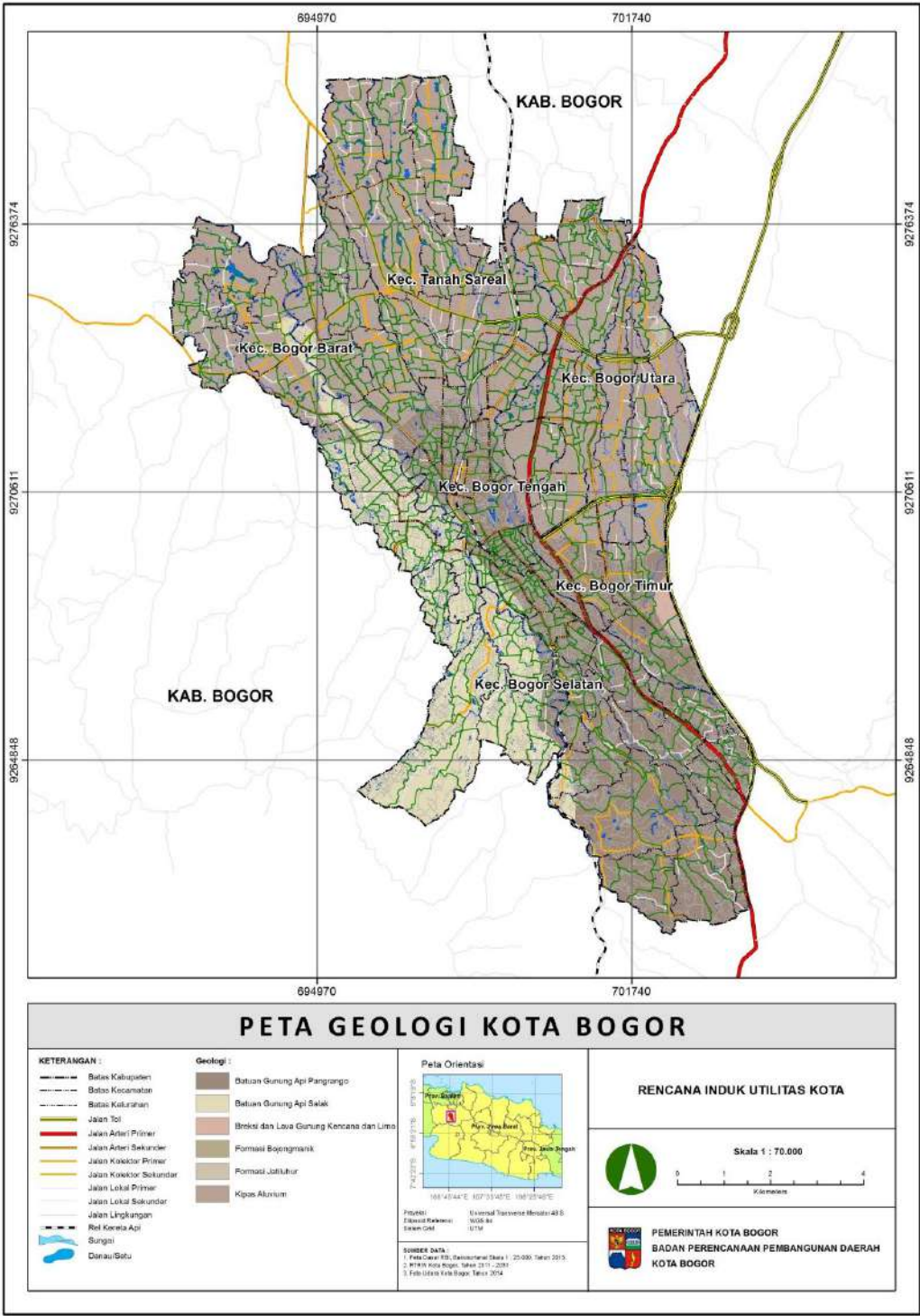
Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kota Bogor



Sumber : Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Gambar 2.5

Peta Geologi Kota Bogor



Sumber: Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

E. Klimatologi

Berdasarkan data BPS yang tertuang dalam Bogor Dalam Angka Tahun 2024, suhu Kota Bogor memiliki rata-rata tiap bulan berkisar antara 25,50°C – 27,70°C dengan suhu terendah 19,50 - 22,20°C dan suhu tertinggi 32,3°C - 36°C. Kelembaban udara rata-rata antara 72,20% - 86,30%. Kota Bogor dijuluki kota hujan karena banyaknya

hari hujan di setiap bulannya. Tahun 2023 rata rata jumlah hari hujan sebesar 18 hari per bulan. Curah hujan tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan November dan Desember masing-masing tercatat sebesar 1.068 mm/bulan dan 563,60 mm/bulan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan September dan Oktober tercatat sebesar 62,20 mm/bulan dan 102,10 mm/bulan.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan. Berdasarkan hasil uji kualitas udara yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2023 diperoleh Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Bogor sebesar 95,92 poin.

E. Hidrogeologi

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini lantaran lahan potensial kritis di Kecamatan Bogor Selatan dan di Kecamatan Bogor Barat menunjukkan semakin berkurangnya resapan air, karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor.

Beberapa danau, situ, dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi, dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang, Situ Anggalena dan Situ Leutik difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai panjang aliran sungai utama hampir 126 km dan Sungai Ciliwung mempunyai

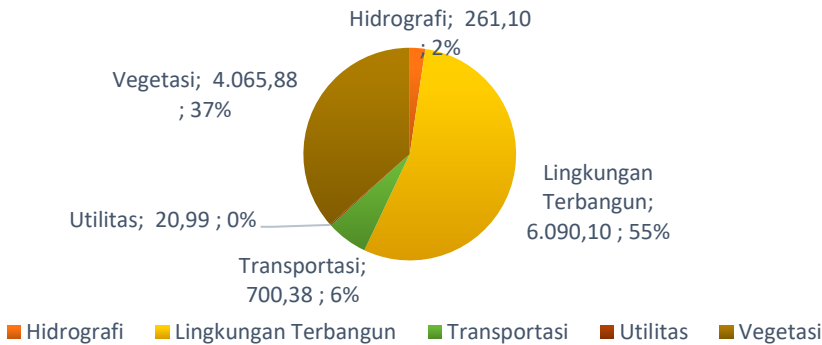
panjang aliran sungai utama sepanjang 120 km. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber air yang diproduksi PDAM Tirta Pakuan Bogor. Dengan kondisi debit air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Ciliwung sebesar 76.000 liter/detik dan Sungai Cisadane sebesar 24.000 liter/detik (*Review Masterplan Drainase TA 2018*).

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-colli di atas kriteria yang disyaratkan. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Kota Bogor pada tahun 2023 adalah 46,67%.

F. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan terbesar di Kota Bogor tahun 2023 berupa kategori lingkungan terbangun yang mencapai lebih dari setengah luas Kota Bogor, yaitu sekitar 55 persen. Sedangkan yang paling kecil berupa penggunaan untuk utilitas yaitu sekitar 0,19 persen. Untuk kategori vegetasi memiliki porsi sekitar 37% yang menjadi penyeimbang luasnya lingkungan terbangun. penggunaan lahan tahun 2023 dengan distribusi setiap kategori sebagaimana disampaikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.1
Distribusi Penggunaan Lahan Tahun 2023 (%)



Sumber : Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Penggunaan lahan Kota Bogor pada tahun 2023 bahwa penggunaan lahan kategori lingkungan terbangun khususnya unsur permukiman dan perumahan memiliki luasan paling besar yaitu masing-masing 3368.73 Ha (30,24%) dan 1218.09 Ha (10,94 %). Sedangkan unsur penggunaan lahan paling kecil luasnya berupa bendungan yaitu sekitar 0,22 Ha (0,002%). Luas masing-masing penggunaan lahan tahun 2023 disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Luas Sebaran Jenis Penggunaan Lahan di Kota Bogor Tahun 2023

SUB KATEGORI	UNSUR	LUAS (HA)	%
Tubuh Air Daratan	Bendungan	0,22	0,00
	Danau	7,31	0,07
	Kolam	60,78	0,55
	Sungai	190,58	1,71
	Waduk	2,21	0,02
Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	1,59	0,01
	Rumah Sakit	32,43	0,29
Kawasan Industri	Industri	161,20	1,45
Kawasan Perdagangan	Niaga	578,72	5,20
Pariwisata Dan Budaya	Arena Olahraga	60,96	0,55
	Daya Tarik Pariwisata	24,56	0,22
Pemakaman	Makam	195,08	1,75
Pemerintahan	Keamanan	100,92	0,91
	Pemerintahan	122,50	1,10
Pendidikan	Pendidikan	193,39	1,74
Peribadatan	Sarana Ibadah	31,92	0,29
Permukiman	Permukiman	3.368,73	30,24
	Perumahan	1.218,09	10,94
Transportasi Darat	Jalan	669,64	6,01
	Terminal Bus	5,87	0,05
Transportasi Perkeretaapian	Daerah KA	19,01	0,17
	Stasiun KA	5,86	0,05
Instalasi Dan Jaringan Air Bersih	Kantor Air Minum	8,99	0,08
Instalasi Dan Jaringan Listrik	Kantor PLN	9,89	0,09
Instalasi Dan Jaringan Pembuangan Limbah	Air Limbah	0,99	0,01
	Persampahan	0,34	0,00
Instalasi Dan Jaringan Pos, Penyiaran Atau Komunikasi	Kantor Telepon	0,78	0,01
Vegetasi Alami	Semak Belukar	415,91	3,73
Vegetasi Dibudidayakan	Ladang	1.108,86	9,96
	Sawah	191,22	1,72
	Tanaman Bangunan	369,31	3,32
	Tanaman Campur	1.980,58	17,78
Jumlah		11.138,45	100

Sumber: Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

batuan/tanah pelapukan, curah hujan, struktur geologi, stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan. Sedangkan banjir sering disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan. Secara rinci kawasan bencana Kota Bogor disajikan pada tabel di bawah ini.

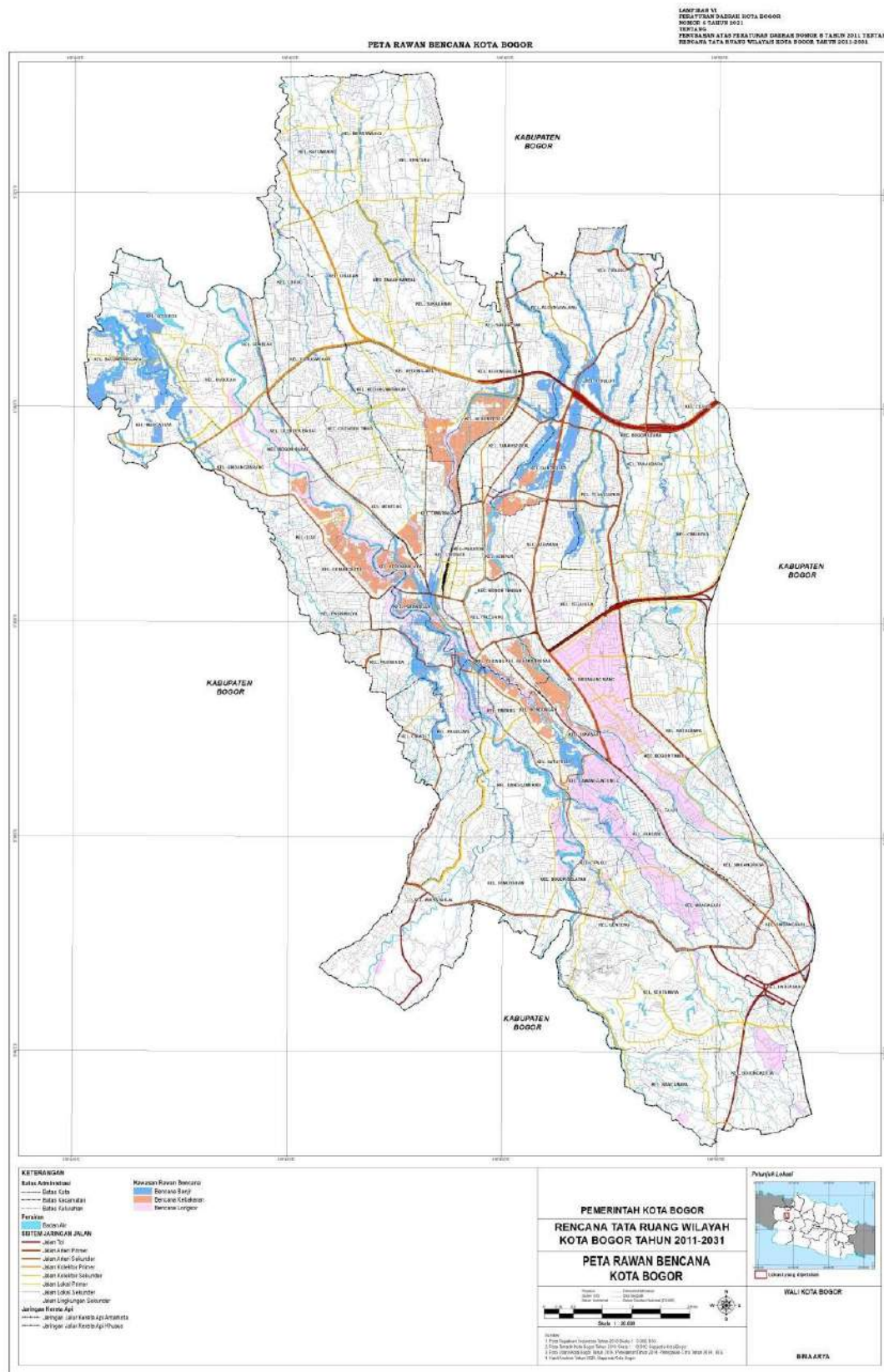
Tabel 2.7
Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi
1	Tanah Longsor	a. Sungai Cisadane; b. Sungai Ciomas; c. Saluran Cisadane Empang; d. Saluran Cidepit; e. Saluran Cibalok f. Sepanjang sungai Ciliwung; dan g. Lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan
2	Banjir	a. Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes; b. Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi; c. Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru; d. Kelurahan Kayumanis; e. Kelurahan Katulampa; f. Kelurahan Cibadak; dan g. Kelurahan Cibuluh
3	Kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Secara umum daerah rawan bencana di Kota Bogor dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Peta Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kota Bogor



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Pada tahun 2023, tercatat terdapat 1011 Kejadian bencana di Kota Bogor. Kejadian bencana terbanyak terjadi pada bulan November

Gambar 2.8
Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2023



2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

**RKPD
2025**

- a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);
- b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);
- c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanah Sareal);
- d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegal Gundil); dan
- e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).

Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. memperhatikan pertimbangan di atas maka pembagian wilayah pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
1	WP Samida (WP A)	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersial di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub-Pusat Kota (Pusat WP-A)	Seluruh Kota, WP	273.811	-
2	WP Pasima (WP B)	Daerah Bubulak - Sindang barang	Sub Pusat Kota (Pusat WP-B)	WP	186.424	Melayani penduduk perbatasan
3	WP Utara (WP C)	Daerah Yasmin – Pasar TU Kemang	Sub Pusat Kota (Pusat WP-C)	WP	456.499	-
4	WP Purwa (WP D)	Daerah warung Jambu-Jl. Adnawijaya	Sub Pusat Kota (Pusat WP-D)	WP	295.188	-
5	WP Daksina (WP E)	Daerah Tajur &sekitar rencana akses toll Ciawi-Sukabumi- Inner Ring Road	Sub Pusat Kota (Pusat WP-E)	WP	324.509	Melayani penduduk perbatasan

Sumber : Perda Kota Bogor No.6 Tahun 2021, Bappeda Kota Bogor

Arahan pengembangan setiap wilayah pelayanan adalah sebagai berikut:

1. PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota;

2. Sub PPK Pasima sebagai pusat WP Pasima diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan dan pengembangan TOD Bubulak;
3. Sub PPK Utara sebagai pusat WP Utara diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan kegiatan utama perdagangan jasa dan pasar induk;
4. Sub PPK Purwa sebagai pusat WP Purwa diarahkan sebagai gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran dengan kegiatan utama perdagangan, jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner;
5. Sub PPK Daksina sebagai pusat WP Daksina diarahkan sebagai wilayah perkembangan ekonomi terbatas, dengan kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, *Meeting – Incentive – Convention - and Exhibition* (MICE), jasa akomodasi dan ekowisata; dan
6. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan.

2.1.1.4 Aspek Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor sebanyak 1.127.408 jiwa yang terdiri atas 570.333 jiwa penduduk laki-laki dan 557.075 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023

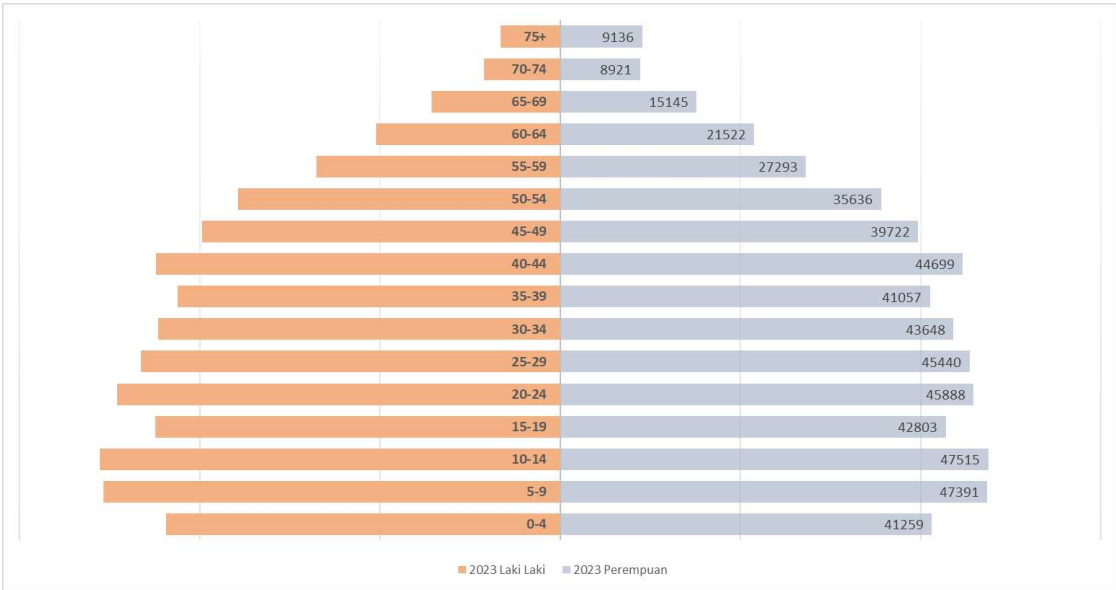
Kecamatan	Jumlah Penduduk			Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah			
Bogor Utara	103.966	100.488	204.454	18,13	11.273	2,12
Bogor Selatan	111.894	107.415	219.309	19,45	7.190	1,3
Bogor Barat	128.328	126.301	254.629	22,59	10.921	0,87
Bogor Tengah	54.680	54.377	109.057	9,67	13.035	-0,25
Bogor Timur	54.831	54.088	108.919	9,66	10.409	0,65
Tanah Sareal	116.634	114.406	231.040	20,49	11.215	1,63
Total	570.333	557.075	1.127.408	100,00	10.122	1,2

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Dari enam kecamatan, Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk terbesar yakni 254.629 jiwa (22,59%) dan terkecil adalah Kecamatan Bogor Timur tercatat sebesar 109.057 jiwa (9,67%). Kepadatan Penduduk pada enam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dengan kepadatan sebesar 13.035 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bogor Selatan sebesar 7.190 jiwa/km².

Selanjutnya penduduk di Kota Bogor dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umurnya sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2023



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024, data diolah

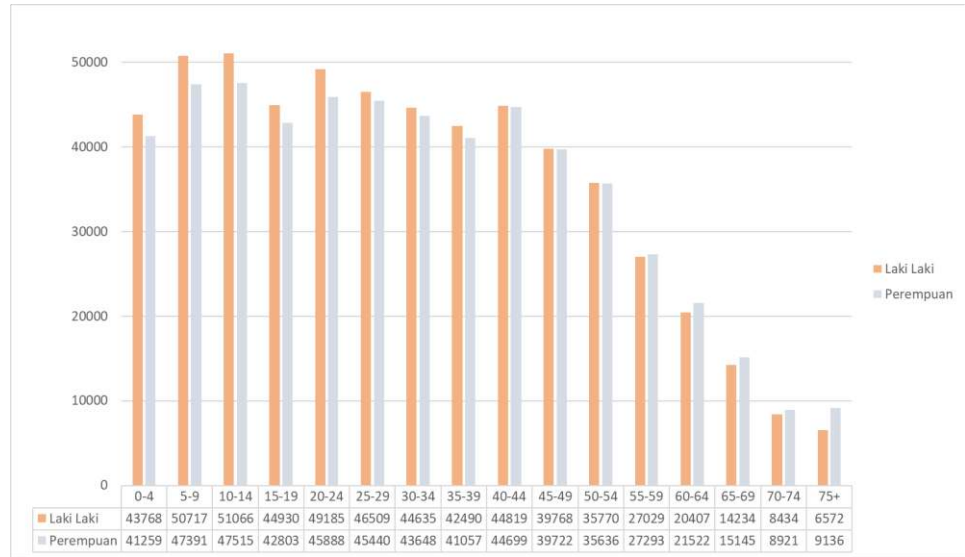
Terlihat dari bentuk piramida penduduk diatas, penduduk Kota Bogor dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 24,99%, jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 69,47%, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) hanya sebesar 5,54%. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kota Bogor apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna, karena mayoritas penduduknya dalam usia produktif.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada tahun 2023, rasio ketergantungan penduduk yaitu 42,1. Angka ini menunjukkan bahwa 43 orang usia produktif (15 – 64 tahun) menanggung sekitar 100 orang usia tidak produktif (0 – 14 dan ≥ 65 tahun) di Kota Bogor.

Rasio ketergantungan menjadi tolak ukur penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat

menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor.

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024, data diolah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki jumlah tertinggi berada pada rentang umur 10-14 Tahun sebanyak 51.066 jiwa dan terendah berada pada umur lebih dari 75 Tahun sebanyak 6.572 jiwa. Begitu pula bagi penduduk perempuan, jumlah tertinggi berada di rentang usia 10 - 14 Tahun sebanyak 47.515 jiwa, sedangkan jumlah terendah berada pada rentang umur 70 – 74 tahun sebanyak 8.921 jiwa. Adapun Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Bogor mencapai 100%.

Tabel 2.10
Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bogor Tahun 2023

NO	KECAMATAN	2023					
		ISLAM	PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	LAINNYA
1	Bogor Selatan	203.188	9.060	4.680	102	2.172	107
2	Bogor Timur	96.802	6.367	4.282	81	1.354	33
3	Bogor Utara	190.333	9.358	3.494	475	740	54
4	Bogor Tengah	97958	5.335	3.498	69	2.113	84
5	Bogor Barat	245.183	5.687	2.713	282	676	88
6	Tanah Sareal	219.828	7.025	3.273	227	635	52
TOTAL		1.053.292	42.832	21.940	1.236	7.690	418

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024, data diolah

Bila dilihat berdasarkan pemeluk agama di Kota Bogor, jumlah penganut agama Islam sebanyak 1.053.292. Sebanyak 42.832 jiwa menganut agama Protestan, 21.940 jiwa menganut agama Katolik, 1.236 jiwa penganut agama Hindu, 7.690 menganut agama Buddha, dan 419 jiwa penganut kepercayaan lainnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik menjadi salah satu tolok ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Berikut data PDRB ADHK dan ADHB Kota Bogor berdasarkan lapangan usaha tahun 2019-2023.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (juta rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha/Industri		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	239771,40	245164,10	258713,80	267405,73	275 952,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	-	-	0,00

Lapangan Usaha/Industri		2019	2020	2021	2022	2023
C	Industri Pengolahan	6065723,10	6015391,84	6283630,90	6602998,62	6 864 580,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	771588,30	725407,20	813132,22	893010,19	869 604,30
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	32725,60	36051,00	39770,90	42443,50	47 057,10
F	Konstruksi	3829210,20	3604700,20	3659258,00	3672500,88	4 094 471,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6744719,90	6210448,40	6379299,80	6722524,91	6 973 022,00
H	Transportasi dan Pergudangan	3933690,10	3850155,50	3961652,00	4352348,40	4 744 099,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1503114,80	1530332,90	1550682,62	1734174,05	1 825 381,90
J	Informasi dan Komunikasi	2253816,00	3047811,20	3182270,70	3344926,07	3 563 349,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2187588,80	2214258,50	2245471,00	2223681,42	2 246 723,30
L	Real Estate	736540,90	719168,81	821058,20	877629,11	896 550,80
M N	Jasa Perusahaan	691035,50	617578,20	598727,40	666389,86	673 097,10
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726854,50	721132,20	746399,20	730750,28	745 613,70
P	Jasa Pendidikan	967826,80	1041697,50	1096423,00	1195603,40	1 241 036,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	479727,41	485700,00	540877,00	595552,79	606 701,50
R S T U	Jasa Lainnya	1131796,10	1097744,80	1195107,70	1336930,80	1 388 121,90
	Produk Domestik	32295729,41	32162742,35	33372476,44	35258870,02	37 055 362,80

Lapangan Usaha/Industri		2019	2020	2021	2022	2023
	Regional Bruto					

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024

Dari tabel data tersebut, terlihat bahwa PDRB ADHK Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Kontribusi PDRB ADHK Kota Bogor di tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6.973,02 miliar rupiah serta sektor industri pengolahan sebesar 6.864,58 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi Kota Bogor ditopang oleh kegiatan ekonomi perkotaan yang berfokus pada perdagangan, industri, dan penyediaan jasa. Untuk sektor industri, Kota Bogor didominasi oleh industri kecil dan menengah, dengan jumlah 1.129 unit dari total 1.189 unit (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, 2021). Berikut tabel perbandingan PDRB ADHK Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dalam kurun tahun 2019-2023.

Tabel 2.12
PDRB ADHK Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36
Provinsi Jawa Barat	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.416,85

Sumber: jabar.bps.go.id, 2024

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka rata-rata PDRB ADHK Kota Bogor sebesar 2,20% dari rata-rata PDRB ADHK provinsi. Ini menunjukkan kapasitas perekonomian Kota Bogor yang tidak jauh berbeda dengan daerah metropolitan lain di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.13

PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industri		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	305493,20	317861,00	337588,40	373750,86	386 772,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	-	-	-
C	Industri Pengolahan	8370600,10	8298889,61	9256855,50	10045536,04	10 658 483,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1925050,10	1840664,00	2072324,40	2365294,98	2 381 766,00
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	50770,90	57628,30	64440,20	70046,50	84 332,10
F	Konstruksi	5615544,00	5306735,70	5429667,40	5769602,94	6 652 460,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9388980,40	8919697,20	9287189,20	10109475,57	10 961 342,50
H	Transportasi dan Pergudangan	5985705,32	5743779,00	5741132,20	6538056,65	7 624 699,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2199470,40	2269202,60	2351864,80	2706181,20	2 797 204,00
J	Informasi dan Komunikasi	2157434,00	2947044,50	2907944,90	3004885,92	3 203 246,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3346217,51	3325974,30	3486572,51	3727399,41	3 823 053,10
L	Real Estate	1010806,60	984525,60	1129313,10	1263588,43	1 289 363,10
M ,N	Jasa Perusahaan	1046281,00	935529,42	939524,90	1105062,70	1 118 701,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1239619,00	1202430,41	1270505,30	1241162,13	1 275 174,20
P	Jasa Pendidikan	1435963,50	1619798,50	1721282,70	1908968,76	1 965 060,00

Lapangan Usaha/Industri		2019	2020	2021	2022	2023
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641408,90	663087,20	781427,10	863525,64	897 622,00
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1478412,20	1479016,80	1548012,00	1822060,72	1 884 477,20
	Produk Domestik Regional Bruto	46197757,13	45911864,14	48325644,61	52914598,44	57 003 757,90

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024

Dari tabel data tersebut, terlihat bahwa PDRB ADHB Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Kontribusi PDRB ADHB Kota Bogor didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10.961,34 miliar rupiah serta industri pengolahan sebesar 10.658,48 miliar rupiah. Terlihat bahwa perekonomian Kota Bogor, baik dengan pengaruh inflasi maupun tidak, memiliki karakteristik ekonomi perkotaan, utamanya perdagangan, industri, dan penyediaan jasa.

Tabel 2.14

PDRB ADHB Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)

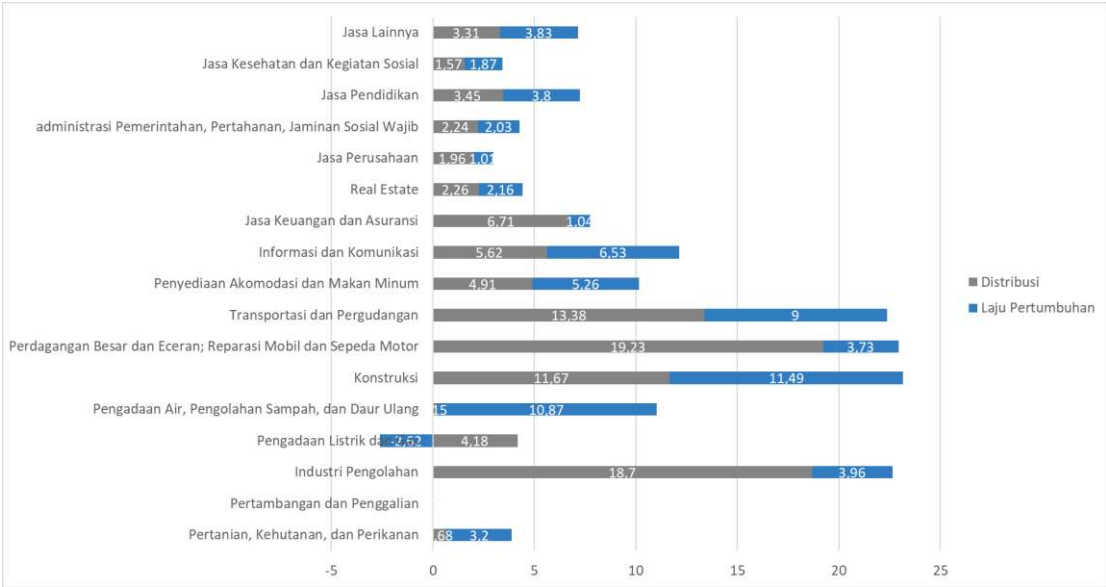
Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76
Provinsi Jawa Barat	2.123.153,71	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.221.,39

Sumber: jabar.bps.go.id (2024)

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, maka rata-rata PDRB ADHB Kota Bogor terhadap rata-rata PDRB provinsi sebesar 2,06%. Ini menunjukkan kontribusi PDRB Kota Bogor dengan kapasitas ekonomi perkotaan terhadap Provinsi Jawa Barat. Berikut tabel persentase kontribusi PDRB ADHB Kota Bogor menurut lapangan usaha tahun 2019-2023.

Grafik 2.4

Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2023



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024, data diolah

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebesar 5,1% dan erat kaitannya dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor usaha yang terdapat di Kota Bogor. Berdasarkan grafik diatas, secara umum kontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Industri Pengolahan; 3) Transportasi dan Perdagangan; dan 4) Konstruksi.

Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Konstruksi sebesar 11,49%. Seperti tahun sebelumnya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,23% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,73%. Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi sebesar 18,70% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,96%.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori sektor ekonomi tersier yang cukup cepat mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian Kota Bogor semakin bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi

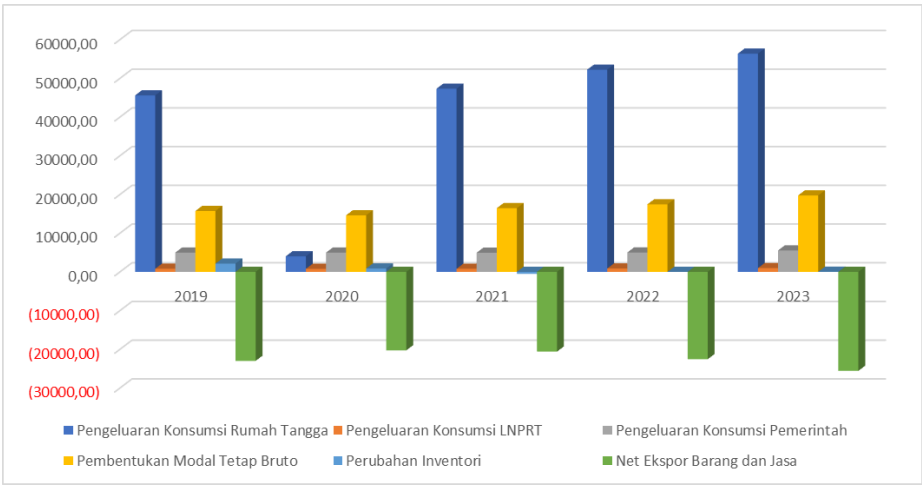
besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Bogor telah ditopang dari sektor perdagangan dan jasa. Namun untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, diperlukan integrasi berbagai sektor perekonomian untuk mengisi potensi-potensi lapangan usaha. Untuk Kota Bogor, selain meningkatkan sarana dan prasarana sektor perdagangan, diperlukan pula peningkatan sektor industri pengolahan dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif. Banyaknya industri kecil dan menengah, serta pangsa pasar potensial berupa sektor kuliner, kriya, dan *fashion*. Potensi ini juga didukung oleh posisi Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek dengan lalu-lintas antar kota yang padat, sehingga permintaan potensialnya pun cukup tinggi.

PDRB juga dipengaruhi oleh komponen-komponen lain, diantaranya Komponen Pengeluaran. Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa Komponen Pengeluaran Rumah Tangga masih mendominasi PDRB, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto. Adapun komponen Net Ekspor Barang dan Jasa bernilai negatif, artinya selama ini Kota Bogor masih didominasi oleh komponen impor daripada ekspor ke luar daerah baik barang maupun jasa.

Grafik 2.5

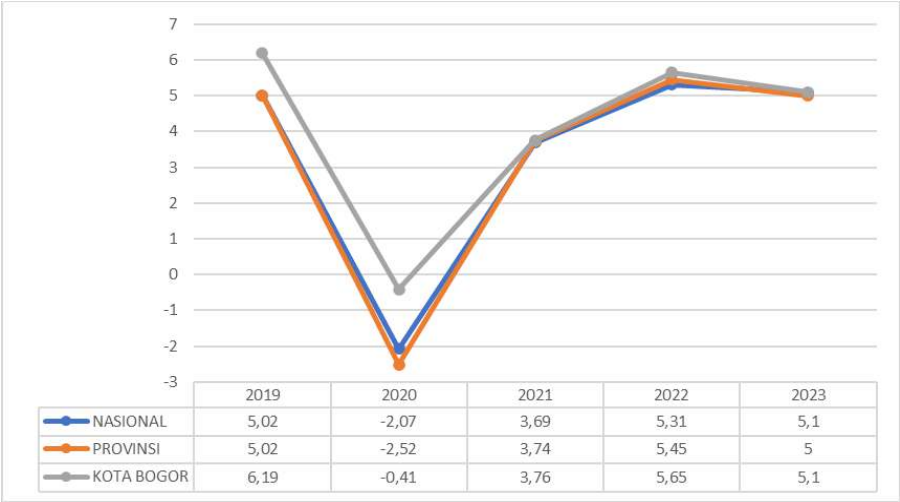
Perkembangan PDRB ADHB Berdasarkan Komponen Pengeluaran (miliar rupiah)



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024, data diolah

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 5,1 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,65. Kota Bogor sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,41 pada tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,76. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dari tahun 2019 – 2023 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Grafik 2.6
Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor
(persen)

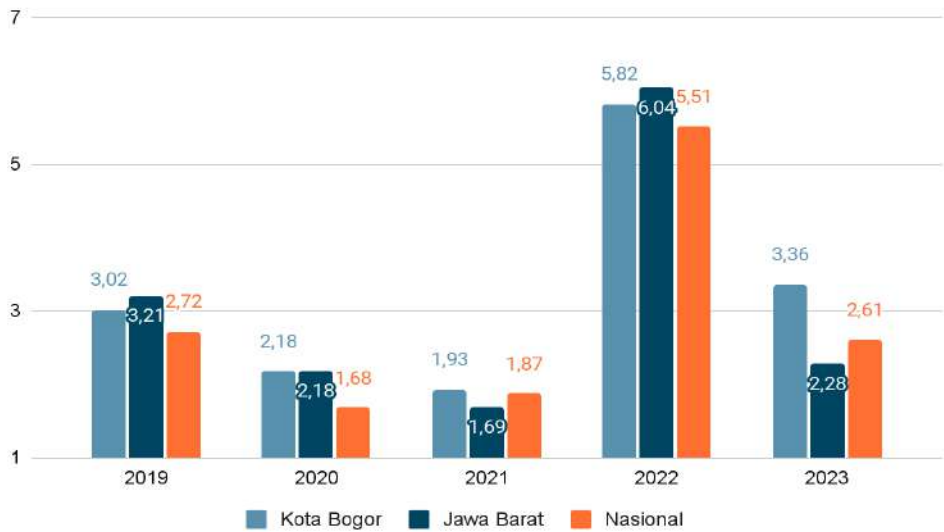


Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), data diolah

B. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan maupun penurunan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah kurang menarik para investor/produsen untuk berinvestasi sehingga berdampak juga pada laju pertumbuhan ekonomi. Berikut data perkembangan inflasi Kota Bogor dan perbandingannya dengan inflasi Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023.

Grafik 2.7
Perkembangan Inflasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

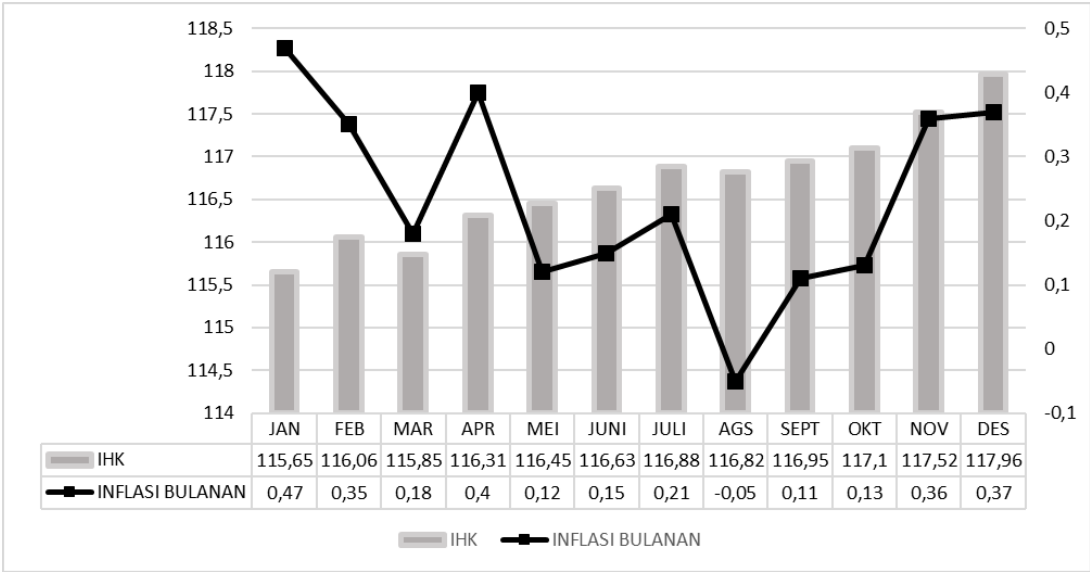


Sumber: *jabar.bps.go.id (2024), bps.go.id (2024)*

Terlihat bahwa laju inflasi Kota Bogor mengalami fluktuasi yang sejalan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Barat. Laju inflasi Kota Bogor mengalami penurunan hingga tahun 2021. Kemudian laju inflasi meningkat tinggi pada tahun 2022. Kenaikan inflasi pada tahun 2022 ini disebabkan oleh utamanya kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan di pasar, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mengatasi penyebab inflasi tersebut, di antaranya menyelenggarakan operasi pasar terbuka, inspeksi mendadak atas harga barang komoditas, penggalakan gerakan menanam tanaman pangan tertentu, subsidi transportasi, dan kerja sama dengan daerah lain untuk penyediaan komoditas dengan harga murah.

Grafik 2.8

Perkembangan IHK dan Inflasi Gabungan Tujuh Kota Di Jawa Barat Menurut Bulan, 2023



Sumber: Indeks Harga Konsumen Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat, 2024

IHK gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pengamatan selama tahun 2023, gabungan 7 kota di Jawa Barat secara bulanan terjadi inflasi sebanyak 10 kali dan deflasi sebanyak 2 kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,47 persen, sedangkan inflasi terendah pada bulan September yaitu 0,11 persen. Sementara itu, deflasi terjadi pada bulan Maret sebesar 0,18 dan pada bulan Agustus sebesar 0,05 persen. IHK (2018=100) tertinggi selama 2023 sebesar 117,96 (Desember) dan terendah 115,65 (Januari).

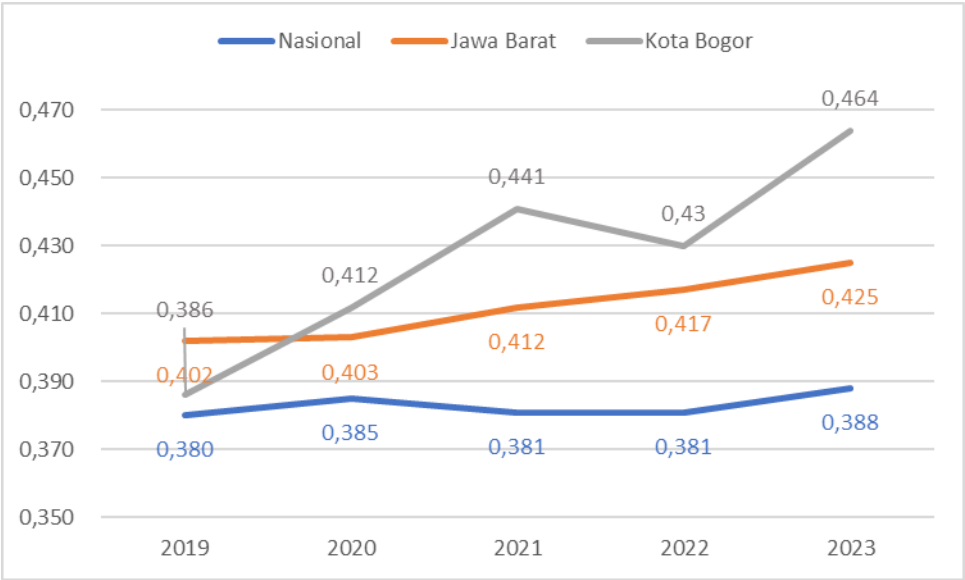
C. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula

tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Grafik 2.9

Perkembangan Rasio Gini di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)

Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2023 adalah sebesar 0,464, artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih memiliki permasalahan yang perlu dipecahkan terkait kesenjangan ekonomi. Walaupun PDRB meningkat setiap tahun, kesejahteraan ekonomi secara umum belum tercapai. Dilihat dari tabel perbandingan di atas, tren peningkatan Rasio Gini Kota Bogor mengikuti tren Provinsi Jawa Barat. Kedua wilayah ini sama-sama menunjukkan peningkatan kesenjangan ekonomi. Selain itu, baik Kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat belum bisa menyamai tingkat kesenjangan nasional yang terbilang lebih rendah.

D. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran

tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Berikut disajikan tabel Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2019-2023, dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Kondisi Kemiskinan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Deskripsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Kota Bogor	63,97	75,04	80,09	79,15	75,00
Persentase penduduk miskin (%) Kota Bogor	5,77	6,68	7,24	7,10	6,67
Garis Kemiskinan Kota Bogor	513.343	547.399	571.425	608.949	661.384
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,72	1,08	1,1	1,27	0,99
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,18	0,26	0,27	0,29	0,20
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Jawa Barat	3.399,2	3.920,2	4.195,3	4.071,0	3.888,6
Persentase penduduk miskin (%) Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Indonesia	24.785,87	27.549,69	26.503,65	26.363,27	75.000
Persentase penduduk miskin (%) Indonesia	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber: bogorkota.bps.go.id (2024), jabar.bps.go.id (2024), bps.go.id (2024)

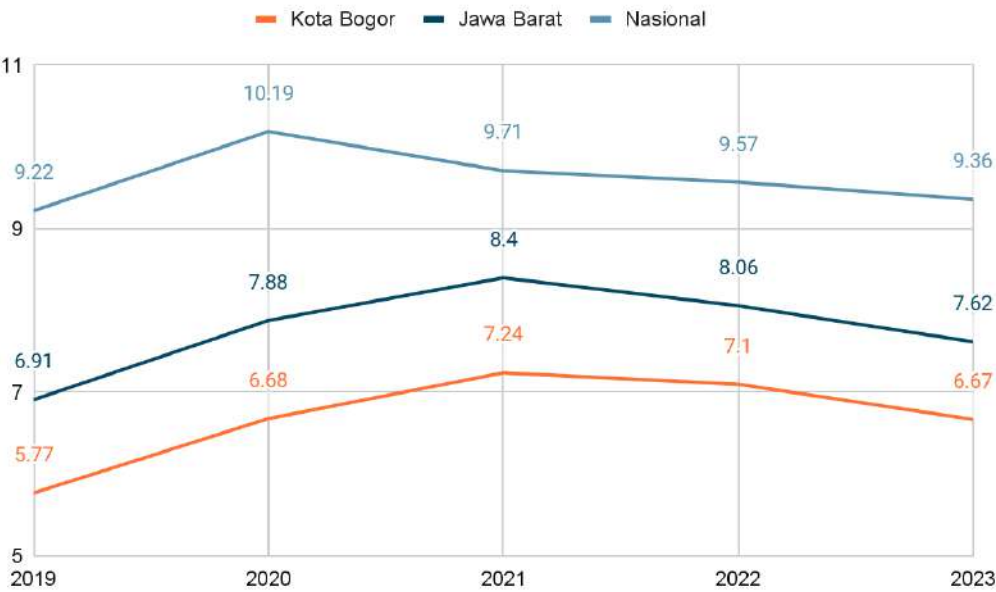
Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mengalami tren peningkatan. Walaupun pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,43%, jumlah penduduk miskin Kota Bogor yang sebesar 75 ribu jiwa masih terbilang tinggi. Dengan naiknya PDRB, Indeks Gini, dan jumlah penduduk miskin Kota Bogor, menandakan perlunya upaya khusus untuk menekan angka kemiskinan melalui redistribusi pendapatan.

Berbicara terkait kemiskinan, tidak terlepas dari adanya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor pada tahun 2022 yaitu 0,99, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pengeluaran pendapatan penduduk miskin semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya, artinya rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2023 mencapai 0,20 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang artinya bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah.

Grafik 2.10
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2023), jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)

Apabila ditinjau dari PDRB dengan pendekatan pengeluaran, maka investasi menjadi aspek penting untuk menciptakan lapangan kerja, yang nantinya akan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Namun, karakteristik Kota Bogor menyebabkannya sulit untuk menumpukan pertumbuhan ekonominya dari sisi investasi untuk mengembangkan industri-industri besar padat modal. Berbeda dengan daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten

Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, Kota Bogor memiliki keterbatasan dan kompatibilitas ruang untuk mengembangkan kawasan industri yang dimaksud.

Ini dapat dilihat dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai komponen PDRB pendekatan pengeluaran. Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yaitu dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022 Kota Bogor menempati urutan terakhir di antara daerah Bodetabek dalam PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 17.441,68 miliar. Sedangkan PMTB Kabupaten Bogor sebesar Rp 56.272,49 miliar, Kota Depok Rp 43.144,95 miliar, Kota Bekasi Rp 37.125,99 miliar, dan tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan Rp 79.217,23 miliar.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah juga ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan dan jumlah masyarakat yang bersekolah harus terus diupayakan.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); dan 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara.

Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Data komponen IPM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16

Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH/Tahun)	73,41	73,61	73,82	74,13	75,52*
Harapan Lama Sekolah (HLS/Tahun)	13,40	13,41	13,42	13,43	13,45
Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Tahun)	10,32	10,33	10,53	10,63	10,64
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP/Rupiah)	11.825	11.564	11.716	12.058	12.656
IPM	76,23	76,11	76,59	77,17	78,36*

Sumber: bogorkota.bps.go.id (2024)

(*) menggunakan data BPS UHH LF SP2020

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor pada tahun 2023 mencapai 77,85. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kota Bogor mengalami tren positif setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Pada Tahun 2023, AHH Kota Bogor mencapai 75,52 tahun, artinya rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh

penduduk yang lahir di Kota Bogor pada tahun 2023 lebih lama 0,31 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat (74,91 tahun pada Tahun 2023) AHH Kota Bogor lebih rendah. Kenaikan AHH di Kota Bogor dikarenakan adanya peningkatan layanan kesehatan terhadap usia pendidikan dasar, terhadap kesehatan usia produktif, terhadap kesehatan usia lanjut, terhadap kesehatan penderita hipertensi, terhadap kesehatan penderita diabetes melitus, terhadap kesehatan orang terduga penyakit tuberkulosis, terhadap kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, terhadap kesehatan bagi penduduk terdapat krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, serta terhadap pelayanan kesehatan gizi masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS Kota Bogor Tahun 2023 naik 0,02 Tahun dari tahun 2022 sehingga diperkirakan pada Tahun 2022 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang Pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati Pendidikan selama 13,45 tahun atau setara dengan diploma.

Komponen lain dari IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mempunyai pengertian rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Pada tahun 2023, RLS Kota Bogor sebesar 10,64 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kota Bogor yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,64 tahun. Jika dibandingkan dengan angka RLS Provinsi Jawa Barat (8,69 tahun) pada tahun 2023, RLS Kota Bogor sudah lebih tinggi 1,95 tahun.

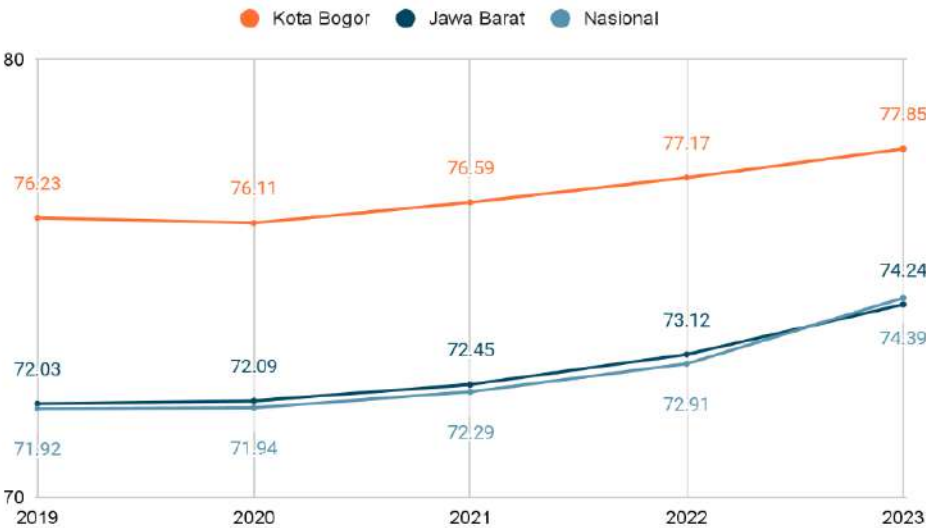
Komponen terakhir IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian,

pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tersebut. Pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Bogor sebesar Rp12.656.000 (*dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kota Bogor selama setahun sebesar ± Rp12,656 juta rupiah atau sebesar ± Rp1,054 juta rupiah per bulan, dan mengalami peningkatan sebesar Rp 598.000 dari tahun sebelumnya.

Capaian pertumbuhan angka IPM Kota Bogor mengalami peningkatan tiap tahunnya, seiring dengan tren kenaikan IPM secara Nasional dan Provinsi, seperti yang tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.11

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2019-2023



Sumber: jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)

Grafik di atas memuat perbandingan IPM Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2023. Terlihat bahwa pada lima tahun terakhir, baik IPM Kota Bogor, IPM Jawa Barat, maupun IPM Nasional menunjukkan tren peningkatan. IPM Kota Bogor rata-rata lebih tinggi 4 poin daripada IPM Jawa Barat dan lebih tinggi 5 poin dari IPM Nasional. Ini menunjukkan Kota Bogor memiliki kapasitas pembangunan manusia yang lebih baik daripada wilayah

kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, maupun wilayah Nasional secara umum.

B. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Data IPD dan IDG sangat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan. IPG Kota Bogor pada Tahun 2023 sebesar 92,19 poin, sedangkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 90,91 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kota Bogor pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. Sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada tahun 2023, IDG Kota Bogor sebesar 71,13 sedangkan IDG Provinsi Jawa Barat mencapai 71,74. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kota Bogor peran perempuan dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan sudah cukup merata.

Tabel 2.17
Perkembangan Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
Provinsi Jawa Barat	89,26	89,2	89,36	89,8	90,91
Kota Bogor	91,11	91,02	90,87	90,97	92,19
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
Provinsi Jawa Barat	69,48	70,24	70,62	71,22	71,74
Kota Bogor	68,91	69,03	72,33	72,56	71,13

Sumber : BPS Prov. Jawa Barat, 2024

C. Angka Melek Huruf (AMH)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah juga ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan dan jumlah masyarakat yang bersekolah harus terus diupayakan. Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2023

Angka Melek Huruf	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	99,35	99,63	99,68	99,78	99,98
Provinsi Jawa Barat	100	99,63	98,62	98,49	98,51

Sumber : BPS Prov. Jawa Barat, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa AMH Kota Bogor dan Jawa Barat meningkat pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk generasi muda yang diiringi oleh kemudahan akses pendidikan untuk memperoleh kemampuan membaca.

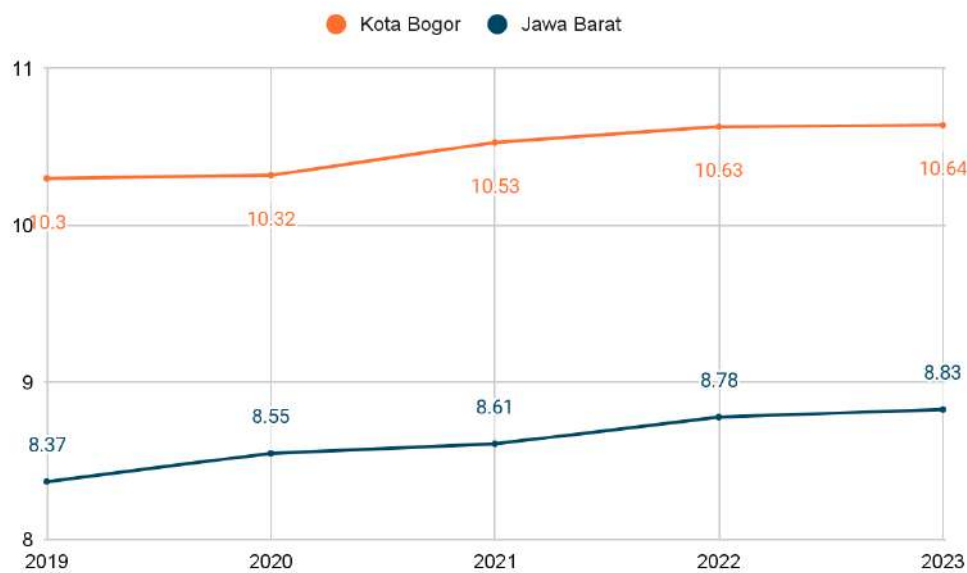
Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, di tahun 2023 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,02%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

D. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Perkembangan Angka RLS di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan dasar 9 tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan untuk

mencapai rata-rata lama sekolah 12 tahun. Pada tahun 2023, RLS Kota Bogor naik 0,01 tahun dari tahun sebelumnya menjadi 10,64 tahun, dan sudah berada di atas angka RLS Jawa Barat dan Nasional. Berikut ini perbandingan rata-rata lama sekolah (RLS) antara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Prov. Jawa Barat 2024, data diolah

Hal ini menunjukkan makin banyak penduduk Kota Bogor yang mampu menjangkau pendidikan dengan jenjang lebih tinggi. Di sisi lain, RLS yang berkisar di angka 10 menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi rata-rata penduduk Kota Bogor yang telah berusia 15 tahun ke atas adalah setingkat kelas 1 SMA. Ini berarti rata-rata kualitas SDM Kota Bogor masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

E. Persentase balita gizi buruk

Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau *severe wasting* biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan beresiko meninggal.

Tabel 2.19

Jumlah Balita yang Diukur dan Terindikasi Gizi Buruk di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Gizi Buruk	Persentase Balita Gizi Buruk
2019	83074	54	0,07
2020	77884	188	0,24
2021	72647	437	0,6
2022	72728	64	0,09
2023	71421	76	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2024, diolah

Dari data di atas, terlihat bahwa persentase balita dengan gizi buruk di Kota Bogor menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah balita gizi buruk tertinggi. Penyebabnya adalah dampak dari wabah COVID-19 yang berpengaruh pada kesehatan dan kondisi finansial penduduk. Selain itu, masih ada sebagian orangtua yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi makanan balita mereka dengan makanan yang bergizi.

F. Indikator Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kota Bogor tahun 2023 sebanyak 534.532 jiwa dimana 484.334 jiwa telah bekerja dan 50.198 jiwa termasuk kategori pengangguran terbuka atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk tercatat sebesar 64,81% dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah 9,39% terhadap angkatan kerja.

Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20

Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2023

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	345.298	189.234	534.532
	a. Bekerja	312.199	172.135	484.334

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	b. Pengangguran Terbuka	33.099	17.099	50.198
2.	Bukan Angkatan Kerja	70.972	219.265	290.237

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Distribusi angkatan kerja yang bekerja dilihat dari tingkat pendidikan untuk tahun 2019 – 2023 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2019 - 2023

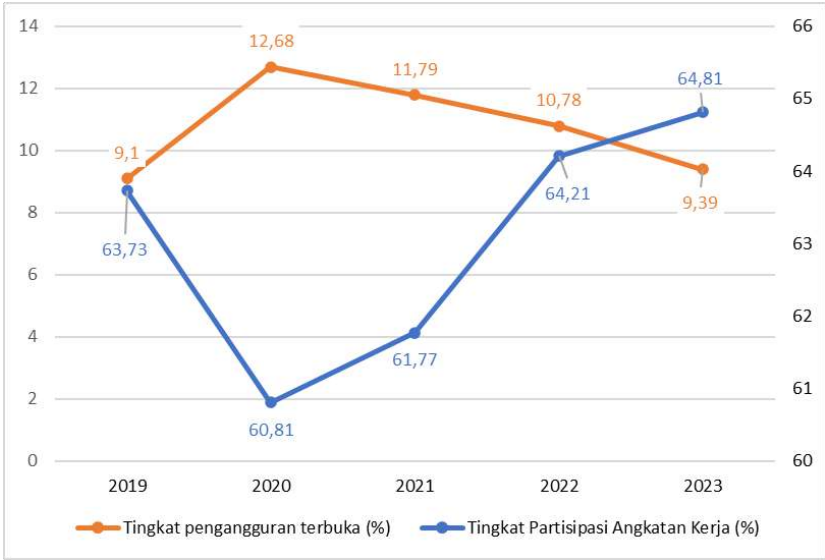
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Tamat Sekolah	NA	NA	NA	NA	NA
Sekolah Dasar (SD)	131,235	104,036	116,779	115,073	130,931
SMP	88,979	70,640	65,059	78,754	77,414
SMA Umum/SMA Kejuruan	209,142	183,238	184,881	183,510	185,858
Diploma /Akademi/ Universitas	106,242	91,196	99,926	119,233	90,131
Jumlah	535,598	449,120	466,645	496,570	484,334

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Penduduk yang bekerja di Kota Bogor pada tahun 2023 sebanyak 484,334 jiwa, dimana terbanyak berpendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas Umum dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan. Adapun perkembangan TPAK dan TPT Kota Bogor pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.13

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024, data diolah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yakni menjadi 60,81%. Namun mengalami kenaikan kembali hingga pada tahun 2023 menjadi 64,21%. Hal ini menunjukkan pula semakin tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kota Bogor untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian serta dapat aktif meningkatkan perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap *supply* tenaga kerja yang ada. Semakin rendah nilai TPT ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah

tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020, persentase TPT mengalami kenaikan akibat adanya pandemi Covid- 19, namun pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yakni mencapai 9,39%. Diasumsikan bahwa di Kota Bogor masih terdapat 9,39% persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan dan belum mendapatkan pekerjaan, penyebabnya sangat beragam salah satunya disebabkan oleh kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kota Bogor.

Data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat memiliki korelasi dengan di Kota Bogor, hal ini karena kenaikan dan penurunannya selaras. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor salah satunya disebabkan oleh pengaruh kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kota Bogor. Karakteristik Kota Bogor yang tidak memungkinkan untuk adanya pengembangan industri-industri besar yang padat modal seperti daerah kawasan industri besar lain yaitu Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi juga menjadi faktor adanya pengangguran terbuka di Kota Bogor. Kondisi ini menjadikan penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas investasi menjadi terbatas, apalagi jika jenis investasinya adalah investasi yang padat modal dan bukan padat karya.

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan industri padat karya yang mampu memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, serta perlunya mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti peningkatan agrobisnis dan agro industri karena potensi geografi Kota Bogor yang cukup baik dalam pengembangan pertanian. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menjadi penggerak perkembangan pembangunan daerah, yang juga membuka peluang perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Adapun APM adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bogor

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Kejar Paket A	108,63	107,27	105,98	103,35	95,5
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Kejar Paket B	105,8	107,8	106,4	105,4	95,5
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Kejar Paket A	108,05	98,06	104,89	106,63	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	94,14	88,01	82,54	96,27	90
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	115,27	99,91	103	101,58	91,92
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	30,93	95,32	89	93,26	89,48

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2024

APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. APK SD dan APK SMP berfluktuatif. Namun untuk di tahun 2023, APK SD dan APK SMP mengalami penurunan yakni 95,5. Kemungkinan penyebab turunnya persentase APK SD dan APK SMP ini karena adanya penurunan

keterlibatan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Pada tahun 2023, APM SD dan APM SMP mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan APS SD dan APS SMP yang mengalami penurunan.

2. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Pendidikan

Salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor adalah tersedianya sarana prasarana berkategori baik serta sumber-daya manusia yang memadai.

Tabel 2.23
Perkembangan Sarana Prasarana dan Sumber daya Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sekolah pendidikan SD/MI berkategori baik (%)	93,70	94,50	96	98	98,73
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kategori baik (%)	94,70	95,00	95,80	96	98
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	33,14	39	46	44	44
4	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah	31,26	20,25	33	24	31

Sumber; Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2024

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru

terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24

Rasio Peserta Didik per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Peserta Didik dan Guru		Rasio Peserta Didik dan Sekolah	
	SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS
Bogor Barat	1 : 20	1 : 22	1 : 356	1 : 310
Bogor Selatan	1 : 23	1 : 21	1 : 351	1 : 301
Bogor Tengah	1 : 22	1 : 21	1 : 340	1 : 492
Bogor Timur	1 : 21	1 : 20	1 : 342	1 : 215
Bogor Utara	1 : 22	1 : 19	1 : 343	1 : 290
Tanah Sareal	1 : 21	1 : 20	1 : 384	1 : 331

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2024

Seperti tersaji pada tabel di atas, kecamatan yang memiliki rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI yaitu Kecamatan Bogor Barat yaitu 1:20 yang artinya satu orang guru mengajar 20 siswa, dan terkecil di Kecamatan Bogor Selatan dengan 1:23. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru terhadap murid tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Utara dengan rasio sebesar 1:19. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kota Bogor rasio guru dan murid berada pada kondisi ideal di atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Data ini menggambarkan daya tampung sekolah. Dari tabel di atas tergambar rasio jumlah murid dan sekolah jenjang SD/MI tertinggi di Kota Bogor terdapat di Kecamatan Bogor Tengah yakni 1:340, artinya 1 sekolah dapat menampung 340 murid, sedangkan rasio terendah

ada di Kecamatan Bogor Barat yaitu 1:356. Untuk Jenjang pendidikan SMP/MTs rasio tertinggi di Kecamatan Bogor Timur dengan 1 : 215 dan terendah di Kecamatan Bogor Tengah yakni 1 : 492.

3. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Berikut disajikan data mengenai angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota selama kurun waktu tahun 2019 - 2023.

Tabel 2.25
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Bogor
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	87,87	86,90	89,20	89,43	92,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2024

Berdasarkan UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian ke satu pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma IV. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 92,30%.

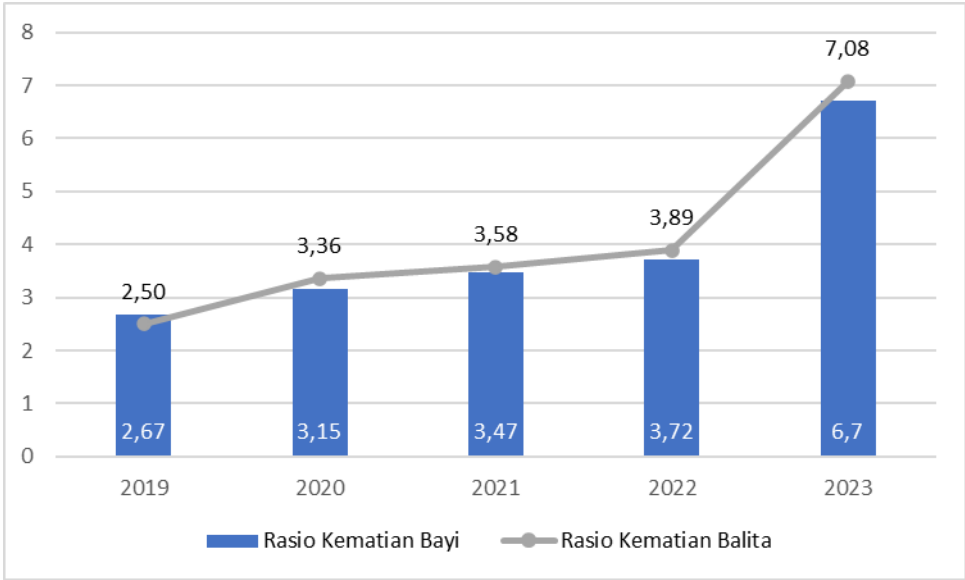
2.1.3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator terhadap upaya pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neonatal. Salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat AKB menggambarkan besarnya risiko kematian bayi (< 1 tahun) dalam 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.14

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kota Bogor



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2024, data diolah

Pada Tahun 2023, Angka Kematian Bayi di Kota Bogor mencapai 6,7/1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sistem pelaporan kematian ibu dan bayi melalui aplikasi MPDN, di Kota Bogor seluruh Faskes sudah disiplin dalam pelaporan kematian Bayi sehingga jumlah kematian bayi semua tercatat dalam pelaporan aplikasi MPDN tersebut. Hal yang dilakukan untuk menurunkan rasio kematian bayi yaitu dengan kegiatan Pendampingan dan penguatan RS EMAS dan Puskesmas EMAS, peningkatan SDM kesehatan terkait penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pendampingan dokter spesialis anak di faskes, dan kegiatan deteksi resiko pada kehamilan untuk menghasilkan kelahiran bayi yang sehat.

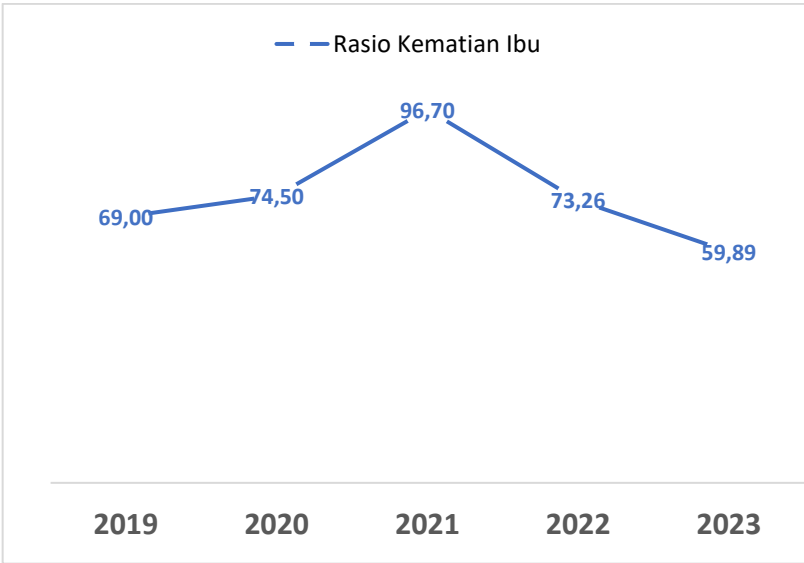
Adapun Angka Kematian Balita di Kota Bogor yakni 7,08/1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sistem pelaporan kematian ibu dan bayi melalui aplikasi MPDN, di Kota Bogor seluruh Faskes sudah Disiplin dalam pelaporan kematian Balita sehingga jumlah kematian balita semua tercatat dalam pelaporan aplikasi MPDN tersebut. Hal yang dilakukan untuk menurunkan rasio kematian balita yaitu dengan kegiatan Pendampingan dan

penguatan RS EMAS dan Puskesmas EMAS, peningkatan SDM kesehatan terkait penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelaksanaan MTBM/ MTBS di semua faskes (Puskesmas, PMB, Klinik) dan Pelaksanaan SDIDTK, dan pelaksanaan kelas ibu balita (tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga terkait kesehatan Balita termasuk deteksi dini dan tanda bahaya pada balita).

2. Angka Kematian Ibu

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan dan melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor (data diolah), 2024

Pada tahun 2023, Angka Kematian Ibu di Kota Bogor pada Tahun 2023 mencapai 59,89 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022. Hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya meningkatkan kompetensi petugas dalam tata laksana kegawatdaruratan maternal dan tindakan

pra-rujukan serta melakukan upaya deteksi dini faktor resiko dan pemantauan pada bumil dengan faktor resiko. Selain upaya tersebut dilakukan juga upaya edukasi dan konseling terhadap keluarga dan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran dan perubahan perilaku terkait pentingnya menjaga ibu hamil dan merencanakan persalinan sehat dan aman

3. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.26
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Bogor Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Puskesmas	24	25	25	25	25
Jumlah Puskesmas Pembantu	31	32	31	31	31
Rasio Puskesmas	2.16	2.22	2.38	2.24	2,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah puskesmas. Pada tahun 2019 jumlah puskesmas yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 24 puskesmas. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat penambahan satu puskesmas sehingga jumlah puskesmas menjadi 25. Terdapat peningkatan rasio puskesmas dalam setiap tahunnya mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Rasio puskesmas di Kota Bogor pada tahun 2019 sebanyak 2,16, pada tahun 2020 sebanyak 2,22, pada tahun 2021 sebanyak 2,38. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat penurunan rasio puskesmas menjadi 2,24.

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas

Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tabel 2.27

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Bogor Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit	19	20	22	22	22
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1.71	1.77	2.09	1.97	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2024

Terdapat peningkatan jumlah rumah sakit yang terdapat di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 19. Pada tahun 2020 jumlah rumah sakit yang terdapat di Kota Bogor naik menjadi 20 dan pada tahun 2021 hingga 2023 jumlah rumah sakit di Kota Bogor naik menjadi 22 rumah sakit (pemerintah dan swasta) dengan jumlah total bed sebanyak 3346.

5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.28

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	0,74	1,33	1,35	1,53	2,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2024

Di Kota Bogor banyak tersedia fasilitas kesehatan baik fasilitas layanan primer maupun layanan rujukan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi ketersediaan tenaganya.

Dengan demikian terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Kota Bogor.

2.1.3.1.3

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi.

Tabel 2.29

Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bogor

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	89,38	83,47	84,20	88,23	88,95
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (meter)	88,79	66,7	507,38	518,377	96,121
Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	67,21	3,72	75,12	5,43	5,49
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	11,01	11,17	25,11	25,86	20,15
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	71,57	0,014	0,509	60,71	0,88
Rasio Jaringan Irigasi	0,2578	0,26	0,415	0,345	0,36
Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	45,83	57,5	51,58	52,62	53,66
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (jiwa/km ²)	0,066	0,576	0,1203	0,817	0,197
Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	745	863	921	985	1195
Rasio pemakaman umum per satuan penduduk	11,71	12	11,38	11,98	9,74
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,02	1,03	1,57	1,49	1,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2024

Pada tahun 2023, rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi kota dakam kondisi baik mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Namun perlu adanya penambahan panjang saluran irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian. Jumlah lokasi rawan longsor yang sudah dibangun Tembok Penahan Tebing semakin meningkat yakni mencapai 1195 titik di tahun 2023. Adapun rasio pemakaman umum berkurang sebab tidak ada penambahan penyerahan aset tanah makam untuk tahun 2023.

2. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- didominasi komunitas tumbuhan.

Tabel 2.30
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang di Kota Bogor

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik berkualitas berupa taman, jalur hijau, dan RTHP lainnya	4,18	4,18	4,2	4,24	4,23
Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun (%)	99,80	94,18	99,88	99.59	99,7
Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB (%)	72,8	87,15	88,45	95,18	86,9

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2024

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pada tahun 2023, sudah 997% bangunan di Kota Bogor yang sudah dibangun sesuai dengan IMB serta tindakan pencegahan untuk bangunan yang belum memiliki IMB mencapai 86,9%. Diharapkan pemerintah Kota Bogor dapat terus memperhatikan izin dari bangunan yang akan dibangun sehingga tidak ada bangunan liar/ bangunan yang tidak memiliki izin.

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Adapun target SPM terkait cakupan ketersediaan rumah layak huni tercatat 100% sedangkan untuk cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah 70%. Di Kota Bogor, dari tahun 2019 – 2022 rasio rumah layak huni masih dibawah 20% namun di tahun 2023 meningkat menjadi 21,16%. Lebih lengkapnya kondisi rumah layak huni di Kota Bogor seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.31

Indikator Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio rumah layak huni	17,07	18,37	17,36	18,52	21,16
Rasio pemukiman layak huni	95,53	95,51	90,99	96,31	89,13
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	73,2	75,00	80,02	82,19	92,82
Persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	2,62	3,99	2,12	2,02	2,02
Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100	94,01	86,68	76,82	72,36
Berkurangnya jumlah unit RTLH	26,80	24,61	19,98	17,81	7,18
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	8,16	11,53	10,72	10,72	12,04

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman, 2024

Target capaian Persentase lingkungan permukiman kumuh kewenangan kota tidak tercapai dikarenakan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perlu adanya kolaborasi antar perangkat daerah dalam penanganan kawasan kumuh. Tidak hanya pembangunan jalan dan drainase perlu juga penanganan persampahan yang dilakukan oleh DLH, ketersediaan air minum oleh PDAM, sanitasi oleh DPUPR dan proteksi kebakaran oleh DPKP. Sehingga permasalahan kekumuhan dapat berkurang. Untuk jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni 7,18 di tahun 2023.

2.1.3.1.5

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3, persentase penegakan perda, cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap bencana.

Tabel 2.32

Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bogor

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	68%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penegakan PERDA (%)	85%	100%	100%	100%	100%

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan petugas perlindungan masyarakat	3739	3739	3739	3739	1049
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	68%	100%	94%	100%	50%
Waktu tanggap pelayanan kebakaran	75%	87,10%	100%	95,35%	95%
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	75	15,1	9,3	9,3	11,91

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Bogor selama 3 tahun terakhir ini telah mencapai 100%, ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Adapun Cakupan penegakan Perda Kota Bogor selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti. Hubungan antara ketiga indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga semakin baiknya petugas Satpol PP melakukan patroli maka semakin berkurangnya angka pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat sehingga capaian penegakan Perda pun akan maksimal.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Bogor mengalami kenaikan pada tahun 2023 hanya mencapai 50%. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sub Urusan Kebakaran bahwa Wilayah Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota (Wilayah Manajemen Kebakaran/ WMK) yaitu 1 (satu) Pos Damkar untuk 1 (satu) Wilayah Kecamatan. Di Kota Bogor hanya ada 3 pos damkar di 3 kecamatan.

Untuk waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran di Kota Bogor telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69/2012 disebutkan bahwa standar waktu tanggap (*response rate*) sebesar 75%, sementara itu, waktu tanggap bencana di Kota Bogor pada tahun 2023 telah mencapai 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) daerah layanan WMK rata-ratanya 11,91 menit. Hal ini sudah sesuai yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yaitu 15 menit.

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

Tabel 2.33
Indikator Sosial di Kota Bogor Tahun 2019-2023

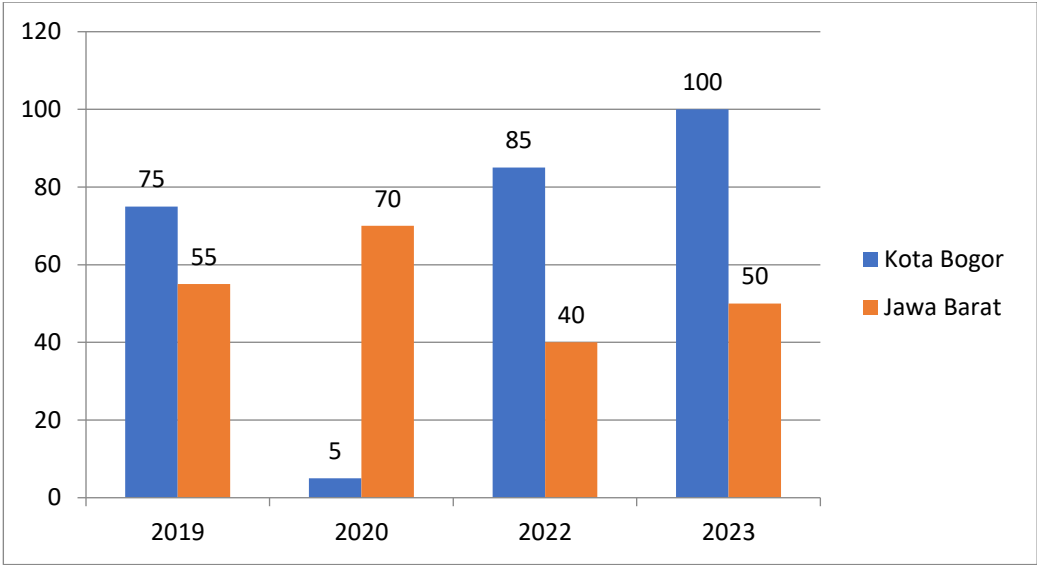
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	75,32	92	95	96	100
Persentase PMKS yang tertangani	91,45	92	95	98	100
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	8,90	32	40	100	100
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91,45	92	94	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor, 2023

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial selalu meningkat tiap tahunnya dan mencapai 100% pada tahun 2023. Adapun persentase PMKS yang tertangani di tahun 2023 juga sudah mencapai 100%. Pemerintah diharapkan terus memberikan bantuan sosial agar tepat sasaran atau peruntukannya.

Grafik 2.16

Persentase Jumlah Fakir Miskin dan PMKS yang Direhab dan Berdaya



Sumber: RPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024-2026

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai 75,32 dan menurun di tahun 2020 menjadi 5,98. Pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 100%. Fenomena tersebut juga terjadi pada persentase jumlah anak terlantar/ anak jalanan yang di bina, persentase penyandang cacat trauma yang di bina, dan jumlah PMKS/ PPKS yang terbina.

2.1.3.2

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1

Tenaga Kerja

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kota Bogor yang mencakup indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34

Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bogor

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat kesempatan kerja (%)	90,38	87,74	91,87	89,22	90,61
Jumlah tenaga kerja	2189	965	2440	7005	6729

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
yang terserap pasar kerja					
Jumlah pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	109.416	279.361	293.329	198.301	303.941
Penetapan besaran UMK	3.557.146	4.169.806	4.330.249	4.634.429	4.813.988
Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	63,91	64,70	71,43	67,21	76,5
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	17,49	17,48	18,28	18,37	18,62

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, 2024

Tingkat kesempatan kerja, penetapan besaran UMK, tingkat produktivitas tenaga kerja, jumlah pekerja yang memiliki BPS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Namun jumlah tenaga kerja yang terserap pasar kerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Adanya penyusunan dan perumusan upah minimum yang berkeadilan bagi pelaku usaha (perusahaan) dan tenaga kerja, dengan mengedepankan pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat juga dapat mendukung tingkat partisipasi tenaga kerja. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyederhanaan sistem pendidikan melalui pemilihan minat bakat sejak dini, serta adanya peningkatan pelatihan kerja bagi mahasiswa untuk mencegah adanya pengangguran.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Bogor pada tahun 2023 mencapai 71,13. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki- laki dan perempuan cukup rendah. Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase partisipasi perempuan di lembaga	5,63	1,87	52,3	N/A	2,00

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
pemerintah					
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	22	22	22	22	22
Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,04	0,00019	0,31	0,00013	0,00014
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	26,88	50,77	36,23	36,56	47,66

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, 2024

Berdasarkan tabel partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Bogor mengalami penurunan di Tahun 2019 hingga 2023. Partisipasi perempuan dalam hal memilih pemimpin daerah sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketersediaan sumber daya memang relatif lebih rendah bagi perempuan, misalnya sumber daya waktu dan ekonomi. Selain itu, angka kemiskinan dan kurangnya kendali terhadap sumber daya ekonomi membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak sebagai pemilih, kandidat, juru kampanye partai, petugas pemilu, ataupun pengawas pemilu.

Kendali terbatas terhadap aset ekonomi juga membatasi kemampuan perempuan untuk mencalonkan diri karena dalam banyak kasus mereka memiliki lebih sedikit sumber daya yang dapat digunakan untuk kampanye jika dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan ketercapaian partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah belum optimal. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Bogor masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesempatan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum harus ditingkatkan karena keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan cara mewakili, mengawal, meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran perempuan tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan di lingkungan rumah tangga yang berakibat pada kerugian fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 35 kasus KDRT dengan rasio 0,0001 dan 5 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap persentase penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. Meningkatnya minat dan partisipasi perempuan untuk berkontribusi dalam pasar kerja meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan di pasar kerja. Pada tahun 2023, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 47,66%. Pemerintah daerah Kota Bogor perlu meningkatkan kesempatan pendidikan yang layak bagi perempuan dan kesempatan kerja yang lebih luas melalui pemberdayaan dan juga upaya dalam menjamin keamanan dan perlindungan kerja.

2.1.3.2.3 Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan agenda penting pembangunan dalam rangka memenuhi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik.

Tabel 2.36
Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	231,01	231,20	156,18	164,92	161,00
2	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hr)	2592,9	2375	2230	2403	2318
3	Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hr)	110,3	68	63,6	81,20	76,40
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	93,96	90,81	93,75	94,68	92,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Berdasarkan data tabel di atas ketersediaan pangan utama Kota Bogor mengalami penurunan di Tahun 2019 hingga 2023, hal ini menunjukkan ketercapaian ketersediaan pangan utama yang belum optimal. Ketersediaan pangan utama di tahun 2023 sebesar 161,00 kg/kap/tahun yang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022.

Ketersediaan pangan utama Kota Bogor mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk, semakin minimnya lahan pertanian sehingga harga komoditi di pasar lebih mahal karena pedagang membeli pasokan melalui pengepul dari luar kota. Sehingga diperlukan upaya peningkatan pembudayaan pertanian organik. Semakin berkurangnya jumlah petani juga menjadi faktor penurunan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor salah satunya yaitu melalui pembinaan Kebun Organik Herbal Bejo di 68 kelurahan se-Kota Bogor.

Ketersediaan energi per kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Berdasarkan tabel di atas ketersediaan energi dan protein masyarakat Kota Bogor mengalami fluktuasi pada Tahun 2019 hingga 2023. Ketersediaan energi di tahun 2023 sebesar 2318,00 kkal/kap/tahun yang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022.

Ketersediaan protein per kapita masyarakat Kota Bogor mengalami fluktuasi pada tahun 2019 hingga 2023. Ketersediaan protein di tahun 2023 sebesar 76,40 gram/kap/tahun yang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Ketersediaan protein telah melebihi angka kecukupan energi ideal yaitu 63 gram/kap/hari. Kebutuhan konsumsi protein bagi masyarakat di Kota Bogor pangan Kota Bogor didukung oleh adanya regulasi ketahanan pangan.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/ perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan keamanan pangan dilakukan secara insidentil, apabila ada informasi kasus keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk, pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di tahun 2023 mencapai 92,96%. Konsistensi dalam upaya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan perlu terus dilakukan untuk membangun komitmen dalam upaya mewujudkan peredaran pangan yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian, di mana memunculkan isu strategis yang akan dijadikan bahan penentu kebijakan, hal tersebut diantaranya dengan melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

2.1.3.2.4 Pertanahan

Penyelesaian kasus tanah negara menjadi cerminan dalam melihat peran badan pertanahan dalam menyelesaikan sengketa tanah negara.

Tabel 2.37
Indikator Urusan Pertanahan di Kota Bogor Tahun 2019-2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100	100	100
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (%)	77	73	75	80	85

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2024

Berdasarkan data terkait penyelesaian kasus tanah negara dapat di Kota Bogor telah dilaksanakan secara penuh. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah dilakukan penyelesaian 100%. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tanah negara Di Kota Bogor telah membantu dalam mencapai konsensus dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Meskipun demikian upaya untuk melakukan penyelesaian tanah negara di Kota Bogor perlu dilakukan secara optimal baik dalam memperkuat SDM pengelola aset melalui pembentukan tim kelompok kerja optimalisasi aset tingkat K/L, yang bertugas dalam pengamanan yang belum terdapat pembatas pagar, papan nama, dan lainnya, melakukan pelaporan kepada pengelolaan barang, melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagai tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan barang, dan usaha-usaha lain untuk menjaga aset negara secara administratif. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan pengelola barang untuk senantiasa melakukan pengawasan pada aset-aset negara yang sudah diberikan izin, dan perlu adanya penguatan fungsi APP pada penelaahan perencanaan kebutuhan baik pada perhitungan SBSK maupun lainnya.

Hingga tahun 2023, sudah tersedia 85% lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Kondisi daerah Kota Bogor terkait urusan dapat dilihat pula dari penyelesaian permohonan izin lokasi. Proses pembuatan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait dengan *leading* sektornya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi menggambarkan semakin mudah dan menarik berinvestasi di suatu daerah.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH di Kota Bogor terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Tabel 2.38
Perkembangan IKLH, IKA dan IKU di Kota Bogor

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,29	55,45	58,597	64,29	58,400
2	Indeks kualitas Air	51,67	56,33	64,72	51,39	46,67
3	Indeks Kualitas Udara	81,76	80,09	99,35	98,36	95,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2023 sebesar 58,400. Sedangkan Indeks kualitas air di Kota Bogor pada tahun rentang 2019 – 2023 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 46,67 dan termasuk ke dalam status mutu pencemaran ringan. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Hasil *monitor Ing* Indeks Kualitas udara Kota Bogor pada tahun 2019 – 2023 termasuk ke dalam kategori baik ($70 \leq x < 90$). Status mutu udara dilakukan dengan menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO2 (Sulfur Dioksida) dan NO2 (Nitrogen Dioksida) tahunan sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan meskipun tidak signifikan yakni di angka 95,92. Faktor penurunan ini dikarenakan saat ini masyarakat sudah beraktivitas secara normal, sehingga aktivitas industri dan mobiliyasi masyarakat berpengaruh terhadap penurunan angka Indeks kualitas Udara.

2. Persampahan

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Sampah merupakan permasalahan yang sangat umum yang terjadi di

masyarakat global. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam.

Tabel 2.39

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	77,04	84,81	88,85	89,15	86,84
2	Timbulan sampah yang ditangani (%)	75,37	77,20	81	81,32	79,03
3	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	6,26	7,61	7,85	7,80	7,81
4	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	77,04	77,20	81,19	81,32	79,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor, 2024

Pada tahun 2023 persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 86,84%. Adanya penambahan armada pengangkut sampah, kuantitas TPS 3R yang cukup mengakomodir penanganan sampah menjadi faktor pendorong. Terdapat TPS di Kota Bogor sebanyak 28 unit, namun jumlah sampah yang berkurang melalui 3R hingga tahun 2023 baru mencapai 7,81%. TPS 3R ini melakukan pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos agar lebih efektif dan efisien dengan kapasitas tamping 5 M³ per unit.

Pada tahun 2022, timbulan sampah di Kota Bogor mencapai 659.653 ton/hari dengan volume sampah yang terangkut ke TPAS sebesar 536,403 ton/hari. Artinya, masih ada 18,68% timbulan sampah yang belum tertangani. Pengelolaan sampah di Kota Bogor masih perlu penanganan yang optimal melalui kebijakan dan kerjasama berbagai level. Adanya kesepakatan berbagai pihak dalam

pengelolaan sampah, baik dari pemerintah yang memfasilitasi alat maupun tempat pengelolaan (meningkatkan kuantitas dan kualitas TPS dan TPA), lembaga atau komunitas dan RT/RW yang memberikan edukasi, *reward* dan wadah bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, hingga masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun kelompok (bank sampah). Pengelolaan sampah yang berjalan semestinya selalu mengutamakan pada sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan Akte Kelahiran.

Tabel 2.40
Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio penduduk ber -KTP per satuan penduduk	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Kepemilikan KTP	98	98	99,34	99,31	100
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	94.07	95	96,43	96,51	98
4	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	51	31	53,82	52,49	55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2024

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemilikan KTP di Kota Bogor pada tahun 2023 mencapai 100%. Peningkatan ini terjadi karena adanya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang semakin membaik, terjalannya koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pemenuhan blangko KTP serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Adapun kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kota Bogor pada tahun 2023 telah mencapai 98%.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendataan dan pemahaman Masyarakat terkait pendataan kelahiran bayi melalui

akte kelahiran oleh pemerintah daerah Kota Bogor. Bagi pencatatan akta kelahiran yang terlambat dapat dilakukan upaya pelayanan langsung di kelurahan. Upaya untuk pemberian *feedback* atau pelayanan pendataan kependudukan akta kelahiran dapat selalu ditingkatkan melalui pembentukan saluran hotline pengaduan dan pembentukan dispenduk agen yang bertugas melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi kepada warga masyarakat khususnya di kelurahan di mana dispenduk agent ditugaskan.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.41
Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok binaan PKK	75	75	75	75	75
2	Jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	75	75	75	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa PKK aktif di Kota Bogor telah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat melalui PKK di Kota Bogor telah sesuai dengan target yang diharapkan. Jumlah kelompok binaan PKK dan LPM di Kota Bogor pada tahun 2023 sebanyak 75 kelompok, dengan persentase PKK aktif sebesar 100%. Artinya, target di tahun 2023 sudah tercapai. Hal ini terbukti dengan perolehan 329 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bogor dalam berbagai program sosial dan keagamaan. Peran PKK di Kota Bogor dalam hal ini telah menunjukkan partisipasi yang cukup baik,

sehingga diharapkan dapat semakin dioptimalkan, bukan hanya terkait pembangunan fisik.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan sebuah usaha dalam mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan seperti program KB (Keluarga Berencana) dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang.

Tabel 2.42
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,53	1,33	1,19	2,07	0,96
2	Ratio akseptor KB (%)	77,1	77,42	78,63	78,66	64,70
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	66	53,01	58,48	95,4	100
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	52,73	31,97	40,57	39,81	71,90
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	25,75	18,03	26,51	8,46	75,93

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Laju pertumbuhan penduduk rentang tahun 2019 – 2023 berfluktuatif, dengan LPP terendah pada tahun 2023 yaitu 0,96 dan tertinggi pada tahun 2022 mencapai 2,07.

Akseptor KB adalah pasangan umur subur yang menggunakan alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB meningkat dari tahun 2019 hingga 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu mencapai 64,70%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam penerimaan program KB di Kota Bogor cukup tinggi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan pemahaman masyarakat pada program-program KB dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan adanya pembentukan dan pengembangan kampung-kampung KB di Kota

Bogor, apresiasi Kampung KB, berbagai kompetisi terkait ketahanan keluarga, pembentukan duta dan berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan terkait remaja dalam generasi berencana tingkat kota Bogor. Upaya dalam mengembangkan kampung KB yaitu untuk menciptakan keluarga berkualitas tinggi yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di tingkat kota melalui perencanaan kependudukan, keluarga berencana, dan pengembangan keluarga.

Cakupan anggota BKB ber-KB mencapai 100% di tahun 2023. Secara umum, indikator diatas sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Cakupan anggota BKR dan BKL ber-KB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2.1.3.2.9 Perhubungan

a. Jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bogor

Angkutan Umum menjadi moda transportasi masyarakat. Fasilitas penyelenggaraan angkutan umum di Kota Bogor perlu dioptimalisasi sebagai perwujudan dalam pelayanan publik. Berikut adalah tabel jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bogor:

Tabel 2.43
Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum
di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang Angkutan Umum	24.060.642	22.442.108	12.201.950	23.069.825	30.469.356

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penumpang angkutan umum. Hambatan yang menyebabkan minimnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum antara lain kenyamanan halte angkutan umum yang digunakan untuk perdagangan dan parkir, rambu halte bus yang tidak sesuai dan hilang, cabang bus menutup jalan, halte rusak/tidak sesuai, konflik dengan sarana transportasi yang ada, vandalisme, lubang, gorong-gorong dan konstruksi jalan sempit.

Sementara itu, terdapat kekurangan dalam pengelolaan sistem angkutan umum (GIZ, 2023) yaitu: (1) pemerintah daerah tidak

memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelenggarakan sistem angkutan umum, (2) kurang optimalnya struktur kelembagaan perkotaan yang kompeten tentang integrasi pengembangan dan pengelolaan moda transportasi administratif dan lintas batas di perkotaan, (3) kurang optimalnya rencana mobilitas perkotaan yang terpadu sebagai landasan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan, (4) kurang optimalnya keahlian teknis untuk merencanakan, merancang, melaksanakan secara utuh dan mengoperasikan sistem transportasi umum. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan inisiatif dari pemerintah pusat secara umum terhadap pemerintah daerah (termasuk pertukaran pengetahuan, dukungan dan dorongan).

Kota Bogor merupakan kota metropolitan dengan tingkat integrasi yang tinggi dengan wilayah lain karena tingginya konsentrasi lapangan kerja dan berbagai sektor usaha. Berdasarkan data tahun 2016, Kota Bogor menduduki peringkat kelima kota paling padat di Indonesia, hal ini berdampak pada peningkatan penggunaan transportasi pribadi dan menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu memberikan alternatif solusi permasalahan kemacetan di Kota Bogor dengan melakukan pembenahan transportasi perkotaan untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan nyaman melalui integrasi serta proses reformasi struktur lalu lintas dan transportasi untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum di Kota Bogor. Salah satu angkutan umum yang sering digunakan masyarakat di Kota Bogor adalah angkutan umum. Namun saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang berupaya mengurangi jumlah angkot yang dianggap sebagai sumber kemacetan, dengan menata transportasi menuju transportasi terpadu, menyediakan banyak bus kota dan mendukung fasilitasi akses.

b. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib

memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Rasio zin trayek mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan mencapai 0,0114894.

Tabel 2.44

Perkembangan Rasio Izin Trayek

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Izin Trayek	0,000381	0,0021	0,000152	0,000132	0,0114894

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Diperlukan upaya untuk mereduksi angkutan umum yang sudah tidak layak pakai, serta meningkatkan kualitas angkutan umum sebagai upaya meningkatkan kenyamanan penumpang. Rasio izin trayek di Kota Bogor sebagai izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang perlu dioptimalkan untuk menjamin keselamatan penumpang.

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji KIR ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

Tabel 2.45

Perkembangan Jumlah Uji KIR

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	5.851	4.504	5.304	2.836	2.015

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Jumlah uji KIR angkutan umum berfluktuatif, namun dari 2019 – 2023 jumlahnya semakin berkurang yakni menjadi 2.015 kendaraan di tahun 2023. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Bogor masih cukup rendah, sehingga perlu adanya kebijakan terkait implementasi

uji KIR angkutan umum yang lebih konsisten sehingga diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum, serta sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informasi

Secara umum pencapaian indikator urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Nilai SPBE	2,97	2,97	3,11	2,75	3,72
2	Persentase keterbukaan informasi publik	100	98	77,5	79,80	86,40

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor (2024)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE pada tahun 2021 sebesar 3,11 dengan predikat baik. Pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai yakni hanya mendapatkan nilai 2,75 walaupun masih masuk ke dalam predikat baik. Namun meningkat kembali pada tahun 2023 yakni mencapai 3,72. Adapun persentase keterbukaan informasi publik Kota Bogor yang mencapai 86,40% belum mencapai target 100% yang ditetapkan di tahun 2023.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembangunan ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.47

Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Bogor Tahun 2019- 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase koperasi aktif (%)	64,29	65,21	66,19	18,75	21,40
2	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	0	124	1088	260	370
3	Jumlah PKL yang naik stastus menjadi UMKM	418	50	223	31	87

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, 2024

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan antara koperasi yang aktif dengan keseluruhan koperasi yang terdaftar. Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya melalui partisipasi aktif dalam ekonomi. Koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, persentase koperasi aktif mengalami penurunan hanya sebesar 21,40. Adanya kegiatan yang mendukung tercapainya koperasi aktif yaitu pembinaan dan pendampingan kepada koperasi melalui coaching klinik koperasi, pendampingan laporan RAT bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT, Rapat Kerja Koperasi, Pelatihan Perkoperasian di Wilayah kelurahan dan penyuluhan Perkoperasian di Wilayah kelurahan.

Jumlah UMKM (wirausaha) baru dan jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM semakin meningkat karena adanyaHasil kolaborasi dengan PD. Pasar Pakuan Jaya dan PT. Mulyagiri.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Tabel 2.48

Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

No	Tahun	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Jumlah Investor	Jumlah perizinan yang dikeluarkan
1	2019	2.641.381.312.523	1.347	7065
2	2020	1.603.215.590.165	1.060	6473
3	2021	618.472.107.486	1.604	6987
4	2022	1.571.444.371.677	2.748	6621
5	2023	1.934.967.980.187	2.890	7866

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Pada tahun 2023, jumlah nilai investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 1.934.967.980.187, dengan jumlah investor sebanyak 2.890. Dengan meningkatnya jumlah investor, maka semakin meningkat pula perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPSTP. Perkembangan nilai investasi tersebut menunjukkan pada banyak investor yang mulai berinvestasi di Kota Bogor. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kota Bogor itu sendiri.

2.1.3.2.13

Kepemudaan dan Olahraga

Indikator organisasi pemuda yang aktif penting untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari organisasi pemuda tersebut dalam mencapai tujuannya. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan, seberapa besar dampak yang telah dicapai, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda yang aktif juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi perbaikan dalam kinerja organisasi pemuda tersebut dan membantu mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya.

Tabel 2.49

Indikator Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO)	45	39	34,10	56,91	57,30
2	Persentase Pemuda Pelopor	5	20	0	30	20

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
	yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan					

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bogor, 2024

Penurunan jumlah pemuda pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan di Kota Bogor mengindikasikan bahwa peran pemuda dalam mendukung dan terlibat dalam organisasi atau komunitas di Kota Bogor masih kurang serta fasilitasi dari pemerintah Kota Bogor dalam mendukung keaktifan organisasi pemuda belum optimal dilaksanakan.

Oleh karena itu, perlu untuk adanya program atau kebijakan terkait bimbingan pelatihan untuk pemuda baik dalam program pelatihan kerja, pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan, dan peningkatan keterampilan. Di sisilain, partisipasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan memungkinkan pemuda untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat, memecahkan masalah sosial, dan meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bogor.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian.

Tabel 2.50
Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasangiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	15	19	21	38	41
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	32	18	18	20	25
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	59	24	21	36	41

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2024

Pada tahun 2023 penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami peningkatan. Artinya, pengembangan budaya melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bogor harus dioptimalkan untuk mempertahankan karakter daerah, dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui wisata seni dan

budaya. Festival Cap Go Meh dan Helaran Budaya dalam rangka Hari Jadi Bogor menjadi agenda rutin setiap tahunnya.

Banyak Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang membutuhkan perawatan yang dilakukan oleh Juru Pelihara, agar cagar budaya dapat tetap terjaga dan dilestarikan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mendorong terselenggaranya event/Festival/Pasanggiri/Lomba dan sayembara Karya seni terus yang dilakukan secara berkolaborasi, baik yang dilaksanakan oleh komunitas ataupun oleh pemerintah Kota Bogor.

2.1.3.2.15 Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satunya-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunanya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	28.790	9.601	1.084	5.249	99.615

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor, 2024

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Rata-rata penurunan yang terjadi pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021 yaitu sebesar 13.853 hal ini menunjukkan adanya penurunan pengunjung secara drastis dikarenakan adanya

regulasi terkait pandemi Covid 19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu dimungkinkan masih rendahnya minat baca masyarakat, keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung, dampak perkembangan teknologi informasi. Meskipun pada tahun 2023 berikutnya mengalami peningkatan, namun upaya untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan perlu dilakukan. Keberadaan Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor yang dibangun Tahun 2022 diharapkan dapat menambah kunjungan ke Perpustakaan Kota Bogor. Selain itu diperlukan fasilitasi dalam penambahan koleksi buku, layanan internet, kemudahan akses digital baik e-book, jurnal, dan lainnya. Program-program penunjang untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan perlu ditingkatkan baik di lingkungan perpustakaan daerah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satunya-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunaannya.

Tabel 2.52
Perkembangan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	75.705	77.684	77.648	78.354	80.834

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor, 2024

Pada tahun 2023 jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 80.834. Peningkatan tersebut sebagai wujud dalam usaha meningkatkan bahan literasi bagi masyarakat dan meningkatkan kunjungan di perpustakaan. Untuk koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Bogor diantaranya yaitu karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, seni dan olahraga, kesastraan, sejarah dan geografi, kanak- kanak, referensi, fiksi, sumbangan, dan hibah Perpusnas.

2.1.3.2.16 Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan, dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

Tabel 2.53

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	70	67	45,48	70	41,7

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor, 2024

Pada tahun 2023, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku baru mencapai 41,7% sedangkan target yang ingin dicapai adalah 95%. Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik maka diperlukan pengelolaan kearsipan elektronik secara menyeluruh, untuk menghindari kerusakan, kehilangan, dan lamanya pencarian arsip yang tersimpan secara manual. Selain itu pengelolaan kearsipan secara elektronik dapat meningkatkan keamanan karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronis, maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relatif sulit untuk mengaksesnya.

2.1.3.3

Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1

Pariwisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah, atau kegiatan rekreasi lainnya.

Tabel 2.54

Perkembangan Kunjungan Wisata di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan	6,367,303	3,457,722	3,803,494	5,174,317	5.650.637

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2024

Pertumbuhan jumlah wisatawan semakin berkembang hingga pada tahun 2023 mencapai 5,650,637 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki potensi pariwisata yang dapat mendukung pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat di Kota Bogor. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan daya tarik wisata dengan mengoptimalkan peran serta para pengusaha pariwisata Kota Bogor (ODTW). Pengembangan pariwisata dilakukan oleh Dinas Seni, Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan PHRI, ASITA, HPI. Pengelola ODTW Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, Sanggar Seni, BKKNI. Museum dan instansi terkait bertujuan untuk meningkatkan fasilitas, mengembangkan daya tarik wisata, dan mempromosikan daya tarik wisata.

Tempat wisata utama di Kota Bogor antara lain Kebun Raya, Museum Zoologi dan Istana Bogor. Hal ini diukur dari kunjungan wisatawan ke tempat-tempat tersebut yang relatif lebih tinggi dibandingkan kunjungan ke tempat wisata lainnya. Selain tempat wisata utama di Kota Bogor, ada beberapa tempat yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata, antara lain Wisata Perdesaan di Desa Cikaret Pancasan Bogor, Taman Penelitian Tanaman Obat

Industri Cimanggu, Kawasan Perdesaan Situ Gede dan pusat penelitian lainnya. Pengembangan Kampung Wisata seperti Kampung Wisata Mulyaharja dan Kampung Wisata Perca menjadi data tarik wisata baru. Selain mengunjungi tempat wisata tersebut, wisatawan di Kota Bogor juga memiliki potensi ekonomi pada pusat kuliner jajanan dan buah-buahan serta factory outlet pakaian dan koper seperti Jalan Suryakencana, Siliwangi, Pajajaran dan Tajur, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu Idul Fitri dan hari libur. Oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata di Kota Bogor perlu ditingkatkan untuk menambah pendapatan masyarakat dan daerah.

2.1.3.3.2 Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

Tabel 2.55
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	0,66	0,69	0,70	0,71	0,68

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel data kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, nilai kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB masih sangat kecil. Hal tersebut karena terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian yang terjadi di Kota Bogor yaitu tingkat sosialisasi dan pelatihan masyarakat mengenai pengolahan pangan sub-tanaman dan tepung umbi lokal masih rendah, ketersediaan benih berkualitas rendah, ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan rendah, ketersediaan air dan lahan pertanian masih tinggi, risiko hama dan penyakit tanaman, mutu dan

daya saing produk pertanian masih rendah, surveilans penyakit hewan masih rendah, jumlah dokter hewan dan perawat hewan serta pelayanan kesehatan hewan masih rendah, mutu produk hewan masih rendah, dan kemampuan tenaga utama dan badan usaha di bidang pertanian masih rendah, serta tingkat pengelolaan balai penyuluhan teknologi pertanian masih rendah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah Kota Bogor dan kerjasama pentahelix untuk meningkatkan kontribusi pertanian dan perikanan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi rencana pertanian organik secara keseluruhan, mengatur penggunaan lahan dengan menetapkan kawasan lahan permanen yang dilindungi secara hukum, memperkuat sistem kelembagaan pertanian dan pendidikan petani, termasuk program insentif pertanian, program bank pertanian, mengembangkan pasar dan jaringan pemasaran untuk mendukung petani, mengembangkan industrialisasi pertanian/pedesaan, dan mendorong akses terhadap sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperbaiki infrastruktur pertanian dan meningkatkan teknologi tepat guna, memperoleh wawasan kearifan lokal, dan memaksimalkan pemanfaatan temuan penelitian dari ilmuwan lokal, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan penyuluh pertanian, dan adanya pelatihan dan pemagangan (retoling) keterampilan hidup, keterampilan kewirausahaan dan kemandirian pertanian bagi generasi muda dan masyarakat luas.

Tabel 2.56

Indikator Urusan Pertanian di Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produktivitas padi per hektar (ton)	7	7,18	7,28	7,28	7,28
2	Cakupan bina kelompok petani (%)	68,97	75,08	76,37	89,40	93,08
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/Ha)	13,14	13,40	NA	12,92	10,81

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Produktivitas padi per hektar adalah 7,28 ton. Cakupan bina kelompok petani mengalami peningkatan dan telah mencapai target di

tahun 2023. Sedangkan untuk produktivitas pertanian per hektar per tahun belum memenuhi target yang ditetapkan yang seharusnya 13,91 ton/Ha pada tahun 2023.

2.1.3.3.3 Perdagangan

Sub sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara.

Tabel 2.57
Kontribusi dan Laju Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran	20,32	19,43	19,22	19,11	19,23
Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	3,85	-7,92	2,72	5,38	3,20

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa angka kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2019 menjadi angka paling tinggi kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran yang kemudian turun sebesar 0,79% (19,52) pada Tahun 2020, dan selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,3% (19,22) pada Tahun 2021, 0,11 (19,11) pada Tahun 2022, dan 0,12 (19,23) pada Tahun 2023. Adanya tren penurunan kontribusi terhadap PDRB oleh sektor perdagangan yang memiliki karakteristik daya saing rendah dan pertumbuhan yang lambat. Pada subsektor perdagangan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat Kota Bogor sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga berimplikasi pada angka produksi dan daya beli masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran diperlukan peningkatan ekspor dan investasi, serta adanya peningkatan konsumsi rumah tangga.

Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Bogor mengalami fluktuasi nilai pada Tahun 2019

hingga Tahun 2023. Tahun 2022 menjadi angka paling tinggi pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan kenaikan 2,66% (5,38). Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor menunjukkan kategori sektor ekonomi tersier di mana bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Sektor industri dan perdagangan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kota Bogor.

2.1.3.3.4 Perindustrian

Sub sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara.

Tabel 2.58
Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	18,12	18,08	19,16	18,98	18,70
Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5,72	-0,83	4,46	5,08	3,96

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan di Kota Bogor cenderung fluktuatif pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2021 menjadi angka paling tinggi kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan dengan kenaikan 1,12% (19,16). Selanjutnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 18,70. Penguatan sub sektor industri terhadap penerimaan PDRB di Kota Bogor perlu terus diupayakan dengan membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah) di Kota Bogor.

2.1.3.4

Urusan Penunjang

2.1.3.4.1

Perencanaan Pembangunan

1.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.59

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa salah satu indikator perencanaan pembangunan di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tentang tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA telah terpenuhi, yaitu Perda No. 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Bogor Tahun 2005 – 2025.

2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RPJMD dan

PERDA/PERKADA tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami visi dan misi pembangunan daerah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.60
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa salah satu indikator perencanaan pembangunan di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tentang tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA telah terpenuhi, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RKPD dan PERKADA tersebut tersedia bagi

masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami program dan kegiatan pemerintah daerah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.61

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2

Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian perencanaan pembangunan Kota Bogor tahun 2019 tahun 2023 tentang tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA yakni RKPD Murni dan RKPD Perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2024.
- Peraturan Walikota Bogor No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bogor No. 73 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2023.

2.1.3.4.2 Keuangan

Capaian indikator urusan keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62

Indikator Urusan Keuangan Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	8,84	11,9	14	8	1,77
3	Persentase SILPA terhadap APBD	8,84	11,9	14	8	1,77
4	Persentase belanja pendidikan	23,49	21,15	24,14	20,04	21,67
5	Persentase belanja kesehatan	16,54	21,7	12,18	11,56	22,89

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BKAD Kota Bogor, 2024

Opini BPK terhadap laporan keuangan dari 2019 – 2023 termasuk ke dalam predikat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP bermanfaat dalam mengawal tata Kelola keuangan yang baik. Opini ini diberikan oleh BPK dengan 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kecukupan pengungkapan.

SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada tahun 2023, SILPA Kota Bogor sebesar 1,77%, artinya terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8%. Adapun Persentase belanja untuk bidang Pendidikan mencapai 21,67% di tahun 2023, sedangkan untuk bidang Kesehatan sebesar 22,89%.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu suatu dokumen yang menjabarkan estimasi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran. Penetapan APBD dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah dan harus disetujui oleh DPRD setempat. Berdasarkan capaian indikator penetapan APBD pada tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu tepat waktu.

2.1.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Capaian indikator kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per JP	1	1	1	2	22
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	93,44	94,12	94,4	95,39	85,47

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	75	52,72	60,92	51,50	35,31
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35	35	35	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	155	157	152	150	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	3875	3651	3483	4015	4723

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bogor, 2024

Dari pencapaian indikator di atas, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai. Untuk persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan mencapai 95,59% pada tahun 2023 namun hanya mencapai 85,47% dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi serta jadwal di lembaga penelitian tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Adapun untuk persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktur ditargetkan mencapai 82,50% pada tahun 2023 namun hanya mencapai 35,31% dikarenakan adanya pengurangan jumlah pejabat struktural yang wajib mengikuti diklat yang beralih menjadi pejabat fungsional sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi. Sedangkan untuk indikator lainnya telah mencapai target di tahun 2023.

2.1.3.4.4 Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.64
Indikator Urusan Pengawasan Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tidak lanjut temuan internal	100	100	55,5	93,81	94,10
2	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	100	100	94,39	91,63	90,20
3	Persentase pelanggaran pegawai	1,3	0,3359	0,016	0,225	0,006
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	70	72,5	75	84,50	84.31

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2024

Faktor pendorong untuk meningkatkan capaian indikator diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Perangkat Daerah yang terdapat temuan rekomendasi Internal/ Eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan eksternal, mengikuti diklat, workshop yang diselenggarakan dalam meningkatkan kualitas APIP.

Adapun faktor penghambatnya antara lain kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan, Tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP belum terlaksana sesuai jadwal dikarenakan perubahan mekanisme tindaklanjut internal, Rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut khususnya BPK dilakukan setiap semester sehingga Tim Monitoring Inspektorat kesulitan untuk melakukan pemantauan atas data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah serta terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

2.1.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.65

Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor

Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	125	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	68	100	100	80	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	45,96	78,3	97,6	97,6	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	84,45	100	100	91,24	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (2024)

Seluruh target indikator urusan penelitian dan pengembangan tercapai sesuai dengan target pada RPJMD Perubahan 2019 – 2024, hal ini disebabkan karena adanya komitmen pemerintah Kota Bogor terhadap penguatan inovasi daerah melalui penguatan di aspek regulasi, keterlibatan masyarakat dengan adanya *Bogor Innovation Award* (BIA) dan keterlibatan perangkat daerah melalui *Innovation Government Award* (IGA).

2.1.3.4.6 Sekretariat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor serta wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tabel 2.66
Perkembangan Nilai SAKIP di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	BB	BB (73,75)	BB (75,15)	BB (75,20)	BB (76,73)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bogor, 2024

Nilai SAKIP Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mendapat predikat BB dengan kenaikan nilai yang tidak signifikan.

2.1.3.4.7 Sekretariat DPRD

Peran pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja DPRD secara keseluruhan. Beberapa aspek yang dapat diukur untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD melibatkan fungsi dan layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Berikut adalah capaian indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bogor.

Tabel 2.67

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor, 2024

Sekretariat DPRD Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah melaksanakan capaian fungsi baik pada penyediaan rencana kerja, pengintegrasian program kerja melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, serta dalam pelaksanaan program. Sekretariat DPRD Kota Bogor telah bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan administratif dan teknis bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa faktor pendorong diantaranya adanya pembahasan Rencana Kerja Tahunan pada AKD oleh Badan Musyawarah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, disusunnya Program/ Jadwal setiap bulan oleh Badan Musyawarah dalam pelaksanaan Kegiatan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 Fungsi DPRD yang mana didalam nya terdapat Rapat Kerja bersama dengan Mitra Kerja Pemerintah untuk mendukung dari pada Pemerintahan kota Bogor serta adanya rencana kerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Rencana kerja DPRD, serta melaksanakan Fasilitas secara maksimal untuk terlaksananya program kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

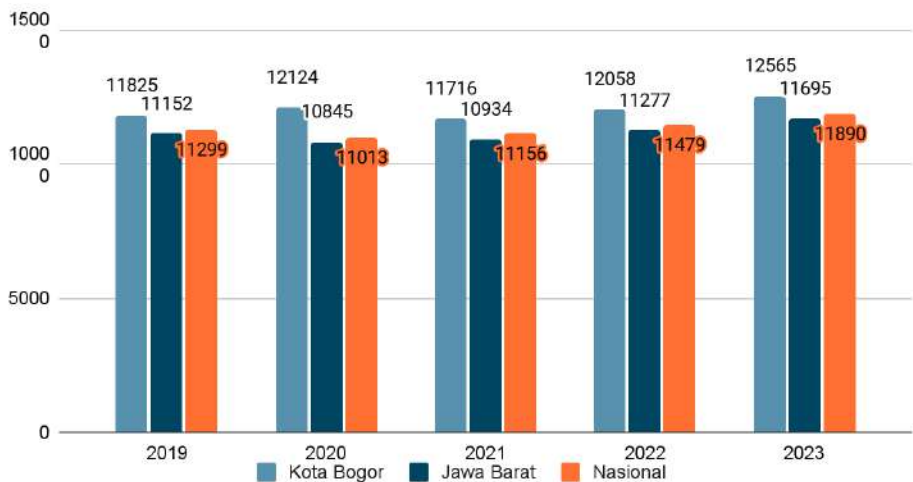
Aspek daya saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat

kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, atau internasional. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN, bahwa skor IDSD Kota Bogor tahun 2023 adalah 3,74 dan masuk pada kategori Daya Saing Tinggi.

2.1.4.1 Pengeluaran per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.

Grafik 2.17
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Prov Jawa Barat (2024), data diolah

Capaian pengeluaran per kapita rumah tangga di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat maupun nasional mengalami tren fluktuatif selama periode 5 (lima) tahun (2019-2023). Berdasarkan grafik di atas, data menunjukkan capaian pengeluaran per kapita Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2023, capaian pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar Rp 11,695 juta/tahun, sedangkan untuk Kota Bogor pengeluaran per kapita sebesar Rp 12,565 juta/tahun. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut menunjukkan konsumsi per kapita di Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB Kota Bogor yang

meningkat setiap tahun, meningkatnya PDRB dan pengeluaran per kapita berarti menunjukkan kemampuan daya beli yang cukup tinggi di Kota Bogor, sehingga secara tidak langsung memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pengeluaran per kapita dibedakan atas dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita kelompok makanan sebesar 950.587 (34,78) sedangkan kelompok non makanan sebesar 1.782.683 (65,22%). Pengeluaran non pangan per kapita Kota Bogor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori Hukum *Engel/Engel Law* yaitu semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

2.1.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.68
Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Rasio Ketergantungan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	264.425	272.800	275.097	263.022	281.716
Jumlah Penduduk Usia >65 tahun	60.730	54.693	57.751	70.083	62.442
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	722.455	737.205	742.609	780.913	783.250
Rasio Ketergantungan Muda	36,55	37,00	37,04	33,8	35,96

Rasio Ketergantungan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Ketergantungan Tua	8,39	7,42	7,77	8,8	7,97

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024

Tahun 2023 angka ketergantungan total Kota Bogor mencapai 43,93%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka ketergantungan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Adapun rasio ketergantungan muda di tahun 2023 mencapai 35,96% mengalami peningkatan dari 33,8 pada tahun 2022; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 36 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun). Pada tahun 2023, rasio ketergantungan tua sebesar 7,97; ini menunjukkan setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung 8 orang usia tidak produktif.

2.1.4.3 Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Tabel 2.69
Data Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Tingkat Kriminalitas (Kejadian)	919	909	978	1479	1366
Angka Kriminalitas yang Tertangani (Kejadian)	589	644	687	905	853

Sumber: Reskrim Kota Bogor, 2024

Angka Tingkat kriminalitas di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga 2022 meningkat, mencapai 1366 kejadian di tahun 2023. Adapun kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor pada tahun 2023 sebanyak 853, artinya sebanyak 513 kejadian yang belum tertangani (37,5%). Semakin tingginya angka kriminalitas pada suatu daerah menggambarkan rendahnya rasa aman Masyarakat.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Capaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari sembilan indikator makro RPJMD Kota Bogor terdapat dua indikator yang belum tercapai, yaitu angka kemiskinan dan indeks gini ratio. Namun demikian, rata-rata ketercapaian indikator makro RPJMD Kota Bogor pada Tahun 2023 menunjukkan 98,59 persen atau hampir mencapai target dengan predikat sangat tinggi (91 persen ≤ 100 persen).

Tabel 2.70
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		Tingkat Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,67	76,11	77,22	76,59	77,19	77,17	77,75	78,36	100,78
2	Jumlah Penduduk	dalam Ribu Jiwa	1.131	1.126	1.148	1.052	1.166	1.114	1.183	1.070	110,56
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1,51	1,33	1,47	1,19	1,46	2,07	1,46	0,96	134,25
4	Angka Kemiskinan (%)	%	5,8	6,68	5,78	7,24	6,90	7,10	6,56	6,67	98,32
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,47	12,68	8,22	11,79	11,32	10,78	10,56	9,39	111,08
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,66	-0,53	6,75	3,76	5,37	5,65	5,66	5,10	90,11
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0,4	0,412	0,39	0,441	0,37	0,430	0,35	0,464	67,43
8	Tingkat Inflasi	%	2 - 4	2,18	2 - 4	1,93	2 - 4	5,82	2 - 4	3,36	100
9	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	40,36	44,10	42,73	45,92	45,10	49,75	49,84	53,24	106,82

Sumber: Data diolah, 2024

Kota Bogor cenderung dapat mempertahankan percepatan pertumbuhan IPM. peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap

pencapaian pembangunan manusia. Lambatnya laju tingkat pertumbuhan faktor-faktor tersebut, dikarenakan adanya indikator-indikator lain yang juga membentuk faktor-faktor tersebut. Seperti usia harapan hidup masyarakat di suatu daerah, jika dalam daerah tersebut tidak memiliki tingkat sarana dan prasarana kesehatan yang baik, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa usia harapan hidup masyarakat tersebut juga akan semakin rendah dan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan semakin rendah. Kualitas hidup manusia di Kota Bogor mengalami kenaikan, hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor. Pada Tahun 2023, IPM Kota Bogor telah mencapai 78,36. Angka ini meningkat 1,19 poin dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar 77,17.

Pada Tahun 2023 penduduk Kota Bogor berdasarkan data BPS Kota Bogor sebanyak 1.070.719 jiwa yang terdiri atas 542.408 jiwa penduduk laki-laki dan 528.311 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,96 persen.

Berdasarkan publikasi BPS laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bogor tahun 2023 sebesar 5,10 persen, mengalami penurunan sebesar 0,55 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,65.

Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor menurun menjadi 9,39 persen pada tahun 2023 dari 10,78 pada tahun 2022. Angka ini sudah mencapai target TPT pada dokumen Perubahan RPJMD maupun RKPD Kota Bogor Tahun 2023 yaitu sebesar 10,56. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini Kota Bogor tahun 2023 mencapai 0,464. Angka ini masih belum mencapai target indeks gini ratio pada RPJMD dan RKPD tahun 2023 yakni sebesar 0,35. Nilai Gini Ratio mengalami kenaikan sebesar 0,034 dari 0,430 di tahun 2022.

Persentase penduduk miskin di Kota Bogor sudah mencapai target dan mengalami penurunan yaitu dari sebesar 0,43 persen dari 7,10 persen pada tahun 2022 menjadi 6,67 persen di tahun 2023. Kota Bogor berusaha mengurangi persentase penduduk miskin dari sisi pengeluaran antara lain dengan intervensi melalui Pemberian Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Tunai Bersyarat baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2023 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 3,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,42. Inflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,09 persen dengan IHK sebesar 124,92 dan terendah pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0.74 persen dengan IHK sebesar 101,03. Pemerintah Kota Bogor mengupayakan beberapa langkah koordinasi Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, dan peninjauan ke pasar.

Selain capaian indikator makro pembangunan Kota Bogor, berikut ini juga disajikan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor tahun 2023. IKU Pemerintah Daerah Kota Bogor memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolak ukur penilaian kinerja Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019-2024. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Bogor. Lebih rinci mengenai target, realisasi dan tingkat capaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023 disajikan sebagai berikut

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	Kondisi Awal (2019)	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020-2023								Evaluasi
				2020		2021		2022		2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,41	73.69	73.61	73,96	73.82	73.93	74.13	74.15	75.52	Tercapai
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	65,80	68	66.30	69,00	69.27	70,00	70.02	71,00	71.53	Tercapai
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	NA	0.45	0.39	0,47	34.1	49	56.91	57	57.30	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak	%	NA	NA	71.61	83.88	83.85	80.62	84.04	84.72	91.91	Tercapai
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	92,58	93.15	81.46	94,86	68.49	59.30	68.68	69.32	76.57	Tercapai
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	NA	NA	67.10	69.61	69.61	70.93	73.02	72.01	73.58	Tercapai
7	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	69,12	67.47	70.90	70,42	75.12	7.20	5.42	7.88	5.49	Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	Kondisi Awal (2019)	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020-2023								Evaluasi
				2020		2021		2022		2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	0	2.44	2.30	2,27	2.11	2,12	2.02	1,94	2.02	Tidak Tercapai
9	Persentase Reduksi Sampah	%	6,89	6.4	7.61	6,60	7.85	6,80	7.80	7.80	7.81	Tercapai
10	Indeks Kualitas Air	Angka	51,67	49.67	56.33	49,67	64.72	36.17	51.39	37.17	46.67	Tercapai
11	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,67	85.9	80.09	86,00	99.35	79.63	98.36	79.72	95.92	Tercapai
12	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,18	5.91	6.12	5,92	6.45	4,21	4.24	4.24	4.23	Tidak Tercapai
13	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,32	10.63	10.33	10,97	10.53	10.62	10.63	10.74	10.64	Tidak Tercapai
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,40	13.6	13.41	13,90	13.42	13.63	13.43	13.83	13.45	Tidak Tercapai
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin		56.31	Tidak dilaksanakan kegiatan perhitungan IPP Tahun 2020 karena refocusing anggaran akibat Covid-19	59,13	NA	62,09	NA	65,19	NA	Tercapai
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka		600-610	5,162	611-620	57.8					
		Kategori					Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Tercapai
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	68.91	69,50	69.03	70,50	72.33	71,50	72,56	72,50	71,13	Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	Kondisi Awal (2019)	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020-2023								Evaluasi
				2020		2021		2022		2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka		70,50	68.51	71,00	79.09	71,50	79.16	79.16	79.98	Tercapai
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (66,10)	BB	B	BB	B	A	BB	A	A	Tercapai
20	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Tercapai
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,10	8,47	12.68	8,22	11.79	11.32	10.78	10.56	9.39	Tercapai
22	Angka Kemiskinan	%	5,77	5,80	6.68	5,78	7.24	6.90	7.10	6.56	6.67	Tidak Tercapai
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	NA	73-74	85.2	74-75	85.20	75-77	85.20	85.20	85.20	Tercapai
24	PDRB (Atas dasar harga konstan)	Milyar Rp	32,254	NA	32,084	33,229	33,372	35,013	35,258	36,950	37,055	Tercapai
25	PDRB Per Kapita (Atas dasar harga berlaku)	Juta Rp	46,22	40,36	40.36	42,73	45.92	45,10	49.76	49.84	53.24	Tercapai
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	11.825	11.124	11,564	11.219	11,716	11.534	12.058	12090	12656	Tercapai
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19.22	21.00	19.11	22.00	20.49	23.00	18.70	24.00	17.75	Tidak Tercapai
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	20	20	20	40	40	60	26.05	80	49.45	Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	Kondisi Awal (2019)	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020-2023								Evaluasi
				2020		2021		2022		2023		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	20	20	20	40	40	60	38.51	80	58.76	Tidak Tercapai
30	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88,79	89	83.47	89,25	84.20					
	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%						86.00	88.23	88.50	88.95	Tercapai
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%		50	32	60	78.99	44	42.15	44	60.07	Tercapai

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023, dari 31 IKU 21 (dua puluh satu) indikator (67,74 persen) yang mencapai target dan 10 (sepuluh) indikator (32,26 persen) yang tidak tercapai.

Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) tidak lepas dari Indikator derajat Kesehatan lainnya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) suatu daerah. Indikator-indikator tersebut adalah indikator dasar pembentuk AHH individu manusia di suatu daerah. Realisasi ketercapaian Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2023 sebesar 101,85%, AHH Kota Bogor tahun 2023 sebesar 75,52 masih lebih tinggi dari realisasi AHH Jabar sebesar 73,80.

Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga tahun 2023 dari target sebesar 57 persen, realisasinya sebesar 57,30 persen berdasarkan survey di Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Selatan. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga diantaranya dengan menyelenggarakan event-event olahraga tingkat regional maupun nasional.

Indeks kerukunan umat Beragama Kota Bogor tahun 2023 sebesar 79,98, nilainya meningkat sebanyak 0,82 dari realisasi tahun 2022. Pada tahun 2023, Kota Bogor masuk ke dalam ketiga kota besar toleran, sehingga mendapatkan penghargaan Indeks Kota Toleran 2023. Indeks ini terbentuk berdasarkan tiga indikator besar yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Survei indeks ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif di 40 kelurahan di Kota Bogor yang terpilih secara acak.

Tingkat ketercapaian indikator luasan kawasan kumuh kewenangan kota sebesar 96,04 persen. Realisasi persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota tahun 2023 sama nilainya dengan tahun 2022 yaitu sebesar 2,02 persen dari target 1,94 persen.

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Pendidikan yang merepresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya

sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua angka tersebut merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah sebagaimana tersedia dan memungkinkan untuk diikuti. Berdasarkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 sebesar 13,45 mengalami peningkatan dari 13,43 pada tahun 2022. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan capaian HLS 13,45 tahun 2023, menggambarkan pembangunan secara sistem pendidikan di Kota Bogor sudah mengarahkan dan memungkinkan anak-anak akan tetap bersekolah pada umur-umur yang sama dengan waktu yang sesuai untuk menempuh jejang pendidikan.

Dilihat dari capaian Harapan Lama Sekolah sudah mengarah pada pencapaian wajib belajar 12 tahun, namun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Bogor masih belum mencapai waktu wajib belajar tersebut. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 penduduk Kota Bogor selama rentang usia 7-18 tahun (usia sekolah) masih dibawah wajib belajar 12 tahun sekolah sebesar 10,64. Dengan angka capaian RLS ini rata-rata Pendidikan masyarakat Kota Bogor hanya sampai tamat Sekolah Menengah Pertama atau Drop Out Sekolah Menengah Atas (kelas 11). Meskipun demikian capaian RLS Kota Bogor masih diatas rata-rata provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 8,83 tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor menurun menjadi 9,39 persen pada tahun 2023 dari 10,78 pada tahun 2022. Angka ini sudah mencapai target TPT pada dokumen Perubahan RPJMD maupun RKPD Kota Bogor Tahun 2023 yaitu sebesar 10,56.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Persentase penduduk miskin di Kota Bogor sudah mencapai target dan mengalami penurunan yaitu dari sebesar 0,43 persen dari 7,10 persen pada tahun 2022 menjadi 6,67 persen di tahun 2023. Kota Bogor berusaha mengurangi persentase penduduk miskin dari sisi pengeluaran antara lain dengan intervensi melalui Pemberian Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Tunai Bersyarat baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota. Terdapat beberapa indikator kemiskinan dan ketimpangan yang diukur perkembangannya, diantaranya adalah garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan gini rasio.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2023

Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun ke-n;
3. Realisasi Program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan yang direncanakan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab itu.

Kinerja pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2023 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program

pembangunan daerah pada pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 dengan rincian: < 50% Sangat Rendah; 51% ≤ 65% Rendah; 66% ≤ 75% Sedang; 76% ≤ 90% Tinggi; dan 91% ≤ 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2023 berdasarkan urusan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.72

Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2023 (%)	
		Triwulan IV	
		Fisik (%)	Predikat Fisik
1	2	3	4
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91.95	Sangat Tinggi
1	Pendidikan	87.00	Tinggi
2	Kesehatan	95.49	Sangat Tinggi
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.07	Sangat Tinggi
4	Perumahan dan Permukiman	100	Sangat Tinggi
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	96.72	Sangat Tinggi
6	Sosial	82.41	Tinggi
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	91.96	Sangat Tinggi
7	Tenaga Kerja	100	Sangat Tinggi
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92	Sangat Tinggi
9	Pangan	82.92	Tinggi
11	Lingkungan Hidup	97.54	Sangat Tinggi
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	97.09	Sangat Tinggi
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.17	Sangat Tinggi
15	Perhubungan	94.16	Sangat Tinggi
16	Komunikasi dan Informatika	99.58	Sangat Tinggi
17	Statistik	97.87	Sangat Tinggi
18	Persandian	99.87	Sangat Tinggi
19	Koperasi dan UKM	45.00	Sangat Rendah
20	Penanaman Modal	96.77	Sangat Tinggi
21	Kepemudaan dan Olah Raga	96.00	Sangat Tinggi
22	Kebudayaan	94.80	Sangat Tinggi
23	Perpustakaan	100	Sangat Tinggi
24	Kearsipan	80.59	Tinggi
C	Urusan Pilihan	96.58	Sangat Tinggi
25	Kelautan dan Perikanan	100.00	Sangat Tinggi

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2023 (%)	
		Triwulan IV	
		Fisik (%)	Predikat Fisik
1	2	3	4
26	Pariwisata	98.59	Sangat Tinggi
27	Pertanian	93.33	Sangat Tinggi
28	Perdagangan	80.00	Tinggi
29	Perindustrian	111.0	Sangat Tinggi
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	94.92	Sangat Tinggi
30	Sekretariat Daerah	100	Sangat Tinggi
31	Sekretariat DPRD	89.83	Tinggi
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	95.89	Sangat Tinggi
32	Perencanaan	98.00	Sangat Tinggi
33	Keuangan	96.76	Sangat Tinggi
34	Kepegawaian	90.80	Tinggi
35	Penelitian dan Pengembangan	98.00	Sangat Tinggi
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	97.06	Sangat Tinggi
36	Pengawasan	97.06	Sangat Tinggi
G	Unsur Kewilayahan	91.95	Sangat Tinggi
37	Kecamatan	91.95	Sangat Tinggi
H	Unsur Pemerintahan Umum	80.00	Tinggi
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	80.00	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2024.

2.2.3 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (Outcome)

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah) yang dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program (outcome). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan. Dalam hai ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Wali Kota melalui Bappeda Kota Bogor. Berikut ini disajikan tabel realisasi indikator kinerja program (outcome) tahun 2023.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Keberhasilan Kunci RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	Laju Inflasi	%	3.69	2-4%	2.18	2-4%	1.93	2-4%	5.82	2-4%	3.36	Tercapai	Bapperida
2	PDRB per kapita	Juta Rp	37.99	40.36	40.36	42.73	45.92	45.10	49.76	49.84	53.24	Tercapai	Bapperida
3	Indeks gini	Point	0.41	0.4	0.412	0.39	0.441	0.37	0.430	0.35	0.464	Tidak Tercapai	Bapperida
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	94.07	94.2	94.20	94.22	92.76	93.88	92.90	93.44	93.33	Tercapai	Bapperida
5	indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	75.66	76.67	76.11	77.22	76.59	77.22	77.17	77.78	78.36	Tercapai	Bapperida
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,096,828	1,131,890	1,126,927	1,148,968	1,052,359	1,166,046	1,114,018	1,183,124	1,070,719	Tercapai	Bapperida
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.39	1.51	1.33	1.47	1.19	1.46	2.07	1.46	0.96	Tercapai	Bapperida
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6.14*	6.66	-0.53	6.75	3.76	5.37	5.65	5.66	5.10	Tidak Tercapai	Bapperida
9	angka melek huruf	Persen	99.98	99.98	99.98	99.98	99.68	99.98	99.98	99.98	99.98	Tercapai	Disdik
10	rata rata lama sekolah	Tahun	10.29	10.63	10.33	10.97	10.53	10.62	10.63	10.74	10.64	Tidak Tercapai	Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
11	harapan lama sekolah	Tahun	13.37	13.60	13.41	13.90	13.42	13.63	13.43	13.83	13.45	Tidak Tercapai	Disdik
12	angka usia harapan hidup	Tahun	73.37	73.69	73,61	73.96	73.82	73.93	74.13	74.42	75.52	Tercapai	Dinkes
13	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	Persen	4.8	4.75	10,66	4.7	5.33	10.10	3.25	9.80	2.59	Tercapai	Dinkes
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	Persen	4.53	4.31	3,74	4.2	4.77	4.09	4.82	3.98	4.16	Tidak Tercapai	Dinkes
15	cakupan desa siaga aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
16	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64.30	62.27	65.55	61.77	66.79	64.21	68.04	64.81	Tercapai	Disnaker
17	tingkat pengangguran terbuka	opini	9,57	8.47	12,68	8.22	11.79	11.32	10.78	10.56	9.39	Tercapai	Bapperida
18	rasio penduduk yang bekerja	Persen	57,1	59.46	57.1	61.01	54.48	62.56	49.96	64.10	42.96	Tidak Tercapai	Disnaker
19	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Persen	90,35	90.62	90.35	90.80	88.21	90.85	89.22	90.90	90.61	Tidak Tercapai	Disnaker

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
20	keluarga pra sejahtera	Persen	7.38	7.00	7.00	6.50	5.12	6.00	NA	5.50	NA	Data Tidak Tersedia	DPPKB
21	indeks kepuasan masyarakat	angka	3.39	3.32	3.34	3.43	3.40	3.40	3.50	3.52	3.57	Tercapai	Setda
22	persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	42.83	43.00	35.92	43.50	56.67	44.00	42.00	44.50	45.09	Tercapai	Bapenda
23	opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
24	pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	84.90	86.90	75.84	87.90	70.56	71.30	81.70	82.70	83.10	Tercapai	DKPP
25	penguatan cadangan pangan	Ton	5.40	30.00	8.18	26.72	0	10	0.829	10	27.40	Tercapai	DKPP
26	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0.730	0.696	0.69	0.681	0.70	0.666	0.706	0.651	0.678	Tercapai	DKPP
27	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan	persen	0.81	0.75	0.79	0.73	5.53	0.71	0.758	0.68	0.745	Tercapai	DKPP

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	terhadap PDRB Atas Dasar Konstan												
28	produksi Pertanian (Padi)	ton	5.439	5.548	4186	5.602	5,496	3367	3378	3401.20	2831.90	Tidak Tercapai	DKPP
29	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,34	18.22	18.04	18.18	19.16	18.13	18.98	18.08	18.53	Tercapai	Dinkukm dagin
30	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	21,21	21.07	19.52	21.00	19.22	20.95	19.11	20.9	19.23	Tercapai	Dinkukm dagin
31	kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	18,35	18.28	18.56	18.26	19.16	18.23	18.98	18.21	18.53	Tercapai	Dinkukm dagin
32	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,212	0.211	19.52	0.21	19.22	0.209	19.11	0.209	19.23	Tercapai	Dinkukm dagin

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
33	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,22	0.218	19.39	0.217	19.22	0.216	19.07	0.215	18.82	Tercapai	Dinkukm dagin
34	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,04	12.31	12.55	12.42	11.88	12.53	12.36	12.64	13.38	Tercapai	Dishub
35	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persen	22	21.76	-1,86	21.66	2.90	21.56	12.34	12.64	12.80	Tercapai	Dishub
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH												
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	10 .940	11,396	11,564	11,533	11,716	11,534	12,058	12,090	12,656	Tercapai	Bapperida
2	Angka kriminalitas	Angka	0.00048	0.00047	0.00057	0.00046	0,00065	0.00045	0,00081	0.00044	0,00080	Tidak Tercapai	Satpol PP

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Rasio ketergantungan	Persen	42.28	41.54	41.54	41.17	NA	40.8	42.60	43	43	Tercapai	Disdukcapil
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67.37	69.50	69.03	70.50	72.33	71.50	72.33	72.50	72.56	Tercapai	DP3A
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62.27	64.30	60.68	65.55	61.77	66.79	64.21	68.04	64.81	Tidak Tercapai	Disnaker
III	ASPEK PELAYANAN UMUM												
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
1	PENDIDIKAN												
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	49.06	50.00	49.06	50.55	50.20	51.00	48.80	51.50	38.00	Tidak Tercapai	Disdik
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	98.75	Tidak Tercapai	Disdik
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdik
4	Angka Partisipasi Murni												Disdik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	108.05	108.06	98.06	108,07	104.89	98.30	106.63	100.00	90.00	Tidak Tercapai	Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	94.14	94.15	88.01	94,20	82.54	77.00	96.27	97.00	90.00	Tidak Tercapai	Disdik
5	Angka Partisipasi Kasar												Disdik
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	112.60	113.00	107.27	113.05	105.98	113.08	103.35	114.00	95.50	Tidak Tercapai	Disdik
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	104.10	104.30	107.80	104.80	106.40	105.00	105.40	105.50	95.50	Tidak Tercapai	Disdik
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	115.27	115.28	99.91	115.29	103.00	100.00	101.58	100.00	91.92	Tidak Tercapai	Disdik
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	30.93	30.94	95.32	30.95	89.00	97.00	93.26	98.00	89.48	Tidak Tercapai	Disdik
7	Angka Putus Sekolah												Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0	0.06	0	0,05	0	0.04	0	0.03	0.02	Tercapai	Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0	0.06	0	0,05	0	0.04	0	0.03	0.02	Tercapai	Disdik
8	Angka kelulusan												Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdik
9	Angka Melanjutkan (AM):												Disdik
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	111	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdik
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	110	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdik
10	Fasilitas Pendidikan:												Disdik
	Sekolah pendidikan	Persen	93.70	94.50	94.50	94.80	96.00	95.00	98.00	98.50	98.73	Tercapai	Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	SD/MI kondisi bangunan baik												
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	94.70	94.80	94.50	95.00	95.80	95.20	96.00	97.00	98.00	Tercapai	Disdik
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	33.14	33.15	39.00	33.16	46.00	33.17	44.00	44.00	44.00	Tercapai	Disdik
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	31.26	31.25	20.25	31.22	22.00	30.55	24.00	30.25	31.00	Tercapai	Disdik
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1 : 33	1 : 33	1 : 45	1 : 33	1:44	1 : 33	1: 44	1 : 32	0.06458333	Tercapai	Disdik
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	1 : 23	1 : 23	1 : 17	1 : 23	1:19	1 : 23	1:18	1 : 24	1:23	Tercapai	Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	99.73	100.73	102.02	101.05	100	101.37	102.50	100.00	100.00	Tercapai	Disdik
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99.98	99.98	NA	99.98	NA	99.98	99.98	99.98	99.98	Tercapai	Disdik
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	99,98	98.15	NA	97.80	NA	97.46	97.46	97.50	97.50	Tercapai	Disdik
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	87.87	88.00	86.90	88.10	89,20	88.20	89.43	90.00	92.30	Tercapai	Disdik
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Angka	49.00	50.00	48.50	50.55	50.20	49.50	48.80	50.00	48.00	Tidak Tercapai	Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	109.80	108.60	107.50	108.70	103.00	107.70	101.58	107.80	91.92	Tidak Tercapai	Disdik
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	86.02	94.15	86.80	94.20	89.00	90.20	93.26	94.00	89.48	Tidak Tercapai	Disdik
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	Angka	1.42	1.43	1.43	1.44	4.40	1.45	74.50	75.00	75.30	Tercapai	Disdik

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	dalam pendidikan kesetaraan												
2	KESEHATAN												
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	60 / 100.000 KH	55	74,50	50	96.7	65	73.26	60	59.89	Tercapai	Dinkes
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	2,95 / 1.000 KH	2.90	3.15	2.94	3.47	3.00	3.72	2.90	6.70	Tidak Tercapai	Dinkes
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	3,35/1.000 KH	3.35	3.36	3.34	3.58	3.20	3.89	3.10	7.08	Tidak Tercapai	Dinkes
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0.02	0.0185	0.02	0.0191	0.20	0.02	0.02	0.02	0.02	Tercapai	Dinkes
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0.74	0.80	1.33	0.84	1.35	0.88	1.53	0.92	2.97	Tercapai	Dinkes
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	Persen	96.10	97.00	93.10	98.00	94.90	99.00	96.10	100.00	97.50	Tidak Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	kompetensi kebidanan												
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	80	85	87	90	90	90	92	95	99.26	Tercapai	Dinkes
8	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.70	0.71	0.71	0.67	Tidak Tercapai	Dinkes
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98.50	99.00	63.20	99.5	72.10	92	98.53	100	92.65	Tidak Tercapai	Dinkes
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96.50	97.00	7.9	97.5	91.50	98.00	96.55	98.50	94.10	Tidak Tercapai	Dinkes
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	7 Kasus Negatif	0	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	1 kasus	7 Kasus Negatif	2.77	$\geq \frac{3}{100.00}$ 0	25.12	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
										penduduk usia < 15 tahun			
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	24,25	100	100	70	78.77	80	0.9831	Tercapai	Dinkes
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	58,88	100	100	80	107.12	100	1.121	Tercapai	Dinkes
15	Prevalensi Hipertensi	%	9.67	9.30	6.40	9.00	6.62	7.20	7.25	7.90	9.66	Tercapai	Dinkes
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2.40	2.35	2.08	2.30	1.58	2.00	2.05	2.05	2.5	Tercapai	Dinkes
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	81.22	86.00	60.84	86.50	44.24	84.50	84.38	86.5	74.28	Tidak Tercapai	Dinkes
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66/100.000 Penduduk	65.00	19.78	62.50	50	62.00	135.07	61.50	128.17	Tidak Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	95.00	95.30	50.03	95.40	92.00	95.60	94.49	95.70	94.38	Tidak Tercapai	Dinkes
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100	100	21	100	18.00	100	93.13	100	52.27	Tidak Tercapai	Dinkes
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,42	<0,5	0,42	<0,5	<0,5	<0,5	0.46	<0,5	0.47	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	97,2	100	100	100	96.11	100	102.46	100	109.9	Tercapai	Dinkes
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80	72	85	85	90	92	95	96	Tercapai	Dinkes
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24	97,83	31	91.53	38	109.47	100	93.96	Tidak Tercapai	Dinkes
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	96	91,1	97	90.46	93	96.11	96.2	99.70	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8 (2 puskesmas)	8	16 (4 puskesmas)	8	100.00	104.08	100	116	Tercapai	Dinkes
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persen	97.60	100	93,61	100	96.70	100	97.36	100	100	Tercapai	Dinkes
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	98	100	93,14	100	94.90	100	95.88	100	100	Tercapai	Dinkes
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	90.10	100	96,63	100	99.70	100	99.69	100	100	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	98	100	78,84	100	94.10	100	94.42	100	100	Tercapai	Dinkes
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	75	75	74.30	76	80.59	77	80.40	80.50	85.80	Tercapai	Dinkes
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
35	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	84	100	93.80	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	131.3	100	165.4	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
39	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	persen	2.40	0.19	0.19	0.19	0.28	0.19	0.29	0.29	0.29	Tercapai	Dinkes
40	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	persen	85.71	90	85.71	95	82	100	95.45	100	100	Tercapai	Dinkes
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	persen	100.30	100	93.61	100	96.7	100	97.36	100	100	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	persen	99.10	100	93,14	100	94.9	100	95.88	100	100	Tercapai	Dinkes
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	persen	103.50	100	96,63	100	99.70	100	99.69	100	100	Tercapai	Dinkes
44	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	78,84	100	94.10	100	94.42	100	100	Tercapai	Dinkes
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	51.00	100	46.60	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	78.67	100	18.78	100	65	100	104.26	100	100	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	60.20	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	69.80	100	68.80	100	101.90	100	103.63	100	100	Tercapai	Dinkes
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	102.91	100	88.50	100	104.50	100	103.69	100	100	Tercapai	Dinkes
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	89.20	100	88.40	100	76.30	100	131.43	100	100	Tercapai	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	110.80	100	104.10	100	50.6	100	110.65	100	100	Tercapai	Dinkes
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	86.38	100	95.70	100	92.7	100	109.07	100	100	Tercapai	Dinkes
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	PEKERJAAN UMUM												
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88.59	89	83.47	89.25	84.20	89.50	88.23	88.50	88.95	Tercapai	PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0.0660997	0.0642509	0.576	0.0634	0.1203	0.0625	0.817	0.825	0.197	Tidak Tercapai	PUPR
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88.59	89.00	83.47	89.25	84.20	89.50	88.23	88.50	88.95	Tercapai	PUPR

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	66.44	67.00	66.70	67.50	507.38	68.00	518.377	520.877	96.121	Tidak Tercapai	PUPR
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67.21	67.47	3.72	70.42	75.12	7.20	5.43	7.88	5.49	Tidak Tercapai	PUPR
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	11.01	21.80	11.17	32.60	25.11	43.40	25.86	54.20	20.15	Tidak Tercapai	PUPR
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	71.57	75	0.014	77.5	0.509	80	60.71	82.5	0.88	Tidak Tercapai	PUPR
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745	865	863	985	921	1.105	985	1.225	1195	Tidak Tercapai	PUPR

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	45.83	58.75	57.50	60	51.58	52.23	52.62	53.01	53.66	Tercapai	PUPR
	Rasio jaringan irigasi	Point	0.2578	0.3304	0.2600	0.3374	0.415	0.3445	0.3450	0.3515	0.3600	Tercapai	PUPR
10	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	90	91.03	91.04	92.06	91.71	92.54	94.81	96.77	82.46	Tidak Tercapai	PUPR
11	persentase penduduk berakses air minum	Persen	91.98	93.15	81.46	94.86	83.83	99.20	68.68	99.60	91.90	Tidak Tercapai	PUPR
12	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	91.98	93.15	81.46	94.86	83.83	99.20	68.68	99.60	91.90	Tidak Tercapai	PUPR
13	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	2.62	2.44	2.44	2.27	2.11	2.12	2.02	1.94	2.02	Tidak Tercapai	Perumkim

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
14	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	10.00	12.5	13.90	15	20.07	17.50	23.57	20.00	20.61	Tercapai	DLH
15	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	11.71	12.00	12.00	12.50	11.38	13.00	11.98	13.50	9.74	Tidak Tercapai	Perumkim
16	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0.02	0.0190	1.03	0.0200	1.57	0.0250	1.49	0.0300	1.52	Tercapai	Bagian Kesra SETDA
PENATAAN RUANG													
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	20	4,18* (RTH publik)	20	4,20* (RTH publik)	20	4,24* (RTH publik)	20	4,23* (RTH publik)	Tidak Tercapai	PUPR
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	35	37	0.0046	39		0.0055	0.323	0.0067	0.0035	Tidak Tercapai	PUPR
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	80	82	82	84	90	86	95.18	88	86.90	Tidak Tercapai	PUPR

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	rasio rumah layak huni	persen	17.28	16.17	18.37	16.36	17.36	16.54	18.52	18.52	21.16	Tercapai	Perumkim
2	rasio pemukiman layak huni	persen	95.14	95.47	95.51	95.80	90.99	96.13	96.31	96.46	89.13	Tidak Tercapai	Perumkim
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	70.59	74.80	75.00	76.79	80.02	78.77	82.19	96.46	92.82	Tidak Tercapai	Perumkim
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	2.62	2.44	3.99	2.27	2.12	2.12	2.02	1.94	2.02	Tidak Tercapai	Perumkim
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	4.31	3.77	9.78	3.32	3.90	2.82	3.78	2.27	5.68	Tercapai	Perumkim

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	1.09	1.07	0.64	1.05	1.05	1.03	-0.10	1.01	0.987	Tercapai	Perumkim
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	77.33	80.67	98.72	84	97.74	87.33	97.74	97.74	99.59	Tercapai	Perumkim
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen		100	100	100	84.85	85	100	90	100	Tercapai	Perumkim
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen		0	0	100	NA	85	100	100	100	Tercapai	Perumkim

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	100	93.22	94.01	86.68	86.68	80.77	76.82	74.17	72.36	Tercapai	Perumkim
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	26.80	25.20	24.61	23.22	19.98	21.23	17.81	19.25	7.18	Tidak Tercapai	Perumkim
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	8.16	11.53	11.53	15.11	10.72	11.91	10.72	13.10	12.04	Tidak Tercapai	Pe rumkim
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT													
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	1049	Tidak Tercapai	Satpol PP

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90	90	100	90	100	90	100	100	100	Tercapai	Satpol PP
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	90	90	100	90	100	90	100	100	100	Tercapai	Satpol PP
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	68	70	100	72.50	100	75	100	100.00	50.00	Tidak Tercapai	Damkar
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	75	77.50	77.50	80.00	94.00	82.50	95.00	100	35.29	Tidak Tercapai	Damkar
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	Tercapai	Damkar

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	114,412	492,202	315,572	492,202	2,963	492,202	3,195	492,202	28,200	Tidak Tercapai	BPBD
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jiwa	52.099	492,202	241,188	492,202	2,963	492,202	3,195	492,202	3,869	Tidak Tercapai	BPBD
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	12889	3000	2727	3000	2963	3000	2730	3,000	13230	Tercapai	BPBD
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	71.70	100	91.70	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Satpol PP

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Satpol PP
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DPKP
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	persen	75	75	87.10	87	100	90	95	95	82.14	Tidak Tercapai	DPKP
6	SOSIAL												
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	91.45	92	92	93	95	94	96	100	100	Tercapai	Dinsos
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	91.45	92	92	93	95	94	98	100	100	Tercapai	Dinsos
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	91.45	92	92	93	94	94	100	100	100	Tercapai	Dinsos

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	Persen	8.90	12.80	32.00	15.50	40	35.00	100	38.00	100	Tercapai	Dinsos
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	NA	3	3	50	60.35	86	90	100	100	Tercapai	Dinsos
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	24.32	26	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Persen	24.32	26	100	27	59,41	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	(534/1915X100%) = 27,88%	18.60	100	21.53	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	persen	(3523/3523X100%) = 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
1	TENAGA KERJA												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90.38	91.53	87.74	91.87	91.87	92.20	89,22*	92.51	90.61	Tidak Tercapai	Disnaker
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2189	2500	965	2500	2440	2500	7005	2500	6,729	Tercapai	Disnaker
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109,416	120,358	279,361	132,393	293,329	307,995	198,301	323,395	303,941	Tidak Tercapai	Disnaker
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	3,557,146	4,149,797	4,169,806	4,169,806	4,330,249	4,330,249	4,634,429	4,639,429	4,813,988	Tercapai	Disnaker
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Disnaker
6	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%)	Juta/Pekerja/Tahun	63.91	65.78	64,70	68.59	71.43	65.54	67.21	74.57	76.50	Tercapai	Disnaker
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	50	75	40	100	80	125	140	150	176	Tercapai	Disnaker

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	26	25	20	30	40	30	20	50	50	Tercapai	Disnaker
9	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	64.71	68.75	68.75	68.75	68.75	53.57	72.73	72.73	81.82	Tercapai	Disnaker
10	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	17.49	19.48	17,48	19.88	18.28	24.69	18.37	27.09	18.62	Tidak Tercapai	Disnaker
11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	66.24	65.78	64,70	68.59	71.43	65.54	67.21	71	76.50	Tercapai	Disnaker
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan	Persen	100	100	79.96	100	50.60	100	56.60	100	72.05	Tidak Tercapai	Disnaker

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan												
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	58.75	21.10	21.10	22.40	67.18	23.70	50.68	64.70	82.90	Tercapai	Disnaker
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2.2	2.30	1.87	2.40	52.3	2.50	NA	2.60	2.00	Tidak Tercapai	DP3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	18.18	18.18	22	18.18	22	22	22	22	22	Tercapai	DP3A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	11.72	12.22	7.39	12.72	NA	13.22	NA	13.72	NA	Data Tidak Tersedia	DP3A
4	Rasio KDRT	Persen	0.05	0.1	0.00019	0.15	0.31	0.00021	0.00013	0.00012	0.00014977	Tercapai	DP3A
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	26,88	26.95	50.77	27.08	36.23	27.18	36.56	36.56	47.66	Tercapai	DP3A
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DP3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DP3A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit												
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DP3A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	8,9	7,1	9	5,3	6	3,5	15	1,7	48.48	Tercapai	DP3A
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DP3A
11	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	1.70	3.50	3.50	5.30	6.30	7.10	0.00	19.70	100	Tercapai	DP3A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	47.16	56.60	55.31	66.03	68.15	75.47	80.00	95.60	100	Tercapai	DP3A
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99.93	99.94	93.92	99.95	96.50	99.96	92.06	99.97	99.84	Tidak Tercapai	DP3A
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	92.48	92.58	100.68	92.73	96.2	92.82	92.34	92.97	95.94	Tercapai	DP3A
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	97.49	97.58	100.72	97.63	provinsi	97.77	provinsi	97.81	92.26	Tercapai	DP3A
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen				PUSAT						Tercapai	DP3A
17	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	poin	31.0	NA	25.0	25.0	24.1	25.0	2.05	25.0	15.51	Tidak Tercapai	DP3A
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	poin	0.0149	NA	0.0119	0.0112	0.0150	0.0107	0.0180	0.0102	0.2111	Tercapai	DP3A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	instansi terkait Kabupaten /kota												
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	poin	0.0104	NA	0.0155	0.0090	0.1500	0.0088	0.1180	0.0087	0.0128	Tercapai	DP3A
3	PANGAN												
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/t ahun	230.61	246.61	231.20	254.87	156.18	151.84	164.92	154.87	161.00	Tercapai	DKPP
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap /hr	2512.80	2400	2,375	2400	2230	2247	2403	2400.00	2318.00	Tidak Tercapai	DKPP
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap /hr	89.40	68	68	63	63,6	64.30	81.20	63.00	76.40	Tercapai	DKPP
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	91.53	98.00	90.81	93,5	93.75	94.00	94.68	95.00	92.96	Tidak Tercapai	DKPP
4	PERTANAHAN												
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	60	100	100	100	100	100	100	Tercapai	SETDA

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DPMPTSP
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	77	70	73	75	75	80	80	85	85	Tercapai	DPMPTSP
5	LINGKUNGAN HIDUP												
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	DLH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	DLH

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	49	40.36	56.33	40.47	64.72	49.80	51.39	37.17	46.67	Tercapai	DLH
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	85.86	80.1	80.09	80.21	99.35	86.10	98.36	79.72	95.92	Tercapai	DLH
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah	Persen	50	50	50	55	67.55	34	54.55	54.55	57.14	Tercapai	DLH

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Daerah kabupaten/kota												
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	Ada	Tercapai	DLH
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	Ada	Tercapai	DLH
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota , lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	50	60	60	70	70	100	100	100	100	Tercapai	DLH

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75.37	76	77.20	76.5	81	75.00	81.32	81.32	79.03	Tidak Tercapai	DLH
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	6.26	6.4	7.61	6.6	7.85	6.80	7.80	7.80	7.81	Tercapai	DLH
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	81.47	80.10	84.81	81.5	88.85	81.80	89.15	89.15	86.84	Tidak Tercapai	DLH
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	55.29	50.396	55.45	51.371	58.597	52.35	64.29	53.439	58.400	Tercapai	DLH
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	77.04	76	77.20	76.50	81.19	75	81.32	81.32	79.03	Tidak Tercapai	DLH

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen	26.11	26	37.37	46	38.13	34	54.55	38	57.14	Tercapai	DLH
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Disdukcapil

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai	Disdukcapil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	75	80	98	85	99.34	90	99.31	99.5	100	Tercapai	Disdukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	75	76	95	80	96.43	82	96.51	98	98	Tercapai	Disdukcapil
8	Kepemilikan KTP	Persen	98	99.50	98	99.8	99.34	98	99.31	99.50	100.00	Tercapai	Disdukcapil
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	94.07	95	95	96	96.43	97	96.51	98	98	Tercapai	Disdukcapil
10	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	Persen	51	25	31	30	53.82	35	52.49	55	55	Tercapai	Disdukcapil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Tercapai	DP3A

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Tercapai	DP3A
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB												
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1.53	1.52	1.33	1.51	1.19	1.47	2.07	1.46	0.96	Tercapai	DPPKB
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,15	2,15	2.135	2,15	2.03	2.135	2,03*	2.135	1.870	Tercapai	DPPKB
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	45.94	48.64	61.11	Tercapai	DPPKB
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	35.14	35.14	44.44	Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	NA	5	5	5	5	5	13	13	13	Tercapai	DPPKB
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	NA	1	-	1	1	1	1	1	1	Tercapai	DPPKB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2	1.37	Tercapai	DPPKB
8	Ratio Akseptor KB	Persen	77,41	77,42	77,42	77,42	78.64	77,51	78.66	78.66	64.70	Tidak Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	77.41	77,42	77,42	77,42	78.64	77,51	78.66	78.66	64.70	Tidak Tercapai	DPPKB
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	14,42	14,41	16,23	14,40	12.09	15,75	12.09	15,00	9.30	Tercapai	DPPKB
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15	0,13	0.17	Tidak Tercapai	DPPKB
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,43	11,42	13,30	11,41	12.44	11,40	12.45	11,39	15.94	Tidak Tercapai	DPPKB
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi	Persen	22,36	22,40	20,27	22,44	21.13	20,35	20.36	20,40	19.80	Tidak Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Jangka Panjang (MKJP)												
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	77,41	77,41	77,42	77,42	78.64	77,51	78.66	78.66	64.70	Tidak Tercapai	DPPKB
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	66	66.05	53.01	66.06	58.48	66,07	95.4	95.4	100	Tercapai	DPPKB
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,73	52.74	31.97	52.75	40.57	52,76	39.81	52,77	71.90	Tidak Tercapai	DPPKB
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,75	25.76	18.03	25.77	26.51	25,78	8.46	25,79	75.93	Tercapai	DPPKB
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	40,68	42.18	49.18	43.48	50.00	44,59	50	50	114.71	Tercapai	DPPKB
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DPPKB
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,94	39.94	44.5	39.94	66.39	39,95	39.32	39,95	79.83	Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DPPKB
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	93,2	93.2	30	93.2	100	94,9	100	100	100	Tercapai	DPPKB
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	standarisasi pelayanan												
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.47	Tercapai	DPPKB
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70	77	77	79	79	81	100	100	81.63	Tidak Tercapai	DPPKB
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	35,13	35,30	35,30	35,47	35,47	35,64	35,47	35,81	49.89	Tercapai	DPPKB

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Tercapai	DPPKB
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	77.41	77,41	77,42	77.42	78.64	77,51	78.66	78.66	64.37	Tidak Tercapai	DPPKB
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	11.43	11,42	13,30	11.41	12.44	11.4	12.45	11.39	15.94	Tidak Tercapai	DPPKB
9	PERHUBUNGAN												
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	24.060.642	22,442,108	22,442,108	23,140,448	285,298	23,890,192	23,069,825	24,696,261	30,469,356	Tercapai	Dishub
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,000381	0.0021	0.0021	0.0024	0.000152	0.000435	0.000132	0.000309	0.0114894	Tercapai	Dishub
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5.851	4,504	4,504	5094	5304	5586	2836	5620	2015	Tidak Tercapai	Dishub
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	3	3	2	3	1	2	2	2	2	Tercapai	Dishub

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	1.11	1.36	1.36	1.22	1.11	1.11	0.000137	1.02	0.04	Tidak Tercapai	Dishub
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dishub
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	25,64	14.91	14.91	15.07	15.07	95.00	83.33	100	100	Tercapai	Dishub
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1.31	1.25	1.25	1.19	0.0019	1.13	1.56	1.56	0.0018	Tidak Tercapai	Dishub
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpa ng	24.261.237	16,466,81 4	16,466,81 4	21,457,80 0	285,298	25,297,272	4,997,609	27,597,02 4	30,469,356	Tercapai	Dishub
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpa ng	4.335.315	4,890,991	4,890,991	5,380,090	27,602	5,918,099	458,857	6,509,909	71,948	Tidak Tercapai	Dishub
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	rasio	0.82	0.77	0.77	0.83	0.78	0.80	0.78	0.7	0.78	Tidak Tercapai	Dishub
12	Kinerja Lalu Lintas	rasio	0.62	0.76	0.62	0.74	0.61	0.62	0.60	0.62	0.63	Tidak Tercapai	Dishub

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Kabupaten / Kota												
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	57	66	59.1	74	40.5	81	90	95	94	Tidak Tercapai	Diskominfo
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2.92	2.97	2.92	3.11	2.98	2.75	2.98	3.72	Tercapai	Diskominfo
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	7	14	14	21	26,67	28	30	34	37	Tercapai	Diskominfo
4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	persen	100	100	98	63	77.5	100	79.80	100	86.40	Tidak Tercapai	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Diskominfo
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persen	71.81	71.81	72,69	73.57	70	74,45	81.49	74.7	86.07	Tercapai	Diskominfo
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	62,26	65	65	67	66.2	10,33	18.75	18.75	21.40	Tercapai	DinKUKM dagin
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	8.30	8.70	8.70	9.20	7.00	9.80	8.96	9.00	10.14	Tercapai	DinKUKM dagin
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	0	180	124	180	1088	180	260	326	370	Tercapai	DinKUKM dagin
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	2,3 T	68 M	41 M	81 M	69,5 M	95	65.7	70	194	Tercapai	DinKUKM dagin
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	418	500	1127	500	0	500	593	621	682	Tercapai	DinKUKM dagin
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	150	50	150	223	150	31	59	87	Tercapai	DinKUKM dagin
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70	75	40	40		40	44	45	65	Tercapai	Disparbud
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	75	80	80	80	-	85	-	Tercapai	DinKUKM dagin

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	44	64	64	84	64	104	76	86	86	Tercapai	DinKUKM dagin
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	108	180	180	180	180	180	180	180	-	Tidak Tercapai	DinKUKM dagin
12	PENANAMAN MODAL												
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	3.1	2.5	1.63	2.53	0.618	2.55	1.571	2.58	1.175	Tidak Tercapai	DPMPTSP
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	0	1.2	0.6	0.79	0.36	1,2	1.54	1.54	-64,40	Tidak Tercapai	DPMPTSP
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	persen	100	100	46	100	85	90	154	100	-25	Tidak Tercapai	DPMPTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	NA	NA	NA	5	NA	5	NA	5	NA	Tercapai	Dispora
2	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	20	20	40	0	20	30	20	20	Tercapai	Dispora
3	Wirausaha muda	orang	25	30	30	35	35	35	200	200	150	Tidak Tercapai	Dispora
4	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	33,34	33,34	33,34	50.01	33.34	50,01	50	66,67	50	Tidak Tercapai	Dispora
5	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Rasio	0,001511 : 2,08	0,001552 : 2,08	0,001552 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001734 : 2,08	0,003264: 2,08	0,003264: 2,08	0,001773 : 2,08	Tercapai	Dispora

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0.27	0,01	0,014	0.004	1.4	0,0148	0.1128	0,0148	3.031	Tercapai	Dispora
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	24	25	4,33	25	4.33	5,01	2.29	5,51	21.17	Tercapai	Dispora
8	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	18	0	0	68	60	13	241	65	9	Tidak Tercapai	Dispora
14	STATISTIK												
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Tercapai	Diskominfo
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Tercapai	Diskominfo
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Tercapai	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Tercapai	Diskominfo
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Diskominfo
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Diskominfo
15	PERSANDIAN												Diskominfo
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	NA	20	20	30	30	60	81	85	86	Tercapai	Diskominfo

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	79	79	79	80	80	81	77	82	81	Tidak Tercapai	Diskominfo
16	KEBUDAYAAN												
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persen	10	10	0	10		10	30.84	10	76.5	Tercapai	Disparbud
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	32	18	18	18	18	25	20	25	25	Tercapai	Disparbud
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasangiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	15	15	19	17	21	17	38	38	41	Tercapai	Disparbud
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	2	2	0	2	0	2		1	1	Tercapai	Disparbud

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
17	PERPUSTAKAAN												
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustak aan	25,421	35,000	28,530	42,000	1084	60000	5249	108,000	99,615	Tidak Tercapai	Diskarpus
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	67.999	77,370	77,684	79,870	77,684	82370	78354	84807	80834	Tidak Tercapai	Diskarpus
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustak aan	6.60	7.50	8.40	7.70	7.3	8.00	8.96	8.20	0.43	Tidak Tercapai	Diskarpus
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ta hun	pemustak a	25,421	35,000	28,530	42,000	42,000	60000	5249	108,000	99,615	Tidak Tercapai	Diskarpus
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	37,017	39,517	38,255	42,017	38,255	44.517	38528	47,017	39,615	Tidak Tercapai	Diskarpus
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	7	6	9	8	11	12	13	20	Tercapai	Diskarpus
18	KEARSIPAN												Diskarpus

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	NA	25	67	45	45.48	70	70	95	41.17	Tidak Tercapai	Diskarpus
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	100	80	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Diskarpus
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN												
1	PARIWISATA												
1	Kunjungan wisata	Orang	7.965.987	7.004.033	3.457.722	7.704.436	3.803.494	4.183.843	5,174,327	5,174,327	5,650,637	Tercapai	Disparbud
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	2-3 hari	1-2 hari	Tidak Tercapai	Disparbud
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	239,350,000,000			168,205,200,000	185,661,140,961	277,530,000,000	287,860,632,150	312,500,000	328,823,584,610	Tercapai	Disparbud
2	PERTANIAN												
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7	7.14	7.18	7.21	7.28	7.20	7.28	7.33	7.28	Tidak Tercapai	DKPP
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	68.97	70,25	75,08	71,43	76.37	75.87	89.40	90.21	93.08	Tercapai	DKPP
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-2,72	-	19,83	NA	NA	-2.14	2.14	-2,19	-0.93	Tidak Tercapai	DKPP

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	13,14	-	13,40	NA	NA	13.67	12.92	13.91	10.81	Tidak Tercapai	DKPP
3	PERDAGANGAN												DinKUKM dagin
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	99.283.771,63 USD	1.1	-0,09 (90.705.930.244)	1.35	0,59 (99.874.168,96)	1.60	15.16	15.16	8.70	Tidak Tercapai	DinKUKM dagin
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P toko/ swalayan)	persen	7.21	10	21,06	13	21.50	22	26.92	30.77	76.20	Tercapai	DinKUKM dagin
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	16.10	20	87,44	22	99.26	23	98.08	98.08	55.43	Tidak Tercapai	DinKUKM dagin

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda terasah yang berlaku	persen	6.81	13.80	10.81	22.87	13.21	11,92	24.25	24.53	38.67	Tercapai	DinKUKM dagin
4	PERINDUSTRIAN												DinKUKM dagin
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	75	77.5	77.5	80	80.2	82,5	86.66	93.33	93.25	Tidak Tercapai	DinKUKM dagin
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	persen	130.30	8.21	7.06	9.00		7,06	45.60	48.98	7.80	Tidak Tercapai	DinKUKM dagin
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	-2,17	30	1.83		0	0	0	10	Tercapai	DinKUKM dagin

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	28.41	30	29.41	32		29,41	100	100	100	Tercapai	DinKUKMda gin
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100%	100%	100	100%		0	0	0	0	Tercapai	DinKUKMda gin
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan	persen	100	100	100	100		0	0	0	0	Tercapai	DinKUKMda gin

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota												
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	0	8	7.14	18		7,5	70	70	70	Tercapai	DinKUKM dagin
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN												
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	4980	5129	5150.99	5179	5206	4,182.00	5,211	5,303.70	3,364.51	Tidak Tercapai	DKPP
2	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	28,068,674.5 0	30,939,68 0	28,899,47 4	31,553,52 4	29,991,19 0	31,130,160	31,094,59 0	31,749,71 1	30,076,148	Tidak Tercapai	DKPP

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	Ton	5063,14	5,129	5150,99	5,179.00	5,205.69	5,253.90	5,211.14	5,303.70	3,364.51	Tidak Tercapai	DKPP
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN												
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Bapperida
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Bapperida

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Bapperida
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Bapperida
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	95.61	100	91.97	100	91.97	100	99.27	Tidak Tercapai	Bapperida
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	97.28	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Bapperida
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	64,66*	100	58.85	Tidak Tercapai	Bapperida
8	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai	Bapperida

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA												
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Tercapai	Bapperida
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Tercapai	Bapperida
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	-	1	-	-	-	-	Tercapai	Bapperida
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	95.61	100	91.97	100	91.97	100	99.27	Tidak Tercapai	Bapperida

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	97.28	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Bapperida
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	64,66*	100	58.85	Tidak Tercapai	Bapperida
Inspektorat Daerah (Perencanaan dan Keuangan)													
15	Maturitas SPIP	predikat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai	Inspektorat
16	Peningkatan kapabilitas APIP	predikat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai	Inspektorat
2	KEUANGAN												
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
2	Persentase SILPA	persen	10,88	10	11.90	9.5	6	9	5.11	8.5	1.77	Tercapai	BKAD
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,88	10	11.90	9.5	6	9	5.11	8.5	1.77	Tercapai	BKAD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai	BKAD

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	23,49	≥20	21.15	≥20	24.14	≥20	20.04	≥20	21.67	Tercapai	BKAD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	16,54	≥10	21.7	≥10	12.18	≥10	11.56	≥10	22.89	Tercapai	BKAD
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tercapai	BKAD
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	0.05	0.15	0.21	0.17	74.58	0.18	78.39	78.50	80.61	Tercapai	BKAD
9	Opini Laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	12	11	12	11	4	10	18.43	10	4.32	Tercapai	BKAD

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	persen	10	11	25	11	14	10	13.85	10	5.40	Tercapai	BKAD
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	4	0	6	0	11	0	3.32	0	0.99	Tidak Tercapai	BKAD
13	Manajemen Aset												BKAD
14	Adanya Daftar Aset Tetap	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
15	Penyusunan Manual daftar aset tetap	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
16	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
17	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
3	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT												

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	1	1	1	1	1	2	2	20	22	Tercapai	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	91.84	92	94.12	92.5	94.4	93	95.39	95.59	85.47	Tidak Tercapai	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	68	75	52.72	77.5	69	80	51.50	82.50	35.31	Tidak Tercapai	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	35	34	35	34	35	35	35	Tercapai	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	157	150	150	150	150	150	150	Tercapai	BKPSDM

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3690	3700	3651	3710	3483	3720	4015	3730	4723	Tercapai	BKPSDM
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	101.53	103.73	103.73	105.16	115.73	105.42	132.78	58.00	58,83	Tercapai	BKPSDM
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	9.52	10.43	10.43	11.96	11.56	24.20	21.16	25.07	21.16	Tidak Tercapai	BKPSDM
9	Rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	57.76	100	57.76	Tidak Tercapai	BKPSDM

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	100	100	100	83.30	100	100	100	Tercapai	Bapperida
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	100	100	100	100	100	66.70	80	85	100	Tercapai	Bapperida
	Penerapan SIDA:												Bapperida
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73.68	75	78.30	77.5	97.6	58.33	97.60	100	100	Tercapai	Bapperida
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	100	100	100	100	100	73	91.24	94	63	Tidak Tercapai	Bapperida
5	PENGAWASAN												
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	1.3	0.075	0.3359	0.050	0.016	0.320	0.225	0.210	0.006	Tercapai	Inspektorat

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	100	100	100	100	55.5	90	93.81	94	94.10	Tercapai	Inspektorat
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	100	100	100	100	94.39	80	91.63	91.65	90.20	Tidak Tercapai	Inspektorat
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	70	72.5	72.5	75	75	77.50	84.50	85	84.31	Tidak Tercapai	Inspektorat
6	SEKRETARIAT DPRD												
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Setwan

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		Evaluasi	Dinas
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai	Setwan

Sumber: Hasil Analisis, Bapperida Kota Bogor, 2024

2.2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kota Bogor meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2.2.4.1 Pendidikan

Jenis layanan dasar urusan Pendidikan bagi Kota Bogor antara lain: (1) pendidikan dasar usia dini; (2) pendidikan dasar; dan (3) pendidikan kesetaraan. Capaian kinerja ketiga jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.74
Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan	17,597	17,597	80	100	20	100

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
		Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)						
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	13,584	13,584	80	100	20	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	1,281	1,281	80	100	20	100

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang urusan Pendidikan, alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.75

Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	APBD	61.891.458.536
2	DAK	17.128.460.000

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

2.2.4.2

Kesehatan

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 2.76

Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19,351	19,351	80	100	20	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18,391	18,391	80	100	20	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17,769	17,769	80	100	20	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	84,983	84,983	80	96,41	19,28	99
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	164,261	164,261	80	83,81	16,76	96,76
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	737,301	737,301	80	100	20	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	85,71	85,71	80	89,54	17,91	97,91
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	67,228	67,228	80	100	20	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan	17,445	17,445	80	100	20	100

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1,465	1,465	80	100	20	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	37,93	37,93	80	100	20	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	24,267	24,267	80	100	20	100

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang urusan Kesehatan, alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.77
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	APBD	15.189.034.250
2	DAK	15.059.028.995

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

2.2.4.3 Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota ada dua (2) pelayanan yaitu sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.78

Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	241,744	222,822	18,922	73,74	23,32	4,66	78,4
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	24,744	191,39	50,354	63	17	3,4	66,74

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang urusan Pekerjaan Umum, alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.79

Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Urusan Air Minum	761.270.800
2	Urusan Air Limbah	19.187.360.329

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

2.2.4.4 Perumahan Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman terdiri dari:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.

Tabel II.2.11

Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	218	218	0	80	100	20	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	80	100	20	100

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang urusan Perumahan Rakyat, alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.80

Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	APBD	2.224.080.000
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR	77.500.000

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2024

2.2.4.5

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan trantibumlinmas terbagi menjadi sub urusan trantibum, sub urusan kebencanaan dan sub urusan pemadam kebakaran. Adapun target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 2.81

Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	29	29	0	80	100	20	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	13,230	13,230	0	80	100	20	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,869	3,869	0	80	100	20	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13,230	13,230	0	80	100	20	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	783	783	0	80	100	20	100

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang urusan Trantibumlinmas, alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.82

Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
Sub Urusan Trantibum		
1	APBD	2.340.951.000

No	Uraian	Anggaran (Rp)
Sub Urusan Kebencanaan		
1	APBD	1.588.496.500
Sub Urusan Pemadam Kebaran		
1	APBD	2.375.950.700
2	Dana Bagi Hasil	807.644.200

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2024

2.2.4.6 Sosial

Menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat lima jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.83
Hasil Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	727	727	0	80	100	20	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	90	90	0	80	100	20	100

No.	Jenis Layanan Dasar	Uraian	Capaian Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Capaian SPM (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	495	495	0	80	100	20	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	363	363	0	80	100	20	100
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban bencana kabupaten/kota	690	690	0	80	100	20	100

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2024

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang urusan Sosial alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.84
Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	330.551.979
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	165.048.650
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	225.066.341

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	58.414.000
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Benacna Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	93.361.705
Jumlah			872.442.675

Sumber : Laporan SPM Kota Bogor, 2024

2.3

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan bentuk dari “*gap expectation*”: antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Tabel 2.85

Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Belum meratanya akses dan mutu kesehatan	Masih terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan (tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan, SDM tenaga kesehatan, kemampuan finansial masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak)	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Masih belum optimalnya pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat (status mutu gizi keluarga dan pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular/degeneratif, akses masyarakat terhadap air minum, air limbah, persampahan, rumah layak huni, kebiasaan merokok, cuci tangan dengan sabun, kebersihan lingkungan, olahraga)	Urusan Kesehatan
		Masih belum optimalnya penguatan sistem kesehatan dalam penanganan wabah	Urusan Kesehatan
	Belum meratanya akses dan mutu pendidikan	Masih terjadinya ketimpangan layanan pendidikan (tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak)	Urusan Pendidikan
	Belum optimal layanan pendidikan Inklusif	Rendahnya pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan atas pendidikan inklusif	Urusan Pendidikan
		Kurangnya sarana prasarana untuk pendidikan inklusif	Urusan Pendidikan
		Tidak ada grand design pengembangan pendidikan inklusif	Urusan Pendidikan
	Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia	Masih terjadinya ketimpangan peran gender dan perlindungan anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata
		Belum optimalnya peran pemuda dan prestasi pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Sosial
		Belum optimalnya pengembangan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap aktivitas pembangunan	Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Masih belum optimalnya tumbuh kembang anak dan remaja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Masih belum optimalnya pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas	Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Belum optimalnya pengembangan literasi	Urusan Pendidikan
		Belum optimalnya produktivitas, daya saing, dan serapan tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUKM, Urusan Pariwisata Ekraf
		Belum optimalnya layanan untuk pemenuhan, dan integrasi data administrasi kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum tercapainya pengentasan kemiskinan	Belum meratanya peningkatan pendapatan terutama pada kelompok miskin dan rentan miskin	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin	Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan
		Masih adanya kantong kantong kemiskinan (kawasan permukiman kumuh padat penduduk) yang belum tertangani dan dilakukan penataan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Sosial, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan PUPR
		Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal yang berorientasi bagi pengembangan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial
	Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	Kualitas SDM masyarakat menengah bawah belum optimal	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya sector penyerap tenaga kerja <i>middle low labor</i>	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Para migran yang mengisi kebutuhan kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Belum optimalnya peluang Usaha Mikro Kecil Menengah menyerap tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan daerah	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya pengendalian Inflasi Daerah (masih cukup tingginya inflasi di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan transportasi)	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pertanian
		Belum terkendalinya tingkat inflasi daerah akibat naiknya sebagian kelompok pengeluaran	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Belum optimalnya pertumbuhan sektor utama struktur ekonomi kota	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Belum tingginya peran sektor jasa (tersier) dalam struktur perekonomian kota	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rendahnya daya saing wilayah dalam menyerap investasi yang menghasilkan tenaga kerja di Kota Bogor	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif	Belum ada grand design pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Belum meratanya kapasitas/pemahaman aparatur dalam pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Belum ada instansi khusus yang menangani perencanaan dan money terkait ekonomi	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Masih rendahnya integrasi UMKM sebagai bagian dari <i>Value Chain</i> industri yg lebih besar	Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Perdagangan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal	Belum optimalnya penanganan tenaga kerja informal	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya fasilitasi ruang aktivitas ekonomi informal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM	Belum teridentifikasi dengan jelas potensi ekonomi lokal	Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum terbentuknya instansi pembina dan penggerak ekonomi lokal dan ekonomi kreatif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya kualitas SDM pelaku ekonomi lokal/ UMKM	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Masih lemahnya pertumbuhan perusahaan <i>startup</i> di Kota Bogor	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
			Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Peran inkubasi bisnis belum optimal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya kualitas dan daya saing produk	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan UMKM	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Keterbatasan pemasaran produk	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya pemanfaatan IT & digital economy di lingkup UMKM	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya fasilitasi pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Belum optimalnya pengembangan, pemberdayaan, dan pendampingan bagi UMKM	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum optimalnya peran BUMD	Belum optimalnya pembinaan & pengawasan rutin BUMD	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya kebijakan pengelolaan BUMD sektor keuangan (BPR & LKM)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
		Kurangnya inovasi pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor	Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Penelitian dan Pengembangan
	Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Belum optimalnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Sosial
		Belum optimalnya perumusan dan penegakan ketentuan perundang undangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum stabilnya kondusifitas wilayah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, atau pekerjaan dengan upah kurang layak	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Perindustrian
		Tingginya pengeluaran kebutuhan RT/kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Belum optimal Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan UMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rendahnya peluang usaha bagi masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum optimalnya kebijakan struktur, sistem, dan mekanisme penetapan upah	Urusan penunjang perekonomian, Urusan Tenaga Kerja, Urusan industri
	Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	Peran pemerintah dalam mendorong peran serta masyarakat bagi peningkatan pendapatan masyarakat bawah belum optimal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Perindustrian
		Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal daerah pro masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Perindustrian, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan (panjang jalan, lebar jalan, kecepatan)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan jaringan penerangan jalan umum	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Perhubungan
		Belum optimalnya kualitas penataan transportasi perkotaan (layanan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan)	Urusan Perhubungan
		Belum meratanya layanan akses penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya ketersediaan utilitas pencegahan dan pengendalian resiko bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang kota	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup
		Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
	kualitas penataan kawasan perumahan permukiman	Terbatasnya aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kualitas PSU di kawasan perumahan permukiman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masih adanya backlog pemenuhan kebutuhan rumah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya kualitas penataan ruang	Belum terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)	Urusan PUPR dan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang kota	Urusan PUPR, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan	Masih belum terkendalinya kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Masih belum optimalnya konservasi kawasan lindung berupa sempadan Sumber Daya Air dan kawasan perlindungan plasma nutfah	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Pengawasan
		Belum optimalnya akuntabilitas keuangan pemerintah	Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Pengawasan
		Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Urusan Kepegawaian, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
			Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Kepegawaian
			Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Kepegawaian

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel analisis permasalahan sebagai penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terdapat masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang saling terkait dalam menganalisis sasaran pembangunan daerah di Kota Bogor. Masalah pokok pertama, yaitu belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di mana dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan belum optimal. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya ketimpangan layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat yang masih belum optimal, serta layanan pendidikan inklusif baik pada pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan atas pendidikan inklusif, sarana prasarana untuk pendidikan inklusi, dan grand design pengembangan pendidikan inklusif juga belum terlaksana dengan baik dan efektif. Pembangunan daya saing sumberdaya manusia juga dirasa kurang optimal karena masih terjadinya ketimpangan peran gender, tingginya angka pengangguran, dan minimnya peran pemuda dalam pembangunan. Selain itu dalam pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas, produktivitas tenaga kerja, layanan untuk pemenuhan administrasi kependudukan, dan kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja.

Masalah pokok kedua, yaitu belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya dalam pengentasan kemiskinan baik pada kebijakan, dan beragam program belum efektif. Selain itu dalam integrasi peran berbagai aktor pada lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Kemudian masih tingginya ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini pendapatan dan pekerjaan masyarakat masih banyak yang kurang layak, padahal pengeluaran kebutuhan RT/kebutuhan dasar tinggi. Selain itu optimalisasi dalam kebijakan peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah dan struktur pengupahan juga belum efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Masalah pokok ketiga, yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah

lingkungan. Padahal hal ini mampu menunjang daya saing ekonomi daerah. Konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal, penyediaan layanan utilitas perkotaan dalam hal ini yaitu layanan akses penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman, dan utilitas pencegahan serta pengendalian resiko bencana baik penanganan genangan dan banjir dan penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang kota belum optimal. Selain itu masalah lainnya yaitu belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman di mana dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan, aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kualitas PSU di kawasan perumahan permukiman, penyediaan Rumah Layak Huni masih terbatas, serta masih adanya backlog pemenuhan kebutuhan rumah. Kemudian, belum optimalnya kualitas penataan ruang, melalui struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), pengawasan dan pengendalian tata ruang kota, pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan belum optimal.

Masalah pokok keempat, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel belum terwujud, baik dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya yang belum berbasis elektronik, akuntabilitas kinerja pemerintah, maupun akuntabilitas keuangan pemerintah. Selain itu budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan juga belum optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- 1) Belum optimalnya mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah. penyediaan sarana dan prasarana sekolah, daya tampung antara SD, SMP, dan SMA tidak seimbang sehingga akan dibangun sekolah menengah baru untuk menyamakan jumlah SMP dan SMA. Kondisi pendidikan mutlak harus ditambahkan sarana dan prasarana di daerah yang belum

terlayani. Sehingga perlu distribusi sekolah yang belum terlayani;

- 2) Belum optimalnya kemampuan literasi pada SD Keagamaan Negeri dan Swasta, Kesetaraan Negeri dan Swasta;
- 3) Belum Optimalnya Kemampuan Numerasi pada SD Umum Negeri, Keagamaan Negeri dan Swasta;
- 4) Belum Optimalnya Kemampuan Numerasi pada SD, SDLB Swasta, SD Kesetaraan;
- 5) Belum Kondusifnya Iklim Keamanan dan Kebhinekaan Sekolah pada SD Keagamaan Negeri;
- 6) Belum Kondusifnya Iklim Kebhinekaan pada SDLB Swasta;
- 7) Belum Kondusifnya Iklim Inklusivitas pada SD Keagamaan Negeri, SD Kesetaraan Negeri dan Swasta;
- 8) Belum tercapainya target rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- 9) Belum optimalnya tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan dan SDM kesehatan;
- 2) Belum optimalnya jaminan kesehatan kepada masyarakat;
- 3) Belum optimalnya layanan puskesmas dan posyandu;
- 4) Belum meratanya akses dan mutu kesehatan;
- 5) Belum tercapainya target penurunan balita gizi buruk dan gizi kurang;
- 6) Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup yang masih tinggi yakni di angka 6,7;
- 7) Rasio angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup yang masih tinggi yakni di angka 7,08;
- 8) Belum tercapainya target anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak;
- 9) Angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk yang masih tinggi ditandai dengan realisasi di tahun 2023 mencapai 128,17;
- 10) belum optimalnya cakupan rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- 11) belum terlayannya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan balita untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar 100%;

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sub bidang Penataan Ruang

- a) Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau publik di tandai dengan rasionya yang rendah yaitu 4,23%;
- b) Belum optimalnya realisasi program pemanfaatan ruang pada RTRW
- c) Penegakan hukum penataan ruang masih belum optimal

2) Sub Bidang Pekerjaan Umum

- a) Belum tercapainya target proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ditandai dengan realisasi ditahun 2023 sebesar 88,95;
- b) Persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 20,15%;
- c) Terdapat lokasi rawan longsor yang belum dibangun TPT-nya;
- d) Belum meratanya layanan akses penyediaan air minum yang layak dan aman
- e) Belum meratanya layanan akses penyediaan air limbah yang layak dan aman
- f) Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi local

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Persentase luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan, yang masih tinggi dan belum mencapai target yaitu 2,02% ;
- 2) Belum optimalnya kualitas permukiman layak huni melalui Pengurangan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang belum optimal, masih 92.82 %

- 3) Belum terpenuhinya target di tahun 2023 untuk jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum), sebanyak 12,04%.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih minimnya masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, ditandai dengan realisasi 2023 yang belum mencapai target;
- 2) Belum tercapainya 100% kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Belum optimal dalam perlindungan dan pemberdayaan PPKS;
- 2) Belum tercapainya pengentasan kemiskinan;
- 3) Terwujudnya daya saing sumberdaya manusia;
- 4) Belum optimalnya fasilitasi penyandang disabilitas baik fisik maupun intelektual

2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Tingkat penganggaran terbuka masih tinggi sebesar 9,39%
- 2) Belum optimalnya tingkat kesempatan kerja yang ada ditandai dengan realisasi 2023 sebesar 90,61%;
- 3) Belum sepenuhnya pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan;
- 4) Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja ditandai dengan pencapaian di tahun 2022 sebesar 67,21%;
- 5) Banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi;
- 6) Minimnya rasio penduduk yang bekerja;
- 7) Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah;
- 2) Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah dan swasta masih rendah;
- 3) Minimnya layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- 4) Rasio kekerasan terhadap perempuan dengan TPPO per 100.000 penduduk perempuan masih tinggi.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Masih rendahnya pemanfaatan potensi pemanfaatan pekarangan melalui *urban farming* sebagai upaya pemenuhan kemandirian dan ketahanan pangan;
- 2) Inflasi menyebabkan akses pangan bagi masyarakat miskin masih kurang;

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- 1) Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan, dan sengketa peruntukan/penggunaan lahan;
- 2) Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum masih belum terpenuhi terutama proyek-proyek strategis;
- 3) Masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum jelas legalitasnya.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan;
- 2) Menurunnya kualitas indeks kualitas udara;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;
- 4) Pengelolaan TPA tidak efisien;
- 5) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

- 6) Pengolahan limbah B3 masih belum banyak dimiliki oleh pengusaha;
- 7) Penegakan hukum lingkungan belum optimal;
- 8) Penanganan sampah belum optimal.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Bogor dan penduduk non permanen di Kota Bogor;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah;
- 3) Belum 100% penduduk berusia 0 – 17 tahun memiliki kartu identitas anak.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Lembaga pemberdayaan masyarakat belum optimal dalam partisipasi masyarakat;
- 2) Program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal;
- 3) Kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Tingkat kelahiran yang semakin menurun, nilai TFR 1,8 dan jumlah rata-rata anak per keluarga sebesar 1,3;
- 2) Belum sepenuhnya keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 3) Kebutuhan ber-KB belum sepenuhnya terpenuhi.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Minimnya rasio jumlah uji KIR angkutan umum;

- 2) Belum optimalnya program reduksi angkutan kota dan angkutan umum massal;
- 3) Rasio konektivitas Kabupaten/Kota dan kinerja lalu lintas belum mencapai target di tahun 2023;
- 4) Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Penerapan proses bisnis dan rencana induk SPBE belum dipantau dan dievaluasi secara berkala;
- 2) Masih banyak aplikasi yang belum terintegrasi dengan suatu layanan SPBE lain;
- 3) Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;
- 4) Kualitas dan kuantitas sarana prasana penunjang teknologi informasi pemerintah yang belum optimal;
- 5) Belum terpenuhinya 100% keterbukaan informasi publik;
- 6) Belum tersedianya fasilitas penyimpanan data pemerintah yang memenuhi standar.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) UMKM belum berdaya saing tinggi;
- 2) Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah dikarenakan manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah. terbatasnya akses permodalan, terbatasnya akses pemasaran produk;
- 3) Peran dan daya saing koperasi masih rendah;
- 4) Belum banyaknya koperasi yang berkualitas.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- 1) Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN;
- 2) Investasi Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah;
- 3) Ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kebijakan investasi, dan ketersediaan SDM berkualitas masih menjadi

pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya di Kota Bogor;

- 4) Pelayanan berusaha masih terkendala pemahaman proses perizinan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- 1) Daya saing pemuda masih rendah karena tingkat pendidikan;
- 2) Keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan masih rendah;
- 3) Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih belum optimal;
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih rendah
- 5) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik bagi pemuda perempuan (gender);
- 6) Masih terbatasnya kesempatan bagi pemuda disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik;
- 7) Masih belum optimalnya kreativitas dan inovasi pemuda;
- 8) Masih belum optimal peran dan kapasitas kelembagaan kepemudaan;

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral ;
- 2) Belum efektifnya pengelolaan data statistik dalam sistem portal satu data;
- 3) Belum adanya regulasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- 4) Masih lemahnya analisa data statistik sektoral sehingga pemanfaatan data tersebut menjadi kurang efektif dan berdaya guna;
- 5) Belum adanya data indikator makro di level kecamatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sistem keamanan data dan informasi masih belum dapat memenuhi standar.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- a. Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs, dan Kawasan cagar budaya/pusaka;
- b. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya lokal.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Masih rendahnya budaya literasi masyarakat;
- b. Belum maksimalnya masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan;
- c. Keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung;

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- a. Organisasi kearsipan belum berfungsi secara optimal;
- b. Kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja sesuai standar;
- c. Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

2.3.4 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Inovasi atraksi wisata yang masih rendah;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata masih belum optimal
- 3) Pemasaran pariwisata belum optimal dan terintegrasi;

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- 1) Produksi Pertanian mengalami tren perlambatan/penurunan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, dan belum optimalnya penggunaan dan penyediaan sarana prasarana pertanian, serta belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian;

- 2) Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dapat mengandalkan pada ketersediaan lahan yang terbatas;
- 3) Produktivitas pertanian yang belum optimal.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Inflasi yang cukup tinggi;
- 2) Perlindungan konsumen masih belum optimal;
- 3) Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan;
- 4) Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor;
- 5) Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor;
- 6) Belum semua pelaku bisnis di kota bogor siap menghadapi ekonomi digital.
- 7) Pengawasan harga kebutuhan pokok masih belum optimal.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- 1) Industri kecil dan menengah masih terkendala berkembang karena keterbatasan regulasi pada tata ruang;
- 2) Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah.

2.3.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Fungsi Penunjang

a. Urusan Perencanaan

- 1) Belum optimalnya sinergitas antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Sektoral;
- 2) Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan *top down-bottom up*) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
- 3) Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;

- 4) Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

b. Urusan Keuangan

- 1) Belum optimalnya pendapatan daerah Kota Bogor terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- 3) Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- 5) Pengamanan terhadap aset dan BMD khususnya tanah belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

c. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD;
- 2) Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
- 3) Perangkat daerah masih kekurangan formasi ASN baik dari kuantitas dan maupun yang sesuai dengan analisis jabatan;
- 4) Penyusunan indikator kinerja individu, dan pemberian *reward punishment* belum optimal;
- 5) Kinerja non ASN belum terkait dengan kinerja perangkat daerah
- 6) Rasio pegawai fungsional belum mencapai target.

d. Urusan Penelitian Dan Pengembangan

- 1) Belum optimalnya peran litbang/riset dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kelitbangan.;
- 3) Belum sinergisnya program-program berbasis kelitbangan antar Perangkat Daerah;

- Masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat tentang hasil kelitbangan Kota Bogor.

2.3.6 Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung/Sekretariat Daerah.

- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif;
- Sistem Pengawasan Internal Pemerintah belum optimal;
- Penerapan zona integritas masih belum optimal.

2.3.7 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan isu strategis guna menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi. Berikut ini adalah penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bogor Tahun 2023 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.

Tabel 2.86
Identifikasi isu strategis

Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
Tata kelola pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan manusia belum optimal	- Belum meratanya akses dan mutu kesehatan - Belum meratanya akses dan mutu pendidikan - Belum optimal layanan pendidikan Inklusif - Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia - Belum tercapainya pengentasan kemiskinan	Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
	6. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	
Pengembangan daya saing ekonomi daerah belum optimal	1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah 2. Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif 3. Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM 5. Belum optimalnya peran BUMD 6. Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 7. Masih tingginya ketimpangan pendapatan 8. Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi
Belum optimalnya Ketersediaan infrastuktur yang berkualitas serta lingkungan yang sehat	1. Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal 2. Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan 3. Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman 4. Belum optimalnya kualitas penataan ruang 5. Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel 2. Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bapperida, data diolah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tahun 2025 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro menggambarkan arah dan kebijakan ekonomi Kota Bogor tahun 2025 berdasarkan analisa dan proyeksi dengan berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2023. Dalam perumusan kebijakan perekonomian tersebut mempertimbangkan pula kebijakan pembangunan ekonomi Jawa barat, Nasional dan Global.

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2025, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor. Kerangka pendanaan menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor untuk tahun 2025, mempertimbangkan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 serta kondisi perekonomian tahun 2023 dan awal tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota

Bogor tahun 2025 memperhatikan pula kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Global.

3.1.1 KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BOGOR

Kondisi perekonomian Kota Bogor tahun 2023 tidak bisa terlepas dari kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, yang mana berupaya untuk mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tidak terpusat serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan peningkatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok. Hal ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh positif bagi pembangunan ekonomi daerah Kota Bogor salah satunya dalam program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi serta daya tarik potensi ekonomi daerah Kota Bogor. Pembangunan ekonomi Kota Bogor dapat ditentukan melalui berbagai macam aspek daya saing ekonomi masyarakat yang dapat diukur melalui indikator makro ekonomi yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor.
2. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor.
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita) Kota Bogor.
4. Tingkat Inflasi daerah Kota Bogor.
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini rasio).
6. Penurunan Angka Kemiskinan Kota Bogor.
7. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Bogor.

Berikut ini adalah capaian kinerja indikator ekonomi Kota Bogor selama kurun waktu 2018-2023.

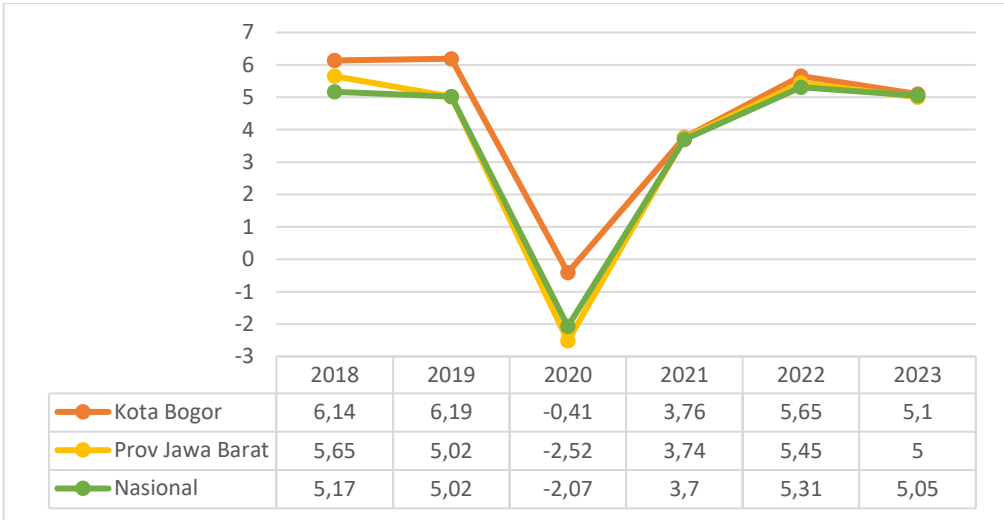
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebelum pandemi covid-19 berada di kisaran 6 persen, dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 saat pandemi covid-19, dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai -0,41 persen. Namun, sejalan dengan dilaksanakannya berbagai program pemulihan ekonomi, maka perekonomian Kota

Bogor mulai bangkit dan ini terlihat pada tahun 2021 mencapai 3,76 persen dan meningkat lagi di tahun 2022 mencapai 5,65 persen. Namun, di tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 0,55 persen menjadi sebesar 5,10 persen, sebagaimana terlihat pada grafik 3.1 berikut:

Grafik 3.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dengan
capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penurunan LPE tidak hanya dialami oleh Kota Bogor tapi juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Bogor tahun 2023 masih lebih tinggi meskipun mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan provinsi dan nasional. LPE Jawa Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 5 persen, mengalami penurunan 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan LPE Nasional adalah sebesar 5,05 persen, turun 0,26 persen.

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB Atas Dasar Harga konstan disusun berdasarkan

harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2019-2023 diperlihatkan pada tabel 3.1:

Tabel 3.1

Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp), 2019 -2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	239,77	245,16	258,71	267,41	275,95
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6.065,72	6.015,39	6.283,63	6.603,00	6.864,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	771,59	725,41	813,13	893,01	869,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,73	36,05	39,77	42,44	47,06
F	Konstruksi	3.829,21	3.604,70	3.659,26	3.672,50	4.094,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.744,72	6.210,45	6.379,30	6.722,52	6.973,02
H	Transportasi dan Pergudangan	3.933,69	3.850,16	3.961,62	4.352,35	4.744,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.503,11	1.530,33	1.550,68	1.734,17	1.825,36
J	Informasi dan Komunikasi	2.253,82	3.047,81	3.182,27	3.344,93	3.563,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.187,59	2.214,26	2.245,47	2.223,68	2.246,72
L	Real Estat	736,54	719,17	821,06	877,63	896,5
M,N	Jasa Perusahaan	691,04	617,58	598,73	666,39	673,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726,85	721,13	746,40	730,75	745,61
P	Jasa Pendidikan	967,83	1.041,70	1.096,42	1.195,60	1.241,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	479,73	485,70	540,88	595,55	606,70
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.131,80	1.097,74	1.195,11	1.336,93	1.388,12
Produk Domestik Regional Bruto		32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36

*Angka Sementara/ Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/ Very preliminary figures

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebesar 37,06 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 1,8 triliun dibandingkan 2022 yaitu sebesar 35,26 triliun rupiah. Dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tersebutlah didapat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yaitu sebesar 5,10 persen, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,65 persen.

Jika dilihat dari nilai PDRB masing-masing sektor usaha, maka hampir semua sektor usaha mengalami kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Hanya satu sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Pengadaan listrik & gas yang turun dari 893,01 milyar tahun 2022 menjadi 869,60 milyar di tahun 2023 atau turun sebesar 23,41 milyar. Laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor ADHK dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019–2023

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,63	2,25	5,53	3,36	3,20
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	5,72	-0,83	4,46	5,08	3,96
D	Pengadaan listrik dan gas	-4,54	-5,99	12,09	9,82	-2,62
E	Pengadaan air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,58	10,16	10,32	6,72	10,87
F	Konstruksi	9,60	-5,86	1,51	0,36	11,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,85	-7,92	2,72	5,38	3,73
H	Transportasi dan Pergudangan	8,58	-2,12	2,90	9,86	9,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	1,81	1,33	11,83	5,26
J	Informasi dan Komunikasi	7,55	35,23	4,41	5,11	6,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,00	1,22	1,41	-0,97	1,04
L	Real Estate	7,65	-2,36	14,17	6,89	2,16
M, N	Jasa Perusahaan	9,21	-10,63	-3,05	11,30	1,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,18	-0,79	3,50	-2,10	2,03
P	Jada Pendidikan	9,10	7,63	5,25	9,05	3,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,47	1,24	11,36	10,11	1,87

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
R, S, T, U	Jasa lainnya	7,71	-3,01	8,87	11,87	3,83
Produk Domestik Regional Bruto		6,19	-0,41	3,76	5,65	5,10

*Angka sementara /Preliminary Figures
 **Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures
 Sumber : BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,62 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor konstruksi yang tumbuh 11, 49%, diikuti oleh sektor Pengadaan air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh 10,87%. Di urutan ketiga adalah sektor transportasi dan perdagangan yang tumbuh sebesar 9%.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
 Tahun 2019–2023

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,66	0,69	0,70	0,71	0,68
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	18,12	18,08	19,16	18,98	18,70
D	Pengadaan listrik dan gas	4,17	4,01	4,29	4,47	4,18
E	Pengadaan air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,13	0,13	0,13	0,15
F	Kontruksi	12,16	11,56	11,24	10,90	11,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,32	19,43	19,22	19,11	19,23
H	Transportasi dan Pergudangan	12,96	12,51	11,88	12,36	13,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	4,94	4,87	5,11	4,91
J	Informasi dan Komunikasi	4,67	6,42	6,02	5,68	5,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,24	7,24	7,21	7,04	6,71
L	Real Estate	2,19	2,14	2,34	2,39	2,26
M, N	Jasa Perusahaan	2,26	2,04	1,94	2,09	1,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,68	2,62	2,63	2,35	2,24
P	Jada Pendidikan	3,11	3,53	3,56	3,61	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,44	1,62	1,63	1,57
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,20	3,22	3,20	3,44	3,31

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka sementara /Preliminary Figures
 **Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures
 Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor

Dari tabel diatas dapat dilihat sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB Kota Bogor ADHB. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Bogor konsisten didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB Kota Bogor ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran adalah pada table 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta) Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
Konsumsi Rumah Tangga		45.582,47	45.013,83	47.301,11	52.212,39	56.362,06
Konsumsi LNPRT		790,72	765,21	788,75	860,78	958,04
Konsumsi Pemerintah		4.972,04	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01
PMTB		15.722,78	14.605,10	16.435,04	17.441,68	19.739,33
Perubahan Inventori		2.135,03	855,79	-529,40	-18,40	7,44
Net (Expor Impor)		(23.005,29)	(20.280,18)	(20.613,76)	(22.578,58)	25.584,13)
Total PDRB		46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76

*Angka sementara
 **Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Pengeluaran

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Kota Bogor. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang harus dibayarkan serta peningkatan volume pada setiap komponen PDRB.

Pada tahun 2020 nilai PDRB mengalami penurunan -285,9 miliar rupiah yang disebabkan karena turunnya volume pada setiap komponen dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 Nilai PDRB mulai meningkat dengan hingga mencapai nilai 48.325,64 miliar rupiah dan 52.914,60 miliar rupiah, seiring dengan

dilaksanakannya program-program pemerintah untuk pemulihan perekonomian paska pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, nilai PDRB Kota Bogor meningkat cukup signifikan, hingga mencapai nilai 57.003,76 miliar rupiah. Peningkatan tersebut disebabkan tidak hanya karena adanya pengaruh perubahan harga, namun juga karena adanya perubahan volume.

Selain atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Tabel 3.5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar) Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Konsumsi Rumah Tangga	30.750,85	29.733,52	30.659,69	32.438,61	33.546,74
Konsumsi LNPRT	582,55	552,89	563,21	589,91	626,92
Konsumsi Pemerintah	3.181,39	3.094,63	3.011,38	2.983,11	3.274,02
PMTB	11.293,06	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00
Perubahan Inventori	1.299,59	519,63	-300,58	-10,40	4,05
Net (Expor Impor)	-14.811,69	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53	-12.777,35
PDRB	32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Pengeluaran

Dari tabel 3.5 di atas, dapat dilihat bahwa ada pola yang sama dengan PDRB ADHB menurut pengeluaran, dimana pada tahun 2020 nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 132,99 yang disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya volume dari semua komponen PDRB pengeluaran, dan kemudian meningkat di tahun 2021 sampai dengan 2023.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Konsumsi Rumah Tangga	98,67	98,04	97,88	98,67	98,87
Konsumsi LNPRT	1,71	1,67	1,63	1,63	1,68
Konsumsi Pemerintah	10,76	10,79	10,23	9,44	9,69
PMTB	34,03	31,81	34,01	32,96	34,63
Perubahan Inventori	4,62	1,86	-1,10	0,03	0,01
Net (Expor Impor)	(49,80)	(44,17)	(42,66)	(42,67)	(44,88)
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2024

Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, sebagian besar PDRB Kota Bogor digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu di atas 30 persen. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2019-2023 nilai impor masih lebih besar dibandingkan nilai ekspor di Kota Bogor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada level 9,69 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisilain, pada tahun 2019-2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor atau sering disebut net import, menunjukkan nilai negatif yang mengindikasikan nilai impor barang dan jasa yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor.

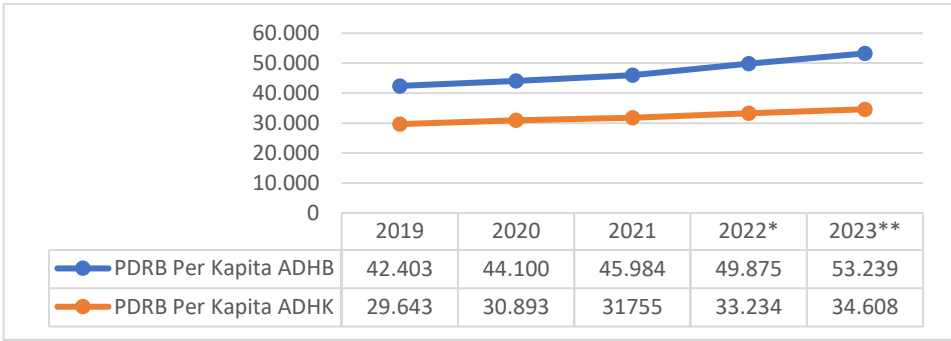
3.1.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita dapat dilihat untuk menggambarkan kemakmuran penduduk di suatu daerah. Besar

kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Grafik 3.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHB dan ADHK Kota Bogor Tahun 2019-2023

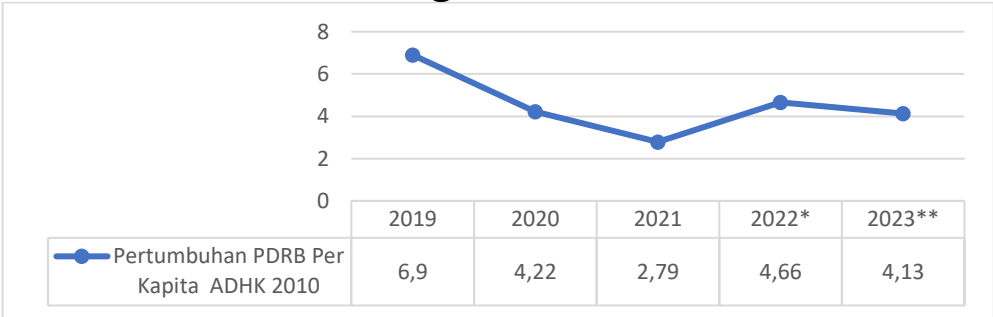


Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir PDRB per kapita Kota Bogor baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 nilai PDRB Per Kapita ADHB kota Bogor naik sebesar 3.364 ribu rupiah dari tahun 2022, akan tetapi kenaikan PDRB Per Kapita ADHB tidak dapat dijadikan patokan untuk melihat peningkatan kemakmuran secara riil, karena dapat dipengaruhi oleh inflasi. Untuk melihat peningkatan kemakmuran yang lebih riil dapat dilihat dengan peningkatan PDRB Per Kapita ADHK tahun 2010. Nilai PDRB ADHK tahun 2010 Kota Bogor mengalami peningkatan dari 33.234 di tahun 2022 menjadi 34.608 di tahun 2023, atau naik sebesar 1.374 rubu rupiah.

Grafik 3.3

Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bogor Tahun 2019-2023



*Angka sementara /Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber : Diolah dari data BPS Kota Bogor, Tahun 2024

Meskipun nilai PDRB Per Kapita ADHK tahun 2010 cenderung terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, namun pertumbuhan yang terjadi dari tahun ke tahun berbeda-beda. Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK tahun 2010 Kota Bogor sebelum pandemi yaitu pada tahun 2019 adalah sebesar 6,9%. Dengan terjadinya pandemi Covid-19, pertumbuhan melambat hingga mencapai titik terendah di tahun 2021, dimana PDRB per kapita ADHK hanya tumbuh sebesar 2,79%. Angka ini kemudian membaik pada tahun 2022 yang mencapai angka 4,66% namun kemudian sedikit melambat di tahun 2023. Tahun 2023 pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK tahun 2010 Kota Bogor adalah sebesar 4,13%, sejalan dengan turunnya laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor yang juga turun di tahun 2023.

3.1.1.4 Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2023 untuk kelompok makanan sebesar 950.587 rupiah per kapita per bulan atau sebesar 34,78 persen dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar Rp.1.783.683 atau sebesar 65,26% persen. Di tiga tahun terakhir, secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bogor sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga, diperlihatkan di tabel 3.7:

Tabel 3.7

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)

Kota Bogor Tahun 2021-2023

Kelompok Komoditas	2021	2022	2023
Makanan	821.693	751.435	950.587
Non Makanan	1.138.861	1.040.157	1.782.683
Jumlah pengeluaran	1.960.500	1.791.592	2.733.270

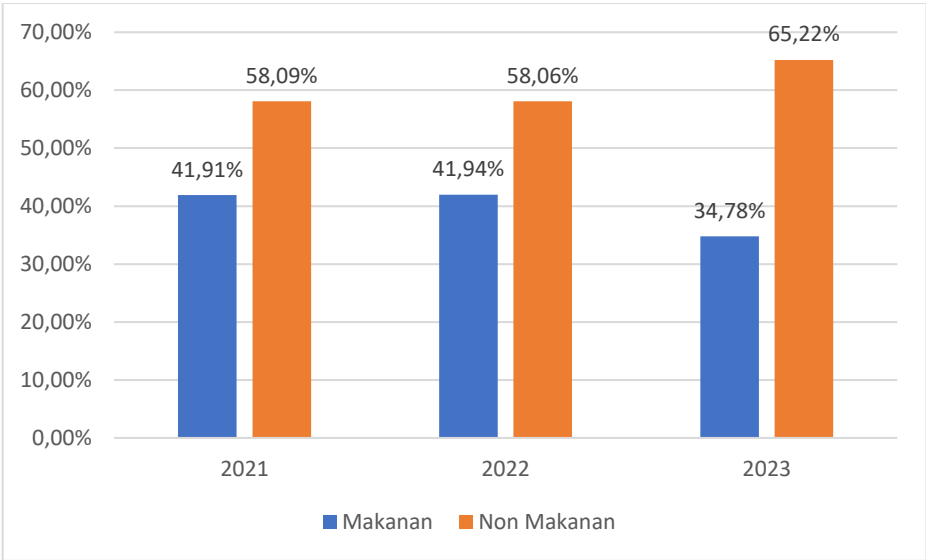
Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Pengeluaran perkapita penduduk Kota Bogor tahun 2023 sebesar Rp2.733.270 mengalami peningkatan setelah turun di tahun 2022 yang hanya Rp. 1.791.592. Dilihat dari persentase pengeluarannya, terlihat adanya perubahan persentase di tahun 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan ada di kisaran 41,91 hingga 41,94 persen, sedangkan di tahun 2023, persentase pengeluaran untuk makanan menurun menjadi 34,78%. Persentase pengeluaran perkapita sebulan tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Grafik 3.4 di bawah ini:

Grafik 3.4

Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Bogor

Tahun 2021-2023

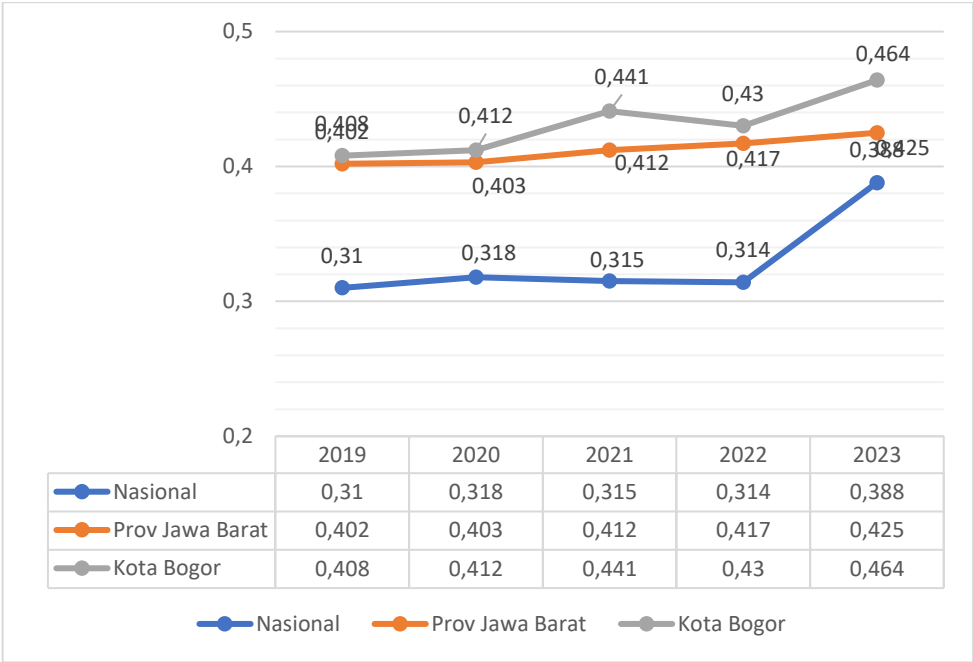


Sumber: Diolah dari data BPS, 2024

Pemerataan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dapat dilihat dari angka gini rasio pada daerah tersebut. Gini rasio menggambarkan Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Nilai gini rasio Kota Bogor tergambar pada Grafik 3.5 di bawah ini.

Grafik 3.5

Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah sempat turun di tahun 2022, gini rasio Kota Bogor kembali naik ditahun 2023 yaitu sebesar 0,464. Hal ini berarti bahwa ketimpangan di Kota Bogor kembali naik, sebagaimana juga yang terjadi pada ketimpangan di level Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang juga mengalami kenaikan di tahun 2023. Angka gini rasio Kota Bogor juga masih lebih tinggi dibandingkan nilai gini rasio Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini berarti isu mengenai ketimpangan di Kota Bogor masih perlu menjadi perhatian.

3.1.1.5 Kemiskinan

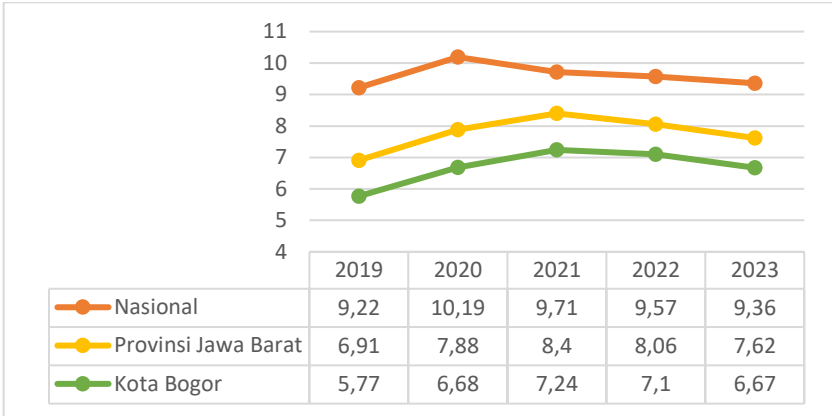
Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,43

persen menjadi 6,67 persen dari tahun 2022 sebesar 7,10 persen. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2018-2023:

Grafik 3.6
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2023



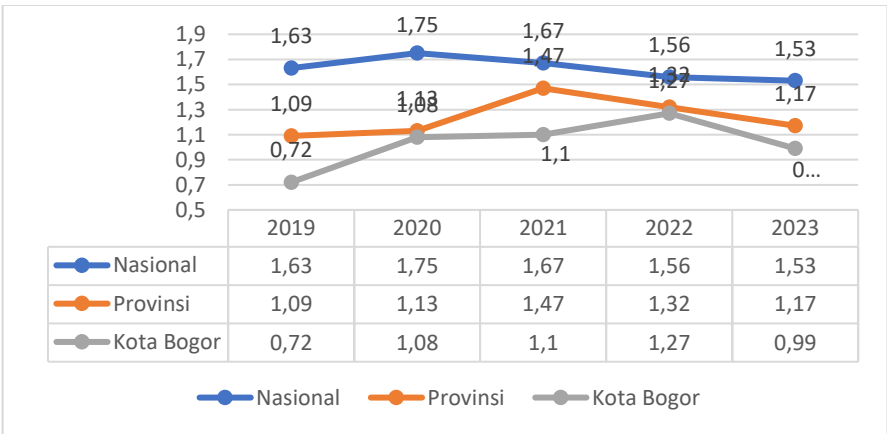
Sumber: Badan Pusat Statistik

Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan Kota Bogor masih lebih baik pada tahun 2023.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambaran mengenai Tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Bogor dapat dilihat pada Grafik 3.7 di bawah ini:

Grafik 3.7
Persentase indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2019 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

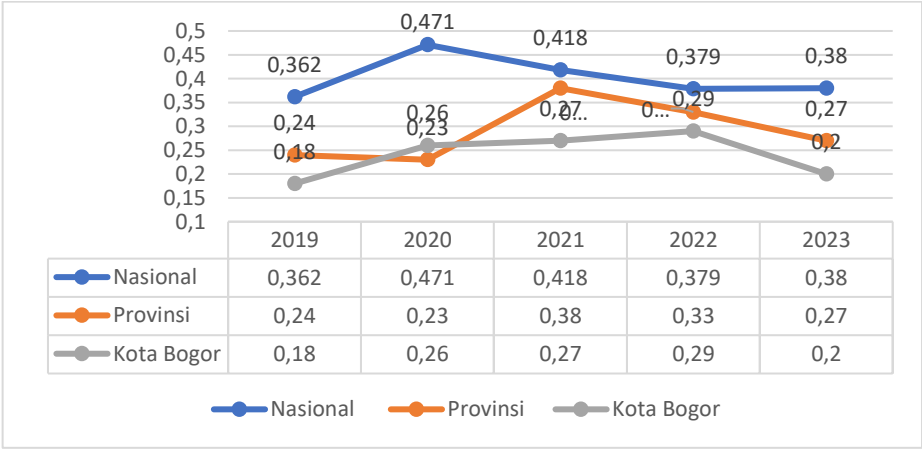
Sebagaimana dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa tingkat kedalaman kemiskinan Kota Bogor tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 1,27 di tahun 2022 menjadi 0,99 di tahun 2023. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung mendekati garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mencapai 0,29. Sejak tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan di Kota Bogor cenderung meningkat, yang mana hal ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, Sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Indeks Keparahan kemiskinan Kota Bogor dari tahun 2018-2023 adalah pada grafik 3.8 sebagai berikut:

Grafik 3.8
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik diatas menggambarkan mengindikasikan bahwa rata-rata penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Bogor cenderung makin mendekati garis. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2023 masih berada di bawah indeks kedalaman kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat.

3.1.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang-barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisilain.

Indeks Harga Konsumen (IHK) indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman/restoran dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berikut laju inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran.

Grafik 3.9

IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Kota Bogor Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran

Keterangan:

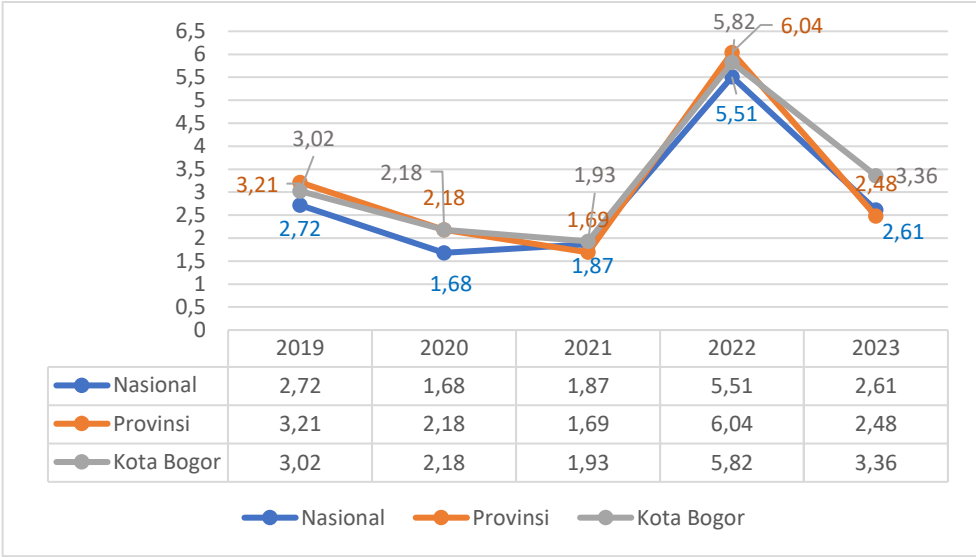
Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi mtm Desember 2023 ¹⁾ (%)	Tingkat Infalasi ytd Desember 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2023 ³⁾ (%)	Andil Infasi mtm Desember 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2023 (%)
Umum (Headline)	115,54	119,42	0,22	3,36	3,36	0,2200	3,3600
Makanan, Minuman, dan Tembakau	116,65	124,92	0,50	7,09	7,09	0,1284	1,7626
Pakaian dan Alas Kaki	119,41	124,95	0,01	4,64	4,64	0,0005	0,2183
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	106,34	109,28	0,03	2,76	2,76	0,0063	0,5855
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	122,32	124,27	0,30	1,59	1,59	0,0158	0,0851
Kesehatan	109,93	111,11	0,05	1,07	1,07	0,0011	0,0238
Transportasi	119,36	120,56	0,02	1,01	1,01	0,0025	0,1308
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,29	101,03	0,20	0,74	0,74	0,0090	0,0342
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	112,10	113,70	0,70	1,43	1,43	0,0138	0,0288
Pendidikan	123,18	124,72	0,00	1,25	1,25	0,0000	0,0872
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	122,51	123,97	0,00	1,19	1,19	0,0000	0,1199
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	131,48	138,74	0,78	5,52	5,52	0,0397	0,2769

- 1) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK November 2023.
2) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.
3) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.
Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2024

Pada tahun 2023, Kota Bogor mengalami Inflasi *year on year* (YoY) sebesar 3,36 persen dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,54 pada Desember 2022 menjadi 119,42 pada Desember 2023. Tingkat inflasi *Month to Month* (mtm) sebesar 0,22 persen dan tingkat inflasi *Year to Date* (ytd) sebesar 3,36 persen. Inflasi year to year tahun 2023 lebih rendah dari inflasi tahun 2022 yang mencapai angka 5,82. Inflasi tertinggi dialami oleh kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau yaitu sebesar 7,09 persen, diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,5 persen, dan pakaian dan alas kaki sebesar 4,64 persen. Sedangkan kelompok

pengeluaran yang mengalami kenaikan terkecil adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang hanya naik di angka 0,74 persen. Perkembangan tingkat inflasi Kota Bogor tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam grafik 3.10 di bawah ini:

Grafik 3.10
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2019-2023



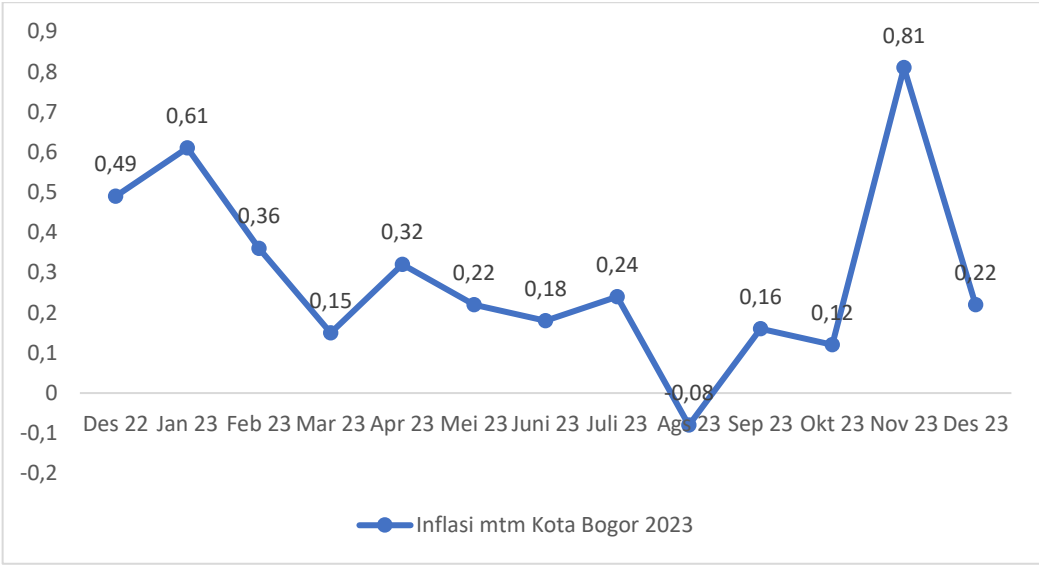
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik 3.10 di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021, angka inflasi cenderung turun baik di tingkat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan juga Nasional. Kemudian di tahun 2022, ketiganya sempat mengalami kenaikan yang signifikan hingga di tahun tersebut, inflasi di Kota Bogor mencapai angka 5,82 persen. Di tahun 2023, inflasi Kota Bogor dapat dikendalikan hingga kembali turun di angka 3,36 persen. Demikian juga dengan inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang juga mengalami penurunan. Namun demikian, angka inflasi Kota Bogor pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Inflasi bulanan pada tahun 2023 diperlihatkan pada Grafik 3.11 Inflasi bulanan tahun 2023 berfluktuasi. Inflasi terendah dicapai pada bulan Agustus -0,08 persen, sedangkan inflasi tertinggi dicapai pada bulan November yaitu mencapai 0,81 persen.

Grafik 3.11

Perkembangan Tingkat Inflasi Bulanan Kota Bogor Tahun 2023



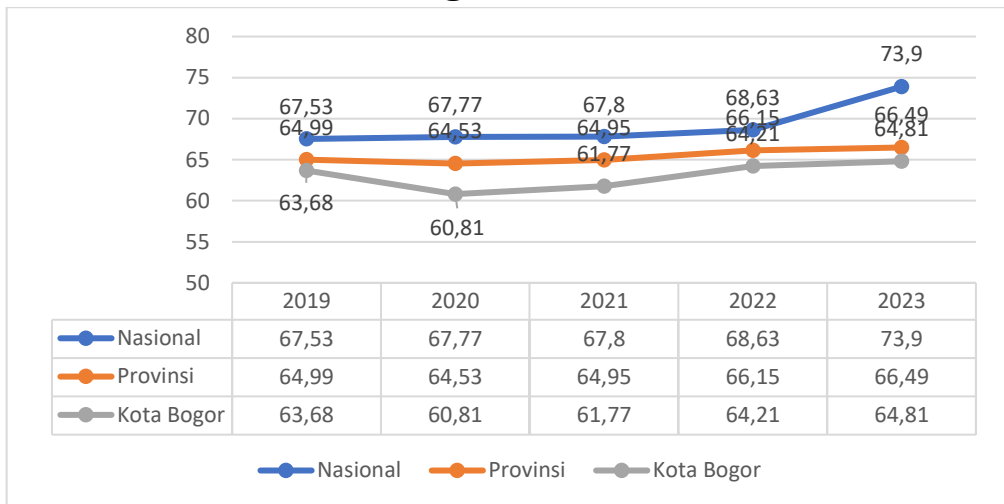
Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2023

3.1.1.7 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan Kota Bogor adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menghitung kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengukur kualitas kondisi ketenaga kerjaan di Kota Bogor.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan penduduk usia kerja di atas 15 tahun yang menjadi bagian dari pasar tenaga kerja. Persentase penduduk usia kerja yang aktif pada suatu wilayah secara ekonomi mencerminkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang besar. Semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia dalam proses produksi barang dan jasa pada perekonomian, semakin tinggi nilai TPAK. Berikut data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor:

Grafik 3.12
TPAK Kota Bogor Tahun 2018-2022

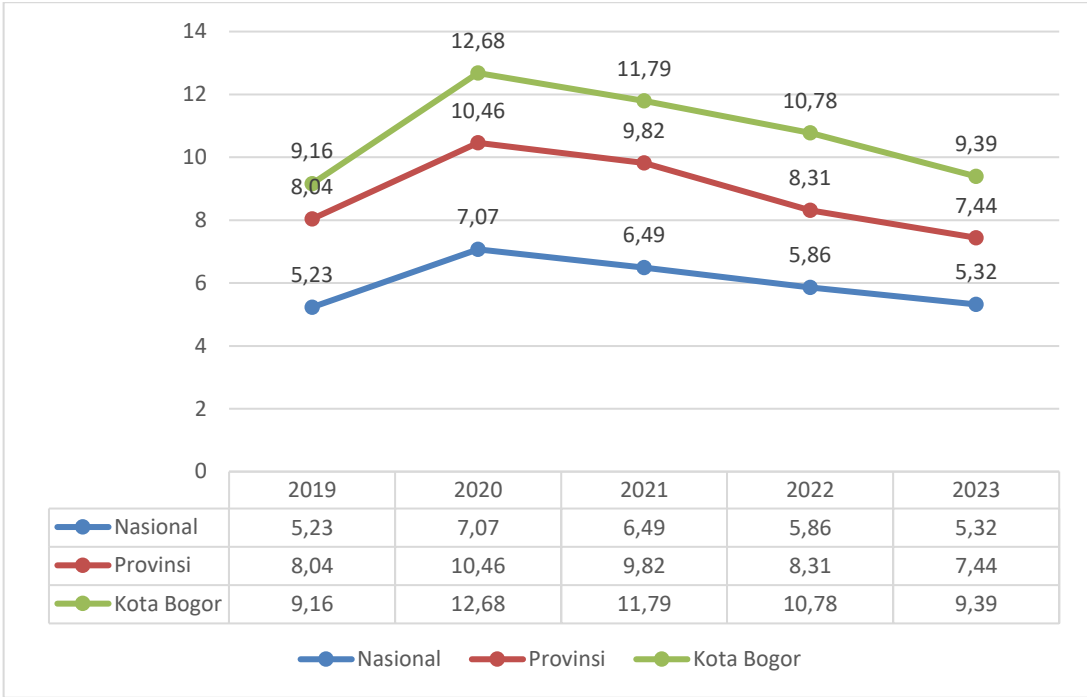


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada grafik 3.12 di atas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi nilai TPAK dalam periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bogor mengalami penurunan dikarenakan pandemi sebesar 60,81 persen. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor mulai mengalami peningkatan di tahun 2021 hingga pada tahun 2023 mencapai angka 64,81. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kenaikan angka partisipasi angkatan kerja tertinggi pada tahun 2019-2020 yaitu sebesar 4,04%, di mana kondisi pasca pandemi Covid-19 menarik banyak masyarakat untuk mencari pekerjaan karena sulitnya kondisi ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di Kota Bogor.

Hal lain yang dilihat dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka merupakan jumlah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Grafik 3.13
TPT Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Kenaikan dan angka tertinggi pada data tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor dan Jawa Barat terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pemutusan hubungan kerja, pelemahan ekonomi, pergeseran pola bisnis, dan menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan kerugian di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hingga saat ini masih berada dalam fase pemantapan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global dan nasional. Selain tiga sektor tersebut, sektor informasi dan komunikasi, real estate dan jasa perusahaan.

Data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat memiliki korelasi dengan di Kota Bogor, hal ini karena kenaikan dan penurunannya selaras. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor salah satunya disebabkan oleh pengaruh

kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kota Bogor. Karakteristik Kota Bogor yang tidak memungkinkan untuk adanya pengembangan industri-industri besar yang padat modal seperti daerah kawasan industri besar lain yaitu Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi juga menjadi faktor adanya pengangguran terbuka di Kota Bogor. Kondisi ini menjadikan penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas investasi menjadi terbatas, apalagi jika jenis investasinya adalah investasi yang padat modal dan bukan padat karya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan industri padat karya yang mampu memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, serta perlunya mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti peningkatan agrobisnis dan agro industri karena potensi geografi Kota Bogor yang cukup baik dalam pengembangan pertanian. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menjadi penggerak perkembangan pembangunan daerah, yang juga membuka peluang perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

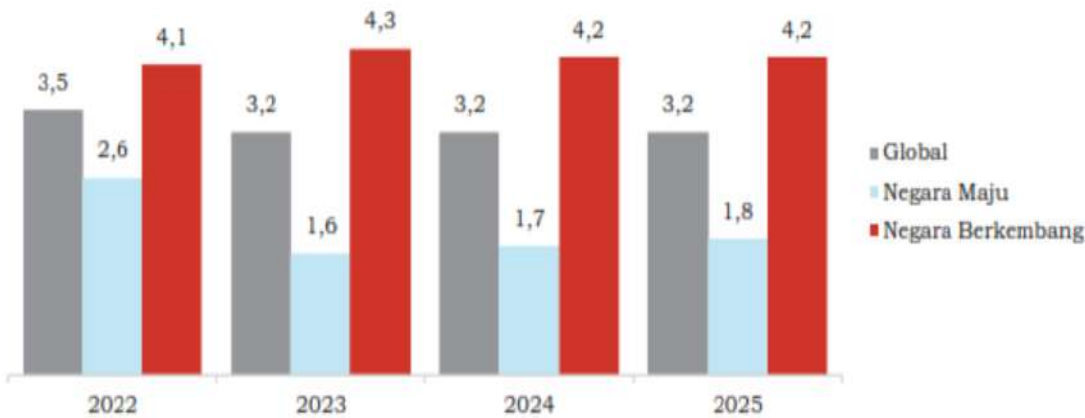
3.1.2.1 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang

diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Grafik 3.14

Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)



Sumber: World Economic Outlook Update, April 2024

Aktivitas perdagangan global tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan *Baltic Dry Index* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, dan ketegangan geopolitik. *World Trade Organization* dalam *Global Trade Outlook and Statistics* April 2024 memproyeksi volume perdagangan pada tahun 2023 kembali melambat dan terkontraksi sebesar 1,2 persen, setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen.

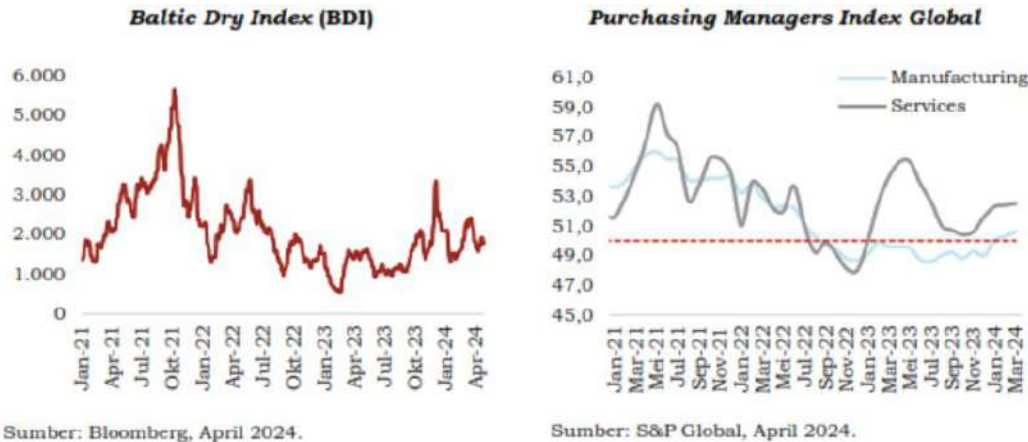
Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat.

Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Sementara itu, aktivitas manufaktur tahun 2023 mengalami perlambatan, tercermin dari *Purchasing Managers Index* sektor manufaktur yang berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2023, aktivitas jasa mengalami ekspansi, tecermin dari *Purchasing Managers Index* sektor jasa yang berada di zona ekspansi. Memasuki tiga bulan pertama di tahun 2024, *Purchasing Managers Index* sektor manufaktur dan sektor jasa mengalami perbaikan dan berada di zona ekspansi.

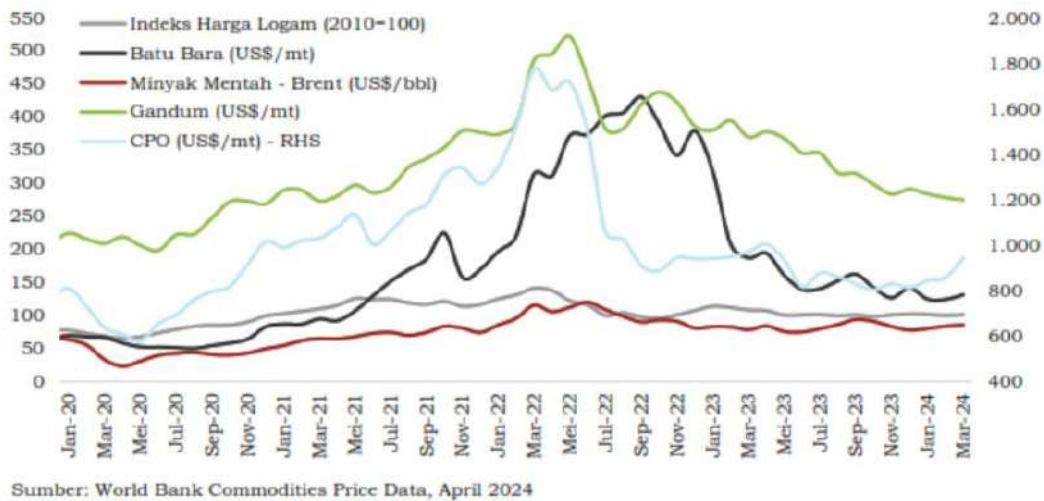
Grafik 3.15

Baltic Dry Index (BDI) dan Purchasing Managers Index Global



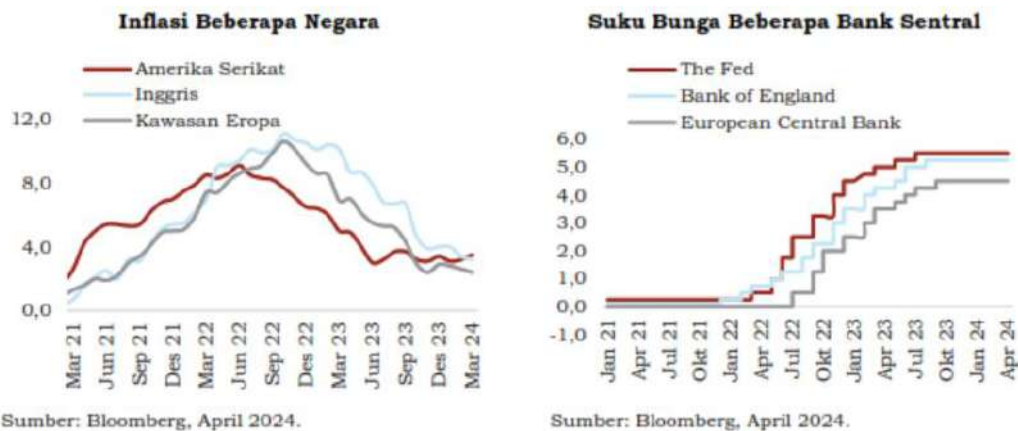
Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan dari kenaikan tinggi di tahun 2022. Penurunan harga komoditas tahun 2023 seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara.

Grafik 3.16
Harga Komoditas Internasional



Sejak awal tahun 2022, bank sentral dari berbagai negara di dunia juga menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga sebagai respons untuk menurunkan tekanan inflasi. Meskipun di akhir tahun 2023 inflasi di beberapa negara telah turun dan kembali ke target bank sentral, tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England, dan European Central Bank belum menunjukkan sinyal akan diturunkan dalam waktu dekat. Hal ini memicu risiko perlambatan aktivitas perekonomian akibat tekanan suku bunga tinggi yang berkepanjangan (*higher for longer*).

Grafik 3.17
Inflasi Bererapa Negara dan Suku bunga Beberapa Bank Sentral



Aktivitas ekonomi tetap bertahan selama disinflasi global pada tahun 2022-23, menentang peringatan stagflasi dan resesi global.

Pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan tetap stabil, meskipun ada kenaikan suku bunga bank sentral yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Ketahanan ini disebabkan oleh kemampuan rumah tangga untuk memanfaatkan tabungan dari pandemi. Perubahan dalam pasar hipotek dan perumahan selama dekade sebelum pandemi memoderasi dampak kenaikan suku bunga kebijakan. Pertumbuhan global diproyeksikan akan berlanjut pada kecepatan yang sama pada tahun 2024 dan 2025, dengan perkiraan terbaru untuk pertumbuhan global sebesar 3,1%. Laju konvergensi menuju standar hidup yang lebih tinggi untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah juga diharapkan.

Ekonomi global sedang mengalami perlambatan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi yang terus-menerus. Prospek jangka menengah yang lemah disebabkan oleh pertumbuhan PDB per orang yang lebih rendah karena gesekan struktural yang mencegah modal dan tenaga kerja berpindah ke perusahaan-perusahaan yang produktif. Ekonomi pasar negara berkembang, seperti RRT, akan memiliki prospek pertumbuhan yang lebih redup, yang berdampak pada mitra dagang. Risiko-risiko terhadap prospek global berimbang, dengan lonjakan harga baru akibat ketegangan geopolitik, perbedaan kecepatan disinflasi, dan suku bunga tinggi yang menyebabkan tekanan finansial. Namun, kebijakan fiskal yang lebih longgar dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, dan inflasi dapat turun lebih cepat dari yang diperkirakan.

Bank-bank sentral berfokus pada konsolidasi fiskal jangka menengah untuk membangun kembali manuver anggaran dan investasi prioritas, memastikan kesinambungan utang.

3.1.2.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena

tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori upper-middle income country yang dicapai di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistic kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan

dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti rangkaian acara konferensi tingkat tinggi ke-43 Association of South East Asia Nations, Moto Grand Prix Mandalika, World Superbike Mandalika, Federation Internationale de Basketball World Cup 2023, Aquabike Jet Ski World Championship 2023, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Stabilitas moneter tahun 2023 ditopang oleh berlanjutnya perbaikan kondisi perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Capaian ini tecermin dari realisasi inflasi yang menurun dan terjaga dalam rentang sasaran serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya. Realisasi inflasi umum sepanjang tahun 2023 mengalami tren penurunan. Pada akhir tahun 2023, realisasi inflasi mencapai 2,61 persen (yoy), lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 5,51 persen (yoy) dan berada di rentang sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Bersama Bank Indonesia sebesar 2,0 – 4,0 persen. Dari sisi domestik, capaian ini didukung oleh terjaganya ketiga komponen inflasi, yakni inflasi inti yang mencapai 1,68 persen (yoy), pangan bergejolak sebesar 7,22 persen (yoy), dan harga diatur pemerintah sebesar 1,74 persen (yoy).

Dari sisi global, rendahnya realisasi inflasi tahun 2023 sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penurunan harga komoditas energi dan pangan global. Sementara dari sisi domestik, terjaganya inflasi dipengaruhi oleh terbatasnya penyesuaian harga energi yang dilakukan oleh pemerintah,

kecukupan pasokan pangan di tengah gangguan perubahan iklim, sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta suku bunga acuan yang dijaga pada tingkat moderat.

Pada Januari 2024 tingkat inflasi tercatat sebesar 2,57 persen (yoy), kemudian meningkat menjadi 2,75 persen (yoy) pada Februari 2024, dan 3,05 persen (yoy) pada Maret 2024. Peningkatan ini didorong oleh inflasi komponen pangan bergejolak utamanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, di antaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan tomat seiring adanya peningkatan permintaan pada bulan Ramadan. Akan tetapi, capaian ini masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Inflasi umum diakhir tahun 2024 diperkirakan mencapai kisaran 2,70 persen (yoy) atau berada dalam rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy).

3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

- a. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
- b. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
- c. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech;
- d. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
- e. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
- f. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar; dan
 - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Substitusi bahan baku impor;
 - e. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan

- b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian JawaBarat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
- 4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - b. Pengembangan Desa Wisata;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan
 - d. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE).
 - e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.
- 5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;
 - b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;
 - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
 - d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
 - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
- 6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan:
 - a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
 - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
 - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan d. Peningkatan produktivitas bahan pangan; dan
 - d. Peningkatan Produksi Pertanian potensi ekspor.
- 7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
 - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
 - e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2024 dan 2025 sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.9. Nilai PDRB pada tahun 2024 ditargetkan untuk bertambah sekitar 14 persen dengan asumsi PDRB pada tahun 2023 mencapai 2.500 triliun rupiah, dan pada 2025 bertambah sekitar 4 persen dari tahun 2024. Proyeksi ini tidak terlepas dari kondisi industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 40 persen dan perdagangan yang menyumbang lebih dari 14 persen terhadap PDRB Jawa Barat, masih tumbuh di atas 4 persen, dan peluang pertumbuhan lebih besar di masa depan seiring peningkatan teknologi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang dapat mendorong produktivitas sektor tersebut.

Meskipun demikian, tantangan juga muncul dari sektor pertanian yang menyumbang sekitar 9 persen nilai PDRB Jawa Barat pada tahun 2023, dimana pertumbuhan sektor ini terlihat sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Pada kuartal III 2023, pertumbuhan sektor ini mencapai -1,90 persen, dimana pada kuartal ini adalah puncak fenomena el-nino yang telah menyebabkan kemarau berkepanjangan. Tantangan ini juga dirasakan oleh negara dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian, seperti Brazil dan India. Akibat el-nino, India mengalami penurunan produksi pada komoditas pangan pokok, biji-bijian untuk minyak, dan sereal bernutrisi dengan rata-rata penurunan produksi sekitar 9 persen. Sementara itu Brazil mengalami penurunan sekitar 7 persen pada produksi komoditas gandum.

Indikator pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan berada di kisaran lebih besar dari 5,5 persen, meskipun capaian pertumbuhan kuartal III 2023 yang berada di bawah 5 persen. Optimisme ini didukung oleh pertumbuhan sektor lapangan usaha jasa yang masih positif, dan kuatnya permintaan domestik dalam mengimbangi penurunan permintaan luar negeri atas berbagai produk, terutama produk industri pengolahan.

Tabel 3.8

Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Indikator	Realisasi 2023 ¹⁾	Target			
			2024		2025	
			RPD ²⁾	Hasil Perhitungan ³⁾	RPD ²⁾	Hasil Perhitungan ³⁾
1	Nilai PDRB ADHB (triliun rupiah) kumulatif	1.953,42		2.853,56		2.990,98
2	Laju Pertumbuhan PDRB (y-o-y, %)	4,57	5,67	4,75	5,81	4,87-5,37
3	Inflasi Tahunan (%)	2,48	N/A	1,5 - 3,5		1,5-3,5
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah) ²⁾	48,32 ⁴⁾	57,28	51,00	61,57	61,57
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (y-o-y, %) Agustus	7,44	8,01	7,41 - 7,16	7,45-	7,25
6	Persentase Penduduk Miskin(%) Maret 2023	7,62	7,34	7,48 - 7,03	7,13)	7,13
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	162,43	532,22	600,03	542,86	639,59

Sumber:

- 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (Triwulan III);
- 2) RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Jawa Barat;
- 3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023; dan
- 4) BPS Provinsi Jawa Barat 2022

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.9

Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2024-2025

(Persen)

Lapangan Usaha		Share	Realisasi	Proyeksi	
		2023	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,07	-1,90	1,51	1,58
B	Pertambangan dan Penggalian	1,00	0,44	-0,79	-0,80
C	Industri Pengolahan	41,55	4,72	4,31	4,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	-0,34	3,99	3,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	-3,29	4,82	4,90
F	Konstruksi	8,42	5,88	5,78	5,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,47	4,32	3,70	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	12,44	6,62	6,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,95	7,76	6,44	6,60
J	Informasi dan Komunikasi	3,77	6,31	8,38	8,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,85	4,93	3,99	4,01
L	Real Estate	1,15	5,72	5,29	5,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	6,31	7,08	7,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,63	-5,74	2,09	2,00
P	Jasa Pendidikan	3,31	1,08	6,07	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	6,74	7,36	7,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,15	9,86	6,48	6,71

Sumber:

1) BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023 (distribusi PDRB ADHB)

2) BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023 (yoy) dan;

3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 digerakkan oleh komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Kinerja PMTB diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan seiring dengan masuknya investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, khususnya pada kawasan industri pada wilayah WPPI I dan II, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, serta pusat pertumbuhan lainnya. Sementara di sektor pelayanan publik, agenda pembangunan beberapa infrastruktur strategis di Jawa Barat tahun 2024 seperti Tol Patimban, Tol Jakarta-Cikampek II, Tol Getaci juga akan turut mendorong kinerja PMTB.

Kinerja Ekspor Jawa Barat tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,23 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan. Penguatan peran dan fungsi

pelabuhan patimban dan BIJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2024.

Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, serta sistem kesehatan daerah yang lebih resiliensi terhadap potensi ancaman penyakit infeksi menular-pandemi. Risiko penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari tekanan inflasi tahun 2024 dikendalikan melalui sinergi program penguatan ketahanan pangan serta program pengendalian inflasi daerah. Inflasi daerah tahun 2024 dikendalikan pada level (2,5+1) persen.

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10

Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2024-2025

Komponen Pengeluaran		Realisasi	Proyeksi	
		2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,83	4,08	3,94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	21,17	12,58	3,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,34	2,35	2,46
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,4	5,17	4,10
5	Ekspor	14,63	5,05	5,52
6	Impor	22,28	4,65	5,07

Sumber:

1) BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (yoy);

2) RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat dan;

3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET	
		2025 ¹⁾	2025 ²⁾
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	N/A	74,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,96 – 5,37	5,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,42 – 6,99	7,25
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,85 – 6,46	7,13
5	Indeks Gini (Poin)	0,383 – 0,390	0,383
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,02
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	N/A	61,57

Sumber:

1) Target Nasional terhadap Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rakortekbangnas 2024

2) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

3.1.2.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor

Pada tahun 2023, kontribusi Kota Bogor pada PDRB Provinsi Jawa Barat hanya 2,17 persen dan berada pada posisi ke-14, manun demikian laju perekonomian Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 5,10 persen, artinya perekonomian Kota Bogor tumbuh 5,10 persen, lebih cepat dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang tumbuh 5,00 persen dan nasional yang tumbuh 5,05 persen. Pertumbuhan perekonomian yang cukup kuat di 2023 menunjukkan potensi kekuatan perekonomian yang cukup solid untuk mengatasi dampak pasca-Covid19 dan resesi global.

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Bogor 2023, sektor unggulan yang menjadi tumpuan perekonomian adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 19,23 persen dan kategori Industri Pengolahan sebesar 18,70 persen. Sektor unggulan lain adalah kategori transportasi dan pergudangan yang berkontribusi sebesar 13,38 persen. Hal ini bisa semakin dikembangkan dengan beroperasinya Biskita serta perbaikan infrastruktur di Stasiun Bogor dan Terminal Baranangsiang serta terminal-terminal lainnya. Selain itu, pembukaan Tol Bocimi dan Tol Bogor Selatan. Pembangunan infrastruktur yang sedang banyak dilakukan di Kota Bogor, seperti pembangunan RS, pasar, jalan dan jembatan serta perbaikan rumah layak huni membuat kategori konstruksi menjadi kategori pendorong perekonomian Kota Bogor sebesar 11,67 persen.

Pada 2023, PDRB per kapita berdasarkan harga belaku Kota Bogor sebesar Rp 53.239.000,00, sedangkan berdasarkan harga konstan

2010=100 sebesar Rp 34.608.000,00. Jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Bogor dan Kota Depok, PDRB per kapita Kota Bogor masih jauh lebih tinggi. Pada 2023, berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita Kab. Bogor hanya Rp 51,38 juta dan Kota Depok Rp 40,82 juta. Berdasarkan harga konstan, PDRB per kapita Kab. Bogor Rp 31,40 juta dan Kota Depok Rp 25,74 juta.

Ditinjau dari PDRB menurut komponen pengeluaran, maka profil perekonomian Kota Bogor adalah net impor, artinya bahwa kegiatan perekonomian Kota Bogor disokong oleh komponen impor yang lebih besar dibandingkan eksportnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik sektor unggulan Kota Bogor yang merupakan kota yang bertumpu pada aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Iklim investasi yang segar perlu didorong pada sektor-sektor unggulan dan sektor potensial yang belum banyak tergarap, seperti sektor industri kreatif di bidang jasa sehingga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang signifikan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pada Februari 2024 terjadi inflasi *year on year* (yoy) Kota Bogor sebesar 3,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,25. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di seluruh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,59 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 4,21 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,35 persen. Sebagai wilayah yang mengandalkan sektor perdagangan, maka pengendalian harga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan wilayah. Terutama berkaitan dengan resesi global yang secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada masyarakat. Tantangan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2025 meliputi:

- a. Tingkat inflasi yang fluktuatif
- b. Daya beli masyarakat
- c. Investasi di sektor ekonomi kreatif
- d. Ketersediaan pangan yang terjangkau
- e. Pelayanan perizinan berusaha
- f. Daya saing tenaga kerja

Tabel 3.12

Target Indikator Makro Ekonomi

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,11	76,59	77,17	77,85	78,7
2	Jumlah Penduduk	dalam Ribu Jiwa	1.126	1.052	1.114	1.070	1.090
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1,33	1,19	2,07	0,96	0,94
4	Angka Kemiskinan (%)	%	6,68	7,24	7,1	6,67	6,05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,68	11,79	10,78	9,39	8,11
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0,41	3,76	5,65	5,1	5,3
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0,412	0,441	0,43	0,464	0,43
8	Tingkat Inflasi	%	2,18	2,18	5,82	3,36	2-4
9	PDRB per Kapita (AdhB)	Juta Rupiah	44,1	45,92	49,76	53,24	58,86

Sumber: Hasil Analisis Tim KEM Bapperida, 2024

Pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi sebesar 5,3 persen naik dengan laju inflasi 2-4%. Diproyeksikan Indeks Gini Rasio menurun menjadi 0,43. PDRB per kapita naik menjadi Rp 58,86 juta.

3.1.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia

maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

A. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

- a. Berbagai program unggulan yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau.
- b. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung dengan insentif perpajakan yang diberikan untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing
- c. Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi dalam energi terbarukan dapat mendorong peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur.
- d. Insentif pajak juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan berdaya saing.
- e. Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi infrastruktur gap.

B. Penguatan *well-being*

- a. Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan Pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, Kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlintas yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
- b. Di bidang pendidikan, penguatan pendidikan vokasi memiliki pengaruh besar untuk menyelaraskan Pendidikan dengan pasar tenaga kerja atau kebutuhan dunia industri.
- c. Penguatan *link and match* menjadi krusial untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja usia muda.
- d. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dapat lebih efektif dicapai apabila ada sinergi antar program yang baik.

- e. Di bidang Kesehatan, pemerintah terus mendorong untuk menghadirkan kesehatan berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan akses, kualitas dan penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*) kesehatan mampu mewujudkan SDM yang sehat dan produktif
- f. Akselerasi penurunan prevalensi stunting pada tahun 2025 untuk mencapai target 11 persen pada tahun 2029 yang difokuskan pada penguatan intervensi yang berdaya ungkit tinggi di provinsi prioritas
- g. Mendorong perlindungan sosial yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan melalui pendampingan, peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau,

3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan:
 - 1) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
 - 2) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
 - 3) Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
 - 4) Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
 - 5) Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai

- tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- 6) Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 7) Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - 8) Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
 - 9) Peningkatan perhutanan sosial;
- b. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
- 1) Perbaikan tata kelolapangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
 - 2) Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
 - 3) Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
- c. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan:
- 1) Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
 - 2) Pengembangan IKM dan industri hijau;
 - 3) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
 - 4) Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta
 - 5) perdagangan digital;
 - 6) Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
 - 7) Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.

3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor

Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025, adalah rencana kerja tahun pertama RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Tema RKPD Kota Bogor tahun 2025 adalah Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas, dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Adapun fokus

pembangunan ekonomi tahun 2025 adalah Mendorong pengembangan potensi pariwisata heritage dan ilmiah, kampung tematik, ekonomi kreatif, penguatan sumberdaya manusia kreatif dan UMKM, mengakselerasi pelayanan investasi, mengembangkan sarana prasarana perekonomian, serta meningkatkan produktivitas.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor meliputi dari aspek sumberdaya manusia, aktivitas perekonomian dan infrastruktur seperti pada tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.13

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan	Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja
		Meningkatkan kompetensi para pencari kerja
	Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda	Meningkatkan kewirausahaan pemuda
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan
		Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan
	Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
		Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata
	Mengurangi kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan dan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan
		Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin
		Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana
		Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial
		Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat
		Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana
Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan		
Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal
		Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi
		Mengembangkan kampung kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal
	Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi	1. Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif
	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM. IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)
		Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf
		Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis
		Meningkatkan kualitas manajemen koperasi
		Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian
		Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi
		Meningkatkan koperasi yang sehat
		Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Mengakselerasi pelayanan investasi	Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik
		Meningkatkan pengembangan City Marketing
		Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah
	Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja
		Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
		Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja
	Mengembangkan usaha sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan
Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah
		Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau
		Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu
		Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen
		Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional
		Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya
		Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan
		Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan
		Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan
		Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan
		Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis
	Menjaga stabilitas harga kebutuhan	Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting
		Meningkatkan penggunaan produk lokal

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
	barang pokok dan penting	
	Memperkuat aktivitas perekonomian sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan
		Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan
		Meningkatkan penyuluhan pertanian
		Meningkatkan kualitas irigasi
		Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan
Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar	Memperkuat efisiensi dan efektifitas dalam proses pengembangan ekosistem pasar	Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk
		Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk
		Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedagang
	Memperkuat branding produk	Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran
		Meemperluas jangkauan konsumen
Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Mengurangi risiko bencana daerah	Meningkatkan manajemen mitigasi dan adaptasi risiko bencana
		Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana
		Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mitigasi bencana
	Memperkuat penegakan peraturan daerah serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparaturnegak perda dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang penegak perda dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kerjasama dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat
Tujuan 3: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung
		Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan
	Mengoptimalkan pemerataan kebutuhan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan
		Meningkatkan kualitas sistem drainase

Tujuan dan Sasaran RPD	Strategi	Arah Kebijakan
potensi ekonomi lokal	infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas
	Terwujudnya kualitas, konektivitas dan infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum
		Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota

Apabila dilakukan penyelarasan indicator makro ekonomi nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor pada Tahun 2025 bahwa target 2025 Kota Bogor disesuaikan dengan pencapaian 2023 sehingga ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari target nasional maupun provinsi, sebagaimana pada table berikut ini.

Tabel 3.14

Target Indikator Makro Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor Tahun 2025

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Target 2025		
			Nasional	Provinsi	Kota Bogor
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks		73,78	78,7
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56		
2	Angka Kemiskinan (%)	%	7,0-8,0	7,49	6,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5-5,0	7,88	8,11
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,3-5,6	4,96 -5,37	5,3
5	Indeks Gini Rasio	Angka	0,404	0,406	0,43

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam hal ini Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bogor. Diperlukan dukungan sumber pendanaan Non APBD Kota Bogor berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kota juga melalui APBN; APBD Provinsi; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP); obligasi daerah; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP) serta *swadaya masyarakat melalui konsep pemanfaatan dana umat*.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

RKPD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, yang dalam hal ini target kinerja pembangunan pada RKPD Kota Bogor Tahun 2025 mengacu terhadap target kinerja yang tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD Tahun 2025. Untuk mensinkronkan antara kebutuhan dengan kapasitas keuangan daerah, perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengukur keuangan daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah serta proyeksi keuangan

daerah, sehingga dapat ditetapkan rancangan struktur keuangan daerah. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Ketepatan analisis standar biaya akan mempengaruhi dalam Penetapan proyeksi keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk pengelolaan informasi tentang pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik. Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan menggunakan SIPD.

Dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam struktur APBD Kota Bogor terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Penetapan arah kebijakan keuangan daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional akan mewarnai arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD maupun APBD Tahun 2025.

Gambar 3.1
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan



Sumber: Diolah Bapperida, 2024

3.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek kinerja pelaksanaan APBD. Sebagai dasar Penetapan kebijakan keuangan tahun 2025, maka diukur kinerja keuangan masa lalu atau tahun sebelum tahun 2025, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber

penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah.

Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selama ini dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bogor masih sangat bergantung terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah melalui pendapatan transfer. Berikut unsur-unsur yang tertuang dalam elemen pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rata rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari Tahun 2013-2022 berada dikisaran 42,83 persen, sedangkan rata rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2019-2023 sebesar 6 persen. Berikut disampaikan realisasi pendapatan daerah Kota Bogor pada grafik 3.18.

Grafik 3.18
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

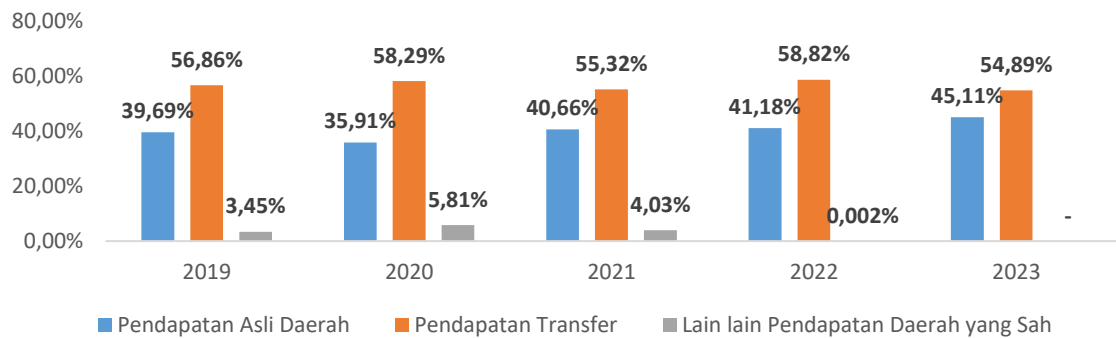
Dari gambaran grafik diatas, mencerminkan bahwa pada tahun 2023 masih adanya ketergantungan keuangan Kota Bogor terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat apabila disandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Rata rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 40,51 persen, namun angka tersebut cenderung naik dimana pada tahun 2019 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan Kota Bogor sebesar 39,69 persen, dan pada tahun 2023 kontribusinya

sebesar 45,11 persen. Berikut persentase komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah yang tertuang dalam grafik 3.19.

Grafik 3.19

Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 kondisi keuangan daerah mengalami fluktuasi yang sangat signifikan yang disebabkan adanya wabah pandemi covid 19 pada awal tahun 2020, tentunya hal tersebut berimplikasi terhadap seluruh komponen pendapatan daerah yang merupakan pendapatan rill suatu daerah.

Rata rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor pada tahun 2019-2023 mencapai 6,50 persen. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun 2019-2023 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rata rata pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 9,08 persen, Rata rata pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2019-2023 sebesar -8,16 persen. Rata rata pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari tahun 2019-2023 sebesar 4,85 persen. Rata rata pertumbuhan lain lain pendapatan asli daerah

yang sah dari tahun 2019-2023 sebesar 12,05 persen. Hal utama yang menyebabkan trend negative pada pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 salah satunya akibat adanya pandemi covid 19, dimana aktifitas perekonomian Kota Bogor menjadi lumpuh disertai dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Berikut disampaikan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2019-2023 pada tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pajak Daerah	689.543.006.040	509.039.468.746	624.784.886.145	744.960.592.537	897.753.380.910
1.1.2	Retribusi Daerah	51.362.153.192	35.010.375.259	36.033.010.539	23.942.828.414	31.081.390.548
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.241.844.911	31.927.293.792	32.420.552.150	32.170.048.280	33.960.776.435
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.737.212.776	296,040,104,355.12	382.002.477.379	346.549.576.477,92	375.822.720.275,80
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		1.015.884.216.919	872,017,242,152.12	1.075.240.926.213	1.147.623.045.708,92	1.338.618.268.168,80

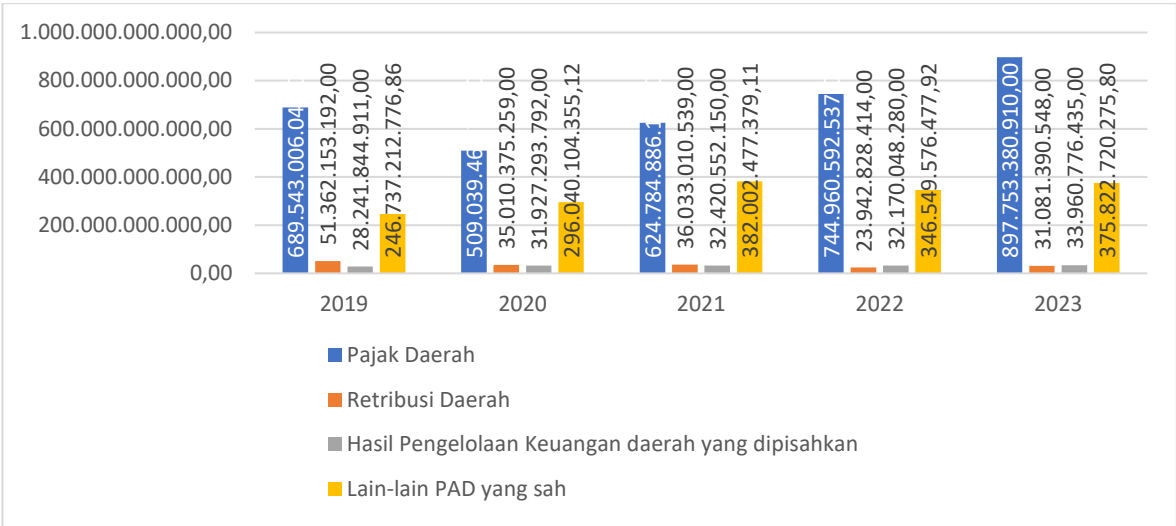
Sumber: Simral LRA, 2024

Berikut dilampirkan trend Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2023 pada grafik 3.20 berikut ini:

Grafik 3.20

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Komponen

Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

Di tahun 2023 dalam upaya memaksimalkan penerimaan pendapatan dikeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
2. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan;
3. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
4. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan PAD;

5. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:
- Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar;
 - Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan menitikberatkan pada pengintegrasian sistem informasi;
 - Pembentukan profil potensi Pendapatan Asli Daerah Wajib Pajak Daerah non PBB BPHTB;
 - Meningkatkan peran perangkat daerah penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
 - Inventarisasi asset dengan pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah;
 - Meningkatkan upaya penagihan piutang pajak khususnya PBB dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan wilayah;
 - Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
 - Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
 - Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
 - Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
 - Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak;
 - Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun 2023 apabila disandingkan pada total pendapatan asli daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sangat besar dimana pada tahun 2023 pendapatan pajak daerah mencapai Rp. 897.753.380.910,- atau meningkat sebesar 20,51 persen dari total Rp. 744.960.592.537,- di tahun 2022;
- b. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat besar keempat dimana pada tahun 2023 Retribusi daerah mencapai Rp. 31.081.390.548,00,- atau naik sebesar 29,82 persen dari total Rp. 23.942.828.414,- di tahun 2022;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan memberikan kontribusi yang sangat besar ketiga dimana pada tahun 2023 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan mencapai Rp. 33.960.776.435,00,- atau naik sebesar 5,57 persen dari total Rp. 32.170.048.280,- di tahun 2022;
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi yang sangat besar kedua dimana pada tahun 2023 Lain lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai Rp. 375.822.720.275,80,- atau naik sebesar 8,45 persen dari total Rp. 346.549.576.477,92,- di tahun 2022.

Komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan eksternal.

3.2.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Dana perimbangan dari pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan

pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer tersebut terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keseluruhan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, yang artinya besaran Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri neto. Pada saat Pendapatan Dalam Negeri neto naik, maka pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan ikut naik sehingga alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tiap daerah juga akan ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Dana Insentif Daerah (DID) atau Dana Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kriteria dan kategori yang diturunkan melalui

Peraturan Menteri Keuangan nomor 170/PMK.07/2022 meliputi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.

Di tahun 2023, kebijakan pendapatan daerah untuk pendapatan transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi pajak (PPN, Pph, dll);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengusulan dan implementasi Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer dalam APBD Kota Bogor pada tahun 2019-2023, terlihat bahwa pendapatan transfer terus mengalami peningkatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3 persen. Berikut disampaikan realisasi pendapatan transfer baik yang bersumber dari Pusat dan Provinsi sebagaimana tergambar dalam tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Realisasi Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
4.2	PENDAPATAN TRANSFER					
4.2.1	Pendapatan					
	Transfer	1.106.494.405.	1.112.100.550.	1.127.139.550.	1.249.992.463.	1.249.655.329
	Pemerintah Pusat	814	899	566	277	.523
4.2.2	Pendapatan					
	Transfer Antar	308.076.934.06	303.398.115.49	335.861.243.76	389.434.070.56	379.201.972.8
	Daerah	0	7	0	7	48
Total Pendapatan Transfer Kota Bogor		1.414.571.339.	1.415.498.666	1.463.000.794.	1.639.426.533	1.628.857.30
		874	.396	326	.844	2.371

Sumber: Simral LRA, 2024

Dilihat dari tabel di atas masih besarnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer baik Pusat maupun Provinsi, hal tersebut menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pencapaian pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di

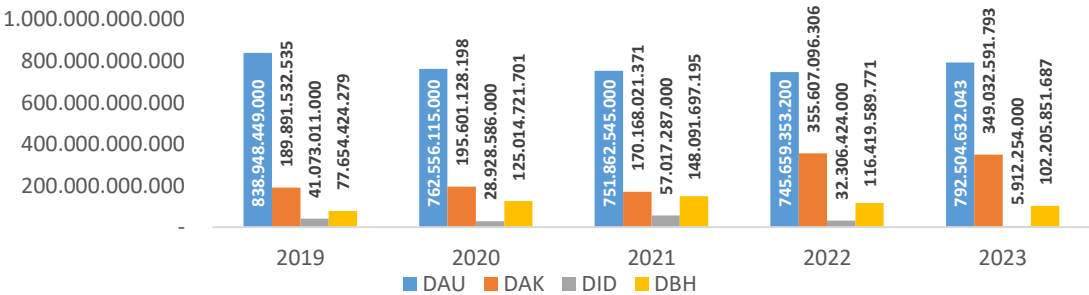
daerah, karena pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah yang akan diterima dapat naik atau turun tergantung pada realisasi penerimaan negara dimana hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam setiap tahunnya.

Tidak berbeda halnya dengan pendapatan transfer Pemerintah Pusat untuk alokasi pendapatan transfer antar daerah pun bersifat dinamis, hal tersebut menuntut daerah untuk terus dapat menetapkan program prioritas agar dinamika alokasi pendapatan transfer dapat segera direspon dengan tetap mengutamakan prioritas pembangunan daerah. Poin penting lainnya tentu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran tetap harus diperhatikan.

Dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2023, rata-rata pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar -1,26 persen, hal tersebut berlaku pula apabila disandingkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total Pendapatan Daerah. Pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 sebesar Rp.838.948.449.000,- terus menurun sebesar -9,11 persen ditahun 2020 senilai Rp. 762.556.115.000, kemudian -1,40 persen ditahun 2021 senilai Rp.751.862.545.000,- dan -0,83 persen ditahun 2022 senilai Rp. 745.659.353.200,-, namun naik kembali di tahun 2023 sebesar 6,28 persen senilai Rp 792.504.632.043,- Berikut persentase Pendapatan transfer Pemerintah pusat dapat dilihat pada grafik 3.21 dan Pendapatan transfer Antar Daerah dapat dilihat pada grafik 3.22 sebagai berikut:

Grafik 3.21

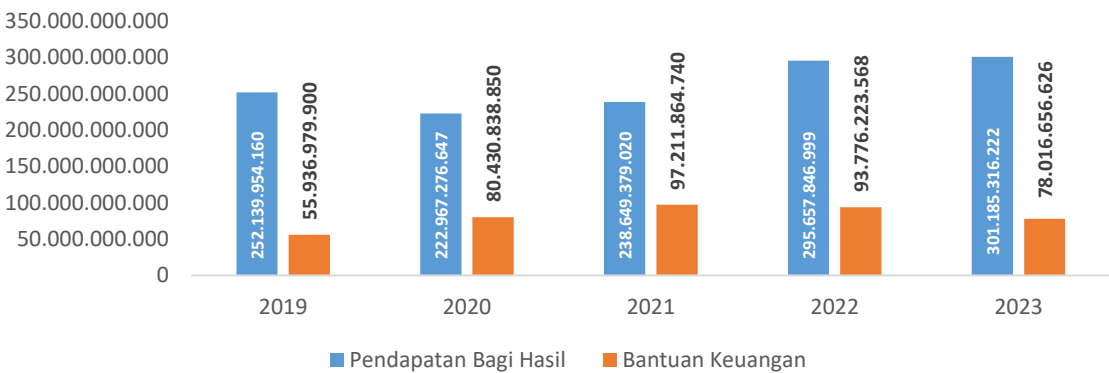
Pendapatan Transfer Pemerintah pusat Tahun 2019-2023



Sumber : Simral LRA, 2024

Grafik 3.22

Komposisi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2023, kebijakan yang ditetapkan untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Penghasil;
2. Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi dana perimbangan ke daerah.

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah akan mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah. Terhitung dari tahun 2019-2022 Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat dalam rangka membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, namun pada tahun 2022 nomenklturnya menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut disampaikan realisasi lain lain

pendapatan daerah yang sah sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.23 berikut ini:

Grafik 3.23
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2019-2023

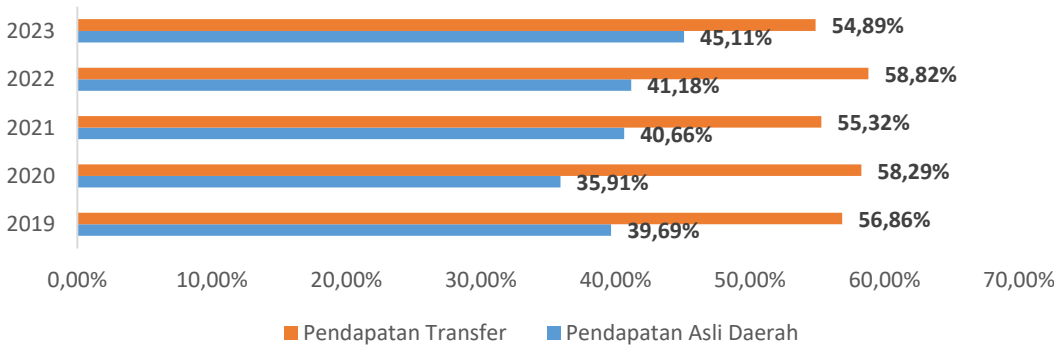
KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
4.3.1	Pendapatan Hibah	88.328.640.000	141.063.595.101	276.000.000		-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	88.328.640.000	141.063.595.101	106.048.704.000		-
4.3.2	Dana Darurat					-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				55.479.250	-
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah			214.511.238		-
	Total Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor	88.328.640.000	141.063.595.101	106.539.215.238	55.479.250	-

Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.1.4 Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Berikut disampaikan rasio kemandirian fiskal pada grafik 3.24:

Grafik 3.24
Kemandirian Fiskal Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber: Simral, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rata rata kemandirian fiskal Kota Bogor diangka 0,71 dimana pada tahun 2019 kemandirian fiskal Kota Bogor berada diangka 0,70, pada tahun 2020 berada diangka 0,62, pada tahun 2021 berada diangka 0,73, pada tahun 2022 berada diangka 0,70 dan naik kembali pada tahun 2023 berada di angka 0,82.

Apabila diukur dari sisi Pendapatan Asli Daerah serta Pendapatan Transfer, trend dari Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya meningkat begitu juga dengan Pendapatan transfer namun persentase besaran dari sisi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, hal tersebut menyimpulkan bahwa rasio indeks kemandirian fiskal Pemerintah Kota Bogor masuk dalam kategori *Menuju Kemandirian* dengan ukuran rasio ($0,25 \leq IKF < 0,50$). Berikut Analisa Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Bogor pada Tabel 3.17:

Tabel 3.17

Analisa Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Bogor

DESKRIPSI	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	0,3969	0,3591	0,4066	0,4118	0,4511
Pendapatan Transfer	0,5686	0,5829	0,5532	0,5882	0,5489
Indeks Kemandirian Fiskal					
Sangat Mandiri ($IKF \geq 0,75$)					
Mandiri ($0,50 \leq IKF < 0,75$)					
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq IKF < 0,50$)	0,3969	0,3591	0,4066	0,4118	0,4511
Belum Mandiri ($IKF < 0,25$)					

Sumber : Diolah Bapperida, 2024

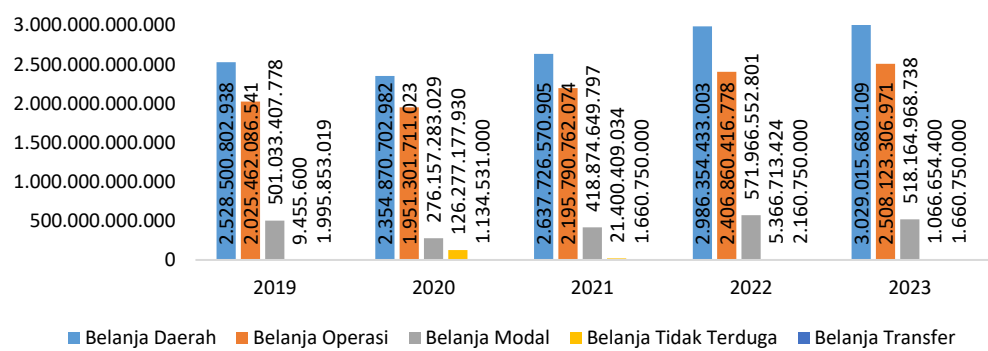
3.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewenangan daerah dalam mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan pilihan, Pendukung urusan pemerintahan, Penunjang urusan pemerintahan, Pengawasan urusan pemerintahan, kewilayahan dan Pemerintahan umum.

Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek yang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, atau standar teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun besaran belanja daerah dalam mendukung prioritas pembangunan dari tahun 2019-2023 tertuang dalam Grafik 3.25 Berikut ini:

Grafik 3.25
Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber : Simral LRA, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa belanja operasi masih yang paling dominan dibandingkan dengan komponen lainnya. Rata rata belanja operasi apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 81,93 persen, rata rata belanja modal apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 16,74 persen, rata rata belanja tidak terduga apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 1,28 persen, dan rata rata belanja transfer apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 0,06 persen.

Di sisi lain Belanja Daerah dalam pendanaannya disusun berdasarkan hasil Analisa dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bogor 2019-2024. Berikut gambaran realisasi Belanja Daerah tahun 2019-2023 yang disajikan dalam Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
Total Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.1	Belanja Pegawai	1.181.889.361.829	1.010.111.841.189	1.091.969.595.660	1.128.093.224.058	1.063.654.426.888
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	711.101.422.815	798.841.580.650	981.671.384.413	1.066.553.405.102	1.236.457.277.949
5.1.3	Belanja Bunga	6.578.046.142	5.427.749.091	4.047.853.424	4.282.366.790	6.191.682.700
5.1.4	Belanja Hibah	79.149.334.000	93.233.837.587	68.284.278.577	146.302.919.328	147.381.004.434
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	46.743.921.755	43.686.702.506	49.817.650.000	61.628.501.500	54.438.915.000
	TOTAL BELANJA OPERASI	2.025.462.086.541	1.951.301.711.023	2.195.790.762.074	2.406.860.416.778	2.508.123.306.971
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18.044.020.000	2.772.077.406	456.222.600	17.328.944.627	1.287.152.960
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.754.707.372	129.790.481.108	134.821.926.424	93.283.801.959	97.928.993.032
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.703.165.317	30.694.955.339	75.413.812.539	188.457.698.905	178.951.840.395
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.965.307.071	109.784.631.171	206.667.544.227	271.189.473.185	238.985.747.391
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.910.823.018	1.789.184.630	1.515.144.007	708.136.673	911.157.960
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	655.385.000	1.325.953.375		998.497.452	100.077.000
	TOTAL BELANJA MODAL	501.033.407.778	276.157.283.029	418.874.649.797	571.966.552.801	518.164.968.738
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.455.600	126.277.177.930	21.400.409.034	5.366.713.424	1.066.654.400
	TOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	9.455.600	126.277.177.930	21.400.409.034	5.366.713.424	1.066.654.400
5.4	BELANJA TRANSFER					
5.4.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.023.845.129	1.134.531.000	1.660.750.000	2.160.750.000	1.660.750.000

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
5.4.2	Bantuan Keuangan Lainnya	972.007.890				
	TOTAL BELANJA TRANSFER	1.995.853.019	1.134.531.000	1.660.750.000	2.160.750.000	1.660.750.000
	TOTAL BELANJA DAERAH	2.528.500.802.938	2.354.870.702.982	2.637.726.570.905	2.986.354.433.003	3.029.015.680.109

Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:

1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi urusan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada calon penerima sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berikut realisasi belanja operasi selama Tahun 2019-2023 yang sudah disesuaikan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan pada tabel 3.19:

Tabel 3.19
Realisasi Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.1	Belanja Pegawai	1.181.889.361.829	1.010.111.841.189	1.091.969.595.660	1.128.093.224.058	1.063.654.426.888
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	711.101.422.815	798.841.580.650	981.671.384.413	1.066.553.405.102	1.236.457.277.949
5.1.3	Belanja Bunga	6.578.046.142	5.427.749.091	4.047.853.424	4.282.366.790	6.191.682.700
5.1.4	Belanja Hibah	79.149.334.000	93.233.837.587	68.284.278.577	146.302.919.328	147.381.004.434
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	46.743.921.755	43.686.702.506	49.817.650.000	61.628.501.500	54.438.915.000
TOTAL BELANJA OPERASI		2.025.462.086.541	1.951.301.711.023	2.195.790.762.074	2.406.860.416.778	2.508.123.306.971

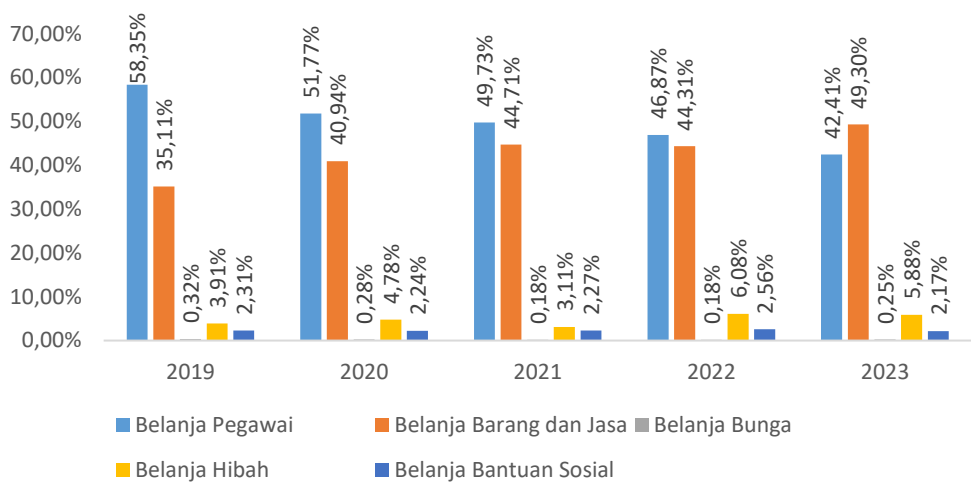
Sumber: Simral LRA, 2024

Melihat pada tabel diatas menunjukan belanja pegawai merupakan belanja terbesar dalam komponen belanja operasi walaupun secara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bahwa total belanja pegawai pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 30 persen dari total APBD dan maksimal sudah harus diimplementasikan ditahun 2027 atau 5 tahun dari ditetapkannya Undang undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 02 Januari 2022. Tentunya hal tersebut harus dijadikan perhatian mengingat

persentase belanja pegawai di Kota Bogor masih diatas dari yang sudah ditentukan.

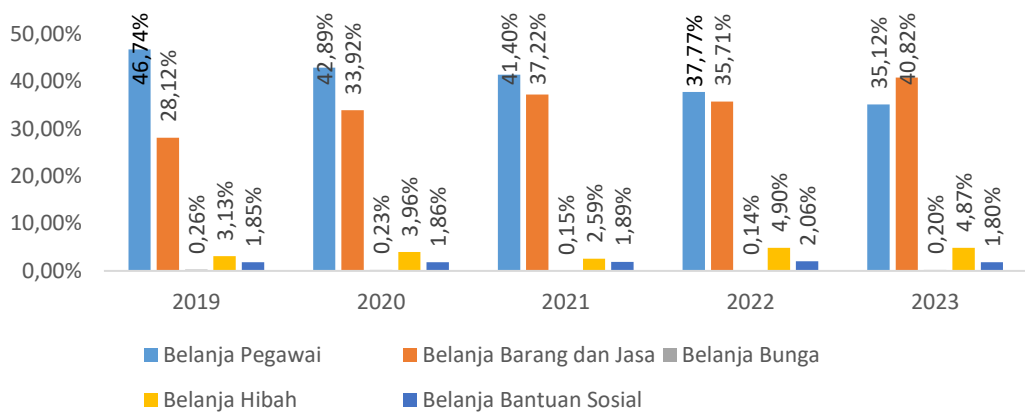
Berikut disampaikan persentase komponen belanja operasi terhadap total belanja operasi pada grafik 3.26 dan persentase komponen belanja operasi terhadap total belanja daerah pada grafik 3.27:

Grafik 3.26
Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

Grafik 3.27
Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

Baik pada grafik 3.26 maupun grafik 3.27 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena diantaranya terdapat belanja yang cukup besar yakni belanja untuk Non ASN, belanja jasa penyediaan listrik, air, telpon, internet,

pemeliharaan kendaraan dinas, pembelian suku cadang dan lainnya sedangkan belanja pegawai cenderung mengalami penurunan.

3.2.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi:

1. Belanja Tanah

Belanja Tanah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan

Belanja Jalan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap,

yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

Berikut realisasi belanja modal selama Tahun 2019-2023 yang mengacu terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan pada tabel 3.20:

Tabel 3.20
Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18.044.020.000	2.772.077.406	456.222.600	17.328.944.627	1.287.152.960
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.754.707.372	129.790.481.108	134.821.926.424	93.283.801.959	97.928.993.032
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.703.165.317	30.694.955.339	75.413.812.539	188.457.698.905	178.951.840.395
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.965.307.071	109.784.631.171	206.667.544.227	271.189.473.185,	238.985.747.391
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.910.823.018	1.789.184.630	1.515.144.007	708.136.673	911.157.960
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	655.385.000	1.325.953.375		998.497.452	100.077.000
TOTAL BELANJA MODAL		501.033.407.778	276.157.283.029	418.874.649.797	571.966.552.801	518.164.968.738

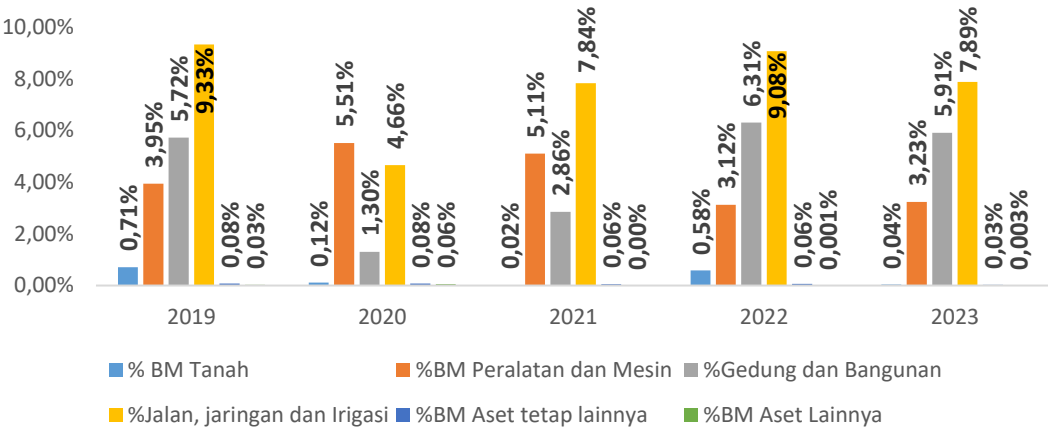
Sumber: Simral LRA, 2024

Belanja modal menurun pada tahun 2023 dikarenakan menurunnya belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Walaupun terdapat belanja modal jalan yang cukup besar yakni pembangunan jembatan Jl. Otto Iskandardinata, lanjutan pembangunan Sekolah Satu Atap dan lanjutan pembangunan Masjid Agung Bogor.

Berikut disampaikan persentase komponen belanja modal terhadap total belanja daerah pada grafik 3.28 dan persentase komponen belanja modal terhadap total belanja modal dan pada Grafik 3.29, berikut ini:

Grafik 3.28

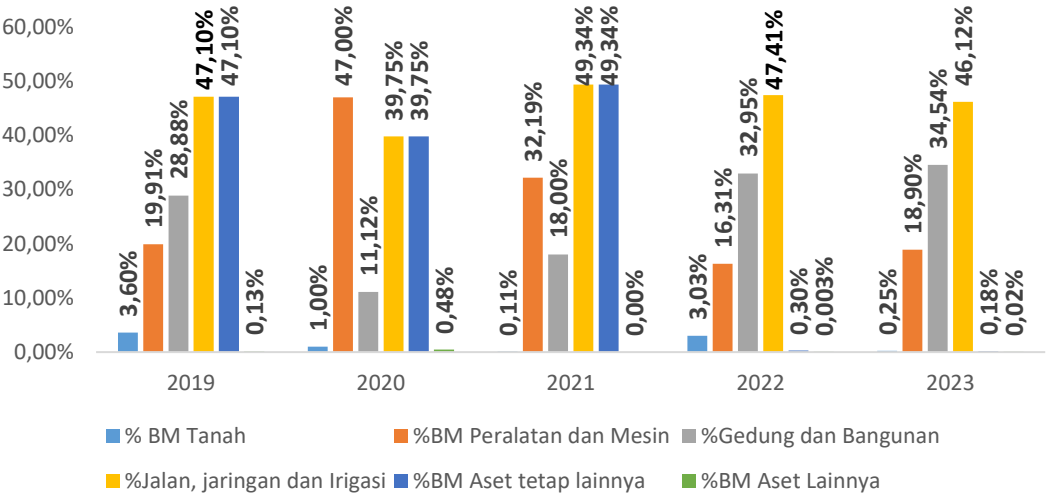
Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

Grafik 3.29

Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

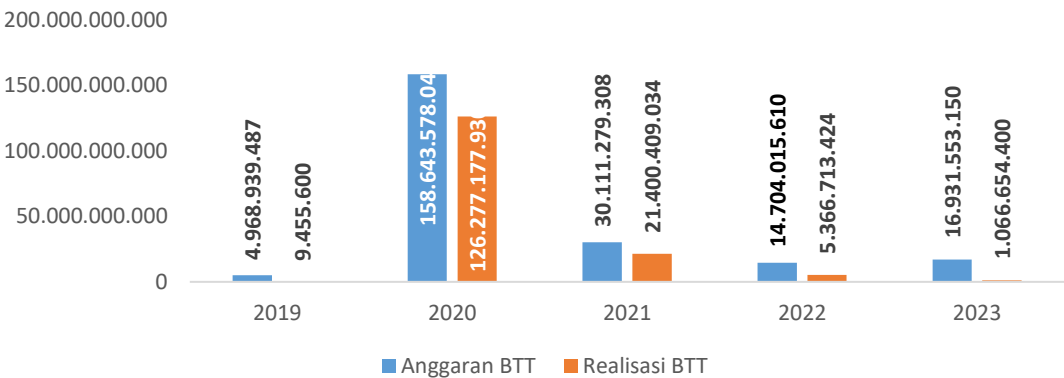
3.2.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 9.455.600,-, pada tahun 2020 realisasi belanja

tidak terduga sebesar Rp. 126.277.177.930,-, pada tahun 2021 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 21.400.409.034,-, pada tahun 2022 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.366.713.424,-. Tahun 2023 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.066.654.400,- Berikut gambaran realisasi belanja tidak terduga yang dituangkan pada grafik 3.30:

Grafik 3.30

Total Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2019-2022



Sumber : Simral LRA, 2024

3.2.1.2.4 Belanja Transfer

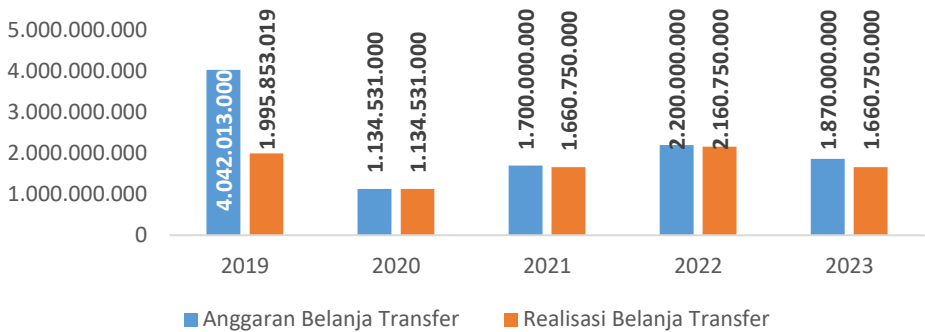
Belanja transfer adalah belanja pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor digunakan untuk kepentingan sosial di kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Galuga. Pada tahun 2019 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.995.853.019,- pada tahun 2020 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.134.531.000,- pada tahun 2021 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- dan pada tahun 2022 realisasi belanja transfer sebesar Rp.2.160.750.000,- sedangkan pada tahun 2023 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,-. Berikut gambaran realisasi belanja transfer yang dituangkan pada tabel 3.21 dan realisasi belanja transfer terhadap anggaran belanja transfer pada grafik 3.31:

Tabel 3.21
Realisasi Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
54	BELANJA TRANSFER					
5.4.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.023.845.129	1.134.531.000	1.660.750.000	2.160.750.000	1.660.750.000
5.4.2	Bantuan Keuangan Lainnya	972.007.890				
TOTAL TRANSFER		1.995.853.019	1.134.531.000	1.660.750.000	2.160.750.000	1.660.750.000

Sumber: Simral LRA, 2024

Grafik 3.31
Realisasi Belanja Transfer Terhadap Anggaran Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2023



Sumber: Simral LRA, 2024

Dalam Menyusun Belanja Daerah selain mengalokasikan untuk menunjang prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerahnya masing masing. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, maupun penanaman modal. Urusan Pemerintahan Pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

Undang undang pun memperkenalkan terminologi urusan pemerintahan yang baru, yaitu Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/Wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

- keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sesuai wilayah kerja, dimana Forkopimda kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/wali kota, dengan anggota pimpinan DPRD; pimpinan kepolisian daerah; pimpinan Kejaksaan; dan pimpinan satuan teritorial TNI di daerah. Forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan dipimpin oleh camat, dengan anggota pimpinan kepolisian di kecamatan dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan. Berikut ini adalah tren realisasi Belanja Daerah dari Tahun 2019-2023 yang dialokasikan untuk setiap urusan pada tabel 3.22:

Tabel 3.22

Alokasi Anggaran Per Urusan Kota Bogor Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
ALOKASI ANGGARAN PER URUSAN					
Urusan urusan wajib pelayanan dasar	1.532.530.784.052	1.304.066.877.399			
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar			1.658.681.026.130	1.870.500.199.093	1.991.151.542.829
Urusan urusan wajib bukan pelayanan dasar	308.144.180.404	284.843.485.552			
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			405.489.470.829	479.549.204.522	419.273.230.146
Urusan urusan pilihan	31.901.626.211	24.487.211.303			
Urusan pemerintahan pilihan			19.025.209.432	25.028.992.917	21.673.610.592
Unsur pendukung urusan pemerintahan			213.158.206.501	242.844.151.310	240.460.748.576
Urusan urusan pemerintahan fungsi penunjang	589.194.702.551	741.473.128.728			
Unsur penunjang urusan pemerintahan			142.263.485.763	146.914.101.090	121.541.232.491
Unsur pengawasan urusan pemerintahan			16.647.657.802	18.980.289.880	19.907.585.103
Unsur kewilayahan			169.041.868.537	174.995.510.196	160.531.608.416
Unsur pemerintahan umum			13.419.645.911	27.541.983.995	54.476.121.956

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
ALOKASI ANGGARAN PER URUSAN					
Urusan urusan umum/non urusan	66.729.509.720				
TOTAL	2.528.500.802.938	2.354.870.702.982	2.637.726.570.905	2.986.354.433.003	3.029.015.680.109

Sumber : Simral LRA, 2024

3.2.1.2.5 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selanjutnya gambaran tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor yang menginformasikan kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2019-2023. disajikan pada tabel 3.23 dibawah ini:

Tabel 3.23
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A BELANJA PEGAWAI						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	474.675.837.587	476.299.627.451	456.499.514.837	456.949.303.955	483.142.741.393
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	430.063.148.526	387.234.448.397	307.600.560.540	344.689.616.254	314.944.193.159
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			159.178.557.231	149.321.715.538	145.108.326.637
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD			41.203.910.676	41.167.712.768	47.497.252.680
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			180.615.830	177.312.422	179.275.989
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	16.066.860.000	17.247.620.000	1.815.120.000	2.041.320.000	2.018.520.000
7	Belanja Pegawai BLUD	63.323.315.053	78.436.590.917	125.491.316.546	133.746.243.121	70.764.117.030
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	25.425.320.280	21.940.471.029			
9	Honorarium PNS	11.859.459.500	1.682.957.500			
10	Honorarium Non PNS	121.851.695.045	6.150.374.618			
11	Uang Lembur	2.350.190.000	1.141.104.000			
12	Belanja Pegawai BOS	36.273.535.838	19.978.647.277			
JUMLAH		1.181.889.361.829	1.010.111.841.189	1.091.969.595.660	1.128.093.224.058	1.063.654.426.888
B BELANJA BARANG DAN JASA						

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Barang	82.666.691.631	80.412.009.552	142.217.707.109	146.080.004.316	175.422.007.590
2	Belanja Jasa	206.075.862.973	367.337.085.563	439.675.316.197	449.890.541.627	423.062.067.821
3	Belanja Pemeliharaan	72.629.116.248	60.934.772.960	64.935.041.152	64.032.357.837	129.645.432.722
4	Belanja Perjalanan Dinas	98.925.696.726	56.126.654.891	48.948.157.743	79.437.586.151	85.890.101.324
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	245.468.226.087	62.481.107.900	36.222.759.778	39.066.286.779	56.273.712.418
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	842.198.250	55.969.546.386	75.434.258.712	79.728.949.884	81.091.691.202
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.493.630.900	115.580.403.398	174.238.143.722	208.317.678.508	285.072.264.872
JUMLAH		711.101.422.815	798.841.580.650	981.671.384.413	1.066.553.405.102	1.236.457.277.949
C BELANJA MODAL						
1	Belanja Modal Tanah	18.044.020.000	2.772.077.406	456.222.600	17.328.944.627	1.287.152.960
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.754.707.372	129.790.481.108	134.821.926.424	93.283.801.959	97.928.993.032
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.703.165.317	30.694.955.339	75.413.812.539	188.457.698.905	178.951.840.395
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.965.307.071	109.784.631.171	206.667.544.227	271.189.473.185	238.985.747.391
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.910.823.018	1.789.184.630	1.515.144.007	1.690.033.475	911.157.960
6	Belanja Modal Aset Lainnya	655.385.000	1.325.953.375		16.600.650	100.077.000
JUMLAH		501.033.407.778	276.157.283.029	418.874.649.797	571.966.552.801	518.164.968.738
TOTAL		2.394.024.192.422	2.085.110.704.868	2.492.515.629.870	2.766.613.181.961	2.818.276.673.575

Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.2.6 Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Pembiayaan Tahun 2019-2022

Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bogor yang menginformasikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2019-2023. disajikan pada tabel 3.24 dibawah ini:

Tabel 3.24
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Pembiayaan Kota Bogor
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A BELANJA PEGAWAI						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	474.675.837.587	476.299.627.451	456.499.514.837	456.949.303.955	483.142.741.393
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	430.063.148.526	387.234.448.397	307.600.560.540	344.689.616.254	314.944.193.159
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			159.178.557.231	149.321.715.538	145.108.326.637
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD			41.203.910.676	41.167.712.768	47.497.252.680
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			180.615.830	177.312.422	179.275.989
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	16.066.860.000	17.247.620.000	1.815.120.000	2.041.320.000	2.018.520.000
7	Belanja Pegawai BLUD	63.323.315.053	78.436.590.917	125.491.316.546	133.746.243.121	70.764.117.030
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	25.425.320.280	21.940.471.029			
9	Honorarium PNS	11.859.459.500	1.682.957.500			
10	Honorarium Non PNS	121.851.695.045	6.150.374.618			
11	Uang Lembur	2.350.190.000	1.141.104.000			
12	Belanja Pegawai BOS	36.273.535.838	19.978.647.277			
	JUMLAH	1.181.889.361.829	1.010.111.841.189	1.091.969.595.660	1.128.093.224.058	1.063.654.426.888
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16.000.000.000	24.300.000.000	-	4.394.083.430	
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	139.495.608.833	56.245.341.402			
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			135.617.812.976	5.484.766.176	5.484.766.176
4	Pembentukan Dana Cadangan					71.336.251.300
	JUMLAH	155.495.608.833	80.545.341.402	135.617.812.976	9.878.849.606	76.821.017.476
	TOTAL (A+B)	1.337.384.970.662	1.090.657.182.591	1.227.587.408.636	1.137.972.073.664	1.140.475.444.364

Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.3 Neraca Daerah

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana

pembangunan daerah. Di sisi neraca daerah, total aset Pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp.8.134.004.234.559,- pada tahun 2020 total aset Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp.8.451.357.134.760,- pada tahun 2021 total aset Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp.9.203.864.257.665,- dan pada tahun 2022 total aset Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp.10.316.556.025.616,43 serta pada tahun 2023 sebesar Rp.10.792.438.087.151,04. Apabila melihat dari data tersebut rata rata pertumbuhan aset Pemerintah Kota Bogor mencapai 7,38 persen. Dalam komponen aset tetap kenaikan yang paling dominan ada pada komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami peningkatan rata rata sebesar 16,54 persen. Berikut ini adalah perkembangan kondisi neraca daerah dalam kurun waktu 2019-2023 yang tergambar dalam tabel 3.25:

Tabel 3.25
Kondisi Neraca Daerah Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	ASET					
11	ASET LANCAR					
111	Kas dan Setara Kas					
11101	Kas di Kas Daerah	241.211.999.533	256.115.222.198	305.390.350.678	130.401.482.495	33.520.359.707,00
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-		922.000,00
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	549.961.149	153.905.685	2.200.525		1.810.000,00
11104	Kas di BLUD	1.854.238.462	8.107.669.667	.109.372.432	29.011.343.370,34	17.674.780.233,14
11105	Kas di Bendahara FKTP	12.656.415.139	9.337.552.993	8.356.906.451		
11106	Kas Lainnya	173.631.664	-	25.000	204.120.800	1.108.045.406,00
11107	Kas di Bendahara BOS Pusat	417.961.220	.229.656.416	5.903.901.729	1.990.834.186	1.649.723.756,00
11108	Setara Kas	-	-	-		
112	Investasi Jangka Pendek	-				
113	Piutang Pendapatan	290.103.493.941	454.435.483.329	520.862.986.236	649.127.643.510,86	750.326.016.471,70
114	Piutang Lainnya	192.470.717.640	150.777.331.093	127.973.208.139	70.566.455.628	65.081.689.452,00
115	Penyisihan Piutang	(168.778.975.776,21)	(197.644.133.020,74)	(239.164.821.612)	(279.787.959.764,01)	(327.357.002.657,22)
116	Beban Dibayar Dimuka	540.978.634	844.904.499	857.645.340	281.653.702,54	515.022.118,72

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
117	Persediaan	26.708.887.745	32.596.243.908	44.188.378.065	42.886.362.633,34	59.870.448.656,74
11801	R/K SKPD					
	JUMLAH ASET LANCAR	597.909.309.350	718.953.836.768	782.480.152.983	644.681.936.562,07	602.391.815.144,08
12	INVESTASI JANGKA PANJANG					
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	63.742.100	63.742.100	63.742.100	63.742.100	
12101	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-		
12102	Investasi dalam Obligasi	-	-	-		
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-		
12104	Dana Bergulir	63.742.100	63.742.100	63.742.100	63.742.100	
1210401	Penyisihan Dana Bergulir			(63.742.100)	(63.742.100)	
12105	Deposito Jangka Panjang	-	-	-		
12106	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-		
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	504.092.523.552	523.642.733.333	547.890.119.989	831.636.916.668	835.123.845.482,75
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	504.092.523.552	23.642.733.333	547.890.119.989	831.636.916.668,80	835.123.845.482,75
12202	Investasi Permanen Lainnya	-	-			
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	504.156.265.652	523.706.475.433	547.890.119.989	831.636.916.668,80	835.123.845.482,75
13	ASET TETAP					
131	Tanah	4.749.339.012.961,63	4.767.414.421.962,63	4.977.048.911.209	5.675.827.547.827,63	5.938.980.428.024,63
132	Peralatan dan Mesin	627.792.307.268	743.613.685.336	878.774.080.882	1.041.697.508.364,03	1.136.877.015.590,06
133	Gedung dan Bangunan	1.064.887.956.865,95	1.206.807.131.742,41	1.233.596.418.612	1.357.632.385.067,17	1.582.373.719.962,85
134	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.904.629.267.613,01	2.124.872.812.527,01	2.734.857.301.296	3.204.080.524.732,92	3.483.468.228.932,92
135	Aset Tetap Lainnya	9.114.028.408	9.905.925.847	10.771.560.024	10.425.280.533,84	11.314.989.293,84

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	58.417.911.301	57.861.964.006	58.350.074.016	256.117.091.612,52	224.422.793.771,34
137	Akumulasi Penyusutan	(1.608.771.628.636,89)	(1.817.462.723.225,40)	(2.135.442.627.196)	(2.788.162.647.260,66)	(3.162.527.131.333,85)
JUMLAH ASET TETAP		6.805.408.855.780,70	7.093.013.218.195,65	7.757.955.718.843	8.757.617.690.877,45	9.214.910.044.241,79
14	DANA CADANGAN					
141	Dana Cadangan					46.125.787.358,00
JUMLAH DANA CADANGAN						46.125.787.358,00
15	ASET LAINNYA					
151	Tagihan Jangka Panjang	3.350.792.857	3.266.687.864	3.271.317.337	0	0
	Tagihan Penjualan Angsuran				891.773.350	873.259.125
	Tuntutan Ganti Rugi				2.349.791.062	334.362.178,57
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	52.526.184.310	52.526.184.310	52.526.184.310	11.014.184.310	11.014.184.310,00
153	Aset Tak Berwujud	12.720.633.782	3.345.818.782	14.765.690.157	16.120.188.183,80	16.945.217.083,80
154	Aset Lain-lain	168.763.333.169	175.679.958.444	176.686.747.837	189.420.063.755,95	199.888.450.262,74
155	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-10.831.140.342	-12.013.269.675	(13.057.680.076)	(14.857.922.126,05)	(16.066.792.926,55)
156	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(117.612.965.360,89)	(118.653.993.715)	(134.718.785.714,59)	(142.870.965.109,14)
158	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				12.400.188.687	23.768.880.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		226.529.803.775	115.192.414.364	115.538.265.850	82.619.481.508,11	93.886.594.924,42
JUMLAH ASET		7.031.938.659.556	9.308.796.639.165,00	7.873.493.984.693	10.316.556.025.616,43	10.792.438.087.151,04
2	KEWAJIBAN					
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.059.579	268.757.122	258.325.090	249.302.783	260.050.896,00
212	Utang Bunga	0	155.902.381	0	0	0
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	5.484.766.177	5.484.766.176	6.284.285.132	10.281.879.912,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	1.657.035.105	1.705.986.063	1.350.712.398	278.229.328,39	413.113.467,07

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
215	Utang Belanja	7.843.210.475	8.176.671.331	31.041.506.440	52.449.022.792,09	95.418.767.474,00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	23.424.617.827	32.113.634.366	2.231.465.191		900.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		33.042.922.986	47.905.717.440	40.366.775.295	59.260.840.035,48	106.374.711.749,07
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
221	Utang Dalam Negeri	82.271.492.651	71.301.960.299	65.817.194.123	82.830.822.901	72.948.702.467,00
222	Utang Jangka Panjang Lainnya					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		82.271.492.651	71.301.960.299	65.817.194.123	82.830.822.901	72.948.702.467,00
JUMLAH KEWAJIBAN		115.314.415.637	119.207.677.738	106.183.969.418	142.091.662.936,48	179.323.414.216,07
3	EKUITAS					
311	Ekuitas	8.018.689.818.922	8.332.149.457.022	9.097.680.288.246	10.174.464.362.679,95	10.613.114.672.934,97
JUMLAH EKUITAS		8.018.689.818.922	8.332.149.457.022	9.097.680.288.246	10.174.464.362.679,95	10.613.114.672.934,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.134.004.234.559	8.451.357.134.760	9.203.864.257.665	10.316.556.025.616,43	10.792.438.087.151,04

Sumber: Simral LRA, 2024

3.2.1.4 Analisa Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pinjaman dari pemerintah pusat.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya. Berikut ini adalah perkembangan penutup defisit riil anggaran daerah dalam kurun waktu 2019-2023 yang tergambar dalam tabel 3.26:

Tabel 3.26

Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,559,857,207,793	2,428,579,503,649.12	2.644.780.935.777,11	2.787.105.058.802,92	2.967.475.570.539,80
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	2,528,500,802,938.19	2,354,870,702,982.00	2.637.726.570.905,00	2.986.354.433.003	3.029.015.680.109
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	155,495,608,833	80,545,341,402.00	135.617.812.976,00	9.878.849.606	76.821.017.476
A	Defisit riil	(124,139,203,978.19)	(6,836,540,734.88)	(128.563.448.103,89)	(209.128.223.806,08)	(138.361.127.045,20)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	256.564.582.703	277.640.687.080	327.542.156.075,31	365.001.935.698,42	161.360.978.068,34
5	Pencairan Dana Cadangan					25.765.828.400
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	139.752.780.949,00	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00		
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.484.766.178,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176	5.484.766.176
9	Penerimaan Piutang Daerah		19.053.167.687,00			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	401.802.129.830,52	334.337.716.975,19	493.565.383.802,31	370.486.701.874,42	192.611.572.644,34
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	277.662.925.853,19	327.501.176.240,31	365.001.935.698,42	161.358.478.068,34	54.250.445.599,14

Sumber : Simral LRA, 2024

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan

yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

3.2.1.4.1 **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Realisasi penerimaan pembiayaan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.401.802.129.830,-, pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.334.337.716.975,-, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.493.565.383.802,- tahun 2022 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 370.486.701.874,42 serta tahun 2023 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 192.611.572.644,34. Besaran realisasi penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp. 161.360.978.068,34, pencairan dana cadangan untuk Pilkada sebesar Rp.25.765.828.400,- penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.5.484.766.176,-. Berikut disampaikan data penerimaan pembiayaan daerah pada tabel 3.27:

Tabel 3.27
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	401.802.129.830	334.337.716.975,19	493.565.383.802,31	370.486.701.874,42	192.611.572.644,34
1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	256.564.582.703	277.640.687.080,19	327.542.156.075,31	365.001.935.698,42	161.360.978.068,34
1.2	Pencairan Dana Cadangan					25.765.828.400
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	139.752.780.949	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00		
1.4	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.484.766.178	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176	5.484.766.176
1.5	Penerimaan Piutang Daerah		19.053.167.687,00			
1.6	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja					

Sumber : Simral LRA, 2024

3.2.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD, pembayaran pinjaman daerah serta pembentukan Dana Cadangan. Tahun 2020 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah Rp.80.545.341.402,- dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.135.617.812.976,- Naiknya pembiayaan daerah dikarenakan adanya pinjaman/loan ke PT. SMI sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai bentuk percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.9.878.849.606,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp.76.821.017.476,- dengan rincian pengeluaran pembiayaan yakni pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada serentak Tahun 2024 sebesar Rp.71.336.251.300,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.5.484.766.176,-. Berikut disampaikan data pengeluaran pembiayaan daerah pada tabel 3.28:

Tabel 3.28
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	155.495.608.833	80.545.341.402,00	135.617.812.976,00	9.878.849.606	76.821.017.476
2.1	Pembentukan Dana Cadangan					71.336.251.300
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000	24.300.000.000,00		4.394.083.430	
2.3	Pembayaran Pokok Utang	139.495.608.833	56.245.341.402,00			
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			135.617.812.976,00	5.484.766.176	5.484.766.176
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					

Sumber : Simral LRA, 2024

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Struktur Anggaran pada APBD Tahun 2025 sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1. Pendapatan Daerah;
- 2. Belanja Daerah, dan;
- 3. Pembiayaan Daerah.

3.2.2.1 Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berikut disampaikan pendapatan daerah Kota Bogor pada tabel 3.29:

Tabel 3.29
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.075.240.926. 213	1.147.623.045. 708,92	1.338.618.268.1 68,80	1.437.509.600. 344	1.587.178.793. 643
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	624.784.886.145	744.960.592.537	897.753.380.910 ,00	1.016.572.839.0 00	1.144.382.200.0 00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.033.010.539	23.942.828.414	31.081.390.548, 00	374.259.143.423	392.384.298.949
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.420.552.150	32.170.048.280	33.960.776.435, 00	33.064.860.644	36.118.899.553
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	382.002.477.379	346.549.576.477 ,92	375.822.720.275 ,80	13.612.757.277	14.293.395.141
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.000.794. 326	1.639.426.533. 844	1.628.857.302.3 71,00	1.605.706.544. 279	1.178.059.321. 684
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.127.139.550.5 66	1.249.992.463.2 77	1.249.655.329.5 23,00	1.297.598.702.0 00	1.050.064.127.0 00

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	335.861.243.760	389.434.070.567	379.201.972.848 ,00	308.107.842.279	127.995.194.684
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106.539.215.23 8	55.479.250			
4.3.1	Hibah	276.000.000				
4.3.3	Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	106.263.215.238	55.479.250			
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		2.644.780.935. 777	2.787.105.058. 802,92	2.967.475.570.5 39,80	3.043.216.144. 623	2.765.238.115. 327

Sumber: Diolah Bapperida, Simral, SIPD RI, 2024

Dalam menentukan rencana pendapatan daerah perlu dilakukan analisis agar terukur secara logis, karena hal tersebut akan dijadikan dasar kemampuan keuangan daerah dalam merencanakan belanja daerah untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah. Berikut penjelasan komponen yang tertuang dalam pendapatan daerah yang terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melihat pada realisasi rata rata pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2023 sebesar 8,13 persen, maka rencana potensi pendapatan asli daerah Kota Bogor untuk tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan asli daerah yang tertuang dalam proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp. 84.533.891.313,24,-. Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah serta proyeksi

pendapatan asli daerah diasumsikan naik pada komponen pajak daerah (penambahan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB) Sebagai dampak adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah (optimalisasi target pendapatan), hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (optimalisasi target pendapatan BUMD/Perumda). Selain itu terjadi dampak yang signifikan pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berkurang sebesar 36,39 persen akibat diberlakukannya formulasi perhitungan baru. Berikut gambaran struktur pendapatan asli daerah yang dituangkan pada tabel 3.30:

Tabel 3.30

Rencana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.067.401.480.950,00	1.144.382.200.000	1.201.601.310.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	384.081.992.758,00	392.384.298.949	404.712.505.420
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.387.455.069,76	36.118.899.553	36.454.008.860
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.773.973.552,00	14.293.395.141	15.008.064.898.
		1.502.644.902.329,76	1.587.178.793.643	1.657.775.889.178

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

- b.

Pendapatan transfer, yang meliputi transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, insentif fiskal, dana bagi hasil serta transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Melihat pada realisasi rata rata penerimaan pendapatan transfer dari tahun 2019-2023 sebesar 3 persen, maka rencana penerimaan pendapatan transfer Kota Bogor untuk tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana penerimaan pendapatan transfer yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp. 16.023.538.964,-. Perencanaan pendapatan transfer pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi mengacu terhadap penerimaan pendapatan transfer tahun 2024 diluar

Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi seperti yang digambarkan pada tabel 3.31 berikut ini:

Tabel 3.31
Rencana Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.034.040.588.036,00	1.050.064.127.000	1.050.064.127.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.995.194.684,00	127.995.194.684	127.995.194.684
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.162.035.782.720,00	1.178.059.321.684	1.178.059.321.684

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

3.2.2.2 Rencana Belanja Daerah Tahun 2025

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bogor. Berikut disampaikan belanja daerah Kota Bogor pada tabel 3.32:

Tabel 3.32
Proyeksi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	2.195.790.762.074	2.406.860.416.778	2.508.123.306.971,00	2.695.303.160.764	2.625.096.020.390	2.676.499.321.221
5.1.1	Belanja Pegawai	1.091.969.595.660	1.128.093.224.058	1.063.654.426.888,00	1.220.115.717.333	1.271.211.993.166	1.271.211.993.166
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	981.671.384.413	1.066.553.405.102	1.236.457.277.949,00	1.261.223.052.335	1.246.864.801.391	1.314.987.328.055
5.1.3	Belanja Bunga	4.047.853.424	4.282.366.790	6.191.682.700,00	7.750.000.000	221.589.324	300.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	68.284.278.577	146.302.919.328	147.381.004.434,00	171.671.641.096	78.799.282.670	60.000.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	49.817.650.000	61.628.501.500	54.438.915.000,00	34.542.750.000	27.998.353.839	30.000.000.000

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5.2	BELANJA MODAL	418.874.649.797	571.966.552.801	518.164.968.738,00	327.782.083.340	263.306.071.512	256.200.000.000
5.2.1	Belanja Modal Tanah	456.222.600	17.328.944.627	1.287.152.960,00	6.155.150.436	16.603.485.059	16.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.821.926.424	93.283.801.959	97.928.993.032,00	82.021.148.307	60.051.267.270	60.000.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.413.812.539	188.457.698.905	178.951.840.395,00	138.714.305.394	133.663.617.536	130.000.000.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	206.667.544.227	271.189.473.185	238.985.747.391,00	91.727.484.945	52.727.960.447	50.000.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.515.144.007	708.136.673	911.157.960,00	9.088.994.258	259.741.200	200.000.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		998.497.452	100.077.000,00	75.000.000		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.400.409.034	5.366.713.424	1.066.654.400,00	92.112.529.383	30.000.000.000	30.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	21.400.409.034	5.366.713.424	1.066.654.400,00	92.112.529.383	30.000.000.000	30.000.000.000
6	BELANJA TRANSFER	1.660.750.000	2.160.750.000	1.660.750.000,00	1.870.000.000	1.665.750.000	1.665.750.000
6.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000	2.160.750.000	1.660.750.000,00	1.870.000.000	1.665.750.000	1.665.750.000
	TOTAL BELANJA DAERAH	2.637.726.570.905	2.986.354.433.003	3.029.015.680.109,00	3.117.067.773.487	2.920.067.841.902	2.932.699.321.221

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sementara, belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Berikut penjelasan komponen yang tertuang dalam pendapatan daerah yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
- Merupakan pengeluaran anggaran dalam mendukung kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya target kinerja. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Berikut rencana belanja operasi tahun 2025 yang disandingkan dengan proyeksi 2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 pada tabel 3.33:

Tabel 3.33
Rencana Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.214.129.058.804,00	1.271.211.993.166	1.271.211.993.166
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.016.884.512.509,76	1.246.864.801.391	1.314.987.328.055
5.1.03	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	221.589.324	300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000.000,00	78.799.282.670	60.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000.000,00	27.998.353.839	30.000.000.000
		2.328.013.571.313,76	2.625.096.020.390	2.676.499.321.221

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Apabila melihat pada tabel 3.34 total belanja modal yang direncanakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 dengan proyeksi Tahun 2025 terdapat kenaikan signifikan, hal tersebut disebabkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur khususnya sarana prasarana gedung pemerintahan di wilayah yang menunjang pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor. Berikut terlampir rencana belanja modal tahun 2025 pada tabel 3.34.

Tabel 3.34
Rencana Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	16.603.485.059	16.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000.000	60.051.267.270	60.000.000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000.000	133.663.617.536	130.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000.000	52.727.960.447	50.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	259.741.200	200.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-		
		200.000.000.000	263.306.071.512	256.200.000.000

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Berikut rencana belanja tidak terduga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 yang disandingkan dengan proyeksi Tahun 2025 pada tabel 3.35:

Tabel 3.35
Rencana Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000	30.000.000.000
		30.000.000.000,00	30.000.000.000	30.000.000.000

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, sedangkan pemanfaatan belanja transfer Kota Bogor tahun 2025 untuk kepentingan sosial disekitaran wilayah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Galuga. Berikut rencana belanja transfer dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 yang disandingkan dengan proyeksi Tahun 2025 pada tabel 3.36.

Tabel 3.36
Rencana Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.870.000.000,00	1.665.750.000	1.665.750.000
		1.870.000.000,00	1.665.750.000	1.665.750.000

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

3.2.2.3 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar

atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut disampaikan pembiayaan Kota Bogor pada tabel 3.37:

Tabel 3.37
Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493.565.383. 802,31	370.486.70 1.874,42	192.611.572.64 4,34	84.145.774.860 ,00	5.497.032.26 0	55.497.032.2 60
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	327.542.156.0 75,31	365.001.935 .698,42	161.360.978.068 ,34	40.000.000.000, 00		
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan			25.765.828.400, 00	38.648.742.600, 00		50.000.000.00 0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	160.538.461.5 51,00					
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.484.766.176 ,00	5.484.766.1 76	5.484.766.176,0 0	5.497.032.260,0 0	5.497.032.260	5.497.032.260
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	135.617.812. 976,00	9.878.849.6 06,00	76.821.017.476 ,00	10.294.145.996 ,00	95.565.145.9 96	45.565.145.9 96
6.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	135.617.812.9 76,00	5.484.766.1 76,00	5.484.766.176,0 0	10.294.145.996, 00	10.294.145.99 6	10.294.145.99 6
6.2.2	Penyertaan modal daerah		4.394.083.4 30			35.271.000.00 0	35.271.000.00 0
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan			71.336.251.300, 00			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya						
	PEMBIAYAAN NETTO	357.947.570. 826,31	360.607.85 2.268,42	115.790.555.16 8,34	73.851.628.864 ,00	(90.068.113.7 36)	(9.931.886.26 4)

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, yaitu berupa SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran pembiayaan, yaitu pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah,

pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut rencana pembiayaan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 yang disandingkan dengan proyeksi Tahun 2025 pada tabel 3.38:

Tabel 3.38
Rencana Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.497.032.260,00	5.497.032.260	55.497.032.260
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya			
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan			50.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.497.032.260	5.497.032.260
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	110.294.145.996,00	95.565.145.996	45.565.145.996
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	10.294.145.996,00	10.294.145.996	10.294.145.996
6.2.02	Penyertaan modal daerah		35.271.000.000	35.271.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	50.000.000.000	
PEMBIAYAAN NETTO		(104.797.113.736,00)	(90.068.113.736)	(9.931.886.264)

Sumber : Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

Sebagaimana Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 6 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, Rencana Struktur Anggaran yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Kepmendagri nomor 050-5889

Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut rencana struktur pendanaan RKPD tahun 2025 yang disandingkan dengan RPD Tahun 2025-2026 yang disajikan pada tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39
Struktur Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bogor Tahun 2025

KODE	URAIAN	RPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	2.664.680.685.049,76	2.765.238.115.327	2.835.835.210.862
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.502.644.902.329,76	1.587.178.793.643	1.657.775.889.178
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.067.401.480.950,00	1.144.382.200.000	1.201.601.310.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	384.081.992.758,00	392.384.298.949	404.712.505.420
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.387.455.069,76	36.118.899.553	36.454.008.860
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.773.973.552,00	14.293.395.141	15.008.064.898.
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.162.035.782.720,00	1.178.059.321.684	1.178.059.321.684
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.034.040.588.036,00	1.050.064.127.000	1.050.064.127.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.995.194.684,00	127.995.194.684	127.995.194.684
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0		
4.3.1	Hibah	0		
4.3.3	Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	0		
5	BELANJA DAERAH	2.559.883.571.313,76	2.920.067.841.902	2.932.699.321.221
5.1	BELANJA OPERASI	2.328.013.571.313,76	2.625.096.020.390	2.676.499.321221
5.1.01	Belanja Pegawai	1.214.129.058.804,00	1.271.211.993.166	1.271.211.993.166
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.016.884.512.509,76	1.246.864.801.391	1.314.987.328.055
5.1.03	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	221.589.324	300.000.000
5.1.05	Belanja hibah	60.000.000.000,00	78.799.282.670	60.000.000.000
5.1.06	Belanja bantuan social	30.000.000.000,00	27.998.353.839	30.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	200.000.000.000,00	263.306.071.512	256.200.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	16.603.485.059	16.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	60.051.267.270	60.000.000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	133.663.617.536	130.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	52.727.960.447	50.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	259.741.200	200.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	30.000.000.000	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000	30.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.870.000.000,00	1.665.750.000	1.665.750.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.870.000.000,00	1.665.750.000	1.665.750.000
6	SURPLUS / (DEFISIT)	(104.797.113.736,00)	(154.829.726.575)	(96.864.110.359)
6.1	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.497.032.260,00	5.497.032.260	55.497.032.260
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya			
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan			50.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.497.032.260	5.497.032.260
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	110.294.145.996,00	95.565.145.996	45.565.145.996
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	50.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	0	35.271.000.000	35.271.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	10.294.145.996	10.294.145.996
	PEMBIAYAAN NETTO	(104.797.113.736,00)	(90.068.113.736)	(9.931.886.264)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	0	(244.897.840.311)	(86.932.224.095)
	TOTAL APBD	2.670.177.719.309,76	2.770.735.147.587	2.891.332.243122

Sumber: Diolah Bapperida, RPD 2025-2026 dan SIPD-RI, 2024

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam Rancangan APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
4. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
5. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
6. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini;
7. Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Bogor untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga di tingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan

- mengalokasikan pendapatan transfer bagi kabupaten/kota;
9. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Bogor sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kenaikan yang signifikan dipengaruhi oleh kenaikan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan adanya perubahan regulasi terkait tarif dan skema alokasi bagi hasil pajak daerah provinsi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, yang semula menggunakan skema dana bagi hasil pajak daerah provinsi untuk kabupaten/kota berubah menjadi skema opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Kondisi ini telah mempengaruhi terhadap kenaikan target PKB dan BBNKB pada tahun 2025 sebesar Rp.62.141.342.243,- apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yang masih menggunakan skema alokasi dana bagi hasil pajak daerah provinsi untuk kabupaten/kota.

3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 2025

Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bogor sebagai salah satu sumber dana penopang pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
4. Pemantapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah;
5. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
7. Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak;
12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
13. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan;
15. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
16. Melaksanakan sensus data kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bogor;
17. Sinergi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB dengan Pusat

Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bogor;

18. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah;
19. Kewajiban melaksanakan validasi pada saat proses peralihan hak BPHTB;
20. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penggunaan Tapping Box.

3.2.3.2 Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Pendapatan Transfer 2025

Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendapatan Transfer;
4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA. 2024, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil TA. 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil dapat direncanakan berdasarkan pada: Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 4 (empat) tahun terakhir yaitu TA. 2020, TA. 2021, TA. 2022 dan TA. 2023/Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA. 2024.
5. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2024, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA. 2024 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA. 2023;

6. Mematangkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
7. Mematangkan usulan Bantuan Keuangan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.3.3 Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan optimalisasi dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan rencana kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan:

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:

1. Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;
2. Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
3. Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
6. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang

tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;

7. Peningkatan upaya yang dapat mengembalikan peningkatan potensi di sektor pariwisata Kota Bogor dengan melaksanakan :
 - a. Sosialisasi potensi pariwisata Kota Bogor;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
 - c. Melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun citra pariwisata Kota Bogor;
 - d. Meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
 - e. Melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman sebagai salah satu potensi wisata dan potensi pendapatan asli daerah;
 - f. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil;
 - i. Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, fungsionalisasi jabatan dan lain sebagainya;
 - j. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;
 - k. Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - l. Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan law enforcement pengelolaan PAD.

Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:

- a. Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;

- b. Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak);
- d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.4 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Ketentuan umum alokasi belanja daerah Tahun 2025 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut:

1. Pagu belanja setiap perangkat daerah maksimal sesuai dengan nilai pagu indikatif yang ditetapkan;
2. Penetapan rencana kerja mempertimbangkan pencapaian kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, serta kegiatan prioritas/kegiatan unggulan yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan 3 (tiga) tujuan:
 - a. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas Pendidikan;

- Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
 - Meningkatnya taraf hidup Masyarakat;
 - Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif.
- b. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata, dan Berkelanjutan, sasaran :
- Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar;
 - Meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
 - Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar;
 - Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang Mampu Menunjang Daya Saing Ekonomi Daerah
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
- Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif;
 - Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
3. Penetapan aktivitas dalam Renja agar mengacu pada Renstra dan Indikasi Program pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
4. Mendukung program strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
5. Tersedianya Alokasi anggaran yang bersifat mandatori (pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengawasan,

- Infrastruktur, Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, Stunting, Kemiskinan, SPM, Pengangguran dan Inflasi);
6. Alokasi Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu:
 - a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - c. Dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (time bound), (SMART);
 - d. Dalam pendanaan yang direncanakan menganut prinsip “money follow program” dengan memperhatikan permasalahan serta isu prioritas pembangunan pada tahun 2025 sebagai dasar pengalokasian pendanaan prioritas.
 7. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan pendanaan untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% (dua puluh persen) secara akumulatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan yang berdasarkan rapor pendidikan;
 8. Dalam upaya percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) perlu dilakukan sinergitas antar Perangkat Daerah, maka dari itu untuk Tahun 2025 Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam percepatan penanganan tersebut agar mengalokasikan kegiatan pembinaan maupun pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF), sedangkan bagi Kelurahan alokasi

sarana dan prasarana diutamakan untuk mendukung percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) baik sifatnya pembinaan secara langsung maupun pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Kelurahan;

9. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat melalui hasil Musrenbang dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Belanja Sarana Prasarana Kelurahan bersumber dari Usulan Musrenbang yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.
11. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada Tahun 2025 harus mempertimbangkan prioritas pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
12. Perencanaan belanja daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan harus melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan program sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,

persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampiiian teknis;

13. Pengutamaan Belanja wajib dan mengikat yang dialokasikan untuk kebutuhan selama 1 Tahun;
14. Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan apabila sudah dilengkapi dokumen syarat dasar pembangunan seperti perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, terkecuali untuk pembangunan/peningkatan/perbaikan infrastruktur/bangunan gedung dibawah Rp.200.000.000 dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026 maka DED dapat disusun pada tahun berkenaan;
15. Mengalokasikan minimal 40% dari anggaran belanja pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri, (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 25%;
16. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, untuk masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam database di aplikasi SOLID dan pengajuan usulannya melalui aplikasi SAHABAT;
17. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk di dalamnya belanja penanganan darurat dan mendesak;
18. Perencanaan pengadaan barang/jasa di Kota Bogor untuk tahun 2025 sesuai dengan yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan mengalokasikan minimal 30% (tiga puluh persen) transaksi melalui e-purchasing;

19. Melaksanakan kegiatan lelang dini pada kegiatan PBJ Strategis untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses PBJ sesuai ketentuan yang berlaku;
20. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
21. Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diutamakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022;
22. Dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja prioritas dan/atau belanja tidak terduga, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
23. Penyesuaian alokasi belanja pegawai untuk menuju proporsi 30% terhadap APBD, dengan ketentuan:
 - a. Penganggaran Belanja Pegawai menuju proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2025 dengan alokasi 14 bulan;
 - c. Belanja TPP dialokasikan 14 bulan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 (menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat);
 - d. Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/ Kuasa BUD, PA/ KPA, PPK—SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu / Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan;

Contoh: Pagu SKPD A diluar gaji dan tunjangan sebesar 50 Milyar, maka total honor yang boleh dianggarkan adalah maksimal 5 Milyar terdiri dari:

- 1) honor PA (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 3.420.000 = 41.040.000;
- 2) honor PPK-SKPD (spesifikasi diatas 25M - COM) = 12 bulan x 1.520.000 = 18.240.000;
- 3) honor Bendahara Pengeluaran (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.320.000 = 15.840.000;
- 4) total a, b, dan c = 75. 120.000 (lebih kecil dari 5 milyar);
Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD / Kuasa BUD, PA/ KPA, PPK - SKPD, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan.

24. Belanja barang dan jasa:

- a. Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi;
- b. Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2024 (Tenaga Pendukung Administrasi, Tenaga Pendukung Teknis, Keamanan, Pengemudi, Kebersihan);
- c. Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari (Tenaga Pendukung Administrasi, Tenaga Pendukung Teknis, Keamanan, Pengemudi, Kebersihan) yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung selama 12 bulan sesuai dengan standar harga satuan jasa tahun 2025;
- d. Belanja Non ASN untuk TKK dihitung 14 bulan;
- e. Tidak ada rekrutmen baru Non ASN di tahun 2025;
- f. Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/ Insentif Pemungutan Pajak Retribusi;
- g. Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2025);
- h. Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor;
- i. Alokasi BOS Kota Bogor sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2024;
- j. Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:

- 1) Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah tangga;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- k. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD;
- l. Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD;
- m. Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi;
- n. Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
- o. Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2025;
- p. Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM;
- q. Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;
- r. Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2024 dan Standar Harga Satuan Jasa 2025. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah);
- s. Pemberian Honorarium RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2025;
- t. Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - 1) Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan;
 - 2) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 3) Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ.

- u. Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
- v. Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
- w. Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
- x. Belanja perjalanan dinas untuk mobilitas dari tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) untuk pegawai Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, dengan ketentuan:
 - a) dalam rangka koordinasi / konsultasi atas inisiatif perangkat daerah dengan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
 - b) dalam rangka memenuhi undangan dengan jumlah peserta paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengemudi, sepanjang tidak ditentukan lain dalam surat undangan;
 - c) dalam rangka studi banding, kunjungan kerja, dan atau sejenisnya atas inisiatif sendiri dengan maksimal jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, dianggarkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) perangkat daerah;
 - 2) untuk narasumber pada kegiatan atau saksi yang dibutuhkan dan atau dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bogor;
- y. Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk online;

- 2) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah dan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - 3) dilaksanakan di wilayah Kota Bogor;
 - 4) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka 3) untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD;
- z. Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah;
 - 2) tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah;
- â. Belanja sistem informasi/aplikasi agar mendapatkan persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memegang prinsip efisiensi, integrasi dan interoperabilitas serta satu data Kota Bogor.
25. Pengalokasian Belanja untuk penunjukan daerah Kota Bogor sebaga penyelenggara Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.727-Kesra/2022, tanggal 18 November 2022;
 26. Pengalokasian Belanja Angkutan Umum dengan skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Bogor sesuai surat dari Kepala BPTJ Nomor AJ.005/4/14/BPTJ/2024, tanggal 13 Mei 2024;
 27. Pengalokasian Belanja terkait kegiatan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB untuk pengadaan dan penyebaran Unit Layanan Samsat Digital Mandiri, WA Blast (penagihan dan sosialisasi), operasional penelusuran di kecamatan, kegiatan pendukung lainnya (peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB) dengan estimasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-
 28. Belanja Subsidi
Belanja subsidi dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Belanja bunga
 - a. Pembayaran bunga atas pinjaman PDAM kepada World Bank;
 - b. Pembayaran bunga atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
30. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - a. Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah dilakukan verifikasi oleh PD verifikator yang sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.
31. Belanja modal:
 - a. Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 - b. Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas secara selektif, efektif dan efisien;
 - c. Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
32. Belanja Tidak Terduga:

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh

pemerintah daerah, serta tidak biasa/ tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun Anggaran 2025;

33. Belanja Transfer

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPA Galuga sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan Nomor 658. 1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020;

34. Kebijakan perencanaan belanja daerah dikecualikan /d disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi untuk alokasi anggaran berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.

3.2.5 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pembiayaan daerah di Kota Bogor diarahkan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan - kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan - kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal daerah. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Arah kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2025 berencana untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan dalam rangka ekspansi usaha. Pemenuhan penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan secara bertahap serta melihat kemampuan keuangan daerah yang besarannya tertuang dalam Peraturan Daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
 - b. Penerimaan Cicilan Utang Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan;
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pakuan;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang terkait:
 - 1) Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan;

- 2) Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor.
- c. Pembentukan Dana Cadangan penyelenggaraan Porprov XV di Kota Bogor Tahun 2026.

3.2.6 ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber – sumber penerimaan konvensional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternative pembiayaan, Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah), Dana umat, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaa Lainnya (PHLN, Obligasi dan Sukuk).

3.2.7 APBN (DANA TRANSFER DAN BELANJA DIPA K/L DI DAERAH)

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah berupa Transfer ke Daerah yang terdiri dari dana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal. Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya:

1. Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
2. DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan,

dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.

3. Pemberian insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan terkait pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

3.2.8 DANA UMAT

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Bogor adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kota Bogor yang cukup besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

3.2.9 PERAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sumber pendapatan Daerah Tahun 2025 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari Corporate Social Responsibility

(CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan, Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Peran perusahaan/sektor swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada Tahun 2025 akan diarahkan untuk:

- a. Pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
- g. Sarana dan prasarana keagamaan;
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui:

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor.
2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.
5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP, Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR/TJSLP Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

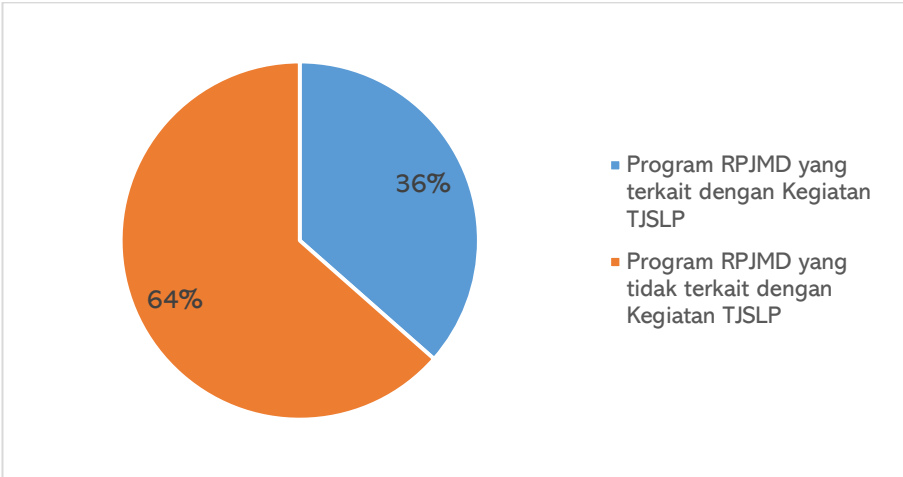
Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor dalam menuntaskan Prioritas Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor melakukan alternatif pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor dalam program

CSR/TJSLP sebatas sekretariat yang kemudian memfasilitasi dalam pembentukan Forum CSR/TJSLP dimana dalam kepengurusannya terdiri dari para pengusaha dan unsur pemerintah. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor berfungsi untuk menyelaraskan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Forum CSR/TJSLP agar tepat sasaran serta sinergi dengan prioritas pembangunan Kota Bogor.

Dari 137 program yang ada dalam RPJMD Perubahan Kota Bogor Tahun 2019-2024, terdapat 50 program atau 36,50% yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan CSR/TJSLP Kota Bogor yang dilaksanakan tahun 2023.

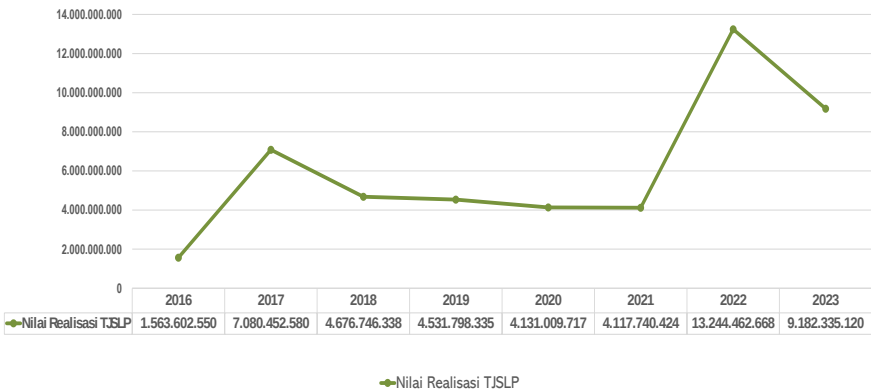
Gambar 3.2

Persentase Program RPJMD yang Terkait Dengan Kegiatan CSR/TJSLP Tahun 2023



Grafik 3.32

Realisasi TJSLP Tahun 2016-2023



Berikut disampaikan beberapa program CSR/TJSPL yang sudah dilaksanakan dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Bogor Tahun 2019-2024 melalui tabel 3.40:

Tabel 3.40

Keterkaitan Kegiatan CSR/TJSPL Tahun 2023 dengan Program dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

No	Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
8	Program Informasi dan Komunikasi Publik
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10	Program Pengembangan Kebudayaan
11	Program Pembinaan Perpustakaan
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
13	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
14	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
16	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18	Program Kawasan Permukiman
19	Program Penanggulangan Bencana
20	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
21	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
22	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
23	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
24	Program Pemasaran Pariwisata

No	Program
25	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
26	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
27	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
28	Program Rehabilitasi Sosial
29	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
30	Program Penanganan Kerawanan Pangan
31	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
32	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
33	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
34	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
36	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
37	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
38	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
39	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
40	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
41	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
42	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
43	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
44	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
45	Program Penyuluhan Pertanian
46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
47	Program Pengembangan UMKM
48	Program Pengelolaan Persampahan
49	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
50	Program Keanekaragaman Hayati

Sumber : Laporan CSR/TJSLP Kota Bogor, Tahun 2023

3.2.9.1 KEGIATAN UNGGULAN SESUAI PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 YANG DIDANAI DARI CSR/TJSLP

1. PERCEPATAN ODF

Buang air besar sembarangan (BABS) masih menjadi masalah di Kota Bogor. Masih banyak rumah tangga di Kota Bogor yang masih membuang limbahnya langsung ke alam. Banyak dari masyarakat Kota Bogor tidak memiliki septictank atau terhubung dengan septictank komunal, banyak juga yang belum memiliki septictank yang memenuhi standar. Kebiasaan tersebut dapat berakibat buruk bagi lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat sendiri. Untuk itu, di tahun 2023, percepatan ODF menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Bogor. ODF sendiri merupakan predikat bagi wilayah/daerah yang sudah bebas buang air besar sembarangan / *open defecation free*.

Dukungan CSR/TJSLP terhadap percepatan ODF yaitu berupa pembuatan *septictanck* untuk masyarakat baik berupa *septictanck* individu maupun *septictank* komunal. Terdapat beberapa pelaku usaha yang melaporkan berpartisipasi dalam upaya percepatan ODF di Kota Bogor.

2. PENGENTASAN STUNTING

Dalam rangka pengentasan stunting, pemerintah Kota Bogor menggandeng dunia usaha untuk ikut berpartisipasi melalui TJSLP. Pemerintah Kota Bogor, baik melalui perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan banyak bekerjasama dengan dunia usaha untuk mengadakan acara yang berisi pemberian bantuan terkait stunting, seperti Mabar Men, Go Roasting, Dashat, dan lain sebagainya. Dukungan CSR/TJSLP dalam pengentasan stunting yaitu berupa pemberian bantuan makanan berupa telur, makanan tambahan, susu, dan vitamin untuk anak dan ibu hamil. Beberapa pelaku usaha yang melaporkan memberikan bantuan dalam pengentasan stunting.

3. PEMBERDAYAAN UMKM

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk UMKM yang ada di Kota Bogor. Keberadaan PKL di satu sisi menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, selain itu juga menjadi salah satu aktraksi yang menarik bagi penikmat kuliner, terlebih Kota Bogor dikenal sebagai salah satu kota yang menjadi destinasi wisata kuliner. Namun di sisi lain, keberadaan PKL juga merupakan masalah bagi ketertiban dan keindahan kota. Keberadaannya di trotoar mengurangi bahkan mengalihkan fungsi trotoar yang seharusnya merupakan jalur pejalan kaki. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan juga menambah hambatan samping jalan yang menyebabkan kemacetan. Untuk itu, salah satu bentuk pemberdayaan UMKM yang didanai dengan CSR/TJSLP adalah berupa pembuatan *foodcourt* atau sentra kuliner yang menjadi wadah bagi para pelaku UMKM bidang kuliner yang semula berjualan di trotoar dan pinggir jalan.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana TJSLP dilaksanakan oleh PT. Astra Daihatsu di Kelurahan Katulampa. PT. Astra Daihatsu melaksanakan CSR/TJSLP dengan program Kampung Binaan Astra Daihatsu di Katulampa dengan membuka Wahana Ngalun yang dikelola oleh komunitas binaan yang bernama komunitas SARADA (Sahabat Remaja Astra Daihatsu). PT. Astra Daihatsu melaksanakan CSR/TJSLP dengan berfokus pada pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, dan pendidikan. Bentuk bantuan yang diberikan kepada warga kampung binaan tersebut diantaranya berupa pembinaan kelompok untuk kewirausahaan, bantuan alat untuk posyandu, bantuan sarana pertanian, sarana prasarana untuk pengembangan wahana Ngalun, alat pengolahan sampah, dan bibit tanaman.

Adanya Wahana Ngalun di Katulampa ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyaknya wisatawan baik dari Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang berkunjung ke Wahana Ngalun ini, mendatangkan keuntungan bagi kelompok pengelola

wahana. Keuntungan yang didapat, selain digunakan untuk operasional, sebagian juga digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar, seperti perbaikan jalan, serta mensponsori berbagai acara yang diadakan masyarakat.

5. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA UMUM

Penyediaan sarana prasarana umum merupakan salah satu kegiatan yang dapat didanai dengan dana CSR/TJSLP. Pada tahun 2023, ada beberapa kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana umum yang dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha. Kegiatan tersebut diantaranya adalah revitalisasi Taman Lansia oleh PT. GoTo Gojek Tokopedia; Pembangunan MCK Umum oleh RS Hermina; dan perbaikan GOR Pajajaran oleh Bogor Raya Basketball Club, dan lain-lain.

6. PEMBANGUNAN GALERI BUMI PARAWIRA

Pada tahun 2023 Kota Bogor membangun Galeri Bumi Parawira yang berlokasi di Gedung Perpustakaan Kota Bogor. Galeri Bumi Parawira merupakan galeri yang menyajikan sejarah kepemimpinan dan perkembangan Kota Bogor dari periode Kerajaan Pajajaran sampai dengan saat ini. Galeri ini dibangun dengan dana Rp3,1 Miliar dan didanai 100% dengan dana CSR/TJSLP dari Bank BJB dan beberapa pihak lain.

Galeri Bumi Parawira saat ini sudah dibuka untuk umum dan gratis. Pengunjung hanya perlu reservasi melalui website bumiparawira.com dan datang pada jadwal yang sudah ditentukan. Galeri Bumi Parawira berisi lukisan, diorama, dan koleksi lain yang menggambarkan Kota Bogor yang dibagi menjadi lima chapter yang menggambarkan lima era, yaitu era Kerajaan Pajajaran (1482-1570), Kolonialisme (1690-1945), Revolusi & Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi (1998-sekarang).

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan CSR/TJSLP di Kota Bogor berperan dalam mendukung pembangunan daerah Kota Bogor. Sebagian kegiatan sudah searah dengan program RPJMD, program prioritas, dan arah kebijakan daerah.

Kedepannya keselarasan antara pelaksanaan CSR/TJSLP dengan program pembangunan dan arah kebijakan perlu terus diupayakan. Dengan demikian, peran CSR/TJSLP sebagai alternatif pendanaan program daerah dapat betul-betul terlaksana.

Fasilitasi CSR/TJSLP Kota Bogor masih mengalami kendala dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Bogor, hal tersebut terjadi akibat:

1. Belum semua pelaku usaha yang melaksanakan CSR/TJSLP di Kota Bogor melakukan pelaporan.
2. Belum semua perangkat daerah melaporkan pelaksanaan CSR/TJSLP yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait.
3. Belum adanya batasan yang jelas mengenai pengertian CSR/TJSLP sehingga tim fasilitasi masih kesulitan memilah kegiatan-kegiatan yang merupakan CSR/TJSLP dan bukan.
4. Laporan yang masuk sebagian merupakan kegiatan yang dilaksanakan diluar Kota Bogor.
5. Belum optimalnya pelaporan melalui website CSR/TJSLP.
6. Belum terbentuknya Forum CSR/TJSLP.
7. Belum adanya update terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang CSR/TJSLP di Kota Bogor.

Dengan adanya kendala tersebut, maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut agar pemanfaatan CSR/TJSLP di Kota Bogor sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Bogor Tahun 2019-2024, adapun hal yang perlu dilakukan seperti:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah di Kota Bogor, agar seluruh pelaksanaan kegiatan CSR/TJSLP di perangkat daerah terkait dapat tercatat dan dilaporkan kepada Tim Fasilitasi
2. Melakukan sosialisasi kembali mengenai pelaporan CSR/TJSLP dan pemanfaatan website CSR/TJSLP Kota Bogor kepada pelaku usaha dan perangkat daerah.

3. Pembaruan terhadap peraturan yang mengatur tentang CSR/TJSLP, untuk memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian CSR/TJSLP, bidang-bidang yang dapat didanai dengan CSR/TJSLP, pembaruan format laporan CSR/TJSLP, dan lain-lain.
4. Pembentukan dan aktivasi kembali Forum CSR/TJSLP Kota Bogor.

3.2.10 KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) ATAU PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan.

Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiayaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif

pembiayaan. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.2.11 HIBAH

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non-departemen), lembaga pemerintahan non departemen (selanjutnya disebut lembaga) Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.2.12 PENDANAAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang ada. Pemerintah

Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bond). Selain Obligasi Daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah Obligasi Syariah atau Sukuk.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari proses transisi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang berisi arah kebijakan, strategi, serta penetapan ukuran keberhasilan Pembangunan daerah kemudian nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Bogor. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas Pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tetap disandingkan Bersama program unggulan kepala daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2025.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025, prosesnya memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bogor.

4.1.1 Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis Tingkat pertumbuhan pada tahap berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu Pendapatan perkapita setara negara maju, Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Tema besar pembangunan tahun 2025-2029 yaitu: penguatan fondasi transformasi dilaksanakan melalui penguatan 5 transformasi yaitu:

1. Transformasi sosial
meliputi Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi ekonomi

Meliputi Industri, pariwisata, ekonomi biru, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, BUMN, percepatan transisi energi, ekonomi sirkular industri, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, digital, integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

Meliputi transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, dan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Meliputi stabilitas makro, politik luar negeri, pertahanan, hukum, keamanan, dan demokrasi

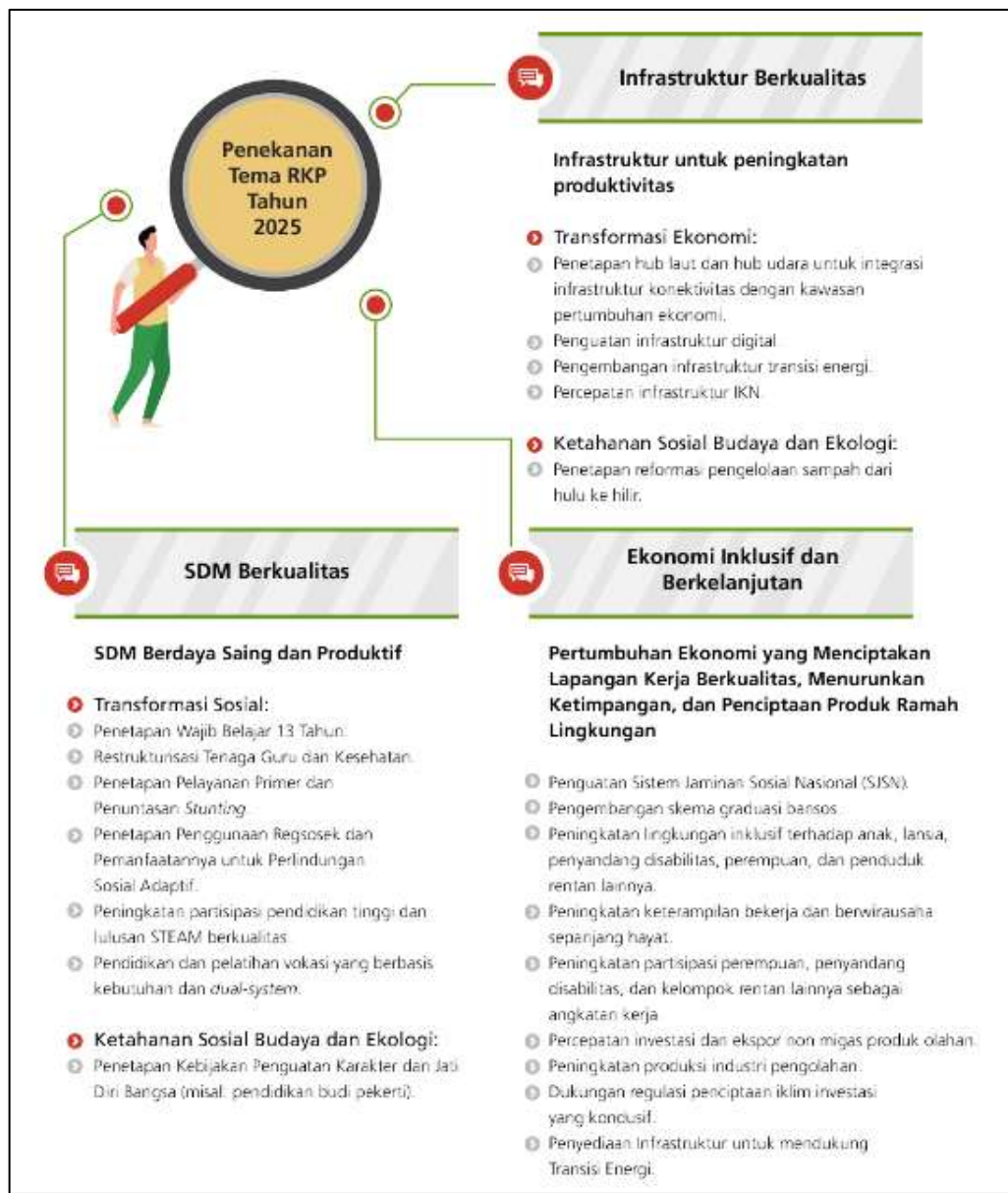
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Meliputi: isu agama, isu budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pangan, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dan energi

Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

Tema RKP Tahun 2025 yaitu *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada grafik 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1
Fokus Penekanan Tema RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Berikut adalah tabel 4.1 target indikator sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Tabel 4.1

Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Nasional Tahun 2025

Uraian	Capaian		Target
	2022	2023	2025
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,05	5,3-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	5,32	4,5-5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	9,36	7,0-8,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,388	0,379-0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,77	74,39	-
Indeks Modal Manusia	-	0,53	0,56
Penurunan Emisi GRK (%)	28,49	34,09	38,6
Nilai Tukar Petani (NTP)	109	105,21	113-115
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,51	-	104-105

Sumber : BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

4.1.2

Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Arah pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dibagi berdasarkan wilayah, untuk wilayah pulau Jawa tema pembangunan dikhususkan menjadi “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Provinsi Jawa Barat (Jabar) difokuskan menjadi “Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional” dengan indikator makro seperti gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 4.2

Target Makro.Provinsi Jabar 2025-2029



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran Pembangunan Jawa Barat sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta Pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunkan risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas Lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam Pembangunan.

Tabel 4.2
Target Indikator Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	8,01	7,88	7,76
2	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,68	7,49	7,30
3	Rasio Gini (nilai)	Poin	0,408	0,406	0,404
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,56	73,78	74,00
5	Penurunan Emisi GRK (%)	Persen	7,11	7,72	7,98
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	4,50	4,54	4,59
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	N/A	N/A	N/A

Sumber : RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar, serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada tema RPJPD I (2025-2029), yaitu penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “meningkatkan kemandirian Masyarakat Jawa Barat” maka tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah :

“Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”.

4.1.3 Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bogor sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup Masyarakat;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif.

Tujuan 2 Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
3. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar;
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar;
5. Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif
2. Terciptanya budaya birokrasi Ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional

4.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor

Tujuan dan sasaran pembangunan dicapai melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah pemahaman yang diperlukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor untuk mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun metode, tahapan, atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan salah satu referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kota Bogor Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
1.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	
			Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik	Dinas Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada setiap jenjang	Dinas Pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa kepada siswa miskin	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial
			Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan pengembangan inovasi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja	Dinas Pendidikan	Dinas Tenaga Kerja

			Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Meningkatkan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan sekolah	Dinas Pendidikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Mengembangkan sekolah negeri baru sesuai dengan Standar Pendidikan Pelayanan Minimal khususnya SMP sederajat dan SMA sederajat yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Dinas Pendidikan	
			Meningkatkan pendidikan inklusif yang berkualitas	Dinas Pendidikan	
			Meningkatkan asupan makanan bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatkan akses terhadap siswa putus sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial
			Mengembangkan PKBM yang mampu menumbuhkan minat dan bakat siswa	Dinas Pendidikan	
		Memperkuat literasi masyarakat	Meningkatkan kualitas perpustakaan berstandar nasional	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	

	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses kesehatan	Meningkatkan pembinaan perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Mendorong minat baca masyarakat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Penguatan pencegahan, deteksi dini wabah, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pelayanan prima	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang terintegrasi	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security)	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatkan kesadaran PHBS masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah,

			Menurunkan angka perilaku ODF masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah,
			Penegakan hukum kawasan tanpa rokok	Satpol PP	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan pelayanan kuratif bagi masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan puskesmas dan posyandu	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

					Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakat	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
		Memperkuat pembudayaan olahraga pada masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Meningkatkan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		3. Menurunkan angka kelahiran	Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
			Optimalisasi pembentukan kelompok bina keluarga seperti BKP dan BKR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pemantapan kualitas keluarga dan penurunan angka kematian bayi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

					Perlindungan Anak
		4. Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Menurunkan angka stunting pada balita	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Sosial
			Meningkatkan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Sosial
			Meningkatkan pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Sosial
			Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		5. Mengurangi kawasan kumuh dan lingkungan sehat	Meningkatkan hunian layak huni	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman	

			Meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatkan waktu tanggap terhadap kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan	Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja	
			Meningkatkan kompetensi para pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja	
		Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda	Meningkatkan kewirausahaan pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan
			Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan
		Mengurangi kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan dan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

					Anak, Sekretariat Daerah
			Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin	Dinas Sosial	
			Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana	Dinas Sosial	
			Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	
			Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat	Dinas Sosial	
			Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana	Dinas Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman
	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul,	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga baik ketahanan struktur fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

berintegritas, produktif, dan inovatif			Perlindungan Anak	
		Meningkatkan pembinaan dan pendampingan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatkan pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

				Perlindungan Anak	
			Menurunkan jumlah anak terlantar	Dinas Sosial	
			Meningkatkan pelayanan lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan	Dinas Sosial	
		Memperkuat legalitas kependudukan	Meningkatkan layanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			Meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda	1. Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			2. Meningkatkan pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			3. Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4. Meningkatkan program pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti, dan upaya untuk mengedepankan wawasan kebangsaan	Dinas Pendidikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat	Meningkatkan penggalan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan
			Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya)	Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan masyarakat dan toleransi	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan peran partai politik dan peran perempuan dalam politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatkan pemberdayaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga

			Meningkatkan penghargaan terhadap pahlawan	Dinas Sosial	
			Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penguatan kemajuan kebudayaan bangsa	Memperkuat lembaga kesenian tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Memperkuat pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai potensi ekonomi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan pembinaan sejarah dan kualitas museum	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan				
	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

					Perdagangan, dan Perindustrian
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pemuda, dan Olahraga
			Mengembangkan kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi	Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM. IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

			demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf		
			Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatkan kualitas manajemen koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan koperasi yang sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

			Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Mengakselerasi pelayanan investasi	Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatkan pengembangan City Marketing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
			Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
			Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Komunikasi dan Informasi
			Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

					Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
		Mengembangkan usaha sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

			Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	

			Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
	2. Menjaga stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan penting		Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	

				Perdagangan, dan Perindustrian	
			Meningkatkan penggunaan produk lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	
		Memperkuat aktivitas perekonomian sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan kualitas irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar	Memperkuat efisiensi dan efektifitas dalam proses pengembangan ekosistem pasar	Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedagang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Memperkuat branding produk	Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Meemperlus jangkauan konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Mengurangi risiko bencana daerah	Meningkatkan manajemen mitigasi dan adaptasi risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mitigasi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Memperkuat penegakan peraturan daerah serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparaturnya penegak perda dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	

			Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang penegak perda dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatkan kerjasama dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
		Mengoptimalkan pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas sistem drainase	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang	
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan	

		Terwujudnya kualitas, konektivitas dan infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum	Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas	Dinas Perhubungan	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota	Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau publik budidaya yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau publik kawasan lindung	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan sampah di sumber	Dinas Lingkungan Hidup	
			Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung spbe daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif, dan berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas data dan informasi serta alternatif sumber pendanaan dalam		Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan kematangan organisasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan	Sekretariat Daerah	

		Memperkuat akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	
			Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Inspektorat	
			Optimalisasi capaian kinerja pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah	Inspektorat	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan PD yg sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Inspektorat	
			Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap peraturan yang berlaku	Inspektorat	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
			Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan	
			Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kecamatan	Kecamatan	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas	Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan	Sekretariat Daerah	
			Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan di wilayah	Sekretariat Daerah	
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Kecamatan	

			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan	Inspektorat	
			Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbang	Seluruh Perangkat Daerah	
		Meningkatkan pengelolaan arsip yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Meningkatkan kualitas pemanfaatan arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Memperkuat administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatkan Penataan organisasi, penataan per-UU, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem informasi PBJ, kualitas layanan, PBJ dan Penguatan SDM PBJ	Sekretariat Daerah	
			Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	

		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
		Memperkuat pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi yang memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan pembangunan Kota Bogor	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan penerapan invensi dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan	Sekretariat Daerah	
		Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam rangka menunjang fungsi DPRD Kota Bogor	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	
	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi	Meningkatkan kualitas pengadaan, pemberhentian, sistem informasi dan penatausahaan kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Mengoptimalkan proses mutasi dan promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

			Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatkan kinerja organisasi yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani	Meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBN	Inspektorat	

Sumber : Analisis Bapperida, 2024

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran Pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas Pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

4.2.1 Isu strategis dan Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Bogor Tahun 2025 diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2023;
2. Kondisi terkini Tahun 2024;
3. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026;
4. Arah kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;

5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Ditetapkan isu strategis Pembangunan Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi
3. Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditetapkan tema Pembangunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 adalah “Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”.

4.2.2 Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan

Hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka keterkaitan isu strategis dengan permasalahan Pembangunan dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025

Arah Kebijakan Nasional	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Isu Strategis RPD Kota Bogor Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025
1. Sumber Daya Manusia berkualitas 2. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan 3. Infrastruktur berkualitas	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Belum meratanya akses dan mutu kesehatan 2. Belum meratanya akses dan mutu pendidikan 3. Belum optimal layanan pendidikan Inklusif 4. Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia 5. Belum tercapainya pengentasan kemiskinan 6. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi	1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah 2. Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif 3. Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM 5. Belum optimalnya peran BUMD 6. Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 7. Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi

Arah Kebijakan Nasional	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Isu Strategis RPD Kota Bogor Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025
			8. Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	
	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan	6. Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal 7. Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan 8. Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman 9. Belum optimalnya kualitas penataan ruang 10. Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	3. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel 4. Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber : Analisis Bapperida, 2024

4.2.3 Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKPD dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Rencana kerja pemerintah (RKP) Republik Indonesia mengusung tema Pembangunan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat mengusung tema Pembangunan “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”. Kemudian RKPD Kota Bogor mengusung tema “Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas” Keselarasan dokumen-dokumen tersebut diujikan melalui keterkaitan Isu Strategis dan Arah Kebijakan. Berikut adalah tabel keselarasan Isu Strategis Kota Bogor Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2025.

Tabel 4.5
Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Perangkat Daerah

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing (P1/T1)	1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 1.1.2 Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik 1.1.3 Meningkatkan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik 1.1.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada setiap jenjang 1.1.5 Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa kepada siswa miskin 1.1.6 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan pengembangan inovasi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar 4. Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat 5. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 7. Peningkatan pelayanan penyakit menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif	Diantaranya sebagai berikut : 1. Kualitas Pendidikan masih rendah 2. Kesenjangan partisipasi Pendidikan tinggi 3. Kualitas lulusan masih rendah 4. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun 5. Angka kematian Ibu masih tinggi 6. Stunting masih tinggi 7. Prevelensi obesitas terus meningkat 8. Kasus baru TBC peringkat ke-2 Dunia 9. Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia 10. Puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar 1. Akurasi program bantuan sosial masih rendah 2. Pelaksanaan system Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal dan inklusif	SDM Berdaya Saing dan Produktif

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.1.7 Meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja 1.1.8 Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada sekolah 1.1.9 Meningkatkan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan sekolah 1.1.10 Mengembangkan sekolah negeri baru sesuai dengan Standar Pendidikan Pelayanan Minimal khususnya SMP sederajat dan SMA sederajat yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 1.1.11 Meningkatkan pendidikan inklusif yang berkualitas 1.1.12 Meningkatkan asupan makanan bagi peserta didik 1.1.13 Meningkatkan akses terhadap siswa putus sekolah 1.1.14 Mengembangkan PKBM yang mampu menumbuhkan minat dan bakat siswa		8. Percepatan penurunan stunting 9. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK 10. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif 11. Penguatan pembiayaan kesehatan 12. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 13. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha 14. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni 15. Pemberdayaan masyarakat dan desa 16. Pemberdayaan Perempuan 17. Perlindungan terhadap keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan 18. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan	3. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga 4. Tingginya ketimpangan gender 5. Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa	

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.2.1 Meningkatkan kualitas perpustakaan berstandar nasional 1.2.2 Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan 1.2.3 Meningkatkan pembinaan perpustakaan 1.2.4 Mendorong minat baca masyarakat 2.1.1 Penguatan pencegahan, deteksi dini wabah, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 2.1.2 Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pelayanan prima 2.1.3 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat 2.1.4 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang terintegrasi 2.1.5 Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security)		sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial 19. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 20. Peningkatan perlindungan perempuan 21. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 22. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup 23. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda 24. Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga 25. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	2.1.6 Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat 2.1.7 Meningkatkan kesadaran PHBS masyarakat 2.1.8 Menurunkan angka perilaku ODF masyarakat 2.1.9 Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat 2.1.10 Penegakan hukum kawasan tanpa rokok 2.1.11 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 2.1.12 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas 2.1.13 Meningkatkan pelayanan kuratif bagi masyarakat 2.1.14 Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	kesehatan sesuai dengan standar 2.1.15 Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan puskesmas dan posyandu 2.1.16 Meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakat 2.2.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga 2.2.2 Meningkatkan prestasi olahraga 2.3.1 Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS) 2.3.2 Optimalisasi pembentukan kelompok bina keluarga seperti BKP dan BKR 2.3.3 Meningkatkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pemantapan kualitas keluarga dan penurunan angka kematian bayi 2.4.1 Menurunkan angka stunting pada balita 2.4.2 Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	penguatan cadangan pangan yang beragam 2.4.3 Meningkatkan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat 2.4.4 Meningkatkan pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat 2.4.5 Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan 2.5.1 Meningkatkan hunian layak huni 2.5.2 Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan 2.5.3 Meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak 2.5.4 Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang layak 2.5.5 Meningkatkan waktu tanggap terhadap kebakaran 3.1.1 Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja 3.1.2 Meningkatkan kompetensi para pencari kerja				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	3.2.1 Meningkatkan kewirausahaan pemuda 3.2.2 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan 3.2.3 Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan 3.3.1 Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 3.3.2 Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata 3.4.1 Meningkatkan keterpaduan dan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan 3.4.2 Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin 3.4.3 Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana 3.4.4 Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial 3.4.5 Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat 3.4.6 Optimalisasi pemenuhan penyediaan				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	dan rehabilitasi korban bencana 4.1.1 Meningkatkan kualitas keluarga baik ketahanan struktur fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya 4.1.2 Meingkatkan pembinaan dan pendampingan keluarga 4.1.3 Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja 4.1.4 Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga 4.1.5 Meningkatkan pemenuhan hak anak 4.1.6 Meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan 4.1.7 Menurunkan jumlah anak terlantar 4.1.8 Meningkatkan pelayanan lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan 4.2.1 Meningkatkan layanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	4.2.2 Meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan 4.3.1 Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi 4.3.2 Meningkatkan pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor 4.3.3 Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda 4.3.4 Meningkatkan program pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti, dan upaya untuk mengedepankan wawasan kebangsaan 4.4.1 Meningkatkan penggalan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya 4.4.2 Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 4.4.3 Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya) 4.5.1 Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 4.5.2 Meningkatkan peran partai politik dan peran perempuan dalam politik 4.5.3 Meningkatkan pemberdayaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan 4.5.4 Meningkatkan penghargaan terhadap pahlawan 4.5.5 Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 4.6.1 Memperkuat lembaga kesenian tradisional 4.6.2 Memperkuat pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai potensi ekonomi				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	4.6.3 Meningkatkan pembinaan sejarah dan kualitas museum				
Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi (P2/T2)	1.1.1 Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor 1.1.2 Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal 1.1.3 Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif 1.1.4 Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif 1.1.5 Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas 1.1.6 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi 1.1.7 Mengembangkan kampung kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal 1.2.1 Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Penerapan link and match industri kecil-industri besar 2. Pengembangan IKM dan industri hijau 3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu 4. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital 5. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor 6. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok 7. Peningkatan Perlindungan Konsumen 8. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan 9. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya	Diantaranya sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia dalam tren melambat 2. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5,0 % dalam 20 tahun terakhir 3. Total Factor Productivity (TFP) Indonesia dalam tren menurun;	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.3.1 Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM. IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) 1.3.2 Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf 1.3.3 Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis		prasarana dan sarana pertanian 10. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani 11. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan 12. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 13. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 14. Peningkatan perhutanan sosial 15. Perbaikan tata kelola pangan dengan memperhatikan akses ketersediaan dan pemanfaatan pangan 16. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.3.4 Meningkatkan kualitas manajemen koperasi 1.3.5 Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian 1.3.6 Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi 1.3.7 Meningkatkan koperasi yang sehat 1.3.8 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi 2.1.1 Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik 2.1.2 Meningkatkan pengembangan City Marketing 2.1.3 Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2.1.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah 2.2.1 Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan		17. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture 18. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing 19. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis 20. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 21. Pengembangan budaya local yang mendukung pengembangan pariwisata 22. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi 23. Promosi dan peningkatan layanan investasi 24. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas 25. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	pajak daerah dan retribusi daerah 2.3.1 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja 2.3.2 Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM 2.3.3 Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar 2.3.4 Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja 2.4.1 Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan 2.4.2 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan 3.1.1 Mengembangkan klaster industri, kemitraan		26. Peningkatan keterampilan angkatan kerja 27. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja 28. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan 29. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah 3.1.2 Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau 3.1.3 Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu 3.1.4 Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional 3.1.5 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen 3.1.6 Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional 3.1.7 Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya 3.1.8 Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan 3.1.9 Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan 3.1.10 Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor 3.1.11 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan 3.1.12 Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan 3.1.13 Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis 3.2.1 Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting 3.2.2 Meningkatkan penggunaan produk lokal 3.3.1 Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	3.3.2 Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian 3.3.3 Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan 3.3.4 Meningkatkan penyuluhan pertanian 3.3.5 Meningkatkan kualitas irigasi 3.3.6 Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan 3.3.7 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan 4.1.1 Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk 4.1.2 Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk 4.1.3 Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedagang 4.2.1 Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran 4.2.2 Meemperluas jangkauan konsumen				
Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan (P3/T3)	1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah 1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung 1.1.3 Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan 1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan 1.2.2 Meningkatkan kualitas sistem drainase 1.2.3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas 1.3.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi 1.3.2 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum	Pemeratan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	1. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi 2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat, serta Kawasan Cekungan Bandung 3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan 4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan 5. Pemanfaatan ruang yang efektif	Diantaranya sebagai berikut : 1. Kualitas jalan daerah yang masih rendah 2. Penuntasan manfaat bendungan terbangun 3. Gap Pengelolaan Sampah	Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.3.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas 1.3.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang 2.2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau publik kawasan lindung 2.2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan sampah di sumber 2.2.3 Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan 2.2.4 Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 2.2.5 Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup		6. Pengembangan Sistem Transportasi yang berkeselamatan dan Transportasi Massal yang ramah lingkungan 7. Pemenuhan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri 8. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah 9. Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman 10. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah 11. Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman 12. Penyelenggaraan Bangunan Gedung 13. Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan 14. Peningkatan tatakelola pertanahan 15. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	2.2.6 Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup		pemulihan kualitas lingkungan hidup 16. Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan 17. Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis 18. Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan 19. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian 20. Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 21. Pengembangan potensi konservasi energi dan baru terbarukan 22. Penerapan waste to energy dan circular economy dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian food waste dan food loss 23. Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat 24. Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
			termasuk bencana hidrometeorologi 25. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa 26. Peningkatan kualitas pemerintahan dan potensi desa 27. Peningkatan infrastruktur desa		
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (P4/T4)	1.1.1 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung spbe daerah 1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE 1.1.3 Meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi daerah 1.1.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral 1.1.5 Meningkatkan keterbukaan informasi publik 1.2.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas data dan informasi serta alternatif sumber pendanaan dalam	Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi Serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Peningkatan kapasitas sektor-sektor atau kelompok untuk mandiri dan otonom 2. Peningkatan kapasitas kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi untuk dapat memiliki akses yang setara pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan 3. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, dan penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin	Diantaranya sebagai berikut : 1. Kontribusi Iptek dan inovasi terhadap pembangunan Indonesia masih rendah 2. Terdapat desa/kelurahan serta layanan Pendidikan dan Kesehatan yang belum mendapatkan akses internet <i>blankspot</i> 3. Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) dan kemandirian siber nasional.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.2.2 Meningkatkan kematangan organisasi Perangkat Daerah 1.2.3 Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan 1.3.1 Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 1.3.2 Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP 1.3.3 Optimalisasi capaian kinerja pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah 1.3.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan PD yg sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 1.3.5 Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap peraturan yang berlaku 1.4.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah 1.4.2 Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		kebebasan dan kesetaraan 4. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) dalam mewujudkan World Class Government 5. Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Pengembangan Smart Governance yang unggul dalam rangka mewujudkan Jabar Smart Province 7. Penguatan dan Penataan Organisasi 8. Penerapan sistem merit secara konsisten 9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan corporate university 10. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.4.3 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kecamatan 1.4.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah 1.5.1 Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah 1.5.2 Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan 1.5.3 Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan di wilayah 1.6.1 Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan 1.6.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan 1.6.3 Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbang 1.7.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip		akuntabel berbasis teknologi informasi 11. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi 12. Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	1.7.2 Meningkatkan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip daerah 1.7.3 Meningkatkan kualitas pemanfaatan arsip 1.8.1 Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD 1.8.2 Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah 1.8.3 Memperkuat administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan 1.9.1 Meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem informasi PBJ, kualitas layanan, PBJ dan Penguatan SDM PBJ 1.9.2 Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah 1.10.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah 1.11.1 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan				

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2025	Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2025	Arah Kebijakan RPD Prov Jabar 2024-2026	IsuStrategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	pengembangan pengkajian dan penerapan invensi dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan 1.12.1 Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD 2.1.1 Meningkatkan kualitas pengadaan, pemberhentian, sistem informasi dan penatausahaan kepegawaian 2.1.2 Mengoptimalkan proses mutasi dan promosi ASN 2.1.3 Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat 2.1.4 Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat 2.2.1 Meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBN				

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah kota Bogor dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas daerah, diantaranya adalah:

1. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik;
3. Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi;
4. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan.

Keempat prioritas Pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025 dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan sasaran Pembangunan daerah pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Prioritas, sasaran dan indicator sasaran Pembangunan daerah kota Bogor tahun 2025 dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran
Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target	TARGET KINERJA	
					2025	2026
1	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	(S1) Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	72,74	76,17	77,19
		(S2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,28	83,74	83,88
			Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)
		(S3) Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	12.656	12.700	12.750
			Angka Kemiskinan	6,67	6,05	5,9
			Tingkat Pengangguran Terbuka	9,39	8,11	7,96
			Gini Ratio	0,464	0,43	0,41
		(S4) Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga	61,81	61,98	62,08
			Indeks Ketimpangan Gender	0,434	0,419	0,414

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target	TARGET KINERJA	
					2025	2026
2	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	(S1) Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	5,26	6,14	7,74
		(S2) Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	20,94	21,25	21,88
			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	16,57	12,33	17,43
			Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	2,36	2,36	2,36
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	6	5,9
		(S3) Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	3,96	4,5	5
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	3,73	3,79	4
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	3,2	3,89	4,42
		(S4) Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,98	80	80,09
			Indeks Risiko Bencana	63,49	65	65
3	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	(S1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan rang	48	60	65
			Volume to Capacity Ratio	0,63	0,63	0,62
			Rasio konektivitas	0,78	0,79	0,8
		(S2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,4	57,84	58,09

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target	TARGET KINERJA	
					2025	2026
		daerah yang berkelanjutan				
4	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	(S1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,72	3,75	3,8
			Nilai AKIP Tingkat Kota	BB (76,23)	A	A
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,296)	Level 3 (3,326)	Level 3 (3,356)
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	97,23	98	98,5
			Indeks Kualitas Kebijakan	65	70	70
			Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,055)	Level 3 (3,06)
		(S2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks Ber-Akhlak	60,5	62,5	62,7
			Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat	71,29	72	72,72

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, permasalahan dan isu strategis Pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung prioritas Pembangunan Jawa Barat dan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Keterkaitan prioritas Pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPD Tahun 2025-2026, permasalahan Pembangunan dan isu strategis, dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPD Kota Bogor 2025-2026

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
1. Belum meratanya akses dan mutu kesehatan 2. Belum meratanya akses dan mutu pendidikan 3. Belum optimal layanan pendidikan Inklusif 4. Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia 5. Belum tercapainya pengentasan kemiskinan 6. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 1.1.2 Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik 1.1.3 Meningkatkan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik 1.1.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada setiap jenjang 1.1.5 Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa kepada siswa miskin 1.1.6 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan pengembangan inovasi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar 1.1.7 Meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja 1.1.8 Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada sekolah 1.1.9 Meningkatkan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan sekolah 1.1.10 Mengembangkan sekolah negeri baru sesuai dengan Standar Pendidikan Pelayanan Minimal khususnya SMP sederajat dan SMA sederajat yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 1.1.11 Meningkatkan pendidikan inklusif yang berkualitas 1.1.12 Meningkatkan asupan makanan bagi peserta didik 1.1.13 Meningkatkan akses terhadap siswa putus sekolah 1.1.14 Mengembangkan PKBM yang mampu menumbuhkan minat dan bakat siswa 1.2.1 Meningkatkan kualitas perpustakaan berstandar nasional 1.2.2 Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan	P1) Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		1.2.3 Meningkatkan pembinaan perpustakaan 1.2.4 Mendorong minat baca masyarakat 2.1.1 Penguatan pencegahan, deteksi dini wabah, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 2.1.2 Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pelayanan prima 2.1.3 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat 2.1.4 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang terintegrasi 2.1.5 Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security) 2.1.6 Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat 2.1.7 Meningkatkan kesadaran PHBS masyarakat 2.1.8 Menurunkan angka perilaku ODF masyarakat 2.1.9 Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat 2.1.10 Penegakan hukum kawasan tanpa rokok 2.1.11 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 2.1.12 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas 2.1.13 Meningkatkan pelayanan kuratif bagi masyarakat 2.1.14 Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar 2.1.15 Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan puskesmas dan posyandu 2.1.16 Meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakat 2.2.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		2.2.2 Meningkatkan prestasi olahraga 2.3.1 Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS) 2.3.2 Optimalisasi pembentukan kelompok bina keluarga seperti BKP dan BKR 2.3.3 Meningkatkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pemantapan kualitas keluarga dan penurunan angka kematian bayi 2.4.1 Menurunkan angka stunting pada balita 2.4.2 Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam 2.4.3 Meningkatkan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat 2.4.4 Meningkatkan pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat 2.4.5 Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan 2.5.1 Meningkatkan hunian layak huni 2.5.2 Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan 2.5.3 Meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak 2.5.4 Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang layak 2.5.5 Meningkatkan waktu tanggap terhadap kebakaran 3.1.1 Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja 3.1.2 Meningkatkan kompetensi para pencari kerja 3.2.1 Meningkatkan kewirausahaan pemuda 3.2.2 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan 3.2.3 Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan 3.3.1 Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 3.3.2 Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		3.4.1 Meningkatkan keterpaduan dan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan 3.4.2 Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin 3.4.3 Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana 3.4.4 Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial 3.4.5 Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat 3.4.6 Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana 4.1.1 Meningkatkan kualitas keluarga baik ketahanan struktur fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya 4.1.2 Meningkatkan pembinaan dan pendampingan keluarga 4.1.3 Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja 4.1.4 Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga 4.1.5 Meningkatkan pemenuhan hak anak 4.1.6 Meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan 4.1.7 Menurunkan jumlah anak terlantar 4.1.8 Meningkatkan pelayanan lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan 4.2.1 Meningkatkan layanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil 4.2.2 Meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan 4.3.1 Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi 4.3.2 Meningkatkan pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor 4.3.3 Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda 4.3.4 Meningkatkan program pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti, dan upaya untuk mengedepankan wawasan kebangsaan 4.4.1 Meningkatkan penggalan kreativitas dan inovasi	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya 4.4.2 Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 4.4.3 Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya) 4.5.1 Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 4.5.2 Meningkatkan peran partai politik dan peran perempuan dalam politik 4.5.3 Meningkatkan pemberdayaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan 4.5.4 Meningkatkan penghargaan terhadap pahlawan 4.5.5 Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 4.6.1 Memperkuat lembaga kesenian tradisional 4.6.2 Memperkuat pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai potensi ekonomi 4.6.3 Meningkatkan pembinaan sejarah dan kualitas museum	
1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah 2. Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif 3. Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM 5. Belum optimalnya peran BUMD 6. Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 7. Masih tingginya ketimpangan	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi	1.1.1 Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor 1.1.2 Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal 1.1.3 Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif 1.1.4 Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif 1.1.5 Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas 1.1.6 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi 1.1.7 Mengembangkan kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal 1.2.1 Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif	(P2) Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
pendapatan 8. Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah		1.3.1 Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) 1.3.2 Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf 1.3.3 Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis 1.3.4 Meningkatkan kualitas manajemen koperasi 1.3.5 Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian 1.3.6 Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi 1.3.7 Meningkatkan koperasi yang sehat 1.3.8 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi 2.1.1 Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik 2.1.2 Meningkatkan pengembangan City Marketing 2.1.3 Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2.1.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah 2.2.1 Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah 2.3.1 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja 2.3.2 Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM 2.3.3 Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar 2.3.4 Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja 2.4.1 Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan 2.4.2 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan 3.1.1 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah 3.1.2 Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau 3.1.3 Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu 3.1.4 Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional 3.1.5 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen 3.1.6 Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional 3.1.7 Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya 3.1.8 Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan 3.1.9 Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan 3.1.10 Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor 3.1.11 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan 3.1.12 Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan 3.1.13 Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		3.2.1 Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting 3.2.2 Meningkatkan penggunaan produk lokal 3.3.1 Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan 3.3.2 Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian 3.3.3 Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan 3.3.4 Meningkatkan penyuluhan pertanian 3.3.5 Meningkatkan kualitas irigasi 3.3.6 Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan 3.3.7 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan 4.1.1 Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk 4.1.2 Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk 4.1.3 Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedagang 4.2.1 Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran 4.2.2 Meemperluas jangkauan konsumen	
1. Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal 2. Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan 3. Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman 4. Belum optimalnya kualitas penataan ruang	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah 1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung 1.1.3 Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan 1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan 1.2.2 Meningkatkan kualitas sistem drainase 1.2.3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas 1.3.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi 1.3.2 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum	(P3) Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
5. Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan		1.3.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas 1.3.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang 2.2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau publik kawasan lindung 2.2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan sampah di sumber 2.2.3 Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan 2.2.4 Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 2.2.5 Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup 2.2.6 Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	
1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel 2. Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.1.1 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung spbe daerah 1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE 1.1.3 Meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi daerah 1.1.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral 1.1.5 Meningkatkan keterbukaan informasi publik 1.2.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas data dan informasi serta alternatif sumber pendanaan dalam 1.2.2 Meningkatkan kematangan organisasi Perangkat Daerah 1.2.3 Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan 1.3.1 Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 1.3.2 Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan	(P4) Penguatan Tatakelola Pelayanan Publik

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		SPIP 1.3.3 Optimalisasi capaian kinerja pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah 1.3.4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan PD yg sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 1.3.5 Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap peraturan yang berlaku 1.4.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah 1.4.2 Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 1.4.3 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kecamatan 1.4.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah 1.5.1 Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah 1.5.2 Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan 1.5.3 Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan di wilayah 1.6.1 Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan 1.6.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan 1.6.3 Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbang 1.7.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip 1.7.2 Meningkatkan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip daerah 1.7.3 Meningkatkan kualitas pemanfaatan arsip 1.8.1 Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD 1.8.2 Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah 1.8.3 Memperkuat administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan	

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	ARAH KEBIJAKAN RPD 2025-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2026
		perundangan 1.9.1 Meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem informasi PBJ, kualitas layanan, PBJ dan Penguatan SDM PBJ 1.9.2 Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah 1.10.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah 1.11.1 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan penerapan invensi dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan 1.12.1 Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD 2.1.1 Meningkatkan kualitas pengadaan, pemberhentian, sistem informasi dan penatausahaan kepegawaian 2.1.2 Mengoptimalkan proses mutasi dan promosi ASN 2.1.3 Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat 2.1.4 Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat 2.2.1 Meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBN	

4.2.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pemerintah kota Bogor melakukan penjaringan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diinput ke dalam aplikasi SIPD RI, kemudian hasil pokir yang telah diakomodir di-*import* ke aplikasi internal Pemerintah Kota Bogor yaitu SIAPMANG (Sistem informasi Aspirasi Perencanaan dan Monitoring Pembangunan). Hal ini dilakukan untuk memastikan supaya tidak adanya tumpang tindih antara usulan pokir dengan usulan pokir lainnya maupun usulan pokir dengan usulan musrenbang. Pokir yang diakomodir dan yang telah dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, berikut adalah keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokir DPRD Tahun 2025

Tabel 4.8
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Kota Bogor
Permasalahan Bidang Pendidikan Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Kesehatan a. Penyediaan alat kesehatan; b. Sarana dan Prasarana Posyandu.	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Penanganan infrastruktur ruas jalan skala kota; b. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan skala kota; c. Pembangunan/Rehabilitasi septictank komunal; d. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase skala Kota; e. Pembangunan/Rehabilitasi TPT dasar Sungai.	P3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan sarana dan prasarana persampahan	P3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan

Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan; b. Pembangunan TPT skala permukiman.	P3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Permasalahan Bidang Sosial Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Lansia dan Anak	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Tenaga Kerja Pelatihan Kompetensi dan Kewirausahaan	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Permasalahan Bidang Perhubungan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, meliputi Ruas Jalan Kota dan jalan lingkungan;	P2 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Permasalahan Bidang Pertanian a. Pemberian prasarana bibit hewan dan tanaman; b. Pelatihan budidaya ikan, pembibitan hewan dan tanaman.	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Peningkatan SDM para pelaku UMKM; b. Peningkatan SDM para pelaku koperasi;	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Permasalahan Bidang Kepemudaan dan olahraga Sarana dan prasarana olah raga	P1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
Permasalahan Bidang Pariwisata a. Sarana dan prasarana kesenian; b. Peningkatan SDM pengelola Pariwisata;	P3 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi

4.2.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kernagka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas Pembangunan pada RKP 2025 meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Keterkaitan prioritas, sasaran dan indikator sasaran Pembangunan daerah tahun 2025 dengan Prioritas, Sasaran serta Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan Jawa Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Provinsi Jawa Barat dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
PN.01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PP.06	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PD.01	Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	
S.1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Ketimpangan Gender
PN.02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.		PP.01	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PD.02	Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi	
			PP.05	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PD.03	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	
			PP.06	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PD.04	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	
S.2	Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,	1. Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Ketimpangan Gender
		2. Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang	Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.			kapasitas lembaga demokrasi			unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Ketimpangan Gender
		3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
		4. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	S.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	S.2.3	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Indeks Ketimpangan Gender
								Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)
								Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)
		5. Indeks Ketahanan Energi	S.11	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)
								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
		6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	S.11	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	S.14	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
								Predikat Kota Sehat
		8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	S.14	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
								Predikat Kota Sehat
		9. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
								Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
								Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
		10. Indeks Ekonomi Hijau	S.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan,	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	S.2.3	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
				kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan			dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)
								Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)
		12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		13. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		15. Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan (%); Kumulatif (%)	S.11	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
PN.03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		PP.01	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PD.02	Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi	
S.3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
		2. Rasio Kewirausahaan (%)	S10.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	S.1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
								Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
								Pengeluaran Per Kapita
								Angka Kemiskinan
								Tingkat Pengangguran Terbuka
		3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Gini Ratio
								Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
								Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
				daya saing dan penempatan tenaga kerja				Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
		4. Rasio PDB Pariwisata (%)	S.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S.2.1	Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)
		5. Devisa Pariwisata (miliar USD)	S.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S.2.1	Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
		6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S.2.1	Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)
PN.04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PP.02	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		PD.01	Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	
			PP.03	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah		PD.01	Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	
			PP.04	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		PD.01	penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	
						PD.02	Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi	
S.4	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA: i. Membaca; ii. Matematika; iii. Sains	S.5	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	S.5	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
		c. Harapan lama sekolah (tahun)	S.5	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	S.5	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
		3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
								Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
								Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
		4. Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB); b. Peringkat Indeks Inovasi Global	S.18	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S.4.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi
								Indeks SPBE
								Nilai AKIP Tingkat Kota
								Opini BPK
								Tingkat Maturitas SPIP
								Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
								Indeks Kualitas Kebijakan
								Indeks Manajemen Risiko (MRI)
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
								Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
				daya saing dan penempatan tenaga kerja				Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
		6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	S.6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
		7. Usia Harapan Hidup (tahun)	S.8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
								Predikat Kota Sehat
		8. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup); b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	S.9	Meningkatnya upaya percepatan penurunan stunting	Prevalensi Stunting (%)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
								Predikat Kota Sehat
		9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	S.8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
								Predikat Kota Sehat
		10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	S.8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
								Predikat Kota Sehat

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
		11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	S.6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
		12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	S.6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
PN.05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PP.01	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PD.02	Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi	
S.5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	S.2.3	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)
					Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)
								Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
		2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
								Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
								Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
		3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	S.12	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang
								Volume to Capacity Ratio
								Rasio konektivitas
		4. Biaya Logistik (% PDB)	S.12	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang
								Volume to Capacity Ratio
								Rasio konektivitas
PN.06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP.05	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa			PD.03	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
S.6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	S.7	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
		2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	S.7	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
		3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	S.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S.2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun
								Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
								Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD
								Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
		4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	S.13	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	S.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang
								Volume to Capacity Ratio
								Rasio konektivitas
6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S,14	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		
						Predikat Kota Sehat		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
PN.07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PP.06	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PD.04	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	
S.7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	2. Indeks Integritas Nasional	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
		3. Indeks Materi Hukum	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
								Indeks Ketimpangan Gender
		4. Indeks Pelayanan Publik	S.18	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S.4.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi
								Indeks SPBE
								Nilai AKIP Tingkat Kota
								Opini BPK
		5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	S.18	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S.4.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Tingkat Maturitas SPIP
								Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
								Indeks Kualitas Kebijakan
								Indeks Manajemen Risiko (MRI)
								Indeks Reformasi Birokrasi
								Indeks SPBE
								Nilai AKIP Tingkat Kota
								Opini BPK
								Tingkat Maturitas SPIP

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
								Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
								Indeks Kualitas Kebijakan
								Indeks Manajemen Risiko (MRI)
		6. Indeks Persepsi Korupsi	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga
		7. Indeks Pembangunan Hukum	S.17	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S.1.4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Ketimpangan Gender
								Indeks Pembangunan Keluarga
PN.08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PP.02	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		PD.01	Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	
			PP.03	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		PD.01	Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	
S.8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	S.5	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Kota Bogor		Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	S.11	Meningkatnya pembangunan rendah Karbon dan menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	S.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil analisis Bapperida 2024

Tabel 4.10
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL 2023	TARGET KINERJA	
					2025	2026
1	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	(S1) Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	72,74	76,17	77,19
		(S2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,28	83,74	83,88
			Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)
		(S3) Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	12.656	12.700	12.750
			Angka Kemiskinan	6,67	6,05	5,9
			Tingkat Pengangguran Terbuka	9,39	8,11	7,96
			Gini Ratio	0,464	0,43	0,41
		(S4) Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga	61,81	61,98	62,08
			Indeks Ketimpangan Gender	0,434	0,419	0,414
2	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	(S1) Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	5,26	6,14	7,74
		(S2) Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	20,94	21,25	21,88

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL 2023	TARGET KINERJA	
					2025	2026
			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	16,57	12,33	17,43
			Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	2,36	2,36	2,36
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	6	5,9
		(S3) Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	3,96	4,5	5
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	3,73	3,79	4
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	3,2	3,89	4,42
			(S4) Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,98	80
		Indeks Risiko Bencana		63,49	65	65
		3	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	(S1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan rang	48
Volume to Capacity Ratio	0,63				0,63	0,62
Rasio konektivitas	0,78				0,79	0,8

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL 2023	TARGET KINERJA	
					2025	2026
		(S2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,4	57,84	58,09
4	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	(S1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,72	3,75	3,8
			Nilai AKIP Tingkat Kota	BB (76,23)	A	A
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,296)	Level 3 (3,326)	Level 3 (3,356)
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	97,23	98	98,5
			Indeks Kualitas Kebijakan	65	70	70
			Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,055)	Level 3 (3,06)
		(S2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks Ber-Akhlak	60,5	62,5	62,7
			Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat	71,29	72	72,72

4.3 Program Prioritas Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bogor 2025 diimplementasikan melalui program prioritas dan program Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota Bogor. Penjabaran prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor pada RKPD Tahun 2025 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 kedalam program prioritas dan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah
1	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan UPTD PSC	Dinas Kesehatan, RSUD
				Pembangunan Labkesda Tahap 3	Dinas Kesehatan, RSUD
				Perbaikan 3 Puskesmas dan 1 Puskesmas Pembantu	Dinas Kesehatan, RSUD
				Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Lokal (96% dari Balita Gizi Kurang) dan Pemberian PMT untuk Ibu Hamil KEK (100%)	Dinas Kesehatan
				Memperluas Cakupan PBI	Dinas Kesehatan
				Pemicuan STBM di 68 Kelurahan	Dinas Kesehatan
				Akselerasi Aktivitas Menuju Kota Layak Anak Predikat Utama	Dinas Kesehatan
		2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi 15 SD dan 4 SMP	Dinas Pendidikan
				Pembangunan 6 Ruang Kelas Baru SD	Dinas Pendidikan
				Pembangunan SMP 22 dan SMP 23 (lanjutan)	Dinas Pendidikan
				Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin	Dinas Pendidikan
				Beasiswa Miskin SD, SMP, PKBM	Dinas Pendidikan
		3	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Edukasi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) 68 Kelurahan	Dalduk KB
		4	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Gemarikan (28,75 kg/Kapita/Tahun)	DKPP
		5	Program pengembangan jasa konstruksi	Revitalisasi IPLT (Penambahan Kapasitas IPLT)	Dinas PUPR
				Pembangunan dan Rehabilitasi SPALDT	Dinas PUPR
		6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penguatan Data Pensasaran Penduduk Miskin (P3KE)	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah
		7	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
				Penguatan kebijakan pemberian bantuan sosial (BSM)	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
		8	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konektivitas Pendidikan Vokasi dengan Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		9	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengendalian Inflasi Bahan Pokok	DKUMKMDAGIN
		10	Program Penangan Kerawanan Pangan	Pengadaan cadangan pangan	DKPP
		11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatkan Cakupan Posyandu dan Layanan Posyandu	DP3A
		12	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan Advokasi Korban Tindakan Kekerasan Anak dan Perempuan	DP3A
2	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	1	Program pengembangan kebudayaan	Pembangunan Museum Padjadjaran (Lanjutan)	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		2	Program pengembangan kebudayaan	Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Pajajaran	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		3	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelaksanaan <i>Calender of Events</i>	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif : Penyediaan Infrastruktur (Pembangunan Creative Space, Co-Working Space,Teknologi Informasi, Pembangunan Galery Creative)	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
				Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
				Penyelenggaraan <i>Event</i> Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		5	Program pengembangan UMKM	Peningkatan Kapasitas bagi pelaku UMKM	DKUMKMDAGIN
				Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Pelaku UMKM	DKUMKMDAGIN
		6	Program pelayanan penanaman modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan (Mall Pelayanan Publik)	DPMPTSP
		7	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penyusunan Dokumen <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO)	DPMPTSP
		8	Program Pengembangan Ekspor	Identifikasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal	DKUMKMDAGIN
				Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berorientasi Ekspor	DKUMKMDAGIN
		9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	DKUMKMDAGIN

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah
3	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap 1 (penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Bubulak)	Dinas Perhubungan
				Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap 1 (Emplacement Tahap 1)	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dinas Perhubungan
				Re-routing Angkutan Umum Penumpang	Dinas Perhubungan
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Subsidi Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
				Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal (BisKita), Angkutan Umum Listrik dan Angkutan Feeder	Dinas Perhubungan
		2	Program pengelolaan perkeretaapian	Penyusunan Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelola Perkeretaapian Perkotaan	Dinas Perhubungan
		3	Program penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jalan R3 (Lanjutan)	Dinas PUPR
				Pembangunan/Perbaikan Jembatan Pancasan	Dinas PUPR
				Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan)	Dinas PUPR
		4	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus bagi korban bencana	Disperumkim
		5	Program Pengelolaan Persampahan	Pembangunan dan Perbaikan Prasarana TPA/TPS3R/TPST/TPS	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengadaan dan Pemeliharaan sarana penunjang TPA/TPS3R/TPST/TPS	Dinas Lingkungan Hidup
				Optimalisasi TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup
4	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	6	Program Keanekaragaman Hayati	Pembangunan taman skala lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		7	Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan	Penyiapan Dana Cadangan Hibah Dana KONI	Dispora Dispora
		8	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Sarana Prasana Lingkungan	Disperumkim
		9	Program Kawasan Permukiman	RTLH	Disperumkim
		1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pembangunan ZI seluruh PD menuju WBK/WBBM	Inspektorat
		2	Program Kepegawaian Daerah	Integrasi sistem manajemen kinerja organisasi dan kinerja individu ASN, peningkatan Kompetensi SDM, penghargaan ASN berprestasi, penguatan	BKPSDM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah
				budaya kerja dan sistem kerja baru	
		3	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Reviu masterplan SPBE, penguatan Satu Data, Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik,	Diskominfo
		4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pelayanan Sosial (Ambulan Pelayanan Sosial)	Dinsos
		5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penguatan evaluasi internal akuntabilitas kinerja dan keuangan	Inspektorat
				Penguatan manajemen Aset, peningkatan kerjasama pemanfaatan Aset	BKAD
		6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penguatan pengkajian Kebijakan mulai dari perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan	Bapperida
		7	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengembangan dan Pemeliharaan SIABANG	SETDA - Bagian Adbang
		8	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola Pengadaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ITKP, Pengembangan & Pemeliharaan SIPPB & Helpdesktiketing, Surveillance ISO 9001:2025	SETDA - Bagian PBJ
		9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemeliharaan Aplikasi Nongkrong Sehat, Pemeliharaan Aplikasi SIMPUS, Pemeliharaan Bogor Smart Health, Pemeliharaan Aplikasi e-SIR Bogor Sehat, Pemeliharaan Aplikasi SIGEULIS, Pemeliharaan Aplikasi Rasajaga, Pemeliharaan Aplikasi Dikaper, Pemeliharaan Aplikasi Pamong Walagri, Pemeliharaan Aplikasi Surveilans PTM, Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD, Pengembangan Bogor Smart Health, Pengembangan Aplikasi SIMPUS, Pengembangan Aplikasi Dikaper, Pengembangan Aplikasi e-SIR Bogor Sehat	Dinkes
		10	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penguatan kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Bapperida
		11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehab Kecamatan, Rehab Kel Bubulak, Rehab Kel Cilendek Barat, Rehab Kel Ps Jaya, Pembebasan Lahan Kel Situgede	Kecamatan Bogor Barat

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah		Kegiatan Unggulan	Perangkat Daerah
				Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Pengadaan Kantor Kel Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan
				Kecamatan, Kel Bantarjati, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Cimahpar, Kel Ciparigi, Kel Kedunghalang, Kel tanah Baru, Kel Tegalgundil	Kecamatan Bogor Utara
				Kecamatan, Kel Babakan, Babakan Pasar, Gudang, Kel Cibogor, Pabaton, Tegallega, Kel Kebon Kalapa, Kel Paledang, Kel Sempur	Kecamatan Bogor Tengah
				Rehab Kel. kebon pedes, Rehab Kel. Tanah Sareal, Pembangunan Kel. Sukaresmi	Kecamatan Tanah Sareal

Sumber: Analisis Bapperida 2025

4.3.1 Penjabaran Prioritas Pembangunan ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Penjabaran prioritas dan sasaran Pembangunan daerah tahun 2025 kedalam program prioritas dan program Pembangunan daerah, disertai indicator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Keselaran Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
1	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	76,17	1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks SPM (Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Minimal yang telah diberikan daerah kepada warga negara daerahnya) Pendidikan	77,19	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Predikat Kota Sehat	83,74 Swasti saba Wistara (Kategori Tertinggi)	2. Memperkuat literasi Masyarakat	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					3. Meningkatkan kualitas dan akses kesehatan				
					4. Menurunkan angka kelahiran	Program Pembinaan Perpustakaan	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	1	Dinas Arsip dan Perpustakaan
					5. Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat		Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2)	0,0922	
							Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	1	
							Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4)	0,1166	
							6. Mengurangi kawasan kumuh dan lingkungan sehat	IK 5 Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5)	
					IK 6 Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6)			1	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
					7. Memperkuat pembudayaan olahraga pada masyarakat		IK 7 Anggota perpustakaan (UPLM 7)	1	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7	
							Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9	
							Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100	
							Prevalensi Hipertensi	8,4	
							Prevalensi Diabetes Melitus	2,05	
							Prevalensi ODGJ	0,14	
							Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	
							Insiden Rate HIV	0,18	
							Predikat STBM	Paripurna	
							Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	
							Persentase Balita Berstatus gizi Normal	87,1	
							Ratio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673	
							Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92	
							Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	55	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase keluarga yang diintervensi melalui pendekatan keluarga	94	
							Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	96	Dinas Kesehatan
							Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	96	
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	40	Dinas Kesehatan
							Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	65	
							Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan	60	
							Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	70	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	72,2	Dinas Kesehatan
							Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri	11,5	
						Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase Pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional atau Internasional	50	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Saing Keolahragaan	Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	80	
							Persentase Atlet Berprestasi Dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	50	
							Persentase Perolehan medali dengan jumlah Atlet yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	50	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	19,84	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang disusun	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Ketersediaan Energi	2400 kkal/kap /hari	
							Ketersediaan protein	63 gram/kap /hari	
						Program Pengawasan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	95,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Keamanan Pangan			
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	47,62	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	83,25	
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni	100	
							Persentase tingkat hunian rusunawa	90	
							Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin	14,73	
						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase Panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipeli hara	54,13	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipeli hara	54,13	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana	100	
							Persentase pengelolaan makam yang dikelola pemerintah	21,03	
						Program Pencegahan Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan tanggap kebakaran	65	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							Persentase SDM aparatur damkar dan penyelamatan yang ditingkatkan kompetensinya	75	
							Rata Rata respontime penanganan kebakaran	9,25	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	78,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	93,68	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) yang layak	74,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah		
						Sistem Air Limbah	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) yang aman	6,1	Satpol PP		
						Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Pelanggar Perda KTR Yang di Tertibkan	100			
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Gini Ratio	12.700 6,05 8,11 0,43	1.Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan 2.Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda 3.Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 4.Mengurangi kemiskinan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau <i>Prevalence of Undernourished</i> (PoU)	4,77	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,94	Dinas Tenaga Kerja		
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja		
							Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memiliki Usaha	30			
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang ditindaklanjuti	87	Sekretariat Daerah		
							Jumlah penduduk miskin ekstrim yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar data P3KE desil1)	1000 Orang			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Jumlah penduduk miskin yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar Data DTKS)	3000 Orang	
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	3,62	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10	
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Omset Usaha Mikro Perorang Tahunan	3	Dinas KUKM Dagin
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	2,175	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	21,18	
							Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	4	
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi	88,5	Dinas Sosial
							Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	18	
							Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	90	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	Dinas Sosial
						Program Pemberdayaan Sosia	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100	Dinas Sosial
							Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	85	
						Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Siswa Miskin yang mendapat beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan lainnya (SD, SMP, dan PKBM)	2,85	Dinas Pendidikan
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	5,53	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	39,79	
							Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	33,67	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan, Perorangan, dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100	Dinas Kesehatan
		Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Ketimpangan Gender	61,98 0,419	1. Meningkatkan ketahanan keluarga 2. Memperkuat legalitas kependudukan 3. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda 4. Menumbuhkan membangun kreativitas	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	87	Sekretariat Daerah
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Pemeliharaan Anak Terlantar Yang Tertangani	100	Dinas Sosial
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda pelopor yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai dimensi kualitas legalitas struktur	79,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Nilai dimensi kualitas ketahanan fisik	78,27	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
					dan inovasi masyarakat		Nilai dimensi kualitas ketahanan ekonomi	68,35	
					5. Meningkatkan pemberdayaan , partisipasi, gotong royong, kerukunan masyarakat dan toleransi		Nilai dimensi kualitas Ketahanan Sosial Psikologi	62,91	
							Nilai Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya	66,61	
					6. Penguatan kemajuan kebudayaan bangsa	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	82,34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
							Persentase cakupan perekaman E-KTP	100	
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 tahun	99,2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
							Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	65	
						Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan yang di perlukan OPD sesuai dengan SOP kerjasama pemanfaatan data	60,87	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor pada klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA	101	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Skor pada klaster 2 (perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif) KLA	130	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Skor pada kluster 3 (Kesehatan dasar dan kesejahteraan) KLA	144	
							Skor pada kluster IV (Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) KLA	102	
						Program Perlindungan Khusus Anak	Skor pada kluster V (perlindungan khusus anak)	156	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	100	Dinas Sosial
							Persentase layanan rehabilitasi bagi masyarakat lanjut usia terlantar	100	
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100	Dinas Sosial
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Peningkatan Pera Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi partai politik dalam pendidikan politik	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Peran masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100	
							Persentase partisipasi perempuan perempuan sebagai anggota legislatif	26	
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	52,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kontribusi event seni budaya dalam CoE	3 Event	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pembinaan Sejarah	Jumlah SDM pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	55,71	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.13
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada
prioritas Pembangunan 2

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
2	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	6,14	1. Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi	1 Destinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					2. Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	7.038.999	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	23,44	
					3. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	3,62	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	10	
						Program Pemberdayaan Usaha	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	3	Perdagangan dan Perindustrian
						Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
							Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya	3	
							Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	3	
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	73	Sekretariat Daerah
							Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	18,01	
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan koperasi berizin	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	11,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	15,6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	6,24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan perekonomian dan SDA	80,6	BAPPERIDA
							Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	
		Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	21,25	1. Mengakselerasi pelayanan investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12,33	2. Meningkatkan pendapatan daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	1.940 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	2,36	3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan atau regulasi Penanaman Modal yang terimplementasi	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	4. Mengembangkan usaha sektor pertanian dan perikanan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rata Rata nilai capaian kinerja BUMD	67,5	Sekretariat Daerah
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Target penerimaan Pajak Daerah	1.067.401 .480.950, 00	Badan Pendapatan Daerah
							Persentase peningkatan pajak daerah	18,9	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	30	Dinas Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial	Penetapan Besaran UMK	1Keputusan	Dinas Tenaga Kerja
							Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang Ditindaklanjuti	100	
							Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	100	
		Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	4,5	1. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang Difasilitasi Pemasarannya dari data UMKM yang Terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	3,79		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	14,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan	3,89		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan IKM yang Produktif	8,7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
			perikanan (ADHK)		3. Memperkuat aktivitas perekonomian sektor pertanian dan perikanan	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Realisasi Ekspor	USD 139.025.307,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar	29,19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	11,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah	75,86	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (ikan konsumsi)	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase peningkatan produksi perikan (ikan hias)	1	
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item)	32,68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)	48,72	
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor	63,1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase peningkatan jumlah potong hewan yang dilayani RPH	1,54	
							Persentase peningkatan retribusi RPH	1,54	
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	18,42	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	93,41	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming	1,81	
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi yang ber kondisi baik (%)	62,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase Sungai yang ber kondisi baik (%)	87,97	
							Persentase Lokasi rawan banjir yang ditangani	3,57	
		Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80	1. Mengurangi risiko bencana daerah 2. Memperkuat penegakan peraturan daerah serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Risiko Bencana	65		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	Satuan Polisi Pamong Praja
							Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100	
							Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningakatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik SARA yang tertangani	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 4.14
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada
Prioritas Pembangunan 3

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
3	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan rang	60	1. Meningkatkan penyelenggara n penataan ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal 2. Mengoptimalka n pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal 3. Terwujudnya kualitas, konektivitas	Program Penyelenggara n Penataan Ruang	Persentase pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Volume to Capacity Ratio	0,63		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rasio konektivitas	0,79		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkunganny a	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRW/RDTRK)	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggara an Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase penurunan lokasi genangan	0,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
					dan infrastruktur transportasi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik	14,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan jalan	92,5	Dinas Perhubungan
							Persentase fasilitas terminal yang terpelihara	77,78	
							Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	98,1	
							Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	100	
							Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	88	
							Load Factor Angkutan Perkotaan	59	
							Load Factor Angkutan Umum Massal	79	
						Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian	30	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	1. Mengoptimalkan pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaa	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas penambahan RTH Publik Budidaya yang dibangun	472,91	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	49,77	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
		pembangunan daerah yang berkelanjutan			n yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
					2. Terwujudnya kualitas, konektivitas dan infrastruktur transportasi	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	8	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase Volume Sampah tertangani	79,25	
							Persentase jalur wilayah penyapuan	94,97	
							Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,9	
					3. Terwujudnya pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau publik budidaya yang berkualitas	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	4,17	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	2,13	
							Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	98,16	
					4. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Persentase sarana persampahan yang terpenuhi	100	
						Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase kelompok masyarakat/ lembaga/ kegiatan usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Untuk Masyarakat			
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Adiwiyata	35,6	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	19	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	56,32	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	20	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	8	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase sungai yang berkategori baik	87,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Persentase jumlah sungai rawan banjir yang ditangani	3,57	
							Persentase irigasi yang berkategori baik	62,21	
							Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air berkategori baik	75,09	

Tabel 4.15
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada
Prioritas Pembangunan 4

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah						
4	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE Nilai AKIP Tingkat Kota Opini BPK Tingkat Maturitas SPIP Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Manajemen Risiko (MRI)	3,75 A	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi dan informatika	Nilai Aspek Teknologi informasi dan komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks 3,50	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				WTP			Nilai Aspek Kebijakan internal tata Kelola SPBE	Indeks 3,70							
				Level 3 (3,326)			Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks 3,00							
				98			Nilai Aspek Penerapan Managemen SPBE	Indeks 2,88							
							Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks 3,46							
				70	2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif, dan berkelanjutan	Program Penyelenggara an Persandian untuk Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				Level 3 (3,055)						Program Penyelenggara an Statistik Sektoral	Indeks prinsip satu data indonesia	2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika		
														Indeks kualitas data	2,66
														Indeks Proses Bisnis Statistik	3
														Indeks Kelembagaan	2,85
					Indeks Statistik Nasional	2,22									
					3. Memperkuat akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah										

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
					4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10000 penduduk)	27,5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	100	
							Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	37,5	
					5. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas		Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	75	
					6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia	26,88	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia	26,21	
					7. Meningkatkan pengelolaan arsip yang berkualitas		Persentase ketercapaian target program perencanaan Pembangunan daerah urusan pemerintahan dan pembangunan manua	80,6	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
					8. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan perekonomian dan SDA	28,34	
							Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan perekonomian dan SDA	27,47	
					9. Meningkatkan Penataan organisasi, penataan per-UU, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan infrastruktur dan kewilayahan	28,48	
							Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan infrastruktur dan kewilayahan	26,8	
							Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan infrastruktur dan kewilayahan	80,6	
					10. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang mendapat nilai pelaporan kinerja perangkat daerah minimal 12,2	50	Sekretariat Daerah
							Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi	80,55	
							Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif	83,33	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
					11. Memperkuat pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi yang memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan pembangunan Kota Bogor		Presentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	100	Sekretariat Daerah
							Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	65	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	25,8	Seluruh Perangkat Daerah
							Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	26,55	
							Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	12,48	
							Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	21,97	
							Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	
							Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	
					12. Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam rangka menunjang fungsi DPRD Kota Bogor				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	94	
							Persentase Kepatuhan Anggaran	100	
							Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	95	
							Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94	
							Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	87,11	
							Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75	
							Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38	
							Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	80	Sekretariat Daerah
							Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan	90	
						Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP	100	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang berpredikat swasembada	4,4	Sekretariat Daerah
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara aktif	70	Sekretariat Daerah
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	88,1	Kecamatan Bogor Utara
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100	Kecamatan Bogor Utara
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100	Kecamatan Bogor Timur
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Masyarakat Hukum Adat			Kecamatan Bogor Utara
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100	
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	1	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100	Kecamatan Bogor Timur
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	2	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	1	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	88,1	Kecamatan Bogor Timur
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100	Kecamatan Bogor Utara
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	1	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100	Kecamatan Bogor Timur
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	1	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	88,1	Kecamatan Bogor Selatan
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	100	Kecamatan Bogor Selatan
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	1	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	100	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	75	Kecamatan Bogor Selatan
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	75	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100	Kecamatan Bogor Selatan
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	2	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	1	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Koordinasi dan Ketentraman Umum	Persentase gangguan ketentrama dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	88,1	Kecamatan Tanah Sereal
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	100	Kecamatan Tanah Sereal
							Persentase keterwakilan perempuan dan musrenbag kecamatan	20	
							Persentase keterwakilan anak dalam musrenbang kecamatan	100	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	100	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	Kecamatan Tanah Sereal
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang aktif	100	
						Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100	Kecamatan Tanah Sereal

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Desa dan Kelurahan	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	20	Kecamatan Bogor Barat
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	2	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	1	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	100	
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	1	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	100	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	88,1	Kecamatan Bogor Barat
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	Kecamatan Bogor Barat
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100	Kecamatan Bogor Barat
							Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	2	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	1	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur	100	Kecamatan Bogor Tengah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						dan Pelayanan Publik	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	1	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	100	
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	88,1	Kecamatan Bogor Tengah
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100	Kecamatan Bogor Tengah
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100	
						Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100	Kecamatan Bogor Tengah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Desa dan Kelurahan	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan	20	
							Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan	2	
							Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	1	
							Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan	100	
						Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	51.42	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yang diselamatkan, dielstarikan dan dimanfaatkan	52	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip tertutup yang dibuatkan sarana temu baliknya	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal "20"	70,63	Inspektorat
							Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti	90,2	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		
							Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	90	
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan , dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPIP pada level 3	90	Inspektorat
							Nilai Capaian MCP KPK diatas rata-rata nasional	87	
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	
							Transparansi Perencanaan Penganggaran	100	
							Transparansi Pelaksanaan APBD	100	
							Penyerapan realisasi anggaran dalam APBD	93	
						Program Pengelolaan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan	7	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
						Barang Milik Daerah	Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah	34	
							Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik	83	
							Persentase Ketepatanwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon	100	
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25 poin	75	Sekretariat Daerah
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	93	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase terselenggaranya penyebaran informasi	80	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM $\geq 3,35$	88,89	Sekretariat Daerah
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
							Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
							Persentase penanganan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan	100	
						Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n	36,11	
							Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	
							Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	10	
							Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	30	
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	100	
		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks Ber-Akhlak Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata	62,5 72	1. Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	56,5 poin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen	170 poin	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Target 2025	Strategi	Program	Indikator Kerja	Target 2025	Perangkat Daerah
			Kota Kabupaten se-Jawa Barat		kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi		Kinerja, Disiplin dan Penghargaan		
					2. Meningkatkan kinerja organisasi yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani		Indeks Sistem Merit Aspek perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan	114 poin	
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	43 poin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	10	Inspektorat Daerah

4.3.2 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional tahun 2025, Pemerintah Kota Bogor menetapkan prioritas Pembangunan daerah dan program prioritas daerah tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	200.267.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	1.521.027.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	285.846.042	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	567.483.600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	335.183.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	480.360.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	494.666.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	783.990.457	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	64.399.770	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Kelautan & Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	162.762.856	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	449.140.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Kepemudaan & Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	89.017.684.700	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.653.092.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	990.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
6	Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	17.479.390.579	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	386.632.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman	241.522.200	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.262.625.280	Dinas Kesehatan
7	Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	327.296.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.344.914.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.359.828.718	Satpol PP
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	18.824.767.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.873.162.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penanggulangan Bencana	1.570.597.575	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.032.687.100	DPKP
8	Komunikasi & Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.267.406.112	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.638.671.810	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	625.151.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	17.500.000	Dinas KUKM Dagin

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	222.614.200	Dinas KUKM Dagin
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	857.210.900	Dinas KUKM Dagin
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	34.200.000	Dinas KUKM Dagin
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	51.193.200	Dinas KUKM Dagin
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	79.452.000	Dinas KUKM Dagin
		Program Pengembangan UMKM	230.016.000	Dinas KUKM Dagin
10	Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	15.040.692.301	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	10.347.251.100	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.427.631.840	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.148.977.520	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	445.730.300	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	154.072.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	262.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
11	Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	73.536.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	18.314.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12.278.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vieteriner	200.684.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	139.110.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	1.149.999.651	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	43.353.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	604.732.700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	986.492.780	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	2.247.555.300	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.921.631.815	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi	10.211.214.800	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.577.587.452	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Prasaranan, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	72.152.367.776	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	787.500.000	Dinas PUPR
14	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	867.893.978	DPPPA
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.007.208.367	DPPPA
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	124.960.000	DPPPA
		Program Perlindungan Perempuan	524.602.000	DPPPA
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	931.304.600	DPPPA
16	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.995.270.444	DPMPSTP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	184.764.600	DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	549.961.100	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	359.675.909	DPMPTSP
17	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	138.428.000.000	Dinas Pendidikan
18	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan keluarga Berencana (KB)	3.069.955.144	DPPKB
		Program Pengendalian Penduduk	1.616.154.000	DPPKB
19	Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	128.640.000	Dinas KUKM Dagin
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	294.825.500	Dinas KUKM Dagin
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	91.999.608	Dinas KUKM Dagin
20	Perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian	137.576.900	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	54.190.215.544	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	93.514.878.545	Dinas Perhubungan
21	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	703.466.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22	Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	200.000.000	Setda
23	Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	224.916.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	839.957.876	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	227.422.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
24	Perumahan & Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	26.660.832.904	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	4.482.653.858	Dinas Perumahan dan Permukiman
25	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	442.843.300	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	50.146.800	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	923.174.200	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	1.497.178.900,00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	1.118.649.300,00	Dinas Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
26	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	276.565.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
27	Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.757.260.545	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga kerja	390.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	226.275.000	Dinas Tenaga Kerja
28	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	246.096.900	Dinas KUKM Dagin

Sumber : diolah Bapperida 2024

4.3.3 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam Tahun 2025

Dalam rangka penyelarasan Pembangunan di Pembangunan Kota Bogor maka dilakukan persandingan yang menunjukan dukungan program prioritas daerah pada RKPD 2025 terhadap prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 serta Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025, dengan prioritas Pembangunan Jawa barat tahun 2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
PN.01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia						
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.344.914.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PN.02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru						
1	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	625.151.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Fasilitasi digital technopreneur	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	857.210.900	Dinas KUKM Dagin
					Program pengembangan UMKM	230.016.000	Dinas KUKM Dagin
					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	3.757.260.545	Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	139.110.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penanganan kerawanan pangan	73.536.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengawasan keamanan pangan	18.314.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	839.957.876	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	224.916.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	12.278.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program penyuluhan pertanian	227.422.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	200.684.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengelolaan perikanan budidaya	449.140.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	162.762.856	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	6.427.631.840	Dinas Lingkungan Hidup
		N/A	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program pengelolaan persampahan	10.347.251.100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	11.921.631.815	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.148.977.520	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	154.072.500	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	445.730.300	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	15.040.692.301	Dinas Lingkungan Hidup
					Program perencanaan lingkungan hidup	262.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	23.577.587.452	Dinas PUPR
PN.03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi						
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan nasional di kota Bogor	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program penyelenggaraan jalan	54.190.215.544	Dinas PUPR
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	10.211.214.800	Dinas PUPR

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
		N/A	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	72.152.367.776	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program penataan bangunan gedung	2.247.555.300	Dinas PUPR
					Program pengembangan jasa konstruksi	167.992.500	Dinas PUPR
					Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	93.514.878.545	Dinas Perhubungan
					Program pengelolaan perkeretaapian	137.576.900	Dinas Perhubungan
					Program penyelenggaraan penataan ruang	787.500.000	Dinas PUPR
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program pengembangan kebudayaan	783.990.457	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan kesenian tradisional	64.399.770	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lapangan Kerja Seluas-luasnya		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	480.360.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	294.825.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pemasaran pariwisata	1.149.999.651	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	986.492.780	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	43.353.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	604.732.700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program pengembangan ekspor	128.640.000	Dinas KUKM Dagin

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
		N/A	(P1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	(P2) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	17.500.000	Dinas KUKM Dagin
					Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	79.452.000	Dinas KUKM Dagin
					Program pendidikan dan latihan perkoperasian	34.200.000	Dinas KUKM Dagin
					Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	222.614.200	Dinas KUKM Dagin
					Program perencanaan dan pembangunan industri	246.096.900	Dinas Tenaga Kerja
					Program penempatan tenaga kerja	390.000.000	Dinas Tenaga Kerja
					Program hubungan industrial	226.275.000	Dinas Tenaga Kerja
					Program standarisasi dan perlindungan konsumen	51.193.200	Dinas KUKM Dagin
					Program perekonomian dan pembangunan	2.028.690.825	Bag Perekonomian - Setda

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	91.999.608	Dinas KUKM Dagin
PN.04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas						
1	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	(P3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	386.631.596.460	Dinas Kesehatan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.262.625.280	Dinas Kesehatan
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	241.522.200	Dinas Kesehatan
		Pembangunan kualitas keluarga	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.239.203.400	DPPKB
					Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.069.955.144	DPPKB

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.007.208.367	DPPPA
					Program pengelolaan sistem data gender dan anak	124.960.000	DPPPA
					Program perlindungan perempuan	524.602.000	DPPPA
					Program pemenuhan hak anak (PHA)	867.893.978	DPPPA
					Program peningkatan kualitas keluarga	931.304.600	DPPPA
		N/A	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.653.092.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program pengembangan kapasitas kepramukaan	990.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	89.017.684.700	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program pengelolaan taman makam pahlawan	50.146.800	Dinas Sosial
2	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pengelolaan pendidikan	138.427.572.738	Dinas Pendidikan
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	(P3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemenuhan upaya kesehatan	386.631.596.460	RSUD
		Fasilitasi literasi digital	(P2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pembinaan perpustakaan	703.466.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Program pengelolaan permuseuman	494.666.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PN.05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri						
-	-	-	-	-	-	-	-

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
PN.06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan						
1	Pemerataan ekonomi	Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	4.482.653.858	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	(P5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	(P3) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	26.660.832.904	Dinas Perumahan dan Permukiman
		N/A	(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program Pemberdayaan sosial	442.843.300	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	923.174.200	Dinas Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	1.497.178.900	Dinas Sosial
PN.07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan						
1	Membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	285.846.042	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
	ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu				Program Pencatatan Sipil	200.267.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pendaftaran Penduduk	1.521.027.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program pengembangan iklim penanaman modal	549.961.100	DPMPTSP
					Program promosi penanaman modal	359.675.909	DPMPTSP
					Program pelayanan penanaman modal	1.995.270.444	DPMPTSP
					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	184.764.600	DPMPTSP
					Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.638.671.810	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	N/A	N/A	(P6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	(P4) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	75.953.207.706	Sekretariat DPRD
					Program penyelenggaraan pengawasan	625.673.800	Itda

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	845.052.800	Itda
					Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.459.339.621	Kecamatan
					Program kepegawaian daerah	2.269.200.715	BKPSDM
					Program pengembangan sumber daya manusia	2.380.800.000	BKPSDM
					Program administrasi pemerintahan desa	393.390.750	
					Program pengelolaan arsip	567.483.600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.000.898.500	Bapperida
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.314.786.900	Bapperida

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.652.138.880.082	Seluruh Perangkat Daerah
					Program pengelolaan aplikasi informatika	4.267.406.112	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program pengelolaan keuangan daerah	33.711.363.006	BKAD
					Program pengelolaan barang milik daerah	10.534.615.400	BKAD
					Program penyelenggaraan statistik sektoral	276.565.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	20.250.382.400	Kecamatan
					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	23.899.905.356	Kecamatan
					Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	33.579.166.651	Bag Kesra, Bag Hukum, Bag Pemerintahan - Setda

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program pengelolaan pendapatan daerah	5.698.319.336	Bapenda
					Program penelitian dan pengembangan daerah	1.725.000.000	Bapperida
PN.08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur						
1	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program penanganan bencana	1.118.649.300	Dinas Sosial
					Program penanggulangan bencana	1.570.597.575	BPBD
					Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.032.687.100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		N/A	(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	5.873.162.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program Prioritas Kota Bogor	PAGU	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.224.621.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	3.359.828.718	BPBD, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	712.024.800	Kecamatan
			(P4). Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	(P1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	18.824.767.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3.4 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan arah kebijakan pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2025

Program dan kegiatan tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan disesuaikan dengan hasil analisis rancangan perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021. Dari hasil analisis arah program dan kegiatan Kota Bogor disesuaikan 10 (sepuluh) tujuan pembangunan berkelanjutan dari 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.18
Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1: TANPA KEMISKINAN	
- Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. - Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. - Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Pengendalian Penduduk - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2: TANPA KELAPARAN	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. - Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. - Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi - kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil - dan menyusui, serta manula	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	
- Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. - Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. - Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. - Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. - Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. - Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. - Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. - Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. - Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS	
- Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. - Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. - Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global - Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Tujuan 5: KESETARAAN GENDER	
- Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. - Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. - Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. - Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. - Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensikonferensi tersebut. - Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. - Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. - Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. - Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	-
Tujuan 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	
- Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. - Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. - Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan	-

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. - Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. - Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. - Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR	
- Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. - Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai masingmasing. - Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	-
Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang	-

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. - Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya - Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
Tujuan 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	
- Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia lingkungan. - Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. - Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. - Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengelolaan Persampahan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. - Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentukbentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 16: PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
- Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. - Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. - Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. - Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. - Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. - Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. - Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. - Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Kepegawaian Daerah - Program Pencatatan Sipil
Tujuan 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. - Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. - Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. - Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. - Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. - Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Kepegawaian Daerah - Program Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RPD Kota Bogor 2025-2026 dan turut menjadi pedoman penyusunan prioritas pembangunan tahun 2025.

4.3.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka rencana dan target kinerja untuk penerapan SPM pada 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2025-2026

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan ;iterasi dam numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebeluymnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesenetraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi	Meningkat dari hasil	Setiap tahun				

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		dan numerasi siswa berdasarkan nilai Asesmen Nasional	dua tahun sebelumnya					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Failitasi penyerdiaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memeperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memeperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandng disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		dan perkada Kabupaten/Kota						
2	Pelayan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.3.6 Arah Kebijakan Pendekatan Spasial

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bogor adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang Daerah Kota meliputi:

- a. pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi;
- b. mengembangkan 4 (empat) Wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
- c. mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
- d. pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
- e. pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- f. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- i. pelestarian kawasan cagar budaya;

- j. peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota;
- k. pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- l. pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
- n. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- o. pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi.

Strategi penataan ruang Daerah Kota terdiri dari:

- a. strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:
 - 1) meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
 - 2) menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - 3) menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
 - 4) mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - 1) mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan
 - 2) merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
- c. strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
 - 1) mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;

- 2) mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
- 3) mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
- 4) mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran;
- d. strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
- e. strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
 - 1) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 - 2) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 - 3) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan
 - 4) mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina;
- f. strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
 - 1) sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
 - 2) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 - 3) mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 - 4) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;

- 5) mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 - 6) mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 - 7) mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
 - 8) mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
 - 9) mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
 - 10) mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya;
- g. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
- 1) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - 2) melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
 - 3) mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - 4) mengembangkan jaringan gas;
 - 5) mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 - 6) mengembangkan jaringan sumber daya air;
 - 7) mengembangkan sistem jaringan air minum;
 - 8) meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 - 9) meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 10) meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
 - 11) meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
 - 12) mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
- h. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
- 1) menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - 2) mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
 - 3) merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan

- 4) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
- i. Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
 - 1) menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 - 2) meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
 - 3) mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- j. strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:
 - 1) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 - 2) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 - 3) meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (landbanking); dan
 - 4) mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- k. strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
 - 1) mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) mengendalikan pengembangan kawasan PPK;
 - 3) mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
 - 4) membatasi pengembangan kawasan industri;
- l. strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
 - 1) menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
 - 2) mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
 - 3) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:

- 1) mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan
 - 2) menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
- n. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:
- 1) mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
 - 2) mempertahankan nilai sejarah kawasan;
 - 3) menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
 - 4) mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata;
- o. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:
- 1) mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
 - 2) menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
 - 3) mengembangkan kawasan tematik; dan
 - 4) mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

4.3.6.1 Kebijakan Rencana Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang melalui penetapan pusat kegiatan di wilayah Daerah Kota yang merupakan rencana pengembangan sistem hirarki PPK, Sub PPK, dan PL.

Rencana pengembangan PPK dan Sub PPK, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) PPK terletak di kawasan pemerintahan dan perdagangan dan jasa di sekitar Kebun Raya Bogor;
- 2) Sub PPK Pasima terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh (Bubulak-Sindangbarang);
- 3) Sub PPK Utara terletak di Jl. KH. Sholeh Iskandar (Yasmin-Pasar Kemang);

- 4) Sub PPK Purwa terletak Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor; dan
- 5) Sub PPK Daksina terletak di Jalan Raya Tajur–rencana jalan R3 – rencana jalan lingkar dalam;

Rencana pengembangan PL ditetapkan sebagai berikut:

- 1) PL Samida 1 terletak di sekitar Jalan Merdeka, Kelurahan Kebon Kalapa;
- 2) PL Samida 2 terletak di Kelurahan Situgede;
- 3) PL Pasima 1 terletak di Kelurahan Balumbang Jaya;
- 4) PL Pasima 2 terletak di Kelurahan Gunungbatu;
- 5) PL Utara 1 terletak di Kelurahan Mekarwangi;
- 6) PL Utara 2 terletak di Kelurahan Sukaresmi;
- 7) PL Utara 3 terletak di Kelurahan Kedungwaringin;
- 8) PL Utara 4 terletak di Kelurahan Cilendek Barat;
- 9) PL Purwa 1 terletak di Kelurahan Kedunghalang;
- 10) PL Purwa 2 terletak di Kelurahan Tanah Baru dan Ciluar;
- 11) PL Purwa 3 terletak di Kelurahan Cimahpar;
- 12) PL Purwa 4 terletak di Kelurahan Tegalgundil;
- 13) PL Daksina 1 terletak di Kelurahan Katulampa;
- 14) PL Daksina 2 terletak di Kelurahan Kertamaya;
- 15) PL Daksina 3 terletak di Kelurahan Bojongkerta; dan
- 16) PL Daksina 4 terletak di Kelurahan Mulyaharja;

Pengembangan PPK dan Sub PPK dilaksanakan dengan pola pembangunan kawasan terpadu yang dilengkapi RTH, serta diarahkan kepada pembangunan vertikal dengan konsep *green building*.

4.3.6.2 Kebijakan Rencana Pola Ruang

Kebijakan Rencana pola ruang wilayah mencakup Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budi daya yang dituangkan dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dalam skala 1:5.000.

4.3.6.2.1 Kawasan Peruntukan lindung meliputi:

- a. Kawasan perlindungan setempat dengan luasan kurang lebih 411 Ha (empat ratus sebelas Hektare) terdiri dari:

- 1) sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran;
- 2) kawasan sekitar danau atau waduk Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, Situ Panjang.
- b. Kawasan konservasi merupakan kawasan pelestarian alam dengan luasan kurang lebih 85 Ha (delapan puluh lima Hektare) meliputi kawasan perlindungan plasma nutfah Kebun Raya Bogor.
- c. RTH publik dengan luas lebih kurang 2.230 Ha (dua ribu dua ratus tiga puluh Hektare) atau lebih kurang 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari luas kota meliputi:
 - 1) rimba kota yaitu Hutan Penelitian Dramaga di Kelurahan Situ Gede;
 - 2) taman kota dan taman lingkungan (skala WP, Kecamatan, Kelurahan dan RW) menyebar di seluruh kecamatan;
 - 3) Tempat Pemakaman Umum, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Kelurahan Empang (Tempat Pemakaman Umum Dreded) untuk WP Samida, Kelurahan Situ Gede (Tempat Pemakaman Umum Situ Gede) untuk WP Pasima, Kelurahan Kebon Pedes (Tempat Pemakaman Umum Blender) dan Kelurahan Kayumanis (Tempat Pemakaman Umum Kayumanis) untuk WP Utara, Kelurahan Cimahpar (Tempat Pemakaman Umum Cimahpar) untuk WP Purwa, Kelurahan Mulyaharja (Tempat Pemakaman Umum Mulyaharja), Kelurahan Genteng (Tempat Pemakaman Umum Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (Tempat Pemakaman Umum Cipaku) untuk WP Daksina;
 - 4) kawasan konservasi yakni Kebun Raya Bogor;
 - 5) kebun penelitian di Kelurahan Menteng, Pasirjaya dan Pasirkuda Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Tanah Sareal;
 - 6) sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran;
 - 7) kawasan sekitar danau atau waduk Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya; Situ Panjang;
 - 8) jalur hijau jalan tol;

- 9) jalur hijau jalan;
 - 10) jalur hijau rel kereta api; dan
 - 11) jalur hijau dibawah tegangan tinggi.
- d. RTH privat dikembangkan melalui:
- 1) RTH pekarangan rumah; dan
 - 2) RTH pekarangan industri, perkantoran, perdagangan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pertahanan keamanan, kawasan transportasi dan tempat usaha lainnya.

4.3.6.2.2 Kawasan peruntukan budi daya ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan pertanian;

- 1) Kawasan tanaman pangan tersebar di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Pasirjaya, Sindangbarang, Situgede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Cikaret, Pakuan, Rancamaya, Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur dengan luas lebih kurang 127 Ha (seratus dua puluh tujuh Hektare).
- 2) Kawasan peternakan meliputi Rumah Potong Hewan sebagai Rumah Potong Hewan regional di Bubulak dengan luas lebih kurang 3 Ha (tiga Hektare).

b. kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri dengan luas lebih kurang 139 Ha (seratus tiga puluh sembilan Hektare) meliputi:

- 1) kegiatan industri yang telah ada di Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Ciparigi, Kedunghalang, Tanahbaru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sindangrasa, Sindangsari, Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Batutulis, Empang, Harjasari, Lawanggintung, Muarasari, Pakuan, Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kayumanis, Kebonpedes, Kedungbadak, Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sareal; dan
- 2) sentra industri kecil dan menengah diarahkan menyebar di setiap WP.

c. kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata dengan sebaran luas lebih kurang 46 Ha (empat puluh enam Hektare) meliputi:

- 1) wisata ilmu pengetahuan dan teknologi di Pusat Kota atau WP Samida;
- 2) wisata budaya di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima dan Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa;
- 3) wisata kuliner dan belanja di PPK (kawasan Bogor lama), Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur/WP Daksina (kawasan Tajur);
- 4) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina;
- 5) wisata agro dan rekreasi alam di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- 6) wisata taman rekreasi di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.

d. kawasan permukiman;

- 1) Rencana kawasan perumahan dengan sebaran luas lebih kurang 7.103 Ha (tujuh ribu seratus tiga Hektare) meliputi :
 - a) peruntukan kawasan perumahan tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal;
 - b) pengaturan kepadatan perumahan ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan dan daya dukung lingkungan dan akan didetailkan pada rencana detail tata ruang;
 - c) perumahan kepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima yaitu di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Situgede Kecamatan

- Bogor Barat serta sebagian WP Daksina di Kelurahan Bojongkerta, Genteng, Harjasari, Kertamaya, Muarasari, Mulyaharja, Pamoyanan, Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan;
- d) perumahan kepadatan sedang diarahkan di sebagian Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida di Kelurahan Babakan, Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur, Tegalega, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- e) perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Barat/WP Pasima, dan Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara.
- 2) Rencana peruntukan kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut:
- a) kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional ditetapkan di:
- kawasan PPK dan masing-masing Sub PPK dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu;
 - koridor Jalan Abdullah Bin Muhammad Nuh, Jalan Sholeh Iskandar, Jalan paralel Jalan Tol Lingkar Bogor, Jalan Adnawijaya, dan rencana jalan R3;
 - pasar induk di Kecamatan Tanah Sareal; dan
 - TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang;
- b) kegiatan perdagangan dan jasa skala WP ditetapkan di:
- sub PPK dan dikembangkan secara terpadu;
 - jalan arteri sekunder dan kolektor; dan
 - sekitar kawasan TOD skala sub kota Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya;
- c) kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- 3) Kawasan perkantoran dengan sebaran luas lebih kurang 128 Ha (seratus dua puluh delapan Hektare) ditetapkan sebagai berikut:

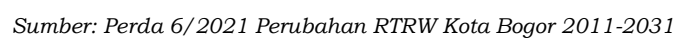
- a) mempertahankan kawasan perkantoran pemerintahan eksisting yang terdiri dari:
 - kantor Pemerintah Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota menyebar di seluruh kecamatan;
 - kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota menyebar di seluruh kecamatan; dan
- b) kawasan perkantoran pemerintahan baru kota di WP Pasima, WP Utara, WP Daksina, dan WP Purwa.
- 4) Kawasan pendidikan dengan sebaran luas lebih kurang 102 Ha (seratus dua Hektare) meliputi:
 - a) kawasan pendidikan dasar menyebar di seluruh kelurahan;
 - b) kawasan pendidikan menengah menyebar di seluruh kecamatan;
 - c) kawasan pendidikan tinggi di menyebar di seluruh kecamatan;
 - d) penambahan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
 - e) pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina.
- 5) Kawasan kesehatan dengan sebaran luas lebih kurang 34 Ha (tiga puluh empat Hektare) meliputi:
 - a) rumah sakit yang menyebar di seluruh kecamatan;
 - b) pelayanan kesehatan dasar berupa puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dan sarana kesehatan lainnya yang menyebar di seluruh kecamatan; dan
 - c) penambahan puskesmas pembantu ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara.
- 6) Kawasan peribadatan dengan luasan kurang lebih 6 Ha (enam Hektare) menyebar di seluruh kecamatan.

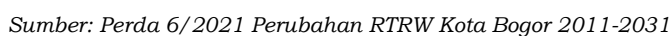
- 7) Kawasan olahraga dengan sebaran luas lebih kurang 111 Ha (seratus sebelas Hektare), meliputi:
 - a) GOR Pajajaran;
 - b) sarana olah raga skala WP dan lingkungan di setiap WP; dan
 - c) kawasan olahraga skala kota atau skala nasional di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.
- 8) Kawasan transportasi dengan luasan lebih kurang 1 Ha (satu Hektare) sebagai berikut:
 - a) stasiun kereta api di kawasan stasiun Bogor;
 - b) stasiun kereta api perkotaan di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya; dan
 - c) kawasan terminal dan stasiun kereta api perkotaan Baranangsiang.
- 9) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luasan lebih kurang 25 Ha (dua puluh lima Hektare) sebagai berikut:
 - a) Gardu Induk Listrik di Kelurahan Tanahbaru, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Sempur;
 - b) Instalasi Pengolahan Air di Cipaku, Dekeng dan Rancamaya;
 - c) Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kelurahan Tegalgundil dan Kelurahan Kayumanis; dan
 - d) kolam retensi di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan
- 10) Kawasan campuran dengan sebaran luas lebih kurang 295 Ha (dua ratus sembilan puluh lima Hektare) meliputi:
 - a) kawasan campuran di koridor Jalan KH Sholeh Iskandar, rencana jalan arteri Tol Lingkar Bogor, jalan lingkar dalam (inner ringroad);
 - b) kawasan TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang; dan

- c) TOD skala sub kota di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya serta TOD skala lingkungan.

e. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan sebaran luas lebih kurang 113 Ha (seratus tiga belas Hektare), menyebar di Kelurahan Cilendek Barat, Gunungbatu, Loji, Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Lawanggintung, Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Cibuluh, Ciparigi, Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Kedungbadak Kecamatan Tanah Sareal.





4.3.6.2.3 Arahana Pemanfaatan Ruang

Adapun arahan pemanfaatan ruang pada priode rencana jangka menengah tahun 2025-2026 untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.20
Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
I. WP Samida		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Samida (WP A)	Sub WP Samida (WP A)
3	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor TOD Baranangsiang
4	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)
5	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)
6	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan,Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur
7	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)
8	Penataan Pusat Lingkungan A1, A2	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari
9	Penataan sektor informal (PKL)	WP Samida (WP A)
II. WP Pasima		
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)
2.	Penyusunan Rencana rinci Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
6.	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Pasima (WP B)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
8.	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
9.	Pembangunan Pusat Lingkungan B1 dan B2	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu
III.	WP Utara	
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
6.	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan di Sub PPK C	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin–Pasar TU Kemang
7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin–Pasar TU Kemang
8.	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)
9.	Pembangunan Pusat Lingkungan C1, C2, C3, C4	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat
IV.	WP Purwa	
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi	
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu–Jalan Adnawijaya
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
6.	Penyusunan RTBL koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta
7.	Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota
8.	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Purwa (WP D)	WP Purwa

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
9.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu–Jalan Adnawijaya
10.	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)
11.	Pembangunan Pusat Lingkungan D1, D2, D3 dan D4	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil
V. WP Daksina		
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi–Bogor– <i>Inner Ring Road</i>
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Dasina (WP E)
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
6.	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Bogor	Simpang Jalan Tajur–Jalan Raya Ciawi Bogor
7.	Penyusunan RTBL Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Koridor <i>Inner Ring Road</i>
8.	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Daksina	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Bogor – <i>Inner Ring Road</i>
9.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Bogor – <i>Inner Ring Road</i>
10.	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina
11.	Pembangunan Pusat Lingkungan E1, E2, E3, E4	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja

Tabel 4.21

Indikasi Program Transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
Studi dan Kajian		
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor
2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor
4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor
5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
I	Jaringan Jalan	
A	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor
B	Peningkatan Jalan	
1	Jalan kolektor sekunder	Jalan Pajajaran Jalan KS Tubun; Jalan Letjen Ibrahim Adjie; Jalan Mayjen Ishak Djuarsa; Jalan Pangeran Shogiri; Jalan Tumenggung Wiradiredja; Jalan Parung Banteng; Jalan Kayumanis-Cilebut; Jalan Cibeureum; Jalan Kapten Yusuf; Jalan Cipaku; Jalan Warung Nangka; Jalan Mandala Ciluar
2	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor
3	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Johar
		Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Manunggal
		Simpang Jalan R. Saleh Bustaman – Jalan Pahlawan
		Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun
		Simpang Jalan Raya Pemda – Jalan KS Tubun (Talang)
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun
		Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango
		Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri
		Simpang Ahmad Syam – Cimahpar
		Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
4	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan RE Martadinata
		Persimpangan Jalan MA Salmun
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya
5	Peningkatan Jembatan	Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Ahmad Yani
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat
		Jembatan ruas jalan lainnya
C	Pembangunan jalan	
1	Pengembangan jalan tol	
a	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BORR)
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Bogor Ciawi Bogor (Bocimi)
2	Pembangunan jalan non tol	
a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan Arteri paralel dengan jalan tol lingkar bogor ruas ciluar kedunghalang (Jalan R2)
b	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 Parungbanteng – Wangun
		Jalan Bogor Inner ring road
		Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa
d	Pembangunan jalan kolektor sekunder	
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Soleh Iskandar (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jambu Dipa (Kab. Bogor)
		Rencana ruas jalan: Jalan Raya Semplak- Jalan KH Sholeh Iskandar – Kel

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda
		Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi – Jalan Kemang – Kedung Halang (Sholeh Iskandar);
		Rencana ruas jalan: Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi
		Rencana ruas jalan: Jalan Perdana Raya – kel Kencana
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Tanah Baru
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Katulampa
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor;
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Tol Bocimi
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi
e	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
3	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP
4	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP
5	Pengembangan prasarana dan sarana kendaraan tidak bermotor (jalan pejalan kaki dan jalur khusus sepeda)	
a	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking
		Jalan MA Salmun
		Jalan Merdeka
		Jalan RE Martadinata
		Jalan Paledang
		Jalan Kapten Muslihat
		Jalan KS Tubun
		Jalan KH Sholeh Iskandar
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh
		Jalan Brigjen Saptaji
		Jalan Dr. Sumeru
		Jalan Mawar
		Jalan Sempak
		Jalan Ir. H. Djuanda
		Jalan Jenderal Sudirman
		Jalan Jenderal Ahmad Yani
		Jalan Dadali
		Jalan Jalak Harupat
		Jalan Pemuda
		Jalan Suryakencana
		Jalan Siliwangi
		Jalan Pajajaran
		Jalan Otto Iskandardinata
		Jalan Adnawijaya
		Jalan Ahmad Sobana
		Jalan Ahmad Syam
		Jalan lokal kawasan komersial dan kepadatan tinggi
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
b	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda	
a	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor
b	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD
c	Skywalk	Air Mancur – Jl. Pajajaran
		Jl. Suryakacancana – Terminal Baranangsiang
		Kawasan TOD
II	Terminal	
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang
2.	Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi	Terminal Baranangsiang/Tol Jagorawi
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Tanah Baru yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Kelurahan Tanah Baru
4	Pembangunan terminal di Kelurahan bubulak sebagai transfer point yang terintegritas dengan stasiun kereta ringan	Kelurahan Bubulak
5	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi
6	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD
7	Penyediaan terminal perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan
8	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal
9	Revitalisasi terminal agribisnis	Kelurahan Rancamaya
10	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru
III	Parkir	
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan
		PPK
		Sub PPK
		Kawasan pengembangan TOD
		Terminal Penumpang
		Stasiun KA
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor
		Kawasan pasar Bogor
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota
2	Pembangunan prasarana "park and ride"	Kawasan pengembangan TOD
		Kawasan Suryakencana

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya Pool bis wisata Baranangsiang
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor
IV	Angkutan Umum Massal	
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal
2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor–Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor
6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor
V	Jaringan Lintas	
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor
VI	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota	
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor
VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota	
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor
B	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki	
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor
4	Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda	
a	Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki	Jalan-jalan arteri dan kolektor
		Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum
b	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor
c	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda	Menyebar di Kota Bogor
d	Pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki	Menyebar di Kota Bogor
5	Menyediakan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Menyebar di Kota Bogor
6	Penataan pedestrian	PPK
7	Pembangunan pedestrian	Sub PPK pusat-pusat kegiatan
8	Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor / sepeda	Menyebar di Kota Bogor
VIII	Jaringan Kereta Api	
1	Peningkatan jalur kereta api <i>commuter line</i> Bogor – Jakarta	Jalur KA Bogor – Jakarta
a	Peningkatan jalur kereta api Bogor Bogor	Jalan KA Bogor – Bogor
b	Pembangunan jalur kereta ringan dalam kota	Tanah Baru - Sukaresmi - Bubulak - Stasiun Bogor - Mulyaharja - Kertamaya - Wangun - Baranangsiang - Tanah Baru
2	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan kereta ringan dalam	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	kota yang terintegrasi dengan LRT Cawang - Bogor	
3	Pengembangan simpul/stasiun kereta ringan	Tanah Baru
		Sukaresmi
		Bubulak
		Kertamaya
		Mulyaharja
		Baranangsiang
		Wangun
4	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan sekitarnya sebagai kawasan TOD	Stasiun Bogor dan Sekitarnya
5	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang
6	Revitalisasi Stasiun Kereta Api Batutulis	Batutulis
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api Genteng	Genteng
8	Pembangunan Kawasan TOD yang teritegrasi dengan jalur kereta api ringan	Tanah Baru
		Sukaresmi
		Bubulak
		Stasiun Bogor
		Mulyaharja
		Kertamaya

Tabel 4.22

Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
I	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik	
1.	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota
2.	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota	
A	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota
B	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota
3.	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota
4.	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota
5.	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota
6.	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota
7.	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
II	Pengembangan Sistem Jaringan Gas	
1.	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota
2.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota
3.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota
4.	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota
III	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	
1.	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
2.	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
3.	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
4.	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
5.	Peningkatan sistem teknologi telekomunikasi pada kawasan budidaya	Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta pelayanan umum
6.	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
7.	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
8.	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
9.	Pengembangan <i>micro cell</i>	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
10.	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
IV	Sumber Daya Air	
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan
		Sungai Cibalok
		Sungai Ciangke
		Sungai Ciomas
		Sungai Cigede
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor
V	Sistem Jaringan Air Minum	
A.	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan	
1	Penyediaan jaringan air baku untuk air minum	
a.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 1
		Zona 2
		Zona 3
		Zona 4
		Zona 5
		Zona 6
b.	Peningkatan target pelanggan	
	a. 12.000 SR oer tahun	Kota Bogor
	b. 15.000 SR per tahun	Kota Bogor
c.	Peningkatan distribusi air bersih	Dari IPA Dekeng ke <i>Reservoir</i> Pajajaran
		Dari IPA Cipaku ke <i>Reservoir</i> Cipaku
d.	Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi air bersih	Dari Mata Air Tangkil ke <i>Reservoir</i> Rancamaya
		Dari Mata Air Bantar Kambing ke <i>Reservoir</i> Cipaku
		Dari Mata Air dan IPA Palasari ke <i>Reservoir</i> Palasari
		Dari Mata Air Kota Batu ke <i>Reservoir</i> Kota Batu
		intake Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng
2.	Peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat	
a.	Pembangunan SPAM	SPAM Katulampa Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur
		SPAM Palasari Desa Palasari, Kabupaten Bogor
		SPAM Cikereteg (kapasitas 240 L/dt) Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan
b.	Pembangunan IPA Cikereteg	Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
c.	Optimalisasi IPA Dekeng I dan uprating IPA Dekeng II	Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan
d.	Pengoperasian dan <i>uprating intake</i> Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan
e.	Pengadaan dan pemasangan pipa <i>by pass resv</i> Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan
3.	Pembangunan reservoir	Reservoir Bantarkambing Kapasitas 2000 M3
		Reservoir Jabaru Kapasitas 3000 M3
		Reservoir Merdeka Kapasitas 5000 M3
		Reservoir Cikereteg Kapasitas 3000 M3
a.	Penggantian jaringan perpipaan yang sudah lama/usang	Kota Bogor
4.	Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air bersih dan air minum	
a.	Pengembangan Jaringan Retikulasi	Kota Bogor
b.	PB MBR	Kota Bogor
5.	Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi dan dari distribusi	
a.	Perbaikan sistem distribusi	Kota Bogor
b.	Pembangunan DMA	Kota Bogor
c.	Penggantian Meter Induk	Kota Bogor
d.	Tera Meter Air	Kota Bogor
6	Peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas; dan keterjangkauan untuk masyarakat	
a.	Pemeliharaan Instalasi Produksi, Bangunan Instalasi dan ME (Biaya)	Kabupaten dan Kota Bogor
b.	Pengadaan dan Pemasangan <i>Scada System</i>	Kelurahan Genteng dan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan
B.	Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan	
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat
2	Perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor
4.	Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah	Kota Bogor, Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM. Prioritas Daerah Pelayanan Non PDAM
A.	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
B.	Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM
C.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan
2	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Kayumanis
3	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara dan kawasan permukiman
4	Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S)	Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP Daksina
5	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) dan sarana prasarannya	Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/Ha, diarahkan ke WP Samida dan WP Purwa
6	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor
7	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor
8	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Seluruh Kota Bogor
9.	Pembuatan Rencana Induk Sanitasi yang dilengkapi dengan rencana detilasinya (DED)	Seluruh kota Bogor
10.	Penetapan sanksi bagi pencemar badan air	Seluruh Kota Bogor
VII	Persampahan	
1.	Membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah <i>regional</i>	Kota Bogor dan Kabupaten Bogor
2.	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga
3.	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Luna (Lulut dan Nambo)
4.	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana TPA	Persiapan dukungan pada TPA Luna (Lulut dan Nambo)

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
5.	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar
6.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	Kota Bogor
7.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor
8.	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru
9.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor
10.	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan
11.	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor
12.	Membangun ITF (Intermediate Treatment Facilities)	Kota Bogor
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkar luar, Jl,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai
5.	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang, Saluran sekunder Cibuluh, Saluran sekunder Cidepit, Saluran sekunder Ciereng.
6.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Seluruh Kota Bogor
7.	Normalisasi sungai dan saluran	Kali Kayang
8.	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai
9.	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer.	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang,
10.	Sertifikasi kepemilikan danau dan situ-situ kecil, misalnya dengan sertifikat BPN.	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor
11	Mengamankan embung-embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor
12.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal
13	Perumahan baru diarahkan untuk membuat sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep <i>zero run off</i> , <i>eco drainage</i> , dan <i>low impact development</i>	Kota Bogor
IX	Jaringan Prasarana Kota Terpadu	

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu	
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	

4.4 Inovasi Daerah

Program pembangunan kota Bogor dilaksanakan merujuk pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan menengah skala provinsi maupun nasional agar sinergitas pembangunan dapat selaras sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun. Keberhasilan program pembangunan kota bogor yang tercermin dalam kerangka program prioritas pemerintah kota Bogor tidak bisa terlepas dari dukungan inovasi dalam upaya percepatan prioritas pembangunan daerah, berikut adalah inovasi yang telah dibangun di kota Bogor:

Tabel 4.23
Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Aplikasi SmartPosyandu	Kesehatan
			GEULIS (Gerakan Peduli Stunting);	Kesehatan
			KONSEKUENSI 1000 HPK (Konseling dan Edukasi Demi Generasi Pada Sasaran Seribu Hari Pertama Kehidupan)	Kesehatan
			KERETA HATI (Kegiatan Terintegrasi untuk Balita Sehat Bebas Stunting)	Kesehatan
			LAYANAN 3 IN 1 KELAHIRAN	Kesehatan
			TEH IDA MUNGGAH PILIH KASIH (Temukan Hipertensi dan Diabetes Melitus Segini Mungkin dan Cegah Komplikasi di Kemudian Hari)	Kesehatan
			CEKLIS GO SERBU (Cegah Karies dan Peduli Stunting dengan Gerakan Gosok Gigi, Cek Rutin, Konsumsi buah dan Sayur);	Kesehatan
			AMEL DILIHAT (Ayo Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan)	Kesehatan
			ASIAP JAGA 1000 HARTA (Aksi Tanggap Jaga 1000 Hari Pertama Kehidupan)	Kesehatan
			GARDU SIHATI (Gerakan Terpadu Atasi Hipertensi)	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
			LAPIS TALAS KANG RANDI (Lakukan Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Sampai Tuntas dengan Kantong Persalinan Digital)	Kesehatan
			KANTIN PA EKO DENGAN PARENTING (Kegiatan Rutin Pemantauan Balita Beresiko Dengan Penanganan Dan Pencegahan Kejadian Dan Resiko Stunting)	Kesehatan
			SI PANTURA (Aksi Pemantauan Minum Tablet Tambah Darah)	Kesehatan
			Posrem PS 5.0 (Posyandu Remaja dalam Perspektif Society 5.0)	Kesehatan
			GEMAR MAKAN KATUK (Gerakan Masyarakat Mengkampanyekan Etika Batuk)	Kesehatan
			HAY SOBAT (Hayu Stop Buang Air Besar Disembarangan Tempat)	Kesehatan
			BOGOR TIMUR BERAKSI (Bersama Kawal Vaksinasi)	Kesehatan
			BATAGOR (Ibu Anak Tangguh Kota Bogor)	Kesehatan
			TEMAN MTBS (Temukan Pneumonia dengan Menghitung Napas Balita Sakit Batuk)	Kesehatan
			PELITA HATI (Peduli Wanita Cek Kesehatan Sejak Dini)	Kesehatan
			RANTE (Rabu Makan Tempe)	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
			SELI MEMANAS (Konseling Berhenti Merokok Mobile Anak Sekolah)	Kesehatan
			SIPATUHAR (Si Patuh Minum ARV)	Kesehatan
			SIGAPADIMAS (Siap Jaga Persalinan di Puskesmas)	Kesehatan
			GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa)	Kesehatan
			SITARSIMO (Siap Antar Vaksin Mobile)	Kesehatan
	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Polink Gaul (Pojok Konseling Keluarga Unggul)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Senam Bogor Berlari	Kepemudaan dan Olah Raga
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	SIMPELA B3 (Sistem Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Bersih KPP Tirta Galih	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	SIPROKSI (Sistem Pengendalian Proyek Konstruksi)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			SIPRANATA (Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas)	
		Program Pengembangan Perumahan	SABUMI (Sistem Aplikasi Bangunan Rumah Milik)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	SIMAE (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik)	Perhubungan
			SIMA PANGERAN (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor)	Perhubungan
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	SIKLABO (Sistem Informasi Kota Layak Anak Bogor)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif,	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kampung Tertib	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
	lincah, dan kolaboratif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KAMIS PESONA (Kami siap melaksanakan Pelayanan & Sosialisasi mobile yang Terencana)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KPWK (Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan)	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SIBADRA (Sistem Informasi Berbagai Aduan dan Saran)	Penunjang
			SIPACAR (Sistem Informasi dan Pembayaran Cara Anyar)	Penunjang
			E-Kujang	Penunjang
			SIMOTIP (Sistem Informasi Mobile Tirta Pakuan)	Penunjang
			SIDOGI (Sistem Informasi Dokumen Digital) Kota Bogor	Penunjang
			Sistem Manajemen Administrasi Perkantoran	Penunjang
			SIPEKA PPID (Sistem Informasi Pendukung Keputusan)	Penunjang
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	SIMASDA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah)	Penunjang
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SIMLEG (Sistem Legislatif)	Penunjang
		Program Perekonomian dan Pembangunan	SIPPB (Sistem Informasi Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa)	Penunjang

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PROBONO SILAS (Aplikasi Permohonan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kota Bogor)	Penunjang
			Bogor Mengaji	Penunjang
			Aplikasi SIPRO HD (Sistem Informasi Permohonan Produk Hukum Daerah) Aplikasi permohonan Harmonisasi dan Tanda Tangan Digital Produk Hukum Daerah	Penunjang
			VISH (Video Interactive Seputar Hukum)	Penunjang
			Budaya Kerja "SPIRIT" (Santun, Profesional, Integritas, Religius, Intektual dan Transparan	Penunjang
		Program Kepegawaian Daerah	ANJAS GO CLEAR (Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government Clear)	Penunjang
			Aplikasi AUSEP (Administrasi Usulan Perpindahan Pegawai)	Penunjang
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	SIAPMANG (Sistem Informasi Aspirasi Perencanaan Dan Pemantauan Pembangunan)	Penunjang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Penunjang
			Pengaduan <i>Online</i> (inspektorat)	Penunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	SSO (Single Sign On) TP2DD Kota Bogor	Komunikasi dan Informatika
			BSW (Bogor Single Window)	Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
			API KPK (Application Programming Interface) Kota Bogor	Komunikasi dan Informatika
			Aplikasi TND (Tata Naskah Dinas) Elektronik	Komunikasi dan Informatika
			Data Warehouse	Komunikasi dan Informatika
		Program Pencatatan Sipil	SITANDUK WILAYAH (Sistem Informasi Data Administrasi Kependudukan)	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Jemput Bola Rekam & Cetak Di Tempat	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Dukcapil Goes To School	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Drive Thru Go Dukcapil	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			SIKANCIL BERLARI (Sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berintegritas Layanan Prima)	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Lantatur (Layanan Tanpa Turun) atau Drive Thru dengan Si Kancil Berlari (Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Berintegrasi Layanan Prima)	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah		Program Pelayanan Penanaman Modal	SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, dan Tepat Waktu)	Penunjang

Tujuan	Sasaran	Program	Inovasi	Bidang Inovasi
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		CMS (Sistem Aplikasi Perijinan Dalam Angka Berbasis Web)	Penunjang
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	GH Berseri (Green House Tanaman Hias Bojongkerta Berseri)	Pertanian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	GEMAR ANTRI (Gerakan Masyarakat Antri Minyak)	Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kampung Tematik Ciharashas/Agro Edu Wisata Organik (AEWO) Mulyaharja	Pariwisata
			Kampung PERCA (PEduli Resik sehat CAntik)	Pariwisata
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	API TAX CLEARANCE (Application Programming Interface Tax Clearance) Kota Bogor	Penunjang
			E-SPPT	Penunjang

4.5 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Merujuk kepada aturan tersebut, Pemerintah Kota Bogor merancang kebutuhan kerjasama didasari bahwa tren kolaborasi menjadi salah satu kunci keberhasilan membangun daerah, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Di Kota Bogor terdapat sejumlah aset daerah yang berpotensi dapat memberi pelayanan bahkan pendapatan daerah, pemetaan kerjasama dilakukan secara berkala setiap tahun (Y-1), telah terinventarisir potensi kerjasama daerah untuk dilaksanakan di tahun 2025. Kerjasama tersebut mencakup:

- a. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berupa penataan daerah perbatasan;
- b. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, berupa: pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
- c. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berupa penataan ruang publik.

Tabel 4.24
Kerjasama yang telah dilaksanakan

Tujuan	Sasaran	Program	Kerja Sama	Bidang Kerjasama
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan KC Bogor tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk dan Peserta Aktif Terdaftar di Fasilitas Kesehatan Pertama Tingkat Kota Bogor dalam Rangka <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	Bidang Kesehatan
			Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3 terkait pelaksanaan magang di puskesmas	Bidang Kesehatan
			Kerja Sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (Penelitian dan Inovasi Kesehatan Masyarakat)	Bidang Kesehatan
			Kerjasama dengan IDI Cabang Kota Bogor Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor	Bidang Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor terkait Kerja Sama Wahana Pendidikan Kedokteran	Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	Perjanjian Kerja Sama dengan PT Nyala Masadepan Indonesia tentang Pengembangan Program Literasi Sekolah di Kota Bogor	Bidang Perpustakaan
	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kerja Sama dengan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor tentang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Melalui Pendidikan, penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Universitas Indraprasta PGRI tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Universitas Katolik Parahiyangan (Penelitian Pembangunan Masyarakat Inklusif	Urusan penunjang

Tujuan	Sasaran	Program	Kerja Sama	Bidang Kerjasama
			Kerja Sama dengan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan tentang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Lingkungan Hidup)	Urusan penunjang
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor tentang Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara	Urusan penunjang
			Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor tentang Penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara di Dinas Kesehatan Kota Bogor	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor tentang Penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara pada Kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Bank BJB, Badan Pertanahan Nasional, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, BPJS Kesehatan, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, Kemenag, Jasa Raharja, Taspen, DPMPTSP Jabar tentang Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Gubernur Jawa Barat tentang Komponen Pendanaan Bersama Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Urusan penunjang
			Kerja Sama dengan Kota Madiun tentang Pembangunan Daerah	Urusan penunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kerja Sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Pengawasan, Penataan dan Penerapan Infrastruktur Telekomunikasi)	Bidang Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Program	Kerja Sama	Bidang Kerjasama
			Kerja Sama dengan PT. Indonesia Cable Network (Pemanfaatan Saluran Khusus Televisi Kabel dan Jaringan Fiber Optik	Bidang Komunikasi dan Informatika
			Kerja Sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Banda Siber dan Sandi Negara (Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik)	Bidang Komunikasi dan Informatika
		Program Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Tuti Asmawati S, Amd.Keb tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Tuti Asmawati S, A.Md.Keb.	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Karukunan Warga Bogor Kota Bogor tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemiikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Warga Kota Bogor	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Yenny Irawati Adam, A.Md,Keb. tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Yenny Irawaty Adam, A.md.Keb	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Elma Vyana S.Tr,Keb tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Elma Vyana S.Tr.Keb	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Wrestiani Rahayu, A.md,Keb tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Wrestiani Rahayu,A.md.Keb	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan F.Ashri N, M,Keb tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan F.Ashri N,M.Keb	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Program	Kerja Sama	Bidang Kerjasama
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Eli Liawati, S.ST,Bdn tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Eli Liawati, S.ST,Bdn	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Amry Restu Ayu, A.Md,Keb tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Amry Restu Ayu,A.Md,Keb	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Praktek Mandiri Bidan Nevi Novita Nuraisah, A.Md,Keb tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Nevi Novita Nuraisah,A.Md,Keb	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Bank mandiri KCU Juanda Bogor tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil di Bank Mandiri KCU Juanda Bogor	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Kota Bogor tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Kota Bogor	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan PT GoTo Gojek Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masyarakat Kota Bogor Melalui Pemanfaatan Aplikasi Gojek Tokopedia Tbk	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bogor tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bank BJB Cabang Bogor	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Program	Kerja Sama	Bidang Kerjasama
			Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIA Menarasiswa tentang Pemberdayaan dan Penelitian Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Kota Bogor	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1 A tentang Pelayanan Terpadu Melalui Permohonan Langsung Jadi (One Day Service) dan Pojok Informasi Catatan Sipil pada Pengadilan Negeri Sipil	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Kerja Sama dengan Rumah Sakit EMC Sentul tentang Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit EMC Sentul	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
			Nota Kesepakatan antar Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Pengadilan Agama Bogor Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor tentang Upaya Pengendalian Angka Dispensasi Kawin	Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
		Program Pengendalian Penduduk	Kerja Sama dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue Prov Aceh tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Sigulai Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh	Bidang Transmigrasi
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kerja Sama dengan PT Divaintan Putripratama tentang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bogor, PT Olympic Bangun Persada dan PT Marga Sarana Jabar tentang Peningkatan Kapasitas Simpang Jalan Raya Bogor -Jalan Sholeh Iskandar - Jalan Tol Bogor Ring Road pada <i>On Ramp</i> Kedung Halang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Perjanjian Kerja Sama dengan PT Sejahtera Eka Graha dan PT Kharisma Tangguh Perkasa tentang Perencanaan Pekerjaan Infrastruktur untuk Akses Bersama di Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Bogor	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Program	Kerja Sama	Bidang Kerjasama
daya saing ekonomi daerah	potensi ekonomi lokal		Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan National Urban Water Supply Project (NUWSP)	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Kerja Sama dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tentang Pengawasan Eksternal Kualitas Air Minum	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kota Bogor dan PT Aneka Mitra Wira Bangun Mas tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik Kota Bogor (penataan kawasan)	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bima Sakti Jinluo tentang Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bogor	Bidang Lingkungan Hidup
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Program Pengembangan UMKM	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor, PT Digiasia Bios dan PT Mandalika Wilasita Sajiwa Tentang Implementasi Solusi Teknologi Finansial Dalam Pembangunan Ekosistem Elektronifikasi Pembayaran dan Transaksi Daerah di Kota Bogor	bidang Koperasi dan UMKM
			Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kota Bogor dan PT Es Teh Indonesia Makmur tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik Kota Bogor	bidang Koperasi dan UMKM

4.6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Dalam rangka percepatan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota, program dan kegiatan tidak mampu ditopang dengan APBD dan APBN karena keterbatasan anggaran dapat menggunakan alternatif pendanaan lainnya. Pendanaan kreatif merupakan salah satu pilihan untuk mengisi hambatan keterbatasan anggaran. TJSLP merupakan salah satu bentuk pendanaan kreatif yang merupakan sebuah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kota Bogor secara aktif membentuk tim fasilitasi TJSLP untuk memetakan program unggulan yang dapat didanai oleh TJSLP, mengkordinasikan dengan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di kota Bogor maupun luar kota Bogor kemudian melaporkannya kepada penanggung jawab untuk dapat diimplementasikan. Untuk tahun 2025, telah dilakukan pemetaan program dan kegiatan untuk 5 bidang yang dapat ditopang melalui TJSLP adalah:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, berupa percepatan pengentasan *Open Defecation Free* (ODF), *stunting* dan AIDS Tuberculosis, Malaria (ATM)
- b. Urusan Pemerintahan Koperasi dan UMKM: berupa pusat kuliner
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain:
 - 1) Penataan ruang publik;
 - 2) Penyediaan *landmark* kota.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup, berupa: Pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, antara lain:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana sosial
 - 2) Pelatihan dan modal usaha bagi kelompok rentan (Pekerja Seks Perempuan, penyandang disabilitas, ODHIV).

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Sebagai dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen ini mencakup berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan. Dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini menggunakan nomenklatur Program/Kegiatan/Sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang jelas dan terstruktur. Strategi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disusun secara cermat dan disajikan dalam bentuk program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) serta partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Bab V dokumen ini berasal dari analisis kondisi, permasalahan, dan isu strategis yang dihadapi, yang kemudian menghasilkan prioritas pembangunan. Pada tahun 2025, prioritas pembangunan terdiri dari berbagai sasaran yang diimplementasikan melalui **117** program yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dokumen ini menetapkan

target capaian kinerja untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan hasil formulasi dari rangkaian pembahasan mendalam terkait substansi program, kegiatan, dan subkegiatan. Pembahasan ini telah disinkronisasi dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2025. Musrenbangda Tahun 2025 berfungsi sebagai forum bagi pemangku kepentingan untuk menyusun RKPD Tahun 2025. Pemangku kepentingan ini meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat Kota Bogor.

Untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disepakati, selain berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas, Bab V dokumen RKPD ini juga mencakup prakiraan program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2026. Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 meliputi:

- a. Pelaksanaan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bogor dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ini mencakup upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.
- c. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Untuk pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan melalui aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Dokumen RKPD tahun 2025 dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Awal Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk tahun 2025. Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka acuan

bagi berbagai sektor dan perangkat daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif.

Secara rinci, rumusan program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai program dan kegiatan prioritas, termasuk tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta estimasi anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah memiliki panduan yang terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan sepanjang tahun anggaran 2025.

Dokumen RKPD ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan perencanaan, tetapi juga sebagai alat koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan responsif terhadap perubahan dan tantangan yang mungkin timbul sepanjang tahun. Melalui pendekatan yang fleksibel dan adaptif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 5.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA (RENJA OPD) BOGOR TAHUN 2025

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	29
2	KECAMATAN	5	12	34
3	KEPEGAWAIAN	2	10	28
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	11	22
5	KEUANGAN	4	12	57
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	4
7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	7
8	PERENCANAAN	3	13	42
9	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	57
10	SEKRETARIAT DPRD	2	16	60
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	12	23
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	7	19
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	12	19
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	3	4
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	13	33
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	23	76
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	16	49
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	8	21
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	6	10
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	16	33
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	12	26
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	5	10
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	17	49
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	8	24

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	17	30
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	11	20
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	10	52
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	13	56
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	4
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	17	40
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	5	17
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	5
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	9	13
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	15	38
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	15	43
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	4
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	13	27
	TOTAL	146	400	1087

5.2 REKAPITULASI RKPD DAN RENJA TAHUN 2025 PER SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH, PER URUSAN PEMERINTAHAN DAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Adapun rekapitulasi besaran pagu indikatif setiap Perangkat Daerah sebagai bentuk target kinerja Perangkat Daerah di Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 yang dapat digambarkan pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	NILAI ENTRY	DEVIASI	%
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	574.432.917.383	574.432.917.383	-	100,00
2	1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	613.738.175.717	613.738.175.717	-	100,00
3	1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137.199.542.555	137.199.542.555	-	100,00
4	1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	161.316.087.081	161.316.067.634	19.447	100,00
5	1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.564.314.894	9.564.310.894	4.000	100,00
6	1.05.0.00.0.00.07.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.177.891.926	48.177.891.926	-	100,00
7	1.05.0.00.0.00.08.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17.559.729.215	17.559.694.780	34.435	100,00
8	1.06.0.00.0.00.09.0000	DINAS SOSIAL	16.609.640.458	16.609.640.070	388	100,00
9	2.07.0.00.0.00.10.0000	DINAS TENAGA KERJA	14.831.980.212	14.831.980.212	-	100,00
10	2.08.2.13.0.00.11.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.007.457.915	15.007.457.275	640	100,00
11	2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.148.444.149	19.148.444.094	55	100,00
12	2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	125.922.436.739	125.922.436.739	-	100,00
13	2.12.0.00.0.00.14.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.720.054.185	15.720.053.833	352	100,00
14	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.894.647.609	14.625.249.275	269.398.334	98,19
15	2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	181.673.343.838	181.673.343.821	17	100,00
16	2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.813.647.049	23.813.647.049	-	100,00
17	2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18.473.829.335	18.473.735.286	94.049	100,00
18	2.18.0.00.0.00.19.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.136.838.264	16.130.502.364	6.335.900	99,96
19	2.19.0.00.0.00.20.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	106.609.962.157	106.609.865.096	97.061	100,00
20	2.24.2.23.0.00.21.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12.226.087.049	12.226.086.808	241	100,00
21	3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15.507.280.491	15.507.280.252	239	100,00
22	3.26.2.22.0.00.22.0000	SEKRETARIAT DAERAH	123.122.747.804	123.079.691.920	43.055.884	99,97

NO	KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	NILAI ENTRY	DEVIASI	%
23	4.02.0.00.0.00.24.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	160.360.995.508	160.354.632.944	6.362.564	100,00
24	5.01.5.05.0.00.25.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.463.725.890	24.463.725.890	-	100,00
25	5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.877.325.883	62.877.325.883	-	100,00
26	5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	57.433.618.241	57.433.618.241	-	100,00
27	5.03.5.04.0.00.28.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	37.587.255.357	37.587.255.357	-	100,00
28	6.01.0.00.0.00.29.0000	INSPEKTORAT	25.959.737.182	25.957.551.341	2.185.841	99,99
29	7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN BOGOR UTARA	29.464.881.388	29.464.813.759	67.629	100,00
30	7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN BOGOR SELATAN	53.168.482.858	53.168.482.858	-	100,00
31	7.01.2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN BOGOR TIMUR	25.553.352.434	25.553.347.141	5.293	100,00
32	7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN BOGOR BARAT	50.412.595.451	50.412.595.282	169	100,00
33	7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN BOGOR TENGAH	35.189.036.944	35.189.036.940	4	100,00
34	7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN TANAH SAREAL	39.471.217.794	39.459.866.145	11.351.649	99,97
35	8.01.0.00.0.00.30.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.777.575.138	36.777.575.138	-	100,00
TOTAL			2.920.406.856.093	2.920.067.841.902		99,99

Sumber : SIPD-RI, 2024

Selanjutnya proporsi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tersebut untuk setiap Urusan Pemerintahan yang selanjutnya diterjemahkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Proporsi Pagu RKPD Per Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERSENTASE PER URUSAN (%)
1	NON URUSAN	49.598.075.966	1,70
2	UNSUR KEWILAYAHAN	166.743.321.902	5,71
3	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.777.575.138	1,26
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	282.840.934.114	9,69
5	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.957.551.341	0,89
6	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	149.424.670.729	5,12
7	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.934.483.349	0,75
8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.570.125.180.498	53,77

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERSENTASE PER URUSAN (%)
9	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	616.666.048.865	21,12
	TOTAL	2.920.067.841.902	100.00

Sumber : SIPD-RI, 2024

Dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa persentase anggaran urusan masih didominasi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 54,01%. Apabila dari sisi banyaknya program setiap urusan, maka urusan yang memiliki program terbanyak adalah urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 10 program, sedangkan urusan yang memiliki program yang sedikit sebanyak 1 program terdiri dari urusan Bidang Pertanahan, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan Bidang Urusan yang memiliki persentase anggaran tertinggi adalah Urusan Bidang Pendidikan, sedangkan Bidang Urusan yang memiliki persentase anggaran terendah adalah Bidang Urusan Pertanahan, sebagai berikut:

Tabel 5.4
Bidang Urusan dan Program Tahun 2025

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.486.824.741
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	625.673.800
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	845.052.800
	TOTAL	25.957.551.341
KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	712.024.800
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	438.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.899.905.356

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.234.052.125
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.339.621
	TOTAL	166.743.321.902
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.269.200.715
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.598.075.966
	TOTAL	51.867.276.681
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.224.621.600
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	327.296.800
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.344.914.600
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	18.824.767.400
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.873.162.800
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.182.811.938
	TOTAL	36.777.575.138
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10.534.615.400
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	33.711.363.006
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.698.319.336
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.366.646.382
	TOTAL	120.310.944.124
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.380.800.000

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	TOTAL	2.380.800.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.725.000.000
	TOTAL	1.725.000.000
PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.314.786.900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.423.040.490
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.000.898.500
	TOTAL	22.738.725.890
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.579.166.651
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.878.443.694
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.028.690.825
	TOTAL	122.486.301.170
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	75.953.207.706
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.401.425.238
	TOTAL	160.354.632.944
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.267.900
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.521.027.900
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	285.846.042
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.392.345.063
	TOTAL	14.399.486.905
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	567.483.600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.291.056.384
	TOTAL	9.858.539.984
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	480.360.000

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	494.666.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	783.990.457
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	64.399.770
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.899.285.694
	TOTAL	12.722.701.921
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	449.140.400
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	162.762.856
	TOTAL	611.903.256
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	89.017.684.700
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.653.092.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	990.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	260.000.000
	TOTAL	91.920.776.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.479.390.579
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	386.631.596.460
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.262.625.280
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	207.123.041.198
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	241.522.200
	TOTAL	613.738.175.717
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.570.597.575

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.032.687.100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.359.828.718
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.328.784.207
	TOTAL	75.291.897.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.267.406.112
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.638.671.810
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.005.851.327
	TOTAL	22.911.929.249
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17.500.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	222.614.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	857.210.900
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	34.200.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.452.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	230.016.000
	TOTAL	1.440.993.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	170.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.040.692.301
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.347.251.100

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	154.072.500
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.148.977.520
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	445.730.300
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.286.773.479
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	262.000.000
	TOTAL	134.385.497.200
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	73.536.400
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	18.314.800
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	139.110.600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.800.319.462
	TOTAL	17.031.281.262
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.149.999.651
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	43.353.200
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	604.732.700
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	986.492.780
	TOTAL	2.784.578.331
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.247.555.300
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.921.631.815

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.211.214.800
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.577.587.452
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167.992.500
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	6.427.631.840
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.095.845.144
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.190.215.544
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	787.500.000
	TOTAL	143.627.174.395
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	393.390.750
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	19.812.382.400
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.692.437.823
	TOTAL	66.898.210.973
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	867.893.978
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.007.208.367
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	124.960.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	931.304.600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.910.322.330
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	524.602.000
	TOTAL	14.366.291.275
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.270.444
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.764.600

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	549.961.100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.040.830.311
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	359.675.909
	TOTAL	16.130.502.364
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.427.572.738
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	436.005.344.645
	TOTAL	574.432.917.383
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.239.203.400
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.069.955.144
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.616.154.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.699.936.731
	TOTAL	14.625.249.275
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	128.640.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	294.825.500
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	91.999.608
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.193.200
	TOTAL	566.658.308
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	137.576.900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.020.888.376
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	93.514.878.545
	TOTAL	181.673.343.821
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.219.986.978

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	246.096.900
	TOTAL	16.466.083.878
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	335.183.200
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	703.466.300
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.328.897.324
	TOTAL	2.367.546.824
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	625.151.900
	TOTAL	625.151.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.000.000
	TOTAL	200.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	12.278.400
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	200.684.400
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	224.916.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	839.957.876
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	227.422.900
	TOTAL	1.505.259.576
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.660.832.904
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.482.653.858
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	72.152.367.776
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.129.520.795
	TOTAL	146.425.375.333
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	442.843.300
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.118.649.300
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.146.800

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.577.647.570
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	923.174.200
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.497.178.900
	TOTAL	16.609.640.270
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	276.565.900
	TOTAL	276.565.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	226.275.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.757.260.545
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	390.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.458.444.667
	TOTAL	14.831.980.212
	TOTAL	2.920.067.841.902

Sumber: SIPD-RI, 2024

Tabel 5.5
Porpori Anggaran Bidang Urusan Tahun 2025

BIDANG URUSAN	ANGGARAN	PERSENTASE
INSPEKTORAT DAERAH	25.957.551.341	0,89
KECAMATAN	166.743.321.902	5,71
KEPEGAWAIAN	35.206.455.357	1,21
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.777.575.138	1,26
KEUANGAN	120.310.944.124	4,12
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.380.800.000	0,08
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.725.000.000	0,06
PERENCANAAN	22.738.725.890	0,78
SEKRETARIAT DAERAH	122.486.301.170	4,19
SEKRETARIAT DPRD	160.354.632.944	5,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.720.053.833	0,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.858.539.984	0,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.722.701.921	0,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	611.903.256	0,02

BIDANG URUSAN	ANGGARAN	PERSENTASE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	106.609.865.096	3,65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	613.738.175.717	21,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	75.301.897.600	2,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.911.929.249	0,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.440.993.100	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	134.385.497.200	4,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17.031.281.262	0,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.784.578.331	0,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	143.627.174.395	4,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	66.898.210.973	2,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.007.457.275	0,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.130.502.364	0,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	574.432.917.383	19,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.625.249.275	0,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	566.658.308	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	181.673.343.821	6,22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	16.466.083.878	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.367.546.824	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	625.151.900	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	200.000.000	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.505.259.576	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	146.425.375.333	5,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.609.640.070	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	276.565.900	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.831.980.212	0,51
TOTAL	2.920.067.841.902	100

Terdapat program-program yang tidak dianggarkan, namun melekat pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut yaitu Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Penggunaan Arsip,

Program Perlindungan dan Penyehatan Arsip, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan, dan Bahasa dan Sastra.

Apabila Pagu RKPD dikaitkan dukungannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional bahwa dukungan terbesar adalah pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Pokhukhankam dan Trasformasi Pelayanan Publik sebesar Rp1.798.430.311.039, seperti pada tabel 5.6 di bawah ini:

Tabel 5.6

Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.344.914.600
	TOTAL	1.344.914.600
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	625.151.900
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	857.210.900
	Program pengembangan UMKM	230.016.000
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	3.757.260.545
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	139.110.600
	Program penanganan kerawanan pangan	73.536.400
	Program pengawasan keamanan pangan	18.314.800
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	839.957.876
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	224.916.000
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	12.278.400
	Program penyuluhan pertanian	227.422.900
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	200.684.400
	Program pengelolaan perikanan budidaya	449.140.400
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	162.762.856

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	6.427.631.840
	Program pengelolaan persampahan	10.347.251.100
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	11.921.631.815
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.148.977.520
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	154.072.500
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	170.000.000
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	445.730.300
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	500.000.000
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	30.000.000
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	15.040.692.301
	Program perencanaan lingkungan hidup	262.000.000
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	23.577.587.452
	TOTAL	77.843.338.805
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program penyelenggaraan jalan	54.190.215.544
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	10.211.214.800
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	72.152.367.776
	Program penataan bangunan gedung	2.247.555.300
	Program pengembangan jasa konstruksi	167.992.500
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	93.514.878.545
	Program pengelolaan perkeretaapian	137.576.900
	Program penyelenggaraan penataan ruang	787.500.000
	Program pengembangan kebudayaan	783.990.457
	Program pengembangan kesenian tradisional	64.399.770
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	480.360.000
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	294.825.500

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN
	Program pemasaran pariwisata	1.149.999.651
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	986.492.780
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	43.353.200
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	604.732.700
	Program pengembangan ekspor	128.640.000
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	17.500.000
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	79.452.000
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	34.200.000
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	222.614.200
	Program perencanaan dan pembangunan industri	246.096.900
	Program penempatan tenaga kerja	390.000.000
	Program hubungan industrial	226.275.000
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	51.193.200
	Program perekonomian dan pembangunan	2.028.690.825
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	91.999.608
	TOTAL	241.334.117.156
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	386.631.596.460
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.262.625.280
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	241.522.200
	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.239.203.400
	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.069.955.144
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.007.208.367
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	124.960.000
	Program perlindungan perempuan	524.602.000
	Program pemenuhan hak anak (PHA)	867.893.978
	Program peningkatan kualitas keluarga	931.304.600

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.653.092.000
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	990.000.000
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	89.017.684.700
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	50.146.800
	Program pengelolaan pendidikan	138.427.572.738
	Program pembinaan perpustakaan	703.466.300
	Program pengelolaan permuseuman	494.666.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	17.479.390.579
	TOTAL	645.716.890.546
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
	TOTAL	-
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Pengembangan Perumahan	4.482.653.858
	Program Kawasan Permukiman	26.660.832.904
	Program Pemberdayaan sosial	442.843.300
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	923.174.200
	Program Rehabilitasi Sosial	1.497.178.900
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	327.296.800
	TOTAL	34.333.979.962
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	285.846.042
	Program Pengendalian Penduduk	1.616.154.000
	Program Pencatatan Sipil	200.267.900
	Program Pendaftaran Penduduk	1.521.027.900
	Program pengembangan iklim penanaman modal	549.961.100
	Program promosi penanaman modal	359.675.909
	Program pelayanan penanaman modal	1.995.270.444
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	184.764.600
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.638.671.810
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	75.953.207.706
	Program penyelenggaraan pengawasan	625.673.800

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	845.052.800
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.459.339.621
	Program kepegawaian daerah	2.269.200.715
	Program pengembangan sumber daya manusia	2.380.800.000
	Program administrasi pemerintahan desa	393.390.750
	Program pengelolaan arsip	567.483.600
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.000.898.500
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.314.786.900
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.652.138.880.082
	Program pengelolaan aplikasi informatika	4.267.406.112
	Program pengelolaan keuangan daerah	33.711.363.006
	Program pengelolaan barang milik daerah	10.534.615.400
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	276.565.900
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	20.250.382.400
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	23.899.905.356
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	33.579.166.651
	Program pengelolaan pendapatan daerah	5.698.319.336
	Program penelitian dan pengembangan daerah	1.725.000.000
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	335.183.200
	Program Penyelesaian Tanah dan Garapan	200.000.000
	TOTAL	1.884.778.261.540
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program penanganan bencana	1.118.649.300
	Program penanggulangan bencana	1.570.597.575
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.032.687.100
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	5.873.162.800

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.224.621.600
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	3.359.828.718
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	712.024.800
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	18.824.767.400
	TOTAL	34.716.339.293
	TOTAL KESELURUHAN	2.920.067.841.902

Apabila dikaitkan dengan dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka dukungan anggaran terbesar adalah pada Prioritas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah sebesar Rp.1.766.604.419.621 sebagaimana pada Tabel 5.7 di bawah ini:

Tabel 5.7

Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk membuka lapangan kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	226.275.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.757.260.545	Peningkatan Kesempatan Kerja untuk Masyarakat Miskin, Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja, Padat Karya, Konektivitas Pendidikan Vokasi dengan Pasar Kerja
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17.500.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.270.444	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan (Mall Pelayanan Publik)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.149.999.651	Fasilitasi Promosi kepariwisataan, Pelakasanaan Calender of Events
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	222.614.200	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	857.210.900	Peningkatan Kapasitas bagi pelaku UMKM, Fasilitasi UMKM dalam pemasaran dan kemudahan pinjaman modal usaha, Kerjasama Inkubasi Bisnis Produk Unggulan Daerah dengan Mitra Perguruan Tinggi, Pengembangan Inovasi untuk Mendukung Produk Unggulan Daerah, Temu Bisnis Pelaku Usaha, Kajian Kelembagaan Keuangan Mikro, Peningkatan Penyerapan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
			Kredit Usaha Rakyat (KUR), Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Pelaku UMKM
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	73.536.400	Gemarikan (28,75 kg/Kapita/Tahun), Pengadaan cadangan pangan, Pengadaan pangan masyarakat miskin
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	34.200.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.725.000.000	Penguatan pengkajian Kebijakan mulai dari perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan, Penguatan kematangan Inovasi Perangkat Daerah
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	390.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.452.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	18.314.800	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.764.600	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.698.319.336	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	449.140.400	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.577.587.452	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	43.353.200	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	128.640.000	Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berorientasi Ekspor
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	549.961.100	Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	604.732.700	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif : Penyediaan Infrastruktur (Pembangunan Creative Space, Co-Working Space, Teknologi Informasi, Pembangunan Galery Creative), Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif, Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	230.016.000	Pelatihan UMKM, Penguatan Ekonomi
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	12.278.400	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	200.684.400	

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	294.825.500	Identifikasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal,
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	162.762.856	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	986.492.780	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	139.110.600	Stunting, Budidaya Pertanian, Bantuan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	224.916.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	839.957.876	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	227.422.900	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.028.690.825	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	246.096.900	Pembinaan Pelaku Usaha Distribusi Perdagangan Terkait Perizinan Berbasis Digital, Pelayanan Kemetrolagian (Tera/Tera Ulang UTPP)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.000.898.500	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Resiko, Penyusunan RPJMD, Penyusunan RKPD
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	359.675.909	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	91.999.608	Pengendalian Inflasi Bahan Pokok
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.193.200	
	Total	49.880.154.982	
Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan kehidupan beragama	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	480.360.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.250.382.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.899.905.356	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	703.466.300	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.579.166.651	Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji, penguatan kebijakan pemberian bantuan sosial (BSM), Penguatan pengkajian Kebijakan mulai dari perencanaan kebijakan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
			dan evaluasi kemanfaatan kebijakan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.427.572.738	Rehabilitasi 15 SD dan 4 SMP, Pembangunan 6 Ruang Kelas Baru SD, Pembangunan SMP 22 dan SMP 23 (lanjutan), Penebusan Ijazah Siswa Miskin, Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin, Beasiswa Miskin SD, SMP, PKBM
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	494.666.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	89.017.684.700	Revitalisasi Venue Porprov, Hibah Dana KONI
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.653.092.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	990.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	783.990.457	Pembangunan Museum Pajajaran (Lanjutan), Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Pajajaran
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	64.399.770	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.344.914.600	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	931.304.600	
	Total	312.620.905.572	
Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.479.390.579	Edukasi gizi siswa, Pembinaan kantin sehat, Pemicuan STBM di 68 Kelurahan, Monev Aplikasi RASAJAGA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	386.631.596.460	Pembangunan UPTD PSC, Pembangunan Labkesda Tahap 3, Perbaikan 3 Puskesmas dan 1 Puskesmas Pembantu, Pembangunan RSUD Lanjutan Blok VI (Bankeu dan DAK), Memperluas Cakupan PBI, Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Lokal (96% dari Balita Gizi Kurang), Pemberian PMT untuk Ibu Hamil KEK (100%), Tablet Tambah Darah, Taleus Bogor
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.262.625.280	Meningkatkan Cakupan Posyandu dan Layanan Posyandu, Pelaksanaan Posyandu Siklus Usia, Pemeliharaan Aplikasi Nongkrong Sehat, Pemeliharaan Aplikasi SIMPUS, Pemeliharaan Bogor Smart Health, Pemeliharaan Aplikasi e-SIR Bogor Sehat, Pemeliharaan Aplikasi SIGEULIS, Pemeliharaan Aplikasi Rasajaga, Pemeliharaan Aplikasi Dikaper, Pemeliharaan Aplikasi Pamong Walagri,

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
			Pemeliharaan Aplikasi Surveilans PTM, Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD, Pengembangan Bogor Smart Health, Pengembangan Aplikasi SIMPUS, Pengembangan Aplikasi Dikaper, Pengembangan Aplikasi e-SIR Bogor Sehat
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	241.522.200	
	Total	406.615.134.519	
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	712.024.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.224.621.600	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.239.203.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	442.843.300	Updating Data Kemiskinan, Pelayanan Sosial (Ambulan Pelayanan Sosial)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	327.296.800	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.069.955.144	Edukasi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) 68 Kelurahan, Stunting
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	867.893.978	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.267.900	Pelayanan Kependudukan
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.521.027.900	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.007.208.367	Penguatan Advokasi Korban Tindakan Kekerasan Anak dan Perempuan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	124.960.000	Akselerasi Aktivitas Menuju Kota Layak Anak Predikat Utama
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.146.800	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.616.154.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.359.828.718	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	18.824.767.400	

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.873.162.800	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	923.174.200	Penguatan Data Pensasaran Penduduk Miskin (P3KE), Peningkatan Kesempatan Kerja untuk Masyarakat Miskin, Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin, Membangun Sistem Implementasi Perda Disabilitas dan Perda Lansia
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	524.602.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.497.178.900	
	Total	43.406.318.007	
Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Gerakan Membangun Desa	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.660.832.904	Pembangunan Rumah Khusus bagi korban bencana. RTLH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	170.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.118.649.300	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.570.597.575	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.247.555.300	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.032.687.100	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.921.631.815	Revitalisasi IPLT (Penambahan Kapasitas IPLT), Pembangunan dan Rehabilitasi SPALDT dan SPALDS, Pengadaan Sarana IPLT (Truck Tinja)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.211.214.800	ODF
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.040.692.301	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	137.576.900	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.347.251.100	Pembangunan dan Perbaikan Prasarana TPA/TPS3R/TPST/TPS, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana penunjang TPA/TPS3R/TPST/TPS,

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
			Optimalisasi TPS3R, Persampahan
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167.992.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.482.653.858	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	6.427.631.840	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	154.072.500	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.148.977.520	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	445.730.300	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	72.152.367.776	Pengadaan Lahan untuk RTH, Pembangunan taman skala lingkungan, Sarana Prasana Lingkungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.190.215.544	Pembebasan Lahan untuk Jalan (R3, Frontage R2, Akses IPAL), Pematangan lahan Akses IPAL, Pembangunan Jalan R3 (Lanjutan), Pembangunan/Perbaikan Jembatan Pancasan, Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan), Pembangunan Trotoar Jl. Tentara Pelajar (Lanjutan), Pembangunan Trotoar Jl. Dr. Semeru, PERSIAPAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JABAR 2026
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	93.514.878.545	Revitalisasi Terminal BubulakTahap 1 (penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Bubulak), Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ, Rerouting Angkutan Umum Penumpang, Penyusunan Dokumen Evaluasi Subsidi Angkutan Umum, Penyusunan Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelola Perkeretaapian Perkotaan, Penyusunan Dokumen Kajian Angkutan Umum Listrik, Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal (BisKita), Angkutan Umum Listrik dan Angkutan Feeder, Penggantian lampu gang model esential mika (non LED) periode pemasangan 2013 - 2019 yang diganti (Habis masa garansi), Penggantian Lampu Gang LED periode 2014 - 2019

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
			yang diganti (Habis masa garansi), Penggantian titik efesiensi energi dengan penggunaan lampu LED (Revitalisasi lampu konvensional ke LED di jalan Kota Bogor) yang dilaksanakan (Habis masa garansi), Pengadaan Komponen Kelistrikan / suku cadang lampu, suku cadang panel, kebutuhan jaringan dalam upaya optimalisasi penerangan jalan eksisting di Kota Bogor yang disediakan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	787.500.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	262.000.000	
	Total	315.922.709.478	
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	393.390.750	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	75.953.207.706	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.269.200.715	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.314.786.900	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	335.183.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.267.406.112	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	567.483.600	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10.534.615.400	Penguatan manajemen Aset, peningkatan kerjasama pemanfaatan Aset
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	285.846.042	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.638.671.810	Reviu masterplan SPBE, penguatan Satu Data, Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik,
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	33.711.363.006	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.380.800.000	Integrasi sistem manajemen kinerja organisasi dan kinerja individu ASN, peningkatan Kompetensi SDM, penghargaan ASN berprestasi, penguatan budaya kerja dan sistem kerja baru
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.652.138.880.082	

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN PRIORITAS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.339.621	Pengadaan lahan untuk Kantor Kelurahan Situgede, Rehabilitasi Kantor Kecamatan, Rehabilitasi Kantor Kelurahan, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan,
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	625.673.800	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pembangunan ZI seluruh PD menuju WBK/WBBM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	625.151.900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	276.565.900	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	845.052.800	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Resiko, Penguatan evaluasi internal akuntabilitas kinerja dan keuangan
	Total	1.791.622.619.344	
	Total Keseluruhan	2.920.067.841.902	

Sumber : SIPD-RI, 2024

Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 terdiri dari Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan, Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi, Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik beserta program dan anggaran seperti pada Tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8
Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	226.275.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.757.260.545
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17.500.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.995.270.444
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.149.999.651
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	222.614.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	857.210.900

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	73.536.400
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	34.200.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.725.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	390.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.452.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	18.314.800
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.764.600
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.698.319.336
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	449.140.400
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.577.587.452
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	43.353.200
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	128.640.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	549.961.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	604.732.700
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	230.016.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	12.278.400
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	200.684.400
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	294.825.500
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	162.762.856
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	986.492.780
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	139.110.600
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	224.916.000

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	839.957.876
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	227.422.900
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.028.690.825
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	246.096.900
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.000.898.500
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	359.675.909
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	91.999.608
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.193.200
	TOTAL	49.880.154.982
Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.660.832.904
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	170.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.118.649.300
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.570.597.575
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.247.555.300
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.032.687.100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.921.631.815
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.211.214.800
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.040.692.301
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	137.576.900
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.347.251.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	167.992.500
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.482.653.858

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	6.427.631.840
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	154.072.500
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.148.977.520
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	445.730.300
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	72.152.367.776
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.190.215.544
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	93.514.878.545
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	787.500.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	262.000.000
	TOTAL	315.922.709.478
Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	712.024.800
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	480.360.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.224.621.600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.239.203.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.250.382.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.479.390.579
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.899.905.356
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	442.843.300

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	327.296.800
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.069.955.144
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	703.466.300
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	867.893.978
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	386.631.596.460
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.579.166.651
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.267.900
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.521.027.900
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.007.208.367
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.427.572.738
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	494.666.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	124.960.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.146.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	89.017.684.700
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.653.092.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	990.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	783.990.457
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	64.399.770
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.616.154.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.344.914.600
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.262.625.280
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.359.828.718

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	18.824.767.400
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	931.304.600
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.873.162.800
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	923.174.200
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	524.602.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.497.178.900
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	241.522.200
	TOTAL	762.642.358.098
Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	393.390.750
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	75.953.207.706
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.269.200.715
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.314.786.900
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	335.183.200
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.267.406.112
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	567.483.600
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10.534.615.400
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	285.846.042
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.638.671.810
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	33.711.363.006
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.380.800.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.652.138.880.082

PRIORITAS KOTA BOGOR	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.459.339.621
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	625.673.800
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	625.151.900
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	276.565.900
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	845.052.800
	TOTAL	1.791.622.619.344
	TOTAL KESELURUHAN	2.920.067.841.902

Sumber : SIPD-RI, 2024

Dari Tabel 5.8 di atas yang sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.9 di bawah ini, menunjukkan bahwa jumlah program terbanyak pada Prioritas Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, namun dari sisi jumlah anggaran terbesar proporsinya pada Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik, disebabkan terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai anggaran terbesar yang didominasi peruntukannya untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai.

Tabel 5.9
Proporsi Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Anggaran	Persentase
Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	49.880.154.982	1,71%
Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	762.642.358.098	26,12%
Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	315.922.709.478	10,82%
Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	1.791.622.619.344	61,36%
TOTAL	2.920.067.841.902	100%

Sumber : SIPD-RI, 2024 (diolah)

5.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBN

Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional yang sejalan pula dengan prioritas pembangunan daerah, menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 yang program/ kegiatannya akan diusulkan ke APBN untuk skema penganggarnya baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun program/kegiatan yang dapat diusulkan pendanaannya dari APBN sesuai lokasi prioritas untuk kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Bappenas kemudian dilakukan penginputan data melalui Sistem Aplikasi Krisna.

Tabel 5.10
Rencana Usulan Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus Fisik APBN Tahun 2025

NO	MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN	PERANGKAT DAERAH
1	Revitalisasi PAUD	3	415.164.000	Dinas Pendidikan
2	Revitalisasi SD	14	10.248.252.290	Dinas Pendidikan
3	Revitalisasi SMP	60	22.212.143.000	Dinas Pendidikan
4	Penguatan RS daerah	1	54.194.730.908	RSUD
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1	634.400.000	PUPR
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individu/Komunal	22	14.340.000.000	PUPR
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1	600.000.000	DLH
	TOTAL	102	102.644.690.198	

5.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT

Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mendukung prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat yang sejalan pula dengan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor, menyusunmrencana kerja perangkat daerah tahun 2025 yang program/kegiatannya akan diusulkan melalui APBD Propinsi Jawa Barat dengan skema penganggarnya bantuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun program/kegiatan yang akan diusulkan pendanaannya sesuai dengan kamus usulan yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi

Jawa Barat yang kemudian dilakukan penginputan melalui Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah (SIPD RI). Berikut daftar usulan yang diajukan Kota Bogor yang disajikan dalam table 5.11 sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rencana Usulan Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Perangkat Daerah Tujuan	Jenis Bankeu	Pagu (Rp)
1	Fasilitasi Sarana dan Prasaranan MPP	MPP Graha Tyasa Kota Bogor	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bankeu Reguler	1.751.993.250
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Kelurahan Pasir Jaya - Kecamatan Bogor Barat 2. Kelurahan Ciluar- Kecamatan Bogor Utara	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bankeu Reguler	1.000.000.000
3	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Kota Bogor	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bankeu Reguler	41.364.768.492
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan dari SPAM Cipaku dan SPAM Dekeng	Kelurahan Cipaku, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Kedung Badak	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bankeu Reguler	44.500.000.000
5	Website SINOPPA (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Bogor	DP3AKB Prov Jabar	Bankeu Reguler	90.000.000
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI	BBi Kel. Kencana	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bantuan Keuangan Reguler	5.000.000.000
7	Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Kel. Bubulak	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Bantuan Keuangan Reguler	1.000.000.000
8	Pengembangan Budidaya Padi Khusus	Kota Bogor	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bantuan Keuangan Reguler	200.000.000
9	Bogor Eduwisata, Farm dan Nursery (BERSERI)	Kel. Cipaku	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	BKK Kompetitif - Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura	11.904.963.000
10	Jaminan Kesehatan Peserta BPBU dan BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	Bantuan Keuangan Reguler	29.106.241.920
11	Bogor Integrated Centre of Education, Recreation and Urban Farming (BINCARUNG)	Kel. Rancamaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	BKK Kompetitif - Peningkatan sarana prasarana dan teknologi	16.000.000.000

Prioritas	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Perangkat Daerah Tujuan	Jenis Bankeu	Pagu (Rp)
				produksi peternakan	
12	Makan Ikan Cegah Stunting (MANCING)	Kota Bogor	Dinas Kelautan dan Perikanan	BKK Kompetitif - Peningkatan konsumsi protein hewani (ikan)	1.050.000.000
13	Bogor CEKATAN (cerdas, kuat, dan sehat untuk masa depan) melalui Peningkatan Konsumsi telur, susu daging	Kota Bogor	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	BKK Kompetitif - Peningkatan konsumsi protein hewani (telur, susu dan daging)	20.400.000.000
14	Pembangunan Gedung Blok I Lanjutan (Poly Rawat Jalan, Ruang ICU, OK dan Perkantoran	RSUD KOTA BOGOR	Dinas Kesehatan	Bantuan Keuangan Reguler	158.060.740.000
15	Pengadaan Alkes	RSUD KOTA BOGOR	Dinas Kesehatan	Bantuan Keuangan Reguler	66.574.579.972
16	Optimalisasi Pengendalian Simpang Bersinyal di Wilayah Kota Bogor	Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat	Dinas Perhubungan	Bantuan Keuangan Reguler	2.000.000.000
17	Pengadaan Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester)	Dinas Perhubungan, Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	Dinas Perhubungan	Bantuan Keuangan Reguler	358.426.200
18	Pengadaan Alat uji Emisi Co/Hc (Gas Analyzer)	Dinas Perhubungan, Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	Dinas Perhubungan	Bantuan Keuangan Reguler	369.726.800
19	Sarana prasarana pelatihan kerja di UPTD BLK	Kota Bogor	Dinas Tenaga Kerja	Bantuan Keuangan Reguler	8.993.075.367
20	Usulan Pembangunan Kawasan Terpadu	Kampung Munjul Lap. Bola Assalam Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sereal	Dispora Provinsi Jawa Barat	Bantuan Keuangan Reguler	206.155.187.849
21	Revitalisasi Stadion dan Sarana Penunjang (Jogging Track,Pengembangan Lapangan Luar Stadion,Pembuatan Panjat Tebing)	Stadion GOR Pajajaran	Dispora Provinsi Jawa Barat	Bantuan Keuangan Reguler	77.150.000.000
22	Perlengkapan Alat Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga	Dispora Provinsi Jawa Barat	Bantuan Keuangan Reguler	45.000.000.000
23	Sarana prasarana pendukung penerbitan adminduk (printer,PC), mobil keliling,	Disdukcapil Kota Bogor Jl. Ahmad Adnawijaya No. 45 A Bogor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	Bantuan Keuangan Reguler	6.148.095.000

Prioritas	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Perangkat Daerah Tujuan	Jenis Bankeu	Pagu (Rp)
24	Pengembangan Kampung Wisata (Penyediaan Sarana Pendukung Wisata)	Kota Bogor	Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat	Bantuan Keuangan Reguler	702.497.380
25	Pembangunan Jalan R3	Kota Bogor	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Bankeu	57.268.468.637
26	Pembangunan Jalan Akses IPAL Kayumanis	Jl. Kayumanis	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Bankeu	55.563.604.000
27	Penggantian Jembatan Satu Duit Kota Bogor	Jl. Ahmad Yunus, Sukaresmi, Kota Bogor	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Bankeu	29.320.816.128
Total					887.033.183.995

Sumber : Bapperida, 2024

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, tidak terdapat Visi Misi maupun janji politik Kepala Daerah, sehingga dibentukkan kegiatan unggulan sesuai focus pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan. Adapun anggaran masing-masing kegiatan unggulan seperti pada table 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12
Pagu RKPD Kegiatan Unggulan

NO.	FOKUS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UNGGULAN	ANGGARAN
PRIORITAS 1				
1	PENGUATAN KUALITAS SARANA PRASARANA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN, RSUD	Pembangunan UPTD PSC	6.660.424.000
			Pembangunan Labkesda Tahap 3	100.000.000
			Perbaikan 3 Puskesmas dan 1 Puskesmas Pembantu	56.248.000
2	PENGUATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 15 SD dan 4 SMP	6.853.588.000
			Pembangunan 6 Ruang Kelas Baru SD	1.200.000.000
			Pembangunan SMP 22 dan SMP 23 (lanjutan)	36.485.478.000
3	MENGURANGI SISWA PUTUS SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN	Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin	1.211.000.000
			Beasiswa Miskin SD, SMP, PKBM	2.596.000.000
4	MEMPERKUAT JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Memperluas Cakupan PBI	50.868.176.552
5	PENURUNAN STUNTING	DINAS KESEHATAN	Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Lokal (96% dari Balita Gizi Kurang) dan Pemberian PMT untuk Ibu Hamil KEK (100%)	5.807.696.200
		DALDUK KB	Edukasi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) 68 Kelurahan	449.931.844
		DKPP	Gemarikan (28,75 kg/Kapita/Tahun)	84.487.500
6	PENURUNAN ODF	DINAS PUPR	Revitalisasi IPLT (Penambahan Kapasitas IPLT)	480.654.000
			Pembangunan dan Rehabilitasi SPALDT	3.010.184.000

NO.	FOKUS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UNGGULAN	ANGGARAN
		DINAS KESEHATAN	Pemicuan STBM di 68 Kelurahan	150.990.400
7	PENGUATAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	DINAS SOSIAL	Penguatan Data Pensasaran Penduduk Miskin (P3KE)	219.000.000
		BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji	5.760.000.000
		BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	penguatan kebijakan pemberian bantuan sosial (BSM)	2.978.000.000
		DINAS TENAGA KERJA	Konektivitas Pendidikan Vokasi dengan Pasar Kerja	250,000,000
		DKUKMDAGIN	Pengendalian Inflasi Bahan Pokok	91.999.608
		DKPP	Pengadaan cadangan pangan	11.270.000
8	PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK, DISABILITAS, LANSIA DAN PEREMPUAN	DP3A	Meningkatkan Cakupan Posyandu dan Layanan Posyandu	177.329.800
		DINAS KESEHATAN		13.743.056.012
		DP3A	Akselerasi Aktivitas Menuju Kota Layak Anak Predikat Utama	164.472.000
			Penguatan Advokasi Korban Tindakan Kekerasan Anak dan Perempuan	133.125.100
			Total	136.682.927.616
Prioritas 2				
1	PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA HERITAGE DAN ILMIAH, KAMPUNG TEMATIK	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	Pembangunan Museum Pajajaran (Lanjutan)	494.666.000
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Pajajaran	222.531.770
			Pelaksanaan Calender of Events	188.689.200
2	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif : Penyediaan Infrastruktur (Pembangunan Creative Space, Co-Working Space,Teknologi Informasi, Pembangunan Galery Creative)	115.301.700
			Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif	53.712.000
			Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	167.725.500
3	PENGUATAN SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN UMKM	DKUMKMDAGIN	Peningkatan Kapasitas bagi pelaku UMKM	893.286.900,00
4	MENGAKSELERASI INVESTASI DAERAH	DPMPTSP	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan (Mall Pelayanan Publik)	1.925.526.444,00
			Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO)	98.298.400
5	PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH	DKUMKMDAGIN	Identifikasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal	
			Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berorientasi Ekspor	101.587.800,00
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	25.276.000
6	PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN	DKUMKMDAGIN	Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Pelaku UMKM	39.906.200
			Total	4.326.507.914
Prioritas 3				
1		DINAS PERHUBUNGAN	Revitalisasi Terminal BubulakTahap 1 (penyusunan	98.832.957

NO.	FOKUS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UNGGULAN	ANGGARAN
	MENGAKSELERASI PENATAAN ANGKUTAN UMUM		DED Rehabilitasi Terminal Bubulak)	
			Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap 1 (Emplacement Tahap 1)	3.438.997.120
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	144.484.000
			Rerouting Angkutan Umum Penumpang	109.582.000,00
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Subsidi Angkutan Umum	87.895.400,00
			Penyusunan Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelola Perkeretaapian Perkotaan	142.976.900,00
			Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal (BisKita), Angkutan Umum Listrik dan Angkutan Feeder	49.525.235.455
2	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN DRAINASE	DINAS PUPR	Pembangunan Jalan R3 (Lanjutan)	4.890.010.723
			Pembangunan/Perbaikan Jembatan Pancasan	400.000.000
3	PENUNTASAN INTEGRASI JALUR PEDESTRIAN DI PUSAT-PUSAT KEGIATAN	DINAS PUPR	Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan)	2.712.168.000
4	MEMPERKUAT MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	DISPERUMKIM	Pembangunan Rumah Khusus bagi korban bencana	300.000.000
5	MENGAKSELERASI PENGELOLAAN SAMPAH DI SUMBER TIMBULAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pembangunan dan Perbaikan Prasarana TPA/TPS3R/TPST/TPS	330.000.000
			Pengadaan dan Pemeliharaan sarana penunjang TPA/TPS3R/TPST/TPS	3.150.000.000
			Optimalisasi TPS3R	400.000.000
			Pembangunan taman skala lingkungan	1.205.606.320
7	PERSIAPAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JABAR 2026	DISPORA	Penyiapan Dana Cadangan	50.000.000.000
			Hibah Dana KONI	30.289.000.000
8	PENANGANAN KAWASAN KUMUH TERPADU	DISPERUMKIM	Sarana Prasana Lingkungan	11.867.817.030
			RTLH	18.706.853.839
			Total	177.799.459.744
Prioritas 4				
1	PENGUATAN ZONA INTEGRITAS DI SELURUH PERANGKAT DAERAH	INSPEKTORAT	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pembangunan ZI seluruh PD menuju WBK/WBBM	109.349.000
2	PENGUATAN SISTEM KERJA DAN MANAJEMEN KINERJA SDM	BKPSDM	Integrasi sistem manajemen kinerja organisasi dan kinerja individu ASN, peningkatan Kompetensi SDM, penghargaan ASN berprestasi, penguatan budaya kerja dan sistem kerja baru	3.889.989.500
		BAGIAN ORGANISASI		924.607.800
4	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI PELAYANAN	DISKOMINFO	Reviu masterplan SPBE, penguatan Satu Data, Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik,	3.234.705.210
		DINSOS	Pelayanan Sosial (Ambulan Pelayanan Sosial)	639.161.600

NO.	FOKUS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UNGGULAN	ANGGARAN
5	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI DAN PENGUATAN RISET DAN INOVASI DAERAH	INSPEKTORAT	Penguatan evaluasi internal akuntabilitas kinerja dan keuangan	
		BKAD	Penguatan manajemen Aset, peningkatan kerjasama pemanfaatan Aset	147.723.400
		BAPPERIDA	Penguatan pengkajian Kebijakan mulai dari perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan	2.997.925.826
		SETDA - BAGIAN ADBANG	Pengembangan dan Pemeliharaan SIABANG	77.888.100
		SETDA - BAGIAN PBJ	Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola Pengadaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ITKP, Pengembangan & Pemeliharaan SIPPB & Helpdesktiketing, Surveillance ISO 9001:2025	1.330.191.225
		DINKES	Pemeliharaan Aplikasi Nongkrong Sehat, Pemeliharaan Aplikasi SIMPUS, Pemeliharaan Bogor Smart Health, Pemeliharaan Aplikasi e-SIR Bogor Sehat, Pemeliharaan Aplikasi SIGEULIS, Pemeliharaan Aplikasi Rasajaga, Pemeliharaan Aplikasi Dikaper, Pemeliharaan Aplikasi Pamong Walagri, Pemeliharaan Aplikasi Surveilans PTM, Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD, Pengembangan Bogor Smart Health, Pengembangan Aplikasi SIMPUS, Pengembangan Aplikasi Dikaper, Pengembangan Aplikasi e-SIR Bogor Sehat	135.906.800
		BAPPERIDA	Penguatan kematangan Inovasi Perangkat Daerah	513.456.200
6	SARANA PRASARANA KEWILAYAHAN	Kecamatan Bogor Barat	Rehab Kecamatan, Rehab Kel Bubulak, Rehab Kel Cilendek Barat, Rehab Kel Ps Jaya, Pembebasan Lahan Kel Situgede	6.669.440.000
		Kecamatan Bogor Selatan	Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Pengadaan Kantor Kel Pakuan	10.092.645.277
		Kecamatan Bogor Utara	Kecamatan, Kel Bantarjati, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Cimahpar, Kel Ciparigi, Kel Kedunghalang, Kel tanah Baru, Kel Tegalgundil	747.894.000
		Kecamatan Bogor Tengah	Kecamatan, Kel Babakan, Babakan Pasar, Gudang, Kel Cibogor, Pabaton, Tegallega, Kel Kebon Kalapa, Kel Paledang, Kel Sempur	1.169.460.000
		Kecamatan Tanah Sareal	Rehab Kel. kebon pedes, Rehab Kel. Tanah Sareal, Pembangunan Kel. Sukaresmi	3.670.159.100
			Total	36.350.503.038
Total Kegiatan Unggulan				355.159.398.312

Sumber : SIPD-RI, 2024 (diolah)

Dari tabel 5.12 di atas, total anggaran untuk kegiatan unggulan Rp.355.159.398.312,- dengan kegiatan unggulan terbanyak diprioritas 2 sebesar Rp 177.799.459.744,-. Selain itu dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dianggarkan seperti tertuang dalam tabel 5.13 berikut ini:

Tabel 5.13

Rencana Pendanaan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
1	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	273.344.200
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.501.488.000
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	100.015.500
4	DINAS SOSIAL	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran	21.000.000
5	DINAS SOSIAL	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	61.268.000
6	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	216.000.000
7	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	56.500.000
8	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	49.960.000
9	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Mengurangi Beban Pengeluaran	16.774.000
10	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	Mengurangi Beban Pengeluaran	231.750.000
11	DINAS SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	50.400.000
12	DINAS SOSIAL	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran	9.064.900
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	26.000.000
14	DINAS SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	463.316.000
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	13.206.800
16	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	52.061.671.900
17	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	141.130.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
18	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	287.837.200
19	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	26.324.000
20	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	33.180.000
21	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	82.550.000
22	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	9.849.500
23	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	249.540.000
24	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	28.908.000
25	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	12.771.000
26	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	55.584.300
27	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	98.995.000
28	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	94.464.700
29	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	98.465.000
30	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	190.031.600
31	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	16.931.420
32	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	81.122.800
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	63.746.200
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	24.883.200
35	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	101.896.100
36	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	274.269.600
37	DINAS SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	51.200.000
38	DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	725.927.300

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
39	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	2.238.219.000
40	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	205.347.500
41	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	6.765.450.000
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	299.178.975
43	DINAS SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	577.504.000
44	DINAS SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	24.432.500
45	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	148.754.600
46	DINAS SOSIAL	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	7.183.500
47	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	88.837.600
48	DINAS SOSIAL	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	44.000.000
49	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan	30.046.200
50	DINAS TENAGA KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	Meningkatkan Pendapatan	35.000.000
51	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	47.271.100
52	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	146.996.900
53	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	120.000.400
54	DINAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatkan Pendapatan	45.129.800
55	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	137.362.200
56	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	128.839.800
57	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	12.278.400
58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	94.960.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
59	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	303.546.400
60	DINAS TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	25.000.000
61	DINAS TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	30.000.000
62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	230.016.000
63	DINAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	3.662.825.000
64	KECAMATAN BOGOR SELATAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	6.600.000
65	KELURAHAN BATUTULIS	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	232.800.000
66	KELURAHAN BOJONGKERTA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	160.800.000
67	KELURAHAN BONDONGAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	438.000.000
68	KELURAHAN CIKARET	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	340.200.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
69	KELURAHAN CIPAKU	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	360.000.000
70	KELURAHAN EMPANG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	568.200.000
71	KELURAHAN GENTENG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	204.600.000
72	KELURAHAN HARJASARI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	265.800.000
73	KELURAHAN KERTAMAYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	160.200.000
74	KELURAHAN LAWANG GINTUNG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	201.000.000
75	KELURAHAN MUARASARI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	192.600.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
76	KELURAHAN MULYAHARJA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	319.200.000
77	KELURAHAN PAKUAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	145.200.000
78	KELURAHAN PAMOYANAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	300.600.000
79	KELURAHAN RANCAMAYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	172.800.000
80	KELURAHAN RANGGAMEKAR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	286.800.000
81	KECAMATAN BOGOR TIMUR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	6.600.000
82	KELURAHAN BARANANGSIANG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	430.800.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
83	KELURAHAN SUKASARI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	204.000.000
84	KELURAHAN KATULAMPA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	635.400.000
85	KELURAHAN TAJUR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	144.000.000
86	KELURAHAN SINDANGRASA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	289.800.000
87	KELURAHAN SINDANGSARI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	178.800.000
88	KECAMATAN BOGOR BARAT	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	26.031.600
89	KELURAHAN BALUMBANG JAYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	265.800.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
90	KELURAHAN BUBULAK	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	286.800.000
91	KELURAHAN CILENDEK BARAT	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	431.400.000
92	KELURAHAN CILENDEK TIMUR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	327.600.000
93	KELURAHAN CURUG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	318.600.000
94	KELURAHAN CURUG MEKAR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	308.400.000
95	KELURAHAN GUNUNG BATU	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	359.400.000
96	KELURAHAN LOJI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	291.000.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN
97	KELURAHAN MARGAJAYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	162.000.000
98	KELURAHAN MENTENG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	433.800.000
99	KELURAHAN PASIR JAYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	352.200.000
100	KELURAHAN PASIR KUDA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	315.000.000
101	KELURAHAN PASIR MULYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	136.800.000
102	KELURAHAN SEMPLAK	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	232.800.000
103	KELURAHAN SINDANG BARANG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	287.400.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
104	KELURAHAN SITU GEDE	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	203.400.000
105	KECAMATAN BOGOR TENGAH	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	6.600.000
106	KELURAHAN BABAKAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	192.600.000
107	KELURAHAN CIBOGOR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	156.600.000
108	KELURAHAN CIWARINGIN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	256.200.000
109	KELURAHAN GUDANG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	289.800.000
110	KELURAHAN KEBON KALAPA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	245.400.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
111	KELURAHAN PALEDANG	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	320.400.000
112	KELURAHAN TEGALLEGA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	273.600.000
113	KELURAHAN SEMPUR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	178.800.000
114	KELURAHAN BABAKAN PASAR	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	224.400.000
115	KELURAHAN PANARAGAN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	187.200.000
116	KELURAHAN PABATON	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	105.000.000
117	KECAMATAN TANAH SAREAL	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	18.880.800

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
118	KELURAHAN TANAH SAREAL	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	195.600.000
119	KELURAHAN KEBON PEDES	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	387.600.000
120	KELURAHAN KEDUNG BADAK	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	498.000.000
121	KELURAHAN KEDUNG JAYA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	227.400.000
122	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	391.200.000
123	KELURAHAN SUKADAMAI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	309.000.000
124	KELURAHAN SUKARESMI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	212.270.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
125	KELURAHAN CIBADAK	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	398.400.000
126	KELURAHAN MEKARWANGI	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	393.000.000
127	KELURAHAN KENCANA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	447.000.000
128	KELURAHAN KAYUMANIS	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	294.000.000
129	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	87.419.100
130	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	87.419.100
131	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	6.595.576.065
132	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	50.490.000
133	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.843.354.900
134	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	-
135	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.321.486.000

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
136	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	98.276.000
137	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	144.539.600
138	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	58.630.323.837
139	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.600.000.000
140	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	72.013.267.552
141	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	6.530.497.615
142	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	12.650.000
143	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	19.400.769.039
144	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	97.418.400
145	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	-
146	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	23.676.904.523
147	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.022.842.000
148	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	566.211.800

Sumber : SIPD-RI, 2024

Tabel 5.14

Rencana Pendanaan Tematik Stunting Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	150.000.000
2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	50.000.000
3	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	26.324.000
4	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.550.000
5	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	287.837.200
6	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	141.130.000
7	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.465.000
8	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	190.031.600
9	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.815.968.379
10	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	249.540.000

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
		KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota		
11	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	57.448.800
12	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.320.000
13	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	52.061.671.900
14	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.760.618.080
15	DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	59.022.200
16	DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	108.000.000
17	DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	48.000.000
18	DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	10.500.000
19	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	86.269.467

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
20	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	393.135.100
21	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.999.986.012

Sumber : SIPD-RI, 2024

Tabel 5.15
Rencana Pendanaan Pelaksanaan SPM Tahun 2025

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	280.526.400
2	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.843.354.900
3	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	167.500.000
4	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.082.707.200
5	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.754.913.024
6	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17.906.791.523
7	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	184.774.000
8	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	36.744.241.000
9	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	275.000.000
10	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	332.500.000
11	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.765.450.000
12	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.000.334.344

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
13	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.770.113.000
14	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	260.100.000
15	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99.368.000
16	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	858.660.000
17	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-
18	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	137.566.400
19	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.014.916.000
20	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	205.347.500
21	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.338.526.000
22	Pendidikan Kesenitaraan	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	215.050.000
23	Pendidikan Kesenitaraan	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.238.219.000
24	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.465.000
25	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	190.031.600
26	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	94.464.700
27	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	81.122.800
28	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.931.420

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
29	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.908.000
30	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	98.995.000
31	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	55.584.300
32	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.550.000
33	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33.180.000
34	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	287.837.200
35	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	141.130.000
36	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.300.000.000
37	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.769.440.000
38	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	721.694.200
39	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.600.000.000
40	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.530.497.615

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
41	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000
42	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	87.419.100
43	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	87.419.100
44	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	91.984.400
45	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-
46	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	40.000.000
47	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-
48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-
49	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	87.419.100
50	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	91.984.400

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
51	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	91.984.400
52	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	92.782.400
53	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-
54	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	150.000.000
55	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	180.000.000
56	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	37.000.000
57	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	701.879.300
58	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.000.000
59	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	299.178.975
60	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	98.973.900
61	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	123.080.600
62	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	269.999.600

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
63	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	75.000.000
64	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-
65	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	360.353.900
66	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.770.100
67	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	56.500.000
68	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000
69	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.927.300
70	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	32.215.000

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
71	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.770.100
72	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	56.500.000
73	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000
74	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.927.300
75	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	32.215.000
76	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.770.100
77	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	56.500.000
78	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
79	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.927.300
80	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	32.215.000
81	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.770.100
82	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	56.500.000
83	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000
84	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	725.927.300
85	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	32.215.000
86	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	21.000.000
87	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.064.900

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
88	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	577.504.000
89	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	80.089.600
90	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.183.500
TOTAL					107.481.340.901

Sumber : SIPD-RI, 2024

5.5 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA BOGOR

Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor menghasilkan sebanyak 968 usulan pokok pikiran yang diperoleh melalui hasil Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok-pokok Pikiran DPRD disampaikan mengacu pada Kamus Usulan yang sudah disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, seperti pada table berikut ini:

Tabel 5.16
REKAP PERMASALAHAN USULAN POKIR TAHUN 2025 KOTA BOGOR

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
Kebudayaan	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian, marawis, hadroh)	4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL
	Hibah Badan/Lembaga Seni (Permohonan Hibah untuk Badan/ lembaga seni)	3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL
Kecamatan	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Selatan	6	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
Kelautan dan Perikanan	Pelatihan Budidaya Ikan (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya ikan)	1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Fasilitasi Sarana Pengolahan Perikanan (Bantuan sarana pengolahan perikanan)	1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	10	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Generasi Muda, pemilih pemula)	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kesehatan	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	11	DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Prasarana Penanggulangan Bencana dan fasilitas penunjang (rambu kebencanaan, alat peringatan dini banjir, ringboy/pelampung, alat komunikasi, chainsaw, alat fogging)	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	2	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Perkoperasian (masyarakat yang ingin membentuk, bergabung dan ingin mengetahui tentang koperasi)	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
			DAN PERINDUSTRIAN	
	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Lingkungan Hidup	Prasarana Daur Ulang Sampah (Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara)	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Pembangunan Taman Permukiman (Tanah milik Pemerintah Kota Bogor)	3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pariwisata	Hibah Pokdarwis (Permohonan Hibah untuk Pokdarwis	3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Pelatihan kepariwisataan untuk Pokdarwis	1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kota	2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN
	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN
	Pembangunan Septic Tank Komunal (Barang yang diserahkan kepada masyarakat)	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan RW Ramah Anak (Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sosialisasi Tentang RW Ramah Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah RW)	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pendidikan	Rehabilitasi ruang kelas SD (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang SD, untuk sekolah swasta diusulkan sebagai hibah)	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi ruang kelas SMP (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang SMP, untuk sekolah swasta diusulkan sebagai hibah)	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan ruang kelas baru SD (Pembangunan RKB pada jenjang SD)	3	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan ruang kelas baru SMP (Pembangunan RKB pada jenjang SD)	0	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	17	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sarana Pendidikan SMP (Utilitas Sarana SMP (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Permohonan sarana dan prasarana PAUD (Rehabilitasi bangunan ruang kelas, utilitas dan lainnya untuk PAUD)	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi ruang kelas Paud (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang Paud)	1	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	102	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	16	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	170	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang	5	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pembangunan Prasarana Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Bus Stop, Pembangunan Shelter, JPO	1	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Perpustakaan	Kotak Literasi cerdas (Pengadaan Buku Bacaan)	1	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pertanian	Sarana Bibit Ternak (Bantuan bibit ternak)	3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pelatihan Kelembagaan Pertanian (Pelatihan manajemen/ pengelolaan administrasi kelompok tani)	4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pelatihan Budidaya Tanaman (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya Pertanian)	4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Sarana Budidaya Pertanian (Bantuan Sarana Budidaya Pertanian)	5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	317	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	98	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	172	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	216	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
				UTILITAS UMUM (PSU)
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya (Penyediaan PSU pada lokasi relokasi korban bencana atau terkena program pemerintah daerah)	2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	290	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	15	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	63	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (harus sudah ada lokasinya, baik berupa hibah maupun aset Pemda)	6	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Penyebrangan Orang Permukiman	5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Sekretariat Daerah	Prasarana Keagamaan (Permohonan belanja sarpras hibah keagamaan (sound sistem, karpet, dll))	2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	20	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sosial	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	10	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Tenaga Kerja	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit,)	8	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah Usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Penyelenggaraan Ketrampilan Kerja berbasis kompetensi (diselenggarakan oleh BLK diprioritaskan untuk masyarakat miskin)	1	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Sumber : SIPD-RI, 2024 (diolah)

Tabel 5.17
Hasil Identifikasi Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor (Terlampir)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

- Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
- Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR TAHUN 2025

Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor. Berikut ini adalah capaian dan proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini:

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2020-2025

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian				Target 2025
			2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,11	76,59	77,17	77,85	78,7
2	Jumlah Penduduk	dalam Ribu Jiwa	1.126	1.052	1.114	1.070	1.090
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1,33	1,19	2,07	0,96	0,94
4	Angka Kemiskinan (%)	%	6,68	7,24	7,1	6,67	6,05

5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,68	11,79	10,78	9,39	8,11
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0,41	3,76	5,65	5,1	5,3
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0,412	0,441	0,43	0,464	0,43
8	Tingkat Inflasi	%	2,18	2,18	5,82	3,36	2-4
9	PDRB per Kapita (AdhB)	Juta Rupiah	44,1	45,92	49,76	53,24	58,86

Sumber: Hasil analisis Tim KEMD Bapperida, 2024

6.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 untuk memberikan pemahaman yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, maka setiap indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Bogor tahun 2025-2026, dapat dijelaskan pengukurannya sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja2025	Perangkat Daerah
1	Indikator Tujuan				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,85	78,7	Dinkes
2	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,81	61,98	DPPKB
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,1	5,3	Setda
4	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,42 (Tinggi)	3,55 (Tinggi)	Bapperida
5	Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	Indeks	2,15	2,25	Bapperida
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	A	Setda
2	Indikator Sasaran				
1	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	76,17	Disdik
2	Indeks Kesehatan	Indeks	83,28	83,74	Dinkes
3	Predikat Kota Sehat	Predikat	Belum Ikut Penilaian Kota sehat	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Dinkes

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja2025	Perangkat Daerah
4	Gini Ratio	Rasio	0,464	0,43	Bapperida
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,81	61,98	DPPKB
6	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,434	0,419	DP3A
7	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	Persentase	20,94	21,25	DPMPTSP
8	Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	Persentase	-0,26	0,5	Bapenda
9	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6	6	Bapperida
10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	16,57	12,33	Bapenda
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,49	65	BPBD
12	Volume to Capacity Ratio	Rasio	0,63	0,63	Dishub
13	Rasio konektivitas	Rasio	0,78	0,79	Dishub
14	Maturitas SPIP	Predikat	Level 3 (3,296)	Level 3 (3,326)	Inspektorat
15	Indeks SPBE	Indeks	3,72	3,75	Diskominfo
16	Nilai SAKIP Tingkat Kota	Skor	BB (76,73)	A	Setda
17	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	97,23	98	Setda
18	Manajemen Resiko Indeks	Indeks	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,055)	Inspektorat
19	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	Persentase	48	60	PUPR
20	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	65	70	Bapperida
22	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Persentase	3,96	6,37	DisKUKM Dagin
23	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	Persentase	3,73	5,71	DisKUKM Dagin
24	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	Persentase	3,20	3,89	DisKUKM Dagin

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja2025	Perangkat Daerah
25	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	Persentase	5,26	15,64	DisKUKM Dagin
26	Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se- Jawa Barat	Angka	71,29	72	Inspektorat
27	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	BKAD
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79,98	80	Kesbangpol
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	9,39	8,11	Disnaker
30	Angka Kemiskinan	Angka	6,67	6,05	Dinsos
31	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12.656	12.700	Bapperida
32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,4	57,84	DLH
34	Indeks Ber-Akhlak	Indeks	60,5	62,5	BKPSDM

6.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 6.3. berikut.

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Inflasi	Persentase	3,36	2-4	Bapperida
2	PDRB per kapita	Persentase	53,24	58,86	Bapperida
3	Indeks Gini	Poin	0,464	0,43	Bapperida

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
4	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase	93,33	93,88	Bapperida
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UHH menggunakan hasil long form SP 2020)	Poin	78,36	79,5	Bapperida
6	Jumlah Penduduk	Jumlah	1,070,719	1,090,000	Bapperida
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,96	0,94	Bapperida
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase	5,1	5,3	Sekretariat Daerah
9	Angka melek huruf	Persentase	99,98	99,99	Dinas Pendidikan
10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,64	10,65	Dinas Pendidikan
11	Harapan lama sekolah	Tahun	13,45	13,46	Dinas Pendidikan
12	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,45	74,55	Dinas Kesehatan
13	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	Persentase	2,59	9,6	Dinas Kesehatan
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	Persentase	4,16	4,13	Dinas Kesehatan
15	Cakupan desa siaga aktif	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase	64,81	68,53	Dinas Tenaga Kerja
17	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	9,39	8,11	Dinas Tenaga Kerja
18	Rasio penduduk yang bekerja	Persentase	42,96	64,73	Dinas Tenaga Kerja
19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Persentase	90,61	90,88	Dinas Tenaga Kerja
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,57	3,62	Sekretariat Daerah
22	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persentase	45,09	51,74	Bapenda
23	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	BKAD
24	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	83,1	84,7	DKPP
25	Penguatan cadangan pangan	Ton	27,40	0,5	DKPP
26	Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase	0,68	0,63	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
27	Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	Persentase	0,74	0,73	DKPP
28	Produksi Pertanian (Padi)	Ton	2.831,90	3.541,42	DKPP
29	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase	18,7	18,27	DKUKMDagin
30	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	19,23	20,87	DKUKMDagin
31	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase	18,7	18,88	DKUKMDagin
32	Kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase	19,23	15,94	DKUKMDagin
33	Kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persentase	3,73	18,26	DKUKMDagin
34	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase	N/A	13,12	Dinas Perhubungan
35	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persentase	N/A	14,52	Dinas Perhubungan
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	12.656	12.700	Bapperida
2	Angka kriminalitas	Angka	N/A	0,00043	Satpol PP
3	Rasio ketergantungan	Persentase	43	43,52	Disdukcapil
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72,56	73,81	DP3A
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase	64,81	68,53	Dinas Tenaga Kerja
III	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase	61,9	62	Dinas Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
2	Angka partisipasi sekolah	Angka	98,75	98,85	Dinas Pendidikan
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Angka	100	100	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni				
a	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	90	90,3	Dinas Pendidikan
b	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	90	90,3	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Kasar				
a	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	95,5	96	Dinas Pendidikan
b	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	95,5	96	Dinas Pendidikan
6	Angka Partisipasi Sekolah				
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Angka	91,92	92	Dinas Pendidikan
a	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Angka	89,48	90	Dinas Pendidikan
7	Angka Putus Sekolah				
a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,015	Dinas Pendidikan
b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,02	0,015	Dinas Pendidikan
8	Angka kelulusan				
a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Angka	100	100	Dinas Pendidikan
b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Angka	100	100	Dinas Pendidikan
9	Angka Melanjutkan (AM)				
a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	100	100	Dinas Pendidikan
b	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	100	100	Dinas Pendidikan
10	Fasilitas Pendidikan				
a	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase	98,73	98,8	Dinas Pendidikan
b	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persentase	98	98,2	Dinas Pendidikan
c	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	44	44,2	Dinas Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
d	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	31	31,2	Dinas Pendidikan
e	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,064	01.31	Dinas Pendidikan
f	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	01.23	01.16	Dinas Pendidikan
g	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase	100	100	Dinas Pendidikan
h	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase	99,98	99,99	Dinas Pendidikan
i	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persentase	97,5	97,91	Dinas Pendidikan
j	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	92,3	92,78	Dinas Pendidikan
k	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase	61,9	62	Dinas Pendidikan
l	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase	91,92	92	Dinas Pendidikan
m	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase	89,48	90	Dinas Pendidikan
n	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	75,3	75,4	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN				
1	Rasio Kematian Ibu per 10.000 Kelahiran Hidup	Rasio	59,89	54,5	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,7	2,7	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	7,08	2,9	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	Dinas Kesehatan
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2,97	2,97	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase	97,5	98	Dinas Kesehatan
7	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Rasio	0,67	0,67	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase	92,65	100	Dinas Kesehatan
9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persentase	94,10	100	Dinas Kesehatan
11	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Non polio AFP rate	25,12/ 100.000	≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	Dinas Kesehatan
12	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persentase	98,31	100	Dinas Kesehatan
13	Prevalensi Hipertensi	Persentase	9,66	8,4	Dinas Kesehatan
14	Prevalensi Diabetes Militus	Persentase	2,5	2,05	Dinas Kesehatan
15	Persentase kesembuhan TB Paru	Persentase	74,28	90	Dinas Kesehatan
16	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Angka	128,17	60,5	Dinas Kesehatan
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
18	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persentase	94,38	95,5	Dinas Kesehatan
19	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persentase	52,27	100	Dinas Kesehatan
20	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
21	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persentase	0,47	<0,5	Dinas Kesehatan
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase	109.9	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
23	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	Persentase	96	100	Dinas Kesehatan
24	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	Persentase	94	100	Dinas Kesehatan
25	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	Persentase	99,7	100	Dinas Kesehatan
26	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase	116	100	Dinas Kesehatan
27	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
28	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
29	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
30	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
31	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persentase	85,8	86	Dinas Kesehatan
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
33	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase	165,4	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
36	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
37	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Persentase	0,29	0,3	Dinas Kesehatan
38	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
39	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
40	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
41	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
42	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
43	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
44	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
45	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
46	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
47	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
48	Persentase ODGJ berat yang	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
49	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
50	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	100	100	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.	PEKERJAAN UMUM				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	88,95	89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persentase	0,197	0,198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persentase	88,95	89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Meter	96.121	97,221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	Persentase	5,49	6,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase	62	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persentase	0,89	0,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Jumlah	191	293	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
9	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persentase	53,66	62,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Rasio jaringan irigasi	Rasio	0,36	0,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Persentase saluran/ sungai yang ber kondisi baik	Persentase	82,46	87,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase penduduk ber akses air minum	Persentase	91,91	93,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persentase	91,90	93,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persentase	3,52	3,15	Dinas Perumahan dan Permukiman
15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persentase	20,61	21,09	Dinas Lingkungan Hidup
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	9,42	9,84	Dinas Perumahan dan Permukiman
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	1,52	1,52	Dinas Perumahan dan Permukiman/ Sekretariat Daerah
PENATAAN RUANG					
1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	0,0038	0,0065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase	99,71	99,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,21	0,22	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	89,14	90,24	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	92,82	96,12	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persentase	3,52	3,15	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	Persentase	1,07	1,43	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	1,00	0,67	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persentase	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persentase	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persentase	72,36	65,92	Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persentase	7,18	5,53	Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	12,04	12,71	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
13	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase	7,85	6,02	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Persentase pemukiman yang tertata	Persentase	12,04	12,71	Dinas Perumahan dan Permukiman
15	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persentase	21,16	21,21	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio	15,4	15,5	Satpol PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase	100	100	Satpol PP
3	Persentase Penegakan PERDA	Persentase	100	100	Satpol PP
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	Persentase	50	50	DPKP
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	NA	100	DPKP
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	≤15	≤15	DPKP
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	28.200	31.100	BPBD
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jiwa	3.869	4.062	BPBD
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	13.230	3.100	BPBD
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	Satpol PP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100	Satpol PP
6	SOSIAL				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase	75	100	Dinas Sosial
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase	100	100	Dinas Sosial
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Persentase	100	100	Dinas Sosial
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	Persentase	100	100	Dinas Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
10	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase	0	0,72	Dinas Sosial
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	Persentase	90,61	93,11	Dinas Tenaga Kerja
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	6.729	2.500	Dinas Tenaga Kerja
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	303.941	315.733	Dinas Tenaga Kerja
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	4.813.988	4.813.988	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	Persentase	100	100	Dinas Tenaga Kerja
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Tenaga kerja	176	200	Dinas Tenaga Kerja
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	50	50	Dinas Tenaga Kerja
8	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase	81,82	81,82	Dinas Tenaga Kerja
9	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase	18,62	19	Dinas Tenaga Kerja
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Pekerja/Tahun	76,5	76,5	Dinas Tenaga Kerja
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persentase	72,05	72,05	Dinas Tenaga Kerja
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	Persentase	82,9	82,9	Dinas Tenaga Kerja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota				
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase	2	2,3	DP3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persentase	22	22	DP3A
3	Rasio KDRT	Persentase	0,00015	0,00013	DP3A
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase	47,66	47,70	DP3A
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase	100	100	DP3A
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase	100	100	DP3A
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persentase	100	100	DP3A
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase	48,48	49,01	DP3A
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase	100	100	DP3A
10	Cakupan layanan pemulangan bagi	Persentase	100	100	DP3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	perempuan dan anak korban kekerasan				
11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase	100	100	DP3A
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	99,84	99,85	DP3A
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	95,94	95,95	DP3A
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	92,26	92,27	DP3A
15	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	Persentase	15,51	15,55	DP3A
16	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota	Persentase	0,0236	0,0235	DP3A
17	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	17,27	17,26	DP3A
3	PANGAN				
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/kap/tahun	161,00	162,40	DKPP
2	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr	2.318,00	2.400,00	DKPP
3	Ketersediaan protein perkapita	Gram/kap/hr	76,40	63	DKPP
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase	92,96	95,5	DKPP
4	PERTANAHAN				
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase	100	100	Sekretariat Daerah
5	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Tersusunnya RPPLH kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	Ada/tidak	Ada	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	46,67	71,30	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	95,92	55,63	Dinas Lingkungan Hidup
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase	57,14	56,32	Dinas Lingkungan Hidup
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Pelatihan	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persentase	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persentase	79,03	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persentase	7,81	8	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persentase	86,84	87,25	Dinas Lingkungan Hidup
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	58,4	57,84	Dinas Lingkungan Hidup
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	79,03	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Persentase	57,14	56,32	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	Pemerintah Kabupaten / Kota				
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1: 1	1: 1	Disdukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1: 0,98	1: 1	Disdukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1: 0,55	1: 0,65	Disdukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Disdukcapil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Disdukcapil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase	100,5	100	Disdukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase	98	99,20	Disdukcapil
8	Kepemilikan KTP	Persentase	100,86	100	Disdukcapil
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persentase	98	100	Disdukcapil
10	Cakupan pasangan non-muslim berakte kawin	Persentase	55	65	Disdukcapil
11	Penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun	Persentase	100	100	Disdukcapil
12	Pemanfaatan data kependudukan	Persentase	63,89	66,67	Disdukcapil
13	Perekaman KTP elektronik	Persentase	100	100	Disdukcapil
14	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase	70,10	82	Disdukcapil
15	Kepemilikan akta kelahiran	Persentase	98	99,2	Disdukcapil
18	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persentase	63,89	66,67	Disdukcapil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	75	75	DP3A
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase	N/A	1,98	DPPKB
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	1,87	1,97	DPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persentase	61,11	66,67	DPPKB
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase	44,44	47,22	DPPKB
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	13	14	DPPKB
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	1	2	DPPKB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase	1,37	1,39	DPPKB
8	Ratio Akseptor KB	Angka	64,70	64,73	DPPKB
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persentase	64,70	64,73	DPPKB
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persentase	9,30	9,35	DPPKB
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase	0,17	0,15	DPPKB
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	15,95	15,91	DPPKB
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase	19,79	19,84	DPPKB
14	Persentase tingkat keberlangsungan	Persentase	64,7	64,73	DPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	pemakaian kontrasepsi				
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase	100	100	DPPKB
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase	71,90	72	DPPKB
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase	75,93	75,95	DPPKB
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	1	1	DPPKB
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase	114,71	114,73	DPPKB
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase	100	100	DPPKB
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Persentase	79,83	79,85	DPPKB
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persentase	100	100	DPPKB
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase	100	100	DPPKB
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan	Persentase	100	100	DPPKB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	standarisasi pelayanan				
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persentase	26,47	32,35	DPPKB
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase	81,63	82	DPPKB
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase	49,89	50	DPPKB
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21.2	DPPKB
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persentase	64,37	64,43	DPPKB
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persentase	15,95	15,91	DPPKB
9	PERHUBUNGAN				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	30.841.459	34.496.720	Dinas Perhubungan
2	Rasio ijin trayek	Rasio (/Jml Pddk)	0,0114894	0,0024	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5.738	1.911	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit terminal bis	2	2	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,04	0,91	Dinas Perhubungan
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	100	100	Dinas Perhubungan
7	Pemasangan rambu-rambu	Persen	100	100	Dinas Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1,8	0,00178	Dinas Perhubungan
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Penumpang	19.770.026	12.490.810	Dinas Perhubungan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	Penumpang	848.773	800.000	Dinas Perhubungan
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	Rasio	0,78	0,79	Dinas Perhubungan
12	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	Rasio	0,63	0,63	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase	94	95	Diskominfo
2	Hasil Penilaian SPBE	Poin	3,72	3,75	Diskominfo
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	Persentase	37	43	Diskominfo
4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	Persentase	86,4	80	Diskominfo
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Menuju Informatif	Menuju Informatif (80-89,9)	Diskominfo
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	100	100	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	100	100	Diskominfo
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase	86,07	86,5	Diskominfo
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	21,4	23,4	DinKUKMdagin
2	Persentase Koperasi berkualitas	Persentase	10,14	11,21	DinKUKMdagin
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	Jumlah	370	380	DinKUKMdagin
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	194	200	DinKUKMdagin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
5	Jumlah PKL yang direlokasi	Jumlah	682	-	DinKUKMdagin
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	Jumlah	87	-	DinKUKMdagin
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Jumlah	-	50	DinKUKMdagin
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	-	90	DinKUKMdagin
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	86	106	DinKUKMdagin
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	-	4500	DinKUKMdagin
12	PENANAMAN MODAL				
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun rupiah	1.934	1.940	DPMPTSP
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	22,02	24,29	DPMPTSP
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	Persen	20,94	21,25	DPMPTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persentase	20	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Wirausaha muda	Persentase	11,07	12,8	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persentase	57,3	59	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Cakupan Pembinaan Olah Raga	Persentase	29,62	33,33	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Jumlah Atlet/Perolehan Medali Tingkat Provinsi	Jumlah	74		Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Peningkatan prestasi olahraga (Kejuaran Nasional dan Internasional)	Jumlah	9	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	3.031	3.312	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Persentase	21,17	25	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
9	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	9	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	STATISTIK				
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Diskominfo
2	Data basis pembangunan daerah	Ada/tidak	Ada	Ada	Diskominfo
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Diskominfo
4	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Diskominfo
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	Diskominfo
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	Diskominfo
15	PERSANDIAN				
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	Persentase	86	91	Diskominfo
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	81	82	Diskominfo
16	KEBUDAYAAN				
1	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persentase	76,5	78	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar budaya non bangunan	25	26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	Jumlah	41	43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persentase	1	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	PERPUSTAKAAN				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio	0,09	0,12	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rasio	0,490	0,493	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,44	0,66	Dinas Arsip dan Perpustakaan
4	Rata-rata pengunjung perpustakaan	Orang/Hari	331	421	Dinas Arsip dan Perpustakaan
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	39,615	40,865	Dinas Arsip dan Perpustakaan
6	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persentase	20	50	Dinas Arsip dan Perpustakaan
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	52	71.41	Dinas Arsip dan Perpustakaan
8	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	65,20	68,34	Dinas Arsip dan Perpustakaan
18	KEARSIPAN				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase	41,17	51,42	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Persentase realisasi kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase	100	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	Persentase	93	95	Dinas Arsip dan Perpustakaan
4	Tingkat kesediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban nasional	Persentase	66,81	68	Dinas Arsip dan Perpustakaan
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	3.364,51	1.710,56	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
2	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	30.076.148	32.378.540	DKPP
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	Ton	3.364,51	1.710,56	DKPP
2	PARIWISATA				
1	Kunjungan wisata	Orang	5,650,637	7.038.999	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	1-2 hari	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	328,283,584,610	322.263.722.867	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	PERTANIAN				
1	Produktivitas padi per hektar	Ton/ha	7,28	7,44	DKPP
2	Cakupan bina kelompok petani	Persentase	93,08	93,41	DKPP
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase	79,75	47,62	DKPP
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	10,81	14,09	DKPP
4	PERDAGANGAN				
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	Persentase	8,7	11,2	DinKUKMdagin
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/swalayan)	Persentase	76.2	77	DinKUKMdagin
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase	55,43	57,44	DinKUKMdagin
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda terasah yang berlaku	Persentase	38,67	39,44	DinKUKMdagin
5	PERINDUSTRIAN				
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase	86,66	100	DinKUKMdagin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persentase	45,6	52,38	DinKUKMdagin
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase	10	30	DinKUKMdagin
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	2,8	7,2	DinKUKMdagin
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	2,8	7,2	DinKUKMdagin
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	0	0	DinKUKMdagin
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	Persentase	0	0	DinKUKMdagin
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	70	50	DinKUKMdagin
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	SEKRETARIT DPRD				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
E UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
1 PERENCANAAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Bapperida
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Bapperida
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Bapperida
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Bapperida
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	99,27	100	Bapperida
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase	100	100	Bapperida
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persentase	58,85	100	Bapperida

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	-	1	Bapperida
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	-	1	Bapperida
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	2	2	Bapperida
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	-	-	Bapperida
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	99,27	100	Bapperida
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	Persentase	100	100	Bapperida
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persentase	58,85	100	Bapperida
2	KEUANGAN				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	BKAD
2	Persentase SILPA	Persentase	1,77	1,75	BKAD
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase	1,77	1,75	BKAD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persentase	0	0	BKAD
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persentase	21,67	≥20	BKAD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persentase	22,89	≥10	BKAD
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	BKAD
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persentase	80,61	81	BKAD
9	Opini Laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	BKAD
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase	4,32	4,3	BKAD
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	Persentase	5,4	1,75	BKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
	dalam APBD setahun sebelumnya				
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase	0,99	0	BKAD
13	Manajemen Aset				
14	Adanya Daftar Aset Tetap	Predikat	Ya	Ya	BKAD
15	Penyusunan Manual daftar aset tetap	Predikat	Ya	Ya	BKAD
16	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	Predikat	Ya	Ya	BKAD
17	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Predikat	Ya	Ya	BKAD
3	KEPEGAWAIAN				
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35	35	BKPSDM
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	BKPSDM
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4723	4723	BKPSDM
4	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persentase	58,83	58,83	BKPSDM
5	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persentase	21,16	25,96	BKPSDM
6	Rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persentase	57,76	58	BKPSDM
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Waktu/JP	22	22	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	85,47	86,5	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persentase	35,31	40	BKPSDM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target 2025	Perangkat Daerah
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase	100	100	Bapperida
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100	Bapperida
3	Penerapan SIDA:				
a	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	100	100	Bapperida
b	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase	63	64	Bapperida
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	INSPEKTORAT				
1	Maturitas SPIP	Predikat	Level 3	Level 3	Inspektorat
2	Peningkatan kapabilitas APIP	Predikat	Level 3	Level 3	Inspektorat
3	Persentase pelanggaran pegawai	Persentase	0,006	0,004	Inspektorat
4	Persentase tindak lanjut temuan internal	Persentase	94,1	94,2	Inspektorat
5	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	Persentase	90,2	91	Inspektorat
6	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	Persentase	4,14	0,141	Inspektorat

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025. Penetapan prioritas rencana pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2025, sinergi dengan tahapan pencapaian target Tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan jangka pendek Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026. Penetapan prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2025 mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD 2025 ini dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD sebagai dasar dalam menyusun RAPBD Tahun 2025, RKPD 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor.

4. Dalam Rangka Sinkronisasi, Sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 pada masing-masing perangkat daerah.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum Perangkat daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025. Oleh karena itu, implementasi terhadap usulan masyarakat tersebut harus terus dikawal secara lebih seksama, sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam pembangunan Kota Bogor Tahun 2025.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap perangkat daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota, melalui Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bogor.
7. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 setiap triwulan, sesuai dengan yang amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Demikian RKPD Kota Bogor Tahun 2025 telah disusun merupakan tahun terakhir sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih terkordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

PJ. WALI KOTA BOGOR,

DR. HERY ANTASARI, S.T., M.Dev.Plg.

**KOTA BOGOR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						574.432.917.383,00							630.053.244.508,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						574.432.917.383,00							630.053.244.508,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						574.432.917.383,00							630.053.244.508,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan) Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	25,9 Nilai 26,08 Nilai 17,9 Nilai 100 Persent ase 95 Persenta se 10,98 Nilai 89,39 nilai 87,87 Nilai 89,39 Nilai 94 Persenta se 89,25 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase			100 Persentase 10,88 Nilai 17,8 Nilai 25,8 Nilai 25,98 Nilai 81,11 Nilai 88,38 nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	436.005.344.645,00						25,9 Nilai 26,08 Nilai 17,9 Nilai 100 Persent ase 95 Persenta se 10,98 Nilai 89,39 nilai 87,87 Nilai 89,39 Nilai 94 Persenta se 89,25 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase	436.500.319.746,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	85.404.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan	100 persen 100 persen	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	85.404.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	94 persen			93 persen	424.971.827.172,00			Memperku a Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DINAS PENDIDIKAN	94 persen	425.092.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4327 Orang/bulan			4166 Orang/bulan	424.895.253.972,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DINAS PENDIDIKAN	4327 Orang/bulan	425.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	76.573.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DINAS PENDIDIKAN	1 Laporan	92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	5.268.324.488,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	100 persen	4.887.485.107,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	135.660.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	2 Paket	149.226.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	192.112.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Paket	211.323.970,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	271.590.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan	1 Paket	298.749.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	476.990.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinas Pendidikan	2 Paket	524.689.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	125.778.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinas Pendidikan	4 Paket	138.356.680,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2.520.126.388,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Laporan	2.772.139.027,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen			3 Dokumen	1.546.065.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	793.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 persen			100 persen	1.893.049.200,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Dinas Pendidikan	100 persen	2.082.354.120,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			4 Unit	1.086.409.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Unit	1.195.049.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			8 Unit	415.697.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	6 Unit	457.267.580,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit			6 Unit	390.942.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	44 Unit	430.036.640,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 persen			100 persen	2.581.497.814,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	100 persen	2.998.047.617,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	531.953.502,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	4 Laporan	743.548.874,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	2.049.544.312,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	4 Laporan	2.254.498.743,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 persen			100 persen	1.205.241.971,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	100 persen	1.350.432.902,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			13 Unit	200.423.779,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	5 Unit	245.132.891,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit			8 Unit	314.048.192,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	240 Unit	345.453.011,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	690.770.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	3 Unit	759.847.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Siswa Miskin yang mendapat beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan lainnya (SD, SMP, dan PKBM) Indeks SPM (Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Minimal yang telah diberikan daerah kepada warga negara daerahnya) Pendidikan	77,19 Indeks 2,80 persen			2,85 persen 67,2 Indeks	138.427.572.738,00						77,19 Indeks 2,80 persen	193.552.924.762,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa) Iklim Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan) Iklim Keamanan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik) Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan)	57.7 Skor 70.7 Skor 98,95 persen 72.7 Skor 82,55 skor 73,24 SKOR			98,85 persen 57 Skor 70 Skor 72 Skor 81,55 skor 72,54 SKOR	52.265.516.172,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	57.7 Skor 70.7 Skor 98,95 persen 72.7 Skor 82,55 skor 73,24 SKOR	150.168.131.918,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang			2 Ruang	1.066.059.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	2 Ruang	726.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			3 Ruang	1.028.881.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	3 Ruang	1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit			6 Unit	1.321.486.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	17 Unit	6.085.270.895,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket			6 Paket	1.500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	1 Paket	5.531.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	34 Unit			34 Unit	1.686.527.269,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	34 Unit	3.461.684.765,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	438 Peserta Didik			438 Peserta Didik	420.041.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	438 Peserta Didik	272.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	85 Orang			94 Orang	2.754.913.024,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	85 Orang	3.154.534.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	280 Orang			150 Orang	1.082.707.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	280 Orang	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	285 Satuan Pendidikan			281 Satuan Pendidikan	167.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	285 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	534 Orang			530 Orang	17.211.228.056,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	534 Orang	900.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	280.526.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	308.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 Ruang			21 Ruang	1.843.354.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	21 Ruang	13.552.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	285 Satuan Pendidikan			281 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	285 Satuan Pendidikan	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	98 Ruang			89 Ruang	17.906.791.523,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	98 Ruang	34.134.277.018,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15267 Peserta Didik			13879 Peserta Didik	3.545.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	15267 Peserta Didik	78.831.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa) Iklim Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan) Iklim Keamanan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik) Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)) Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan)	74.41 Skor 89.98 Perse n 72.9 Skor 93 Skor 68.26 Skor 85.93 Skor			89.78 Persen 58.26 Skor 75.93 Skor 64.41 Skor 83 Skor 62.9 Skor	71.739.373.874,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Dinas Pendidikan	74.41 Skor 89.98 Perse n 72.9 Skor 93 Skor 68.26 Skor 85.93 Skor	26.525.056.844,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit			2 Unit	36.744.241.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit			4 Unit	1.022.842.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	4 Unit	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang			27 Ruang	5.770.113.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	30 Ruang	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket			3 Paket	3.247.292.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Desa Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Paket	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25650 Peserta Didik			25650 Peserta Didik	6.765.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	25650 Peserta Didik	7.103.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6625 Peserta Didik			2880 Peserta Didik	700.874.790,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	3130 Peserta Didik	2.023.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58 Orang			56 Orang	2.000.334.344,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	58 Orang	2.000.334.344,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	792 Orang			400 Orang	332.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	792 Orang	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	127 Satuan Pendidikan			126 Satuan Pendidikan	275.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	384 Orang			378 Orang	14.405.952.340,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	384 Orang	825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	184.774.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	127 Satuan Pendidikan			126 Satuan Pendidikan	290.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinas Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS 5-6 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Proporsi Jumlah Stuan PAUD Terakreditasi B	63.94 Skor 62.3 Skor 75.47 Skor			62 Skor 63.64 Skor 75.17 Skor	9.205.239.692,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	63.94 Skor 62.3 Skor 75.47 Skor	10.389.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit			2 Unit	275.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	2 Unit	275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16000 Peserta Didik			9500 Peserta Didik	205.347.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	16000 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1710 Orang			1500 Orang	5.338.526.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	1710 Orang	5.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	735 Orang			675 Orang	1.014.916.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	735 Orang	1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	600 Satuan Pendidikan			373 Satuan Pendidikan	137.566.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	600 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	750 Orang			320 Orang	919.628.192,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	750 Orang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	858.660.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	414.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	35 Komunitas			25 Komunitas	99.368.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	35 Komunitas	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang			400 Orang	260.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	450 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</i>	600 Satuan Pendidikan			300 Satuan Pendidikan	96.127.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	600 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Angka Partisipasi Sekolah Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa jenjang paket A)</i> <i>Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa jenjang paket B)</i> <i>Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa jenjang paket C)</i> <i>Iklim Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan jenjang paket A)</i> <i>Iklim Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan jenjang paket B)</i> <i>Iklim Kebhinekaan (Kondisi</i>	53.13 Skor 59.64 Skor 28.5 Persen 50.04 Skor 54.46 Skor 54.88 Skor 65.02 Skor 60.05 Skor 61.6 Skor 64.58 Skor 28.34 Skor 41.01 Skor 30.55 Skor 62.22 Skor 65.33 Skor 65.16 Skor			28.3 Persen 49.84 Skor 54.26 Skor 54.68 Skor 64.82 Skor 59.85 Skor 61.4 Skor 64.96 Skor 64.38 Skor 65.13 Skor 30.35 Skor 62.02 Skor 59.44 Skor 52.92 Skor 40.81 Skor 28.14 Skor	5.217.443.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	53.13 Skor 59.64 Skor 28.5 Persen 50.04 Skor 54.46 Skor 54.88 Skor 65.02 Skor 60.05 Skor 61.6 Skor 64.58 Skor 28.34 Skor 41.01 Skor 30.55 Skor 62.22 Skor 65.33 Skor 65.16 Skor	6.470.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Jenjang paket B) Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Jenjang paket C)													
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12500 Peserta Didik			1364 Peserta Didik	2.238.219.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	12500 Peserta Didik	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	315 Orang			255 Orang	1.444.636.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	315 Orang	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	410 Orang			320 Orang	214.282.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	410 Orang	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	49 Satuan Pendidikan			46 Satuan Pendidikan	666.856.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	45 Orang			90 Orang	92.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	45 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	215.050.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	70.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	30 Komunitas			25 Komunitas	99.368.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	30 Komunitas	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	350 Orang			300 Orang	158.194.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	350 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7640 Peserta Didik			7000 Peserta Didik	88.837.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan	7640 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						256.817.679.563,00							254.031.982.568,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						256.817.679.563,00							254.031.982.568,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						256.817.679.563,00							254.031.982.568,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kepatuhan anggaran Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA</i>	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persen 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 95,00 Persen	140.519.731.081,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	139.637.429.831,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu</i>	100 Persen 100 Persen			66.67 Persen 100 Persen	311.560.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	100 Persen 100 Persen	356.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen			6 Dokumen	190.120.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	6 Dokumen	226.650.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			6 Laporan	121.440.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	6 Laporan	130.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95,00 Persen 100 Persen			100 Persen 94,00 Persen	129.172.977.232,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	95,00 Persen 100 Persen	127.682.354.906,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1431 Orang/bulan			1338 Orang/bulan	127.702.317.232,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	1431 Orang/bulan	126.046.804.906,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen			16 Dokumen	1.355.660.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	16 Dokumen	1.571.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	115.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	3 Laporan	64.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	4.571.819.475,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	100 Persen	4.501.086.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	345.780.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Paket	382.834.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	356.604.075,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Paket	394.844.260,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	317.780.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Paket	349.572.116,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.584.999.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Paket	2.273.835.328,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			2 Laporan	966.655.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	1 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMĐ	100 Persen			100 Persen	1.895.527.800,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	100 Persen	2.238.614.461,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit			4 Unit	318.398.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	5 Unit	351.562.728,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit			6 Unit	1.376.656.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	7 Unit	1.515.013.533,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	158 Unit			72 Unit	200.472.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	158 Unit	372.038.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 Persen			100 Persen	2.119.399.506,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	100 Persen	2.344.822.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	736.550.234,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	3 Laporan	844.822.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan			7 Laporan	1.382.849.272,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	7 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 Persen			100 Persen	2.448.447.068,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	100 Persen	2.513.651.835,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit			17 Unit	650.895.361,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	17 Unit	400.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	532 Unit			480 Unit	797.611.047,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	532 Unit	1.013.451.835,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			4 Unit	999.940.660,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	4 Unit	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden Rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Prevalensi Diabetes Melitus Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Prevalensi Hipertensi Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar Capaian SPM RSUD Kota Bogor Predikat STBM	54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna Predikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen			0,14 Persen 0,18 Angka 0,673 Rasio 100 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka 2,9 Angka 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen 93,1 Persen Paripurna Predikat	96.314.410.423,00						54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna Predikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen	94.870.845.637,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	12 Unit			1 Unit	27.890.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	12 Unit	1.828.137.222,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>	150 Unit			100 Unit	277.720.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	150 Unit	367.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	10 Paket			10 Paket	24.052.101.416,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	10 Paket	10.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i>	8695 Keluarga			8695 Keluarga	26.324.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Labkesda, PSC Gesit 119, Dinas Kesehatan dan Masyarakat	8695 Keluarga	541.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan</i>	80,00 Perse n 9,5 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen 68 Kelurahan	61.146.989.499,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Mayarakat	80,00 Perse n 9,5 Persen 100 Persen	79.116.928.815,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Rujukan Balik Persentase puskesmas dengan kinerja baik Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar													
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19400 Orang			19400 Orang	82.550.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Mayarakat	19400 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18518 Orang			18518 Orang	33.180.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Mayarakat	18518 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17893 Orang			17893 Orang	287.837.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Mayarakat	17893 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85207 Orang			85207 Orang	141.130.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	85207 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149682 Orang			149682 Orang	98.465.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	149682 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	737301 Orang			737301 Orang	190.031.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	737301 Orang	209.034.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72485 Orang			72485 Orang	94.464.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	72485 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71484 Orang			71484 Orang	81.122.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	71484 Orang	89.224.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17445 Orang			17.445 Orang	16.931.420,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	17445 Orang	18.624.562,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1578 Orang			1578 Orang	28.908.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1578 Orang	31.798.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38688 Orang			38688 Orang	98.995.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	38688 Orang	60.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267 Orang			24267 Orang	55.584.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	24267 Orang	23.475.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen			1 Dokumen	22.006.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	201.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	5.815.968.379,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	5.720.165.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen			2 Dokumen	150.137.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	2 Dokumen	165.151.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen			3 Dokumen	249.540.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	3 Dokumen	274.494.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen			1 Dokumen	57.448.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	2 Dokumen	73.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	31.320.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	53.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60000 Orang			60000 Orang	12.771.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	60000 Orang	14.048.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang			35 Orang	9.849.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	40 Orang	10.883.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen			2 Dokumen	52.061.671.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	2 Dokumen	69.793.675.733,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen			2 Dokumen	319.796.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	815.258.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12 Unit			6 Unit	2.082.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	12 Unit	2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	101 Unit			93 Unit	137.463.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	101 Unit	386.381.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen			1 Dokumen	232.987.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	65.905.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit			1 Unit	751.808.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	1 Unit	354.508.130,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8119 Orang			7960 Orang	39.312.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	8119 Orang	44.065.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2282 Orang			2237 Orang	24.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	2282 Orang	14.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1939 Orang			1939 Orang	8.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	1939 Orang	5.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	5.126.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Mayarakat	1 Dokumen	80.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang terpelihara	10 Buah			10 Buah	1.985.490.608,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	10 Buah	1.684.867.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen			3 Dokumen	1.985.490.608,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Mayarakat	3 Dokumen	1.684.867.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan fasyankes yang diterbitkan Persentase Laporan SPM RS	75 Unit 80,00 Persen			72 Unit 75,00 Persen	108.655.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	75 Unit 80,00 Persen	11.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit			25 Unit	103.669.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	25 Unit	7.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen			2 Dokumen	4.986.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	2 Dokumen	4.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	96 Persen			96 Persen	2.262.625.280,00						96 Persen	1.255.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP	91 Persen			90 Persen	3.412.800,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Tenaga Kesehatan	91 Persen	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	160 Dokumen			150 Dokumen	3.412.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Tenaga Kesehatan	160 Dokumen	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan	96,5 Persen			96,0 Persen	1.980.712.480,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Tenaga Kesehatan	96,5 Persen	360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	40 Dokumen			35 Dokumen	125.227.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Tenaga Kesehatan	40 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	12900 Orang			12900 Orang	1.760.618.080,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Tenaga Kesehatan	12900 Orang	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	600 Dokumen			600 Dokumen	94.867.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Tenaga Kesehatan	600 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi</i>	100 Persen			100 Persen	278.500.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Tenaga Kesehatan	100 Persen	675.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	295 Orang			290 Orang	278.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Tenaga Kesehatan	295 Orang	675.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	45 Persen 75 Persen 70 Persen 65 Persen			40 Persen 60 Persen 65 Persen 70 Persen	241.522.200,00						45 Persen 75 Persen 70 Persen 65 Persen	672.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat	62 Sarana			60 Sarana	9.500.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	62 Sarana	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Dokumen			60 Dokumen	9.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu	6 Sarana			5 Sarana	6.500.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	6 Sarana	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12 Dokumen			10 Dokumen	6.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat	235 Sarana			225 Sarana	59.022.200,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	235 Sarana	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235 Dokumen			225 Dokumen	59.022.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	235 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM	90 Sarana			84 Sarana	108.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	90 Sarana	91.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen			1 Dokumen	108.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	1 Dokumen	91.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi	550 Sarana			500 Sarana	48.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Sentra Makanan Jajanan	550 Sarana	89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen			1 Dokumen	48.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	89.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan olahan industri rumah tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat	95,0 Persen			94,5 Persen	10.500.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	95,0 Persen	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit			33 Unit	10.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	40 Unit	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri Persentase Rumah Tangga ber PHBS	72,40 Perse n 12 Persen			11,5 Persen 72,20 Persen	17.479.390.579,00						72,40 Perse n 12 Persen	17.596.707.100,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	32 Persen			30 Persen	86.269.467,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Instansi Pemerintah	32 Persen	51.218.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	86.269.467,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Instansi Pemerintah	1 Dokumen	51.218.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.891.638.409,00							2.968.034.199,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.891.638.409,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.968.034.199,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	2.891.638.409,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.968.034.199,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.891.638.409,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.968.034.199,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS CIPAKU						3.370.629.892,00							3.539.161.386,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.370.629.892,00							3.539.161.386,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.370.629.892,00							3.539.161.386,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 88,38 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	3.370.629.892,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.539.161.386,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.370.629.892,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.539.161.386,00	PUSKESMAS CIPAKU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.370.629.892,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.539.161.386,00	PUSKESMAS CIPAKU
		PUSKESMAS BONDONGAN						2.534.913.800,00							2.727.913.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.534.913.800,00							2.727.913.800,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.534.913.800,00							2.727.913.800,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.534.913.800,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.727.913.800,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM</i> <i>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</i> <i>Transparansi pengelolaan keuangan daerah</i> <i>Persentase realisasi anggaran terhadap DPA</i>	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.139.706.586,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.156.408.190,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah</i>	100 Persen			100 Persen	35.133.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	35.133.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	50.850.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			7 Unit	50.850.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	2.053.722.086,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.156.408.190,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.053.722.086,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.156.408.190,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Prevalensi ODGJ Insiden Rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Prevalensi Diabetes Melitus Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Prevalensi Hipertensi Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar Predikat STBM</i>	54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna P redikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen			0,14 Persen 0,18 Angka 0,673 Rasio 100 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka 2,9 Angka 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 93,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen Paripurna Predikat	64.015.500,00						54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna P redikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP) Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah</i>	24 Unit 25 Puskesm as 25 Puskesm as 73,20 Perse n			23 Unit 25 Puskesmas 25 Puskesmas 73,19 Persen	64.015.500,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	24 Unit 25 Puskesm as 25 Puskesm as 73,20 Perse n	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>	2 Unit			1 Unit	23.641.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	2 Unit	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	10 Paket			3 Paket	40.374.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	10 Paket	0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG
		PUSKESMAS BOGOR TIMUR						4.268.633.607,00							4.351.135.189,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.268.633.607,00							4.351.135.189,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.268.633.607,00							4.351.135.189,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA</i>	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 95,00 Persen	4.268.633.607,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	4.351.135.189,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.548.747.822,00							2.512.373.300,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.526.656.485,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.512.373.300,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	19.785.500,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			5 Unit	19.785.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 Persen			100 Persen	82.591.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	82.591.584,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Laporan	0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</i>	100 Persen			100 Persen	25.531.579,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	532 Unit			37 Unit	25.531.579,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	532 Unit	0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	2.398.747.822,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.512.373.300,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.398.747.822,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.512.373.300,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden Rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Prevalensi Diabetes Melitus Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Prevalensi Hipertensi Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar Predikat STBM	54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka Paripurna P redikat 100 Persen 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 93,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen Paripurna Predikat			0,14 Persen 0,18 Angka 0,673 Rasio 100 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka 2,9 Angka 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 93,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen Paripurna Predikat	22.091.337,00						54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka Paripurna P redikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen	0,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM</i> <i>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</i> <i>Transparansi pengelolaan keuangan daerah</i> <i>Persentase realisasi anggaran terhadap DPA</i>	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.100.092.570,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.095.624.408,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</i>	100 Persen			100 Persen	104.259.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit			15 Unit	104.259.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Kota Bogor, Bogor Tengah, Sempur Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegallega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS SEMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	1.995.832.770,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.095.624.408,00	PUSKESMAS SEMPUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.995.832.770,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.095.624.408,00	PUSKESMAS SEMPUR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden Rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Diabetes Melitus Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Prevalensi Hipertensi Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi melalui pendekatan keluarga Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar Predikat STBM	54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna Predikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen			0,14 Persen 0,18 Angka 0,673 Rasio 100 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka 2,9 Angka 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 93,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen Paripurna Predikat	45.740.200,00						54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna Predikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Darea Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persen 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 95,00 Persen	992.345.716,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	923.919.250,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	7.117.728,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS GANG AUT
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	7.117.728,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS GANG AUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	86.634.272,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS GANG AUT
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			15 Unit	86.634.272,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS GANG AUT
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	898.593.716,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	923.919.250,00	PUSKESMAS GANG AUT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	898.593.716,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Gudang Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	923.919.250,00	PUSKESMAS GANG AUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.098.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			3 Paket	28.710.804,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	5.204.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	1.459.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS BELONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	33.397.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	16.569.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	5 Unit	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			3 Unit	16.827.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	18.174.396,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	18.174.396,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Laporan	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 Persen			100 Persen	8.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	532 Unit			13 Unit	8.730.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	532 Unit	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	630.197.707,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	637.813.501,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	630.197.707,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	637.813.501,00	PUSKESMAS BELONG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden Rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Prevalensi Diabetes Melitus Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Prevalensi Hipertensi Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi melalui pendekatan keluarga Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar Predikat STBM	54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna Predikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen			0,14 Persen 0,18 Angka 0,673 Rasio 100 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka 2,9 Angka 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 93,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen Paripurna Predikat	52.225.000,00						54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna Predikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	24 Unit 25 Puskesmas 25 Puskesmas as 73,20 Persenn			23 Unit 25 Puskesmas 25 Puskesmas 73,19 Persen	52.225.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdayasaing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	24 Unit 25 Puskesmas 25 Puskesmas as 73,20 Persenn	0,00	PUSKESMAS BELONG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.218.149.509,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.091.705.749,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	15.729.180,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.729.180,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS MERDEKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	56.212.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			6 Unit	56.212.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	78.058.020,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS MERDEKA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	78.058.020,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Laporan	0,00	PUSKESMAS MERDEKA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	3.601.298.720,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.715.156.300,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.601.298.720,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.715.156.300,00	PUSKESMAS SEMPLAK	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.601.298.720,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.715.156.300,00	PUSKESMAS SEMPLAK	
		PUSKESMAS PANCASAN							2.552.646.371,00							2.552.646.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.552.646.371,00							2.552.646.371,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.552.646.371,00							2.552.646.371,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.552.646.371,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.552.646.371,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	2.552.646.371,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.552.646.371,00	PUSKESMAS PANCASAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.552.646.371,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.552.646.371,00	PUSKESMAS PANCASAN
		PUSKESMAS PASIR MULYA							3.610.686.725,00						3.759.709.061,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.610.686.725,00							3.759.709.061,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.610.686.725,00							3.759.709.061,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	3.610.686.725,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.759.709.061,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.610.686.725,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.759.709.061,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.610.686.725,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.759.709.061,00	PUSKESMAS PASIR MULYA
		PUSKESMAS GANG KELOR						2.034.197.969,00							2.156.249.848,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.034.197.969,00							2.156.249.848,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.034.197.969,00							2.156.249.848,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.034.197.969,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.156.249.848,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	2.034.197.969,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.156.249.848,00	PUSKESMAS GANG KELOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.034.197.969,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.156.249.848,00	PUSKESMAS GANG KELOR
		PUSKESMAS SINDANG BARANG						3.084.759.600,00							3.177.302.300,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.084.759.600,00							3.177.302.300,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.084.759.600,00							3.177.302.300,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA</i>	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 95,00 Persen	3.084.759.600,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.177.302.300,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase UPTD yang menerapkan BLUD</i>	100 Persen			100 Persen	3.084.759.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.177.302.300,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.084.759.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.177.302.300,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG
		PUSKESMAS BOGOR UTARA						3.883.666.122,00							3.891.433.454,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.883.666.122,00							3.891.433.454,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.883.666.122,00							3.891.433.454,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	3.883.666.122,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.891.433.454,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persen 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 95,00 Persen	2.334.431.545,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.228.575.846,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	49.992.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	19.996.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	29.996.300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	49.561.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			6 Unit	49.561.300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	49.999.195,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.560.797.140,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.560.797.140,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	2.560.797.140,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	100 Persen	2.560.797.140,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.560.797.140,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	2.560.797.140,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
		PUSKESMAS TANAH SAREAL							3.249.679.899,00						3.249.679.899,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.249.679.899,00							3.249.679.899,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.249.679.899,00							3.249.679.899,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	3.249.679.899,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.249.679.899,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.249.679.899,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.249.679.899,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.249.679.899,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.249.679.899,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PONDOK RUMPUT						1.240.293.750,00							1.109.878.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.240.293.750,00							1.109.878.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.240.293.750,00							1.109.878.200,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persen 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	1.213.427.750,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	1.109.878.200,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	45.696.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			7 Paket	45.696.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	1 Paket	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	30.214.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			4 Unit	30.214.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	15.567.112,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	15.567.112,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Laporan	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	100 Persen			100 Persen	31.655.188,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	532 Unit			32 Unit	31.655.188,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	532 Unit	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	1.090.293.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	1.109.878.200,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket			3 Paket	26.866.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	10 Paket	0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
		PUSKESMAS KEDUNG BADAK						2.166.514.090,00							2.212.087.579,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.166.514.090,00							2.212.087.579,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.166.514.090,00							2.212.087.579,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.166.514.090,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.212.087.579,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persen 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 95,00 Persen	3.054.247.356,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.359.672.091,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.054.247.356,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.359.672.091,00	PUSKESMAS KAYU MANIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.054.247.356,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.359.672.091,00	PUSKESMAS KAYU MANIS
		PUSKESMAS MEKARWANGI							3.201.452.462,00						3.373.445.718,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.201.452.462,00							3.373.445.718,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.201.452.462,00							3.373.445.718,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persen 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	3.201.452.462,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	3.373.445.718,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	3.201.452.462,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	100 Persen	3.373.445.718,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.201.452.462,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	3.373.445.718,00	PUSKESMAS MEKARWANGI
		PUSKESMAS MULYAHARJA						2.093.032.811,00							2.038.161.541,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.093.032.811,00							2.038.161.541,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.093.032.811,00							2.038.161.541,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	2.093.032.811,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Persen 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	2.038.161.541,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	77.223.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit			5 Unit	77.223.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	7 Unit	0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	55.077.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	100 Persen	0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	55.077.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Pegawai di Lingkup Puskesmas	3 Laporan	0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.583.262.434,00							1.741.588.677,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai			100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95,00 Persen	1.583.262.434,00						87,87 Nilai 100 Persen 100 Persen 26,82 Nilai 95,00 Perse n 89,39 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 100 Persen 94 Persen 89,25 Nilai 13,00 Nilai 89,39 Nilai 21,98 Nilai	1.741.588.677,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100 Persen			100 Persen	1.583.262.434,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	100 Persen	1.741.588.677,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.583.262.434,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	27 Unit Kerja	1.741.588.677,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						290.000.000.000,00							300.000.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pemenuhan media promosi kesehatan Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISROUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik Persentase puskesmas dengan kinerja baik Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen 100 Persen			100 Persen							100 Persen 100 Persen		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen			2 Dokumen	290.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	2 Dokumen	300.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119						50.000.000,00							60.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						50.000.000,00							60.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						50.000.000,00							60.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden Rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Prevalensi Diabetes Melitus Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Prevalensi Hipertensi Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar Predikat STBM	54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna P redikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen			0,14 Persen 0,18 Angka 0,673 Rasio 100 Persen 2,05 Persen 2,7 Angka 2,9 Angka 54,5 Rasio 55 Persen 8,4 Persen 87,1 Persen 93,1 Persen 94 Persen 90 Persen 92 Persen Paripurna Predikat	50.000.000,00						54 Rasio 0,14 Persen 8,4 Persen 2,05 Persen Paripurna P redikat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen 2,8 Angka 0,673 Rasio 2,6 Angka 90 Persen 96 Persen 60 Persen 87,2 Persen 0,18 Angka 93,1 Persen	60.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	80,00 Perse n 9,5 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen 68 Kelurahan 93 Unit 1.122.772 Orang 100 Persen 4,13 Persen 2,30 Persen	50.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan,	Masyarakat	80,00 Perse n 9,5 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	60.000.000,00	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight) Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting) Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pemenuhan media promosi kesehatan Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISROUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik Persentase puskesmas dengan kinerja baik Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100 Persen 68 Kelurahan 60 Persen 101 Unit 1.122.772 Orang 100 Persen 												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar													
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						137.199.542.555,00							134.257.967.535,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						137.199.542.555,00							134.257.967.535,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						137.199.542.555,00							134.257.967.535,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Transparansi pengelolaan keuangan daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100 Persent ase 87,87 Nilai 89,39 Nilai 100 Persent ase 89,39 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 29,95 nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 89,25 Nilai			100 % 87,11% 88,38 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 21,97 Nilai 88,75 Nilai 94% 100% 100% 26,55 Nilai 87,11 Nilai	34.095.845.144,00						100 Persent ase 87,87 Nilai 89,39 Nilai 100 Persent ase 89,39 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 29,95 nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 89,25 Nilai	38.360.081.183,002	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi</i>	100 %			100 %	19.697.537.890,00			Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	100 %	21.667.291.679,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	115 Orang/bulan			113 Orang/bulan	19.697.537.890,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	115 Orang/bulan	21.667.291.679,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %			100 %	39.491.000,00			Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	100 %	95.951.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	3 Paket			1 Paket	39.491.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	95.951.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah</i>	100 %			100 %	2.230.759.700,00			Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	100 %	4.059.121.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	49.876.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	109.906.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			12 Paket	921.294.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	1.382.899.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			9 Paket	316.285.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	917.448.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	27.978.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	59.668.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			2 Paket	112.217.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	129.869.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	36 Laporan			4 Laporan	803.107.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	12 Laporan	1.459.330.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</i>	100 persen			100 persen	2.413.844.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	100 persen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>	2 Unit			2 Unit	2.413.844.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	2 Unit	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %			94 %	4.771.572.052,00			Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	100 %	5.179.080.032,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan			48 Laporan	811.296.732,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	12 Laporan	866.321.488,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36 Laporan			24 Laporan	3.960.275.320,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	12 Laporan	4.312.758.544,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</i>	94 %			94 %	4.942.640.002,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	94 %	4.858.637.172,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit			90 Unit	348.959.767,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	60 Unit	402.732.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit			85 Unit	4.090.405.172,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	85 Unit	4.090.405.172,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	221.531.553,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	2 Unit	130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			6 Unit	281.743.510,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	5 Unit	235.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%) Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	66,49 Perse ntase 93,64 Perse ntase 4,76 Persen tase			3,57 % 62,21 % 87,97 %	23.577.587.452,00						66,49 Perse ntase 93,64 Perse ntase 4,76 Persen tase	27.319.286.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Panjang Sungai yang ber kondisi baik	1 Lokasi 100 Dokumen 1 Lokasi 110500 Km			100 Dokumen 1 Lokasi 103,8 Km	12.870.787.452,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Lokasi 100 Dokumen 110500 Km	15.541.806.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5,68 KM			4,18 KM	1.428.582.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	5,68 KM	1.714.406.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	9.889 KM			6,5 KM	7.945.363.652,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	9.889 KM	8.739.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	44 KM			33 KM	10.706.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	44 KM	11.777.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) yang layak</i>	100 Persentase			6,10 % 74,99 Persentase	11.921.631.815,00						100 Persentase	3.800.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak</i>	79,12 % 6,60 %			6,10 % 74,99 %	11.921.631.815,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	79,12 % 6,60 %	3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>	65.188 M³/Hari			25 M³/Hari	721.694.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	1.000 M³/Hari	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	25 Unit			8 Unit	1.769.440.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	10 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	3400 Rumah Tangga			1100 Rumah Tangga	1.600.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	1500 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1251 Unit			1 Unit	1.300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	650 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	4.108 Rumah Tangga			479 Rumah Tangga	6.530.497.615,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	1.537 Rumah Tangga	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Presentase penurunan lokasi genangan Presentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal</i>	80 Persentase 0.75 Persentase			0.8 Persentase 75 Persentase	10.211.214.800,00						80 Persentase 0.75 Persentase	13.217.895.310,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah panjang drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal</i>	80 Km			75 Km	10.211.214.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	80 Km	13.217.895.310,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>	10 km Sistem Drainase Perkotaan			22 Sistem Drainase Perkotaan	4.835.153.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	31 paket/6 km Sistem Drainase Perkotaan	5.318.668.740,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8 km Sistem Drainase Perkotaan			13 Sistem Drainase Perkotaan	3.817.478.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	11 psket / 4 km Sistem Drainase Perkotaan	4.199.226.570,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	8 Dokumen			8 Dokumen	521.621.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	8 Dokumen	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	440 Sistem Drainase Perkotaan			7 Sistem Drainase Perkotaan	1.036.961.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	2.000 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30 %			30 %	2.247.555.300,00						30 %	2.474.984.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin</i>	93 %			90 %	2.247.555.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	93 %	2.474.984.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	9 Dokumen			1 Dokumen	1.491.555.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	9 Dokumen	1.974.984.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	36 Dokumen			10 Dokumen	756.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	36 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang</i>	89 Persentase			89 Persentase	54.190.215.544,00						89 Persentase	48.218.220.642,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase panjang jalan yang ditingkatkan Persentase panjang jalan yang terbangun Persentase pemenuhan ketersediaan trotoar/pedestrian pada jalan arteri/kolektor	100 % 100 % 14,14 % 61,62 % 26,36 %			26,29 % 75 % 56,35 % 50 % 12,07 %	54.190.215.544,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	100 % 100 % 14,14 % 61,62 % 26,36 %	48.218.220.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	100 Dokumen			20 Dokumen	5.316.246.485,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	100 Dokumen	5.890.720.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	2,09 KM			0,2 KM	5.367.716.723,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	2,09 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	128,78 KM			11 KM	11.602.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	128,78 KM	11.602.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	138,69 KM			8 KM	3.005.066.336,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	138,69 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	138 Jembatan			138 Jembatan	1.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	138 Jembatan	1.725.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>	822 Jembatan			2 Jembatan	576.888.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	822 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>	162 Jembatan			1 unit Jembatan	1.696.798.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	162 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	134,69 KM			209 KM	25.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	134,69 KM	25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik</i>	14,22 %			14,22 %	167.992.500,00						14,22 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi	22,22 %			14,22 %	167.992.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	22,22 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	300 Orang			68 Orang	167.992.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	200 Orang	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RPD/RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR	65 Persentase			65 Persentase	787.500.000,00						65 Persentase	867.500.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penataan Ruang	100 %			100 %	472.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	100 %	520.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan			1 Laporan	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %			100 %	157.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemerintah Daerah	100 %	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemerintah Daerah	0 Dokumen	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah	100 %			100 %	157.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemerintah Daerah	100 %	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						161.316.067.634,00							188.644.159.326,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						146.425.375.333,00							156.844.159.326,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						146.425.375.333,00							156.844.159.326,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD</i> <i>Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan</i> <i>Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja</i> <i>Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal</i> <i>Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA</i> <i>Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja</i> <i>Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana</i> <i>Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan</i> <i>Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM</i>	29.07 Nilai 100 % 28.15 Nilai 12.51 Nilai 19.82 Nilai 89.35 Nilai 89.39 Nilai 87.87 Nilai 100 % 95 % 100 % 100 % 93.5 Nilai 100 %			100 % 93 Nilai 12.50 Nilai 19,81 Nilai 95 % 28,13 Nilai 29,06 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 89,3 Nilai	43.129.520.795,00						29.07 Nilai 100 % 28.15 Nilai 12.51 Nilai 19.82 Nilai 89.35 Nilai 89.39 Nilai 87.87 Nilai 100 % 95 % 100 % 100 % 93.5 Nilai 100 %	45.108.218.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai regulasi</i>	100 %			100 %	25.446.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	29.884.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	5.174.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	5 Dokumen	5.152.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan			5 Laporan	20.272.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	5 Laporan	24.731.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100 %			100 %	16.154.090.045,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	15.728.334.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	16.031.064.445,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	14 Orang/bulan	15.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	921.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Laporan	1.259.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan			5 Laporan	122.104.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	5 Laporan	127.074.900,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	219.967.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	219.967.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	2 Paket	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	571.809.856,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	870.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Paket	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	38.169.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	69.157.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			2 Laporan	304.482.356,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	2 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan BMD sesuai RKBMD	100%			100%	1.846.813.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	1.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit			2 Unit	1.292.346.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	25 Unit			17 Unit	130.950.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	25 Unit	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit			26 Unit	423.517.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	20 Unit	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Oprasional Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	19.442.045.658,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	21.079.999.920,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	1.443.661.122,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	12 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	17.998.384.536,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	12 Laporan	19.879.999.920,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah yang berkondisi Baik	100 %			100 %	4.869.347.936,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	100 %	5.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit			44 Unit	4.382.260.748,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	48 Unit	4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit			100 Unit	144.884.893,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	120 Unit	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	342.202.295,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disperumkim	1 Unit	650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni Persentase warga negara	100% 100% 90% 19,6%			100% 100% 90% 19,6%	4.482.653.858,00						100% 100% 90% 19,6%	6.842.772.830,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	yang terkena relokasi program pemerintah yang difasilitasi untuk menghuni rumah layak huni Persentase tingkat hunian rusunawa Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin	100 %			100 %	630.992.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	100 %	699.996.130,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0 Dokumen			1 Dokumen	87.419.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	0 Dokumen	99.999.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen			1 Dokumen	92.782.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	99.999.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen			1 Dokumen	91.984.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	99.999.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	87.419.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	99.999.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	91.984.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	99.999.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	87.419.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	99.997.390,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	91.984.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	99.999.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase partisipasi warga korban bencana dalam persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	100 %			100 %	40.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	100 %	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</i>	80 Orang			80 Orang	40.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	80 Orang	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah</i>	100 %			100 %	500.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	100 %	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	40 Unit Rumah			5 Unit Rumah	500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	40 Unit Rumah	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase tingkat hunian rumah susun	90 %			90 %	3.261.660.958,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	90 %	5.037.776.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan			1 Laporan	149.155.958,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5 Dokumen			5 Dokumen	3.112.505.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	5 Dokumen	5.037.776.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi teknis TPU yang dikeluarkan	6 %			6 %	50.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	6 %	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/di pelihara Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/di pelihara Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	39.94 % 3.88 % 41.47 %			33,67 Persentase 39,79 Persentase 5.53 %	26.660.832.904,00						39.94 % 3.88 % 41.47 %	36.230.505.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha (kewenangan kota) yang belum ditangani	194.99 Ha			193.78 Ha	664.487.800,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	194.99 Ha	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	59 Kelompok Masyarakat			57 Kelompok Masyarakat	98.276.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	59 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen			1 Dokumen	566.211.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	16.98 Ha			29,8 Ha	25.996.345.104,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	20.26 Ha	36.030.505.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3125 Unit Rumah			3500 Unit Rumah	19.400.769.039,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	3125 Unit Rumah	28.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	20 Ha			10 Ha	6.595.576.065,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	10 Ha	8.030.505.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana Persentase pengelolaan makam yang dikelola pemerintah Persentase Panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	62.22 % 62.22 % 100 % 21.33 %			100 % 21.03 % 54.13 %	72.152.367.776,00						62.22 % 62.22 % 100 % 21.33 %	68.662.662.576,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Lingkungan perumahan dan permukiman Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	62.22 %			54,13 %	72.152.367.776,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	62.22 %	68.662.662.576,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen			1 Dokumen	97.418.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	1 Dokumen	154.230.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi			6 Lokasi	72.013.267.376,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kota Bogor	1 Lokasi	68.458.432.576,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	8 Dokumen			4 Dokumen	350.425.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kota Bogor	4 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50,57 Ha			49.77 Ha	3.733.280.952,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kota Bogor	50,57 Ha	8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	120 Orang			60 Orang	194.761.229,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kota Bogor	60 Orang	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	278 Unit			268 Unit	3.628.974.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kota Bogor	278 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) undefined	89,25 Nilai 26,82 nilai 27,34 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 89,25 Nilai 89,39 Nilai 87,37 Nilai 89,39 Nilai 94 Persenta se 21,98 Nilai 13 Nilai 26,82 nilai 27,34 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 13 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 94 Persenta se 89,39 Nilai 100 Persent ase 87,37 Nilai 100 Persent ase 89,39 Nilai 100 Persent ase			89,25 Nilai 26,82 nilai 27,34 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 89,25 Nilai 89,39 Nilai 87,37 Nilai 89,39 Nilai 94 Persenta se 21,98 Nilai 13 Nilai 26,82 nilai 27,34 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 13 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 94 Persenta se 89,39 Nilai 100 Persent ase 87,37 Nilai 100 Persent ase 89,39 Nilai 100 Persent ase	7.962.198.319,00					89,25 Nilai 26,82 nilai 27,34 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 89,25 Nilai 89,39 Nilai 87,37 Nilai 89,39 Nilai 94 Persenta se 21,98 Nilai 13 Nilai 26,82 nilai 27,34 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 13 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 94 Persenta se 89,39 Nilai 100 Persent ase 87,37 Nilai 100 Persent ase 89,39 Nilai 100 Persent ase	8.162.685.000,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan secara tepat Waktu dan sesuai regulasi	10 Dokumen			4 Dokumen	5.021.740,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan secara tepat Waktu dan sesuai regulasi	5 Dokumen	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			5 Dokumen	5.021.740,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan secara tepat Waktu dan sesuai regulasi	5 Dokumen	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan adminsitiasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	19 Orang/Bulan			19 Orang/Bulan	4.009.009.434,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pelaksanaan adminsitiasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	19 Orang/Bulan	4.054.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan			18 Orang/bulan	3.955.729.434,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pelaksanaan adminsitiasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	19 Orang/bulan	4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	53.280.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pelaksanaan adminsitiasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	12 Laporan	54.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	80 Paket			80 Paket	249.179.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	80 Paket	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	124.963.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Paket	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	28.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Paket	29.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	6 Dokumen			12 Dokumen	13.946.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	6 Dokumen	14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	210.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	12 Laporan	215.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD</i>	51 Unit			2 unit	238.122.147,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	51 Unit	239.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	201.769.747,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	0 Unit	202.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			14 Unit	36.352.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	1 Unit	37.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	24 Laporan			24 Laporan	2.140.883.560,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	24 Laporan	2.245.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	140.085.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Laporan	145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	2.000.798.560,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Laporan	2.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	91 Unit			91 Unit	845.332.238,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkel anjutan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	91 Unit	854.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	42.090.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkel anjutan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	1 Unit	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit			17 Unit	683.242.238,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkel anjutan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	23 Unit	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit			50 Unit	120.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkel anjutan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	66 Unit	121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	20 persen			20 persen	1.602.116.575,00						20 persen	1.585.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Kelurahan Tangguh	48,5 Persen 273 Unit			123 Unit 42,65 Persen	1.206.937.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Persentase kelurahan tangguh	48,5 Persen 150 Unit	1.187.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	273 Unit			123 Unit	701.879.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Persentase kelurahan tangguh	150 Unit	705.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1200 Orang			500 Orang	24.937.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Persentase kelurahan tangguh	500 Orang	2.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan			4 Kawasan	480.120.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Bogor Tengah, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegallega Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Persentase kelurahan tangguh	4 Kawasan	480.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana	24 Laporan			12 laporan	325.178.975,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana	12 Laporan	327.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Laporan			12 Laporan Orang	26.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana	12 Laporan	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3000 Orang			3000 Orang	299.178.975,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana	3000 Orang	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94 Persen 100 Persen 94 Persen 90,35 Nilai 85,25 Nilai 90,10 Nilai 93,95 Nilai 100 Persen 100 Persen 23,15 Nilai 11,75 Nilai 26,15 Nilai 28,20 Nilai 95 Persen			100 Persen 11,65 Nilai 23,05 Nilai 26,10 Nilai 28 Nilai 85,15 Nilai 90,00 Nilai 90,30 Nilai 93,85 Nilai 94 Persen	44.818.063.208,00						94 Persen 100 Persen 94 Persen 90,35 Nilai 85,25 Nilai 90,10 Nilai 93,95 Nilai 100 Persen 100 Persen 23,15 Nilai 11,75 Nilai 26,15 Nilai 28,20 Nilai 95 Persen	46.875.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 Persen 100 Persen			100 Persen	25.000.000,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satpol PP Kota Bogor	100 Persen 100 Persen	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satpol PP Kota Bogor	2 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			6 Laporan	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satpol PP Kota Bogor	6 Laporan	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	37.297.202.695,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen 100 Persen	38.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	375 Orang/bulan			185 Orang/bulan	37.297.202.695,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	185 Orang/bulan	38.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	602.666.967,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	162.824.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	51.429.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	45.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	228.313.904,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	40.953.363,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	74.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen			100 Persen	135.026.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	135.026.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	10 Unit	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	5.001.778.171,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	5.585.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	219.875.155,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	235.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	4.781.903.016,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	5.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 Persen			100 Persen	1.756.388.575,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	1.990.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	700 Orang			289 Orang	180.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	350 Orang	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	100 Orang			296 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	50 Orang	180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	2 laporan			1 laporan	150.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 laporan	180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	1.374.620.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	2 Laporan	1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i> <i>umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>	2 Laporan			1 Laporan	37.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	37.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada</i>	100 %			100 %	1.263.208.718,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Bogor	100 %	1.297.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.549.694.780,00							450.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran	100 Persentase			100 Persentase	15.517.007.680,00						100 Persentase	0,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			100 %	11.520.192.298,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penan- ggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan			75 Orang/bulan	11.465.192.298,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penan- ggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana- n/Semesteran SKPD	18 Laporan			12 Laporan	55.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen			1 paket	160.840.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penan- ggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur DKPP	100 persen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket			1 Paket	160.840.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur DKPP	1 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persen			100 persen	680.197.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 persen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	48.161.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	50.767.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	110.142.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Paket	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	471.125.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen			12 Paket	167.792.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPKP dan Masyarakat Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	66.194.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPKP dan Masyarakat Kota Bogor	1 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			10 Unit	101.597.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPKP dan Masyarakat Kota Bogor	10 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen			12 Laporan Laporan 100 persen	1.313.410.876,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur pemerintah	100 persen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	119.651.468,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur pemerintah	1 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	1.193.759.408,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur pemerintah	1 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	100 persen			100 persen	1.674.574.006,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 persen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit			15 Unit	214.623.326,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			17 Unit	973.507.504,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			10 Unit	74.895.176,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	411.548.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rata-rata Response Time penanganan Kebakaran	9,25 menit			9,25 menit	2.032.687.100,00						9,25 menit	450.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 buah 20 orang 2 Kerjasama			203 Buah	1.180.279.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	ASN Kota Bogor	25 buah 10 orang 1 Kerjasama	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang			50 Orang	75.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	ASN Kota Bogor	10 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit			203 Unit	1.105.279.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	ASN Kota Bogor	25 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan Tanggap Kebakaran Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran kepada Masyarakat	20 Kegiatan 20 Kelurahan 120 Relawan 240 Relawan			10 Kelurahan 120 Relawan 10 Kegiatan	492.054.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	10 Kegiatan 10 Kelurahan 120 Relawan	450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulungan Kebakaran Setiap Tahunnya	240 Orang			150 Orang	269.999.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	120 Orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelu rahan			15 Desa/Kelu rahan	123.080.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	10 Desa/Kelu rahan	300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2 Dokumen			1 Dokumen	98.973.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Jumlah Sarana Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Sesuai Standart Jumlah Sarpras Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Sesuai Standar Jumlah SDM Aparatur Pencarian dan Pertolongan yang ditingkatkan Kompetensinya	50 buah 10 orang			217 buah 25 buah 25 buah 5 orang	360.353.900,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	ASN Kota Bogor	25 buah 5 orang	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	50 Unit			18 Unit	360.353.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	ASN Kota Bogor	25 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	X	NON URUSAN						10.000.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	100 Persent ase 27,34 Nilai 21,98 Nilai 13 NILAI 26,82 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 89,39 Nilai 87,87 Nilai 89,39 Nilai 89,25 nilai			94 Persentase 95 Persentase 100 Persentase 12,48 NILAI 21,97 Nilai 26,25 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 nilai	10.000.000,00						100 Persent ase 27,34 Nilai 21,98 Nilai 13 NILAI 26,82 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 89,39 Nilai 87,87 Nilai 89,39 Nilai 89,25 nilai	0,00		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	10.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			5 Dokumen	5.578.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			5 Laporan	4.422.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		DINAS SOSIAL							16.609.640.070,00						800.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			16 Laporan	4.632.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinsos	16 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan			28 Laporan	6.081.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	28 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Presentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100% Perse n 100% Perse n			100% Persen 100% Persen	9.060.896.557,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	100% Perse n 100% Perse n	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan			44 Orang/bulan	9.005.896.557,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	44 orang/bulan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	55.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100% Perse n			100% Persen	837.689.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	100% Perse n	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	21.584.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-ASN Dinsos	12 Paket	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	364.580.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Paket	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	44.128.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Paket	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	407.396.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100% Perse n			100% Persen	817.386.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	100% Perse n	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	639.329.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	1 Unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	12 Unit			2 Unit	7.613.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	22 Unit			16 Unit	170.442.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	22 unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100% Perse n			100% Persen	1.159.268.568,00			Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	100% Perse n	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	221.338.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	101.076.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 laporan			12 Laporan	836.853.968,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD lingkup perangkat daerah bercondisi baik</i>	100% Perse n			100% Persen	687.694.245,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	100% Perse n	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit			7 Unit	343.763.879,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	10 unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	140 unit			11 Unit	127.693.366,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	140 unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit			1 Unit	216.237.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinsos	1 unit	0,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	100 Persentase 87 Persentase			100 Persentase 85 Persentase	442.843.300,00						100 Persentase 86 Persentase	0,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dunia Usaha/ Penyelenggara UGB dan PUB	121 Lembaga			121 Lembaga	3.818.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	121 Lembaga	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen			2 Dokumen	3.818.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	5 dokumen	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah LKS aktif	30% Persen			30% Persen	439.025.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	30% Persen	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang			80 Orang	101.896.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	80 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Lembaga			135 Lembaga	274.269.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	135 lembaga	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat			5 Sertifikat	62.859.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	5 Sertifikat	0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlantar	100 % 100% Perse n 100 % 2% Persen			2% Persen 100% Persen	1.497.178.900,00						100 % 100% Perse n 100 % 2% Persen	800.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	100% Perse n 100% Perse n			100% Persen	921.812.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	100% Perse n 100% Perse n	800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang			250 Orang	32.215.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	500 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang			201 Orang	725.927.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	ASN Dinsos	50 orang	800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360 orang			33 Orang	56.770.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	360 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	360 orang			200 Orang	56.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	360 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	360 orang			504 Orang	50.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	360 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100% Persen 100% Persen			100% Persen	575.366.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	100% Persen 100% Persen	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	240 orang			144 Orang	16.774.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinsos	24 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang			2160 Orang	231.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinsos	50 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	360 orahg			135 Orang	36.450.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinsos	360 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	360 orang			355 Orang	24.432.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	360 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360 orang			2160 Orang	216.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	360 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang			300 Orang	49.960.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	150 orang	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan social Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi	17,50% Per sen 90% Persen 100% Perse n			90% Persen 18% Persen 88,50% Persen	923.174.200,00						17,50% Per sen 90% Persen 100% Perse n	0,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID	100 Orang			95 Orang 100% Persen	156.468.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinsos	100 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang			80 Orang	51.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinsos	80 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			100 Orang	44.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	100 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			100 Orang	61.268.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	100 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID	100% Persen			100% Persen	766.706.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	100% Persen	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				6000 Orang	488.316.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29700 Keluarga			29700 Keluarga	248.344.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	29700 Keluarga	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang			50 Orang	30.046.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinsos	50 orang	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase			100 Persentase	1.118.649.300,00						100 Persentase	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100% Perse n			100% Persen	694.842.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinsos	100% Perse n	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang			500 Orang	577.504.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinsos	500 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang			100 Orang	80.089.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinsos	100 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit			2 Unit	7.183.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinsos	2 unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang			45 Orang	9.064.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinsos	45 orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang			200 Orang	21.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinsos	70 Orang	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1087 Makam			1087 Makam	50.146.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Dinsos	1087 makam	0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						14.831.980.212,00							15.039.761.237,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.831.980.212,00							15.039.761.237,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						14.831.980.212,00							15.039.761.237,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	26 Nilai 87,87 Nilai 89,39 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 89,39 Nilai 100 Persent ase 28,5 Nilai 94 Persenta se 23 Nilai 89,25 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 13 Nilai			100 Persentase 12,91 Nilai 22,7 Nilai 25 Nilai 28,04 Nilai 84,11 Nilai 88,38 Nilai 88,39 Nilai 88,75 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	10.458.444.667,00						26 Nilai 87,87 Nilai 89,39 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 89,39 Nilai 100 Persent ase 28,5 Nilai 94 Persenta se 23 Nilai 89,25 Nilai 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 13 Nilai	10.602.761.237,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu</i>	100 % 100 %			100 % 100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10 Laporan			10 Laporan	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	10 Laporan	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA</i>	100 % 100 %			100 % 100 %	8.730.359.269,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	100 % 100 %	8.730.359.269,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	10 Orang/bulan			39 Orang/bulan	8.682.779.269,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	40 Orang/bulan	8.682.779.269,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	15 Laporan			15 Laporan	47.580.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	15 Laporan	47.580.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	405.061.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	100 %	455.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket			4 Paket	78.662.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	4 Paket	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	20.035.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	39.999.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	3 Paket	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	266.365.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	2 Laporan	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMĐ</i>	100 %			100 %	178.109.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	100 %	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit			2 Unit	178.109.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	2 Unit	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	892.151.968,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	100 %	892.151.968,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			4 Laporan	159.775.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	4 Laporan	159.775.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	732.376.968,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	1 Laporan	732.376.968,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur</i>	100 %			100 %	237.762.930,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	100 %	310.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit			5 Unit	134.798.870,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	5 Unit	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit			140 Unit	45.859.060,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	145 Unit	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	57.105.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	35.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memiliki Usaha	35 Persentase 100 Persentase 30 Persentase			100 Persentase 30 Persentase 30 Persentase	3.757.260.545,00						35 Persentase 100 Persentase 30 Persentase	3.757.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi	280 Orang			422 Orang	3.662.825.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	280 Orang	3.677.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	280 Orang			260 Orang	3.662.825.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	280 Orang	3.677.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	35 LPK			30 LPK	45.129.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	35 LPK	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	35 Lembaga			30 Lembaga	45.129.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	35 Lembaga	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi</i>	30 %			30 %	49.305.745,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	30 %	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	50 Perusahaan			40 Perusahaan	49.305.745,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	50 Perusahaan	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja</i>	91,94 Persentase			91,94 Persentase	390.000.000,00						91,94 Persentase	430.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha</i>	2.500 Orang			2.500 Orang	255.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	2.500 Orang	280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40 Orang			40 Orang	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	40 Orang	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96 Orang			96 Orang	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	96 Orang	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	3.000 Orang			2500 Orang	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	3.000 Orang	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	3.500 Orang			3000 Orang	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	3.500 Orang	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	200 Orang			200 Orang	35.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	200 Orang	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang Ditindaklanjuti Penetapan Besaran UMK	100 Persentase 1 Keputusan 100 Persentase			100 Persentase 1 Keputusan	226.275.000,00						100 Persentase 1 Keputusan 100 Persentase	250.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	72.05 %			72.05 %	132.565.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	72.05 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan			15 Perusahaan	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	15 Perusahaan	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14.366.291.275,00							15.882.243.511,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Presentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan keketentuan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	100 Percent ase 94 Persenta se 90,75 Nilai 89,00 Nilai 94 Persen 89 Nilai 91,75 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 100 Percent ase 95 Persentase se 27,34 Nilai 100 Percent ase			91,5 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95 Persentase 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 88,75 Nilai 90,5 Nilai	10.910.322.330,00						100 Percent ase 94 Persentase se 90,75 Nilai 89,00 Nilai 94 Persen 89 Nilai 91,75 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 100 Percent ase 95 Persentase se 27,34 Nilai 100 Percent ase	11.954.549.023,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ppresentase pelaksanaan penyusunan dokumen, perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100 Persen			100 Persen	29.165.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	100 Persen	32.697.443,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			9 Dokumen	29.165.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	5 Dokumen	32.697.443,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen			100 Persen	6.973.167.566,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	100 Persen	7.670.484.323,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan			32 Orang/bulan	6.906.291.566,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	31 Orang/bulan	7.596.920.723,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			18 Laporan	66.876.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	4 Laporan	73.563.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	1.805.943.544,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	100 Persen	1.986.537.898,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			5 Paket	209.750.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	3 Paket	230.725.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			6 Paket	74.946.644,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	3 Paket	82.441.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	843.141.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	1 Paket	927.455.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	35.734.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	1 Paket	39.307.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			4 Laporan	642.371.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	4 Laporan	706.608.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMĐ	100 Persen			100 Persen	525.144.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	100 Persen	577.659.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	525.144.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	3 Unit	577.659.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	926.813.612,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	100 Persen	964.240.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	143.069.780,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	4 Laporan	180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	783.743.832,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	ASN DP3A Kota Bogor	4 Laporan	784.240.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkoordinasi baik</i>	100 Presen			100 Presen	650.087.808,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	100 Presen	722.930.059,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	17 unit			21 Unit	8.787.754,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	17 unit	17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit			69 Unit	394.770.054,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	69 Unit	434.247.059,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit			3 Unit	246.530.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DP3A Kota Bogor	3 unit	271.183.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100 Persentase			100 Persentase	1.007.208.367,00						100 Persentase	1.107.929.203,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sub kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota</i>	55,00 Sub Kegiatan			53,00 Sub Kegiatan	240.507.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	55,00 Sub Kegiatan	264.558.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>	100 Orang			35 Orang	240.507.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	100 Orang	264.558.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan penguatan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota	130,00 Perempuan			30,00 Perempuan	373.765.956,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	130,00 Perempuan	411.142.551,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	55 organisasi			55 Organisasi	373.765.956,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	55 organisasi	411.142.551,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan</i>	100,00 Persen			100,00 Persen	392.935.011,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	100,00 Persen	432.228.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	500 Orang			450 Orang	392.935.011,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	500 Orang	432.228.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani</i>	100 %			100 %	524.602.000,00						100 %	548.851.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17,25 Nilai			17,26 Nilai	78.864.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	17,25 Nilai	86.751.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	78.864.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	1 Dokumen	86.751.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2,00 Layana n			200 layanan	282.104.000,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Perempuan Kota Bogor	2,00 Layana n	282.104.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	62 Orang			63 Orang	282.104.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Perempuan Kota Bogor	62 Orang	282.104.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	76,00 Lembaga			76,00 lembaga	163.633.200,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	76,00 Lembaga	179.996.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang			110 Orang	163.633.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Perempuan Kota Bogor	120 Orang	179.996.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			JNilai Dimensi Kualitas Legal Struktur Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik	79.90 poin 78.27 poin 68.35 poin												
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	- Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi. Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	- 62.91 poin 66.61poin			-	931.304.600,00						-	1.153.782.110,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarg a			-	526.191.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Keluarga Kota Bogor	100 Keluarga	684.048.430,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	526.191.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Keluarga Kota Bogor	4 Dokumen	684.048.430,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	100 Persen			100 Persen	405.113.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Keluarga Kota Bogor	100 Persen	469.733.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	76 Lembaga			5 Lembaga	167.795.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Keluarga Kota Bogor	76 Lembaga	218.133.630,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen			2 Dokumen	94.960.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Data Gender	2 Dokumen	123.448.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Data Gender	2 Dokumen	39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	38 Organisasi			35 Organisasi	89.424.978,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Anak Kota Bogor	38 Organisasi	98.367.475,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7,0 Lembaga			7,0 Lembaga	778.469.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Anak Kota Bogor	7,0 Lembaga	856.315.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Presentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan keketentuan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase kepatuhan anggaran Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	100 Persent ase 94 Persenta se 90,75 Nilai 89,00 Nilai 94 Persen 89 Nilai 91,75 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 95 Persenta se 27,34 Nilai 100 Persent ase			90,5 Nilai 91,5 Nilai 94 Persen 94 Persentase 95 Persentase 100 Persentase 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 88,75 Nilai	641.166.000,00						100 Persent ase 94 Persenta se 90,75 Nilai 89,00 Nilai 94 Persen 89 Nilai 91,75 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 95 Persenta se 27,34 Nilai 100 Persent ase	705.282.600,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	25.012.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persen	27.513.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	25.012.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	27.513.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek <i>Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> Rata-rata Nilai SKM Aspek <i>Penanganan Pengaduan</i> Persentase <i>realisasi anggaran terhadap DPA</i> Persentase <i>realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah</i> Nilai SAKIP Aspek <i>Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> Nilai SAKIP Aspek <i>Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> Nilai SAKIP Aspek <i>Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> Rata-rata Nilai SKM Aspek <i>Pemenuhan Sarana Prasarana</i> Rata-rata Nilai SKM Aspek <i>Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan</i> Rata-rata Nilai SKM Aspek <i>Pemenuhan Kualitas SDM</i> Persentase <i>Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</i>	22,85 Nilai 95 % 85,92 Nilai 85,84 Nilai 100 % 11,92 Nilai 94 % 100 % 95,68 Nilai 94 % 89,75 Nilai 100 % 26,58 Nilai 28,55 Nilai 11,97 Nilai			22,8 Nilai 95,68 Nilai 95 persen 100 persen 26,53 Nilai 11,92 Nilai 28,55 Nilai 85,47 Nilai 85,75 Nilai 89,53 Nilai 94 persen	16.800.319.462,00						22,85 Nilai 95 % 85,92 Nilai 85,84 Nilai 100 % 94 % 100 % 95,68 Nilai 94 % 89,75 Nilai 100 % 26,58 Nilai 28,55 Nilai 11,97 Nilai	16.517.486.279,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %			100 %	5.699.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	100 %	8.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			2 Dokumen	1.899.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	2 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan			5 Laporan	3.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	5 Laporan	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai peraturan</i>	100 % 100 %			100 % 100 %	13.981.234.330,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DKPP	100 % 100 %	13.371.369.691,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	70 Orang/bulan			70 Orang/bulan	13.932.545.330,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DKPP	70 Orang/bulan	13.315.369.691,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	24 Laporan			12 Laporan	48.689.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN DKPP	12 Laporan	56.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah</i>	100 %			100 %	598.604.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	100 %	729.016.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	23.112.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	1 Paket	30.112.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	32.714.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	1 Paket	42.746.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	19.231.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	1 Paket	29.247.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	32.300.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	1 Paket	35.003.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	14.880.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	2 Paket	24.541.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	476.364.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	1 Laporan	567.364.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 %			100 %	246.543.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	100 %	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit			17 Unit	246.543.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	10 Unit	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	1.530.086.548,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	100 %	1.567.219.988,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	381.423.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	12 Laporan	401.423.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	1.148.663.048,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	12 Laporan	1.165.796.488,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</i>	100 %			100 %	438.151.484,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	100 %	491.380.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	40 Unit			40 Unit	320.147.484,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	40 Unit	353.208.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	106 Unit			91 Unit	68.090.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	106 Unit	78.192.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit			1 Unit	49.914.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DKPP	1 Unit	59.980.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Ketersediaan Energi Ketersediaan protein Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</i>	63 gram/kap/perhari 2400 kkal/kap/perhari 85,7 poin			2400 kkal/kap/perhari 63 gram/kap/perhari 84,7 poin	139.110.600,00						63 gram/kap/perhari 2400 kkal/kap/perhari 85,7 poin	195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	256.111.486 kg			253.575.729 kg	48.211.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	256.111.486 kg	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan			5 Laporan	8.024.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	5 Laporan	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan	24 Dokumen			12 Dokumen	4.886.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Cibogor Kota Bogor, Bogor Tengah, Babakan Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen			1 Dokumen	35.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	0,92 %			0,46 %	13.206.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	0,46 %	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,5 Ton			0,500 Ton	13.206.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	0,5 Ton	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi Konsumsi Protein	2150 kkal/kap/hari 57 gram/kap/hari			2100 kkal/kap/hari 57 gram/kap/hari	77.692.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	2150 kkal/kap/hari 57 gram/kap/hari	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen			1 Dokumen	30.421.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan			1 Laporan	47.271.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourished (PoU)	4,77 %			4,77 %	73.536.400,00						4,77 %	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 peta			1 peta	12.650.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 peta	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen			1 Dokumen	12.650.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah wilayah rawan pangan yang diintervensi	100 %			50 %	60.886.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	50 %	115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	50.490.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan			1 Laporan	10.396.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	95,5 %			95,5 %	18.314.800,00						95,5 %	50.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	11 produk			11 produk	18.314.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	11 produk	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen			1 Dokumen	18.314.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.117.162.832,00							1.315.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						611.903.256,00							900.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (ikan konsumsi)	1 Persentase			1 Persentase	449.140.400,00						1 Persentase	700.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok	60 %			30 %	120.000.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pembudidaya Ikan Kota Bogor	30 %	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura Persentase pemenuhan sarana peternakan	32,68 Persentase 48,72 Persentase			32,68 Persentase 48,72 Persentase	839.957.876,00						67,22 % 51,28 %	75.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok yang menggunakan sarana pertanian dengan baik	100 %			58,27 %	160.322.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Petani Kota Bogor	61 %	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan			1 Laporan	22.960.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Petani Kota Bogor	1 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan			1 Laporan	137.362.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Petani Kota Bogor	1 laporan	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan yang dikelola Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang dikelola Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola	3 jenis 12 jenis			3/12 jenis 3 jenis 12 jenis	679.635.676,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Petani dan peternak Kota Bogor	3 jenis 12 jenis	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen			1 Dokumen	244.757.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Petani dan peternak Kota Bogor	1 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen			1 Dokumen	434.877.776,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Petani dan peternak Kota Bogor	1 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor	63.1 %			63.1 %	224.916.000,00						63.1 %	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</i>	36 Hektar			36 Hektar	25.854.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	36 Hektar	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>	6 Dokumen			1 Dokumen	25.854.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Terpeliharanya Prasarana Pertanian</i>	1 unit			1 unit	199.061.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 unit	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>	1 Unit			1 Unit	199.061.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Unit	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan</i>	47,62 % 83,25%			47,62 Persentase 83,25 Persentase	200.684.400,00						54,55 % 83,5 %	0,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase wilayah yang terkendali</i>	98,53 %			97,79 %	67.665.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	98,53 %	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>	2 Laporan			1 Laporan	67.665.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>	2 Laporan			1 Laporan	96.999.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)</i>	18,42 Persentase			18,42 Persentase	12.278.400,00						18,42 Persentase	10.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Luas lahan sawah yang terkendali dari serangan OPT</i>	75 Hektar			30 Hektar	12.278.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Tani Kota Bogor	45 Hektar	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	75 Ha			30 Ha	12.278.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Tani Kota Bogor	45 Ha	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming Cakupan bina kelompok tani	93,57 % 1,77 %			1,81 Persentase 93,41 Persentase	227.422.900,00						93,57 % 1,77 %	80.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 kelompok			5 kelompok	227.422.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Kelompok Tani Kota Bogor	5 kelompok	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit			1 Unit	9.479.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Kelompok Tani Kota Bogor	1 Unit	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit			4 Unit	128.839.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Kelompok Tani Kota Bogor	4 Unit	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	8 Unit			4 Unit	89.103.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Kelompok Tani Kota Bogor	4 Unit	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						125.922.436.739,00							125.953.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.516.811.971,00							6.813.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						13.516.811.971,00							6.813.000.000,00	
1.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Persentase sarana persampahan yang terpenuhi Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</i>	4,17 Persentase 100 Persentase 98,16 Persentase 5,84 Persentase			100 Persentase 2,13 Persentase 4,17 Persentase 98,16 Persentase	13.516.811.971,00						4,17 Persentase 100 Persentase 98,16 Persentase 5,84 Persentase	6.813.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan</i>	100 %			100 %	13.516.811.971,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	100 %	6.813.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	547,18 Ton/hari			541,76 Ton/hari	330.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Kota Bogor	547,18 Ton/hari	1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	550,05 Ton/hari			546,50 Ton/hari	9.636.811.971,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Kota Bogor	550,05 Ton/hari	13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	15 Unit			10 Unit	400.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa	Masyarakat Kota Bogor	15 Unit	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>	150 Unit			130 Unit	3.150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Kota Bogor	150 Unit	4.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						112.405.624.768,00							119.140.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						112.405.624.768,00							119.140.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM</i>	94 persen 95 persen 100 persen 100 persen 94 persen 89,25 Nilai 89,39 Nilai 100 persen 87,87 Nilai 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 89,39 Nilai			100 % 88,38 Nilai 12,48 Nilai 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai 87,11 Nilai 88,75 Nilai	81.026.822.948,00						94 persen 95 persen 100 persen 100 persen 94 persen 89,25 Nilai 89,39 Nilai 100 persen 87,87 Nilai 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,98 Nilai 89,39 Nilai	77.830.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100 % 100 %			100 % 100 %	170.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	100 % 100 %	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			5 Laporan	170.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	5 Laporan	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100 %			1 Laporan 100 %	33.584.485.984,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	100 %	570.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan			257 Orang/bulan	33.474.565.984,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	265 Orang/bulan	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	109.920.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1 Laporan	460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	1.848.207.700,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	100 %	1.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			5 Paket	856.776.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1 Paket	475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	89.945.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	5 Paket	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			4 Paket	401.840.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	3 Paket	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			3 Paket	119.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	2 Paket	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	379.646.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1 Laporan	575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</i>	100 %			100 %	565.207.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	100 %	1.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	565.207.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	5 Unit	1.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	44.004.387.039,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 %	44.135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	345.955.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	12 Laporan	385.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	43.658.432.039,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	12 Laporan	43.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 %			100 % 100 %	854.534.325,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	100 %	29.985.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit			140 Unit	406.556.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	145 Unit	29.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	258.690.731,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1 Unit	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			6 Unit	189.287.394,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	10 Unit	435.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100 Persentase			100 Persentase	262.000.000,00						100 Persentase	350.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen			1 Dokumen	262.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen			2 Dokumen	262.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paleang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	8,3 Persentase 25 Persentase			20 Persentase 8 Persentase	1.148.977.520,00						8,3 Persentase 25 Persentase	1.095.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air	13.88 % 3 Lokasi 11 Titik			3 Lokasi 11 Titik 13.88 %	1.048.977.520,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	13.88 % 3 Lokasi 11 Titik	915.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2 kegiatan			2 Kegiatan	898.977.520,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	2 kegiatan	760.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 IAPORAN			1 IAPORAN	100.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyrakat Kota Bogor	1 IAPORAN	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyrakat Kota Bogor	1 Kegiatan	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5 Ha			0,5 Ha	150.000.000,00						0,5 Ha	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pohon yang ditanami	500 pohon			500 pohon	150.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	500 pohon	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100 Persentase			100 Persentase	250.000.000,00						100 Persentase	270.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	100 %			100%	170.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat dan Pelaku Kegiatan/Usaha di Kota Bogor	100 %	170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	48 Badan Usaha			36 Badan Usaha	170.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat dan Pelaku Kegiatan/Usaha di Kota Bogor	48 Badan Usaha	170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat/lembaga/kegiatan usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan	15 Persentase			15 Persentase	545.730.300,00						15 Persentase	1.125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	40 Pelaku Kegiatan/Usaha			25 Lembaga 35 Pelaku Kegiatan/Usaha	545.730.300,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	40 Pelaku Kegiatan/Usaha	1.125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	40 Dokumen			50 Dokumen	95.730.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	40 Dokumen	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang			250 Orang	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	300 Orang	375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga			10 Lembaga	250.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	30 Lembaga	575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	- Persentase Sekolah Adiwiyata (%))	35.60%			-	500.000.000,00						35.60%	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah RT/Masyaraka t/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat			784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	500.000.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas			5 Entitas	500.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengemba ngan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyrakat Kota Bogor	5 Entitas	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%				30.000.000,00						100%	30.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %			100 %	30.000.000,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Peningkata n Kualitas Hidup Masyarakat	Masyrakat Kota Bogor	100 %	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan			10 Pengaduan	30.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	12 Pengaduan	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume sampah yang tertangani Persentase Reduksi Sampah (%)) Persentase Jalur Wilayah Penyapua	79.25 Persentase 3 Persentase 8.1 Persentase 97.5 Persentase			79.25 % 8 % 94.97 %	28.322.094.000,00						79.5 Persentase 3 Persentase 8.1 Persentase 97.5 Persentase	37.400.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah Presentase Peningkatan retribusi Persampahan	95 % 58.73 %			57.58 % 94 % 2.90 %	28.322.094.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Infrastrukturbelanjutan	Masyrakat Kota Bogor	95 % 58.73 %	37.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit			8 Unit	7.127.448.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	9 Unit	14.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4471,76 Ton			4427,49 Ton	1.145.286.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	4471,76 Ton	1.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	135 Unit			133 Unit	20.049.360.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat Kota Bogor	135 Unit	21.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL						15.720.053.833,00							17.684.849.428,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.399.486.905,00							15.002.784.800,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						14.399.486.905,00							15.002.784.800,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase kepatuhan anggaran Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	29 Nilai 22,5 Nilai 13,50 Nilai 29 Nilai 29,5 Nilai 94 % 100 % 98 % 100 % 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 22,5 Nilai 12 Nilai 29,5 Nilai 100 persen 94 persen 100 persen 98 persen 100 persen 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 100 %			11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 29 Nilai 92,5 % 93 % 94 % 94 persen 96 Nilai 97,5 % 95 % 97,5 persen 98,5 Nilai 100 persen	12.392.345.063,00						29 Nilai 22,5 Nilai 13,50 Nilai 29 Nilai 29,5 Nilai 94 % 100 % 98 % 100 % 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 22,5 Nilai 12 Nilai 29,5 Nilai 100 persen 94 persen 100 persen 98 persen 100 persen 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 100 %	12.740.931.900,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 % 100 % 99,00 %			97,50 % 100 % 100 %	114.761.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	100 % 100 % 98,00 %	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 Laporan			12 Laporan	114.761.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	5 Laporan	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100 %			100 %	10.363.593.137,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	100 %	10.430.660.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	54 Orang/bulan			54 Orang/bulan	10.313.609.137,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	54 Orang/bulan	10.374.380.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan			12 Laporan	49.984.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	18 Laporan	56.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %			100 %	709.002.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	100 %	1.041.359.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	17.499.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	1 Paket	17.499.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	42.491.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	1 Paket	30.469.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	222.917.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	1 Paket	444.593.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	21.612.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	1 Paket	21.612.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan			12 Laporan	74.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	12 Laporan	177.184.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			1 Laporan	329.631.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	12 Laporan	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</i>	100 %			100 %	354.831.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	100 %	544.931.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	40 Unit			44 Unit	354.831.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	40 Unit	544.931.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %			100 %	275.132.920,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	100 %	17.499.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	275.132.920,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	12 Laporan	17.499.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah ber kondisi baik</i>	100 %			100 Persen	575.023.706,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	100 %	596.481.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	17 Unit			17 Unit	204.793.737,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	17 Unit	188.090.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	234.296.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	1 Unit	234.296.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	135.933.969,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor	1 Unit	174.095.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Persentase cakupan perekaman E-KTP Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persentase 100 Persentase			100 % 100 %	1.521.027.900,00						100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persentase 100 Persentase	1.521.488.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP.</i>	85 % 85.00 %			80 %	19.539.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DiSdukcapil dan Masyarakat	85 % 85.00 %	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen			2 Dokumen	19.539.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DiSdukcabil dan Masyarakat	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	100 % 100 %			100 %	1.501.488.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcabil Kota Bogor dan Masyarakat	100 % 100 %	1.501.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan			2 Laporan	1.501.488.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcabil Kota Bogor dan Masyarakat	1 Laporan	1.501.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 tahun Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	99.20 % 99.50 % 70.00 % 99,5 Persen tase 70 % 70 Persenta se			99.20 % 65 %	200.267.900,00						99.50 % 99.50 % 70.00 % 99,5 Persen tase 70 % 70 Persenta se	323.978.500,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai dengan SOP.	85 % 85.00 %			80.00 %	100.252.400,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcabil Kota Bogor dan Masyarakat	85 % 85.00 %	127.840.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	565 Dokumen			565 Dokumen	75.369.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor dan Masyarakat	565 Dokumen	92.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	576 Layanan			576 Layanan	24.883.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor dan Masyarakat	576 Layanan	35.290.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 % 100 %			100%	100.015.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor dan Masyarakat	100 % 100 %	196.138.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	100.015.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disdukcapil Kota Bogor dan Masyarakat	1 Laporan	196.138.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan yang di perlukan OPD sesuai dengan SOP kerjasama pemanfaatan data	61.00 %			61.00 %	285.846.042,00						61.00 %	416.386.400,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase kepatuhan anggaran Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	29 Nilai 22,5 Nilai 13,50 Nilai 29 Nilai 29,5 Nilai 94 % 100 % 98 % 100 % 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 22,5 Nilai 12 Nilai 29,5 Nilai 100 persen 94 persen 100 persen 98 persen 100 persen 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 100 %			11,5 Nilai 13 Nilai 22 Nilai 28,5 Nilai 98,5 Nilai 29 Nilai 92,5 Nilai 93 Nilai 94 % 94 persen 96 Nilai 97,5 % 97,5 persen 100 % 100 persen	1.320.566.928,00						29 Nilai 22,5 Nilai 13,50 Nilai 29 Nilai 29,5 Nilai 94 % 100 % 98 % 100 % 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 22,5 Nilai 12 Nilai 29,5 Nilai 100 persen 94 persen 100 persen 98 persen 100 persen 93,5 Nilai 96,5 Nilai 93 Nilai 99 Nilai 100 persen 100 %	2.682.064.628,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	1.320.566.928,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	2.682.064.628,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.320.566.928,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Laporan	2.682.064.628,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						14.625.249.275,00							16.125.623.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.625.249.275,00							16.120.623.000,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						14.625.249.275,00							16.120.623.000,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	21,98 Nilai 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13,00 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 87,87 Nilai 89,25 Nilai 89,39 Nilai 89,39 Nilai			87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 100 Persentase 12,48 Nilai 94 Persentase 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai	8.699.936.731,00						21,98 Nilai 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13,00 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 87,87 Nilai 89,25 Nilai 89,39 Nilai 89,39 Nilai	9.604.972.000,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 Persentase			100 Persentase	39.544.400,00			Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persentase	65.540.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	60.540.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	39.544.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	JPersentase Realisasi Anggaran terhadap DPA		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persentase			100%	6.095.156.979,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persen 100 Persentase	6.522.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan			28 Orang/bulan	6.047.143.779,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	26 Orang/bulan	6.510.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	48.013.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Persen ase			100 Persentase	1.254.332.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 Persen ase	1.466.832.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			2 Paket	125.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Paket	165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			7 Paket	219.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7 Paket	401.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	57.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Paket	66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	435.045.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Paket	325.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	85.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Paket	94.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	2 Laporan			2 Laporan	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Laporan	27.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	303.287.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Laporan	348.832.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 Persent ase			100 Persentase	461.580.536,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	100 Persent ase	617.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	71.695.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	12 Laporan	108.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan			12 Laporan	389.885.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	13 Laporan	509.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 Persentase			100 %	849.322.816,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	100 Persentase	933.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			4 Unit	43.436.805,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	5 Unit	185.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			7 Unit	263.604.183,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	8 Unit	194.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			4 Unit	56.480.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	4 Unit	93.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	485.801.828,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	-	1 Unit	460.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang disusun	100 Persentase			100 Persentase	1.616.154.000,00						100 Persentase	1.987.071.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5 Dokumen			5 Dokumen	425.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	5 Dokumen	360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	400 Dokumen			500 Dokumen	80.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	400 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	100 Dokumen			200 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	100 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 Organisasi			30 Organisasi	45.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	30 Organisasi	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	10 Kegiatan			10 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	10 Kegiatan	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal</i>	15 Kegiatan			5 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	10 Kegiatan	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
			<i>Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan</i>	10 Kegiatan			10 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	10 Kegiatan	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen pemetaan pengendalian kependudukan</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	1.191.154.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	3 Dokumen	1.627.071.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen			1 Dokumen	560.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	840.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	165.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	100 Dokumen			1 Dokumen	106.854.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	100 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen			1 Dokumen	12.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	36 Unit			40 Unit	216.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	36 Unit	275.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan			1 Laporan	12.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen			1 Dokumen	67.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	76.071.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	19,84 Persentase			19,84 Persentase	3.069.955.144,00						19,84 Persentase	2.989.580.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Orang yang terpapar Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	505 Orang			505 Orang	507.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	505 Orang	507.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	2 Laporan			2 Laporan	90.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	2 Laporan	90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Unit			5 Unit	25.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	5 Unit	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan			1 Laporan	36.150.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	36.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	211.250.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	211.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dokumen			3 Dokumen	25.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	3 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi			68 Organisasi	120.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	2 Organisasi	120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kelurahan yang mempunyai IMP mandiri	68 Organisa si			68 Organisasi	113.190.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	68 Organisa si	158.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 orang			68 Orang	113.190.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	68 orang	158.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	80 Persenta se			80 Persentase	1.381.245.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	80 Persenta se	1.524.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan			1 Laporan	53.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	58.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2000 Orang			2000 Orang	702.045.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Masyarakat Kota Bogor	2000 Orang	945.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	9 dokumen			9 Dokumen	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Masyarakat Kota Bogor	9 dokumen	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	9 Unit			9 Unit	130.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	9 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>	60 Orang			60 Orang	146.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	60 Orang	220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Jumlah kampung KB aktif</i>	68 Kampung KB			68 Kampung KB	1.068.120.144,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	68 Kampung KB	800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70 Organisasi			70 Organisasi	90.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	70 Organisasi	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen			1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	68 Laporan			68 Laporan	373.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	68 Laporan	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB	68 Unit			68 Unit	514.370.144,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	68 Unit	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	82,34 Persentase			82,34 Persentase	1.239.203.400,00						82,34 Persentase	1.539.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan (poktan) aktif	630 Poktan			615 Poktan	779.398.400,00					Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	630 Poktan	1.039.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	33 Unit			33 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	33 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250 Orang			250 Orang	214.598.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	250 Orang	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	535 Kelompok			398 Kelompok	489.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	535 Kelompok	514.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	5 Kelompok			4 Kelompok	75.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting	5 Kelompok	175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana</i> <i>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan</i> <i>Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM</i> <i>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i>	21,98 Nilai 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13,00 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 87,87 Nilai 89,25 Nilai 89,39 Nilai 89,39 Nilai			87,11 Nilai 88,38 Nilai 88,75 Nilai 100 Persentase 12,48 Nilai 94 Persentase 21,97 Nilai 26,55 Nilai 27,01 Nilai	0,00						21,98 Nilai 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13,00 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 87,87 Nilai 89,25 Nilai 89,39 Nilai 89,39 Nilai	5.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu</i>	100 Persent ase			100 Persentase	0,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persent ase	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							181.673.343.821,00						348.129.615.280,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						181.673.343.821,00							348.129.615.280,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						181.673.343.821,00							348.129.615.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Dinas Perhubungan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Perencanaan Kinerja	100 Persen 87,87 Nilai 100 Persen 21,98 Nilai 89,39 Nilai 13,00 Nilai 89,25 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 26,82 Nilai 94 Persen 89,39 Nilai 94 Persen 100 Persen			100 Persen 11.01 Nilai 21.97 Nilai 26.55 Nilai 27.73 Nilai	88.020.888.376,00						100 Persen 87,87 Nilai 100 Persen 21,98 Nilai 89,39 Nilai 13,00 Nilai 89,25 Nilai 27,34 Nilai 94 Persen 26,82 Nilai 94 Persen 89,39 Nilai 94 Persen 100 Persen	59.822.199.480,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen 85 Persen 100 Persen 90 Persen			6 Dokumen 7 Laporan	34.997.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	90 Persen 85 Persen 100 Persen 90 Persen	340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	19.997.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	5 Dokumen	240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 Laporan	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	7 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen 100 Persen			31 Laporan 250 Orang/Bulan	36.444.096.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor	100 Persen 100 Persen	39.132.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan			250 Orang/bulan	36.319.813.120,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor	250 Orang/bulan	39.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	31 Laporan			31 Laporan	124.283.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor	31 Laporan	132.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Persen			12 Laporan 12 Laporan 5 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	1.194.779.395,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	100 Persen	2.301.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	12.690.198,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	2 Paket	440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	99.311.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Dinas Perhubungan Kota Bogor	2 Paket	275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	29.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	2 Paket	66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket			2 Paket	312.616.497,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	4 Paket	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	499.961.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	2 Paket	275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	24.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	12 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	215.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	12 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Persen			10 Unit	142.999.009,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	100 Persen	826.699.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit			15 Unit	142.999.009,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	32 Unit	826.699.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen			12 Laporan 48 Laporan	46.601.096.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	100 Persen	12.430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	36.892.716.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	48 Laporan	330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			48 Laporan	9.708.380.035,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	48 Laporan	12.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Persen			1 Unit 95 Unit 50 Unit	3.602.919.817,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	100 Persen	4.792.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit			85 Unit	3.203.336.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	85 Unit	3.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151 Unit			20 Unit	199.645.517,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	138 Unit	192.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	199.938.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penganan Titik Lokasi Rawan Kemacetan Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik	59,00 Persen 100 Persen 93 Persen 79,00 Persen 78,95 Persen 94 Persen 98,00 Persen			100% Persen 88 Persen	93.514.878.545,00						59,00 Persen 100 Persen 93 Persen 79,00 Persen 78,95 Persen 94 Persen 98,00 Persen	288.307.415.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 Persen 100 Persen			1 Dokumen	190.461.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Dinas Perhubungan Kota Bogor	100 Persen 100 Persen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	190.461.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Dinas Perhubungan Kota Bogor	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	93 Persen 93 Persen			5063 Unit 2500 Unit 2 Unit 1 Unit	28.713.906.776,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	93 Persen 93 Persen	68.367.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	17 Unit			1 Unit	195.747.276,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Desa Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	17 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6078 Unit			5831 Unit	24.760.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Desa Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	6078 Unit	12.465.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	22 Unit			123 Unit	102.409.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb anging Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat	22 Unit	592.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3830 Unit			15000 Unit	3.655.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb anging Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrastr uktur Konektivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat	3830 Unit	55.310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Lokasi			1 U 1 Unit	3.654.010.077,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	2 Lokasi	10.534.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit			1 Unit	3.574.010.077,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	1 Unit	9.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit			1 Unit	80.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	1 Unit	1.534.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	87 Persen			2 Laporan	108.423.200,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Dinas Perhubungan Kota Bogor	87 Persen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit			2 Unit	79.955.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	2 Unit	526.051.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29000 Dokumen			4123 Dokumen	119.979.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	29000 Dokumen	797.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit			12 Unit	319.052.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	15 Unit	641.629.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan			1 Laporan	51.694.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	1 Laporan	77.175.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	94 Persen			4 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 4 Dokumen	964.388.255,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	94 Persen	6.775.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan			2 Laporan	115.599.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	12 Laporan	413.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	48 Laporan			4 Laporan	9.856.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	24 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	36 Dokumen			18 Dokumen	600.992.255,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Masyarakat Pengguna Layanan	18 Dokumen	5.012.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	14 Laporan			2 Laporan	237.940.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	7 Laporan	1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100 Persen			11 Laporan 11 Laporan	122.160.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	100 Persen	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	60 Laporan			16 Laporan	40.880.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	30 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	250 Laporan			24 Laporan	81.280.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	130 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Load Factor Angkutan Umum Massal	2682 Unit			2821 Unit 6 Laporan	58.774.863.437,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	2682 Unit	198.425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan			6 Laporan	144.539.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	6 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1305 Unit			2821 Unit	58.630.323.837,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	1305 Unit	198.125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Trayek			2 Dokumen	271.499.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	33 Trayek	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Dokumen			2 Dokumen	271.499.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	5 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	144.484.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Layanan	1 Dokumen	163.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						22.911.929.249,00							49.368.300.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase kepatuhan anggaran Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	82,75 Nilai 95,25 Nilai 95 persen 85,00 Nilai 94 persen 100 persen 82,50 Nilai 94 persen 100 persen 27,57 Nilai 100 persen 27 Nilai 11,65 Nilai 22,5 Nilai			11,65 Nilai 22,5 Nilai 27,57 Nilai 27 Nilai 94 persen 100 persen 95 persen	16.005.851.327,00						82,75 Nilai 95,25 Nilai 95 persen 85,00 Nilai 94 persen 100 persen 82,50 Nilai 94 persen 100 persen 27,57 Nilai 100 persen 27 Nilai 11,65 Nilai 22,5 Nilai	19.975.000.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	95 % 95 % A Nilai			A Nilai 95 % 95 %	8.392.800,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	95 % 95 % A Nilai	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			9 Dokumen	8.392.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	9 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	12.557.744.983,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Dokumen	15.370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan			60 Orang/bulan	12.490.891.783,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	65 Orang/bulan	15.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	66.853.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	334.543.694,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Dokumen	1.375.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	6.117.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Paket	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket			5 Paket	105.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	5 Paket	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	15.711.094,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	207.715.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	2.721.127.032,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Dokumen	2.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	9.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.712.127.032,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	1 Laporan	2.640.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	384.042.818,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	2 Dokumen	515.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	15 Unit			13 Unit	233.442.886,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	15 Unit	430.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit			150 Unit	150.599.932,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Diskominfo Kota Bogor	150 Unit	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	90 Persentase 93 Persentase			80 Persentase 93 Persentase	2.638.671.810,00						90 Persentase 93 Persentase	5.498.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Media Cetak, Online, Radio dan TV Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal, media sosial dan website Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD Persentase PPID PD yang aktif Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	90 % 1100 Tayang 90 % 94 % 100 % 93 %			500 Tayang 90 % 100 % 94 % 90 % 93 %	2.638.671.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor dan Masyarakat Kota Bogor	90 % 600 Tayang 90 % 94 % 100 % 93 %	5.498.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi			1 Rekomendasi	224.817.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor dan Masyarakat Kota Bogor	1 Rekomendasi	635.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	8 Media			8 Media	1.816.676.010,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor dan Masyarakat Kota Bogor	8 Media	3.463.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	430.377.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik	24 Konten			4 Konten	166.800.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor dan Masyarakat Kota Bogor	12 Konten	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Penilaian SPBE Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,50 Indeks 3,70 Indeks 2,88 Indeks 3,46 Indeks 3,00 Indeks			2,88 Indeks 3,00 Indeks 3,46 Indeks 3,50 Indeks 3,70 Indeks	4.267.406.112,00						3,50 Indeks 3,70 Indeks 2,88 Indeks 3,46 Indeks 3,00 Indeks	23.895.300.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain	100 %			100 %	67.188.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	100 %	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	67.188.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan <i>Evaluasi Kota Cerdas</i> <i>Penyelenggaraan Evaluasi SPBE</i> <i>Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</i> <i>Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE</i> <i>Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur</i> <i>Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK</i> <i>Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data</i> <i>Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE</i> <i>Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</i> <i>Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</i> <i>Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</i> <i>Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data</i> <i>Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE</i> <i>Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data</i> <i>Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE</i> <i>Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE</i> <i>Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</i> <i>Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</i>	2 Level 2 Level 2 Dokumen 3 Level 2 Level 3,46 Indeks 3 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 2 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 2 Level 2 Level			3,46 Indeks 2 Dokumen 2 Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 2 Level 2 Level	4.200.217.712,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	2 Level 2 Level 2 Dokumen 3 Level 3,46 Indeks 3 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 2 Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 2 Level 4 Level 3 Level 2 Level 2 Level	23.345.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Statistik Nasional Indeks Kualitas Data Indeks Prinsip Satu Data Indonesia Indeks Kelembagaan Indeks Proses Bisnis Statistik	2,75 Indeks 2,85 Indeks 2,66 Indeks 2,22 Indeks 3,10 Indeks			2,22 Indeks 2,66 Indeks 2,75 Indeks 2,85 Indeks 3,00 Indeks	276.565.900,00						2,75 Indeks 2,85 Indeks 2,66 Indeks 2,22 Indeks 3,10 Indeks	1.180.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Aksesibilitas Indeks Aktualisasi dan Ketepatan Waktu Indeks Akurasi Indeks Interoperabilitas Data Indeks Keterbandingan dan Konsistensi Indeks Kode Referensi dan/atau Data Induk Indeks Metadata Statistik Indeks Pemanfaatan Data Statistik Indeks Pemeriksaan Data Indeks Pengelolaan Kegiatan Statistik Indeks Pengorganisasian Statistik Indeks Penguatan SSN Berkelanjutan Indeks Pengumpulan Data Indeks Penyebarluasan Data Indeks Perencanaan Data Indeks Profesionalitas Indeks Relevansi Indeks SDM yang Memadai dan Kapabel Indeks Standar Data Statistik	3,00 Indeks 4,00 Indeks 2,00 Indeks 2,40 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks 2,50 Indeks 2,50 Indeks 2,67 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 1,99 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,67 Indeks 1,99 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,40 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks			3,00 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,50 Indeks 2,00 Indeks 3,00 Indeks 2,67 Indeks 4,00 Indeks 2,00 Indeks 3,00 Indeks 1,99 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,33 Indeks 3,00 Indeks 2,40 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks	276.565.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	3,00 Indeks 4,00 Indeks 2,00 Indeks 2,40 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks 2,50 Indeks 2,67 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,67 Indeks 1,99 Indeks 2,50 Indeks 3,00 Indeks 3,00 Indeks 2,00 Indeks	1.180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang			50 Orang	95.806.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	80 Orang	525.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase			100 Persentase	55.694.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	100 Persentase	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan koperasi berizin	70 Persentase			70 Persentase	17.500.000,00						70 Persentase	70.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berbadan hukum	50 Persen			50 Persen	17.500.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	50 Persen	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha			5 Unit Usaha	17.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	5 Unit Usaha	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	11,21 Persentase			11,21 Persentase	79.452.000,00						11,21 Persentase	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang di periksa dan diawasi	2,11 Persen			2,11 Persen	79.452.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	2,11 Persen	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha			25 Unit Usaha	79.452.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	25 Unit Usaha	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	40 Persentase			40Persentase	34.200.000,00						40 Persentase	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus dan pengawas Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	7,80 Persen			7,80 Persen	34.200.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	7,80 Persen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	310 Orang			150 Orang	34.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	160 Orang	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	6,24 Persentase			6,24 Persentase	222.614.200,00						6,24 Persentase	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentasi koperasi yang di berdayakan dan di lindungi</i>	1,06 Persen			1,06 Persen	222.614.200,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	1,06 Persen	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	10 Unit Usaha			5 Unit Usaha	222.614.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Koperasi	5 Unit Usaha	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha Persentase UMKM yang mendapat fasilitas kemitraan dan penguatan kelembagaan</i>	7 Persentas e 18 Persenta se			16 Persentase 3 Persentase	857.210.900,00						4 Persentas e 18 Persenta se	994.022.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapat mendapat kesempatan bermitra dengan pengusaha besar Jumlah usaha mikro yang mendapat pemberdayaan	815 Usaha Mikro 220 Usaha Mikro			200 Usaha Mikro 725 Usaha Mikro	857.210.900,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	815 Usaha Mikro 220 Usaha Mikro	994.022.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	220 Unit Usaha			200 Unit Usaha	146.996.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	220 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	225 Unit Usaha			200 Unit Usaha	335.534.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	225 Unit Usaha	460.442.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang			175 Orang	166.550.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	200 Orang	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	340 Unit Usaha			320 Unit Usaha	11.550.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	340 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	170 Orang			150 Orang	196.580.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	170 Orang	433.580.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (UMKM Startup) Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya</i>	4 Persentase 3 Persentase 4 Persentase 3 Persentase 4 Persentase			2 Persentase 3 Persentase	230.016.000,00						4 Persentase 3 Persentase 4 Persentase 3 Persentase 4 Persentase	300.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah wirausaha pemula yang terverifikasi di Aplikasi SOLUSI Persentase pelaku usaha mikro yang memahami digitalisasi pemasaran Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat omzetnya melalui pelatihan dan pendampingan</i>	5,8 Persen 5,8 Persen 340 Wirausaha 9 Persen 9 Persen 340 Wirausaha			320 Wirausaha 8 Persen 5,4 Persen	230.016.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,8 Persen 5,8 Persen 340 Wirausaha 9 Persen 9 Persen 340 Wirausaha	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	670 Unit Usaha			605 Unit Usaha	230.016.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	670 Unit Usaha	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.032.742.186,00							17.134.163.326,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						566.658.308,00							720.000.000,00	
1.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok</i>	100 Persentase			100 Persentase	91.999.608,00						100 Persentase	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar yang dilaporkan Persentase Pelaksanaan Pemantauan yang dilaporkan	100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	91.999.608,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat	100 Persen 100 Persen	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			2 Laporan	91.999.608,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat	2 Laporan	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Realisasi Ekspor	139.025.307,45 USD			139.025.307,45 USD	128.640.000,00						139.025.307,45 USD	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kecil Menengah yang melakukan Ekspor</i>	19,35 Perse n			12,90 Persen	128.640.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	19,35 Perse n	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	270 Pelaku Usaha			135 Pelaku Usaha	128.640.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	135 Pelaku Usaha	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)</i>	11,87 Persentase			11,87 Persentase	51.193.200,00						11,87 Persentase	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase Jumlah UTTP yang sudah bertanda Tera/Tera Ulang</i>	8,20 Persen			8 Persen	51.193.200,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pengguna Alat UTTP	8,20 Persen	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	16646 Unit			16320 Unit	51.193.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pengguna Alat UTTP	16646 Unit	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	5%			5%	294.825.500,00						5%	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase UMKM Kota Bogor yang produknya terfasilitasi promosi (Pameran, kemitraan)</i>	6,64 Persen 3,10 Persen			1,55 Persen	294.825.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3,32 Persen 1,55 Persen	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	140 UMKM			70 UMKM	294.825.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	70 UMKM	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						16.466.083.878,00							16.414.163.326,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	88,75 Nilai			88,75 Nilai	16.219.986.978,00						88,75 Nilai	16.294.163.326,00	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Anggaran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100 Persen 94,00 Persen 100 Persen 100 Persen			100Persen	12.611.625.869,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	100 Persen 94,00 Persen 100 Persen 100 Persen	12.612.465.869,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	120.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	60.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	68.535.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	133.653.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			12 Dokumen	47.816.418,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	48.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			12 Laporan	1.064.802.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 Persen			100 Persen	1.295.408.316,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	100 Persen	1.359.697.457,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	370.290.764,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	411.535.065,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	925.117.552,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	948.162.392,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	90,00 Perse n			90,00 Persen	794.145.875,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	90,00 Perse n	820.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 Unit			42 Unit	462.393.775,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	49 Unit	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit			217 Unit	161.032.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	267 Unit	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			5 Unit	170.720.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM yang Produktif	8,7 Persentase			8,7 Persentase	246.096.900,00						8,7 Persentase	120.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Industri yang memiliki sertifikasi kompetensi	0,17 Persen			0,08 Persen	246.096.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat	0,17 Persen	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7 Dokumen			3 Dokumen	60.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat	4 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	14 Dokumen			7 Dokumen	136.096.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangkan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat	7 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						16.130.502.364,00							19.160.437.181,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.130.502.364,00							19.160.437.181,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						16.130.502.364,00							19.160.437.181,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	95 persen 100 persen 28,84 Nilai 94 Nilai 87,87 Nilai 23,48 Nilai 28,32 Nilai 14,5 Nilai 94 persen 100 persen 100 persen 94 persen 89,25 Nilai 92 Nilai 100 persen			28,81 Nilai 87,11 Nilai 88,38 Nilai 88.38 Nilai 88,75 Nilai 94 persen 94 Persen 95 persen 100 persen 13,98 Nilai 23.47 Nilai 28,05 Nilai	13.040.830.311,00						95 persen 100 persen 28,84 Nilai 89.39 Nilai 87,87 Nilai 23,48 Nilai 28,32 Nilai 14,50 Nilai 94 persen 100 persen 94 persen 89,25 Nilai 89.39 Nilai 100 persen	14.910.437.181,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Laporan Perencanaan, Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal yang selesai tepat waktu	100 Persen			100 Persen	137.834.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan DPMPPTSP dan OPD terkait.	100 Persen	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			85 Dokumen	137.834.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan DPMPPTSP dan OPD terkait.	84 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	10.263.478.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	100 Persen	11.430.437.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			45 Orang/bulan	10.192.113.760,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	45 Orang/bulan	11.358.867.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan			24 Laporan	71.364.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	24 Laporan	71.570.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	518.647.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	100 Persen	680.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	99.996.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	99.999.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	17.194.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPTSP	1 Paket	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan			45 Laporan	301.457.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	50 Laporan	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	561.594.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	100 Persen	900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	90 Unit			90 Unit	561.594.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	90 Unit	900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	1.048.067.989,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	100 Persen	1.210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	9.906.029,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawan DPMPTSP	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.038.161.960,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawan DPMPTSP	12 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 Persen			100 Persen	511.208.162,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawan DPMPTSP	100 Persen	640.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	31 Unit			31 Unit	270.842.089,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	31 Unit	380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	37 Unit			37 Unit	50.186.073,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	37 Unit	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	190.180.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Karyawan dan Karyawati DPMPSTSP	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang terimplementasi</i>	100 Persentase			100 Persentase	549.961.100,00						100 Persentase	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 Dokumen			2 Dokumen	199.961.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Calon Investor	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Calon Investor	- Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen			3 Dokumen	99.961.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Calon Investor	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Investasi yang terealisasi	100 Persen			100 Persen	349.999.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Calon Investor	100 Persen	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	149.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Calon Investor	- Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen			3 Dokumen	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Calon Investor	3 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-Nilai Realisasi Investasi	1.940 triliun			1.940 Triliun	359.675.909,00						1.940 triliun	550.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan	100 Persen			100 persen	359.675.909,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat dan Investor	100 Persen	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	359.675.909,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat dan Investor	1 Dokumen	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100 Persentase			100 Persentase	1.995.270.444,00						100 Persentase	2.550.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerima Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100 Persen			100 Persen	1.995.270.444,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Para Pelaku Usaha	100 Persen	2.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	41580 Pelaku Usaha			41.400 Pelaku Usaha	1.995.270.444,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Para Pelaku Usaha	41580 Pelaku Usaha	2.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	100 Persentase			100 Persentase	184.764.600,00						100 Persentase	500.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	6 Dokumen			1 Dokumen	184.764.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai DPMPTSP Kota Bogor	6 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen			1 Dokumen	184.764.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai DPMPSTSP Kota Bogor	6 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA						106.609.865.096,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						91.920.776.700,00							0,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						91.920.776.700,00							0,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase kepatuhan anggaran	100 persen 89,75 Nilai 89,75 Nilai 90,75 Nilai 97 persen 23,98 Nilai 13 Nilai 26,82 Nilai 95 persen 94 persen 100 persen 100 persen 27.34 point 89,39 Nilai			26,55 Nilai 27,01 Nilai 100 persen 27.01 point 97 persen 12,48 Nilai 23,75 Nilai 88,38 Nilai 89,5 Nilai 90,5 Nilai 94 persen 95 persen	260.000.000,00						100 persen 89,75 Nilai 89,75 Nilai 90,75 Nilai 97 persen 23,98 Nilai 13 Nilai 26,82 Nilai 95 persen 94 persen 100 persen 100 persen 27.34 point 89,39 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100 persen			100 persen	260.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	260.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda pelopor yang Berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional Presentase organisasi kepemudaan yang aktif Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	22 Persentase 2 Persentase 35 Persentase 22 Persentase 2,18 Persentase 2 Persentase 35 Persentase 2,18 Persentase			30 Persentase 4 Persentase 21,18 Persentase 2,175 Persentase	1.653.092.000,00						22 Persentase 4 Persentase 35 Persentase 22 Persentase 2,18 Persentase 4 Persentase 35 Persentase 2,18 Persentase	0,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	100 persen			100 persen	1.153.092.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	8 Dokumen			1 Dokumen	65.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	7 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	600 Orang			300 Orang	255.236.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	600 Orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	600 Orang			450 Orang	343.272.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	600 Orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang			30 Orang	89.583.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	30 Orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit			2 Unit	400.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	1 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang terbina	78 OKP			78 OKP	500.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	78 OKP	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i>	6047 Orang			6047 Orang	500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda Kota Bogor	6047 orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase Pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional atau Internasional Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar</i>	55 Persenta se 50 Persenta se 33 Persenta se 55 Persenta se			50 Persentase 80 Persentase	89.017.684.700,00						55 Persenta se 50 Persenta se 33 Persenta se 55 Persenta se	0,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan</i>	100 persen			100 persen	688.999.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota</i>	1 Unit			5 Unit	400.999.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	5 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	288.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	2 kejuaraan			2 kejuaraan	2.153.865.700,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 kejuaraan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			<i>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota</i>	350 Orang			350 Orang	2.153.865.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	350 Orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi	250 medali			50 medali	30.788.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	Olahragawan Kota Bogor	250 medali	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah										Pelayanan Publik	Tata Kelola Pelayanan Publik			
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang			300 Orang	149.325.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pelayanan Publik - Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola	Olahragawan Kota Bogor	300 Orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota										Pelayanan Publik	Pelayanan Publik			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	350 Orang			500 Orang	30.639.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	Olahragawan Kota Bogor	350 Orang	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Penyelenggaraan kegiatan keolahrgaan	100 %			100 %	55.386.495.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik - Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 %	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi											Tata Kelola Pelayanan Publik			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan			2 Laporan	1.150.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen			2 Dokumen	550.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	19 Unit			19 Unit	53.686.495.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	6 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 Persentase			100 Persentase	990.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	100 persen			100 persen	990.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi			1 Organisasi	990.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Organisasi	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X	NON URUSAN						14.689.088.396,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.689.088.396,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase kepatuhan anggaran Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	100 persen 89,75 Nilai 89,75 Nilai 90,75 Nilai 97 persen 23,98 Nilai 13 Nilai 26,82 Nilai 95 persen 94 persen 100 persen 100 persen 27.34 point 89,39 Nilai			100 persen 27,01 Nilai 27.01 point 12,48 Nilai 23,75 Nilai 26,55 Nilai 88,38 Nilai 89,5 Nilai 90,5 Nilai 94 persen 95 persen 97 persen	14.689.088.396,00						100 persen 89,75 Nilai 89,75 Nilai 90,75 Nilai 97 persen 23,98 Nilai 13 Nilai 26,82 Nilai 95 persen 94 persen 100 persen 100 persen 27.34 point 89,39 Nilai	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	100 persen 100 persen			100 persen	89.983.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 persen 100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	17 Dokumen			5 Dokumen	4.984.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	4 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan			10 Laporan	84.998.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	10 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100% perse n			100% persen	8.848.317.442,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Di Dinas Pemuda dan Olahraga	100% perse n	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	56 Orang/bulan			52 Orang/bulan	8.848.317.442,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Di Dinas Pemuda dan Olahraga	56 Orang/bulan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persen			100 persen	1.078.048.834,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Laporan Paket	47.288.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Paket	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	90.665.734,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	6 Paket	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	40.249.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	3 Paket	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	75.710.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Paket	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	50.527.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Paket	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3 Laporan			3 Laporan	773.608.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	3 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD</i>	100 persen			100 persen	1.371.753.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	16 Unit			3 Unit	334.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	8 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit			3 Unit	132.248.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	3 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	46 Unit			44 Unit	904.704.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	46 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persen			100 persen	2.586.145.703,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			3 Laporan	1.539.842.728,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	3 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			3 Laporan	80.518.319,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	3 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	10 Laporan			7 Laporan	965.784.656,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	7 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBM</i>	100 persen			100 persen	714.840.117,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	3 Unit			3 Unit	195.120.117,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	3 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			2 Unit	519.720.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	0 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN						12.226.086.808,00							15.017.034.648,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.226.086.808,00							15.017.034.648,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.367.546.824,00							4.670.250.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai ketentuan Persentase kepatuhan anggaran Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	3.57 Indeks A Predikat			12.48 Nilai 21.97 Nilai 26.55 Poin 27.01 Poin 88.38 Nilai 88.75 Nilai 100 Nilai 92.25 Nilai 94 Persen 100 Persen 95 Persen	1.328.897.324,00						3.57 Indeks A Predikat	1.732.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional	100 Persen			100 Persen	1.328.897.324,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	100 Persen	1.732.250.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	508.661.108,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Laporan	878.800.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	820.236.216,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Laporan	853.450.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3) Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2) Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)</i>	0,0922 nilai 1 nilai 0,1166 nilai 1 Nilai 1 Nilai 1 Nilai 1 Nilai			1 Nilai 0,0914 Nilai 0,1143 Nilai 0,7933 Nilai	703.466.300,00						0,0922 nilai 1 nilai 0,1166 nilai 1 Nilai 1 Nilai 1 Nilai 1 Nilai	2.873.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perpustakaan yang aktif</i>	24 Perpustakaan			12 Perpustakaan	703.466.300,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	24 Perpustakaan	2.873.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	158 Perpustakaan			155 Perpustakaan	367.996.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	158 Perpustakaan	1.690.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4114 Eksemplar			4064 Eksemplar	335.470.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	4114 Eksemplar	1.183.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi	50 Persen			50 Persen	335.183.200,00						50 Persen	65.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	3.57 Indeks A Predikat			21.97 Nilai 26.55 Poin 27.01 Poin 88.38 Nilai 88.75 Nilai 92.25 Nilai 94 Persen 100 Persen 95 Persen 12.48 Nilai	9.291.056.384,00						3.57 Indeks A Predikat	9.595.884.648,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100 Persen			100 Persen	25.755.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	100 Persen	27.450.250,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			6 Dokumen	25.755.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	4 Dokumen	27.450.250,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100 Persen			100 Persen	7.269.453.884,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	100 Persen	7.425.336.543,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan			35 Orang/bulan	7.203.402.684,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	40 Orang/bulan	7.353.281.543,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			4 Laporan	66.051.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	4 Laporan	72.055.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Operasional perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	537.286.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	100 Persen	751.098.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	23.002.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Paket	28.965.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	38.563.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Paket	45.780.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	68.853.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Paket	73.458.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	31.715.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Paket	38.465.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	25.069.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Paket	30.778.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	350.083.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	12 Laporan	533.652.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</i>	100 Persen			88.38 Nilai	528.211.200,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	100 Persen	287.450.400,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125 Unit			1 Unit	130.221.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	125 Unit	134.450.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			16 Unit	397.989.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	20 Unit	153.000.400,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Dinas Arsip dan Perpustakaan berkondisi baik	83 Persen			82.14 Persen	930.348.900,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	83 Persen	1.104.549.455,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit			5 Unit	115.443.118,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	11 Unit	185.725.455,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			6 Unit	79.170.230,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	5 Unit	134.750.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 Unit			58 Unit	77.386.568,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	230 Unit	85.421.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	658.348.984,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	1 Unit	698.653.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	51.42 Persen			51.42 Persen	567.483.600,00						51.42 Persen	750.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang dilakukan audit yang bernilai baik	38 PD			35 OPD	419.323.600,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	38 PD	500.900.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	38000 Berkas			37500 Berkas	155.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	38000 Berkas	165.500.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	59065 Berkas			59060 Berkas	172.199.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	59065 Berkas	185.400.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	92.124.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	93,48 Nilai 85,99 Nilai 94,62 Nilai 93,71 Nilai 94 % 100 % 94 % 100 % 29,08 Nilai 95 % 100 % 30 Nilai 15,65 Nilai 11,53 Nilai			100 % 12.48 Nilai 21.97 Nilai 27,01 Nilai 26.55 Nilai 94 % 95 %	10.899.285.694,00						93,48 Nilai 85,99 Nilai 94,62 Nilai 93,71 Nilai 94 % 100 % 94 % 100 % 29,08 Nilai 95 % 100 % 30 Nilai 15,65 Nilai 11,53 Nilai	12.809.636.967,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %			100 %	1.499.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100 %	3.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	1.499.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	5 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100 % 100 %			100 % 98 %	8.192.142.377,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100 % 99 %	9.432.786.967,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan			37 Orang/bulan	8.133.666.177,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	36 Orang/bulan	9.362.786.967,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	58.476.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %			100 %	615.256.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100 %	1.385.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	109.752.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Paket	165.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	28.692.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Paket	31.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	13.946.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Dokumen	24.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	462.865.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Laporan	1.165.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 %			100 %	307.257.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100 %	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	307.257.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	1.038.411.521,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100 %	1.145.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	305.553.313,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Laporan	365.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	732.858.208,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Disparbud Kota Bogor	1 Laporan	780.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 %			100 %	744.718.296,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100 %	843.350.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			15 Unit	236.004.102,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	16 Unit	265.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit			0 Unit	75.197.194,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	85 Unit	175.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	433.517.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	2 Unit	403.350.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kontribusi event seni budaya dalam CoE	3 event			3 event	783.990.457,00						3 event	1.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek			10 Objek	70.075.800,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	pelaku seni dan masyarakat kota bogor	10 Objek	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9 Objek			10 Objek	70.075.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	pelaku seni dan masyarakat kota bogor	9 Objek	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	74 Kegiatan			34 Kegiatan	713.914.657,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	40 Kegiatan	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	- Objek			10 Objek	713.914.657,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	- Objek	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	10 Persentase			10 Persentase	64.399.770,00						10 Persentase	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	102 orang/lembaga			45 orang/lembaga	64.399.770,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	57 orang/lembaga	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga			5 Lembaga	64.399.770,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	7 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase status ODCB menjadi CB	10 %			10 %	480.360.000,00						10 %	520.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	38 Objek			3 Objek	95.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor	3 Objek	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	38 Objek			3 Objek	95.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor	3 Objek	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/ Kota yang Dikelola	37 Objek			37 Objek	385.360.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor	37 Objek	420.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	35 Objek			35 Objek	385.360.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor	35 Objek	420.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	55,71 %			55,71 %	494.666.000,00						55,71 %	5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke Museum	488.246 Orang			313.481 Orang	494.666.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor Kota Bogor	488.246 Orang	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			1 Unit	494.666.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor Kota Bogor	1 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.784.578.331,00							14.320.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.784.578.331,00							14.320.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi	1 Destinasi			1 Destinasi	986.492.780,00						1 Destinasi	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi</i>	1 Destinasi			1 Destinasi	583.274.440,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	1 Destinasi	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>	2 Lokasi			1 Lokasi	199.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	1 Lokasi	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan			2 Laporan	383.274.640,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terfasilitasi	250 Pelaku Usaha			100 Pelaku Usaha	403.218.340,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	150 Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota														
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 Usaha			50 Usaha	403.218.340,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	50 Usaha	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Jumlah kunjungan wisatawan	23,45 % 7.742.899 O rang			23,44 % 7.038.999 Orang	1.149.999.651,00						23,45 % 7.742.899 O rang	12.900.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi kepariwisataan	35 Kegiatan			18 Kegiatan	1.149.999.651,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	17 Kegiatan	12.900.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen			1 Dokumen	332.904.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	6 Dokumen	3.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan			3 Kegiatan	732.111.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	3 Kegiatan	3.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Promosi			4 Promosi	84.984.251,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	4 Promosi	6.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	10 Persentase		10 Persentase		43.353.200,00						10 Persentase	150.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30 Laporan			15 Laporan	43.353.200,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku ekonomi kreatif	15 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	150 Produk			0 Produk	43.353.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku ekonomi kreatif	100 Produk	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	10 Persenta se 3,86 Persen tase 10 persenta se 3.86 Persen tase			10 persentase 3,62 Persentase	604.732.700,00						10 Persenta se 3,86 Persen tase 10 persenta se 3.86 Persen tase	670.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2 Laporan 120 Orang 120 Orang 2 Laporan			60 Orang 1 Laporan	604.732.700,00			-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan 60 Orang 60 Orang 1 Laporan	670.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan			1 Laporan	406.646.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	120 Orang			30 Orang	49.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	60 Orang	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	120 Orang			30 Orang	148.086.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	60 Orang	120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN						2.507.222.250,00							2.875.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						593.390.750,00							675.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						200.000.000,00							225.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase Sengketa Tanah yg Difasilitasi Sesuai SOP</i>	100 Persentase			100 Persentase	200.000.000,00						100 Persentase	225.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penanganan Aduan Masyarakat Mengenai Permasalahan Pertanahan</i>	100 Persent ase			100 Persentase	200.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat dan Kelurahan di Kota Bogor	100 Persent ase	225.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat dan Kelurahan di Kota Bogor	1 Dokumen	225.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						393.390.750,00							450.000.000,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Kelurahan yang Berpredikat Swasembada</i>	4,4 Persentase			4,4 Persentase	393.390.750,00						4,4 Persentase	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pendayagunaan Data Administrasi Kelurahan	100 Persentase			100 %	393.390.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Bogor	100 Persentase	450.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	68 Dokumen			68 Dokumen	105.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Bogor	68 Dokumen	150.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen			1 Dokumen	288.390.750,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Bogor	1 Dokumen	300.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.913.831.500,00							2.200.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.913.831.500,00							2.200.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	90 %			90 %	1.913.831.500,00						90 %	2.200.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai Dengan Ketentuan	100 Persentase 100 Persentase			100 % 100 Persentase	1.313.836.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	100 Persentase 100 Persentase	1.500.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen			3 Dokumen	255.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	3 Dokumen	300.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen			3 Dokumen	254.336.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	3 Dokumen	300.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	804.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Bogor	3 Dokumen	900.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	85 Persentase 85 Persentase			80 % 80 %	599.995.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dalam Negeri dan Luar Negeri	85 Persentase 85 Persentase	700.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	90 Dokumen			85 Dokumen	378.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dalam Negeri dan Luar Negeri	90 Dokumen	400.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	162.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dalam Negeri dan Luar Negeri	1 Dokumen	200.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>	1 Laporan			1 Laporan	59.995.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dalam Negeri dan Luar Negeri	1 Laporan	100.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						1.391.376.100,00							1.530.597.370,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.391.376.100,00							1.530.597.370,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.391.376.100,00							1.530.597.370,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</i>	100 Persentase			100 Persentase	1.391.376.100,00						100 Persentase	1.530.597.370,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan</i>	100 Persen tase			100 %	1.391.376.100,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	100 Persen tase	1.530.597.370,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>	12 Laporan			12 Laporan	507.020.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	12 Laporan	557.766.225,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	12 Laporan			12 Laporan	684.665.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	12 Laporan	753.171.650,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	12 Laporan			12 Laporan	199.690.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	12 Laporan	219.659.495,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						2.415.304.600,00							2.715.331.800,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.415.304.600,00							2.715.331.800,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.415.304.600,00							2.715.331.800,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>	100 Persentase			100 Persentase	2.415.304.600,00						100 Persentase	2.715.331.800,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum</i>	100 Persent ase 100 Persent ase			100 %	2.415.304.600,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur dan Masyarakat	100 Persent ase 100 Persent ase	2.715.331.800,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>	1100 Dokumen			400 Dokumen	771.068.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur dan Masyarakat	600 Dokumen	871.090.700,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	70 Kasus			30 Kasus	1.348.778.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur dan Masyarakat	40 Kasus	1.448.783.300,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	225 Dokumen			100 Dokumen	295.457.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur dan Masyarakat	125 Dokumen	395.457.800,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
		BAGIAN ORGANISASI						924.607.800,00							1.500.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan			4 Laporan	125.999.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	4 Laporan	250.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6 Dokumen			6 Dokumen	103.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	6 Dokumen	150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						29.250.030.551,00							32.175.046.479,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						29.250.030.551,00							32.175.046.479,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						29.250.030.551,00							32.175.046.479,00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Penduduk Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS) Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Yang Mendapat Bantuan Sosial (berdasarkan data P3KE desil 1) Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 2500 Orang 100 Persent ase 85 Persenta se 90 Persenta se 90 Persenta se 6500 Orang			3000 Orang 1000 Orang 87 Orang 87 Persentase	29.250.030.551,00							90 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 1500 Orang 100 Persent ase 85 Persenta se 90 Persenta se 90 Persenta se 3500 Orang	32.175.046.479,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kebijakan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang di implementasikan Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	12 Dokumen 6 Dokumen			3 Dokumen 6 Dokumen	29.250.030.551,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	6 Dokumen 3 Dokumen	32.175.046.479,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	89.25 Nilai 89.39 Nilai 89.39 Nilai 87.87 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se "e 95 P e r tase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 18.75 Nilai 11.74 Nilai 26 Nilai 27.30 Poin 63.9 Persen tase 83.33 Perse ntase 83.33 Perse ntase 91.67 Perse ntase			11.48 Poin 18.55 Poin 25.88 Poin 27.25 Poin	169.980.200,00						89.25 Nilai 89.39 Nilai 89.39 Nilai 87.87 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se "e 95 P e r tase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 100 Persent ase 18.75 Nilai 11.74 Nilai 26 Nilai 27.30 Poin 63.9 Persen tase 83.33 Perse ntase 83.33 Perse ntase 91.67 Perse ntase	185.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang Disusun Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100 Persent ase 100 Persent ase			100 % 100 %	169.980.200,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Bogor	100 Persent ase 100 Persent ase	185.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			5 Dokumen	79.991.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Bogor	4 Dokumen	90.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 Laporan	89.989.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Bogor	7 Laporan	95.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	79.30 Perse ntase 80.55 Perse ntase 75 Persenta se 67,5 Nilai 74 Persenta se 18.30 Perse ntase 100 Percent ase			100 Persentase 65 Persentase	234.999.900,00						79.30 Perse ntase 80.55 Perse ntase 75 Persenta se 67,5 Nilai 74 Persenta se 18.30 Perse ntase 100 Percent ase	275.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat waktu	100 Percent ase			100 %	234.999.900,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Seluruh Perangkat Daerah Kota Bogor	100 Percent ase	275.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan			4 Laporan	75.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Seluruh Perangkat Daerah Kota Bogor	4 Laporan	100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan			4 Laporan	159.999.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Seluruh Perangkat Daerah Kota Bogor	4 Laporan	175.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN UMUM						84.392.479.594,00							70.581.470.525,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						84.392.479.594,00							70.581.470.525,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						84.392.479.594,00							70.581.470.525,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	89.25 Nilai 89.39 Nilai 89.39 Nilai 87.87 Nilai 100 Persentase 94 Persentase "e 95 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 18.75 Nilai 11.74 Nilai 26 Nilai 27.30 Poin 63.9 Persentase 83.33 Persentase 83.33 Persentase 91.67 Persentase			100 Persentase 94 Persentase	84.392.479.594,00						89.25 Nilai 89.39 Nilai 89.39 Nilai 87.87 Nilai 100 Persentase 94 Persentase "e 95 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 18.75 Nilai 11.74 Nilai 26 Nilai 27.30 Poin 63.9 Persentase 83.33 Persentase 83.33 Persentase 91.67 Persentase	70.581.470.525,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan Sesuai Standar Akuntansi	100 Persentase			100 %	45.131.289.178,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persentase	45.119.397.178,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan			176 Orang/bulan	44.959.578.178,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	200 Orang/bulan	44.959.578.178,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan			2 Laporan	171.711.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	14 Laporan	159.819.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 %	499.980.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	100 Persent ase	500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			6 Paket	499.980.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	6 Paket	500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 %	5.702.751.100,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	100 Persent ase	620.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	179.980.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	1 Paket	190.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	749.945.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	1 Paket	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			15 Paket	2.299.162.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	9 Paket	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	424.248.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	2 Paket	430.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			4 Laporan	2.049.414.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	4 Laporan	0,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100 Persentase			100 %	6.573.177.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persentase	7.448.181.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	14 Unit			5 Unit	3.606.288.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Unit	4.568.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit			9 Unit	328.842.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	5 Unit	690.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit			89 Unit	1.160.878.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Unit	1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit			128 Unit	1.477.168.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	28 Unit	1.190.181.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persent ase			100 %	8.888.267.591,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	100 Persent ase	7.938.973.304,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			2 Laporan	90.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Laporan	90.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.519.412.197,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Laporan	2.520.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			9 Laporan	949.882.090,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	1 Laporan	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	5.328.973.304,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	12 Laporan	5.328.973.304,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Berkondisi Baik</i>	100 Persent ase			100 %	8.085.737.924,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	100 Persent ase	5.470.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	11 Unit			21 Unit	1.323.739.391,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	11 Unit	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	34 Unit			20 Unit	1.292.722.376,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	34 Unit	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	100 Unit			415 Unit	199.983.024,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	100 Unit	200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1800 Unit			1521 Unit	1.349.934.533,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	1800 Unit	1.350.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit			6 Unit	3.469.994.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	12 Unit	3.470.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit			6 Unit	449.363.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah di Lingkuap Sekretariat Dan Rumah Dinas Jabatan	3 Unit	450.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	100 Persentase			100 %	3.911.071.601,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persentase	3.484.919.043,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	1.248.654.643,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Orang/Bulan	1.248.654.643,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	29 Paket			1 Paket	600.791.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	29 Paket	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	8 Orang			8 Orang	92.969.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	8 Orang	80.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ lebih dari 25 poin	75 Persentase			75 Persentase	1.330.191.225,00						75 Persentase	1.600.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ	3,5 Nilai			3,45 poin	1.330.191.225,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Pengadaan	3,5 Nilai	1.600.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen			12 Dokumen	730.191.225,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Pengadaan	12 Dokumen	900.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen			12 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku Pengadaan	12 Dokumen	350.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen			12 Dokumen	38.587.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	16 Dokumen	35.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	119.999.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Dokumen	120.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7.061.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Laporan	7.062.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen			2 Dokumen	22.339.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	2 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	158.657.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	158.661.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	5.005.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Dokumen	5.008.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prosentase Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bogor yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku</i>	100 Persen			100 Persen	570.110.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 Persen	507.997.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	6.084.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Dokumen	6.084.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	64 Orang			32 Orang	564.026.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	64 Orang	501.913.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah</i>	100 Persen			100 Persen	2.441.490.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 Persen	2.510.167.882,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	659.087.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Paket	659.090.310,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	178.911.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Paket	179.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	309.949.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Paket	309.965.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket			1 Paket	299.931.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	3 Paket	300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	30 Dokumen			1 Dokumen	299.235.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	30 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan			12 Laporan	400.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	463.251.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen			12 Dokumen	48.860.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Dokumen	48.861.172,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	45.515.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</i>	100 %			100 %	1.067.556.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 %	1.107.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit			20 Unit	274.693.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	2 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit			20 Unit	792.862.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	2 Unit	907.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 Persen			100 %	10.455.144.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 Persen	10.237.580.868,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan			12 Laporan	7.715.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	7.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	3.004.725.640,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	3.004.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	160.568.466,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	144.368.420,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7.282.135.208,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	7.081.412.448,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMĐ	100 %			100 Persen	3.922.236.472,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 %	3.961.304.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit			26 Unit	1.366.473.636,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	26 Unit	1.361.304.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			20 Unit	758.811.836,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	6 Unit	800.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	777.720.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Unit	800.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			20 Unit	1.019.230.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Unit	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Kesejahteraan Anggota DPRD	100 Persen			100 Persen	49.161.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 Persen	49.338.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan			50 Orang/Bulan	48.200.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	50 Orang/Bulan	48.200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket			4 Paket	761.250.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	5 Paket	938.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang			50 Orang	200.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	50 Orang	200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi DPRD	100 Persen			100 Persen	4.218.487.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 Persen	3.727.466.671,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan			12 Laporan	1.081.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	915.107.990,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan			12 Laporan	2.893.001.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	12 Laporan	2.568.072.681,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket			12 Paket	244.286.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	4 Paket	244.286.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang difasilitasi sesuai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan	100 %			100 %	76.832.120.706,00						100 %	58.756.064.549,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Raperda Yang Disetujui	100 %			100 %	9.719.969.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	100 %	7.429.417.469,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			2 Dokumen	627.471.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	421.406.686,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen			15 Dokumen	7.127.554.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	6.094.141.861,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen			4 Dokumen	1.964.944.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	4 Dokumen	913.868.922,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100 %			100 %	2.028.439.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	100 %	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	676.609.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	666.915.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	684.915.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Penggunaan Anggaran yg ditindaklanjuti</i>	100 %			100 %	8.897.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	100 %	6.551.036.241,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	665.815.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	263.981.241,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	7.634.282.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	12 Dokumen	6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	597.231.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	287.055.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang tercapai</i>	100 %			100 %	7.820.433.606,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	100 %	7.351.473.802,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	6 Dokumen			6 Dokumen	3.724.702.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	6 Dokumen	2.794.363.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	20 Orang			13 Orang	27.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	20 Orang	15.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	48 Orang			8 Orang	606.558.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	48 Orang	558.558.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	340.190.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	12 Dokumen	861.052.902,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	35.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	12 Dokumen	35.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	3.086.983.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	12 Dokumen	3.086.999.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase Dokumen Aspirasi Masyarakat</i>	100 %			100 %	2.940.556.000,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	100 %	2.940.556.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	30.556.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen	30.556.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	150 Dokumen			150 Dokumen	2.910.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	150 Dokumen	2.910.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase dokumen kode etik DPRD serta pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik DPRD</i>	100 %			100 %	2.722.524.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	100 %	1.054.225.525,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	250.832.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Dokumen	250.832.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.471.692.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 Laporan	803.393.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi</i>	100 %			100 %	42.702.870.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat Kota Bogor	100 %	32.379.355.512,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan			25 Laporan	11.507.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapperida Kota Bogor	25 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	99 % 100 %			100 % 98 %	14.123.017.907,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	99 % 100 %	16.390.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan			47 Orang/bulan	14.026.207.907,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	49 Orang/bulan	16.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan			18 Laporan	96.810.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	18 Laporan	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	149.999.826,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang			90 Orang	149.999.826,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	90 Orang	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	1.392.425.738,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	1.735.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	11.397.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	124.888.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	36.636.438,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	17.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	34.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Paket	43.110.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket			3 Paket	15.072.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Paket	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	24 Laporan			12 Laporan	1.169.431.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Laporan	1.505.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD</i>	100 %			100 %	837.196.400,00			Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	616.834.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	40 Unit			8 Unit	61.943.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	20 Unit	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit			17 Unit	158.419.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	1.176.789.786,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	1.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan			12 Laporan	160.386.995,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan			12 Laporan	1.016.402.791,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 %			100 %	712.117.233,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	853.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit			32 Unit	306.071.149,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	32 Unit	266.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	362 Unit			181 Unit	150.942.084,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	181 Unit	87.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit			1 Unit	255.104.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbamg (Per 10000 penduduk) Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah</i>	30 Rasio 80 Persenta se 38 Persenta se 100 Percent ase			100 Persentase 27,5 Rasio 37.5 Persentase 75 Persentase	1.974.842.500,00						30 Rasio 80 Persenta se 38 Persenta se 100 Percent ase	2.525.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik pada tahapan penyusunan RPJPD,RPD,RPJMD dan RKPD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi</i>	100 Percent ase 3250 Orang			3050 Orang 100 Persentase	1.524.842.500,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	100 Percent ase 3250 Orang	1.550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	3 Berita Acara			2 Berita Acara	149.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Berita Acara	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	2 Berita Acara			1 Berita Acara	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Berita Acara	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	3 Berita Acara			2 Berita Acara	399.842.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	1 Berita Acara	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	5 Dokumen			3 Dokumen	825.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Bogor	2 Dokumen	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola</i>	647 Data			647 Data	200.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	647 Data	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	54.166.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 dokumen			1 Dokumen	145.833.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	25 Indikator 45 Program			24 Indikator 44 Program	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	25 Indikator 45 Program	675.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Kerja Sama			1 Kerja Sama	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Kerja Sama	525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			3 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan			2 Laporan	7.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			4 Dokumen	737.287.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	100 % 44 Indikator 100 %			42 Indikator 100 % 100 %	237.999.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 44 Indikator 100 %	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			1 Dokumen	124.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
-			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18 Laporan			9 laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan			1 Laporan	102.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			2 Dokumen	799.999.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan			1 Laporan	77.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.725.000.000,00							1.300.000.000,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	50 Persenta se 41.66 Perse ntase 10 Persenta se 100 Persent ase			100 Persentase 30 Persentase 36.11 Persentase 10 Persentase	1.725.000.000,00							50 Persenta se 41.66 Perse ntase 10 Persenta se 100 Persent ase	1.300.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	100 %			90 %	775.000.000,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	100 %	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	0 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	0 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	10 Laporan			5 Laporan	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	5 Laporan	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>	2 Laporan			1 Laporan	75.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan</i>	100 %			90 %	400.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	-	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						62.877.325.883,00							37.099.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	100 % 26,4 Poin 85,97 % 12,5 Poin 21,8 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 99,4 Poin 99,4 Poin 99,4 Poin 99,4 Poin 27,2 Poin			100 % 12,4 Poin 21,7 Poin 26,2 Poin 27,1 Poin 85,97 % 99,3 Poin	18.631.347.477,00						100 % 26,4 Poin 85,97 % 12,5 Poin 21,8 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 99,4 Poin 99,4 Poin 99,4 Poin 99,4 Poin 27,2 Poin	18.137.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup BKAD Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di Lingkup BKAD Persentase Standarisasi Mutu BKAD	95 % 87,90 Poin 100 % 100 %			87,40 Poin 95 % 100 % 100 %	232.097.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	95 % 87,90 Poin 100 % 100 %	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	232.097.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan laporan barang pengguna Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100 % 100 % 95 %			100 % 100 % 95 %	12.419.666.521,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 % 95 %	12.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	150 Orang/bulan			51 Orang/bulan	12.384.345.521,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	54 Orang/bulan	12.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	36 Laporan			12 Laporan	35.321.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah</i>	100 % 99,4 Poin			99,3 Poin 100 %	2.634.947.665,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 % 99,4 Poin	2.917.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	19.490.330,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	723.842.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	470.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	255.647.335,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	122.950.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			12 Dokumen	13.946.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	436.922.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	1.062.149.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepatuhan penggunaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 % 100 %			100 % 100 %	1.110.587.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	319.574.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	2 Unit	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			5 Unit	791.012.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1 Unit	150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	807.462.256,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	820.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	187.965.572,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	170.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	619.496.684,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik Persentase Kepatuhan Penghapusan BMD	100 % 100 %			100 % 100 %	1.426.585.935,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	1.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit			7 Unit	637.923.752,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	7 Unit	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit			35 Unit	314.074.783,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	35 Unit	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			2 Unit	474.587.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	2 Unit	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	7.220.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	56.020.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	52.810.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	168.519.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Dokumen	175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	18 Dokumen			6 Dokumen	184.305.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	6 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	91.180.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase skor rata-rata indikator dimensi penyerapan anggaran Transparansi SK Wali Kota tentang pejabat pengelola keuangan daerah dan laporan arus kas	93 % 100 %			93 % 100 %	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	93 % 100 %	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang			45 Orang	200.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	65 Orang	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penandatanganan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu Persentase penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan juli Persentase Transparansi informasi perkada tentang kebijakan akuntansi, realisasi anggaran seluruh SKPD, realisasi anggaran PPKD, informasi neraca, CaLK, LK BUMD, perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan opini BPK	100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 %	482.228.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	527.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	36 Laporan			12 Laporan	210.114.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Laporan	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	21 Laporan			7 Laporan	228.610.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7 Laporan	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	43.504.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Dokumen	27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap APBD Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi investasi daerah</i>	50 % 100 %			50 % 100 %	32.302.838.406,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	50 % 100 %	10.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah</i>	3 Laporan			1 Laporan	350.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	3 Laporan			1 Laporan	286.688.406,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	8.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	3 Laporan			1 Laporan	1.665.750.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	3 Laporan			1 Laporan	30.000.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Ketepatanwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BAREKON Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik</i>	39 Persentase 10 Persentase 100 % 10 % 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 39 % 100 %			100 % 34 % 7 % 83 %	10.534.615.400,00						39 Persentase 10 Persentase 100 % 10 % 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 39 % 100 %	7.002.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Pengamanan Aset melalui Pengasuransian atas bangunan dan kendaraan Persentase Pengamanan Aset melalui Pensertipikatan Tanah Persentase tersusunnya laporan BMD semester dan tahunan tepat waktu Persentase tersusunnya RKBMD tepat waktu</i>	100 % 39 % 100 % 100 %			100 % 34 % 100 % 100 %	10.534.615.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	100 % 39 % 100 % 100 %	7.002.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	15 Dokumen			7 Dokumen	518.157.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	7 Dokumen	672.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	24 Laporan			8 Laporan	477.582.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	8 Laporan	675.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	562 Laporan			2 Laporan	8.659.850.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2 Laporan	5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	48 Laporan			16 Laporan	218.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	16 Laporan	270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	69 Dokumen			1 Dokumen	327.804.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	270 Orang			54 Orang	333.220.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	54 Orang	135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						57.433.618.241,00							82.948.824.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						57.433.618.241,00							82.948.824.000,00	
	5.02	KEUANGAN						57.433.618.241,00							82.948.824.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di lingkungan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Pelayanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	96.95 Nilai 94 % 95 % 100 % 94 % 100 % 100 % 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,38 Nilai 89,25 Nilai 87,87 Nilai 93.67 Nilai			100 % 12.48 Nilai 21,37 Nilai 27.01 Nilai 26,55 Nilai 90.33 Nilai 94 % 96.95 Nilai 94.47 Nilai 95 %	51.735.298.905,00						96.95 Nilai 94 % 95 % 100 % 94 % 100 % 100 % 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,38 Nilai 89,25 Nilai 87,87 Nilai 93.67 Nilai	69.641.976.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	100 % 100 %			100 % 100 %	17.747.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	100 % 100 %	83.721.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	2.211.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	1 Dokumen	8.576.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			4 Laporan	12.989.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	3 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	2.547.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	2 Laporan	5.145.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	100 % 95 %			100 % 95 %	40.851.835.465,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	100 % 95 %	58.282.915.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan			86 Orang/bulan	40.819.333.465,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	94 Orang/bulan	58.219.390.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2.211.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	1 Laporan	4.288.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan			2 Laporan	30.291.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	2 Laporan	59.237.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	2.252.629.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	100 %	3.525.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	51.180.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	1 Paket	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	235.833.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	1 Paket	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	89.169.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	1 Paket	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	150.233.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	1 Paket	75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	252.521.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	1 Paket	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.473.690.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	1 Laporan	2.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMĐ	100 %			100 %	3.870.550.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	100 %	498.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit			24 Unit	1.290.648.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	0 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			120 Unit	184.623.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	50 Unit	238.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			49 Unit	2.395.278.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Bapenda Kota Bogor	12 Unit	260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	2.943.772.873,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	100 %	4.875.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	7.438.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	1.527.173.249,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	1 Laporan	1.750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1.409.161.424,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Bapenda Kota Bogor	1 Laporan	3.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 %			100 %	1.798.763.967,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inventaris Bapenda Kota Bogor	100 %	2.376.590.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit			49 Unit	421.189.951,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inventaris Bapenda Kota Bogor	61 Unit	626.590.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit			299 Unit	484.008.139,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inventaris Bapenda Kota Bogor	320 Unit	700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	392.312.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inventaris Bapenda Kota Bogor	1 Unit	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	501.253.877,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inventaris Bapenda Kota Bogor	2 Unit	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Target Penerimaan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah	33,85 % 1.201.601.310.000,00 Rupiah			1.144.382.200.000,00 Rupiah 27,47` %	5.698.319.336,00						33,85 % 1.201.601.310.000,00 Rupiah	13.306.848.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Nilai Pajak Daerah Target Penerimaan Pajak Daerah	1.201.601.31 0.000,00 Ru piah 100 %			100 % 1.144.382.20 0.000,00 Rupiah	5.698.319.336,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1.201.601.31 0.000,00 Ru piah 100 %	13.306.848.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	170.675.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	2.428.797.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	1.475.039.498,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Laporan	2.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit			4 Unit	1.524.662.524,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Unit	2.287.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	80.794.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Laporan	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	877.037.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Laporan	3.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5 Obyek Pajak			5 Obyek Pajak	316.732.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	5 Obyek Pajak	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	107.120.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	205.699.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan			1 Layanan	77.543.764,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Layanan	270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	475.987.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	708.546.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	529.527.750,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan			1 Laporan	63.198.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	1 Laporan	206.706.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						37.587.255.357,00							38.833.235.011,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.650.000.715,00							5.770.980.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						2.269.200.715,00							2.624.180.000,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	2.269.200.715,00						-	2.624.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	95 % 95 % 450 Formasi			-	1.159.200.715,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	95 % 95 % 450 Formasi	1.164.180.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	2 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	344 Dokumen			319 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	344 Dokumen	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga			1 Lembaga	300.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Lembaga	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	267.200.715,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	12 Dokumen	267.180.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>	65 Orang			65 Orang	300.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	65 Orang	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin Persentase wajib lapor LHKPN di Llingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor</i>	344 orang 100 % 95 % 0.05 %			319 orang 95 % 0.05 % 100 %	210.000.000,00			Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	344 orang 100 % 95 % 0.05 %	210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				5 Laporan	80.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>	400 Orang			400 Orang	50.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	400 Orang	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8000 Orang			8000 Orang	80.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	8000 Orang	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.380.800.000,00							3.146.800.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	43 poin			43 poin	2.380.800.000,00						43 poin	3.146.800.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	1.30 %			1.30 % 76.60 %	1.230.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1.30 %	1.630.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	30.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Dokumen	30.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang			200 Orang	1.200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	200 Orang	1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya/Jumlah ASN Kota Bogor x 100%	1.30 %			1.30 %	1.150.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1.30 %	1.516.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	16.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Dokumen	16.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan			1 Laporan	1.134.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Laporan	1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	NON URUSAN						32.937.254.642,00							33.062.255.011,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						32.937.254.642,00							33.062.255.011,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah Nilai Sakip Aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah Tranaparansi pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	- 96,95 Nilai 94 % 95 % 100 % 94 % 100 % 100 % 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,38 Nilai 89,25 Nilai 87,87 Nilai 93.67 Nilai			100 % A (88) Poin 12 Poin 1 Inovasi 20,5 Poin 27 Poin 28,5 Poin 94 % 95 %	32.937.254.642,00						- 96,95 Nilai 94 % 95 % 100 % 94 % 100 % 100 % 27,34 Nilai 26,82 Nilai 13 Nilai 21,38 Nilai 89,25 Nilai 87,87 Nilai 93.67 Nilai	33.062.255.011,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %			100 %	125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	100 %	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			6 Laporan	120.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	6 Laporan	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %			100 %	28.668.486.235,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	100 %	28.668.486.235,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan			95 Orang/bulan	28.600.026.235,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	95 Orang/bulan	28.600.026.235,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	68.460.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Laporan	68.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor</i>	100 %			100 %	2.086.212.618,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	100 %	2.211.212.618,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	151.503.360,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Paket	176.503.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	86.723.670,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	3 Paket	86.723.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	102.040.950,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Paket	102.040.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	1.745.944.638,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	12 Laporan	1.845.944.638,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100 %			100 %	741.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	100 %	741.325.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	116.325.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Unit	116.325.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	38 Unit			38 Unit	425.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	38 Unit	425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	1 Unit	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	749.471.158,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	100 %	749.471.158,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	318.735.774,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	12 Laporan	318.735.774,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	430.735.384,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	12 Laporan	430.735.384,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	566.759.631,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	100 %	566.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	6 Unit			6 Unit	184.230.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	6 Unit	184.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	147 Unit			167 Unit	182.529.631,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Kota Bogor	147 Unit	182.530.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			5 Laporan	225.355.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	100 % 100 %			100 %	19.880.400.003,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan			55 Orang/bulan	19.835.656.003,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	55 Orang/bulan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan			2 Laporan	44.744.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	884.752.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			60 Orang	884.752.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	60 Orang	0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	1.292.218.400,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket			60 Paket	159.277.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	60 Paket	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			48 Paket	76.322.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	48 Paket	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	632 Paket			632 Paket	44.008.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	632 Paket	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan			7 Laporan	912.544.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	7 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	100.066.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	90 %			90 %	417.620.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	90 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	219.727.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit			8 Unit	197.893.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	656.954.435,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	178.521.551,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	478.432.884,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik</i>	100 %			100 %	1.082.154.303,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	7 Unit			7 Unit	270.380.561,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	7 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit			89 Unit	66.462.542,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	20 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	745.311.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal “20” Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	92 Persentase 75.4 Persentase 90.2 Persentase			70.63 Persentase 90.2 Persentase 90 Persentase	625.673.800,00						92 Persentase 75.4 Persentase 90.2 Persentase	0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal “20”	100 % 36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah 100 % 70,63 Persen	544.961.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 36 Perangkat Daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan			9 Laporan	151.654.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	36 Laporan			36 Laporan	35.596.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	36 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan			1 Laporan	118.881.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan			1 Kesepakatan	197.723.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Kesepakatan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen			4 Dokumen	41.106.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	100 %			100 %	80.712.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan			1 Laporan	53.195.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan			100 Laporan	27.517.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Capaian MCP KPK diatas rata-rata nasional Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPIP pada level 3 Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	15 Persenta se 90 Persenta se 88 Persenta se			87 Persentase 90 Persentase 10 Persentase	845.052.800,00						15 Persenta se 90 Persenta se 88 Persenta se	0,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Zona Integritas	10 Perangka t Daerah 36 Perangka t Daerah			36 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	845.052.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	10 Perangka t Daerah 36 Perangka t Daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah			36 perangkat daerah	333.959.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	36 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6 perangkat daerah			6 perangkat daerah	290.672.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	6 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan			2 Kegiatan	165.005.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Kegiatan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah			1 perangkat daerah	55.416.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BOGOR UTARA						22.184.453.609,00							22.869.211.760,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.600.000,00							0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6.600.000,00							0,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persen 100 Persen			100 Persen	6.600.000,00						100 Persen	0,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Tranparasnsi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana</i>	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n			100 Persen 26.52 Nilai 10.83 Nilai 99.72 Nilai 18.56 Nilai 27.54 Nilai 94 Persen 96.84 Persen 99.10 Nilai 99.18 Nilai 99.41 Nilai	21.263.455.486,00						27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n	22.019.211.760,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu Persentase Realiasai Fisik Kegiatan di Lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup Perangkat Daerah</i>	96.85 Perse ntase 100 Percent ase 100 Percent ase 95.78 Perse ntase			100 Persen 100 Persen 95.77 Persen 96.84 Persen	20.753.900,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	96.85 Perse ntase 100 Percent ase 100 Percent ase 95.78 Perse ntase	22.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	10.755.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	3 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	9.998.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan bulanan, Semseteran dan Tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95 Persentase 100 Persentase			100 Persen 95 Persen	15.989.383.526,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	95 Persentase 100 Persentase	16.090.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan			75 Orang/bulan	15.902.668.726,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	75 Orang/bulan	16.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.314.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara		10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	77.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persentase			100 Persentase	1.816.213.656,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	100 Persentase	2.015.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	10.335.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	9 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	921.619.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	9 Paket	1.100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	11.999.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	9 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	549.990.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	9 Paket	450.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	20.206.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	9 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	5.811.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	296.251.356,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase			100 Persen	2.273.398.536,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	100 Persentase	2.192.211.760,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	274.677.136,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	270.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan			52 Laporan	1.998.721.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	52 Laporan	1.922.211.760,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	100 Persentase			100 Persen	1.163.705.868,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	100 Persentase	1.700.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit			5 Unit	193.294.868,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	5 Unit	185.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	45 Unit			45 Unit	60.490.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	45 Unit	65.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	9 Unit			9 Unit	909.921.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	9 Unit	1.450.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan (Kumulatif Kelurahan) Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Pesentase Keterwakilan Kelompok Rentan dalam Musrenbang Kecamatan (Kumulatif Kelurahan)</i>	100 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 100 % 100 Persentase 1 Persentase 20 % 2 Persentase 100 % 2 % 1 % 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			100 Persentase 20 % 20 Persen 1 % 2 Persen	279.398.756,00						100 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 100 % 100 Persentase 1 Persentase 20 % 2 Persentase 100 % 2 % 1 % 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	199.399.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan 1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			1 Laporan	199.399.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan (7 Pelayanan)	100 Persentase 100 Persentase			100 Persen	79.998.956,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	100 Persentase 100 Persentase	60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	74.999.956,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	4.999.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	55.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndan ngan sosial	Kecamatan Bogor Utara	1 Lembaga K emasyarakat an	55.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			1 Laporan	79.999.767,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndan ngan sosial	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan			1 Laporan	9.999.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndan ngan sosial	Kecamatan Bogor Utara	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persen 100 Persen			100 Persen	519.600.000,00						100 Persen	519.600.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan	100 Persen ase			100 Persen	519.600.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	100 Persen ase	519.600.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Dokumen			1 Dokumen	519.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	9 Dokumen	519.600.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						481.575.100,00							481.653.500,00	
	7.01	KECAMATAN						481.575.100,00							481.653.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n			100 Persen 26.52 Nilai 10.83 Nilai 99.72 Nilai 18.56 Nilai 27.54 Nilai 94 Persen 96.84 Persen 99.18 Nilai 99.41 Nilai	118.067.600,00						27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n	118.146.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	118.067.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	100 Persen	118.146.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket			1 Paket	1.784.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	9 Paket	1.784.400,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket			1 Paket	15.935.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	9 Paket	15.935.400,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	9 Paket			1 Paket	4.838.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	9 Paket	4.838.200,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket			1 Paket	89.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	9 Paket	89.400.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	6.109.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	9 Paket	6.188.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Persentase Keterwakilan Kelompok Rentan dalam Musrenbang Kelurahan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Musrenbang Kelurahan Persentase Keterwakilan Anak dalam Musrenbang Kelurahan	100 % 100 Persentase 2 % 1 Persentase 100 % 20 % 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 20 Persentase 100 Persentase			100 Persen 1 Persen 20 Persen 2 Persen	363.507.500,00						100 % 100 Persentase 2 % 1 Persentase 100 % 20 % 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 20 Persentase 100 Persentase	363.507.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase 100 Persentase			100 Persen	363.507.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	100 Persentase 100 Persentase	363.507.500,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	15.125.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.125.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit			3 Unit	303.382.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	8 Unit	303.382.500,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegal Gundil	27 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
		KELURAHAN BANTARJATI							910.927.300,00						907.319.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						395.400.000,00							395.400.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						395.400.000,00							395.400.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Keluraha yang Aktif	100 Persen			100 Persen	395.400.000,00						100 Persen	395.400.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan	100 Persen ase			100 Persen	395.400.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Bantarjati	100 Persen ase	395.400.000,00	KELURAHAN BANTARJATI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	7.778.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bantarjati	9 Paket	7.767.900,00	KELURAHAN BANTARJATI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	85.778.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bantarjati	9 Paket	84.766.200,00	KELURAHAN BANTARJATI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	4.791.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bantarjati	9 Paket	5.417.600,00	KELURAHAN BANTARJATI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang Kelurahan Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang Kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang Kelurahan	100 % 100 Persentase 2 % 1 Persentase 100 % 20 % 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 20 Persentase 100 Persentase			20 Persen 100 Persen 1 Persen 2 Persen	404.407.000,00						100 % 100 Persentase 2 % 1 Persentase 100 % 20 % 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 20 Persentase 100 Persentase	404.407.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	100 Persent ase 100 Persent ase			100 Persen	404.407.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Bantarjati	100 Persent ase 100 Persent ase	404.407.100,00	KELURAHAN BANTARJATI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	9.907.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Bantarjati	1 Lembaga K emasyarakat an	9.907.300,00	KELURAHAN BANTARJATI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	8 Unit			5 Unit	374.294.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Bantarjati	8 Unit	374.294.800,00	KELURAHAN BANTARJATI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	20.205.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Bantarjati	27 Pokmas / Ormas	20.205.000,00	KELURAHAN BANTARJATI
		KELURAHAN CIBULUH						858.061.500,00							858.061.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						373.201.100,00							373.201.100,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						373.201.100,00							373.201.100,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 persen			100 Persen 26.52 Nilai 10.83 Nilai 99.72 Nilai 18.56 Nilai 27.54 Nilai 94 Persen 96.84 Persen 99.10 Nilai 99.18 Nilai 99.41 Nilai	111.001.100,00						27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 persen	111.001.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persen ase			100 Persen	111.001.100,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Cibuluh	100 Persen ase	111.001.100,00	KELURAHAN CIBULUH
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	3.086.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Cibuluh	9 Paket	3.086.000,00	KELURAHAN CIBULUH
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	7.567.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Cibuluh	9 Paket	7.567.200,00	KELURAHAN CIBULUH
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			2 Paket	3.563.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Cibuluh	9 Paket	3.563.700,00	KELURAHAN CIBULUH
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	91.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Cibuluh	9 Paket	91.425.000,00	KELURAHAN CIBULUH
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang Kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang Kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang Kelurahan	100 % 100 Persen ase 2 % 1 Persentas e 100 % 20 % 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persen ase 20 Persenta se 1 Persentas e 2 Persentas e 20 Persenta se 100 Persen ase			100 Persen 20 Persen 1 Persen 2 Persen	484.860.400,00						100 % 100 Persen ase 2 % 1 Persentas e 100 % 20 % 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persen ase 20 Persenta se 1 Persentas e 2 Persentas e 20 Persenta se 100 Persen ase	484.860.400,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persen ase 100 Persen ase			100 Persen	484.860.400,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kelurahan Cibuluh	100 Persen ase 100 Persen ase	484.860.400,00	KELURAHAN CIBULUH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			3 Lembaga K emasyarakat an	11.038.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kelurahan Cibuluh	1 Lembaga K emasyarakat an	11.038.000,00	KELURAHAN CIBULUH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit			3 Unit	440.747.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kelurahan Cibuluh	8 Unit	440.747.400,00	KELURAHAN CIBULUH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, trivulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n			100 Persen 99.41 Nilai 26.52 Nilai 10.83 Nilai 99.72 Nilai 18.56 Nilai 27.54 Nilai 94 Persen 96.84 Persen 99.10 Nilai 99.18 Nilai	111.420.000,00						27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n	111.650.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persen ase			100 Persen	111.420.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Halang	100 Persen ase	111.650.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	1.363.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Halang	9 Paket	1.400.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	14.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Halang	9 Paket	14.800.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	3.853.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Halang	9 Paket	3.900.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	87.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Halang	9 Paket	87.150.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	4.304.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Halang	9 Paket	4.400.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	23.424.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Ciparigi	9 Paket	24.000.000,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	10.593.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Ciparigi	9 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	67.320.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Ciparigi	9 Paket	67.500.000,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	7.236.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Ciparigi	9 Paket	7.500.000,00	KELURAHAN CIPARIGI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Keluraha yang Aktif</i>	100 Persen			100 Persen	274.800.000,00						100 Persen	274.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan</i>	100 Persen ase			100 Persen	274.800.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciluar	100 Persen ase	274.800.000,00	KELURAHAN CILUAR
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	9 Dokumen			1 Dokumen	274.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciluar	9 Dokumen	274.800.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						452.935.000,00							457.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						452.935.000,00							457.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kepatuhan Anggaran Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan</i>	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai			-	98.970.000,00					-	101.500.000,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		18,57 Nilai 100 persen 100,34 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 persen			-	98.970.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Persen ase	101.500.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket			1 Paket	1.119.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN CILUAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	13.962.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	1.122.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	77.790.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Paket	78.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	4.977.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN CILUAR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek Penanganan Pengaduan	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 persen			100 Persen 99.41 Nilai 26.52 Nilai 10.83 Nilai 18.56 Nilai 99.72 Nilai 27.54 Nilai 94 Persen 96.84 Persen 99.10 Nilai 99.18 Nilai	112.861.200,00						27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 persen	113.029.800,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persentase			100 Persen	112.861.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tanah Baru	100 Persentase	113.029.800,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	1.598.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tanah Baru	9 Paket	1.689.000,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	14.189.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Tanah Baru	9 Paket	14.244.000,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	1.134.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Tanah Baru	9 Paket	1.158.300,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	86.820.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Tanah Baru	9 Paket	86.820.000,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	9.118.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Tanah Baru	9 Paket	9.118.500,00	KELURAHAN TANAH BARU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang Kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang Kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang Kelurahan	100 % 100 Persentase 2 % 1 Persentase 100 % 20 % 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 20 Persentase 100 Persentase			100 Persen 20 Persen 1 Persen 2 Persen	304.350.000,00						100 % 100 Persentase 2 % 1 Persentase 100 % 20 % 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 20 Persentase 100 Persentase	315.900.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase 100 Persentase			100 Persen	304.350.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Kelurahan Tanah Baru	100 Persentase 100 Persentase	315.900.000,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Kelurahan Tanah Baru	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	KELURAHAN TANAH BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						616.429.400,00							616.429.600,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di Lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n			100 Persen 99.41 Nilai 10.83 Nilai 26.52 Nilai 18.56 Nilai 99.72 Nilai 27.54 Nilai 94 Persen 96.84 Persen 99.10 Nilai 99.18 Nilai	114.627.400,00						27,55 Nilai 94 persen 99,19 Nilai 99,42 Nilai 99,72 Nilai 99,11 Nilai 18,57 Nilai 10,84 Nilai 26,53 Nilai 100 persen 100 persen 94 persen 100 persen 96,85 perse n	114.627.500,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persent ase			100 Persen	114.627.400,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	100 Persent ase	114.627.500,00	KELURAHAN CIMAHPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	1.059.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	9 Paket	1.059.500,00	KELURAHAN CIMAHPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	13.859.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	9 Paket	13.859.400,00	KELURAHAN CIMAHPAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	6.214.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	9 Paket	6.214.500,00	KELURAHAN CIMAHPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	89.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	9 Paket	89.850.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	3.644.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	9 Paket	3.644.100,00	KELURAHAN CIMAHPAR
			Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	2 %												
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan	100% 100% 20% 1%			100 Persen	501.802.000,00						100 Persen	501.802.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan	100 Persentase 100 Persentase			100 Persen	501.802.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cimahpar	100 Persentase 100 Persentase	501.802.100,00	KELURAHAN CIMAHPAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Transparansi pengelolaan keuangan daerah Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM</i>	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai Rata Rata Nilai Sakip 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 22,51 Nilai 27,01 Nilai 12,48 Nilai 88,38 Nilai 26,55 Nilai 94 % 27,01 Skor 96,17 % 87,11 Nilai 88,75 Nilai	43.128.443.523,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	46.056.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah</i>	100 % 96 % 100 % 95,18 % 100 %			100 % 100 % 95,17 % 95 %	39.807.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	100 % 96 % 100 % 95,18 % 100 %	56.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen			4 Dokumen	34.663.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	2 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	5.144.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan		6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 %	27.838.244.947,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	100 % 100 % 100 %	28.575.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bulan			126 Orang/bulan	27.775.288.947,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	134 Orang/bulan	28.500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			12 Laporan	62.956.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	805.945.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	100 %	1.125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			4 Paket	105.655.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Paket	110.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	55.195.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	357.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Paket	600.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	73.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Paket	80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	13.946.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			2 Laporan	200.399.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100 %			100 %	10.433.251.074,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	100 %	11.800.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	398.589.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan		450.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			20 Unit	732.370.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	3 Unit	800.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit			20 Unit	160.904.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kecamatan Bogor Selatan	16 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit			57 Unit	231.264.100,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	85 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	8.910.123.574,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan		10.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	2.906.426.384,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	100 %	3.100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			12 Laporan	298.519.856,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			12 Laporan	2.607.906.528,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	2.800.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah ber kondisi baik</i>	100 %			100 %	1.104.768.218,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	100 %	1.400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	22 Unit			6 Unit	244.791.324,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	22 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit			165 Unit	109.963.894,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	140 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit			16 Unit	750.013.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	16 Unit	1.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	75% 75%			75 % 75%	6.600.000,00						75% 75%	7.500.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	6.600.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kecamatan Bogor Selatan	100 %	7.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			12 Dokumen	6.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kecamatan Bogor Selatan	1 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.177.741.005,00							1.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.177.741.005,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	264.581.000,00						2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase	305.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	185.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			2 Laporan	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	185.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	185.576.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Lembaga K emasyarakat an	190.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			1 Laporan	111.413.505,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pertumbuh an Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Ber kelanjutan serta Peng embangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	88.1 Persentase			88.1 Persentase	119.635.500,00						88.1 Persentase	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	88,2 %			88,1 %	119.635.500,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	88,2 %	125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			2 Laporan	119.635.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Selatan	1 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN BATUTULIS						490.298.800,00							490.288.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						310.300.000,00							310.300.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						310.300.000,00							310.300.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 22,51 Nilai 12,48 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 26,55 Nilai 94 % 96,17 % 87,11 Nilai 88,75 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Batutulis	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Batutulis	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Batutulis	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Batutulis	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Batutulis	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	232.800.000,00						75% 75%	232.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	232.800.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Batutulis	100 %	232.800.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			52 Dokumen	232.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Batutulis	1 Dokumen	232.800.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						179.998.800,00							179.988.800,00	
	7.01	KECAMATAN						179.998.800,00							179.988.800,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 20 Persentase			100 % 100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	179.998.800,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	179.988.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	179.998.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Batutulis	100 %	179.988.800,00	KELURAHAN BATUTULIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			52 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Batutulis	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	144.998.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Batutulis	1 Unit	144.988.800,00	KELURAHAN BATUTULIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			9 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Batutulis	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS
		KELURAHAN BOJONGKERTA							423.300.000,00						423.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bojongkerta	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bojongkerta	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bojongkerta	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	160.800.000,00						75% 75%	160.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	160.800.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Kelurahan Bojongkerta	100 %	160.800.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	160.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kelurahan Bojongkerta	1 Dokumen	160.800.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						185.000.000,00							185.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						185.000.000,00							185.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	185.000.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	185.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	185.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kelurahan Bojongkerta	100 %	185.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			2 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Bondongan	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bondongan	1 Paket	0,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Bondongan	1 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						623.000.000,00							644.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						623.000.000,00							644.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	438.000.000,00						75% 75%	438.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	438.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Bondongan	100 %	438.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen			3 Pokmas/Or mas Dokumen	438.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Bondongan	1 Dokumen	438.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan</i>	100 Persent ase 2 Persentas e 1 Persentas e 20 Persenta se			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	185.000.000,00						100 Persent ase 2 Persentas e 1 Persentas e 20 Persenta se	206.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	185.000.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Bondongan	100 %	206.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			4 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Bondongan	13 Lembaga Kemasyarak atan	20.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Bondongan	1 Unit	160.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas			8 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Bondongan	3 Pokmas / Ormas	26.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
		KELURAHAN CIKARET						594.552.000,00							599.552.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						417.700.000,00							422.700.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						417.700.000,00							422.700.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM</i>	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 12,48 Nilai 26,55 Nilai 87,11 Nilai 22,51 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 27,01 Skor 94 % 96,17 % 88,75 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	77.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cikaret	100 %	82.500.000,00	KELURAHAN CIKARET
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cikaret	1 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN CIKARET
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cikaret	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN CIKARET
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cikaret	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN CIKARET
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cikaret	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN CIKARET
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	340.200.000,00						100 Persentase	340.200.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	340.200.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Cikaret	100 %	340.200.000,00	KELURAHAN CIKARET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			77 Dokumen	340.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Cikaret	1 Dokumen	340.200.000,00	KELURAHAN CIKARET	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						176.852.000,00							176.852.000,00		
	7.01	KECAMATAN						176.852.000,00							176.852.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase	176.852.000,00							100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	176.852.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	176.852.000,00			-	-	Kelurahan Cikaret	100 %	176.852.000,00	KELURAHAN CIKARET	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			77 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cikaret	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KELURAHAN CIKARET	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	141.852.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	Kelurahan Cikaret	1 Unit	141.852.000,00	KELURAHAN CIKARET	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			50 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cikaret	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN CIKARET
		KELURAHAN CIPAKU						622.500.000,00							687.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						437.500.000,00							447.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						437.500.000,00							447.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 22,51 Nilai 12,48 Nilai 27,01 Nilai 26,55 Nilai 88,38 Nilai 94 % 27,01 Skor 96,17 % 88,75 Nilai 87,11 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	87.000.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cipaku	100 %	87.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			4 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cipaku	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cipaku	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cipaku	1 Paket	65.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cipaku	1 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	360.000.000,00						100 Persentase	360.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	360.000.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Cipaku	100 %	360.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			79 Dokumen	360.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Cipaku	1 Dokumen	360.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						185.000.000,00							240.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						185.000.000,00							240.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Persentase Keterwakilan Kelompok Rentan dalam Musrenbang Kecamatan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Persentase Keterwakilan Anak dalam Musrenbang Kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			100 Persen 1 Persen 20 Persen 2 Persen	185.000.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	240.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	185.000.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Cipaku	100 %	240.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			19 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Cipaku	13 Lembaga Kemasyarak atan	15.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Cipaku	1 Unit	195.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			14 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Cipaku	3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU
		KELURAHAN EMPANG							810.731.000,00						810.731.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						645.700.000,00							645.700.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						645.700.000,00							645.700.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 22,51 Nilai 27,01 Nilai 12,48 Nilai 26,55 Nilai 88,38 Nilai 94 % 27,01 Skor 96,17 % 88,75 Nilai 87,11 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			-	-	Kelurahan Empang	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN EMPANG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Empang	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Empang	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Empang	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN EMPANG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Empang	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN EMPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	568.200.000,00						100 Persentase	568.200.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	568.200.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Empang	100 %	568.200.000,00	KELURAHAN EMPANG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	568.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Empang	1 Dokumen	568.200.000,00	KELURAHAN EMPANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						165.031.000,00							165.031.000,00	
	7.01	KECAMATAN						165.031.000,00							165.031.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persent ase 2 Persentas e 1 Persentas e 20 Persenta se			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	165.031.000,00						100 Persent ase 2 Persentas e 1 Persentas e 20 Persenta se	165.031.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	165.031.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	-	Kelurahan Empang	100 %	165.031.000,00	KELURAHAN EMPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	-	Kelurahan Empang	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	130.031.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	-	Kelurahan Empang	1 Unit	130.031.000,00	KELURAHAN EMPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	-	Kelurahan Empang	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
		KELURAHAN GENTENG						467.100.000,00							467.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						282.100.000,00							282.100.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						282.100.000,00							282.100.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 22,51 Nilai 12,48 Nilai 27,01 Nilai 26,55 Nilai 88,38 Nilai 94 % 96,17 % 88,75 Nilai 87,11 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	77.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Genteng	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN GENTENG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Genteng	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN GENTENG
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Genteng	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN GENTENG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Genteng	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN GENTENG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Genteng	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN GENTENG
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	204.600.000,00						100 Persentase	204.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	204.600.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Genteng	100 %	204.600.000,00	KELURAHAN GENTENG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	204.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Genteng	1 Dokumen	204.600.000,00	KELURAHAN GENTENG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						185.000.000,00							185.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						185.000.000,00							185.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan</i>	100 Persent ase 2 Persentas e 1 Persentas e 20 Persenta se			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	185.000.000,00						100 Persent ase 2 Persentas e 1 Persentas e 20 Persenta se	185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	185.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Genteng	100 %	185.000.000,00	KELURAHAN GENTENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			9 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Genteng	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN GENTENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Genteng	1 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN GENTENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Harjasari	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Harjasari	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Harjasari	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Kelurahan Harjasari	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	265.800.000,00						100 Persentase	265.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	265.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Harjasari	100 %	265.800.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			12 Dokumen	265.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kelurahan Harjasari	1 Dokumen	265.800.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						201.050.000,00							201.050.000,00	
	7.01	KECAMATAN						201.050.000,00							201.050.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	201.050.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	201.050.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	201.050.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Kelurahan Harjasari	100 %	201.050.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Kelurahan Harjasari	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	166.050.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Kelurahan Harjasari	1 Unit	166.050.000,00	KELURAHAN HARJASARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			15 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Kelurahan Harjasari	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
		KELURAHAN KERTAMAYA							516.157.530,00						414.552.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						237.700.000,00							237.700.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase penyampaian					237.700.000,00							237.700.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Persentase kepatuhan Anggaran	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 26,55 Nilai 22,51 Nilai 12,48 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 94 % 96,17 % 88,75 Nilai 87,11 Nilai 100%	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kertamaya	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kertamaya	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kertamaya	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kertamaya	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kertamaya	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	160.200.000,00						100 Persentase	160.200.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	160.200.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kertamaya	100 %	160.200.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			12 Dokumen	160.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kertamaya	1 Dokumen	160.200.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						278.457.530,00							176.852.000,00	
	7.01	KECAMATAN						278.457.530,00							176.852.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	278.457.530,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	176.852.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	278.457.530,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kertamaya	100 %	176.852.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kertamaya	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	243.457.530,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kertamaya	1 Unit	141.852.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			9 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kertamaya	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA
		KELURAHAN LAWANG GINTUNG							455.352.000,00						455.352.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						278.500.000,00							278.500.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						278.500.000,00							278.500.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 26,55 Nilai 22,51 Nilai 12,48 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 27,01 Skor 94 % 96,17 % 88,75 Nilai 87,11 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Lawanggintung	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Lawanggintung	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Lawanggintang	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Lawanggintang	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Lawanggintang	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	201.000.000,00						100 Persentase	201.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	201.000.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Lawanggintang	100 %	201.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			12 Dokumen	201.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Lawanggantung	1 Dokumen	201.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						176.852.000,00							176.852.000,00	
	7.01	KECAMATAN						176.852.000,00							176.852.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	176.852.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	176.852.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	176.852.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Lawanggantung	100 %	176.852.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggantung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Lawanggantung	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	141.852.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggantung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Lawanggantung	1 Unit	141.852.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggantung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Lawanggantung	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG
		KELURAHAN MUARASARI							484.065.000,00						484.065.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						270.100.000,00							270.100.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						270.100.000,00							270.100.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 26,55 Nilai 22,51 Nilai 12,48 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 94 % 96,17 % 88,75 Nilai 87,11 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	192.600.000,00						100 Persentase	192.600.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	192.600.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	100 %	192.600.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			52 Dokumen	192.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	1 Dokumen	192.600.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						213.965.000,00							213.965.000,00	
	7.01	KECAMATAN	Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP					213.965.000,00							213.965.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			100 % 1 Presentase 20 Presentase	213.965.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	213.965.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	213.965.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	100 %	213.965.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			52 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	178.965.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	1 Unit	178.965.000,00	KELURAHAN MUARASARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			52 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Muarasari Kota Bogor	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI
		KELURAHAN MULYAHARJA							542.400.000,00						542.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Mulyaharja	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			2 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Mulyaharja	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Mulyaharja	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%		75% 75%		319.200.000,00						100 Persentase	319.200.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	319.200.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Mulyaharja	100 %	319.200.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	319.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Mulyaharja	1 Dokumen	319.200.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						145.700.000,00							145.700.000,00	
	7.01	KECAMATAN						145.700.000,00							145.700.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	145.700.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	145.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	145.700.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Mulyaharja	100 %	145.700.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	13 Lembaga Kemasyarak atan			9 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Mulyaharja	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit			1 Unit	110.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Mulyaharja	1 Unit	110.700.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Mulyaharja	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA
		KELURAHAN PAKUAN							407.700.000,00							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						222.700.000,00							241.900.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						222.700.000,00							241.900.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			12,48 Nilai 100 % 26,55 Nilai 87,11 Nilai 22,51 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 94 % 96,17 % 88,75 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pakuan	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pakuan	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pakuan	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pakuan	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pakuan	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	145.200.000,00						100 Persentase	164.400.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	145.200.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	-	100 %	164.400.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	145.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	1 Dokumen	164.400.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						185.000.000,00							190.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN	Persentase keterwakilan					185.000.000,00							190.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	185.000.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	190.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	185.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	100 %	190.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			12,48 Nilai 100 % 26,55 Nilai 87,11 Nilai 22,51 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 27,01 Skor 94 % 96,17 % 88,75 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	300.600.000,00						100 Persentase	310.600.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	300.600.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	100 %	310.600.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			12 Dokumen	300.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	1 Dokumen	310.600.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						435.102.000,00							435.102.000,00	
	7.01	KECAMATAN						435.102.000,00							435.102.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase	435.102.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	435.102.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	435.102.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	100 %	435.102.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	13 Lembaga Kemasyarak atan			9 Lembaga K emasyarak at an	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	-	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit			2 Unit	400.102.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	-	1 Unit	400.102.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	-	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
		KELURAHAN RANCAMAYA							469.800.000,00						469.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						250.300.000,00							250.300.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						250.300.000,00							250.300.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			12,48 Nilai 100 % 26,55 Nilai 87,11 Nilai 22,51 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 94 % 96,17 % 88,75 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Rancamaya	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Rancamaya	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Rancamaya	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Rancamaya	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Rancamaya	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75 %. 75%			75% 75%	172.800.000,00						100 %	172.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %			100 %	172.800.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Rancamaya	100 %	172.800.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	172.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Rancamaya	1 Dokumen	172.800.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						219.500.000,00							219.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN	Persentase keterwakilan					219.500.000,00							219.500.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase	219.500.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	219.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	219.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Rancamaya	100 %	219.500.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			100% Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Rancamaya	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			100% Unit	184.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Rancamaya	1 Unit	184.500.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			7 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Rancamaya	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
		KELURAHAN RANGGAMEKAR							513.690.000,00						513.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						364.300.000,00							364.300.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						364.300.000,00							364.300.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %			100 % 12,48 Nilai 26,55 Nilai 87,11 Nilai 22,51 Nilai 27,01 Nilai 88,38 Nilai 94 % 96,17 % 88,75 Nilai	77.500.000,00						94 % 89,39 Nilai 100 % 96,18 % 27,34 Nilai 89,39 Nilai 89,25 Nilai 100 % 87,87 Nilai 100 % 13,0 Nilai 26,82 Nilai 22,52 Nilai 94 %	77.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %			100 %	77.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ranggamekar	100 %	77.500.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ranggamekar	1 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ranggamekar	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	58.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ranggamekar	1 Paket	58.500.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ranggamekar	1 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang AktifPersentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	286.800.000,00						100 Persentase	286.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %			100 %	286.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Ranggamekar	100 %	286.800.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	286.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Ranggamekar	1 Dokumen	286.800.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						149.390.000,00							149.390.000,00	
	7.01	KECAMATAN						149.390.000,00							149.390.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase			1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase	149.390.000,00						100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 20 Persentase	149.390.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %			100 %	149.390.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	100 %	149.390.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan			9 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	-	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			1 Unit	114.390.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	-	1 Unit	114.390.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	-	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR
		KECAMATAN BOGOR TIMUR						20.740.066.341,00							21.015.125.894,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen			7 Dokumen	22.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Dokumen	25.135.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	132.059.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	136.783.900,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA</i>	100 Persent ase 100 Persent ase			100 Persentase 100 Persentase	12.974.480.301,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	100 Persent ase 100 Persent ase	13.097.394.901,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan			58 Orang/bulan	12.830.149.801,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	52 Orang/bulan	12.930.149.801,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			7 Laporan	25.090.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Laporan	36.081.100,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	119.240.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	131.164.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	2.361.730.727,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	100 Persent ase	2.597.318.120,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	11.581.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Paket	12.747.350,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	1.100.976.395,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Paket	1.211.015.960,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	18.337.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Paket	20.179.940,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	474.507.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Paket	521.961.440,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	40.877.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Paket	44.965.030,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	11.622.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	703.828.532,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	774.448.400,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase			100 Persentase	1.824.668.470,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	100 Persentase	1.807.672.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			13 Laporan	231.476.470,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	231.480.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.593.192.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	1.576.192.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah ber kondisi baik	100 Persentase			100 Persentase	2.796.107.242,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	100 Persentase	2.660.492.633,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			5 Unit	318.070.242,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	4 Unit	326.619.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			65 Unit	44.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	10 Unit	56.595.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit			7 Unit	2.433.787.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	7 Unit	2.277.278.633,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)</i>	1 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se			100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	175.303.386,00						1 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se	192.833.960,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Laporan			1 Laporan	52.830.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	1 Laporan	58.113.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	5 Laporan			5 Laporan	52.830.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	5 Laporan	58.113.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan (7 Pelayanan)</i>	100 Persent ase			100 Persentase	122.473.386,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	100 Persent ase	134.720.960,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	99.999.786,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	1 Dokumen	110.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	22.473.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	24.720.960,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persenta se 2 Persentas e 1 Persentas e 100 Percent ase 20 Persenta se 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Percent ase			100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	372.267.215,00						20 Persenta se 2 Persentas e 1 Persentas e 100 Percent ase 20 Persenta se 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Percent ase	409.494.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persentase			100 Persentase	372.267.215,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	100 Persentase	409.494.800,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	77.914.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	1 Lembaga Kemasyarakatan	85.706.280,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	80.684.918,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	1 Lembaga K emasyarakat an	88.753.500,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	187.999.497,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	206.800.000,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	12 Laporan			12 Laporan	25.668.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	28.235.020,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan</i>	88.1 Persentase			88.1 Persentase	73.999.800,00						88.1 Persentase	81.399.780,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase penurunan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan</i>	88,2 Persentase			88,1 Persentase	73.999.800,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	88,2 Persentase	81.399.780,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan			12 Laporan	73.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Timur	12 Laporan	81.399.780,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
		KELURAHAN BARANANGSIANG						1.042.887.900,00							1.055.639.780,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						430.800.000,00							430.800.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						430.800.000,00							430.800.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	430.800.000,00						100 Persentase	430.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan</i>	100 Persentase			100 Persentase	430.800.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Baranangsiang	100 Persentase	430.800.000,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			12 Dokumen	430.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Baranangsiang	12 Dokumen	430.800.000,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						612.087.900,00							624.839.780,00	
	7.01	KECAMATAN						612.087.900,00							624.839.780,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	90,77 Nilai 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persentase 94 Persentase 90,02 Nilai			28,87 Nilai 100 Persentase 28,89 Nilai 11,18 Nilai 94,46 Nilai 100 persen 90,1 Nilai 18,56 Nilai 90,76 Nilai 93,06 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	112.278.700,00						90,77 Nilai 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persentase 94 Persentase 90,02 Nilai	123.557.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Persen tase			100 Persentase	112.278.700,00			Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Baranangsiang	100 Persen tase	123.557.280,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	4.743.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Baranangsiang	7 Paket	5.243.480,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	6.217.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Baranangsiang	7 Paket	6.840.020,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	2.733.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Baranangsiang	7 Paket	3.029.950,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	95.420.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Baranangsiang	7 Paket	104.962.000,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	3.165.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Baranangsiang	7 Paket	3.481.830,00	KELURAHAN BARANANGSIANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase			20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	499.809.200,00						20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase	501.282.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase			100 Persentase	499.809.200,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Baranangsiang	100 Persentase	501.282.500,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	7.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Baranangsiang	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.442.500,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit			3 Unit	472.154.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Baranangsiang	3 Unit	472.840.000,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	19.980.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Baranangsiang	3 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	KELURAHAN BARANANGSIANG
		KELURAHAN SUKASARI						815.000.000,00							833.411.380,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						204.000.000,00							204.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						204.000.000,00							204.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	204.000.000,00						100 Persentase	204.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai			28,87 Nilai 100 Persentase 28,89 Nilai 11,18 Nilai 100 persen 94,46 Nilai 90,1 Nilai 18,56 Nilai 90,76 Nilai 93,06 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	90.000.000,00						90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai	108.411.380,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	90.000.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sukasari	100 Persent ase	108.411.380,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	1.008.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sukasari	7 Paket	1.109.680,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	10.700.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sukasari	7 Paket	10.700.400,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	5.262.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sukasari	7 Paket	5.262.000,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	71.180.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sukasari	7 Paket	89.490.500,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	1.848.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sukasari	7 Paket	1.848.800,00	KELURAHAN SUKASARI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase			20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	521.000.000,00						20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase	521.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persen ase			100 Persentase	521.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sukasari	100 Persen ase	521.000.000,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sukasari	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	3 Unit			4 Unit	500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sukasari	3 Unit	500.000.000,00	KELURAHAN SUKASARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sukasari	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN SUKASARI
		KELURAHAN KATULAMPA						1.233.076.800,00							1.246.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						635.400.000,00							636.600.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						635.400.000,00							636.600.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	635.400.000,00						100 Persentase	636.600.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai			28,87 Nilai 100 Persentase 28,89 Nilai 11,18 Nilai 100 persen 94,46 Nilai 90,1 Nilai 18,56 Nilai 90,76 Nilai 93,06 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	108.195.100,00						90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai	119.025.500,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	108.195.100,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Katulampa	100 Persent ase	119.025.500,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	3.262.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Katulampa	7 Paket	3.589.080,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	8.157.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Katulampa	7 Paket	8.973.030,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	1.826.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Katulampa	7 Paket	2.008.820,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	93.260.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Katulampa	7 Paket	102.597.000,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	1.688.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Katulampa	7 Paket	1.857.570,00	KELURAHAN KATULAMPA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase			20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	489.481.700,00						20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase	490.474.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persen ase			100 Persentase	489.481.700,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Katulampa	100 Persen ase	490.474.500,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	11.744.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Katulampa	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.974.500,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit			4 Unit	452.736.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Katulampa	3 Unit	452.500.000,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Katulampa	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN KATULAMPA
		KELURAHAN TAJUR						513.382.700,00							523.176.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						144.000.000,00							144.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						144.000.000,00							144.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	144.000.000,00						100 Persentase	144.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai			100 Persentase 28,87 Nilai 28,89 Nilai 11,18 Nilai 94,46 Nilai 100 persen 90,1 Nilai 18,56 Nilai 90,76 Nilai 93,06 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	85.806.200,00						90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai	94.600.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	85.806.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tajur	100 Persent ase	94.600.000,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	1.356.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tajur	7 Paket	1.492.700,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	1.268.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tajur	7 Paket	1.395.570,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	2.345.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tajur	7 Paket	2.582.910,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	78.620.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tajur	7 Paket	86.691.000,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	2.216.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tajur	7 Paket	2.437.820,00	KELURAHAN TAJUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase			20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	283.576.500,00						20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase	284.576.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persen ase			100 Persentase	283.576.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Tajur	100 Persen ase	284.576.500,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Tajur	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit			3 Unit	258.576.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Tajur	3 Unit	258.576.500,00	KELURAHAN TAJUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Tajur	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN TAJUR
		KELURAHAN SINDANGGRASA						719.301.100,00							730.165.340,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						289.800.000,00							289.800.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						289.800.000,00							289.800.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	289.800.000,00						100 Persentase	289.800.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai			28,87 Nilai 100 Persentase 28,89 Nilai 11,18 Nilai 94,46 Nilai 100 persen 90,1 Nilai 18,56 Nilai 90,76 Nilai 93,06 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	98.436.300,00						90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai	108.350.440,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	98.436.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangrasa	100 Persent ase	108.350.440,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	3.977.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangrasa	7 Paket	4.398.790,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	7.969.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangrasa	7 Paket	8.798.460,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	9.981.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangrasa	7 Paket	10.993.510,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	72.204.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangrasa	7 Paket	79.425.500,00	KELURAHAN SINDANGRASA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	4.303.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangrasa	7 Paket	4.734.180,00	KELURAHAN SINDANGRASA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase			20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	331.064.800,00						20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase	332.014.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persen tase			100 Persentase	331.064.800,00			Memperku t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Sindangrasa	100 Persen tase	332.014.900,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	9.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Sindangrasa	1 Lembaga K emasyarakat an	10.450.000,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit			2 Unit	306.564.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindanggrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sindanggrasa	3 Unit	306.564.900,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindanggrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sindanggrasa	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN SINDANGGRASA
		KELURAHAN SINDANGSARI						489.632.300,00							499.399.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						178.800.000,00							178.800.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						178.800.000,00							178.800.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	178.800.000,00						100 Persentase	178.800.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai			100 Persentase 28,87 Nilai 28,89 Nilai 11,18 Nilai 94,46 Nilai 100 persen 90,1 Nilai 18,56 Nilai 90,76 Nilai 93,06 Nilai 94 Persentase 95 Persentase	85.993.000,00						90,77 Nilai 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 28,89 Nilai 28,88 Nilai 100 persen 94,47 Nilai 93,07 Nilai 11,19 Nilai 18,57 Nilai 95 Persenta se 94 Persenta se 90,02 Nilai	94.599.400,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	85.993.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangsari	100 Persent ase	94.599.400,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	832.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangsari	7 Paket	919.000,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	4.592.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangsari	7 Paket	5.053.400,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	1.488.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangsari	7 Paket	1.640.100,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	78.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangsari	7 Paket	85.800.000,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket			1 Paket	1.079.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sindangsari	7 Paket	1.186.900,00	KELURAHAN SINDANGSARI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase			20 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 1 Persentase	224.839.300,00						20 Persentase 2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase	226.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persen ase			100 Persentase	224.839.300,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sindangsari	100 Persen ase	226.000.000,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sindangsari	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	3 Unit			2 Unit	199.839.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sindangsari	3 Unit	200.000.000,00	KELURAHAN SINDANGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sindangsari	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN SINDANGSARI
		KECAMATAN BOGOR BARAT						40.452.678.467,00							38.101.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.031.600,00							27.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						26.031.600,00							27.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	26.031.600,00						100 Persentase	27.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			14,17 Nilai 26,55 Nilai 94,4 Nilai 29,13 Nilai 95 Persentase 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 100 Persentase 94,87 Nilai 94 Persentase	39.311.441.000,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	37.698.400.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	100 Persent ase 100 Persent ase 95.5 Persent ase 95,81 Perse ntase			100 Persentase 100 Persentase 95.40 Persentase 95,8 Persentase	22.004.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100 Persent ase 100 Persent ase 95,5 Persent ase 95,81 Perse ntase	101.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	17.931.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur Kecamatan dan Kelurahan	3 Dokumen	97.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	4.073.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur Kecamatan dan Kelurahan	2 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100 Persent ase 95% Persent ase			100 Persentase 95% Persentase	27.559.552.091,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	100 Persent ase 95% Persent ase	28.051.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan			132 Orang/bulan	27.486.918.891,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	122 Orang/bulan	28.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.792.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	70.840.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Persen ase			100 Persentase	1.669.176.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100 Persen ase	1.562.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	11.954.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	17 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	845.126.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	17 Paket	980.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	34.814.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	17 Paket	0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	333.360.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	17 Paket	0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	32.293.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	17 Paket	33.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	34.866.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	1 Dokumen	37.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	376.760.950,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persentase			-	6.549.234.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100 Persentase	7.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	6.549.234.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	1 Unit	7.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persent ase			100 Persentase	2.843.968.938,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100 Persent ase	290.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	298.099.266,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	290.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.545.869.672,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	100 Persentase			100 Persentase	667.504.521,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	100 Persentase	694.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit			23 Unit	194.204.521,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	45 Unit	192.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit			120 Unit	81.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	214 Unit	82.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			1 Laporan	38.784.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	100 Persentase			-	157.473.967,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	100 Persentase	168.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	77.768.667,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Dokumen	80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	69.205.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	10.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	189.207.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Lembaga K emasyarakat an	0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	1 Laporan			1 Laporan	24.184.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	1 Laporan			1 Laporan	15.896.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan</i>	88.1 Persentase			88.1 Persentase	92.658.800,00						88.1 Persentase	127.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan</i>	88,2 Persentase			88,1 Persentase	92.658.800,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Aparatur dan masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	88,2 Persentase	127.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan			1 Laporan	92.658.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Aparatur dan masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	1 Laporan	127.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
		KELURAHAN BALUMBANG JAYA						584.746.700,00							247.668.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						265.800.000,00							2.668.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						265.800.000,00							2.668.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	265.800.000,00						100 Persentase	2.668.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			14,17 Nilai 26,55 Nilai 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 100 Persentase 94,87 Nilai 94 Persentase	87.279.100,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	87.279.100,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persent ase	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.498.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	11.845.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	8.132.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	62.820.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	1.983.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase			1 Persentase 2 Persentase	231.667.600,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase	245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persent ase			100 Persentase	231.667.600,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	245.000.000,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			7 Lembaga K emasyarakat an	3.889.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	16 Unit			2 Unit	210.109.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	220.000.000,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	17.668.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA
		KELURAHAN BUBULAK						552.057.300,00							566.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						286.800.000,00							290.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						286.800.000,00							290.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	286.800.000,00						100 Persentase	290.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	104.538.900,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	95.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persent ase			-	104.538.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persent ase	95.500.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.298.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	11.719.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	11.733.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	76.435.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	77.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	17 Paket			1 Paket	2.352.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN BUBULAK
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		20 Persentase			20 Persentase	160.718.400,00						20 Persentase	181.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase			100 Persentase	160.718.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persentase	181.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	11.040.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	12.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	125.670.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	114.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	24.007.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	55.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK
		KELURAHAN CILENDEK BARAT							751.747.700,00						477.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	3.808.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			0 Paket	16.204.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publiik	Masyarakat Kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	5.815.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	17 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	69.735.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	1.917.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	222.867.600,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	21.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase			100 Persentase	222.867.600,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persentase	21.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	206.917.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	11.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT
		KELURAHAN CILENDEK TIMUR						673.108.500,00							336.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						327.600.000,00							328.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						327.600.000,00							328.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	327.600.000,00						100 Persentase	328.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan</i>	100 Persentase			100 Persentase	327.600.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persentase	328.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17 Dokumen			1 Dokumen	327.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	17 Dokumen	328.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						345.508.500,00							8.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						345.508.500,00							8.400.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 95 Persentase 94 Persentase 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			14,17 Nilai 26,55 Nilai 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 100 Persentase 94,87 Nilai 94 Persentase	101.682.200,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 95 Persentase 94 Persentase 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Persen ase			100 Persentase	101.682.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persentase	2.400.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	4.473.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	23.377.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	9.533.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	61.980.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	2.317.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	2.400.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	243.826.300,00						1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se	6.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persent ase			100 Persentase	243.826.300,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	6.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			3 Lembaga K emasyarakat an	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	6.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			2 Unit	234.813.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	4.012.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR
		KELURAHAN CURUG						816.512.100,00							738.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						318.600.000,00							320.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						318.600.000,00							320.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	318.600.000,00						100 Persentase	320.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 95 Persentase 94 Persentase 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 20,21 Nilai 94,4 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	78.145.600,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 95 Persentase 94 Persentase 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persentase			100 Persentase	78.145.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persentase	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	1.104.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	10.980.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	3.221.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	59.040.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	3.799.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang	20 Persentase			20 Persentase	419.766.500,00						20 Persentase		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 Persent ase			-	419.766.500,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	418.000.000,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	10.134.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	392.632.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	17.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	18.000.000,00	KELURAHAN CURUG
		KELURAHAN CURUG MEKAR						613.919.000,00							597.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						308.400.000,00							310.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						308.400.000,00							310.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	308.400.000,00						100 Persentase	310.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan</i>	100 Persentase			100 Persentase	308.400.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persentase	310.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17 Dokumen			1 Dokumen	308.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	17 Dokumen	310.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						305.519.000,00							287.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						305.519.000,00							287.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 95 Persentase 94 Persentase 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	99.738.000,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persentase 100 Persentase 94 Persentase 100 Persentase 95 Persentase 94 Persentase 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	83.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Persen tase			100 Persentase	99.738.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persentase	83.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	2.727.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	19.470.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	10.407.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	64.860.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	66.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.272.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN CURUG MEKAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persentase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persentase 2 Persentas e 100 Persentase 20 Persenta se			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	205.781.000,00						1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persentase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persentase 2 Persentas e 100 Persentase 20 Persenta se	204.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase			100 Persentase	205.781.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat di Kelurahan	100 Persentase	204.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakat an			1 Lembaga Kemasyarakat an	3.915.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakat an	4.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	199.641.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat di Kelurahan	16 Unit	200.000.000,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	2.224.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN CURUG MEKAR
		KELURAHAN GUNUNG BATU						698.444.600,00							700.930.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						359.400.000,00							360.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						359.400.000,00							360.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	359.400.000,00						100 Persentase	360.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kepatuhan Anggaran</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan</i>	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	105.848.400,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 94 Persenta se 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	97.430.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Percent ase			100 Persentase	105.848.400,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Percent ase	97.430.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	3.199.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	12.145.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	3.327.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	4.500.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	84.330.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	84.330.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	2.845.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.600.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	1 Persentas e 20 Persenta se 100 Percent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Percent ase 2 Persentas e 100 Percent ase 20 Persenta se			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	233.196.200,00						1 Persentas e 20 Persenta se 100 Percent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Percent ase 2 Persentas e 100 Percent ase 20 Persenta se	243.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persent ase			100 Persentase	233.196.200,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	243.500.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	5.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	16 Unit			2 Unit	201.696.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	225.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	27.000.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	13.500.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU
		KELURAHAN LOJI						530.272.800,00							531.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						291.000.000,00							292.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						291.000.000,00							292.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	100 Persentase			100 Persentase	291.000.000,00						100 Persentase	292.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kepatuhan Anggaran</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan</i>	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 20,21 Nilai 94,4 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	101.091.100,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 94 Persenta se 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	97.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 Percent ase			100 Persentase	101.091.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Percent ase	97.000.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	2.976.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN LOJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	10.881.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	4.409.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	80.415.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	75.000.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.409.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN LOJI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	138.181.700,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	142.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase			100 Persentase	138.181.700,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	142.100.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	4.973.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.100.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	118.209.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	119.000.000,00	KELURAHAN LOJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	14.998.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	KELURAHAN LOJI
		KELURAHAN MARGAJAYA						390.807.800,00							563.023.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						162.000.000,00							162.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						162.000.000,00							162.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	162.000.000,00						-	162.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persentase			-	162.000.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	162.000.000,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17 Dokumen			1 Dokumen	162.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	masyarakat Kelurahan	17 Dokumen	162.000.000,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						228.807.800,00							401.023.800,00	
	7.01	KECAMATAN						228.807.800,00							401.023.800,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase			-	95.421.000,00						-	91.723.900,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lingkup Perangkat Daerah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			-	95.421.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persent ase	91.723.900,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.633.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	4.742.500,00	KELURAHAN MARGAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	14.089.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	16.923.200,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	5.340.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	5.429.000,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	70.125.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	61.327.500,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	3.232.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.301.700,00	KELURAHAN MARGAJAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	133.386.800,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	309.299.900,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	100 Persentase			100 Persentase	133.386.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	309.299.900,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	4.787.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	5.500.000,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	102.672.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	116.740.600,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	25.927.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	187.059.300,00	KELURAHAN MARGAJAYA
		KELURAHAN MENTENG							1.119.118.200,00						1.164.674.700,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemuenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek pemuenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemuenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 20,21 Nilai 94,4 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	112.271.300,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	126.474.700,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemuenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	112.271.300,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persent ase	126.474.700,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.726.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.543.800,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	17.575.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	22.868.800,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.106.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	4.499.400,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	86.625.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	90.360.000,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	3.238.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	5.202.700,00	KELURAHAN MENTENG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	573.046.900,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	604.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	100 Persentase			100 Persentase	573.046.900,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persentase	604.400.000,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	8.860.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KELURAHAN MENTENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	16 Unit			4 Unit	558.618.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	585.900.000,00	KELURAHAN MENTENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	5.567.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	8.500.000,00	KELURAHAN MENTENG	
		KELURAHAN PASIR JAYA							758.918.000,00							113.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						352.200.000,00							0,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						352.200.000,00							0,00		
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	352.200.000,00						-	0,00		
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persentase			-	352.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	0,00	KELURAHAN PASIR JAYA	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17 Dokumen			1 Dokumen	352.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	17 Dokumen	0,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						406.718.000,00							113.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						406.718.000,00							113.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	99.600.000,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	107.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persen ase			100 Persentase	99.600.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persen ase	107.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	4.765.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	17.632.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	19.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	9.151.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	9.500.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	65.730.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	71.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.321.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	307.118.000,00						1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persent ase			100 Persentase	307.118.000,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	6.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	5.036.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	6.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			2 Unit	268.346.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	0,00	KELURAHAN PASIR JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	33.735.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PASIR JAYA
		KELURAHAN PASIR KUDA						626.151.310,00							552.036.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						315.000.000,00							311.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						315.000.000,00							311.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	315.000.000,00						100 Persentase	311.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	95.449.200,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 94 Persenta se 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	19.036.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Percent ase			100 Persentase	95.449.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Percent ase	19.036.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	1.267.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	936.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	9.584.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	4.597.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	7.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	78.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	2.100.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan	14,17 Nilai 26,55 Nilai 29,13 Nilai 95			-	215.702.110,00						-	222.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 100 Persentase 94,87 Nilai 94 Persentase			-	215.702.110,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	222.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Masyarakat			1 Lembaga Masyarakat	8.186.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga Masyarakat	9.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	195.045.410,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	196.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	12.470.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	17.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA
		KELURAHAN PASIR MULYA						377.445.300,00							207.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						136.800.000,00							137.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						136.800.000,00							137.000.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	136.800.000,00						100 Persentase	137.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan	100 Persent ase			100 Persentase	136.800.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	137.000.000,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17 Dokumen			1 Dokumen	136.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	17 Dokumen	137.000.000,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN		29,14 Nilai				240.645.300,00							70.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN		14,18 Nilai				21,98 Nilai							70.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN		100 Persent ase				240.645.300,00							70.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100 Persent ase			14,17 Nilai	92.436.200,00						14,17 Nilai	70.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	100 Persent ase			-	92.436.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persent ase	70.000.000,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	1.653.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	14.082.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	5.221.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	69.960.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	70.000.000,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	1.518.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	0,00	KELURAHAN PASIR MULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	141.842.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	0,00	KELURAHAN PASIR MULYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	3.023.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PASIR MULYA
		KELURAHAN SEMPLAK						438.966.200,00							497.550.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						232.800.000,00							232.800.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						232.800.000,00							232.800.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	232.800.000,00						100 Persentase	232.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan	100 Persent ase			100 Persentase	232.800.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	232.800.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17 Dokumen			1 Dokumen	232.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	17 Dokumen	232.800.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Persentase Kepatuhan Anggota.	29,14 Nilai												
	7.01	KECAMATAN	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	14,18 Nilai				206.166.200,00							264.750.000,00	
	7.01	KECAMATAN	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	21,98 Nilai				206.166.200,00							264.750.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	100 Persentase			29,13 Nilai	97.440.400,00						29,13 Nilai	101.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	100 Persentase			-	97.440.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persentase	101.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	873.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	10.002.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	12.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	3.433.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	78.960.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	79.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	4.171.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 2 Persentase	108.725.800,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	163.750.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persentase			100 Persentase	108.725.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persentase	163.750.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	6.651.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.750.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	92.204.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	138.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	9.870.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	16.000.000,00	KELURAHAN SEMPLAK
		KELURAHAN SINDANG BARANG						510.340.000,00							514.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						287.400.000,00							287.400.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						287.400.000,00							287.400.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	100 Persentase			100 Persentase	287.400.000,00						100 Persentase	287.400.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 94,4 Nilai 20,21 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	125.394.000,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Percent ase 100 Percent ase 94 Persenta se 100 Percent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	127.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Percent ase			100 Persentase	125.394.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan	100 Percent ase	127.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	7.904.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan	17 Paket	8.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	12.406.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan	17 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	5.954.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan	17 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	94.680.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan	17 Paket	95.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	17 Paket			1 Paket	4.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Kelurahan	17 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase			100 Persentase 20 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	97.546.000,00						1 Persentase 20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 2 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	100.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	100 Persentase			100 Persentase	97.546.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kelurahan	100 Persentase	100.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			3 Lembaga K emasyarakat an	8.565.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	9.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			1 Unit	73.981.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	16 Unit	75.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	16.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG	
		KELURAHAN SITU GEDE							517.361.305,00							516.490.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	29,14 Nilai 14,18 Nilai 21,98 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai			100 Persentase 14,17 Nilai 26,55 Nilai 94 Persentase 29,13 Nilai 95 Persentase 20,21 Nilai 94,4 Nilai 94,7 Nilai 94,85 Nilai 94,87 Nilai	114.033.800,00						29,14 Nilai 14,18 Nilai 20,22 Nilai 100 Persent ase 100 Persent ase 94 Persenta se 100 Persent ase 95 Persenta se 94 Persenta se 94,71 Nilai 94,41 Nilai 94,88 Nilai 94,86 Nilai 26,82 Nilai	118.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persent ase			100 Persentase	114.033.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	100 Persent ase	118.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.650.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	18.402.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	19.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.706.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	87.345.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	90.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	2.929.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	aparatur kelurahan	17 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentas e 20 Persenta se 100 Percent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Percent ase 2 Persentas e 100 Percent ase 20 Persenta se			20 Persentase 1 Persentase	199.927.505,00						1 Persentas e 20 Persenta se 100 Percent ase 1 Persentas e 2 Persentas e 100 Percent ase 2 Persentas e 100 Percent ase 20 Persenta se	195.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Persent ase			100 Persentase	199.927.505,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	masyarakat Kelurahan	100 Persent ase	195.090.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	3.735.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	masyarakat Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	4.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	16 Unit			2 Unit	148.145.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	16 Unit	161.090.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	48 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	48.046.905,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	masyarakat Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE
		KECAMATAN BOGOR TENGAH						29.527.579.847,00							29.700.918.770,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.600.000,00							6.600.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6.600.000,00							6.600.000,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	6.600.000,00						100 persentase	6.600.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 11,21 Nilai 28,52 Nilai 95 persentase 91,61 Nilai 93,45 Nilai	28.712.150.108,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	28.868.400.043,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	96,86 persentase 100 persentase 100 persentase 100 persentase			100 persentase 100 persentase 96,85 persentase 100 persentase	22.197.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	96,86 persentase 100 persentase 100 persentase 100 persentase	22.197.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	6.430.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	3 Dokumen	6.430.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	15.767.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	2 Laporan	15.767.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	96,86 persentase 100 persentase			100 persentase 96,85 persentase	20.582.181.548,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	96,86 persentase 100 persentase	20.582.181.548,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan			95 Orang/bulan	20.509.023.548,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	97 Orang/bulan	20.509.023.548,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	7.725.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	2 Laporan	7.725.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	65.433.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	3 Laporan	65.433.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persentase			100 persentase	3.320.479.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	100 persentase	3.317.057.400,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	34.296.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket	34.296.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.019.181.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket	2.019.181.400,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	192.405.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket	188.982.700,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	586.222.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket	586.222.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	9.660.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket	9.660.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			6 Dokumen	9.297.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	4 Dokumen	9.297.600,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			3 Laporan	469.417.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	3 Laporan	469.417.700,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100 persentase			100 persentase	286.253.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	100 persentase	395.867.600,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			7 Unit	146.152.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	7 Unit	255.766.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	140.101.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Unit	140.101.600,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persentase			100 persentase	2.284.844.449,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	100 persentase	2.294.328.449,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			3 Laporan	199.999.897,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	3 Laporan	199.999.897,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.084.844.552,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Laporan	2.094.328.552,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik</i>	100 persent ase			100 persentase	2.216.193.111,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	100 persent ase	2.256.767.546,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit			4 Unit	158.170.919,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	4 Unit	192.905.354,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	22 Unit			22 Unit	49.408.192,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	22 Unit	55.248.192,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			10 Unit	2.008.614.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	10 Unit	2.008.614.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	20 persentase 100 persentase 100 persentase 2 persentas e 1 persentase			100 persentase 1 persentase 2 persentase 20 persentase	175.999.712,00						20 persentase 100 persentase 100 persentase 2 persentase 1 persentase	176.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			1 Laporan	96.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Laporan	96.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan			4 Laporan	96.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	4 Laporan	96.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan (7 pelayanan)	100 persentase			100 persentase	79.999.712,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	100 persentase	80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	59.999.712,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Bogor Tengah	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan - Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan - Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	1 Persentas e 20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e			-	482.326.927,00						-	499.415.327,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterwakilan - Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentas e 100 Persent ase 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se			-	3.675.000,00			Memperku a Penyelara san Kehidup an yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	-	100 persent ase	3.675.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga Kemasyarakat an	3.675.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	-	11 Lembaga Kemasyarak atan	3.675.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persentase			100 persentase	478.651.927,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Tengah	100 persentase	495.740.327,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakat an			1 Lembaga Kemasyarakat an	42.820.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Bogor Tengah	1 Lembaga Kemasyarakat an	42.820.600,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	349.999.827,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kecamatan Bogor Tengah	1 Lembaga K emasyarakat an	349.999.827,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	1 Laporan			1 Laporan	74.657.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kecamatan Bogor Tengah	1 Laporan	74.657.500,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	1 Laporan			1 Laporan	11.174.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kecamatan Bogor Tengah	1 Laporan	28.262.400,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan</i>	88.01 persentase			88.01 persentase	150.503.100,00						88.01 persentase	150.503.400,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 11,21 Nilai 28,52 Nilai 91,61 Nilai 93,45 Nilai 95 persentase	97.486.000,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	97.491.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persent ase			100 persentase	97.486.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Babakan	100 persent ase	97.491.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.583.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Babakan	1 Paket	1.583.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.325.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Babakan	1 Paket	15.325.900,00	KELURAHAN BABAKAN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.576.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Babakan	1 Paket	3.576.100,00	KELURAHAN BABAKAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	74.215.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Babakan	1 Paket	74.220.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.786.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Babakan	1 Paket	2.786.000,00	KELURAHAN BABAKAN
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	192.600.000,00						100 Persentase	192.600.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			100 persentase 1 persentase 2 persentase 20 persentase	308.062.000,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	308.062.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persentase			100 persentase	308.062.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Babakan	100 persentase	308.062.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	1.312.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Babakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	1.312.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kepatuhan Anggaran</i> <i>Rata Rata Nilai SAKIP</i> <i>Aspek Evaluasi Internal</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan</i> <i>Rata Rata Nilai SAKIP</i> <i>Aspek Pengukuran Kinerja Transparansi</i> <i>Pengelolaan Keuangan Daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan</i> <i>Rata Rata Nilai SAKIP</i> <i>Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM</i> <i>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</i>	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 11,21 Nilai 28,52 Nilai 91,61 Nilai 93,45 Nilai 95 persentase	92.324.400,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	92.324.400,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persent ase			100 persentase	92.324.400,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cibogor	100 persent ase	92.324.400,00	KELURAHAN CIBOGOR
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	3.823.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cibogor	1 Paket	3.823.100,00	KELURAHAN CIBOGOR
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	14.301.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cibogor	1 Paket	14.301.200,00	KELURAHAN CIBOGOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.975.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cibogor	1 Paket	5.975.300,00	KELURAHAN CIBOGOR
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	63.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cibogor	1 Paket	63.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.224.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Cibogor	1 Paket	5.224.800,00	KELURAHAN CIBOGOR
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	156.600.000,00						100 persentase	156.600.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan	100 persent ase			100 persentase 100 persen	156.600.000,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perl indungan Sosial dan Kesiapsiag aan Penan ggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	Kelurahan Cibogor	100 persent ase	156.600.000,00	KELURAHAN CIBOGOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	156.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Cibogor	1 Dokumen	156.600.000,00	KELURAHAN CIBOGOR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						152.350.000,00							152.350.000,00	
	7.01	KECAMATAN						152.350.000,00							152.350.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			100 persentase 1 persentase 2 persentase 20 persentase	152.350.000,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	152.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persent ase			100 persentase	152.350.000,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Cibogor	100 persent ase	152.350.000,00	KELURAHAN CIBOGOR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			1 Unit	122.350.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Cibogor	11 Unit	122.350.000,00	KELURAHAN CIBOGOR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Cibogor	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR
		KELURAHAN CIWARINGIN						520.575.000,00							520.575.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						348.870.000,00							348.870.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						348.870.000,00							348.870.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 11,21 Nilai 28,52 Nilai 91,61 Nilai 93,45 Nilai 95 persentase	92.670.000,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	92.670.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persentase			100 persentase	92.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciwaringin	100 persentase	92.670.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.202.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciwaringin	1 Paket	1.202.500,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	8.714.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciwaringin	1 Paket	8.714.100,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	6.565.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciwaringin	1 Paket	6.565.800,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	72.570.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Ciwaringin	1 Paket	72.570.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 persent ase 1 persentas e 100 persent ase 2 persentas e 20 persenta se			100 persentase 1 persentase 20 persentase 2 persentase	171.705.000,00						100 persent ase 1 persentas e 100 persent ase 2 persentas e 20 persenta se	171.705.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persent ase			100 persentase	171.705.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Ciwaringin	100 persent ase	171.705.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakat an	3.330.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Ciwaringin	11 Lembaga Kemasyarak atan	3.330.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kepatuhan Anggaran Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</i>	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 94 persentase 100 persentase 28,52 Nilai 91,61 Nilai 93,45 Nilai 95 persentase			100 persentase	92.668.900,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	92.669.900,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persentase			100 persentase	92.668.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Gudang	100 persentase	92.669.900,00	KELURAHAN GUDANG
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	1.202.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Gudang	1 Paket	1.202.500,00	KELURAHAN GUDANG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	8.714.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Gudang	1 Paket	8.714.000,00	KELURAHAN GUDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	6.564.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Gudang	1 Paket	6.565.800,00	KELURAHAN GUDANG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	72.570.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Gudang	1 Paket	72.570.000,00	KELURAHAN GUDANG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.617.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Gudang	1 Paket	3.617.600,00	KELURAHAN GUDANG
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	289.800.000,00						100 Persentase	289.800.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan	100 persent ase			100 persentase 100 persen	289.800.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Gudang	100 persent ase	289.800.000,00	KELURAHAN GUDANG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			1 Dokumen	289.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Gudang	1 Dokumen	289.800.000,00	KELURAHAN GUDANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						233.080.000,00							233.080.000,00	
	7.01	KECAMATAN						233.080.000,00							233.080.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			100 persentase 1 persentase 20 persentase 2 persentase	233.080.000,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	233.080.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persentase			100 persentase	233.080.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Gudang	100 persentase	233.080.000,00	KELURAHAN GUDANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	3.330.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Gudang	11 Lembaga Kemasyarak atan	3.330.000,00	KELURAHAN GUDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			1 Unit	199.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Gudang	11 Unit	199.750.000,00	KELURAHAN GUDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Gudang	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN GUDANG
		KELURAHAN KEBON KALAPA							493.487.200,00						493.738.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						335.464.400,00							335.464.400,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						335.464.400,00							335.464.400,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 93,45 Nilai 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 11,21 Nilai 28,52 Nilai 91,61 Nilai 95 persentase	90.064.400,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	90.064.400,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persent ase			100 persentase	90.064.400,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kebon Kalapa	100 persent ase	90.064.400,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	640.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kebon Kalapa	1 Paket	640.200,00	KELURAHAN KEBON KALAPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	6.802.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kebon Kalapa	1 Paket	6.802.500,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	1.760.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kebon Kalapa	1 Paket	1.760.700,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	78.075.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kebon Kalapa	1 Paket	78.075.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	2.786.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Kebon Kalapa	1 Paket	2.786.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	245.400.000,00						100 Persentase	245.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan</i> <i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan</i>	100 persentase			100 persentase 100 persen	245.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kebon Kalapa	100 persentase	245.400.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	245.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kebon Kalapa	1 Dokumen	245.400.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						158.022.800,00							158.273.600,00	
	7.01	KECAMATAN						158.022.800,00							158.273.600,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan</i> <i>Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			100 persentase 1 persentase 20 persentase 2 persentase	158.022.800,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	158.273.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	100 persent ase			100 persentase	158.022.800,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kebon Kalapa	100 persent ase	158.273.600,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakat an	5.923.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kebon Kalapa	11 Lembaga Kemasyarak atan	5.923.600,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit			1 Unit	122.099.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kebon Kalapa	11 Unit	122.350.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kebon Kalapa	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
		KELURAHAN PALEDANG						687.837.493,00							687.837.615,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						423.878.600,00							423.878.700,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						423.878.600,00							423.878.700,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 93,45 Nilai 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 11,21 Nilai 28,52 Nilai 91,61 Nilai 95 persentase	103.478.600,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	103.478.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persent ase			100 persentase	103.478.600,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Paledang	100 persent ase	103.478.700,00	KELURAHAN PALEDANG
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.233.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Paledang	1 Paket	3.233.100,00	KELURAHAN PALEDANG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	12.152.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Paledang	1 Paket	12.152.600,00	KELURAHAN PALEDANG
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	6.474.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Paledang	1 Paket	6.474.600,00	KELURAHAN PALEDANG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	75.840.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Paledang	1 Paket	75.840.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			100 persentase 1 persentase 20 persentase 2 persentase	263.958.893,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	263.958.915,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persentase			100 persentase	263.958.893,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Paledang	100 persentase	263.958.915,00	KELURAHAN PALEDANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	4.521.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Paledang	11 Lembaga Kemasyarakatan	4.521.300,00	KELURAHAN PALEDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Kepatuhan Anggaran</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM</i> <i>Rata Rata Nilai SAKIP</i> <i>Aspek Evaluasi Internal</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan</i> <i>Rata Rata Nilai SAKIP</i> <i>Aspek Pengukuran Kinerja</i> <i>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana</i> <i>Rata Rata Nilai SAKIP</i> <i>Aspek Pelaporan Kinerja</i> <i>Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA</i>	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 93,45 Nilai 21,06 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 28,52 Nilai 91,61 Nilai 11,21 Nilai 95 persentase	104.625.000,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 94 persenta se 100 persent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	104.625.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persent ase			100 %	104.625.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegallega	100 persent ase	104.625.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	3.588.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegallega	1 Paket	3.588.600,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	7.834.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegallega	1 Paket	7.834.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	8.520.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegallega	1 Paket	8.520.400,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	78.150.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegallega	1 Paket	78.150.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	6.532.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tegallega	1 Paket	6.532.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	273.600.000,00						100 Persentase	273.600.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan</i>	100 persent ase			100 persen	273.600.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndungan sosial	Kelurahan Tegallega	100 persent ase	273.600.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakat an	3.375.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Tegallega	11 Lembaga Kemasyarak atan	3.375.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			1 Unit	192.567.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Tegallega	11 Unit	192.567.500,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Tegallega	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
		KELURAHAN SEMPUR							432.937.100,00						432.937.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						270.289.100,00							270.289.300,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						270.289.100,00							270.289.300,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 21,06 Nilai 93,45 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 94 persentase 91,20 Nilai 28,52 Nilai 11,21 Nilai 91,61 Nilai 95 persentase	91.489.100,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	91.489.300,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persentase			100 persentase	91.489.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sempur	100 persentase	91.489.300,00	KELURAHAN SEMPUR
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.694.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sempur	1 Paket	3.694.500,00	KELURAHAN SEMPUR
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	13.918.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sempur	1 Paket	13.918.400,00	KELURAHAN SEMPUR
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	6.041.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sempur	1 Paket	6.041.200,00	KELURAHAN SEMPUR
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	62.615.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sempur	1 Paket	62.615.000,00	KELURAHAN SEMPUR
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.220.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Sempur	1 Paket	5.220.200,00	KELURAHAN SEMPUR
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	178.800.000,00						100 Persentase	178.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan</i> <i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan</i>	100 persentase			100 persentase 100 persen	178.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sempur	100 persentase	178.800.000,00	KELURAHAN SEMPUR
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	178.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sempur	1 Dokumen	178.800.000,00	KELURAHAN SEMPUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						162.648.000,00							162.648.000,00	
	7.01	KECAMATAN						162.648.000,00							162.648.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan</i> <i>Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			1 persentase 100 persentase 20 persentase 2 persentase	162.648.000,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	162.648.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persent ase			100 persentase	162.648.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Sempur	100 persent ase	162.648.000,00	KELURAHAN SEMPUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakat an	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Sempur	11 Lembaga Kemasyarak atan	4.500.000,00	KELURAHAN SEMPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			1 Unit	128.148.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Sempur	11 Unit	128.148.000,00	KELURAHAN SEMPUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Sempur	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN SEMPUR
		KELURAHAN BABAKAN PASAR						550.400.000,00							550.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						303.700.000,00							303.700.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						303.700.000,00							303.700.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			100 persentase 21,06 Nilai 93,45 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 91,20 Nilai 94 persentase 28,52 Nilai 11,21 Nilai 91,61 Nilai 95 persentase	79.300.000,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	79.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 persent ase			100 persentase	79.300.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Babakan Pasar	100 persent ase	79.300.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.850.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Babakan Pasar	1 Paket	1.850.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	4.250.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Babakan Pasar	1 Paket	4.250.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Babakan Pasar	1 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	70.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Babakan Pasar	1 Paket	70.200.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 persent ase 1 persentas e 100 persent ase 2 persentas e 20 persenta se			1 persentase 100 persentase 20 persentase 2 persentase	246.700.000,00						100 persent ase 1 persentas e 100 persent ase 2 persentas e 20 persenta se	246.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persent ase			100 persentase	246.700.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Babakan Pasar	100 persent ase	246.700.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakata n	16.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan Babakan Pasar	11 Lembaga Kemasyarak atan	16.700.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek pemuenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemuenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemuenuhan sarana dan prasarana Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 percent ase 94 persenta se 100 percent ase 94 persenta se 100 percent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			28,52 Nilai 100 persentase 21,06 Nilai 93,45 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 91,20 Nilai 94 persentase 11,21 Nilai 91,61 Nilai 95 persentase	92.668.900,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 percent ase 94 persenta se 100 percent ase 94 persenta se 100 percent ase 90,66 Nilai 96,86 perse ntase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	92.668.900,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemuenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 percent ase			100 persentase	92.668.900,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pamaragan	100 percent ase	92.668.900,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.202.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Pamaragan	1 Paket	1.202.500,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	8.714.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Panaragan	1 Paket	8.714.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	6.564.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Panaragan	1 Paket	6.564.800,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	72.570.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Panaragan	1 Paket	72.570.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	3.617.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Panaragan	1 Paket	3.617.600,00	KELURAHAN PANARAGAN
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	187.200.000,00						100 Persentase	187.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan</i> <i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kelurahan</i>	100 persentase			100 persentase 100 persen	187.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Panaragan	100 persentase	187.200.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	187.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Panaragan	1 Dokumen	187.200.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						136.104.000,00							136.104.000,00	
	7.01	KECAMATAN						136.104.000,00							136.104.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan</i> <i>Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan</i> <i>Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase			1 persentase 100 persentase 20 persentase 2 persentase	136.104.000,00						100 persentase 1 persentase 100 persentase 2 persentase 20 persentase	136.104.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	100 persent ase			100 persentase	136.104.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Pamaragan	100 persent ase	136.104.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakat an	3.330.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Pamaragan	11 Lembaga Kemasyarak atan	3.330.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit			1 Unit	102.774.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Pamaragan	11 Unit	102.774.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Panaragan	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
		KELURAHAN PABATON						341.108.600,00							341.111.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						197.618.600,00							197.621.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						197.618.600,00							197.621.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai			28,52 Nilai 100 persentase 21,06 Nilai 93,45 Nilai 90,65 Nilai 22,14 Nilai 91,20 Nilai 94 persentase 11,21 Nilai 91,61 Nilai 95 persentase	92.618.600,00						28,53 Nilai 22,15 Nilai 11,22 Nilai 21,07 Nilai 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 94 persentase 100 persentase 90,66 Nilai 96,86 persentase 91,62 Nilai 93,46 Nilai 91,21 Nilai	92.621.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</i>	100 persent ase			100 persentase	92.618.600,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayananan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Pabaton	100 persent ase	92.621.000,00	KELURAHAN PABATON
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	1.898.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayananan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Pabaton	1 Paket	1.899.900,00	KELURAHAN PABATON
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	6.125.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayananan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Pabaton	1 Paket	6.125.700,00	KELURAHAN PABATON
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	5.317.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayananan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Pabaton	1 Paket	5.317.200,00	KELURAHAN PABATON
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	76.245.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayananan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan Pabaton	1 Paket	76.245.000,00	KELURAHAN PABATON
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	100 persent ase 1 persentas e 100 persent ase 2 persentas e 20 persenta se			1 persentase 100 persentase 20 persentase 2 persentase	143.490.000,00						100 persent ase 1 persentas e 100 persent ase 2 persentas e 20 persenta se	143.490.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persent ase			100 persentase	143.490.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Pabaton	100 persent ase	143.490.000,00	KELURAHAN PABATON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga K emasyarakat an	3.375.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Pabaton	11 Lembaga Kemasyarak atan	3.375.000,00	KELURAHAN PABATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			1 Unit	110.115.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Pabaton	11 Unit	110.115.000,00	KELURAHAN PABATON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Pabaton	33 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KELURAHAN PABATON
		KECAMATAN TANAH SAREAL						28.911.586.139,00							27.656.803.742,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.880.800,00							0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						18.880.800,00							0,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	- 75% 75%			- 75% 75%	18.880.800,00						- 75% 75%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan	100 present anse			1 Lembaga 100 presentanse	18.880.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	100 present anse	0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			1 Dokumen	18.880.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						28.892.705.339,00							27.656.803.742,00	
	7.01	KECAMATAN						28.892.705.339,00							27.656.803.742,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			27.01nilai 95 % 12.48 nilai 21.97 nilai 100 % 26.55 nilai 88.75 Nilai 81.11 nilai	27.877.993.891,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	26.541.803.742,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Presentanse penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu Presentanse realisasi anggaran kegiatan lingkup perangiat daerah</i>	100 present anse 100 present anse 96,86 prese ntanse 100 present anse			100 % 96,85 %	13.383.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	100 present anse 100 present anse 96.86 prese ntanse 100 present anse	7.500.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	6.500.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal		7.500.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	6.883.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	2 Laporan	0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan</i>	96,86 peres entanse 100 present anse			97 Orang/bulan	20.857.707.942,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	96.86 peres entanse 100 present anse	20.866.303.742,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	99 Orang/bulan			97 Orang/bulan	20.772.303.742,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	99 Orang/bulan	20.772.303.742,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	77.643.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	12 Paket	90.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	230.159.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Tanah Sareal	12 Paket	250.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	40.761.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	12 Paket	90.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	680.776.590,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	1 Laporan	580.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Perentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKMB</i>	100 peresen tanse			100 peresent anse	3.299.237.243,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	100 peresen tanse	3.400.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	186.283.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	678.402.143,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	1 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit			1 Unit	2.434.552.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	3 Unit	2.900.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Peresentanse Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 peresen tanse			100 peresent anse	1.826.087.532,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	100 peresen tanse	323.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			1 Laporan	303.476.956,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	12 Laporan	323.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan			1 Laporan	1.522.610.576,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	2 Laporan	0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Peresentanse BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik</i>	100 peresen tanse			100 peresent anse	663.319.079,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	100 peresen tanse	720.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	20 Unit			1 Unit	201.960.693,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	20 Unit	210.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1 Unit			1 Unit	205.589.986,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	1 Unit	220.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit			2 Unit	255.768.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan tanah sareal	12 Unit	290.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentanse keterwakilan kelompok rentan dalam musrembang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase Keterwakilan Perempuan dalam musrembang Kecamatan (kumulatif Kelurahan) Persentanse keterwakilan anak dalam musrembang kecamatan (kumulatif Kelurahan) Persentanse layanan yang dilaksanakan sesuai standar oprasional prosedur</i>	1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se 100 Persent ase			2 % 20 % 1 % 100 %	367.798.000,00						1 Persentas e 2 Persentas e 100 Persent ase 20 Persenta se 100 Persent ase	416.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			1 Laporan	234.306.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	1 Laporan	240.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			4 Laporan	234.306.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	1 Laporan	240.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentanse Jenis Pelayanan yang dilaksanakan masyarakat di kecamatan (7 pelayanan)	100 peresentanse			100 peresentanse	133.492.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	100 peresentanse	176.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	118.982.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	1 Dokumen	160.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	14.510.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			2 % 20 % 1 % 100 %	511.685.848,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	539.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentanse Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 presentanse			100 presentanse	511.685.848,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Tanah Sareal	100 presentanse	539.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	273.720.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kecamatan Tanah Sareal	33 Lembaga Kemasyarakatan	285.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1 Lembaga K emasyarakat an			1 Lembaga K emasyarakat an	218.905.848,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndan ngan sosal	Kecamatan Tanah Sareal	1 Lembaga K emasyarakat an	230.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	1 Laporan			1 Laporan	13.060.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perli ndan ngan sosal	Kecamatan Tanah Sareal	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	1 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Presentanse gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan ditingkat kecamatan</i>	88.1 %			5 %	135.227.600,00						88.1 %	160.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 21.97nilai 95 % 27.01 nilai 12.48 nilai 26.55 nilai 88.38 Nilai 88.75 nilai	84.557.300,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	0,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	84.557.300,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan tanah sareal	100 peresen tanse	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	2.147.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan tanah sareal	12 Paket	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	10.304.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan tanah sareal	12 Paket	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	11.248.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan tanah sareal	12 Paket	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	58.515.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan tanah sareal	12 Paket	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	2.342.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan tanah sareal	12 Paket	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	195.600.000,00						100 Persentase	200.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan</i>	100 present anse			100 presentanse	195.600.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tanah Sareal	100 present anse	200.000.000,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			1 Dokumen	195.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan Tanah Sareal	12 Dokumen	200.000.000,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						325.572.100,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						325.572.100,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	325.572.100,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	325.572.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	100 present anse	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			6 Lembaga Kemasyarakatan	11.529.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	11 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			2 Unit	299.042.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal	11 Unit	0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kecamatan Tanah Sareal		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL
		KELURAHAN KEBON PEDES						1.206.680.200,00							158.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						506.413.800,00							133.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						506.413.800,00							133.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan anggaran Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 88.75 nilai 95 % 27.01 nilai 12.48 nilai 21.97 nilai 26.55 nilai 88.38 nilai	118.813.800,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	133.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	118.813.800,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan kebon pedes	100 peresen tanse	133.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	2.224.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan kebon pedes	12 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	15.096.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan kebon pedes	12 Paket	18.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	3.034.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan kebon pedes	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	94.590.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayananan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayananan Publik	Kelurahan kebon pedes	12 Paket	100.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	700.266.400,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	25.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	700.266.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kebon pedes	100 present anse	25.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	7.406.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kebon pedes	11 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	1.015.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung badak	12 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	76.275.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung badak	12 Paket	0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	921.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung badak	12 Paket	0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	498.000.000,00						100 Persentase	510.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan</i>	100 present anse			100 presentanse	498.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan kedung badak	100 present anse	510.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			3 Dokumen	498.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kedung badak	12 Dokumen	510.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						737.086.900,00							881.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						737.086.900,00							881.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	737.086.900,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	881.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	737.086.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan Kedung Badak	100 present anse	881.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	8.684.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kedung Badak	11 Lembaga Kemasyarak atan	11.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			4 Unit	714.782.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kedung Badak	11 Unit	870.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	13.620.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kedung Badak		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
		KELURAHAN KEDUNG JAYA							698.360.900,00						756.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	13.574.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung jaya	12 Paket	16.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	3.349.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung jaya	12 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	81.090.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung jaya	12 Paket	86.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	12.752.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung jaya	12 Paket	16.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	227.400.000,00						100 Persentase	240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan</i>	100 present anse			100 presentanse	227.400.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kedung jaya	100 present anse	240.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	12 Dokumen			3 Dokumen	227.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan Kedung jaya	12 Dokumen	240.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						354.954.700,00							387.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						354.954.700,00							387.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e			1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	354.954.700,00						20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e	387.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan</i>	100 present anse			100 presentanse	354.954.700,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung jaya	100 present anse	387.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	7.354.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung jaya	11 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit			2 Unit	332.599.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan kedung jaya	11 Unit	360.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kedung jaya		17.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA
		KELURAHAN KEDUNG WARINGIN						962.085.200,00							922.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						506.292.100,00							439.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						506.292.100,00							439.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Persentase realisasi anggaran terhadap DPA</i> <i>Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah</i> <i>Transparansi pengelolaan keuangan daerah</i>	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 88.38 nilai 12.48 nilai 21.97 nilai 95 % 88.38 nilai 27.01 nilai 26.55 nilai 81.11 nilai	115.092.100,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	39.000.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah</i>	100 peresentanse			100 peresentanse	115.092.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung waringin	100 peresentanse	39.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	2.407.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung waringin	12 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	14.962.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung waringin	12 Paket	16.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	2.881.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung waringin	12 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	82.950.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung waringin	12 Paket	0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	11.890.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kedung waringin	12 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	455.793.100,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	483.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	455.793.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kedung warangin	100 present anse	483.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan			1 Lembaga Kemasyarakatan	13.400.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kedung warangin	11 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 88.38 nilai 12.48 nilai 21.97 nilai 88.75 nilai 26.55 nilai 27.01 nilai 88.31 nilai	96.333.700,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	114.000.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	96.333.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	100 peresen tanse	114.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	3.465.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	12 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	19.351.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	12 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	4.163.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	67.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	12 Paket	80.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	1.363.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	12 Paket	8.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	309.000.000,00						100 Persentase	310.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan</i>	100 present anse			100 presentanse	309.000.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	100 present anse	310.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			3 Dokumen	309.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukadamai	12 Dokumen	310.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						541.871.566,00							538.300.000,00	
	7.01	KECAMATAN						541.871.566,00							538.300.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	541.871.566,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	538.300.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	541.871.566,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan sukadamai	100 present anse	538.300.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	11.014.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan sukadamai	11 Lembaga Kemasyarak atan	1.300.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			2 Unit	515.857.066,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan sukadamai	11 Unit	520.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan sukadamai		17.000.000,00	KELURAHAN SUKADAMAI
		KELURAHAN SUKARESMI							694.737.520,00							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						301.150.800,00							316.500.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						301.150.800,00							316.500.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 81.11 nilai 12.48 nilai 21.97 nilai 88.38 nilai 27.01 nilai 26.55 nilai 88.75 nilai	88.880.800,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	106.500.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	88.880.800,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	100 peresen tanse	106.500.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	4.245.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	9.737.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	12 Paket	12.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	1.981.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	12 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	68.630.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	12 Paket	80.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	4.287.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	212.270.000,00						100 Persentase	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan	100 present anse			100 presentanse	212.270.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	100 present anse	210.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			3 Dokumen	212.270.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	12 Dokumen	210.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						393.586.720,00							397.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						393.586.720,00							397.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e			1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	393.586.720,00						20 Persenta se 100 Persent ase 1 Persentas e 2 Persentas e	397.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	393.586.720,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan sukaresmi	100 present anse	397.000.000,00	KELURAHAN SUKARESMI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 88.38 nilai 12.48 nilai 21.97 nilai 81.11 nilai 27.01 nilai 26.55 nilai 88.75 nilai	111.096.600,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	124.000.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	111.096.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	100 peresen tanse	124.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	2.586.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	12 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	14.769.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	12 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	4.378.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	81.505.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	12 Paket	85.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	7.857.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	12 Paket	10.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	398.400.000,00						100 Persentase	420.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan</i>	100 present anse			100 presentanse	398.400.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	100 present anse	420.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	12 Dokumen			3 Dokumen	398.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan cibadak	12 Dokumen	420.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						502.066.020,00							527.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN						502.066.020,00							527.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP</i>	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	502.066.020,00							20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	527.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan</i>	100 present anse			100 presentanse	502.066.020,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan cibadak	100 present anse	527.000.000,00	KELURAHAN CIBADAK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 12.48 nilai 88.38 nilai 21.97 nilai 88.75 nilai 26.55 nilai 27.01 nilai 81.11 nilai	109.363.400,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	122.000.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	109.363.400,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan mekarwangi	100 peresen tanse	122.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	3.754.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan mekarwangi	12 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	16.935.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan mekarwangi	12 Paket	12.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	4.833.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan mekarwangi	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	82.470.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan mekarwangi	12 Paket	90.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	1.370.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan mekarwangi	12 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	393.000.000,00						100 Persentase	410.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan</i>	100 present anse			100 presentanse	393.000.000,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan mekarwangi	100 present anse	410.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			3 Dokumen	393.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan mekarwangi	12 Dokumen	410.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						348.647.200,00							385.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						348.647.200,00							385.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			100 Persentase 1 Persentase 20 Persentase 2 Persentase	348.647.200,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	385.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	348.647.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan mekarwangi	100 present anse	385.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	10.854.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan mekarwangi	11 Lembaga Kemasyarak atan	15.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit			3 Unit	322.781.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan mekarwangi	11 Unit	350.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	15.012.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan mekarwangi		20.000.000,00	KELURAHAN MEKARWANGI
		KELURAHAN KENCANA							1.324.043.000,00						0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						562.917.100,00							0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						562.917.100,00							0,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 12.48 nilai 88.38 nilai 81.11 27.01 nilai 21.97 nilai 26.55 nilai 88.75 nilai	115.917.100,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	0,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresen tanse			100 peresent anse	115.917.100,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana	100 peresen tanse	0,00	KELURAHAN KENCANA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	6.071.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana	12 Paket	0,00	KELURAHAN KENCANA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	19.530.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana	12 Paket	0,00	KELURAHAN KENCANA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	4.420.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana	12 Paket	0,00	KELURAHAN KENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	77.820.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana	12 Paket	0,00	KELURAHAN KENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	8.076.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana	12 Paket	0,00	KELURAHAN KENCANA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	75% 75%			75% 75%	447.000.000,00						100 Persentase	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan	100 present anse			100 presentanse	447.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan kencana	100 present anse	0,00	KELURAHAN KENCANA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			3 Dokumen	447.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan kencana	12 Dokumen	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						761.125.900,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						761.125.900,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	761.125.900,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan</i>	100 present anse			100 presentanse	761.125.900,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan kencana	100 present anse	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	11.840.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan kencana	11 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	11 Unit			5 Unit	732.781.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Kelurahan kencana	11 Unit	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	16.504.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kencana		0,00	KELURAHAN KENCANA
		KELURAHAN KAYUMANIS						910.860.000,00							951.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						409.303.500,00							421.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						409.303.500,00							421.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Persentase realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai			100 % 12.48 nilai 88.38 nilai 81.11 nila 27.01 nilai 21.97 nilai 26.55 nilai 88.75 nilai	115.303.500,00						94 % 100 % 95 % 100 % 89.25 nilai 89.39 nilai 87.87 nilai 21.98 nilai 13 nilai 26.82 nilai 27.34 nilai 100 % 94 % 89.39 nilai	121.000.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentanse Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100 peresentanse			100 peresentanse	115.303.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publiik	Kelurahan kayumanis	100 peresentanse	121.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	3.236.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kayumanis	12 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	22.607.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kayumanis	12 Paket	25.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	3.800.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kayumanis	12 Paket	0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	84.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kayumanis	12 Paket	90.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	1.059.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kayumanis	12 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif</i>	75% 75%			75% 75%	294.000.000,00						100 Persentase	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentanse lembaga kemasyrakat (LPM,RW,RT) tingkat Kecamatan	100 present anse			100 presentanse	294.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan kayumanis	100 present anse	300.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen			1 Dokumen	294.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan kayumanis	12 Dokumen	300.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						501.556.500,00							530.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						501.556.500,00							530.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP	20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase			2 Persentase 1 Persentase 100 Persentase 20 Persentase	501.556.500,00						20 Persentase 100 Persentase 1 Persentase 2 Persentase	530.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	100 present anse			100 presentanse	501.556.500,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan kayumanis	100 present anse	530.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarak atan			1 Lembaga K emasyarakat an	8.071.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perлинд ungan sosial	Kelurahan kayumanis	11 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			3 Unit	479.815.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kelurahan kayumanis	11 Unit	500.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	13.670.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Kelurahan kayumanis		20.000.000,00	KELURAHAN KAYUMANIS
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						36.777.575.138,00							0,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						36.777.575.138,00							0,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						36.777.575.138,00							0,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di Lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Aspek pemenuhan kualitas SDM Nilai SaKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKMaspek pemenuhan persyaratan, prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas sarana prasarana Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat Daerah Persentase pengelolaan BMD yang di kelola sesuai dengan ketentuan	-			Nilai 88.38 Nilai 12.48 Nilai 21.97 Nilai 88.75 Nilai 26.55 Nilai 27.01 Nilai 88.38 Nilai 81.11 Persen 100 Persen 94	9.182.811.938,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, perangkat Daerah</i>	-			Persen 100	30.999.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				12 Laporan	30.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			Persen 100	5.045.300.541,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	5.045.300.541,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah</i>	-			Persen 100	2.606.053.276,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	441.150.876,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	398.471.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	13.946.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Pembangu nan Infrastr uktur berkel anjutan	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	243.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.509.485.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			Persen 50	747.611.400,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	109.614.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	274.444.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	363.552.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			Persen 100	287.357.116,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	39.985.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				7 Laporan	247.372.016,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD dilingkup Bakesbangpol berkodisi baik</i>	-			Persen 100	465.489.805,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	218.541.105,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				39 Unit	49.576.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	197.372.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk</i>	Rasio 13			Rasio 13	1.344.914.600,00						Rasio 13	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah msyarakat yang memperoleh penyuluhan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang di implementasikan	-			Orang 81600	1.344.914.600,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				136 Orang	496.558.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				60 Orang	848.356.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaa n serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlind ungan sosial	Masyarakat Kota Bogor		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dalam Pemilu Persentase Partisipasi Persentase Partisipasi Perempuan sebagai anggota legeslatif	-22% 100%			22% 100%	5.873.162.800,00							0,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			Persen 100	5.873.162.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Partai Politik Kota Bogor	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				250 Orang	5.873.162.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Partai Politik Kota Bogor		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	52.51%			52.51%	1.224.621.600,00						52.51%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdauaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-			Laporan 1 Persen 100	1.224.621.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1.224.621.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kebijakan dalam Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	1 dokumen			1 Dokumen	327.296.800,00						1 dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen dalam Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	-			Dokumen 1	327.296.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	227.296.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat Kota Bogor		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik SARA yang Tertangani	-			Persen 100	18.824.767.400,00						-	0,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tersusunnya kebijakan teknis dalam rangka Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			Persen 100	18.824.767.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Instansi Vertikal	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				19 Orang	18.824.767.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Instansi Vertikal		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							2.920.067.841.902,00							3.002.360.525.534,00	

Lampiran

BAB V
Tabel 5.17
Hasil Identifikasi Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jalan selot, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Fasilitasi Sarana Pengolahan Perikanan (Bantuan sarana pengolahan perikanan)	cilendek timur RT.01 RW.03 NO 51, Kota Bogor	1	EKOR	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Gg. Biawas RT. 003 RW. 011 Kebon Pedes, Kota Bogor	450	m'	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Kebon Anggrek Lebak RT. 004 dan RT. 003 RW. 002 Kebon Pedes, Kota Bogor	250	m'	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Pondok Rumput RT. 002, RT. 0003, RT. 004 RW. 005 Kebon Pedes, Kota Bogor	80	titik	DINAS PERHUBUNGAN
6	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Blender RT. 004 dan RT. 007 RW. 003 Kebon Pedes, Kota Bogor	80	titik	DINAS PERHUBUNGAN
7	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	Blender RT. 001, 004, 007 RW. 003 Kebon Pedes, Kota Bogor	120	m'	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			yang berada di luar nama jalan kota)				
8	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Pondok Rumput RT. 001 RW. 013 Kebon Pedes, Kota Bogor	120	m'	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
9	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyelenggaraan Ketrampilan Kerja berbasis kompetensi (diselenggarakan oleh BLK diprioritaskan untuk masyarakat miskin)	Jl. Kebon Pedes, Kota Bogor	40	peserta	DINAS TENAGA KERJA
10	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Manunggal RT. 006 dan RT. 005 RW. 008 Kebon Pedes, Kota Bogor	80	unit	DINAS PERHUBUNGAN
11	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Pacilong Kampung Sawah Kali Cibalok RW. 004 Kebon Pedes, Kota Bogor	350	m'	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Jl. Pondok Rumput 2 (Gamblok) RT. 003 RW. 002 Kebon Pedes, Kota Bogor	855	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	Jl. Kebon Pedes , Kota Bogor	30	sasaran	DINAS KESEHATAN
14	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Jl. Kebon Pedes 1 (Rel Kebon Pedes ke arah Manunggal RW. 8, Kota Bogor	4000	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Jl. Kebon Pedes, Kota Bogor	20	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
16	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian, marawis, hadroh)	Jl. Kebon Pedes, Kota Bogor	3	set	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Pondok Rumput RT. 003 dan RT. 004 RW. 005 Kebon Pedes, Kota Bogor	1084	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
18	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Pacilong RT. 004 dan RT. 006 RW. 10 Kebon Pedes, Kota Bogor	120	m'	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
19	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Pacilong RW. 004 dan ke RW. 010 Kebon Pedes, Kota Bogor	1083	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jl. cipaku Sukaasih RT 03/ 12 kelurahan Cipaku , Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	62	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
21	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	gang Sukaasih RT 03/12 Kel. Cipaku Kec. bogor selatan kota bogor, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
22	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	Jl.KH.TB.M.Falak NO. 319 Loji, Bogor Barat, Kota Bogor	300	peserta	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
23	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Jalan Riau Rw. 03 Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	856	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Wargaluyu Rt. 01/Rw 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur- Kota Bogor , Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
25	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Wargaluyu Rt. 01/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor , Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
26	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung- Cisadane	Wargaluyu Rt. 01/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, , Kota Bogor	60	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Babakan Asem Rt. 02/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor , Kota Bogor	480	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Babakan Asem Rt. 02/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	2700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
29	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Babakan Asem Rt. 02/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor , Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
30	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Ciburial Indah Rt. 03/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	900	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Ciburial Indah Rt. 03/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor timur , Kota Bogor	1600	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Ciburial Rt. 04/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1080	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Ciburial Rt. 04/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor timur , Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
34	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das	Ciburial Rt. 04/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	480	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
35	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Pulo Armin Rt. 05/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	360	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Pulo Armin Rt. 05/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	20	titik	DINAS PERHUBUNGAN
37	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Pulo Armin Rt. 05/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1084	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
38	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Babakan Asem Rt. 02/Rw. 04 Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	35	Unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
39	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Ciheuleut Rt. 05/Rw. 08, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	560	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
40	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Ciheuleut Rt. 05/Rw. 08, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
41	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jalan Pakuan Ciheuleut Rt. 02/Rw. 09, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	4200	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
42	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Pakuan Ciheuleut Rt 02/Rw. 09, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	560	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
43	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Tegal manggah Rt. 05/Rw. 08, Kel. Tegal Lega, Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor	50	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Tegal Manggah Rt. 05/Rw. 08, Kel. Tegal Lega, Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor	40	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
45	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Katulampa Sirnagalih Rt. 02/Rw. 21, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	400	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
46	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit,)	Jl.KH.TB.M.Falak No.319, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Kota Bogor	60	peserta	DINAS TENAGA KERJA
47	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Rt. 05 / Rw. 09, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	500	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
48	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kampung salabenda got RT 01 RW 08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	525	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
49	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	KEDUNG BADAQ RT 4 RW 2 KEL KEDUNG BADAQ KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	Unit	DINAS SOSIAL
50	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Katulampa Sirnagalih Rt. 02/Rw. 21, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
51	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Tangkil Rt. 01/Rw. 05, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	1200	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
52	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Tangkil Rt. 01/Rw. 05, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1500	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
53	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Kp. Tangkil Rt. 01/Rw. 05, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	155	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	gang mushola Asshidiqien RT 01 RW 03 Kelurahan Cilendek timur, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	595	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
55	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Katulampa Panjang Rt. 05/Rw. 09, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	900	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
56	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Katulampa Buled Rt. 02,05/Rw. 09, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1084	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
57	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	katulampa Rt. 02, 05/Rw. 09, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	169	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
58	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Ciburial Indah Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	4	Unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
59	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Ciburial Indah Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Bogor Timur , Kota Bogor	4	Unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
60	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Ciburial Indah Rt. 03/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
61	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Prasarana Penanggulangan Bencana dan fasilitas penunjang (rambu kebencanaan, alat peringatan dini banjir, ringboy/pelampung, alat komunikasi, chainsaw, alat fogging)	Ciburial Indah Rt. 03/Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	2	Unit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
62	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	Babakan Asem Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERHUBUNGAN
63	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	Babakan Asem Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	5	Unit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
64	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL SRIWIJAYA RT 05 RW 07 KELURAHAN KEDUNGBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	855	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
65	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL BOROBUDUR RT 04 RW 09 KELURAHAN KEDUNG BADAK , KECAMATAN TANAH SAREAL, 16164, Kota Bogor	220	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
66	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL RAMBUTAN RT 02 RW 09 KELURAHAN KEDUNG BADAK, KECAMATAN TANAH SAREAL , 16164, Kota Bogor	220	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
67	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL PANATARAN RT 03/ RW 09 KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, 16164, Kota Bogor	520	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
68	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL PAWON JL CIMANGGU PERMAI I RT 07/ RW 09 KELURANG KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL , KOTA BOGOR, 16164. , Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
69	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL PAWON M RT 02 RW 07 KELURAHAN KEDUNG BADAK KEC TANAH SAREAL , 16164, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
70	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 04, 05 DAN 06 , RW 09 KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	20	unit	DINAS PERHUBUNGAN
71	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 01 RW 06 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	9,2	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
72	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 06 RW 03 KELURAHAN KEDUNGWARINGIN KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	6,9	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
73	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 05 RW 07 KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1200	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
74	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 06 RW 08 KELURAHAN KEDUNGBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	123	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
75	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIMANGGU AMIL RT 01 RW 09 KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	720	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
76	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 05 RW 01 KELURAHAN KEDUNG JAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	123	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
77	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 05 RW 01 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
78	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati Atas RT. 1,2,3,4,5 RW 02 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	900	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
79	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Legok setu Beureum RT 01/RW 01, kel. bojongkerta, Kec. Bogor Selatan 16139, Kota Bogor	618	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
80	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp. Legok setu Beureum RT 01/RW 01, kel. bojongkerta, Kec. Bogor Selatan 16139, Kota Bogor	15,3	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
81	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Villa Bogor Indah 3 Rt 6/15 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
82	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati Atas RT. 02 RW. 09 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
83	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	BAntarjati Kaum Rt. 04/12 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
84	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SAWAH RT 001 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
85	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bantarjati Atas Rt. 03/13 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	400	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
86	Syafei,ST	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KP SAWAH RT 001 DAN 002 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
87	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Rehabilitasi dan revitalisasi	Jl. Skip, Gedong tujuh RT 04, RW 01, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	35	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang				
88	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP SAWAH RT 001 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
89	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP SAWAH RT 002 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	110	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
90	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP SAWAH RT 002 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA, Kota Bogor	7	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
91	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP SAWAH RT 001 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	150	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SAWAH RT 001 DAN 002 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
93	Syafei,ST	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	KP SAWAH RT 002 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	10	Unit	DINAS KESEHATAN
94	Syafei,ST	Partai Demokrat	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	KP SAWAH RT 002 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
95	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP BLOK PAKU RT 003 RW 010 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	100	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	Syafei,ST	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KP SAWAH RT 001 RW 006 KELURAHAN TANAH BARU KECAMATAN BOGOR UTARA, Kota Bogor	14	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
97	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SAWAH RT 006 RW 007 KELURAHAN TANAH BARU KECAMATAN BOGOR UTARA, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
98	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP SAWAH RT 004 RW 007 KELURAHAN TANAH BARU KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	100	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
99	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	BUMI MENTENG ASRI PEMUTIHAN RT 04 RW 11 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	55	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
100	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	BLOK PEMUTIHAN RT 04 RW 11 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	120	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
101	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	KP SAWAH RT 001 RW 006 KELURAHAN TANAH BARU KECAMATAN BOGOR UTARA, Kota Bogor	12	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
102	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kalibata RT. 1,2,3,4 RW 11 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	900	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
103	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati atas RW 9 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
104	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl. Pajajaran RT. 03/03 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
105	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KUKUPU RT 05 RW 06 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR 16166, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
106	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KUKUPU RT 03 RW 06 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR 16166, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
107	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KUKUPU RT 03 RW 06 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR 16166, Kota Bogor	250	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
108	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KUKUPU RT 04 RW 06 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR 16166, Kota Bogor	50	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
109	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kampung Kukupu RT04 RW06, Kel Cibadak, Kota Bogor, Kota Bogor	50	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
110	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp Kukupu RT05 RW06, Kelurahan Cibadak, Kota Bogor, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
111	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	Kp. Kukupu RT05 RW06, Kelurahan Cibadak, Kota Bogor, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
112	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Kukupu RT05 RW06, Kelurahan Cibadak, Kota Bogor	120	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
113	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Lingkungan RT 01-05 RW 5 Kel Menteng Gg Koprul Yusuf, Gg Letnan H Dahlan, Gg Letnan Umar, Gg Maslim, Kota Bogor	1084	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
114	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	Jl. Menteng RT : 01 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	100	m2	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
115	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian, marawis, hadroh)	Lokasi : Gedung Serbaguna RW 05 RT : 03 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	1	Set	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
116	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	gang masjid Alhidayah RT 07 RW 02 Bojongkidul Kel. Bojongkerta. kec. bogor Selatan, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
117	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	Posyandu Pesat RW 05 RT : 03 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	1	Set	DINAS KESEHATAN
118	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	Gedung Serbaguna RW 05 RT : 03 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	5	unit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
119	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Kopo II No.13, RT.02/RW.06, Cibadak, tanah sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Indonesia, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
120	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Cilendek Indah, RW 06 Kelurahan Cilendek barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1950	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
121	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Kukupu RT.02/RW.06, Cibadak, tanah sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Indonesia, Kota Bogor	120	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
122	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	cemplang baru RT 4 RW 10 Kelurahan Cilendek barat kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	240	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
123	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Kukupu, Gang Kopo III, RT02 RW06, Kelurahan Cibadak, Kota Bogor, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
124	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	gang H. Dafi Kp. pahlawan RT 02 RW 17 Kelurahan Cilendek barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	390	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
125	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Depan Masjid Nurul Iman Kp. pahlawan RT 04 RW 17 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	13	unit	DINAS PERHUBUNGAN
126	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gang Nasedin RT 01,02,03 RW 02 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1084	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
127	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Gang Nasedin RW 02 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	15	unit	DINAS PERHUBUNGAN
128	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Lingkungan RW 05 RT : 01 - 05 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
129	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Rt 01, 02 dan 03 Rw 04 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	35	titik	DINAS PERHUBUNGAN
130	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Rt 01 Rw 04 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	9,2	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
131	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Rt 01, 02,03 Rw 04 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
132	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Kebon Kopi Rt 01 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	169	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
133	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kebon Kopi Rt 04 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
134	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kebon Kopi Rt 04 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	29,5	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
135	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kebon Kopi Rt 05 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	29,5	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
136	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Kebon Kopi Rt 05 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	100	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
137	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kebon Kopi Rt 05 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	29,5	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
138	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kebon Kopi Rt 05 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	300	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
139	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Kebon Kopi Rt 03 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	50	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
140	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kebon Kopi Rt 03 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
141	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	Kebon Kopi Rt 04 Rw 06 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	75	meter	DINAS PERHUBUNGAN
142	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Menyebarkan di Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	100	Siswa	DINAS PENDIDIKAN
143	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bantarjati Lebak RT . 5 RW. 08 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
144	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati Lebak RT. 1,2,3,4,5 RW. 08 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
145	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati Lebak RT, 01,02,03,04,05 RW. 01 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	1084	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
146	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	CQXG+4G6, Jl. Sholeh Iskandar, RT.02/RW.05, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Indonesia, Kota Bogor	160	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
147	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Jln. Cimahpar RT 03 RW 06 Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor	105	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
148	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	Jalan Abiyasa Karya No. 4 RT 04/RW 16, Bantarjati, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
149	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Ambika No. 46 RT 16 RW 04 Bantarjati, Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
150	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	CQWG+JH5, Kukupu Gg Waru, RT.03/RW.05, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Indonesia, Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
151	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Anggada 1 No 05 RT 05 RW 15 Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
152	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Jalan Ceremai Ujung No 37 RT 04 RW 01 Bantar Jati Utara, Kota Bogor	16	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
153	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Palayu Ujung Tegal Gundil RT 1, 2, 3 RW 12, Kota Bogor	780	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
154	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Babakan Indo Baso RT 1,2,3 RW 09 Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor	840	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
155	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sarana Bibit Ternak (Bantuan bibit ternak)	Kelurahan Cimahpar RT 02 RW 06, Kota Bogor	10	Ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
156	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	FQ2G+342, Jl. Baru, Gg Musholla RT.02/RW.05, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Indonesia, Kota Bogor	30	tiang	DINAS PERHUBUNGAN
157	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Shell Soleh Iskandar 2, Gg. Sahabat No.7, RT.04/RW.05, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
158	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KOMPLEK MINA BHAKTI RT 004 RW 003 KELURAHAN CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1200	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
159	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KOMPLEK MINA BHAKTI RT 004 RW 003 KEL. CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	165	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
160	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp.Bayawak RT 003/012 kelurahan cilendek barat, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
161	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KOMPLEK MINTA BHATI RT 005 RW 003 KEL. CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
162	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KOMPLEK MINA BHAKTI RT 005 RW 003 KEL. CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	90	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
163	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KOMPLEK MINA BHAKTI RT 006 RW 003 KEL. CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
164	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp.emplak rt 1 rw 3 kelurahan bubulak bogor barat (ID 15119), Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
165	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KOMPLEK MINA BHAKTI RT 006 RW 003 KEL. CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	90	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
166	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIBEUREUM Gg. MASJID RT 004 RW 008 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	750	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
167	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang	jalan raya emplak gg plamboyan 1 RT 003/006 kelurahan Semplak, Kota Bogor	10	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)				
168	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jalan cemplang Baru RT 001/010 Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
169	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	CIBEUREUM Gg. BATAS RT 001 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	36	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
170	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIBEUREUM Gg. BATAS RT 001 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	960	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
171	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jalan Cijahe RT 003/013 kelurahan cilendek barat, Kota Bogor	20	titik	DINAS PERHUBUNGAN
172	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RW 006 kelurahan curug mekar, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
173	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP NAGROG RT 01 RW 09 KELURAHAN PAMOYANAN, Kota Bogor	64	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
174	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Muarasari RT 01 RW 04, Kel. Mauarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	108	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
175	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Muarasari RT 04 RW 04, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	4200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
176	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Cemplang Baru RT 003/012 depan rumah ibu nengsih ketua RT 003/012 Kelurahan cilendek Barat , Kota Bogor	30	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
177	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Sindang Resmi RT 03/ RW 018 Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan. , Kota Bogor	150	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
178	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bondongan RT 02 RW 18, Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	80	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
179	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bondongan RT 01 RW 18, Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	70	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
180	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Kelurahan Bondongan RT 3 RW 18, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1200	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
181	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rehabilitasi ruang kelas SD (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang SD, untuk sekolah swasta diusulkan sebagai hibah)	SD Lawanggintung 4 Jl. Lawanggintungg, RT 02 RW 02, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	280	m2	DINAS PENDIDIKAN
182	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembeljaran lainnya)	SD Lawanggintung 4, Jl. Lawanggintung RT 02/ RW 02, Desa Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
183	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rehabilitasi ruang kelas SMP (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang SMP, untuk sekolah swasta diusulkan sebagai hibah)	SMP Sapta Marga, RT 02/ RW 02, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	144	m2	DINAS PENDIDIKAN
184	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Asrama Pusdikzi RT 01 RW 02, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	21	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
185	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	gg swadaya RT 002/002 kelurahan semplak, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
186	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Komplek ABRI RT 02/RW 03, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	25	Unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
187	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Cikaret RT 01/RW 09, Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	90	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
188	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Cipaku Skip Baru RT 01, 02 RW 16, Kel. Cipaku, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	15	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
189	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Cipaku Skip Baru RT 01, 03 RW 16, kel. Cipaku, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
190	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Cipaku Skip Baru RT 01, 02, 03 RW 16, Kel. Cipaku, kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	100	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
191	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel. Rancamaya RT 03 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	360	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
192	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kelurahan Rancamaya RW 04, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	146	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
193	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Hibah Pokdarwis (Permohonan Hibah untuk Pokdarwis	jalan raya semplak gg plamboyan 1 RT 003/006 kampung tematik sicapit, Kota Bogor	1	kegiatan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
194	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kel. Rancamaya RW 04, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	12000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
195	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kelurahan rancamaya RT 01 RW 04, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
196	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kel. Cikaret RW 09, Kota Bogor	50	Titik	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
197	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel. Bondongan RT 01 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	450	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
198	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel. Bondongan RT 02 RW 03, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	280	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
199	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel. Bondongan RT 03 RW 03, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	280	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
200	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	Kel. Bondongan RT 01 RW 03, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
201	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kel. Bondongan RT 02 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
202	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp jawa rt 003 rw 006 kel situ gede, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
203	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kel. Bondongan RT 03 RW 03, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
204	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kel. Muarasari RT 01 RW 05, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	16	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
205	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kel. Muarasari RT 01 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	123,4	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
206	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kel. Muarasari RT 01 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	20	titik	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
207	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel.Rancamaya RT 03 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	360	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
208	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel. Batu Tulis RT 01 RW 09, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	640	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
209	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kel. Batu Tulis RT 02 RW 09, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	324	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan					
210	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP Situ Beureum Kel. Bojongkerta RT 01/RW 01, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	29,4	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
211	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bumi Menteng Asri RT 04 RW 11 Kelurahan menteng Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	150	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
212	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KAMPUNG BALUBUR RT 01 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
213	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Jl Lawanggintung NO. 4 RT 06 RW 06 Kel. Batu Tulis Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	52	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
214	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KAMPUNG BALUBUR RT 01 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	169	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
215	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bojong Neros Rt 05 Rw 13 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
216	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kelurahan Muarasari RT 01 RW 05 Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	50	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
217	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bojong Neros Rt 05 Rw 13 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	169	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
218	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	Kelurahan Bondongan RT 01 RW 03, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	6	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
219	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KAMPUNG BALUBUR PESANTREN RT 02 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	29,5	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
220	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KAMPUNG BALUBUR PESANTREN RT 02 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	120	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
221	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	23 Jl. Rimba Mulya 1 RT 2 RW 1kelurahan Pasir Mulya, kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	25	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
222	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KAMPUNG BALUBUR PESANTREN RT 02 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
223	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bojong Neros Rt 05 Rw 13 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	40	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
224	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KAMPUNG BALUBUR PESANTREN RT 02 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1078	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
225	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KAMPUNG BALUBUR SARI RT 03 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	15,3	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
226	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Bojong Neros Rt 05 Rw 13 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	100	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
227	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KAMPUNG BALUBUR RT 03 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
228	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di	JALAN LEBAK SARI RT 03 RW 05 KELURAHAN MUARASARI	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor			
229	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Sindangsari Rt 06 Rw 07 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	400	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
230	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Sindangsari Rt 06 Rw 07 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	100	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
231	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Sindangsari Rt 06 Rw 07 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	50	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
232	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN LEBAK SARI RT 04 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	100	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
233	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	jalan raya semplak RW 002 kelurahan semplak, Kota Bogor	169	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
234	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	LEBAK SARI RT 04 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
235	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan raya semplak RW002 kelurahan semplak, Kota Bogor	1200	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
236	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KAMPUNG BALUBUR RT 04 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1020	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
237	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	JALAN BALUBUR SARI RT 03,04 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
238	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pegecatan Zeba Cross, Pita Kejut, railing jalan)	KAMPUNG BALUBUR RT 02, 04 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERHUBUNGAN
239	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KAMPUNG BOJONG KIDUL RT 07 RW 02 KELURAHAN BOJONGKERTA KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	79,5	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
240	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KAMPUNG BOJONG KIDUL RT 07 RW 02 KELURAHAN BOJONGKERTA KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
241	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan kp wangkal RT 007/008 kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor	800	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
242	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KAMPUNG BOJONG KIDUL RT 07 RW 02 KELURAHAN BOJONGKERTA KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	12	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
243	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 004 Kelurahan curug mekar, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
244	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KAMPUNG BOJONG KIDUL RT 06 RW 02 KELURAHAN BOJONGKERTA KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
245	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	jalan cemplang Baru RW 010 SDN cemplang baru kelurahan cilendek barat, Kota Bogor	150	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
246	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit,)	kecamatan bogor barat, Kota Bogor	20	peserta	DINAS TENAGA KERJA
247	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	JALAN PAHLAWAN NO 11 RT 02 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN	116,5	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			yang berada di luar nama jalan kota)	KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor			
248	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN PAHLAWAN RT 05 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	120	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
249	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GANG KOMPLEK KEHUTANAN RT 04 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	40	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
250	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	GANG KOMPLEK KEHUTANAN RT 05 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERHUBUNGAN
251	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP CIPINANG GADING RT 01 RW 04 KELURAHAN RANGGAMEKAR KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
252	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP CIRANJANG RT 03 RW 03 KELURAHAN PAMOYANAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	15,3	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
253	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	JALAN KOMPLEK KEHUTANAN RT 03 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	105	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
254	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	GANG KOMPLEK KEHUTANAN RT 03 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	80	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
255	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	GANG KOMPLEK KEHUTANAN RT 05 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
256	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 001/001 kelurahan marga jaya, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
257	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 002/007 mushola baitu syukur kelurahan cilendek timur, Kota Bogor	45	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
258	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	RT004/005 kelurahan cilendek timur, Kota Bogor	300	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
259	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	RT 001/005 kelurahan cilendek timur, Kota Bogor	250	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
260	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JALAN KOMPLEK KEHUTANAN RT 03 RW 07 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	900	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
261	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	BONDONGAN RT 3 RW 3 KEL. BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
262	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG AN NASHAR RT 01 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
263	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG AN NASIR RT 02 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	465	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
264	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG BOLANG RT 02 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
265	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG RESIDEN RT 02 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
266	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GANG AN NASHAR RT 01 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
267	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GANG NASIR RT 02 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
268	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GANG AN NASHAR II RT 02 RW 04 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
269	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GANG HAJI MUHTAR RT 02 RW 04 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
270	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG AN NASHAR III RT 01 RW 04 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
271	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	CIBEUREUM RT 01 RW 11 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	60	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
272	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG ISTIQOMAH 1 RT 04 RW 04 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
273	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	CIBEUREUM Gg. LODAYA RT 01 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	69	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
274	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG ISTIQOMAH 2 RT 03 RW 04 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
275	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	CIBEUREUM RT 01 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
276	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG AROMA 2 RT 04 RW 03 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
277	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIBEUREUN RT 002 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
278	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG AROMA 1 RT 03 RW 03 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
279	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIBEUREUM RT 003 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
280	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG ISTIQOMAH 3 RT 03 RW 03 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
281	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	CIBEUREUM Gg. SATE RT 003 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	110	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
282	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG AROMA RT 04 RW 03 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
283	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN H.M SYARIFUDIN RT 03 RW 06 KELURAHAN SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
284	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JALAN H.M SYARIFUDIN RT 03 RW 06 KELURAHAN SINDANG BARANG	10	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor			
285	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIBEUREUM Gg. SAWAH RT 04 RW 011 MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
286	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JALAN SINDANG BARANG JERO PILAR II GANG REUNGGAS RT 05 RW 06 KELURAHAN BUBULAK KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	10	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
287	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	CIBEUREUM Gg. SAWAH RT 004 RW 011 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	100	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
288	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Legok Setu Beureum RT 01/01 Kel. Bojongketa, Kec. Bogor selatan Kota Bogor, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
289	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp.Tunggilis RT 03 RW 13 Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara , Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
290	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	JALAN GUGAH SARI RT 02 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	5000	LITER	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
291	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Tunggilis RT 03 RW 13 Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
292	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JALAN LEBAK SARI RT 04 RW 05 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
293	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	GANG KOMPLEK KEHUTANAN RT 03 RW 07 KELURAHAN	80	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor			
294	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Belakang Panggung GOR Pajajaran Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	8	titik	DINAS PERHUBUNGAN
295	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP CIRANJANG RT 01 RW 03 KELURAHAN PAMOYANAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	15,3	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
296	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	Belakang Panggung GOR Pajajaran Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor	250	meter	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
297	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP BUBULAK RT 001 RW 007, kel bubulak, kec bogor barat, kota bogor (ID 14580), Kota Bogor	150	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
298	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kukupu gg Walet RT01 RW 05 Kelurahan Cibdak, Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
299	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya (Penyediaan PSU pada lokasi relokasi korban bencana atau terkena program pemerintah daerah)	RT 01 - 05 RW 05 Kel Menteng, Kota Bogor	4	titik	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
300	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Rt 04 Rw 06 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	529	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
301	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/yang	Jl. Mawar Blk. 14 RT : 03 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	1	Unit gedung	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat				
302	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jln. Sukamulya Blok Gemlong Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	200	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
303	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung- Cisadane	Gang Patoha RT : 05 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	35	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
304	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Jl. Menteng RT : 02 RW : 05 Kelurahan : Menteng, Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
305	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Poras RT 04 dan 05 RW 08 Kelurahan Sindangbarang , Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
306	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl babakan rt 001 rw 011,kelurahan bubulak ,kec.bogor barat (17734), Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
307	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	JALN GUGAH SARI RT 02 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	12	M2	KECAMATAN BOGOR UTARA
308	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp pilar 2 rt 004 rw 002, kel bubulak kec.bogor barat,kota bogor (17942), Kota Bogor	175	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
309	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	JALAN KERAMAT MBAH DALEM RT 02, 03 RW 01 KELURAHAN	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor			
310	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN KERAMAT MBAH DALEM NO 14 RT 03 RW 13 KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	60	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
311	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GANG MELATI RT 05 RW 03 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
312	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JALAN KERAMAT MBAH DALEM RT 02 RW 01 KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
313	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg Mushollah RT02 RW 05 Kelurahan Cibadak, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
314	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP KUKUPU NO 48 RT 04 RW 07 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	274	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
315	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 3 RW 10 KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
316	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JALAN KERAMAT MBAH DALEM RT 04 RW 01 KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
317	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG KEMUNING RT 01 s.d 06 RW 09 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
318	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Palasari RT 05/05 , Kel.Sindangsari Kec.Bogor Timur, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
319	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG GEURAK RT 01 RW 08 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
320	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg Family, RT03 RW05 Kelurahan Cibadak, tanah Sareal, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
321	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG BOGO RT 03 RW 12 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
322	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG BOGO RT 04 RW 12 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
323	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kukupu Gg Walet RT01 RW05 Kelurahan Cibadak, tanah Sareal, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
324	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG MUSOLAH RT 03 RW 12 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
325	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg Sahabat RT04 RW05 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	640	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
326	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Gg Family RT03 RW05 Cibadak, tanah Sareal, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
327	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JALAN RAYA SEMPLAK GANG KANTOR POS NO 18 A RT 03 RW 01 KELURAHAN SEMPLAK KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	36	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
328	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. JAYA MEKAR RT 02 RW 06 KELURAHAN RANGGAMEKAR KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	32	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
329	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP. CIPINANG GADING (ARAH SUNGAI CISADANE) RT 01 RW 04 KELURAHAN RANGGAMEKAR KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	50	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
330	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Cilubang mekar 2 RT : 03 RW : 08 Kelurahan : Situgede Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	428	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
331	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Loji RT : 02 RW : 02 Kelurahan : Loji Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	255	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
332	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut RT 02/ RW 09, Baranang Siang, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
333	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut RT 02/ RW 09, Kel. Baranangsiang, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
334	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar Kemang RT 03/ RW 07, Kel. Baranangsiang, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
335	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cimanggu Kecil, RT 03/ RW 07 Kel. Ciwaringin, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
336	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Mushola Nurul Islam RT 03 RW 03 kelurahan Loji, Kota Bogor	-	Unit gedung	SEKRETARIAT DAERAH
337	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT02 RW05 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Gg Musholla, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
338	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Gang Walet, RT01 RW05, Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
339	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT04 RW05 Gg Sahabat, Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
340	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kukupu RW05 RT01, RT02, RT03, RT04 Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	4	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
341	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	JALAN GUGAH SARI RT 02 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	13	Unit	DINAS KESEHATAN
342	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan	TAMAN DRAMAGA INDAH RT 04 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA	13	Unit	DINAS KESEHATAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor			
343	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	PAKUAN REGENCY CLUSTER LINGGABUANA RT 03 RW 07 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	2	Unit	DINAS KESEHATAN
344	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	DRAMAGA LONCENG RT 03 RW 04 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	12	Unit	DINAS KESEHATAN
345	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	JALAN DRAMAGA CARINGIN RT 01 RW 06 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	13	Unit	DINAS KESEHATAN
346	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (harus sudah ada lokasinya, baik berupa hibah maupun aset Pemda)	Jl.Sukamulya Blok Gemblong Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	9	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
347	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Pabuaran tengah gang....RT 02 RW 10 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	700	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
348	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT01 dan RT02 Taman Tirta Cimanggu RW13 Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor	855	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
349	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Taman Permukiman (Tanah milik Pemerintah Kota Bogor)	RT02 RW13 Taman Tirta Cimanggu, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor	350	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
350	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 03 RW 01 KEL. BONDONGAN KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	26	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
351	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Curug Mekar RT 02 RW 04 Kelurahan Curug Mekar kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	-	berkas	DINAS PENDIDIKAN
352	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT01 RW13 Taman Tirta Cimanggu, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor	150	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
353	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Cipinang Gading gang. Rambutan RT RW 06 Nangerang , Ranggamekar Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	550	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
354	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 06 RW13 Taman Tirta Cimanggu, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
355	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	gang mama Rafei 1, masjid Nurul Jannah, kp situ beureum RT 01/01 Kel Bojong kerta, kec Bogor Selatan, kota Bogor, Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
356	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cilendek Timur RT 04 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
357	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cilendek Timur RT 02 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
358	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Rt.01 Rw.10 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat kota Bogor, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
359	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian, marawis, hadroh)	Majelis Dzikir Riyadhul Ikhwan RT 02/RW 09 warung limus, Kel.	1	set	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor			
360	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Gg. Ustad sumanta RT : 05 RW : 11 Kelurahan : Menteng Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	255	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
361	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Alamat : Gg. Ustad sumanta RT : 05 RW : 11 Kelurahan : Menteng Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	15	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
362	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RW 04 KEL. RANCAMAYA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	100	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
363	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	MUARASARI RT 1 RW 5 KEL. MUARASARI KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	20	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
364	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Taman Muara RT.01 RW.09 Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat kota Bogor, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
365	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT.03 Rw.04 Kel. Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
366	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT.02 RW.04 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Kota Bogor	200	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
367	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.02, RT.03 RW.04 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat kota Bogor, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
368	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.02,03 RW.04 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat kota Bogor, Kota Bogor	850	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
369	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Cilubang Mekar 2 Lembur Ketik Jaudin RT.03 RW.08 Kel. Situgede Kec. Bogor Barat kota Bogor, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
370	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.02 RW.04 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor barat kota Bogor, Kota Bogor	200	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
371	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT.02 RW.04 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor barat kota Bogor, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
372	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cilendek Timur RT 02 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
373	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Curug Mekar No. 46 RT 01 RW 04 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	-	berkas	DINAS PENDIDIKAN
374	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pelatihan Perkoperasian (masyarakat yang ingin membentuk, bergabung dan ingin mengetahui tentang koperasi)	KEL.BABAKAN PASAR , KEL.CIBOGOR ,KEL.KATULAMPA ,KEL.TAJUR , KEL.SINDANGSARI , KEL.SINDANGRASA,, Kota Bogor	150	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
375	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit,)	KEL.BABAKAN PASAR , KEL.CIBOGOR ,KEL.KATULAMPA KEL.TAJUR , KEL.SINDANGSARI , KEL.SINDANGRASA, Kota Bogor	20	peserta	DINAS TENAGA KERJA
376	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kayu Manis Kp. Munjul RT.02 RW.06, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
377	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	Mekarwangi RT.03 RW.08, Kota Bogor	1000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
378	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kebon Pedes RW.09, Kota Bogor	1200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
379	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Mekarwangi RT.02 RW.08, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
380	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Mekarwangi RT.01 RW.08, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
381	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kebon Pedes RT.04 RW.10, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
382	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kebon Pedes RT.05 RW.09, Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
383	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT03 RW04 , Kota Bogor	64	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
384	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kebon Pedes RT.05 RW.09, Kota Bogor	5	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
385	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kebon Pedes RT.01 RW.09, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
386	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kebon Pedes RT.05 RW.09, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
387	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT03 RW04 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
388	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp. Srempet RT03 RW04, Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	50	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
389	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP. PALASARI RT.01 / RW.05 KEL. SINDANGSARI KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	100	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
390	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Mekarwangi RT.02 RW.06, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
391	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	Kp.Srempet Rt03 Rw04 Kelurahan Cibadak, tanah Sareal, Kota Bogor	10	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
392	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. PALASARI RT.02 / RW.05 KEL.SINDANGSARI KEC.BOGOR TIMUR, Kota Bogor	215	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
393	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Mekarwangi RT.03 RW.06, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
394	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Mekarwangi RT.04 RW.06, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
395	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. PALASARI RT.03 / RW. 05 KEL. SINDANGSARI KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
396	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KP.PALASARI RT 03 RW 05 SINDANGSARI BOGOR TIMUR, Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
397	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. PALASARI RT 04 RW 05, KEL.SINDANGSARI KEC.BOGOR TIMUR, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
398	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KP.PALASARI RT.05 / RW.05 KEL. SINDANGSARI KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	50	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
399	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN PINANG PERAK 4 UJUNG RT 02 RW 04 KELURAHAN CURUG MEKAR KECAMATAN BOBOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
400	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN CURUG MEKAR RT 02 RW 04 KELURAHAN CURUG MEKAR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
401	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN GUGAH SARI II RT 01 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	120	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
402	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN GUGAH SARI I RT 01 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	80	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
403	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN DRAMAGA LOCENG RT 03 RW 04 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
404	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN CARINGIN MUKTI RT 03 RW 06 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	120	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
405	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang	JALAN BANTARKEMANG RT 01 RW 07 KELURAHAN BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
406	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN BANTARKEMANG RT 01 RW 07 KELURAHAN BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	270	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
407	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN BANTARKEMANG RT 02 RW 07 KELURAHAN BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	100	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
408	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SINDANGSARI RT 04 RW 02 KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	500	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
409	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP SINDANGSARI RT 04 RW 02 KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	29	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
410	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP KEBON KALAPA RT 03 RW 06 KELURAHAN KEBON KALAPA KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	6	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
411	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP PARUNG BANTENG RT 08 RW 01 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	100	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
412	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP PARUNG BANTENG RT 08 RW 01 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
413	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	PARUNG BANTENG JALAN AL BUSRO RT 02, 03 RW 01 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	169	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
414	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Kp. Warung Limus Gang Nedi RT 02 RW 09, Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan. Kota Bogor, Kota Bogor	25	titik	DINAS PERHUBUNGAN
415	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	PERUMNAS BANTAR KEMANG JALAN RAMBUTAN 2 RT 07 RW 06 KELURAHAN BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	347	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
416	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Kp. Warung Limus, RT 02/TW 09, Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
417	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN KATULAMPA PANJANG RT 05 RW 09 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
418	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Gang Mesjid RT 04 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	-	berkas	DINAS PENDIDIKAN
419	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Gang Mejid gang Salim RT 02 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
420	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp Karya Bhakti RT 005/005 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	73	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
421	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jln. gang Mesjid Gang Salim RT 02 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	-	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
422	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 5 RW 5 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	100	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
423	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Salabenda RT 01/04 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	45	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
424	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg Cendana No 2 RT 002/003 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
425	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 03 RW 05 KELURAHAN KEDUNG JAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
426	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gang Siman RT 01,02 RW 08 Kp. Sukajaya Kel. Genteng , Kec Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	275	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
427	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg Cendana RT 02/03 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	87	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
428	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 03 RW 04 KELURAHAN KEDUNG JAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
429	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gang Cendana RT 03/03 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	93	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
430	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 4 RW 4 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
431	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang	JALAN CIMANGGU WATES RT 01s.d 05 RW 05 KELURAHAN KEDUNG JAYA KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	51	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
432	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp Babakan RT 004/009 Kel Bubulak Kec Bogor Barat , Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
433	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN ACHMAD YANI GANG BINAAN RT 05 RW 04 KELURAHAN TANAH SAREAL KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
434	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Bulakamah RT 03/06 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	50	M²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
435	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG KEMUNING RT 03 RW 09 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
436	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gang Duren 1D, RT 01/RW 09, Kel Genteng Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	542	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
437	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana	JALAN TUGU WATES RT 04 RW 01 KELURAHAN SUKARESMI	2	Unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor			
438	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	SUKARESMI RT 03 RW 03 KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
439	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Bulakamah RT 03/06 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	103	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
440	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Bulakamah RT 03/06 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	194	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
441	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gang Cendana No 38 RT 003/003 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	81	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
442	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Salabenda RT 01/04 Kel. kayumanis kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	44	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
443	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cilubang Tonggoh RT 001/002 Kel Situgede Kec Bogor Barat , Kota Bogor	139	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
444	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gang Cendana RT 001/003 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	180	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
445	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Salabenda RT 02/04 Kel kayumanis Kec tanah Sareal , Kota Bogor	44	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
446	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	GG Cendana RT 001/003 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat , Kota Bogor	89	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
447	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Salabenda RT 01/04 Kel kayumanis Kec tanah Sareal , Kota Bogor	78	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
448	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Salabenda RT 01/04 Kel kayumanis Kec tanah Sareal , Kota Bogor	185	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
449	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 02/02 Kel kencana kec tanah Sareal , Kota Bogor	68	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
450	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Kp. Serempet RT 01/04 kel. cibadak kec tanah Sareal , Kota Bogor	87	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
451	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 04/09 Kel kencana kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	47	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
452	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah	PERUM ZIARA VALLEY RT 06 RW 02 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	33	M2	KECAMATAN BOGOR UTARA
453	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	JALAN DRAMAGA KAUM RT 02 RW 05 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	12	M2	KECAMATAN BOGOR UTARA
454	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 05 RW 04 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
455	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. PAHLAWAN GANG PINANG RT 05 RW 17 KELURAHAN CILENDEK BARAT KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	50	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
456	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GG. DADALI RT 004 RW 002 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	50	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
457	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	GG. DADALI RT 004 RW 002 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	20	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
458	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	JL. HEGARMANAH 1 RT 003 RW 008 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
459	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. HEGARMANAH 1 RT 003 RW 008 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	70	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
460	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Jl.BABAKAN LEBAK NO.46 RT/RW 001/005, BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT , Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
461	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp.Pabuaran RT.001 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	1	Orang	DINAS PENDIDIKAN
462	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kebon Pedes RT.06 RW.10 Kel.Kebon Pedes Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
463	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl.Kebon Pedes RT.003 RW.008 Kel.Kebon Pedes Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
464	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cibuluh RT.003 RW.003 Kel.Kedung Badak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
465	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cibuluh RT.005 RW.003 Kel.Kedung Badak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
466	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp.Sumurwangi RT.002 RW.008 Kel.Kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	1	Orang	DINAS PENDIDIKAN
467	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cimanggu lamping RT.003 RW.003 Kel.Kedung Waringin Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
468	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Taman Griya Kencana Bolk A2 RT.007 RW.008 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
469	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp.Pabuaran RT.005 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
470	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JL.BABAKAN LEBAK NO.46 RT/RW 003/005, BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
471	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp.Cibadak RT.002 RW.012 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal (depan RA.Al Hidayah Cibadak)., Kota Bogor	374	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
472	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp.Pabuaran RT.001 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
473	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Pasir Jaya RT004/RW011, Pasir Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
474	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp.Pabuaran RT.002 RW.003 kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
475	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Pabuaran RW.003 Kel.Cibadak Kec,Tanah Sareal, Kota Bogor	70	titik	DINAS PERHUBUNGAN
476	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Salabenda RW.004 Kel.Kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	100	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
477	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Pasir Jaya RT/RW 004/011, Pasir Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
478	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg.007 Kp.Salabenda RT.04,06 RW.04 Kel.Kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
479	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Gg.Palm RT.003 RW.001 Kel.Kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	60	titik	DINAS PERHUBUNGAN
480	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Jl.BABAKAN LIO NO.36 RT 005 / RW 011 , BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
481	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Jl. BABAKAN LIO NO.36 RT005/RW011, BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
482	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kp.Pabuaran RT.001,002,003,004,005 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	30	buah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
483	Ence Setiawan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JL.BATUHULUNG RT01/RW01, BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT , Kota Bogor	150	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
484	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kp.Munjul RT.001,002,003,004,005 RW.05 Kel.kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	20	buah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
485	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp.Pabuaran RT,001 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
486	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp.Pabuaran RW.003 kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	20	rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
487	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 04/09 Kel. Kencana kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	42	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
488	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 04/09 Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	44	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
489	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 04/09 Kel. Kencana Kec tanah Sareal , Kota Bogor	128	M²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
490	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kukupu RT 04/07 Kel. Cibadak kec tanah Sareal , Kota Bogor	197	M²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
491	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Bubulak Gg. Lurah RT 001 / 001 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
492	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Bubulak Gg. Mesjid RT 003 / 001 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	37	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
493	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp salabenda RT 01/04 Kel. Kayumanis kec. tanah Sareal , Kota Bogor	52	M²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
494	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Bubulak Gg. Lurah RT 001 / 001 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	35	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
495	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Kedung Halang Wates RT 001 RW 001 Kel. Sukaresmi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	91	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
496	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bulak Utara RT 02/05 Kel. kencana Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	197	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
497	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Bulakamah RT 03/06 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	86	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
498	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 02/02 Kel. Kencana Kec tanah Sareal , Kota Bogor	141	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
499	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kencana RT 01/02 Kel. Kencana kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	112	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
500	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Masjid RT 03/07 Kel. Mekarwangi kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	165	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
501	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Masjid RT 01/07 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	91	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
502	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Masjid RT 01/07 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	136	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
503	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.01 RW.06 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
504	Syafei,ST	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW.08 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
505	Syafei,ST	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	1	set	DINAS KESEHATAN
506	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cibuluh RT 010 RW 008 Kel. Kedungbadak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	582	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
507	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cibuluh RT 009 RW 008 Kel. Kedungbadak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	27	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
508	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Kp. Cibuluh RT 008 RW 008 Kel. Kedungbadak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	53	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
509	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	SINDANGSARI RT 004/010 KEL. KEBON KELAPA KEC. BOGOR TENGAH KOTA BOGOR, Kota Bogor	1	Unit	DINAS SOSIAL
510	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	GG. BENGKONG LEBAK (MAKAM) RT 005 RW 010 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	40	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
511	Syafei,ST	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RW. 07 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	20	titik	DINAS PERHUBUNGAN
512	Syafei,ST	Partai Demokrat	Sarana Bibit Ternak (Bantuan bibit ternak)	RW.11 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	5	ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
513	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Kukupu RT 02/08 Kel. Cibadak Kec tanah Sareal , Kota Bogor	424	M²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
514	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. A. Yani Gg. Karet RT 004 RW 001 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	22	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
515	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GG. BENGKONG RT 005/010 KEL. GUNUNGBATU KEC. BOGOR BARAT KOTA BOGOR, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
516	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Jl. A. Yani Gg. Karet RT 004 RW 001 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	45	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
517	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GG. BENGKONG RT 005 RW 010 KEL. GUNUNGBATU KEC. BOGOR BARAT KOTA KOTA BOGOR, Kota Bogor	150	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
518	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	GG. PALEM RT 004 RW 013 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	100	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
519	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Taman Cimanggu Poncol RT 001 RW 005 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	18	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
520	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. RAYA CIFOR GG. PESANTREN 2 RT 002 RW 008 KELURAHAN BUBULAK KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
521	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP. CURUG RT 003 RW 009 KELURAHAN CURUG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	90	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
522	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GG. MESJID RT 002 RW 001 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
523	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang	JL. RAYA DRAMAGA, GG. H. BURHAN RT 001 RW 003	15	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor			
524	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JL. RAYA DRAMAGA, GG. H. BURHAN RT 001 RW 003 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	60	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
525	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT : 02 RW : 15 Kelurahan : Menteng , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
526	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL. RAYA DRAMAGA, GG. H. BURHAN RT 001 RW 003 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
527	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. PEMUDA CARINGIN RT 002 RW 005 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
528	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL. PEMUDA CARINGIN RT 001 RW 005 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	10	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
529	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	MARGASARI JL. PEMUDA CARINGIN RT 001 RW 005 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
530	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Serempet RT 02/06 Kel. mekarwangi Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	259	M²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
531	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JL. PEMUDA CARINGIN RT 003 RW 005 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	45	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
532	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	MARGASARI JL. PEMUDA CARINGIN RT 001 RW 005 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	1	Unit	DINAS PERHUBUNGAN
533	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JL. AMASANDI GG. HUNI BONGKOK RT 004 RW 014 KELURAHAN PASIR JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	80	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
534	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Alamat : Menteng RT : 04 RW : 04 Kelurahan : Menteng Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	60	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
535	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL. DEWI SRI V GG. RA ROJAK (PERUM MUARA ASRI) RT 002 RW 012 KELURAHAN PASIR KUDA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
536	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Alamat : Menteng RT : 04 RW : 04 Kelurahan : Menteng Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
537	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JL. DEWI SRI V GG. RA ROJAK (PERUM MUARA ASRI) RT 002 RW 012 KELURAHAN PASIR KUDA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	60	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
538	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/yang sudah dihibahkan ke pemerintah	Posyandu RT : 02 RW : 04 Kelurahan : Menteng Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
539	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP. BOJONG MENTENG (KORBAN LONGSOR) RT 003 RW 002 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	45	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
540	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP. BOJONG MENTENG (DEKAT POS YANDU) RT 003 RW 002 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	90	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
541	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. RIMBA MULYA II RT 002 RW 003 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
542	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	JL. RIMBA MULYA II RT 002 RW 003 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	3	Unit	DINAS PERHUBUNGAN
543	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cibeureum Jempol Rt04/04 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	99	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
544	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Gg Palem RT : 05 RW : 11 Kelurahan : Loji Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	520	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
545	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Mushola Ar-Rohman RT : 01 RW : 04 Kelurahan : Menteng Kecamatan : Bogor Barat , Kota Bogor	-	Unit gedung	SEKRETARIAT DAERAH
546	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Bulakamah RT 03/06 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	600	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
547	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GG. RANTE KP BARU RT 004/013 KEL. GUNUNGBATU KEC. BOGOR BARAT KOTA BOGOR, Kota Bogor	150	M2	DINAS PERHUBUNGAN
548	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp. Rawajati RT 03/08 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	60	M ³	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
549	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Salabenda RT 01/04 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	151	M ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
550	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIPAKU RT 01 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
551	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL. RIMBA MULYA II RT 002 RW 003 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
552	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. SUKA DAMAI RT 02 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
553	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GANG. SAMPING BENGKEL YAMAHA MUAS / GG. KAUM RT 001 & 003 RW 005 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
554	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. SUKADAMAI RT 02 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	60	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
555	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. MUARA LEBAK RT 006 RW 010 KELURAHAN PASIR JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	13	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
556	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP. MUARA LEBAK RT 006 RW 010 KELURAHAN PASIR JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	13	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
557	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	kp. babakan Rt 003/009 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Kota Bogor	42	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
558	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GG. PALEM LOJI RT 005 RW 011 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
559	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	GG. PALEM LOJI RT 005 RW 011 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	50	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
560	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. SUKADAMAI RT 02 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	48	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
561	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Rt 04 Rw 06 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	515	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
562	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. BABAKAN RT 002/009 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Kota Bogor	102	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
563	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIPAKU RT 1, 2, 3 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
564	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Sindangsari Rt. 05/Rw. 05, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	50	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
565	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Katulampa Panjang Rt. 05/Rw. 09, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
566	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RW 17 KEL. CIPAKU KEC. CIPAKU, Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
567	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. SUKADAMAI RT 03 RW 17 KEL.CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
568	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP. SUKADAMAI RT 03 RW 017 KEL. CIOAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	70	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
569	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. SUKAWARNA RT 03 RW 10 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
570	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. SUKA ASIH RT 01 RW 04 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	350	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
571	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. CIPAKU HAJI RT 04 RW 07 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
572	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP. CIPAKU HAJI RT 04 RW 07 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	120	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
573	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. SUKAWARNA RT 01 RW 10 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
574	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Curug Mekar No. 46 RT 01 RW 04 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
575	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	cemplang baru RT 03 RW 12, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
576	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	CIHEULEUT RT.05 rw.08, Kota Bogor	169	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	yang berada di luar nama jalan kota)				
577	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Hibah Pokdarwis (Permohonan Hibah untuk Pokdarwis	keluarahan semplak, Kota Bogor	1,9E+08	rupiah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
578	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Balai Desa No. 64 RT 02/ RW 05 Kel. Tajur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
579	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cimanggu Kecil RT 05/ RW 07 Kel. Ciwaringin Bogor Tengah, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
580	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut RT 05/ RW 09 Kel. Baranangsiang Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
581	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut No. 49 RT 01/ RW 09 Kel. Baranangsiang, Bogor timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
582	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut No. 49 RT 01/ RW 09 Kel. Baranangsiang Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
583	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Jalan Gg Janur, Kp.nyangkokot RT 01/RW 04 Kel.Genteng kec Bogor selatan , Kota Bogor	100	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
584	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp nyangkokot RT.01/RW .04 Kel Genteng kec Bogor selatan provinsi jawabarat, Kota Bogor	855	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
585	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan genteng tengah rt 003/005 kel genteng kec bogor selatan , Kota Bogor	855	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
586	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Wangun Cibalok Rt. 004/006 Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
587	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Anyar Rt. 004/006 Kel. Muarasari Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	53	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
588	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp dekeng rt03/09 kel genteng kec bogor selatan kota bogor, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
589	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukasari RT 006/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	43	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
590	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp Dekeng rt 03/09 kel genteng kec bogor selatan kota bogor, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
591	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Anyar Rt. 004/006 Kel. Muarasari Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	72	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
592	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Margabhakti Rw 01 (Rt.01 dan 02) Kel.kertamaya, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
593	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Raya tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	107	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
594	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	104	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
595	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	39	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
596	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 002/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	63	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
597	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Gang Masjid Gang Salim RT 02 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
598	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 002/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	32	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
599	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar Kemang Rt 002/007 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	41	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
600	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JLN GG MASJID. GG SALIM No.11 CILENDEK TIMUR, KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
601	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	49	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
602	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL. Gang Mesjid Gang Salim RT 03 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
603	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Gang Mesjid gang Salim RT 03 RW 01 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
604	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 002/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
605	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	26	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
606	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Lebak Pasar Rt 002/003 Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor	20	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
607	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Tajur Rt. 004/006 Kel. Pakuan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	32	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
608	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut, Kec Bogor Timur, Kel Baranangsiang RT 002/008 , Kota Bogor	39	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
609	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp.Margabhakti Rt02/01 kel.kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	25	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
610	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya RT 006/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	22	M2Sukamulya	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
611	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Parung banteng Rt. 004/001 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	144	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
612	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya RT 006/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	25	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
613	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut,Kec Bogor Timur, Kel Barangsiang RT 002/008, Kota Bogor	159	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
614	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Parung banteng Rt. 004/001 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	43	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
615	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cikaret Gang Kosasih Rt05/10 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	72	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
616	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Parung banteng Rt. 007/001 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	36	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
617	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	kp marga jaya RT 01/05 kel kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
618	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Parung banteng Rt. 003/001 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	77	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
619	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Katulampa Rt. 004/001 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	132	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
620	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Babakan Perumnas RT 09/06 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	67	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
621	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp marga jaya RT 01/05 kel kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
622	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar Kemang, Kec Bogor Timur, Kel Baranangsiang RT 004/007, Kota Bogor	84	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
623	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Wangun cibalok Rt. 004/006 Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	151	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
624	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp margasari rt02/07 Kel Kertamaya Kec Bogor Selatan, Kota Bogor	60	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
625	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Wangun cibalok Rt. 004/006 Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	104	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
626	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar Kemang RT 001/007 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	187	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
627	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	Kp margasari rt02/07 kel kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
628	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar Kemang, Kec Bogor Timur, Kel Baranangsiang RT 003/007, Kota Bogor	55	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
629	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kampung Tangkil, Kec Bogor Timur, Kel Baranangsiang RT 003/014, Kota Bogor	60	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
630	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya Rt 006/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	55	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
631	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp margasari rt02/07 kel kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	100	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
632	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar Kemang RT 01/07 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Tumur, Kota Bogor	27	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
633	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya RT 003/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	36	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
634	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Sukamulya GG. Wargamulya No. 5 RT 002/003	92	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor			
635	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya Rt 007/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	39	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
636	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya RT 007/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	38	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
637	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya RT 007/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	26	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
638	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya RT 007/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	31	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
639	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp Dekeng Rt 02 / 08 kelurahan genteng Kec Bogor Selatan, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
640	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sukamulya Rt 007/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	76	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
641	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di	Kp nyangkot RW 004 kel genteng kec bogor selat, Kota Bogor	1000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
642	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp. Seremped RT 03/04 Kelurahan Cibadak Kota Bogor, Kota Bogor	160	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
643	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	104	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
644	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	54	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
645	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JL. SINDANG BARANG PENGKOLAN TANJAKAN SERIBU RT 002 RW 004 KELURAHAN SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	15	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
646	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil No.16 RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	57	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
647	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JL. SINDANG BARANG PENGKOLAN DEKAT WAKAF RT 002 RW 004 KELURAHAN SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	78	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
648	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	28	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
649	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JL. SINDANG BARANG PENGKOLAN TANJAKAN SERIBU (DEPAN MUSHOLA) RT 004 RW 004 KELURAHAN SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	64,8	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
650	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	40	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
651	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kel. Bogor Timur, Kota Bogor	56	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
652	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. PAGENTONGAN RT 001 RW 006 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
653	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	32	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
654	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil No.17 RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	53	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
655	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	GG. MESJID RT 01 RW 011 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
656	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP. SINDANG BARANG LOJI RT 002 RW 005 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	60	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
657	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	cikeas RT.01 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	50	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
658	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. RIMBA MULYA RT 003 RW 003 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
659	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikas RT.01 RW.03,kel.Katulampa, Kota Bogor	70	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
660	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikeas RT.01 RW.03,kel Katulampa, Kota Bogor	30	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
661	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikeas RT.01 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	40	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
662	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikeas RT.01 RW.03,kel.Katulampa, Kota Bogor	40	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
663	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikeas RT.01 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
664	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikeas RT.01 RW.03,kel.Katulampa, Kota Bogor	420	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
665	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikeas RT.01 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
666	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikeas RT.01 RW.03,KEL.KATULAMPA, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
667	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	cikeas RT.01 RW.03,kel.Katulampa, Kota Bogor	50	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
668	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikeas RT.02 RW.03,kel.Katulampa, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
669	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	cikeas RT.02 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	50	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
670	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	cikeas RT.02 RW.03, kel. Katulampa, Kota Bogor	40	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
671	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	cikondang RT.01 RW.04, kel. Katulampa, Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
672	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikondang RT.11 RW.04, Kel. Katulampa, Kota Bogor	169	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
673	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikondang Rt.11 Rw.04, Kel. Katulampa, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
674	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	cikondang RT.11 Rw.04, Kota Bogor	209	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
675	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikondang RT.11 RW.04, Kel. Katulampa, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
676	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	parung banteng RT.06 RW.01, Kel. Katulampa, Kota Bogor	116	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
677	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di	parung banteng RT.06 RW.01, kel. Katulampa, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
678	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	parung banteng RT.06 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
679	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	parung banteng RT.06 RW.01,kel.Katulampa, Kota Bogor	40	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
680	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	ciheuleut RT.02 RW.09,Kel.Baranangsiang, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
681	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	ciheuleut RT.01 RW.09,kel.Baranangsiang, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
682	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	ciheuleut RT.04 RW.09,Kel.Baranangsiang, Kota Bogor	123	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
683	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	ciheuleut RT.04 RW.09,Kel.Baranangsiang, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
684	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	ciheuleut RT.04 RW.09,Kel.Baranangsiang, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
685	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	ciheuleut RT.05 RW.09,Kel.Baranangsiang, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
686	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	parung banteng RT.02 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	270	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
687	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	parung banteng RT.03 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	169	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
688	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	parung banteng RT.05 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	75	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
689	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	parung banteng RT.05 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	35	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
690	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	parung banteng RT.05 RW.01,Kel.Baranangsiang, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
691	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	parung banteng RT.07 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	43	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
692	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	parung banteng RT.07 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	276	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
693	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	parung banteng RT.07 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	30	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
694	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	parung banteng RT.07 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	125	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
695	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Tajur.gg.balai desa RT.03 RW.04,Kel.Tajur, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
696	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Tajur.gg.balai desa RT.05 RW.04,Kel.Tajur, Kota Bogor	275	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
697	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Tajur.gg balai desa RT.05 RW.04,Kel.Tajur, Kota Bogor	23	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
698	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Tajur.gg balai desa RT.01 RW.05,Kel.Tajur, Kota Bogor	43	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
699	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Tajur.jln Sukajaya RT.02 RW.05,Kel.Tajur, Kota Bogor	116	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
700	Ujang Sugandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Tajur.jln sukajaya RT.02 RW.05,Kel.Tajur, Kota Bogor	100	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
701	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rancamaya Rt01/09 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	501	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
702	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rancamaya Rt03/09 Kel. rancamaya Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	909	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
703	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Legok Petir Rt01/09 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	109	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
704	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rancamaya Rt03/09 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	320	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
705	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rancamaya Rt01/09 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	142	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
706	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rancamaya Rt02/04 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	89	m ²	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
707	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp.Setu Asem RT.002 RW.014 kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
708	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	TPU Cemplang Jl. Cemplang Baru RT 03 RW 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor	15,35	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
709	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp.Munjul RT.003 RW.005 Kelurahan Kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN
710	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp.Munjul RT.003 RW.005 Kel.Kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	1	Orang	DINAS PENDIDIKAN
711	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan marghabakti rw 02 kel kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	1000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
712	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JALAN MARGHABAKTI RW 02 KEL KERTAMAYA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	20	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
713	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan marghabakti gang pala rw 08 kel kertamaya kec bogor selatan, Kota Bogor	1050	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
714	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP MARGHABAKTI RW 02 KEL KERTAMAYA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	36	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
715	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP MARGASARI RW 02 KEL KERTAMAYA KEC BOGOR SELATAN , Kota Bogor	45	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
716	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KP MARGHABAKTI RW 04 KEL KERTAMAYA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	60	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
717	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Ciheuleut RT 01/ RW 09 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
718	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Villa Bogor Indah 3 Rt. 06 Rw. 15 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
719	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	KP. SUKADAMAI RT 03 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	6	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
720	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	KP. SUKADAMAI RT 02 RW 017 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	6	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
721	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Villa Bogor Indah 3 RT. 6 RW. 15. Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	15,3	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
722	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Prasarana Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Bus Stop, Pembangunan Shelter, JPO	KP. GONDOK RT 3 RW 5 KEL. PAKUAN KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	2	UNIT	DINAS PERHUBUNGAN
723	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kampung pahlawan Rt 01 RW 17 Kelurahan Cilendek barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
724	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Cilendek Timur RT 06 RW 06 Kelurahan Cilendek Timur, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
725	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Pancasan RT 04 RW 07 Kelurahan PAsir Jaya Kwcamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
726	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut RT 05/ RW 09 Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
727	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Ciheuleut RT 01/ RW 09 Kel. Baranangsiang, Bogor timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
728	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Sindangsari Rt 04 Rw 10 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
729	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Belakang H.Sukri Gg. Suburna Kp. Pabuaran RT.01 RW.02 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal kota Bogor, Kota Bogor	150	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
730	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Ust Arif Kencana RT.03 RW.09 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
731	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Gg. Ust Arif Kencana RT.03 RW.09 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Kota Bogor	75	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
732	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Sindangsari Rt 04 Rw 10 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	-	meter	SEKRETARIAT DAERAH
733	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	J. KH. Ahmad Sya'yani No,55 RT.01 RW.14 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor	169	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
734	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Lebak Kantin Rt 01 Rw 05 Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	540	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
735	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Sindangsari Rt 04 Rw 10 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
736	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	sindang barang loji rw 13, Kota Bogor	300	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
737	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	JL CENDANA KOMP IPB 1 Loji , Kota Bogor	10	unit	DINAS KESEHATAN
738	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. KH. Ahmad Sya'yani No,55 RT.01 RW.14 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
739	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. KH, Ahmad Sya'yani No.55 RT.01 RW.14 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	100	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
740	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Bubulak Rw 1, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
741	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	PARUNG BANTENG RT 05 / RW 01 , KEL. KATULAMPA , KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
742	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	PARUNG BANTENG , RT 05 / RW 01 KEL.KATULAMPA KEC.BOGOR TIMUR, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
743	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	PARUNG BANTENG RT 05 / RW 01 KEL. KATULAMPA KEC.BOGOR TIMUR, Kota Bogor	25	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
744	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	PARUNG BANTENG RT 05 / RW 01 KEL. KATULAMPA KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	7	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
745	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	PARUNG BANTENG RT 05 / RW 10 KEL. KATULAMPA KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	7	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
746	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	PARUNG BANTENG RT 08 / RW 10 KEL. KATULAMPA KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
747	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	PARUNG BANTENG RT 08 / RW 10 KEL. KATULAMPA KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
748	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	WANGUN TENGAH RT 02 / RW 02 KEL.SINDANGSARI KEC.BOGOR TIMUR, Kota Bogor	375	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
749	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung- Cisadane	Kalibuluh Kp. Setu Asem RT.03 RW.14 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	150	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
750	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Pabuaran Gg. Suburna RT.01 RW.02 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
751	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	SDN PANARAGAN Jl. Veteran No.35, RT.01/RW.03, Pancaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Kota Bogor	300	UNIT	DINAS PENDIDIKAN
752	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	SDN DEWI SARTIKA Jl. RE. Martadinata No. 7, CIBOGOR, Kec. Kota Bogor Tengah,, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
753	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	SDN TEGALLEGA Jl.tegallega No.16, TEGALLEGA, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
754	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	SDN POLISI 5 Jl. Polisi I No.7, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
755	Hj. R. Lianasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	panaragan pojok rt 02/07 kelurahan panaragan.kecamatan bogor tengah , Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
756	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT : 03 RW : 03 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
757	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Cemplang Baru RT 03 RW 12 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
758	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Gang Abdul Somad RT 01 RW 03 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
759	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT : 03 RW : 03 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	20	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
760	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	69	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
761	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Ke. Bogor Timur, Kota Bogor	27	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
762	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil Rt 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	41	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
763	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 003/014 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	44	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
764	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	27	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
765	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	71	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
766	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	94	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
767	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	23	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
768	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	57	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
769	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil Rt 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	63	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
770	Hj. R. Lianasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Mochamad Aditya Wardhana , Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
771	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil Rt 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	77	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
772	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Kelurahan Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	46	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
773	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	63	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
774	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
775	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	31	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
776	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	48	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
777	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP SITUBEREM RT 003/001 BOJONGKERTA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	15	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
778	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	150	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
779	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	53	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
780	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KP SITUBEREM RT 003/001 BOJONGKERTA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
781	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL.Dumeling KP.Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
782	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 001/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor , Kota Bogor	63	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
783	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 002/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	35	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
784	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 002/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	65	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
785	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 002/005 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	112	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
786	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SITUBEREM RW 001 BOJONGKERTA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	650	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
787	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	Cikaret Gg. Saluyu Rt06/05 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	1	Unit	DINAS SOSIAL
788	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Jukut RT 003/001 Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	26	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
789	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Jukut RT 003/001, Kel Babakan Pasar, Kec Bogor Tengah, Kota Bogor	69	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
790	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Jukut RT 003/001, Kel Bogor Tengah, Kec Babakan Pasar, Kota Bogor	77	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
791	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kota	kelurahan semplak, Kota Bogor	1	kegiatan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
792	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Jukut RT 003/001 Kel. Babakan Pasar kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
793	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Jukut No.09 RT 003/001 Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	20	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
794	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Jukut RT 003/001 Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	37	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
795	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Babakan sukamatri Gg.virus RT 001/007 kelurahan Pasir kuda, Kota Bogor	50	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
796	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	kp.cincau rt03/09 kelurahan gudang kecamatan bogor tengah, Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
797	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pelatihan kepariwisataan untuk Pokdarwis	kelurahan semplak, Kota Bogor	1	kegiatan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
798	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (harus sudah ada lokasinya, baik berupa hibah maupun aset Pemda)	Jl.Ardio Blok Jembatan Rt 03 Rw 05 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	20	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
799	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. Tangkil RT 01 RW 05 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	150	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
800	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Menteng RT 01, 02, 03 RW 12 Kelurahan Menteng Kec. Bogor barat, Kota Bogor	1084	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
801	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cemplang Utara Rt 05 RW 13 Kelurahan Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
802	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cemplang Utara RT 05 RW 13 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
803	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Setu Asem RT.02 RW.14 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
804	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp. Setuasem RT.02 RW.14 kel, Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
805	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Setuasem RT.04 RW.14 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
806	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp, Setuasem RT.04 RW.14 Kel, Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
807	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Kp, Setuasem RT.01 RW.14 Kel, Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	-	paket	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
808	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl. Blok Binong RT.01 RW.05 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	123	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
809	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Blok Binong RT.01 RW.05 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	150	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
810	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	RT 2 RW 9 CIBULUH, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
811	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	RT 2 RW 7 BANTARJATI, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
812	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL GURU MUCHTAR RT 5 RW 12 CIMAHPAR, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
813	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL. KEDUNGHALANG RT 4 RW 13 KEDUNG HALANG, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
814	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	RT 4 RW 8 CIMAHPAR, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
815	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl.Cimanggu Pahlawan no.20 RT.001 RW.016 Kel.Kedung	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				Waringin Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor			
816	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL. HEGARMAHAH 1 RT 002 RW 008 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
817	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciheuleut RT 02/ RW 09 Kel. Baranang Siang, Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
818	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Raya Tajur Gg. Bale Desa No. 8 RT 02/ RW 05 Kel. Tajur Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
819	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Bantar Peuteuy RT 03/ RW 04 Kel. Tajur Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
820	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. SIRNAGALIH RT 02 RW 03 KEL. RANGGAMEKAR KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	280	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
821	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Alamat : Sindangbarang Bendungan RT : 02 RW : 02 Kelurahan : Sindangbarang, Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
822	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Alamat : Loji RT : 03 RW : 03	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kelurahan : Loji , Kota Bogor			
823	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Prasarana Keagamaan (Permohonan belanja sarpras hibah keagamaan (sound sistem, karpet, dll))	Kp Srempet RT03 RW04 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	-	unit	SEKRETARIAT DAERAH
824	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT : 05 RW : 03 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	520	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
825	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT : 03 RW : 03 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	24	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
826	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RW12 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
827	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	Alamat : Jl Raya Pancasan Depan BRI Unit Ciomas RT : 02 RW : 07 Kelurahan : Pasir Jaya , Kota Bogor	1	Lokasi	DINAS PERHUBUNGAN
828	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 02 RW12, Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	20	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
829	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT03 RW12 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	24	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
830	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kota Bogor, RT.02 dan 03 /RW.12, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Kota Bogor	60	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
831	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di	Gang Pala RW 1 loji, Kota Bogor	850	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
832	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kota Bogor, RT03, RW12 Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
833	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Prasarana Daur Ulang Sampah (Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara)	R02 RW12 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	80	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
834	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : kompl IPB Loji RT : 04 RW : 08 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
835	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp.Lebak Nangka RT 02 RW 02 Kel. Genteng Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	12	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
836	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Sindangbarang Loji RT : 02 RW : 09 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
837	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl SD Kayu manis 2 RT04 RW 10, Kelurahan Kayumanis, Kec Tanah Sareal, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
838	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Loji RT : 02 RW : 02 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
839	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT : 02 RW : 05 Kelurahan : Semplak , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
840	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	BTN Tanah Baru Rt.04/Rw.08 Kel.Tanah Baru, Kota Bogor	856	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
841	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Nurul Ikhwan IV x III Rt.05/rw.05, Kota Bogor	1500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
842	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	BTN Tanah Baru Rt.04/rw.08 kel.tanah baru, Kota Bogor	100	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
843	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.03/RW.10, Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
844	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Alamat : Musolah Suhada RT : 02 RW : 02 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	-	m2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
845	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	RANCAMAYA RT 03 / 04 , Kota Bogor	160	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
846	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	RANCAMAYA RT 01/ 01, Kota Bogor	60	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
847	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GANG ANGKASA RT 01 RW 04 KELURAHAN PAKUAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	116	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
848	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	Warung Limus Rt01/09 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Unit	DINAS SOSIAL
849	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	GANG BARU DAN GANG MASJID RT 01 RW 04 KELURAHAN PAKUAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	50	Titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
850	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	Cikaret Rt06/04 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	1	Unit	DINAS SOSIAL
851	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	GANG ANGKASA MUDA 1 RT 01 RW 04 KELURAHAN PAKUAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	100	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
852	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT02 RW07 Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
853	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	RANCAMAYA RT 03 /04, Kota Bogor	80	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
854	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG BARU DAN GANG MASJID RT 02 RW 04 KELURAHAN PAKUAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	480	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
855	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG BABAKAN SIRNA RT 04 RW 10 KELURAHAN PAMOYANAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
856	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Cibuluh rt.02 rw.06, Kota Bogor	20	titik	DINAS PERHUBUNGAN
857	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl Muh Mansyur RT01 RW07 Kampung Masjid, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor	8	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
858	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti :	Pabuaran Rt02/10 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor , Kota Bogor	1	buah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)				
859	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gg. Pangumbahan Rt06/04 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	buah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
860	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 07 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	2000	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
861	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	BTN Tanah Baru Rt.02 sd Rt.03 , Kota Bogor	105	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
862	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	Cikaret Gg. Pangumbahan Rt04/04 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Unit	DINAS SOSIAL
863	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian, marawis, hadroh)	Majelis Talim Nurul Fadilah Kp. Lemah Duhur RT 04 RW 01 Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Kota Bogor	1	set	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
864	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Cikaret Gg. Pangumbahan Rt04/04 Kel. cikaret KEc. Bogor Selatan , Kota Bogor	1	buah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
865	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	BTN Tanah Baru di ujung jalan melat rt.02 rw.08, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			yang berada di luar nama jalan kota)				
866	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RANCAMAYA RT 02 / 03, Kota Bogor	13	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
867	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Penyebrangan Orang Permukiman	Kp.Ciheulet rt.03 rw.11, Kota Bogor	6	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
868	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Kp.kramat rt.06/rw.01, Kota Bogor	145	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
869	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	MUARASARI RT 03 / RW 5, Kota Bogor	450	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
870	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Cibeureum Rt03/07 Kel, Mulyaharja Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	buah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
871	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.sawah rt.01/rw.06, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
872	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga,	JALAN CILENDEK TIMU 1 (SAMPING KELURAHAN) RT 01 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	1000	M2	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)				
873	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.sindangsari rt.03/rw.02, Kota Bogor	30	titik	DINAS PERHUBUNGAN
874	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Tanah Baru rt.04/rw.04, Kota Bogor	30	titik	DINAS PERHUBUNGAN
875	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN CILENDEK TIMUR RAYA RT 02 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	150	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
876	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	MUARASARI RT 03 / RW 05, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
877	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Ciluar rt.01/rw.02, Kota Bogor	30	titik	DINAS PERHUBUNGAN
878	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Ciluar rt.04/rw.04, Kota Bogor	10	titik	DINAS PERHUBUNGAN
879	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	Jl. Semplak Gang Pilar 5 RT 04 RW 03 Kelurahan Semplak Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
880	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Rulita No.19, RT.04/RW.02, Harjasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16138, Indonesia, Kota Bogor	220	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
881	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.ciheulet rt.02/rw.06, Kota Bogor	20	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
882	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Ciparigi rt.02/rw.01, Kota Bogor	30	titik	DINAS PERHUBUNGAN
883	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Kp.sindangsari rt.03/rw.02, Kota Bogor	750	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
884	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 07 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
885	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 07 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
886	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP JAYASARI RTRT 03 / RW 05 , Kota Bogor	550	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
887	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp.Babakan Poncol rt.01/rw.02, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
888	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati rt.04/rw.03, Kota Bogor	450	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
889	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp. Bakom RT 04 RW 06 Kel. Bojongkerta Bogor Selatan , Kota Bogor	30	titik	DINAS PERHUBUNGAN
890	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Pancasan RT 05 RW 07 Kelurahan Pasir jaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
891	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Mekar Saluyu RT 04 RW 16 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
892	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Ciluar rt.02/rw.04, Kota Bogor	75	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
893	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 08 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	10	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
894	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Bantarjati rt.04/rw.03, Kota Bogor	100	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
895	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Gang Nasedin RT 02 RW 02 Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
896	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Bantarjati rt.01/rw.10, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
897	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 08 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	60	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
898	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN CILENDEK TIMUR 1 RW 6,7,10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
899	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP JAYASARI RT 03 / 05, Kota Bogor	750	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
900	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	JALAN HM SYARIFUDIN RT 03 RW 06 KELURAHAN SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	21	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
901	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	KP PATAS RT 01,02,03,04 / RW 08, Kota Bogor	1100	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
902	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP BOJONG KIDUL RT 05 / RW 05, Kota Bogor	320	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
903	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP BOJONG KIDUL RT 06 / RW 02, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
904	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 01 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
905	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SETU BEREUM RT 04 / RW 01, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
906	Sendhy Pratama, SH, MH	Partai Hati Nurani Rakyat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	Loji Barat, Rt. 01 / Rw. 03, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	963	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
907	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL DEKENG NYANGKOKOT RT3 / RW 04, Kota Bogor	900	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
908	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 01 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
909	Sendhy Pratama, SH, MH	Partai Hati Nurani Rakyat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Loji Barat, Rt. 01 / Rw. 03, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
910	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN PAMIKUL BAWAH RT 06 RW 06 KELURAHAN TEGAL GUNDIL KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	325	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
911	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 01 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
912	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	PERUMAHAN KRR RT 03 / RW 2, Kota Bogor	800	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
913	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	SIRNASARI RT 04,RT05,RT06 RW 04 KELURAHAN EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
914	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL RANCAMAYA RT 06 / RW 02, Kota Bogor	30	UNIT	DINAS PERHUBUNGAN
915	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Bakom RT 4 RW 6 Kel. Bojongkerta, Bogor Selatan, Kota Bogor	50	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
916	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Muara RT 01/ RW 10 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
917	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 06 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
918	Sendhy Pratama, SH, MH	Partai Hati Nurani Rakyat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Loji Barat, Rt. 01 / Rw. 03, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	890	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
919	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kota	Graha Grande RT. 03 RW.08, Kota Bogor	50	Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
920	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	BATUTULIS RT 03 / RW 06, Kota Bogor	45	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
921	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 06	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			yang berada di luar nama jalan kota)	RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor			
922	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 06 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	10	titik	DINAS PERHUBUNGAN
923	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 4 RW 1 Kelurahan Bojongkerta Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
924	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP CIPAKU SKIP RT / RW 06, Kota Bogor	50	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
925	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	GENTENG RT 05 / RW 03, Kota Bogor	280	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
926	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT : 01 RW : 04 Kelurahan : Sintugede , Kota Bogor	150	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
927	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	RT : 03 RW : 05 Kelurahan : Sintugede , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
928	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT01,RT02,RT03,RT04 RW 04 EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1084	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
929	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang	RT : 03 RW : 04 Kelurahan : Sintugede , Kota Bogor	8	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
930	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JALAN PRIBADI (PERUMAHAN KAVLING) RT 06 RW 06 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
931	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Gg H Mustopa RT : 04 RW : 06 Kelurahan : Pasir Jaya , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
932	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GG OLIF RT 2 / RW 06, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
933	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GENTENG RT 01/ RW 10, Kota Bogor	300	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
934	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GENTENG RT 03 / RW 07 , Kota Bogor	120	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
935	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL PALEM RT 04 / RW 02, Kota Bogor	800	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
936	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SUKAMANAH RT 01/ RW 01, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
937	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantar kemang RT 03/ RW 07 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
938	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL. PILAR 1 RT. 03 RW. 06 KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	10	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
939	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : komplek IPB 1 Kavling Jl. Cemara RT : 01 RW : 09 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
940	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	JL. PILAR 1 RT. 03/06 KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
941	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : Komplek Pertanian Loji Jl Penegak no.33 RT : 02 RW : 10 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
942	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JALAN AN NASHAR 1 s.d 6 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
943	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp.nanggerang , RT.03/RW.06, Ranggamekar, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Kota Bogor	60	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
944	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sindangsari No. 15 RT 02/ RW 07 Kel. Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
945	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Alamat : Margajaya RT : 02 RW : 05 Kelurahan : Margajaya , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
946	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Alamat : Muara Lebak RT : 02 RW : 10 Kelurahan : Pasir Jaya , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
947	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	RT 2 RW 08, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	15	m2	DINAS PERHUBUNGAN
948	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciwaringin Tanah Sewa RT 02/ RW 02 No. 65A Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
949	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT : 05 RW : 11 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
950	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	RT 4 RW 06, Kel. Cipaku, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	4	m2	DINAS PERHUBUNGAN
951	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Permohonan sarana dan prasarana PAUD (Rehabilitasi bangunan ruang kelas, utilitas dan lainnya untuk PAUD)	RT 2 RW 2, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	DINAS PENDIDIKAN
952	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Alamat : GG mesjid RT 06/01 RT : 06 RW : 01 Kelurahan : Gunung Batu , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
953	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	RT 1 RW 05, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	5	m2	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
954	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah	Posyandu Gatot Kaca di RW 08 Kel. Kertamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
955	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 1 RW 07, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	70	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
956	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	Posyandu Merpati A Alamat : Kp Muara RT : 05 RW : 08 Kelurahan : Pasir Jaya , Kota Bogor	1	Unit gedung	KECAMATAN BOGOR UTARA
957	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 4 RW 07, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	144	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
958	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 1 RW 07, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	72	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
959	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 1 RW 07, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
960	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	RT : 05 RW : 11 Kelurahan : Loji , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
961	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 1 RW 07, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	105	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
962	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	GG. Soesboed RT : 04	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW : 11 Kelurahan : Menteng , Kota Bogor			
963	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	GG. PANORAMA RT. 06 RW. 05 KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	700	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
964	Eny Indari, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG HAJI HASAN RT 02 RW 10 KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
965	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL DEKENG ATAS RT 03 RW 03 KEL GENTENG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	542	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
966	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JL. PANORAMA RT. 03 RW. 05 KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	29,5	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
967	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	GG. PANORAMA RT. 06 RW. 05 KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	20	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
968	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	PASIR JAYA RT 01/07 PASIR JAYA BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
969	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	BABAKAN LIO RT. 01 RW. 11 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	122	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
970	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	PASIR JAYA RT 01/07 BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
971	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kelurahan Gudang Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
972	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	PASIR JAYA RT 01/07 BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
973	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Alamat : jl.kebun percobaan IPB Babakan pasir mas RT : 01 RW : 08 Kelurahan : Pasir Kuda , Kota Bogor	650	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
974	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	BABAKAN LEBAK RT. 02 RW. 05 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	46	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
975	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jerokuta Kaum RT 2 RW 16, Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
976	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	RW 12 Harjasari, Bogor Selatan, Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
977	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp Muara RT : 02 RW : 10 Kelurahan : Pasir Jaya , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
978	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	Kp bojong pesantren rt 01/03, Kel. Bojongkerta, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	43	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			yang berada di luar nama jalan kota)				
979	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP. Jayasari RT 04 RW 05, kel. Ranggamekar, kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	14	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
980	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	kali Cisindangbarang RT : 03 RW : 04 Kelurahan : Situgede , Kota Bogor	60	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
981	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp.Rancamaya,GG Jero Rante ,RT.001 RW.008, Kel Rancamaya , Kota Bogor	38	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
982	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Kp. Jayasari Rt 003 Rw 005 Kel. Ranga mekar Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	480	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
983	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan rancamaya gang musolah al iklas RT 2 RW 3, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
984	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Bengkong RT : 04 RW : 10 Kelurahan : Gunung Batu, Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
985	Hj. R. Lianasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan	kebon pedes rt 02 rw 04, Kota Bogor	60	2,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
986	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan rancamaya gang musolah al huda rt 01 rw 08, Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
987	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl Garuda 2 no 2 RT : 06 RW : 03 Kelurahan : Bubulak , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
988	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jalan rancamaya gang musolah al huda rt 01 rw 08 Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	90	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
989	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	kebon pedes rt 2 rw 11 tanah sareal, Kota Bogor	48	2,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
990	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl Kutilang no 6 RT : 06 RW : 03 Kelurahan : Bubulak , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
991	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	jalan rancamaya pabuaran rt 01 ,03 rw 02 Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	70	titik	DINAS PERHUBUNGAN
992	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	kebon pedes rt 03 rw 06 tanah sareal, Kota Bogor	50	2,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
993	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	kebon pedes rt 06 rw 10 tanah sareal, Kota Bogor	20	2,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
994	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan rancamaya pabuaran rt 03 rw 10 Kel. Rancamaya, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	275	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
995	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. RAWAJAHA RT. 04 RW. 03 NO. 08 KELURAHAN SITUGEDE KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	226	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
996	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cemplang Baru RT 02 RW 11 Kelurahan cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
997	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp Bojong pamoyanan GG H rotai RT 01 RW 02, Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan , Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
998	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Bojong pamoyanan GG H rotai RT 01 RW 02 Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan , Kota Bogor	10	titik	DINAS PERHUBUNGAN
999	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	kebon pedes rt 02 rw 05 tanah sareal, Kota Bogor	60	2,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
1000	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp Bojong pamoyanan GG H rotai RT 02 RW 02 Kel. Pamoyanan Bogor Selatan , Kota Bogor	650	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1001	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	kebon pedes rt 05 rw 10 tanah sareal, Kota Bogor	50	2,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1002	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp Bojong pamoyanan GG H rotai RT 02 RW 02 Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan , Kota Bogor	10	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1003	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Musholla Al Hidayah RT : 01 RW : 05 Kelurahan : Curug , Kota Bogor	20	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1004	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	SINDANGBARANG PILAR I RT. 04/06, KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	68	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1005	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	kebon pedes rt 02 rw 06 tanah sareal, Kota Bogor	169	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1006	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp Bojong pamoyanan GG H rotai RT 02 RW 02 Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan , Kota Bogor	110	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1007	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	kebon pedes rt 02 rw 04 tanah sareal, Kota Bogor	169	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1008	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Bojong pamoyanan GG Amit RT 03 RW 02 Kel. Pamoyanan, Bogor Selatan , Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1009	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL. Cemplang Baru RT 03 RW 10 Kelurahan Cemplang Baru Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1010	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp bojong pamoyanan GG Amit 1.2 RT 03 RW 02 Bogor Selatan , Kota Bogor	750	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1011	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	kebon pedes rt 05 rw 11 tanah sareal, Kota Bogor	125	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1012	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 01 RW 03 Curug, Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1013	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp bojong pamoyanan GG H amit 1.2 gg Toha RT 03 RW 02 Bogor Selatan , Kota Bogor	144	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1014	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan ruang kelas baru SD (Pembangunan RKB pada jenjang SD)	Jl. Pahlawan No.7, RT.01/RW.07, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Kota Bogor	3	Ruang	DINAS PENDIDIKAN
1015	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Lebaksari RT 04 RW 14 Kel. Pamoyanan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	6,95	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1016	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 05 RW 13 Curug, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1017	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung- Cisadane	Kp. Sirna galih Gg. Masjid Rt. 02/03 Kel. Rangka mekar Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	24	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1018	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 05 RW 13 Curug, Kota Bogor	25	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1019	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp. Sirna galih Gg. Masjid Rt. 02/03 Kel. Rangka mekar Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	10	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1020	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Sirna galih Gg. Bonki Rt. 02/03 Kel. Rangka mekar Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1021	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 02 RW 04 Curug, Kota Bogor	15	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1022	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Sirna galih Rt. 02/03 Kel. Rangka mekar Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	155	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1023	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan ruang kelas baru SD (Pembangunan RKB pada jenjang SD)	Jl. Dekeng No.42, RT.01/RW.01, Genteng, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Kota Bogor	1	UNIT	DINAS PENDIDIKAN
1024	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Komp Bogor Raya Permai RT 04 RW 12 Curug, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1025	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	RT 03 RW 11 Curug, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1026	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Tarumanegara 1 No.26 RT 03/RW 07, Kel. Cipaku, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, 16133, Kota Bogor	710	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1027	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 02 Curug, Kota Bogor	650	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1028	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	jalan sayunting lembur sawah RT 03/02 Mulyaharja Bogor Selatan , Kota Bogor	180	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1029	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 01 RW 08 Curug, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1030	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan sayunting gang pos yandu lembur sawah RT 06/02 Mulyaharja Bogor Selatan , Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1031	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 03 RW 01 Curug, Kota Bogor	26	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1032	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl Warung Limus RT 03 RW 9 Mulyaharja, Bogor Selatan , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1033	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan,	RT 6 RW 08, Kel. Harjasari, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	18	m2	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)				
1034	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	villa bogor indah 3 blok be1 RT 001/ RW 015 kedung halang Usulan Dewan PKS, H. Atang Trisnanto, Kota Bogor	1200	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1035	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Gang Saluyu RT 2 RW 6, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1036	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 10 Curug, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1037	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi ruang kelas SMP (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang SMP, untuk sekolah swasta diusulkan sebagai hibah)	Jalan Raya Tajur, RT 04/RW 05 Kelurahan Pakuan, Bogor Selatan , Kota Bogor	3	unit	DINAS PENDIDIKAN
1038	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	RT 02 RW 03 Curug, Kota Bogor	1	Unit gedung	KECAMATAN BOGOR UTARA
1039	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 01,02,03,04, dan 05 RW 01 Sindang Barang, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1040	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	MARGASARI JL. PEMUDA CARINGIN RT 001 RW 005 KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1041	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Bengkong RT : 03 RW : 10 Kelurahan : Gunung Batu , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1042	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. CILUBANG RT 001 S/D 002 RW 005 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1043	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL. PAMIKUL 2 NO 2 RT 3 RW 6 , TEGAL GUNDIL, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
1044	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GG. MA IYAH RT 004 RW 003 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1045	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GG. MUSHOLA S/D GG. MA IYAH RT 004 RW 003 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1046	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	KS. TUBUN RT 2 RW 4 CIBULUH, KEC.BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
1047	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Gg. Bengkong RT : 03 RW : 10 Kelurahan : Gunung Batu , Kota Bogor	150	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1048	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL. PESANTREN RT 7 RW 15 KEDUNGHALANG, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
1049	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Gg. Bengkong RT 03 RW 10 , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1050	Iwan Iswanto, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	GG. BENGGONG LEBAK (MAKAM) RT 005 RW 010 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	40	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1051	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Bengkong RT 03 RW 10 Kelurahan : Gunung Batu , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1052	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Bengkong RT 04 RW 10 Kelurahan : Gunung Batu , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1053	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL KAUMSARI RT 2 RW 5 CIBULUH KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
1054	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL KP CEGER RAYA NO 15 RT 01 RW 17 TEGAL GUNDIL KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
1055	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Kebon Kelapa RW.03 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	90	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1056	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Kalimurni RT.001 RW.001 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	60	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1057	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kebon Kelapa, kec. bogor tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1058	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kelurahan Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1059	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1060	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Panaragan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1061	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Ciheuleut Jl. Jagung Ujung RT 05/ RW 09 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1062	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1063	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1064	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki	Kel. Babakan Pasar, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik				
1065	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1066	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Cibogor, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1067	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1068	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1069	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1070	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki	Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik				
1071	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Sindangsari RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1072	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Sukasari, kec. Bogor timur, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1073	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kel. Tajur, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	500	orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1074	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Pulo Geulis RT 01/ RW 04 Kel. Babakan Pasar, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1075	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP BUNTAR RT 02 RW 08 MUARASARI BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	90	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1076	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP MEKARWANGI RT 04 RW 13 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	26	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1077	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP MEKAR WANGI RT 04 RW 14 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1078	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	LEBAK WANGI RT 01 RW 11 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1079	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 02 RW 09 Batutulis, Bogor Selatan , Kota Bogor	43	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1080	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	SIRNASARI RT 05 RW 14 EMPANGBOGOR SELATAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1081	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 01 RW 09 Kel. Genteng, Bogor Selatan , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1082	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. H. Sulaeman RT 03 RW 16 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	800	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1083	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	di RT 2 RW 5 Pakuan, Bogor Selatan , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1084	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 3 RW 5 Pakuan, Bogor Selatan , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1085	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 4 RW 5 Pakuan, Bogor Selatan , Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1086	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 1 RW 5 Pakuan, Bogor Selatan , Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1087	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 5 RW 5 Pakuan, Bogor Selatan , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1088	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Cemara RT 01 RW 09 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	850	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1089	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP LEBAK WANGI RT 01 RW 11 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	35	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1090	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zeba Cross, Pita Kejut, railing jalan)	Gg Pangumbahan RT 5 RW 4, Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	16	m2	DINAS PERHUBUNGAN
1091	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIHARASHAS RT 06 RW 01 MULYAHARJA BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	249	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1092	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zeba Cross, Pita Kejut, railing jalan)	Gg Pangumbahan RT 7 RW 4, Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan , Kota Bogor	108	m2	DINAS PERHUBUNGAN
1093	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan	RT 2 RW 4 Kelurahan Cikaret, Bogor Selatan , Kota Bogor	150	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			yang berada di luar nama jalan kota)				
1094	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 5 RW 4, Kelurahan Cikaret, Bogor Selatan , Kota Bogor	275	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1095	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 5 RW 4 Kelurahan Cikaret, Bogor Selatan , Kota Bogor	90	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1096	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 3/9 KEDUNG JAYA , Kota Bogor	100	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1097	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg.Barjo Rt 03 Rw 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1098	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL MATARAM , Kota Bogor	1050	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1099	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Malabar Ujung RT 01 RW 01, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	200	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1100	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Malabar Ujung RT 01 RW 01, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1101	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Lodaya II Cilibende RT 01 RW 02, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	990	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1102	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl. Lodaya II Cilibende RT 02 RW 02, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	125	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1103	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Sirozul RT : 01 RW : 07 Kelurahan : Semplak , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1104	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Lodaya II Cilibende RT 02 RW 02, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1105	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Lodaya II Cilibende RT 03 RW 02, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1106	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KEDUNG HALANG SUGIH LAMPING RT.01 RW.7 SUKARESMI, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1107	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Lodaya II Cilibende RT 05 RW 02, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	770	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1108	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Sindangbarang loji RT 04 RW 09, Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	800	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1109	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Blok A5 RT 002/ RW 10, Kelurahan Ciluar, Bogor Utara (Jalan Utama sebelah kiri mulai dari Pos Keamanan RW), Kota Bogor	140	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1110	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Sancang Dalam RT 03 RW 07, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1111	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kedung Halang Sugih Lamping RT.02 RW.07 SUKARESMI, Kota Bogor	5	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1112	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	Kantor Kecamatan Bogor Timur Jalan Pajajaran No.16, RT 003 RW 004, Baranangsiang, Bogor Timur , Kota Bogor	150	Peserta	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1113	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Blok B5 dan B6 RT 004 dan 005 RW 10, Kelurahan Ciluar, Bogor Utara (Antara Gapura RT 005), Kota Bogor	84	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1114	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya (Penyediaan PSU pada lokasi relokasi korban bencana atau terkena program pemerintah daerah)	- Kp Pancagalih - RT : 05 - RW : 03 - Kelurahan : Loji, Kota Bogor	1	Set	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1115	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL MATARAM RT 6/7 KELURAHAN KEDUNG BADAQ, Kota Bogor	350	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1116	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	JL TAJUR RT 02 / RW 04, Kota Bogor	1000	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1117	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Perumnas Bantar Kemang Jl. Durian 1 RT 01 RW 05,	15	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor			
1118	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kedung Halang Wesel RT.02 RW.03 SUKARESMI, Kota Bogor	50	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1119	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Vila bogor indah 3 blok AC, BA1,2 RT04/15 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara , Kota Bogor	25	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1120	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. MAJAPAHIT 2 RT 3/7 KELURAHAN KEDUNG BADAK, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1121	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP CIPAKU SKIP RT 02 / 06, Kota Bogor	15	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1122	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kedung Halang Wesel RT.01 RW.03 SUKARESMI, Kota Bogor	8	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1123	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. Loji RT 02 RW 09, Kelurahan Loji, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	800	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1124	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	Perumnas Bantar Kemang Jl. Durian 1, Durian 2, dan Durian Raya RT 01 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	5	buah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1125	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kedung Halang Wesel RT.03 RW.03 SUKARESMI, Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1126	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga,	Vila Bogor Indah 3 RW15 Kedunghalang, Kota Bogor	322	m2	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)				
1127	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	BONDONGAN RT 1,2,3 / RW 16, Kota Bogor	1080	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1128	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Perumnas Bantar Kemang Jl. Durian 1 dan 2 RT 01 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1129	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Vila Bogor Indah 3 RW15 Kedunghalang, Kota Bogor	-	meter	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1130	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan UMKM Keterampilan Akan Membawa Nilai (KAWANI) Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan di prioritaskan pada lokasi kampung tematik	KELURAHAN KEDUNG JAYA DAN KEDUNG BADAQ, Kota Bogor	200	orang	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1131	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP JAYASARI RT 03 / RW 05, Kota Bogor	15	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1132	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	Perumnas Bantar Kemang Jl. Manggis 6 RT 08 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	169	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1133	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA Mekarwangi RT.06 RW.12, Kota Bogor	12	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1134	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Vila Bogor Indah 3 RW15 Kedunghalang, Kota Bogor	1200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1135	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Perumnas Bantar Kemang Jl. Manggis 6 RT 08 RW 05,	11	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				Baranangsiang, Bogor Timur , Kota Bogor			
1136	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Anjani RT 03 RW 07, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1137	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA Mekarwangi RT.09 RW.12, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1138	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Perumnas Bantar Kemang Jl. Manggis 4 RT 08 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	124	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1139	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Vila Bogor Indah 3 RW15 Kedunghalang (Vila Bogor Indah 3, batas taman Ciliwung dengan Sungai Ciliwung,), Kota Bogor	250	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1140	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL RAYA CIPAKU NO.35 RT 02 / RW 10, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1141	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah	Jl. Otista gang Babakan Peundeuy RT 01 RW 12, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	30,46	m3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1142	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gang H. Mustofa RT 02 RW 07, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1143	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA MEKARWANGI RT.03 RW.12, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1144	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JL. SUTIRAGEN 6 RT 4 RW 16 KEL. BANTARJATI KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	35	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1145	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 04 RW 01 KEL. KEDUNG HALANG KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1146	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Cikondang RT 02 RW 04, Katulampa, Bogor Timur , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1147	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Cikondang RT 02 RW 04, Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1148	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	KELURAHAN KEDUNG BADAQ, Kota Bogor	100	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1149	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA Mekarwangi RT04 RW.12 , Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1150	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Lukmanul Hakim di Kp. Cikondang RT 02 RW 04, Katulampa, Bogor Timur , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1151	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Nur Aidah di Kp. Cikondang RT 02 RW 04, Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1152	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Juju di Kp. Cikondang RT 02 RW 04, Katulampa, Bogor Timur , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1153	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA RT.08 RW.12, Kota Bogor	8	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1154	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	GG DALEM SKIP RT 04 / RW 05, Kota Bogor	100	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1155	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Perintis Kemerdekaan gang Sasitet RT 01 RW 04, Kebon Kelapa, Bogor Tengah, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1156	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Perintis Kemerdekaan, gang Sasitet RT 01 RW 04, Kebon Kelapa, Bogor Tengah, Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1157	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Hariyanto di RT 02 RW 07, Kebon Kelapa, Bogor Tengah , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1158	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Sari Gading RT 04 RW 07 Ranggamekar, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1159	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Sindang sari RT 04 RW 07, Kebon Kelapa, Bogor Tengah, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1160	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Pemakaman VILLA MUTIARA MEKARWANGI RW.12, Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1161	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Nining di Kp. Lebak Sari RT 03 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1162	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Siti Nurjanah di Kp. Lebak Sari RT 04 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1163	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Ahmad Muhamad di Kp. Lebak Sari RT 04 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1164	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	CIBADAK RT.02 RW.04, Kota Bogor	50	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1165	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Muchtiar di Kp. Lebak Sari RT 04 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1166	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Jabaru III RT 01 RW 10 Kelurahan Pasirkuda, Bogor Barat , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1167	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Endang di Kp. Lebak Sari RT 04 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1168	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Sadane RT 05 RW 07, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1169	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA MEKARWANGI RT.05 RW.11, Kota Bogor	40	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1170	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline	Posyandu Anggrek di Kp. Lebak Sari RT 04 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	6	Buah	DINAS KESEHATAN
1171	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Yuswandi di Kp. Lebak Sari RT 05 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1172	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Neni Nuraeni di Kp. Lebak Sari RT 05 RW 09, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1173	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT 1 RW 6 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	120	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1174	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Perum Unitex Jl. Melati 12 RT 04 RW 06, Sindangrasa, Bogor Timur , Kota Bogor	50	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1175	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA MEKARWANGI RT.06 RW.11, Kota Bogor	40	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1176	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Perum Unitex Jl. Melati 12 RT 04 RW 06, Sindangrasa, Bogor Timur, Kota Bogor	15	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1177	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	kebon pedes rt 02 rw 11 tanah sareal, Kota Bogor	150	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1178	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kp. Muara RT 05 RW 10, Sindangrasa, Bogor Timur, Kota Bogor	7	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1179	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 8 RW 7 KELURAHAN KEDUNG BADAQ, Kota Bogor	522	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1180	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	kebon pedes rt 02 rw 11 tanah sareal, Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1181	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Muara RT 05 RW 10, Sindangrasa, Bogor Timur , Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1182	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp. Muara RT 05 RW 10, Sindangrasa, Bogor Timur , Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1183	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Warung bandrek RT 01 RW 05 Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1184	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bantuan RTLH atas nama Warman di Kp. Wangun Atas RT 02 RW 01, Sindangsari, Bogor Timur untuk rehab rumah yang mengalami kerusakan , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1185	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	VILLA MUTIARA MEKARWANGI RT.04 RW.11, Kota Bogor	30	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1186	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Samudi di Kp. Wangun Atas RT 04 RW 01, Sindangsari, Bogor Timur , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1187	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	JL DUTA UTAMA RT 1 RW 11 KELURAHAN KEDUNG BADAK , Kota Bogor	100	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1188	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Ujang Dana di Kp. Wangun Atas RT 04 RW 01, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1189	Hj. R. Lianasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	tegal gundil rt 03 rw 03 bogor utara, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1190	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Iis Aisah di Kp. Wangun Tengah gg. Kudus RT 03 RW 02, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1191	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan	Rumah Ining di Warung bandrek RT 01 RW 05 Kelurahan Bondongan,	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Bogor Selatan , Kota Bogor			
1192	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Nurhasanah di Jl. Raya Wangun Kp. Palasari II RT 03 RW 05, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1193	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	CIMANGGU WATES RT.01 RW.05, Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1194	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Ai Nurlaela di Jl. Raya Wangun Kp. Palasari II RT 03 RW 05, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1195	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Hendi Rustama di Jl. Raya Wangun Kp. Palasari II RT 03 RW 05, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1196	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Esih Syadiah di Jl. Raya Wangun Kp. Palasari II RT 03 RW 05, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1197	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	JALAN BAHAGIA RT 2 RW 13 KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	15	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1198	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Rumah Titin di Jl. Raya Wangun Kp. Palasari II RT 03 RW 05,	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sindangsari, Bogor Timur , Kota Bogor			
1199	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	kebon pedes rt 2 rw 5 tanah sareal, Kota Bogor	100	m2	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1200	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (harus sudah ada lokasinya, baik berupa hibah maupun aset Pemda)	Jl. Sukasari 3 RT 05 RW 06, Sukasari Bogor Timur, Kota Bogor	15,4	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1201	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Amsar di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1202	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Timur	Posyandu Melati di Bantar Peuteuy RT 02 RW 02, Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Unit	KECAMATAN BOGOR UTARA
1203	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	GANG KERAMAT RT 2 RW 13 KEL KEDUNG BADA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	750	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1204	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kebon pedes rt 05 rw 12 tanah sareal, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1205	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Atin Supriatin di RT 06 RW 01, Tegalle, Bogor Tengah , Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1206	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	tegal gundil rt 03 rw 03 bogor utara, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1207	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	JL KERAMAT / MBAH DALEM RT 2 RW 13 KELURAHAN KEDUNG BADAK , Kota Bogor	48	M2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1208	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Hidayat di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1209	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Amasandi RT 02 & 03 Rw 15 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1210	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kebon pedes rt 02 rw 11 tanah sareal, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1211	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Nurhanipah di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1212	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL KERAMAT RT 2/ RW 13 KEL KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	35	UNIT	DINAS PERHUBUNGAN
1213	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cibuluh RT.006 RW.003 Kel.Kedung Badak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Orang	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1214	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	kebon pedes rt 02 rw 05 tanah sareal, Kota Bogor	100	m2	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1215	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Karma bin Djaja di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1216	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. Cilubang Mekar 2 RT 03 RW 08 Kelurahan : Situgede , Kota Bogor	420	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1217	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Dadang Iskandar di RT 01 RW 04, Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1218	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 1 RW 1 KELURAHAN KEDUNG JAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1219	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kebon pedes rt 03 rw 6, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1220	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Putri di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1221	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan	Babakan Sirna RT 03/ RW 09 Kel. Tegallega, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1222	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Acep Badrudin di Kp Bojong Kidul RT 07 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1223	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 3/ RW 2 KELURAHAN KEDUNGJAYA, Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1224	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Misbahudin di Kp Bojong Kidul RT 07 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1225	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kebon pedes rw 10 tanah sareal, Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1226	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL PURNAMA RT 4 RW 11 KEL KEDUNG BADA KEC TANAH SAREAL, Kota Bogor	250	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1227	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Rismah Wati di Kp Bojong Kidul RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1228	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Rumah Acep Ardiansyah di Kp Bojong Kidul RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1229	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Jl. Manunggal Jaya, Kota Bogor	2750	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1230	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Titik 2 Perumnas Bantar Kemang Jl. Durian 1 RT 01 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	30	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1231	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL DUTA INDAH 2 RT 3 RW 11 KEL KEDUNG BADAK, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1232	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Titik 3 Perumnas Bantar Kemang Jl. Durian 1 RT 01 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	30	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1233	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Dakota RT 03 RW 10 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	450	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1234	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Jaenudin di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1235	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan	RW 6 SEMPLAK, Kota Bogor	90	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
1236	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sindang Barang Bendungan RT 02 RW 02 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1237	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP LEBAKWANGI RT 01 RW11 KEL RANGGAMEKAR KEC BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	28	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1238	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 2 RW 7 KELURAHAN KEDUNG JAYA, Kota Bogor	62,5	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1239	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Nuriyah di Kp Bojong Kidul RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1240	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIMANGGU WATES RT.01 RW.05, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1241	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Rudi di Kp Bojong Kidul RT 03 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1242	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	RT 4 RW 5 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGORSELATAN, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1243	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 05 RW 01 KELURAHAN KEDUNG JAYA, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1244	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Puma RT 04 RW 10 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	450	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1245	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Epul Hermawan di Kp Bojong Kidul RT 05 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1246	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Jl. Pemuda Belakang 1A No. 10 RT 06/ RW 03 Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	420	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1247	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah M. Suroto di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1248	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KEDUNG HALANG SUGIH LAMPING RT.01 RW.07 , Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1249	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Hercules 2 RT 02 RW 10 Kelurahan Curug kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	450	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1250	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah U. Saepudin di Kp Bojong Kidul RT 02 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1251	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Jl. Sosiologi Komplek PDK RT 2 RW 6 Ciparigi, Kota Bogor	620	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1252	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	CIMANGGU WATES RT.01 RW.09, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1253	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Herman di Kp Bojong Kidul RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1254	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 1 RW 11 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	700	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1255	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	MEKARWANGI RT.03 RW.08, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1256	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Aah di Kp Bojong Pesantren RT 04 RW 03 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1257	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	Rumah Nenah di Kp Bojong Pesantren RT 04 RW 03 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1258	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah	Jl. Dirgantara No.01 RT 01 RW 10 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	50	m2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1259	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Dody Djuady di Kp Bojong Kidul RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1260	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP WARUNG LIMUS RT 04 RW 09 MULYAHARJA BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	58	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1261	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 1 RW 11 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	10	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1262	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Iyas di Kp Bojong Kidul RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1263	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Saepudin di Kp Bojongkerta RT 01 RW 03 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1264	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	CIHARASHAS RT 06 RW 01 MULYAHARJA BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	106	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1265	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Dede Suwanta di Kp Bojong Pesantren RT 04 RW 03 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1266	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Paridah di Kp Bojong Pesantren RT 01 RW 03 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1267	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KEBON PEDES RT.05 RW.09, Kota Bogor	120	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1268	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 3 RW 01 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1269	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Neneng Hasanah di Kp Bojong Pesantren RT 01 RW 03 Kelurahan Bojongkerta, Bogor Selatan , Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1270	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Penyebrangan Orang Permukiman	Gang Cendana RT 01 RW 03 Kelurahan Cilendek Barat Kcamatan Bogor Barat, Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1271	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KEBON PEDES RT.02RW.09, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1272	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan	RT 1 RW 4 Kelurahan Paledang, Kota Bogor	50	orang	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			non organik (3R, maggot))				
1273	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET RT 04 RW 09 CIKARET BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1274	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KEBON PEDES RT.03 RW.09, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1275	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	RT 3 RW 3 Kelurahan Cibogor, Kota Bogor	50	orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1276	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	Rt 3 Rw 1 Kelurahan Panaragan, Kota Bogor	50	orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1277	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KEBON PEDES RT.04 RW.09, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1278	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	RT 1 RW 1 Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor	50	orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1279	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	balumbang jaya RT 04 RW 02, kel balumbang jaya, bogor barat, kota bogor, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1280	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 3 RW 01 KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	10	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1281	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	RT 1 RW 1 Kelurahan Gudang , Kota Bogor	50	orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1282	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	RT 1 RW 1 Kelurahan Ciwaringin, Kota Bogor	50	orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1283	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	MEKARWANGI RT.03 RW.08, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1284	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 03 RW 05 Kelurahan : Situgede , Kota Bogor	420	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1285	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Kampung sawah RT 06 RW 07 Kelurahan Sindangbarang, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	450	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1286	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	MEKARWANGI RT.02 RW.08, Kota Bogor	120	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1287	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL. CIBURIAL RT 4 RW 4 CIPARIGI, KEC. BOGOR UTARA , Kota Bogor	1	paket	DINAS PENDIDIKAN
1288	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	MEKARWANGI RT.03 RW.08, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1289	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 3 RW 1, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1290	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	CIMANGGU WATES RT.01 RW.05, Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1291	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KEBON PEDES RT.04 RW.10, Kota Bogor	120	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1292	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RW 4 PASIRJAYA, Kota Bogor	60	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1293	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	RT 02 RW 13 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	50	m2	KECAMATAN BOGOR UTARA
1294	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RW 5 KEL SEMPLAK, Kota Bogor	15	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1295	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RW 5 SEMPLAK, Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1296	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 02 RW 08 KEL. PAMOYANAN KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1297	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Sarana Budidaya Pertanian (Bantuan Sarana Budidaya Pertanian)	Kebon Anggrek Lebak RT. 004 RW. 002 No. 8, Kota Bogor	48	m2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1298	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Cilubang nagrak RT : 04 RW : 04 Kelurahan : Situgede , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1299	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP SUKA ASIH RT 03 RW 12 CIPAKU BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	80	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1300	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Cilubang nagrak RT : 04 RW : 04 Kelurahan : Situgede , Kota Bogor	1	Unit gedung	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1301	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 3 RW 1 CURUG MEKAR, Kota Bogor	900	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1302	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 3 RW 1 CURUG MEKAR, Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1303	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan PALAYU 3 dan jalan PALAYU 5 RT 3 RW 7 Tegal gundil Bogor Utara, Kota Bogor	856	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1304	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	KP SUKAJAYA RT 003/001 KEL GENTENG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	70	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1305	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT : 01,02,03,04,05 RW : 06 Kelurahan : Curug mekar , Kota Bogor	25	titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1306	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	RT : 01,02,03,04,05 RW : 06 Kelurahan : Curug mekar , Kota Bogor	12	unit	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1307	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Penyebrangan Orang Permukiman	KP SUKAJAYA RT 003/001 KEL GENTENG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	8	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1308	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Paledang RW 07, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1309	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl. Pabuaran RT 02/RW 10 Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, kota Bogor, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1310	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Dalurung IX No.07 RT. 03/07 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1311	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Warung Bandrek rt 01 rw 05 Bondongan, Bogor Selatan , Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1312	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan Turunan Makam Putih, RW 6 Cimahpar Bogor Utara, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1313	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang	Gg. Makam RT 06 RW 05 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	375	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
1314	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SUKAJAYA RT 03/01 KEL GENTENG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1315	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Kayu Manis RT.02 RW.06, Kota Bogor	15	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1316	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	artzimar kawung luwuk rt 01 rw 01 kel. tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	150	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1317	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Warung Bandrek rt 01 rw 05 Bondongan, Bogor Selatan, Kota Bogor	160	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1318	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Bibit Ternak (Bantuan bibit ternak)	RT 4 RW 7 RANGGAMEKAR, KEC. BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	PAKET	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1319	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	MEKARWANGI RT.01 RW.08, Kota Bogor	25	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1320	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	GG. makam RT 06 RW 05 Cilendek Barat, kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	255	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1321	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	MEKARWANGI RT.02 RW.08, Kota Bogor	15	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1322	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kp tawakal rt 001 rw 005, kel bubulak, kec bogor barat, kota bogor, Kota Bogor	15	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1323	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	Kelurahan Bondongan RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kota Bogor	500	paket/orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1324	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	KEBON PEDES RT.05 RW.09, Kota Bogor	35	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1325	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Bantarjati Kaum RT. 06 RW 10 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	850	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1326	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Jl. KH. Muhidin RT.002/005 Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	-	Paket	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1327	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. BABAKAN RT 02,03 & 06 RW 09 Cimahpar, Kota Bogor	1084	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1328	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit,)	Kelurahan Bondongan RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kota Bogor	60	peserta	DINAS TENAGA KERJA
1329	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	RT 3 RW 4 KELURAHAN TANAH BARU, KEC. BOGOR UTARA., Kota Bogor	169	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1330	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL. Cemplang Baru RT 06 RW 10 Kelurahan Cilendek Barat, Kec Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1331	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Cibadak RT 01/ RW 15 Kel. Tanah Sareal, Kota Bogor	120	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1332	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp tawakal rt 002 rw 005, kel bubulak. kec bogor barat, kota bogor, Kota Bogor	150	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1333	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	Perumahan Cimahpar residence RT 04 RW 15, Kel. Cimahpar, kec. Bogor Utara, kota Bogor, Jawa barat, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1334	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Rw. 03 kel. Pamoyanan Kec. Bogor selatan, Kota Bogor	23	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1335	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 16 RW 03 Keluahan Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1336	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp tawakal rt 001 rw 005, kel. bubulak, kec. bogor barat, kota bogor (16251), Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1337	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	rt 3 rw 8, kel pamoyaan, bogor selatan, Kota Bogor	856	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1338	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 04 RW. 07 kel. Pamoyanan Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	550	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1339	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. BOJONG RT 3 RW 4 CIMAHPAR , KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1340	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl. Lantana Ujung Benda Kaum RT. 01/13 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	120	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1341	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	Rt 3 Rw. 2 kel .Mulyaharja, Kec. Bogor selatan, Kota Bogor	10	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1342	Siti Maesaroh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 5 RW 2, Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	550	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1343	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit,)	Jl. Darul Quran No.31, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Kota Bogor	40	Peserta	DINAS TENAGA KERJA
1344	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	Gg. Wahir No.35, RT.02/RW.11, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia., Kota Bogor, Kota Bogor	50	Unit	DINAS SOSIAL
1345	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	Graha Grande RT.03 RW.08, Kota Bogor	500	m2	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1346	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Hibah Badan/Lembaga Seni (Permohonan Hibah untuk Badan/ lembaga seni)	Jl. Ahmad Adnawijaya 112 Bumi Indraprasta II RW 15 Tegalgundil Bogor Utara, Kota Bogor	5,68E+08	rupiah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1347	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	gg masjid RT. 01,02,03 RW. 03 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	40	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1348	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	pondok aren rt 8 rw 7 kel ciluar bogor utara	856	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				pondok aren rt 8 rw 7 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor			
1349	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp semplak rt 005 rw 003, kel bubulak ,kec bogor barat,kota bogor (id 17989), Kota Bogor	75	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1350	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Sarana Pendidikan SD (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	JL. LODAYA RT 4 RW 8 TEGAL GUNDIL , KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
1351	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Gg. Keramat Mbah Dalem Rt.02 Rw.13 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal , Kota Bogor	60	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1352	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	SUKARESMI RT.04 RW.03, Kota Bogor	15	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1353	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	SUKARESMI RT.04 RW.03, Kota Bogor	15	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1354	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Jl. Keramat Mbah Dalem Rt.03 Rw.13 Kel. Kedung Badak Kel. Tanah Sareal., Kota Bogor	225	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1355	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	Jl. Darul Quran No.31, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Kota Bogor	800	peserta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1356	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	artzimar II Kawung luwuk rt 7 rw 1 tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1357	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jl. mama kurtubi jl. ceger rt 1 rw 3 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	350	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1358	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	RW 5 Kelurahan Panaragan, Kota Bogor	50	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1359	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	RW 12 Kelurahan Paledang, Kota Bogor	50	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1360	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	RW 4 Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor	50	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1361	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cikaret RT 7 RW 4 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	3430000	Rp	DINAS PENDIDIKAN
1362	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.04/RW.01, Bojongkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Kota Bogor	542	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1363	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	RW 6 Kelurahan Gudang, Kota Bogor	50	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1364	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Ciwaringin RW 04, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1365	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	RW 3 Kelurahan Tegallega, Kota Bogor	50	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1366	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp pilar 2 rt 004 rw 002, kel bubulak ,kec bogor barat,kota bogor (id 17942), Kota Bogor	150	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1367	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 04/ RW 01 kel. bojongkerta Bogor Selatan , Kota Bogor	100	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1368	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	Jl. Dr. Semeru Gang menteng RT 01 RW 12 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	unit	KECAMATAN BOGOR UTARA
1369	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Generasi Muda, pemilih pemula)	Kantor Kecamatan Bogor Timur Jalan Pajajaran No.16, RT 03 RW 04, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	150	Peserta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1370	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kp pilar rt 003 rw 002, kel bubulak, kec bogor barat, kota bogor, Kota Bogor	7	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1371	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	Jl. Kapling Kukupu RT 001 RW 007 Kelurahan Cibadak kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1372	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT 6 RW 4 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	32,4	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1373	Sopian, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (harus sudah ada lokasinya, baik berupa hibah maupun aset Pemda)	Bantarjati Lebak RT 4 RW 1 Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor	28	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1374	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. KAPLING KUKUPU RT 001 RW 007 Kelurahan Cibadak , Kota Bogor	200	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1375	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 3 RW 4 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	10	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1376	Zaenul Mutaqin	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. BAPAK RAHMAT RT.01 RW.13 KEL. SUKADAMAI KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	200	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1377	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Cimanggu Pabuaran Poncol Rt.01 Rw.05 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal. (Ponpes Ar Riyadhoh), Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1378	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Budidaya Tanaman (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya Pertanian)	RT 01 RW 1 KELURAHAN MULYAHARJA, Kota Bogor	50	orang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1379	Hj. R. Lantiasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	KEBON PEDES RT 01 RW 05 TANAH SAREAL , Kota Bogor	1	1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1380	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. KAPLING KUKUPU RT 001 RW 007 Kelurahan Cibadak , Kota Bogor , Kota Bogor	120	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1381	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. babakan rt 01 rw 02 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	230	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1382	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Budidaya Tanaman (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya Pertanian)	RW 11 Kelurahan Ciwaringin, Kota Bogor	50	orang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1383	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. BAPAK RAHMAT RT.01 RW.13 KEL. SUKADAMAI KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor , Kota Bogor	120	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1384	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	babakan rt 02 rw 02 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1385	Hj. R. Lianasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Taman Permukiman (Tanah milik Pemerintah Kota Bogor)	kebon pedes rt 02 rw 05 tanah sareal , Kota Bogor	1	1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1386	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. babakan rt 03 rw 02 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1387	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. Bapak Ramhat RT.01 RW.13 Kel, Sukadamai Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1388	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Budidaya Tanaman (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya Pertanian)	RT 3 RW 3 Kelurahan Cibogor, Kota Bogor	50	orang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1389	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. babakan rt 4 rw 2 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1390	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Jl. Cimanggu Pabuaran Poncol Rt.01 Rw.05 Kel. Kedung Waringin	50	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				Kec. Tanah Sareal. (Belakang Ponpes Ar Riyadhoh), Kota Bogor			
1391	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. kebon awi rt 3 rw 6 kel cimahpar bogor utara, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1392	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.03 RW.13 KEL. SUKADAMAI KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1393	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Budidaya Tanaman (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya Pertanian)	RT 1 RW 15 Kelurahan Cibadak, Kota Bogor	50	orang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1394	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. cibuluh gg. kondang rt 5 rw 8 kel cibuluh bogor utara, Kota Bogor	600	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1395	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Baranangsiang RT 02 & RT 04/ RW 07 Bogor Timur, Kota Bogor	805	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1396	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jembatan Permukiman (Jembatan yang dilalui kendaraan, jembatan penyeberangan orang)	loji rt 004 rw 008, kel loji kec bogor barat, Kota Bogor	6	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1397	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	sindang sari rt 3 rw 11 kel tanah baru bogor utara, Kota Bogor	700	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1398	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	loji rt 004 rw 008 ,kel bubulak, kec bogor barat, kota bogor, Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1399	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Baranangsiang RW 09 Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1400	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sarana Pendidikan SMP (Utilitas Sarana SMP (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 20 Kota Bogor, Kota Bogor	32000000	rupiah	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1401	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	KP. KEBON DANAS RT 3 RW 7 KEL. CIMAHPAR , KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	12	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1402	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kpemplak rt 001 rw 012, kel bubulak, kec bogor barat, kota bogor(17114), Kota Bogor	7	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1403	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Dekeng RT 001 RW 009 Kelurahan Genteng Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	uni	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1404	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kel Ciwaringin RW 05 Kec. Bogor tengah, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1405	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Cimanggu Taman Jl. Palem Rt.001 Rw.011 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal (Arah Pemancingan Dodol), Kota Bogor	80	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1406	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 4 RW 4 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1407	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sarana Pendidikan SMP (Utilitas Sarana SMP (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	SMPN 1 - SMPN 2 Kota Bogor, Kota Bogor	2E+08	rupiah	DINAS PENDIDIKAN
1408	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kpemplak rt 002 rw 012, kel bubulak kec bogor barat, kota bogor, Kota Bogor	7	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1409	Ade Askiah, S.H	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Penyebrangan Orang Permukiman	RT 3 RW 3 Kelurahan Rangka Mekar ke rt 2 rw 9 kelurahan batutulis kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	20	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1410	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Kotak Literasi cerdas (Pengadaan Buku Bacaan)	RT 01 RW 04 EMPANG BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	1	Paket	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1411	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Perapatan RT.01-03 RW. 02 Kelurahan Cibadak Tanah Sareal Kota Bogor, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1412	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	RT 01 RW 04 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	200	ORANG	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1413	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sarana Budidaya Pertanian (Bantuan Sarana Budidaya Pertanian)	RT 5 RW 1 MULYAHARJA, Kota Bogor	2E+08	rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1414	Mardiyanto, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Legok setu Beureum RT 01/RW 01, kel. bojongkerta, Kec. Bogor Selatan 16139, Kota Bogor, Kota Bogor	618	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1415	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	Kp. Perapatan RT.01-03 RW. 02 Kelurahan Cibadak Tanah Sareal Kota Bogor., Kota Bogor	50	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1416	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sarana Budidaya Pertanian (Bantuan Sarana Budidaya Pertanian)	RW 11 CIWARINGIN, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	2E+08	RUPIAH	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1417	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sarana Budidaya Pertanian (Bantuan Sarana Budidaya Pertanian)	RT 3 RW 3 KELURAHAN CIBOGOR, Kota Bogor	2E+08	RUPIAH	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1418	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Sarana Budidaya Pertanian (Bantuan Sarana Budidaya Pertanian)	RT 1 RW 15 KELURAHAN CIBADAK, Kota Bogor	2E+08	rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1419	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	Jl. Cimanggu Bharata Rt.01 Rw.04 no.2 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal (Belakang SDITA ELMAMUR), Kota Bogor	225	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
1420	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. ceger re 6 rw 11, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1421	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. ceger rt 2 rw 11 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	2000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1422	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Kelembagaan Pertanian (Pelatihan manajemen/ pengelolaan administrasi kelompok tani)	RWt 5 rw 11 Kelurahan Mulyaharja, Kota Bogor	1E+08	rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1423	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Kelembagaan Pertanian (Pelatihan manajemen/ pengelolaan administrasi kelompok tani)	RW 11 Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1E+08	rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1424	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit,)	GG WAHIR RT 01 RW 11 EMPANG BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	40	peserta	DINAS TENAGA KERJA
1425	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Kelembagaan Pertanian (Pelatihan manajemen/ pengelolaan administrasi kelompok tani)	RT 3 RW 3 Kelurahan Cibogor, Kota Bogor	1E+08	rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1426	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. ceger rt 4 rw 11 tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1427	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp. Prapatan RW.02/02, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1428	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kp. ceger rt 2 rw 11 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	22	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1429	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	selakopi rt 002 rw 003, kel sindang barang ,bogor barat,kota bogor, Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1430	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Cimanggu GG. Madrasah Rt.02 Rw.03 Kel. Kedung Jaya Kec. Tanah Sareal (Depan Rumah RW Rusdiana), Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1431	Drs. Mahpudi Ismail	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	sindang barang selakopi tengah rt 02 rw 8,bogor barat,kota bogor, Kota Bogor	20	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1432	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Kelembagaan Pertanian (Pelatihan manajemen/ pengelolaan administrasi kelompok tani)	RT 1 RW 15 Kelurahan Cibadak, Kota Bogor	1E+08	rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1433	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT 2 RW 8 KELURAHAN KEDUNGJAYA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	100	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1434	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Jl. Ahmad Adnawijaya 112 Bumi Indraprasta II RW 15 Tegalgundil Bogor Utara, Kota Bogor	-	Rupiah	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1435	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 5 RW 4 KELURAHAN KEDUNGJAYA, Kota Bogor	15	UNIT	DINAS PERHUBUNGAN
1436	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 4 RW 4 KELURAHAN KEDUNGJAYA , Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1437	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Cimanggu Gg. Amil Rt.03 Rw.04 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal (Depan Rumah Bu RT Uyun , Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1438	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	jl. r. hanapiah rt 1 rw 15 kel. cimahpar bogor utara, Kota Bogor	542	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1439	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	jl. r. hanapiah rt 2 rw 15 kel cimahpar bogor utara, Kota Bogor	542	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1440	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. bubulak rt 3 rw 3 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	542	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1441	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kali murni RT05 RW01 Kelurahan Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor	360	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1442	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Penyebrangan Orang Permukiman	kp. bubulak rt 3 rw 3 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	12	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1443	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. bubulak rt 2 rw 3 kel ciluar bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1444	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Mesjid An Nur Villa Bogor Indah (VBI) 3 RW 15 Kedung Halang Bogor Utara, Kota Bogor	-	Rupiah	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1445	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kalimurni RT05 RW01 Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor	22	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1446	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	jl. pengkolan 1 kp. bebek rt rw 10 kel kedung halang bogor utara, Kota Bogor	650	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1447	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	gg. kembang rt 3 rw 9 kel kedung halang bogor utara, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1448	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. pangkalan rt 2 rw 10 kel cibuluh bogor utara, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1449	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp. pangkalan rt 1 rw 10 kel cibuluh bogor utara, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1450	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan	Mesjid Al Huda VBI 3 RW 15 Kedung Halang Bogor Utara, Kota Bogor	-	Rupiah	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			prasarana ibadah (masjid, Mushola)				
1451	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	gg. kembang rt 4 rw 9 kel kedung halang bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1452	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 2 rw 4 kelurahan Kedung Jaya, Kota Bogor	15	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1453	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	jl r. hanapiah rt 3 rw 15 kelcimahpar bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1454	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	jl. r. hanapiah rt 1 rw 15 kel cimahpar bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1455	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Majlis Ta'lim Nurul Yaqin, Kp. Tarikolot RT 4 RW 4 Kel. Ciluar Bogor Utara, Kota Bogor	-	Rupiah	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1456	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Makam RT 06 RW 05 Kelurahan cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	350	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1457	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp. anyar rt 3 rw 4 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	542	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1458	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	jl. palupuh rt 2 rw 2 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1459	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	tegal gundil rt 6 rw 2 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	550	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1460	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Makam RT 01 RW 05 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	350	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1461	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	gg. pelita rt 4 rw 8 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	856	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1462	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp anyar rt 3 rw 4 kel tegal gundil bogor utara, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1463	Jatirin	Partai Kebangkitan Bangsa	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	kp pangkalan rt 3 rw 10 kel cibuluh bogor utara, Kota Bogor	500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1464	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Makam RT 03 RW 05 Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	350	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1465	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 3 RW 2 KELURAHAN KEDUNG JAYA, Kota Bogor	15	UNIT	DINAS PERHUBUNGAN
1466	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 07 RW 05 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1467	Hj. R. Lianasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KEDUNG BADA RT 001 RW 004 TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
1468	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 04 Kel. Gudang, Bogor Tengah, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1469	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 06 Kel. Gudang Bogor, Kota Bogor	605	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1470	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Pengaspalan Jalan di RW 07 Kel. Gudang, Boteng , Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1471	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Pengaspalan Jalan di RW 01 Kel. Gudang, boteng, Kota Bogor	550	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1472	Hj. R. Lanasari, S.A.P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	MEKARWANGI RT 02 RW 05 TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	1	DINAS PENDIDIKAN
1473	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	SIRNASARI RT 01 RW 04 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	200	ORANG	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1474	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Mesjid, RT.05/RW.04, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor	900	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1475	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 3 RW 8 KELURAHAN KEDUNG JAYA, Kota Bogor	855	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1476	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 4 RW 8 KELURAHAN KEDUNG JAYA , Kota Bogor	855	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1477	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	GUNUNG BATU KEBON SEREH RT. 04 RW. 06 KELURAHAN GUNUNG BATU KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1478	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL DEKENG ATAS RT 03 RW 03 GENTENG BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor	85	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1479	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	GG. PANORAMA RT. 03 RW. 05 KELURAHAN SINDANGBARANG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	120	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1480	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/yang	RT : 01 RW : 07	1	Unit gedung	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	Kelurahan : Loji , Kota Bogor			
1481	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Johar Grande I Rt06 RW04, Kelurahan Kedung Waringin, Kota Bogor	855	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1482	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Johar V RT04 RW04 Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor	855	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1483	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Flanboyan IV, RT01 RW04 Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1484	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	SAWAH BARU RT. 01 RW. 12 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	72	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1485	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kedung halang wates rt 3 rw 1 kel sukaesmi kec tanah sareal, Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1486	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	SAWAH BARU RT. 02 RW. 12 KELURAHAN BALUMBANG JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1487	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kedung halang sugih rt 1, 2 rw 2 kel sukaesmi kec tanah sareal , Kota Bogor	412	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1488	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kedung halang wesel rt 2 rw 3 kel sukaesmi kec tanah sareal, Kota Bogor	125	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1489	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Blk. AA Jl. Dahlia Mesjid No.1, RT.03/RW.04, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor,	855	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
				Jawa Barat 16164, Indonesia, Kota Bogor			
1490	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	DINAS SOSIAL KOTA BOGOR, JL. MERDEKA NO. 142, RT. 03 RW. 05, KELURAHAN CIWARINGIN KECAMATAN BOGOR TENGAH, Kota Bogor	100	Unit	DINAS SOSIAL
1491	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kedung halang sentral rt 1 rw 4 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	77	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1492	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rw 5 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	375	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1493	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rw 4 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1494	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	DINAS SOSIAL KOTA BOGOR, JL. MERDEKA NO. 142, RT. 03 RW. 05, KELURAHAN CIWARINGIN KECAMATAN BOGOR TENGAH, Kota Bogor	10	UNIT	DINAS SOSIAL
1495	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rt 3, 4 rw 2 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	312	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1496	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Alat Bantu Dengar (Kursi Roda)	DINAS SOSIAL KOTA BOGOR, JL. MERDEKA NO. 142, RT. 03 RW. 05, KELURAHAN CIWARINGIN KECAMATAN BOGOR TENGAH, Kota Bogor	5	Unit	DINAS SOSIAL
1497	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rt 1 rw 6 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	175	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1498	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Kedung halang wesel rt 3 rw 6 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	175	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1499	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Re 6 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	250	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1500	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rw 6 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	800	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1501	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JOHAR II RT05 RW04, Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1502	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Rt 4 rw 2 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	120	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1503	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rt 2 rw 4 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	145	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1504	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 02 Kelurahan Gudang Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1505	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 03 Kelurahan Gudang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1506	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	Rw 9 kel cibadak kec tanah sareal, Kota Bogor	125	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1507	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jl Johar III, RT02 RW04, Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1508	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/ untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Rw 7 kel sukadamai kec tanah sareal, Kota Bogor	115	m1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1509	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Rt 3 rw 6 kel sukadamai kec tanah sareal, Kota Bogor	80	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1510	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 09 Kelurahan Tegalleja, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1511	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	Gg Kelor RT : 02 RW : 10 Kelurahan : Menteng , Kota Bogor	1	Unit gedung	KECAMATAN BOGOR UTARA
1512	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Untung Partowijoyo Kel No.5, RT.05/RW.03, Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155, Kota Bogor	856	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1513	Edi Darmawansyah, SH	Partai Bulan Bintang	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Rt 2 rw 4 kel sukaresmi kec tanah sareal, Kota Bogor	25	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1514	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jalan lingkungan RT 5 RW 3 Cimahpar (pxlxt=250 m x 30cm x 40 cm) = 30 m3, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1515	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Taman Lotus RT 01/ RW 15 Kel. Cibadak tanah Sareal, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1516	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Cimanggu Gg. Kemboja Rt.04 Rw.04 Kel. Kedung Jaya Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1517	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	lebak kongsi rw 07 kel. sindangsari kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1518	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	lebak kongsi rt 3 rw 7 kel. sindangsari kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1519	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp. Muara RT 01/ RW 10 Kel. Sindangrasa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1520	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	lebaksari rt 2 rw 6 kel. sindangsari kec. bogor timur, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1521	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Cimanggu Gg.Delima Rt. 02 Rw. 04 Kel. Kedung Jaya Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1522	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah	lebaksari rw 3 kel. paledang kec. bogor tengah, Kota Bogor	1	paket	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1523	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. MUARA RT 001 RW 001 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	1400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1524	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	baranang siang indah rt 6 rw 5 kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	1	paket	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1525	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP GUDANG RT 3 RW 7 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN, Kota Bogor	-	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1526	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 01/ RW 15 Kel. Cibadak Kec. tanah Sareal, Kota Bogor	1000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1527	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Cimanggu Gg. Kemboja Rt.05 Rw.04 Kel. Kedung Jaya Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	20	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1528	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	lebaksari rt 2 rw 6 kel. sindangsari kec. bogor timur, Kota Bogor	200	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1529	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. MUARA BARU RT 001 RW 001 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	228	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1530	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP ANTAWIS RT 02 RW 10 GENTENG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	-	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1531	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	CIKARET GG KOSASIH RT 05 RW 10 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	-	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1532	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. MUARA TEGAL 1 NO. 82 RT 002 RW 001 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1533	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang	JL. MUARA TEGAL RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 002 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	35	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1534	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi ruang kelas Paud (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang Paud)	Panaragan penggilingan RT 01/ RW 06 Kel. panaragan bogor tengah, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
1535	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	gudang rw 8 kel. gudang kec. bogor tengah, Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1536	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	gudang rw 5 kel. gudang kec. bogor tengah, Kota Bogor	200	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1537	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	CIKARET GG KOSASIH RT 05 RW 10 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1538	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Permohonan sarana dan prasarana PAUD (Rehabilitasi bangunan ruang kelas, utilitas dan lainnya untuk PAUD)	Panaragan penggilingan RT 01/ RW 06 Kel. Panaragan Kota Bogor, Kota Bogor	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
1539	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Generasi Muda, pemilih pemula)	parung banteng rw 01 kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	100	orang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1540	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Septic Tank Komunal (Barang yang diserahkan kepada masyarakat)	Panaragan penggilingan RT 01/RW 06 Kel. panaragan, Kec. bogor tengah, Kota Bogor	1	unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1541	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	kebon jahe rw 03 kel. kebon kalapa kec. bogor tengah, Kota Bogor	40	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1542	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	belakang komplek BBIA rt 4 rw 2 kelurahan Cikaret kecamatan Bogor Selatan., Kota Bogor	35	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1543	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kebon jahe rw 03 kel. kebon kalapa kec. bogor tengah, Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1544	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	babakan sirna rw 02 kel. tegallega kec. bogor tengah, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1545	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	babakan sirna rw 02 kel. tegallega kec. bogor tengah, Kota Bogor	40	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1546	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	Jl. Merdeka Gg. Ambi 1 No. 19 Kel. Ciewatingin ., Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1547	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	lebaksari rw 03 kel. paledang kec. bogor tengah, Kota Bogor	20	tabung	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1548	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	lebaksari rw 10 kel. paledang kec. bogor tengah, Kota Bogor	20	tabung	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1549	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung /Barang yang diserahkan ke masyarakat)	kebon manggis rw 04 kel. paledang kec. bogor tengah, Kota Bogor	20	tabung	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1550	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	turap di RT 3 RW 18 Tegal gundil, Kota Bogor	100	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1551	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	Taman Tirta Cimanggu RT 03/ RW 13 Kel. Mekarwangi, Ke, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1552	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	drainase di RT 03 & 04 RW 02 (60m3) TEGalgundil Bogor Utara, Kota Bogor	60	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1553	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan di RW 12 Tegal Gundil (1000m2), Kota Bogor	1000	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1554	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RW 05 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	200	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1555	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	jalan menuju mesjid Attawab Rw 13 Tegal Gundil (500m2), Kota Bogor	500	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1556	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	cikondang rt 09 rw 04 kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1557	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	katulampa panjang rw 19 kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1558	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan lingkungan di RW 3 RT 5 Tegal Gundil (200m2), Kota Bogor	200	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1559	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA LEBAK RT. 02/10 KELURAHAN PASIR JAYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	48	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1560	H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Drainase Jalan lingkungan di RW 3 RT 5 Tegalgundil (100m3), Kota Bogor	100	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1561	Fajari Aria Sugiarto, SH	Partai Amanat Nasional	Pelatihan Budidaya Ikan (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya ikan)	parung banteng rw 01 kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	100	orang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1562	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl. Nurul Ikhwan IV x III Rt.05/rw.05, Kota Bogor	1500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1563	Gilang Gugum Gumelar	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	JL MARGABAKTI RW 009 KEL KERTAMAYA KEL BOGOR SELATAN, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1564	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP GUDANG RT 03 RW 07 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1565	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	CIKARET RT 03 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1566	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	CIKARET JL R KOSASIH RT 05 RW 10 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1567	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	PANCASAN RT 02 RW 06, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1568	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP GUDANG RT 03 RW 07 RANGGAMEKAR BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1569	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP SUKAJADI CIPAKU BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1570	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL WARUNG BANDREK BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1571	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	WARUNG BANDREK BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1572	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	Kp.Kebon Kelapa RT.01,02,03,04 RW.03 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1573	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	WARUNG BANDREK RT 01 RW 02 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1574	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Kp.Seremped Barat RT.002 RW.004 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	40	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1575	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Kp.Kebon Kelapa RT.001 RW.003 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	123	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1576	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Tentara Pelajar Gg.Mantri guru Rt.05 Rw.01 Kel. Kedung Jaya Kec. Tanah Sareal (Dekat rumah Bpk. Djuanda), Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1577	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Tentara Pelajar Gg. Mantri guru Rt.01 Rw.01 Kel. Kedung jaya Kec. Tanah sareal (Dekat rumah Bpk. Lili), Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1578	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	Cemplang Baru RT 002/012 kelurahan cilendek barat kecamatan bogor barat, Kota Bogor	140	M1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1579	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Ciparigi Rt.01/Rw.10 a.n. Ibu Uum , Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1580	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Tanah Baru Rt.05/Rw.08 a.n. Ibu Murniah, Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1581	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl. Tentara Pelajar Gg. Pahlawan Rt.03 Rw.02 Kel. Kedung jaya Kec. Tanah Sareal., Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1582	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Kota (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Kp karya bakti RT004/004 kelurahan cilendek Barat kecamatan bogor barat, Kota Bogor	300	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1583	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	CIKARET RT 01 RW 04 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1584	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	WARUNG BANDREK RT 03 RW 13 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1585	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Gg tawakal RT003/005 Kelurahan bubulak kecamatan bogor barat, Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1586	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	WARUNG BANDREK RT 01 RW 12 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1587	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP WARUNG BANDREK RT 03 RW 12 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1588	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	WARUNG BANDREK RT 02 RW 12 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1589	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL WATUNG BANDREK KP KUTA JAYA RT 04 RW 02 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1590	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	PARUNG JAMBU RT 01 RW 10 EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1591	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	BATUTULIS RT 04 RW 02 BATUTULIS BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1592	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi	ASRAMA BRIMOB SUKASARI RT 01 RW 03 KELURAHAN LAWANGGINTUNG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	554	M3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane				
1593	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	ASRAMA BRIMOB SUKASARI RT 01 s.d 04 RW 03 KELURAHAN LAWANGGINTUNG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	9,2	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1594	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	ASRAMA BRIMOB SUKASARI RT 01 RW 03 KELURAHAN LAWANGGINTUNG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	79	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1595	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	ASRAMA BRIMOB SUKASARI RT 01 RW 03 KELURAHAN LAWANGGINTUNG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	135	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1596	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	ASRAMA BRIMOB SUKASARI RT 01 s.d 04 RW 03 KELURAHAN LAWANGGINTUNG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1050	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1597	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 002/002 kelurahan Loji kecamatan bogor barat, Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1598	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL LAYUNG SARI GG RADEN SALEH RT 04 RW 16 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1599	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	CIKARET GG KOSASIH CIKARET KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1600	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL BATUTULIS NO 27 GG MESJID RT 05 RW 02 BATUTULIS BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1601	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	WARUNG BANDREK RT 02 RW 04 BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1602	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL SIRNASARI RT 04 RW 04 KEL EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1603	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	SUKAJADI RT 04 RW 09 KEL BONDONGAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1604	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL LAYUNGSARI RT 06 RW 14 KEL EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1605	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP ANYAR RT 05 RW 06 KEL MUARASARI BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1606	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. kampung Babakan Pasir Mas Pasir Kuda, Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
1607	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Gang pala RT 03 RW 01 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	berkas	DINAS PENDIDIKAN
1608	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL CIPAKU KP SUKADAMAI R T 02 RW 17 CIPAKU BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1609	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP CIRANJANG RT 04 RW 03 MULYAHARJA BGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1610	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JLN GUNUNG GADUNG RT 02 RW 06 KEL GENTENG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1611	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	SIRNASARI RT 05 RW 14 EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1612	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	JL LOLONGOK TENGAH NO 27 RT 06 RW 13 KEL EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1613	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Pedes Gg. Pacilong RT 02/01 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	263	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1614	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP SINDANG SARI RT 04 RW 04 PAMOYANAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1615	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	KP WANGUN SARI RT 03 RW 04 PAMOYANAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1616	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	GG PESANTREN RT 01 RW 07 HARJASARI BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1617	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	GG AMIL RT 04 RW 02 BATUTULIS BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	ORANG	DINAS PENDIDIKAN
1618	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Perintis Kemerdekaan RT 02/ RW 04 Kel. Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1619	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. tajudin yasin rt 05 rw 02 kel. sindangrasa, Kota Bogor	150	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1620	H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. Sindang Sari RT 03 RW.02, Kota Bogor	750	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1621	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah Bapak Adang Zaenudin Cemplang Baru RT 002/012 Kelurahan Cilendek Barat , Kota Bogor	121	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1622	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Perum.Taman Griya Kencana A.8/05 RT.002 RW.008 Kel.Kencana Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	1	orang	DINAS PENDIDIKAN
1623	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Hibah Badan/Lembaga Seni (Permohonan Hibah untuk Badan/ lembaga seni)	Kp.Pabuaran RT.001 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	100	m2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1624	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/yang	JL KP NAGROG NO 41 RT 01/ RW 09, Kota Bogor	40	M2	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Selatan				
1625	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Prasarana Keagamaan (Permohonan belanja sarpras hibah keagamaan (sound sistem, karpet, dll))	Jl.Kp.Pabuaran RT.001 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	-	m2	SEKRETARIAT DAERAH
1626	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	komplek pertanian RT 02 RW 08 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1627	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Manunggal RT 02 RW 08 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1628	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	GENTENG RT 02 RW 06 GENTENG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	153	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1629	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET GG KOSASIH RT 03 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	83	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1630	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP SUKAASIH RT 03 RW 12 CIPAKU BOGOR SELATAN, Kota Bogor	173	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1631	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIHARASHAS RT 05 RW 01 MULYAHARJA BOGOR SELATAN, Kota Bogor	103	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1632	H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	WARUNG PARI RT 03 RW 02 KEL. PAMOYANAN KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	600	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1633	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit,)	KEL.BABAKAN PASAR , KEL.CIBOGOR ,KEL.KATULAMPA KEL.TAJUR , KEL.SINDANGSARI , KEL.SINDANGRASA, Kota Bogor	20	peserta	DINAS TENAGA KERJA
1634	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Rumah ibu Siti salbiah kp pilar 2 RT 002/001 kelurahan bubulak kec bogor barat, Kota Bogor	80	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1635	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Kampung tawekal RT 003/005 kelurahan Bubulak kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	-	Juta	SEKRETARIAT DAERAH
1636	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Pancasan Baru RT 02 RW 06 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1637	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Pancasan No. 44 RT 02 RW 06 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1638	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Perumnas Jl. Manggis 4 N0. 04 RT 008 RW 005 Kelurahan BaranangSiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1639	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIRANJANG RT 04 RW 03 PAMOYANAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	282	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1640	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	CIKARET RT 04 RW 09 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	36	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1641	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	77	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1642	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP BUNTAR RT 03 RW 08 MUARASARI BOGOR SELATAN, Kota Bogor	425	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1643	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	GG EMAD RT 05 RW 05 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	54	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1644	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN , Kota Bogor	66	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1645	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	75	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1646	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET GG PANGUMBAHAN RT 04 RW 04 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	408	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1647	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	77	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1648	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP SUKADAMAI RT 03 RW 01 CIPAKU BOGOR SELATAN, Kota Bogor	37	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1649	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	110	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1650	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL R KOSASIH RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	44	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1651	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL LOLONGOK GG KRUPUK NO 3A RT 02 RW 12 EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	157	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1652	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	MULYAHARJA RT 02 RW 11 MULYAHARJA BOGOR SELATAN, Kota Bogor	375	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1653	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	JL LOLONGOK GG MUTIARA RT 05 RW 03 EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	35	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1654	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	JL R KOSASIH RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	89	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1655	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	GG MADRASAH RT 03 RW 01 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	43	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1656	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIEBEREUM JEMPOL RT 04 RW 04 MULYAHARJA , Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1657	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP CIRANJANG RT 04 RW 03 PAMOYANAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	446	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1658	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIMANENGAH RT 03 RW 05 CIPAKU BOGOR SELATAN, Kota Bogor	91	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1659	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	WARUNG LIMUS RT 02 RW 09 MULYAHARJA BOGOR SELATAN, Kota Bogor	245	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1660	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp Jawa RT 001/006 Kelurahan Situ gede Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	50	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1661	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp Jawa RT 003/007 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	187	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1662	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Curug Cideres RT 004/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	28	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1663	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Curug RT 004/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	30	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1664	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Curug Cideres RT 004/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	35	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1665	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Curug Cideres RT 003/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	126	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1666	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Curug Cideres RT 004/006 Kelurahan Curug Kevamatan Bogor Barat , Kota Bogor	262	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
		Indonesia Perjuangan	masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1667	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Curug Cideres RT 004/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	65	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1668	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Curug Cideres RT 004/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	36	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1669	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	MINA BAKTI RT 6 RW 03 KELURAHAN CIKARET KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1670	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	WARUNG BANDREK RT 01,02,03 RW 13 KELURAHAN BONDONGAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1050	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1671	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP. PENDEUY RT 01 RW 11 KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1672	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP PENDEUY RT 02 RW 11 KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1673	H. Mulyadi, S.H	Partai Demokrat	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	KP SINDANGSARI RT 04 RW 06 KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	750	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1674	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (harus sudah ada lokasinya, baik berupa hibah maupun aset Pemda)	Tanjakan Pala Rt 05 Rw 07 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	12	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1675	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Tanjakan Pala RW 07 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	360	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1676	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Rt 05 Rw 09 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1677	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Pancasan Baru RT 01 RW 012 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1678	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Jl. Pancasan Baru RT 02 RW 12 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1679	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl Johar Ujung RT05 RW04, Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1680	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan ruang kelas baru SD (Pembangunan RKB pada jenjang SD)	Jl. Batu Tulis No.44, RT.01/RW.03, Batutulis, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Kota Bogor	3	Ruang	DINAS PENDIDIKAN
1681	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIHARASHAS RT 06 RW 01 MULYAHARJA BOGOR SELATAN, Kota Bogor	106	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1682	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP KEBON KELAPA RT 02 RW 09 BATUTULIS BOGOR SELATAN, Kota Bogor	99	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1683	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	CIEUBEREUM JEMPOL RT 04 RW 04 MULYAHARJA BOGOR SELATAN, Kota Bogor	65	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1684	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET GG PANGUMBAHAN RT 04 RW 04 CIKARET BOGOR SELATAN, Kota Bogor	400	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1685	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	CIKARET GG KOSASIH RT 04 RW 08 CIKARET BOGOR SELATAN , Kota Bogor	41	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1686	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	*PRIORITAS IWAN SETIAWAN 3271011606710001 Buruknya kualitas tempat tinggal masyarakat yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung dari segi kesehatan, sanitasi, dan kenyamanan tmpt tinggal masyarakat., Kota Bogor	194	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1687	Atty Somaddikarya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kp Curug RT 004/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat , Kota Bogor	141	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1688	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg. Empang, Kp. SITU PETE , RT02 RW02, kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1689	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	: Gg Empang, Kp.Situ Pete, RT02 RW02, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1690	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Jl Sukadamai Raya, RT01 RW02, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1691	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jl Sukadamai Raya dan jl gang di RT01 RW02, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1692	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp situpete Gang lapangan bola, Blok Cerme, RT04 RW07, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor	360	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1693	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp. Cilubang Tonggoh RT 01 RW 10 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1694	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Situ Pete Gg Wa Masnah, RT01 RW01, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal., Kota Bogor	10	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1695	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp situpete Gg blok cerme, RT05 RW07, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1696	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gang pak Adeng Kampung sumurwangi, RT03 RW11, Kelurahan Kayumanis, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1697	Bambang Dwi Wahyono, SH	Partai Demokrat	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	BTN KRBUN RAYA BLOK B7 RT 03 RW 06 KELURAHAN PAMOYANAN KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	25	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1698	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Kp. Cilubang Tonggoh RT 03 RW 02 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN
1699	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Penebusan Ijasah (bagi masyarakat miskin yang tidak mampu)	Cemplang Baru RT 006 RW 010 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	Berkas	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1700	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Perintis Kemerdekaan, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1701	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sindangsari, RT 002/ RW 007, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1702	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 69 RT 001/ RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1703	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Sindangsari, RT 001/ RW 007, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1704	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Babakan Sirna, RT 004/ RW 009, Kelurahan Tegallega, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1705	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Babakan Sirna, RT 005/ RW 009, Kelurahan Tegallega, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1706	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	Babakan Sirna, RT 005/ RW 009, Kelurahan Tegallega, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1707	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Kebon Kopi, RT 004/ RW 006, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1708	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	Gg. Kepatihan IV No. 24, RT 004/RW 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor	1	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1709	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 01,02,03,04,05,06 / RW 01 Kel. Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor	60	buah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1710	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Griya katulampa RT 07/ RW 10, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	855	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1711	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Griya Katulampa RW 10, Kota Bogor	855	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1712	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross, Pita Kejut, railing jalan)	SDN Pajajaran. Jl Pajajaran nomor 26. Baranangsiang Bogor Timur., Kota Bogor	300	m2	DINAS PERHUBUNGAN
1713	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan/Gg Pak Ilyas, RT03 RW11, Kayumanis, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1714	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT.03 RW.13 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	169	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1715	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT.05 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	100	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1716	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.05 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1717	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.01 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan tanah Sareal , Kota Bogor	1080	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1718	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT.01 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	200	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1719	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT.01 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	150	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1720	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jalan cemplang baru rt 003/12 kelurahan cilendek barat, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1721	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.03 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	300	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1722	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 17 kelurahan cilendek barat, Kota Bogor	1084	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1723	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	RT.03 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	100	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1724	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jl. muara tegal rt 01 rw 02 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	250	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1725	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Gg Nurul Amal RT.03 RW.09 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	-	paket	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1726	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. rubi no.2 rt.2/rw.3 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	1500	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1727	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	KP. CARADAMAI RT.01 RW.06 KELURAHAN MEKARWANGI KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	-	PAKET	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1728	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp. muara rt.1/rw.3 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	125	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1729	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp. muara rt.1/rw.3 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	2500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1730	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jl. raya tajur blok babadak no.40 rt.3/rw.4 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	300	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1731	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	jl. raya tajur kp. muara gg. babadak no.15 rt.3/rw.4 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	15	unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1732	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	perum unitex rt.1/rw.5 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	2	unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1733	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jalan melati IV gg mushola rt.5/rw.5 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	600	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1734	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jl. mawar V blok B6 No.5 rt.3/rw.5 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	100	m3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1735	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	jl. mawar v no.16 rt.1/rw6 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	60	unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1736	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. desa sindangrasa no. 60299210 rt.4/rw.7 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	1500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1737	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jalan babadak rt.5/rw.7 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	100	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1738	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. desa sindangrasa no. 60298788 rt.3/rw.7 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	1500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1739	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	jl. raya tajur gg. babadak kp. muara rt.1/rw.8 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1740	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. raya tajur gg. babadak rt.1/rw.8 kel. sindangrasa, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1741	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	jl. muara no.01 rt.1/rw.9 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1742	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp. muara rt.4/rw.9 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	1500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1743	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp. muara rt.4/rw.10 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	250	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1744	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp. muara rt.2/rw10 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	250	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1745	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl Airlangga III, IV dan V rw6 kedungjaya, Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1746	Ir. H. Muaz HD	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	jl mataram rt6 rwVI kel kedungjaya, Kota Bogor	1080	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1747	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	jl. muara tegal I No.20 rt.4/rw.10 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	40	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1748	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp. muara pendeuy rt.1/rw.11 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	300	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1749	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	kp. muara pendeuy rt.1/rw.11 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	1500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1750	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	kp. muara pendeuy rt.1/rw.11 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	30	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1751	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. muara babadak rt.1/rw.12 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	1500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1752	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Kaliki 3 RT.04 RW.07 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1753	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	kp. muara rt.3/rw.12 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	32	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1754	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.01 RW.07 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1755	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT.07 RW.01 KELURAHAN KENCANA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	250	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1756	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT.07 RW.01 KELURAHAN KENCANA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	123	M	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1757	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 002 RW 001 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1758	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT 001 RW 003 kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	20	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1759	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	perum unitex RW 005 Kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	15	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1760	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	BMU RT.02 RW.07 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	250	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1761	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	perum unitex RW 006 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	20	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1762	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT 006 RW 007 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	20	m1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1763	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	BMU RT.04 RW.07 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	250	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1764	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	gg. ahli RT 02,03 RW 08 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1765	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RT 03 RW 09 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	60	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1766	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	BMU RT.04 RW.07 Kelurahan Kencana Kecamatan tanah Sareal, Kota Bogor	100	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1767	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	RT 004 RW 009 Kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	200	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1768	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT 001 RW 009 Kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1769	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Kp. muara RT 002 RW 012 Kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	500	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1770	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	perum griya katulampa RT 010 RW 010 kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	100	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1771	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	perum griya katulampa RT 04 RW 10 Kel. katulampa kec. bogor timur, Kota Bogor	30	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1772	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	perum griya katulampa RT 09 RW 10 Kel. katulampa, Kota Bogor	400	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1773	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	perum griya katulampa RT 9 RW 10 Kel. katulampa, Kota Bogor	120	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1774	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	perum griya katulampa RT 10 RW 10 Kel. katulampa, Kota Bogor	240	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1775	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kp. muara RW 12 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	2	unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1776	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik	jl. raya tajur gg. babadak RT 01 RW 12 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	50	M2	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Timur				
1777	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Timur	RT 001 RW 001 Kel. sindangrasa kec. bogor timur, Kota Bogor	50	M2	KECAMATAN BOGOR UTARA
1778	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	jl. raya tajur gg babadak RT 001 RW 008 Kel. sindangrasa, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1779	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	kp. muara rt 1 rw 3 kel. sindangrasa, Kota Bogor	200	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1780	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	JL. MELATI IV GG. MUSHOLA RT 005 RW 005 KEL. SINDANGRASA, Kota Bogor	1000	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1781	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	JL. MUARA BARU RT 01 RW 01 KEL. SINDANGRASA, Kota Bogor	324	M3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1782	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KP. MUARA PENDEUY RT 001 RW 011 KEL. SINDANGRASA, Kota Bogor	35	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1783	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Prasarana Daur Ulang Sampah (Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara)	RT02 RW 12 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	80	m2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1784	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT.07 RW.01 Kelurahan Kencana Kecamatan tanah Sareal, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1785	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Jalan Lingkungan(Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota,	Jalan Bitungsari, RT 02 RW 02, Kel. Bojongkerta, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	450	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1786	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 001 RW 001, Kota Bogor	3	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1787	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 002 RW 002, Kota Bogor	3	UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1788	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 003 RW 002 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	3	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1789	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 004 RW 003 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	3	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1790	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 001 RW 003 KEL. SINDANGGRASA KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	2	UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1791	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	PERUM. CITRA KENCANA RT.02 RW.05 KELURAHAN KENCANA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	500	METER	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1792	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada	KP. MUARA RT 001 - 006 RW 007 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	9	UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1793	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	PERUMAHAN CITRA KENCANA RT.02 RW.05 KELURAHAN KENCANA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	200	METER	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1794	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 01, 03 RW 08 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	5	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1795	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi ruang kelas SD (Ruang Kelas untuk pembelajaran jenjang SD, untuk sekolah swasta diusulkan sebagai hibah)	Jl. Kapten Yusuf, gang Emad RT 04/06, Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	3	unit	DINAS PENDIDIKAN
1796	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	PERUM CITRA KENCANA RT.02 RW.05 KELURAHAN KENCANA KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	75	TITIK	DINAS PERHUBUNGAN
1797	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 01, 03 RW 09 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	3	UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1798	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 01, 02, 05 RW 10 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	10	unit	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1799	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima	KP. MUARA RT 1-3 RW 11 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	9	UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)				
1800	Jenal Mutaqin, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima Sudah mengajukan proposal dan terverifikasi di aplikasi SAHABAT)	KP. MUARA RT 1-2 RW 12 KEL. SINDANGGRASA, Kota Bogor	5	UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1801	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Jl. Pahlawan, Gg Jerokuta Kaum RT 01/16, Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	1	unit	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1802	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan Utama Komplek Taman Tirta Cimanggu, RW 13 Mekarwangi, Kota Bogor	990	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1803	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Perum Griya Kencana Asri Kelurahan Kencana kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	250	METER3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1804	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Perum Griya Kencana Asri Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	250	meter	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1805	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Perum Griya Kencana Asri Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	100	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1806	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	RW 07 Tegal Gundil, Kota Bogor	-	Paket usulan	SEKRETARIAT DAERAH
1807	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	RT06 RW 05 Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor	-	m2	SEKRETARIAT DAERAH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1808	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Taman Permukiman (Tanah milik Pemerintah Kota Bogor)	RW09 Kelurahan Ciluar Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	480	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1809	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Kampung Batik RT02 RW04 Kelurahan Cibuluh - Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	-	Paket Usulan	SEKRETARIAT DAERAH
1810	Ahmad Aswandi, S.H	Partai Persatuan Pembangunan	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	Perum Griya Kencana Asri Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor	-	paket	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1811	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	RW01 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	169	M1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1812	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RW 01 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	1300	meter kuadrat	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1813	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT03 RW03 Kelurahanh Cibuluh, Kota Bogor	80	meter kubik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1814	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	RT03 dan RT04 RW04 Kelurahan Cibuluh - Bogor Utara, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1815	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Jalan RT04 RW04 Kelurahan Cibuluh - Bogor Utara, Kota Bogor	542	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1816	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Permukiman (Berlokasi selain di sungai)	RT04 RW05 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	25	meter kubiik	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1817	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	Masuk Gg Kondang, RW08 Kelurahan Cibuluh - Bogor Utara, Kota Bogor	50	titik	DINAS PERHUBUNGAN
1818	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT02 RW08 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	80	meter kubik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1819	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan TPT Sungai (Perbaikan TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT04 RW08 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	80	meter kubik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1820	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Gg Kondang RT03 RW08 Kelurahan Cibuluh Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	542	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1821	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Hibah Badan/Lembaga Seni (Permohonan Hibah untuk Badan/ lembaga seni)	Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket usulan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1822	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	RT04 RW02 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	542	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1823	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan TPT Sungai (Pembangunan baru TPT Sungai)/untuk TPT sungai yang berada di sub das Ciliwung dan Cisadane diluar yang menjadi kewenangan BWWS Ciliwung-Cisadane	RT04 RW03 Kelurahan Ciparigi-Bogor Utara, Kota Bogor	60	meter kubik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1824	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK	RT05 RW10 Kel. Ciparigi - BoUt, Kota Bogor	542	M2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)				
1825	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola)	RT02 RW04 Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor	-	paket usulan	SEKRETARIAT DAERAH
1826	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Hibah Pokdarwis (Permohonan Hibah untuk Pokdarwis	RT01 RW10 Kelurahan Ciluar - Bogor Utara, Kota Bogor	1	pakt usulan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1827	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Jalan yang berada di luar SK Nama Jalan Kota, diutamakan dilengkapi sumur resapan)	Pondok Rumpit Gg. Ikan Mas dan Gg. Tawes RT. 003 RW. 005 , Kota Bogor	1080	m2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1828	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Tanah Sareal	Jl. Manunggal Jaya RT. 002 RW. 002, Kota Bogor	1	unit	KECAMATAN TANAH SAREAL
1829	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Jl. Manunggal Bhakti dan Jl. Pondok Rumpit 2, Kota Bogor	3500	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1830	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Prasarana Penanggulangan Bencana dan fasilitas penunjang (rambu kebencanaan, alat peringatan dini banjir, ringboy/pelampung, alat komunikasi, chainsaw, alat fogging)	Jl.KH.TB.M.Falak No.319, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	6	unit	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1831	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembinaan RW Ramah Anak (Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sosialisasi Tentang RW Ramah Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah RW)	Jl. Brigjen H. Saptadji Hadiprawira No.70 Kelurahan cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	150	peserta	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1832	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot))	di Kecamatan Bogor Timur - Bogor Tengah, Kota Bogor	200	Peserta	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
1833	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit,)	Di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, Kota Bogor	200	Peserta	DINAS TENAGA KERJA
1834	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	Di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, Kota Bogor	200	Peserta	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1835	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	Di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, Kota Bogor	200	Peserta	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1836	Anna Mariam Fadhillah, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket)	Perumahan Bantar Kemang RT 05 RW 05, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Lapangan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1837	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan Drainase Lingkungan (Drainase pada jalan yang berada di luar nama jalan kota)	Jalan Setapak RT01 RW05 Mekarwangi. seberang Masjid Al Ahsan, Kota Bogor	100	m	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1838	Drs. Safrudin, M.Si	Partai Amanat Nasional	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru	KEBON PEDES RT.03 RW.09 , Kota Bogor	15	Titik	DINAS PERHUBUNGAN
1839	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Partai Golongan Karya	Pemeliharaan Berkala Jalan (untuk jalan yang masuk dalam SK Walikota nama jalan kota)	Jl. Kebon Pedes 1, Kota Bogor	3500	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1840	Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	SIRNAGALIH RT 1 RW 7 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	6	m2	KECAMATAN BOGOR BARAT
1841	M. Rusli Prihatevy, SE	Partai Golongan Karya	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/ yang	Pamoyanan Rt 01/ Rw 09, Kota Bogor	100	M	KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	OPD TUJUAN AWAL
			sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Selatan				
1842	H.M. Dody Hikmawan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Pembangunan dan Rehabilitasi Posyandu (lahan harus milik pemerintah daerah/PSU/yang sudah dihibahkan ke pemerintah) lokus Kec. Bogor Barat	Gang Menteng no.40 RT 02 RW 12 Kelurahan Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor	1	unit	KECAMATAN BOGOR BARAT